PEMERINTAH
KABUPATEN
DHARMASRAYA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2025-2029



Dharmasraya
Sejahtera Merata

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PULAU PUNJUNG, TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a. menetapkan Strategi dan kebijakan umum Pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu, singkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
b. menjabarkan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
c. menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana strategis PD, RKPD, dan rencana kerja PD; dan
d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum daerah;
   c. bab III memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
   d. bab IV memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   e. bab V penutup.

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Bupati melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
   b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
   c. hasil dari Rencana Pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.

(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan rencana strategis PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

JASMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan Daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Penyusunan rencana pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2025-2029 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 127

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1. LATAR BELAKANG ..... I - 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... I - 4
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA ..... I - 6
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 ..... I - 8
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... I - 9
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... I - 10
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 ..... I - 11
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan KLHS RPJMD ..... I - 12
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Dharmasraya ..... I - 12
1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..... I - 12
1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya ..... I - 13
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I - 13
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I - 14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ..... II - 1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ..... II - 1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ..... II - 14
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ..... II - 34
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ..... II - 76
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ..... II - 83
2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ..... II - 88
2.1.1.7. Demografi ..... II - 99
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II -113
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II -149
2.3.1. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan ..... II -149
2.3.2. Produktivitas Total Daerah ..... II -150
2.3.3. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi ..... II -150
2.3.4. Penerapan Ekonomi Hijau ..... II -161
2.3.5. Transformasi Digital ..... II -163
2.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ..... II -164
2.3.7. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ..... II -168
2.3.8. Stabilitas Ekonomi Makro ..... II -171
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM ..... II -180
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif ..... II -180

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh dan Demokrasi Substansial ..... II -184
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ..... II -187
2.4.4. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II -187
2.4.5. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... II -204
2.4.6. Urusan Pemerintahan Pilihan ..... II -227
2.4.7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... II -237
2.4.8. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II -239
2.4.9. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... II -246
2.4.10. Unsur Kewilayahan ..... II -248
2.4.11. Unsur Pemerintahan Umum ..... II -249
2.4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2021-2026 ..... II -250
2.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020-2024 ..... II -257
2.6. CAPAIAN SDG's TAHUN 2020-2024 ..... II -262
2.6.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS) ..... II -265
2.6.2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB) ..... II -278
2.6.3. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB) ..... II -287
2.6.4. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA) ..... II -288
2.7. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... II -289
3.7.1. Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 ..... II -290
3.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II -327
2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... II -338
2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II -338
2.8.2. Permasalahan Perurusan Pemerintahan ..... II -361
2.8.3. Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya ..... II -369
2.8.3.1. Isu Global ..... II -369
2.8.3.2. Isu Nasional dan Regional ..... II -376
2.8.3.3. Isu Strategis Daerah ..... II -382
2.8.4. Isu Strategis Dalam Dokumen Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029 ..... II -389

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III - 1

3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA ..... III - 2
3.1.1. Kebijakan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ..... III - 2
3.1.2. Kebijakan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ..... III -23
3.1.3. Rekomendasi Kebijakan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ..... III -31
3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... III -47
3.2.1. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ..... III -47
3.2.2. Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III -50
3.3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029 ..... III -56
3.3.1. Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ..... III -57
3.3.2. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ..... III -59
3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2030 ..... III -63
3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III -71
3.5.1. Pentahapan Pembangunan ..... III -71
3.5.2. Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... III -72
3.5.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD ..... III -78

3.5.4. Program Prioritas RPJMD III-109
3.5.5. Program Unggulan III-118
3.3.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III-119
3.3.5. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III-122
3.3.6. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-124
3.5.6. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN tahun 2025-2029 ..... III-129

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV - 1

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... IV - 1
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV -38
4.2.1. Target Indikator Makro Pembangunan ..... IV -38
4.2.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV -39
4.2.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) ..... IV -41

BAB V PENUTUP ..... V - 1

5.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD ..... V - 1
5.2. MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... V - 12
5.3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DHARMASRAYA ..... V - 15
5.3.1. Memperkuat tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah ..... V - 15
5.3.2. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Dharmasraya medorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik ..... V - 16

Lampiran I Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran II Metadata Indikator Pembangunan Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2- 1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong di Kabupaten Dharmasraya 3
Tabel 2- 2 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 6
Tabel 2- 3 Penutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 8
Tabel 2- 4 Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya 9
Tabel 2- 5 Distribusi Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya 10
Tabel 2- 6 Sebaran Luas Jasa Penyediaan Air Bersih di Kawasan Karst Kabupaten Dharmasraya 12
Tabel 2- 7 Sebaran Luas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik di Kawasan Karst Kabupaten Dharmasraya 13
Tabel 2- 8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Dharmasraya 15
Tabel 2- 9 Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya 16
Tabel 2- 10 Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya 19
Tabel 2- 11 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Dharmasraya 20
Tabel 2- 12 Pemanfaatan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 21
Tabel 2- 13 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 22
Tabel 2- 14 Komoditi Unggulan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 24
Tabel 2- 15 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Dharmasraya Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) 25
Tabel 2- 16 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya (ha), 2023 dan 2024 26
Tabel 2- 17 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya (kuintal), 2023 dan 2024 26
Tabel 2- 18 Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya 28
Tabel 2- 19 Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung di Kabupaten Dharmasraya 29
Tabel 2- 20 WIUP Kabupaten Dharmasraya dan Sekitarnya 30
Tabel 2- 21 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya 30
Tabel 2- 22 Objek Wisata Kabupaten Dharmasraya 32
Tabel 2- 23 Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya 35
Tabel 2- 24 Ketersediaan Air di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kecamatan 35
Tabel 2- 25 Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya 38
Tabel 2- 26 Estimasi Kecukupan Pangan Kabupaten Dharmasraya 39
Tabel 2- 27 Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 40
Tabel 2- 28 Jasa Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 42
Tabel 2- 29 Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 44
Tabel 2- 30 Jasa Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 46
Tabel 2- 31 Daya Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 48
Tabel 2- 32 Jasa Pengaturan Iklim Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 49

Tabel 2- 33 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 51
Tabel 2- 34 Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya..... 53
Tabel 2- 35 Jasa Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 55
Tabel 2- 36 Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 56
Tabel 2- 37 Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 58
Tabel 2- 38 Jasa Pengaturan penyerbukan alami (pollination) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya..... 60
Tabel 2- 39 Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 61
Tabel 2- 40 Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya..... 63
Tabel 2- 41 Jasa Rekreasi dan Ecotourism Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 65
Tabel 2- 42 Jasa Estetika Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 67
Tabel 2- 43 Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya..... 69
Tabel 2- 44 Jasa Siklus Hara (Nutrient) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya..... 71
Tabel 2- 45 Jasa Produksi Primer Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 73
Tabel 2- 46 Jasa Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 75
Tabel 2- 47 Klasifikasi Indeks Ketahan Pangan di Kabupaten Dharmasraya..... 77
Tabel 2- 48 Indeks Ketahan Pangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 78
Tabel 2- 49 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024..... 80
Tabel 2- 50 Persentase Penduduk Yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya..... 82
Tabel 2- 51 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Dharmasraya 83
Tabel 2- 52 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Dharmasraya 86
Tabel 2- 53 Tingkat Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya 87
Tabel 2- 54 Indeks Risiko Per-ancaman di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024..... 90
Tabel 2- 55 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya..... 91
Tabel 2- 56 Luas Kerentanan Perubahan Iklim..... 94
Tabel 2- 57 Program Kampung Iklim Kabupaten Dharmasraya..... 98
Tabel 2- 58 Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Tahunan..... 98
Tabel 2- 59 Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Komulatif..... 99
a. Tabel 2- 60 Indikator Utama Demografi Kabupaten Dharmasraya 100
Tabel 2- 61 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2020-2024..... 100
Tabel 2- 62 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... 101
Gambar 2- 63 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 102
Gambar 2- 64 Rasio Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 102
Gambar 2- 65 Rasio Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... 103
Tabel 2- 66 Jumlah Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 104

Gambar 2- 67 Jumlah Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 104
Tabel 2- 68 Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 105
Tabel 2- 69 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya 106
Tabel 2- 70 Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2045 106
Tabel 2- 71 107
Tabel 2- 72 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045 108
Tabel 2- 73 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Dharmasraya 109
Tabel 2- 74 Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045 Berdasarkan Data Dukcapil 110
Tabel 2- 75 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya 110
Tabel 2- 76 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur 111
Tabel 2- 77 Nilai, Kontribusi, dan Petumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d 2024 115
Tabel 2- 78 Capain Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 134
Tabel 2- 79 Capain Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 134
Tabel 2- 80 Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 138
Tabel 2- 81 Persentase Kondisi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023 139
Tabel 2- 82 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 150
Tabel 2- 83 Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (persen) 151
Tabel 2- 84 Kontribusi PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (persen) 152
Tabel 2- 85 Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Non Pertanian di Kabupaten Dharmasraya 155
Tabel 2- 86 Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 155
Tabel 2- 87 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 . 157
Tabel 2- 88 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen) 158
Tabel 2- 89 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 . 159
Tabel 2- 90 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dharmasraya 160
Tabel 2- 91 Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Dharmasraya 161
Tabel 2- 92 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Dharmasraya 163
Tabel 2- 93 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2023 164
Tabel 2- 94 Jumlah Nagari berdasarkan Status IDM di Kabupaten Dharmasraya 170

Tabel 2- 95 Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen) 172
Tabel 2- 96 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023 (persen) 173
Tabel 2- 97 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2022 175
Tabel 2- 98 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen) 178
Tabel 2- 99 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Provinsi Sumatera Barat 179
Tabel 2- 100 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum 180
Tabel 2- 101 Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya 183
Tabel 2- 102 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya 183
Tabel 2- 103 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Dhramasraya Tahun 2020-2024 187
Tabel 2- 104 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 191
Tabel 2- 105 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 196
Tabel 2- 106 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 197
Tabel 2- 107 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 199
Tabel 2- 108 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 200
Tabel 2- 109 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 204
Tabel 2- 110 Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 206
Tabel 2- 111 Capaian dan Target di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 208
Tabel 2- 112 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 209
Tabel 2- 113 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 211
Tabel 2- 114 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 214
Tabel 2- 115 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 215
Tabel 2- 116 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 216

Tabel 2- 117 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024219
Tabel 2- 118 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 220
Tabel 2- 119 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 221
Tabel 2- 120 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 222
Tabel 2- 121 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 223
Tabel 2- 122 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 224
Tabel 2- 123 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 225
Tabel 2- 124 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 226
Tabel 2- 125 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 226
Tabel 2- 126 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Dharmasraya 227
Tabel 2- 127 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 228
Tabel 2- 128 Capaian Indikator Sektor Pertanian di Kabupaten Dharmasraya 230
Tabel 2- 129 Capaian Indikator Bidang Perdagangan di Kabupaten Dharmasraya 233
Tabel 2- 130 Capaian Indikator Bidang Perindustrian di Kabupaten Dharmasraya 236
Tabel 2- 131 Capaian Indikator Bidang Sekretariat Daerah di Kabupaten Dharmasraya 238
Tabel 2- 132 Capaian Indikator Bidang Sekretariat DPRD di Kabupaten Dharmasraya 238
Tabel 2- 133 Capaian Indikator Bidang Perencanaan di Kabupaten Dharmasraya 239
Tabel 2- 134 Capaian Indikator Bidang Keuangan di Kabupaten Dharmasraya 240
Tabel 2- 135 Capaian Indikator Bidang Perindustrian di Kabupaten Dharmasraya 243
Tabel 2- 136 Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dharmasraya 245
Tabel 2- 137 Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dharmasraya 245
Tabel 2- 138 Capaian Indikator Inspektorat Daerah di Kabupaten Dharmasraya 247
Tabel 2- 139 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 248
Tabel 2- 140 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 248
Tabel 2- 141 Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 249
Tabel 2- 142 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Dharmasraya Periode Pelaksanaan Tahun 2021 - Tahun 2024 251

Tabel 2- 143 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 259
Tabel 2- 144 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya 264
Tabel 2- 145 Rekapitulasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Dharmasraya 264
Tabel 2- 146 Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS) 266
Tabel 2- 147 Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB) di Kabupaten Dharmasraya 279
Tabel 2- 148 Indikator TPB/SDGs Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB) 287
Tabel 2- 149 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020- 2024 dan Semester Satu Tahun 2025 (Rp juta) 292
Tabel 2- 150 Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 310
Tabel 2- 151 Pendapatan Daerah Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 312
Tabel 2- 152 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 313
Tabel 2- 153 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 314
Tabel 2- 154 Tax Buoyancy/Elastisitas Pajak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 316
Tabel 2- 155 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 317
Tabel 2- 156 Rasio Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 318
Tabel 2- 157 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 320
Tabel 2- 158 Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta) 323
Tabel 2- 159 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (%) 327
Tabel 2- 160 Proyeksi Belanja Bersifat Wajib di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2030 334
Tabel 2- 161 Proyeksi Besaran APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2030 335
Tabel 2- 162 Daftar Isu Panjang Pembangunan BerkelanjutanDalam Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan di Kabupaten Dharmasraya 389

No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2- 1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya 3
Gambar 2- 2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya 4
Gambar 2- 3 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya 5
Gambar 2- 4 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 9
Gambar 2- 5 NDVI Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2024 10
Gambar 2- 6 Endokarst di Nagari Gunung Selasih (Kiri) dan Endokarst Gua 11
Gambar 2- 7 Aliran air sungai karts (spring) Gua Suko, Kabupaten Dharmasraya 12
Gambar 2- 8 Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 1985 – 1990 – 2000 – 2008 - 2016 14
Gambar 2- 9 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya 16
Gambar 2- 10 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya 17
Gambar 2- 11 Grafik Kehilangan Hutan Primer di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2001-2024 17
Gambar 2- 12 Grafik Kehilangan Tutupan Pohon di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2001-2024 18
Gambar 2- 13 Kondisi Hutan Primer dan Kehilangan Tutupan Hutan di Kabupaten Dharmasraya 18
Gambar 2- 14 Faktor Pendorong Dominan Kehilangan Tutupan Pohon Kabupaten Dharmasraya 19
Gambar 2- 15 Peta Pemanfaatan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Dharmasraya 21
Gambar 2- 16 Peta HGU Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya 22
Gambar 2- 17 Potensi Pertambangan Kabupaten Dharmasraya 31
Gambar 2- 18 Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya 37
Gambar 2- 19 Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Dharmasraya 41
Gambar 2- 20 Peta Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya 41
Gambar 2- 21 Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Dharmasraya 42
Gambar 2- 22 Peta Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya 43
Gambar 2- 23 Jasa Penyediaan Serat (Fiber) di Kabupaten Dharmasraya 44
Gambar 2- 24 Peta Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kabupaten Dharmasraya 45
Gambar 2- 25 Jasa Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) di Kabupaten Dharmasraya 46
Gambar 2- 26 Peta Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kabupaten Dharmasraya 47
Gambar 2- 27 Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik di Kabupaten Dharmasraya 48
Gambar 2- 28 Peta Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kabupaten Dharmasraya 48
Gambar 2- 29 Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Dharmasraya 50
Gambar 2- 30 Peta Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Dharmasraya 50
Gambar 2- 31 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Dharmasraya 52
Gambar 2- 32 Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 52
Gambar 2- 33 Jasa Pengaturan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Dharmasraya 54
Gambar 2- 34 Peta Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Dharmasraya 54

Gambar 2- 35 Jasa Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Dharmasraya 55
Gambar 2- 36 Peta Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya 55
Gambar 2- 37 Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Dharmasraya 57
Gambar 2- 38 Peta Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Dharmasraya 57
Gambar 2- 39 Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Dharmasraya 58
Gambar 2- 40 Peta Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya 59
Gambar 2- 41 Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kabupaten Dharmasraya 60
Gambar 2- 42 Peta Jasa Pengaturan penyerbukan alami (pollination) Kabupaten Dharmasraya 60
Gambar 2- 43 Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit di Kabupaten Dharmasraya 62
Gambar 2- 44 Peta Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya 62
Gambar 2- 45 Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) di Kabupaten Dharmasraya 64
Gambar 2- 46 Peta Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) Kabupaten Dharmasraya 64
Gambar 2- 47 Jasa Rekreasi dan Ecotourism Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 66
Gambar 2- 48 Peta Jasa Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Dharmasraya 66
Gambar 2- 49 Jasa Estetika Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 67
Gambar 2- 50 Peta Jasa Budaya Estetika Kabupaten Dharmasraya 68
Gambar 2- 51 Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 69
Gambar 2- 52 Peta Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Dharmasraya 70
Gambar 2- 53 Jasa Siklus Hara (Nutrient) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya 71
Gambar 2- 54 Peta Jasa Siklus Hara (nutrient) Kabupaten Dharmasraya 72
Gambar 2- 55 Jasa Produksi Primer Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 73
Gambar 2- 56 Peta Jasa Pendukung Produksi Primer 74
Gambar 2- 57 Jasa Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya 75
Gambar 2- 58 Peta Jasa Biodiversitas Kabupaten Dharmasraya 76
Gambar 2- 59 Skema Pilar Ketahanan Pangan 77
Gambar 2- 60 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya 78
Gambar 2- 61 79
Gambar 2- 62 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) di Kabupaten Dharmasraya 82
Gambar 2- 63 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Dharmasraya 84
Gambar 2- 64 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 85
Gambar 2- 65 Estimasi Timbulan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 (ton/hari) 86
Gambar 2- 66 Indeks Risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024 89
Gambar 2- 67 Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya 93
Gambar 2- 68 Peta Risiko Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya 93
Gambar 2- 69 Inventarisasi GRK di Kabupaten Dharmasraya 95

Gambar 2- 70 Proyeksi Piramida Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 112
Gambar 2- 71 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) di Kabupaten Dharmasraya 113
Gambar 2- 72 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen) 118
Gambar 2- 73 PDRB Perkapita (rupiah) di Kabupaten Dharmasraya 119
Gambar 2- 74 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Dharmasraya 120
Gambar 2- 75 Rasio Gini Tahun 2019-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya 121
Gambar 2- 76 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya 122
Gambar 2- 77 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (Tahun) 124
Gambar 2- 78 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya 125
Gambar 2- 79 Prevalensi Stunting di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 126
Gambar 2- 80 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 128
Gambar 2- 81 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 129
Gambar 2- 82 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 130
Gambar 2- 83 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (indeks) 132
Gambar 2- 84 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (indeks) 135
Gambar 2- 85 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 136
Gambar 2- 86 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2022 (persen) 137
Gambar 2- 87 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 139
Gambar 2- 88 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 141
Gambar 2- 89 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Dharmasraya 145
Gambar 2- 90 Indeks Ketimpangan Gender (indeks) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 146
Gambar 2- 91 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 147
Gambar 2- 92 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 147
Gambar 2- 93 Indeks Pemenuhan Khusus Anak (IPHA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 148
Gambar 2- 94 Indeks Pembangunan Gender (indeks) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 148
Gambar 2- 95 Angka Kelahiran Total (indeks) Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 149
Gambar 2- 96. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 154
Gambar 2- 97 Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) di Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya 156
Gambar 2- 98. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2023 162

Gambar 2- 99. Pembentukan Modal Tetap Brutto Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 165
Gambar 2- 100. Ekspor Barang Dan Jasa Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya 167
Gambar 2- 101. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 169
Gambar 2- 102. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya 171
Gambar 2- 103 Ekspor Barang Dan Jasa di Kabaupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022 (persen)..... 174
Gambar 2- 104. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah) di Kabupaten Dharmasraya.... 175
Gambar 2- 105 Total Kredit /PDRB di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022 (persen) 176
Gambar 2- 106 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 (persen) 177
Gambar 2- 107 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya 181
Gambar 2- 108 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional 264
Gambar 2- 109 Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya 265
Gambar 2- 110 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya 278
Gambar 2- 111 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya 287
Gambar 2- 112 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data (NA) 289
Gambar 2- 113 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta) 294
Gambar 2- 114 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 295
Gambar 2- 115 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta 296
Gambar 2- 116 Perkembangan Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)..... 299
Gambar 2- 117 Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta) 300
Gambar 2- 118 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta) 301
Gambar 2- 119 Perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2024 (Rp juta)..... 303
Gambar 2- 120 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2024 (dalam persen) 304
Gambar 2- 121 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024..... 305

. Gambar 2- 122 Perkembangan Realisasi Belanja Modal (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 305
Gambar 2- 123 Perkembangan Realisasi Belanja Tak Terduga (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 306
Gambar 2- 124 Perkembangan Realisasi Realisasi Belanja Transfer (Rp juta) Tahun 2020-2024 307
Gambar 2- 125 Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) 308
Gambar 2- 126 Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 309
Gambar 2- 127 343
Gambar 2- 128 Analisis Typologi Klassen Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 345
Gambar 2- 129 Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan Antar Isu 390

No table of figures entries found.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, supaya pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien maka dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah untuk tersebut menjamin agar pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan adanya pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Terkait dokumen ini Kabupaten Dharmasraya telah menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan hasil evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable*

Development Goals (SDG's), sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjuntan dengan 169 target dan 319 indikatornya sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 diharapkan akan terwujud Pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan Pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaksudkan sebagai Upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, dan selaras dengan Pembangunan nasional. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD/RPJPD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Oleh karena itu, dalam muatan KLHS RPJMD dilakukan berbagai perumusan kebijakan dan arahan daerah yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan selama periode RPJMD berlaku. Dengan demikian, permendagri ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Upaya untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 dan hasil analisis kondisi saat ini seperti; melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat, cenderung meningkatnya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan rendahnya kualitas layanan dasar serta dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Berlandaskan substansi tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui perumusan yang didasari atas kondisi dan potensi daerah serta memperhatikan isu pembangunan daerah dan nasional saat ini. Mengingat RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan sangat strategis pada tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 periodesasi Tahun 2025-2030 serta untuk menuntaskan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 melalui pengintegrasian KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam muatan dokumen RPJMD pada aspek kebijakan umum

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yaitu pasangan Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, maka pemerintah telah menyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi misi dan program prioritas hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 lalu. dimana sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa periodesasi RPJMD terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029. Dimana penyusunan RPJMD tersebut harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang sebelumnya sudah ditetapkan, dan Penyusunan RPJMD dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, logic model, berpikir sistem, dan sistem dinamik.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4):
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043.
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045;

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 mempedomani serta memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor … tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya; dan
4. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah terdapat 2 (dua) bentuk dokumen perencanaan, yaitu Perencanaan Pembangunan (aspasial) dan Perencanaan Keruangan (spasial). Dimana pada perencanaan

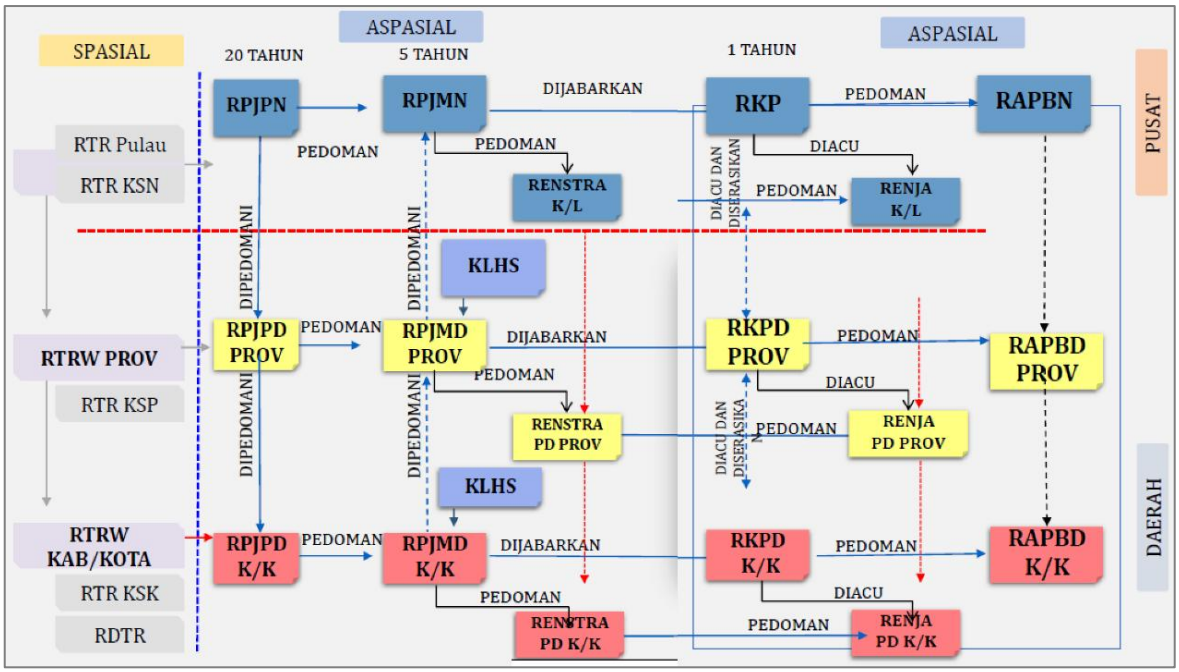
pembangunan diarahkan pada fokus (prioritas pembangunan), sedangkan perencanaan keruangan diarahkan pada lokus (peruntukan kawasan).

Dengan telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1- 1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Dharmasraya lebih dahulu dibandingkan dengan RPJPD, maka muatan RTRW akan menjadi diintegrasikan dengan muatan RPJPD Kabupaten Dharmasraya.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 yang telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1- 2
Pentahapan Implementasi RPJPD Tahun 2025-2045



RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima tahunan pertama implementasi RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadi bagian untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,04 -5,25 persen per tahun. Adapun fokus arah kebijakan lima tahunan pertama (2025-2029) pada RPJPD tahap I (2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera. Arah kebijakan dititik beratkan pada Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal. Arah kebijakan diarahkan pada Peningkatan produktifitas dan diversifikasi komoditi bernilai tambah tinggi dan mewujudkan dukungan infrastruktur pendukung ketahanan pangan lokal;
3. Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju. Arah kebijakan lima tahun pertama diarahkan pada Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) ASN, penataan kelembagaan dan regulasi pembangunan, serta digitalisasi pengelolaan pemerintahan;
4. Misi 4 : Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro

daerah. Arah kebijakan diarahkan pada Peningkatan kinerja kelembagaan untuk mewujudkan daerah yang aman, rukun dan bebas korupsi serta stabilitas ekonomi makro daerah;

5. Misi 5 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai "ABS-SBK", pelestarian aset budaya dan ekologi. Arah kebiajakan difokuskan pada Peningkatan internalisasi nilai ABS-SBK, serta peningkatan pelestarian aset budaya dan pelestarian lingkungan;
6. Misi 6 : Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan. Difokuskan pada Peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi dan dukungan infrastruktur antar kecamatan;
7. Misi 7 : Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar. Difokuskan pada Peningkatan konektivitas antar sub wilayah dan kelengkapan sarana dan prasarana; dan
8. Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah. Difokuskan pada Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN merupakan pedoman utama bagi seluruh pemerintah daerah, terutama dalam mensukseskan visi presiden yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) misi yang disebut dengan Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 program terbaik, serat didukung oleh 320 program kerja yang tersebar di kementerian/ lembaga kabinet merah putih (KMP) di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

Gambar 1- 3
Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029



1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga menjadi pedoman bagi 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Adapun visi Gubernur diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi dengan program prioritas.

Gambar 1- 4
Visi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025-2029

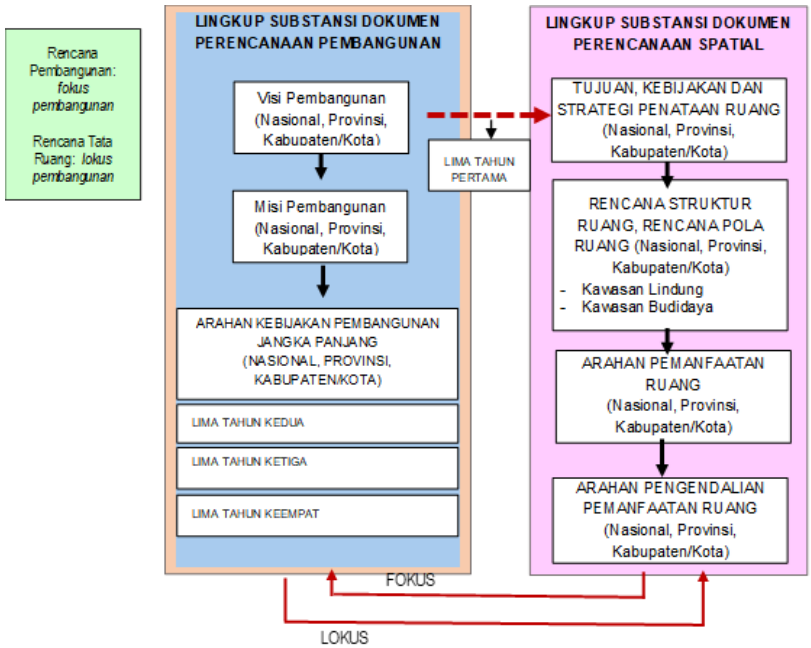


1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Dokumen RTRW 2023-2043 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan (spasial) dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan, tujuan mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan dalam RPJMD 2025-2029. Selain itu, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga menyelaraskan paradigma, konsep tata ruang serta indikasi program dalam dokumen RTRW tersebut ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan, arah kebijakan kewilayahan, serta program pembangunan jangka menengah daerah.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Gambar 1- 5
Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spasial)



1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD merupakan dokumen yang daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Selain daya dukung dan daya tampung dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini memuat capaian indikator TPB hingga tahun 2024, selanjutnya KLHS RPJMD ini digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis, selanjutnya akan dapat merumuskan arah kebijakan yang akan menjadi bahan masukan/ diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Dharmasraya

RPJMD Tahun 2025-2029 akan dijabarkan/ dioperasionalkan melalui dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan RKPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta kebijakan prioritas nasional. Sedangkan sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD yang mengandung makna, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan harus selaras dan sejalan dengan indikasi rencana program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam dokumen RKPD perlu ditetapkan prioritas pembangunan daerah atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

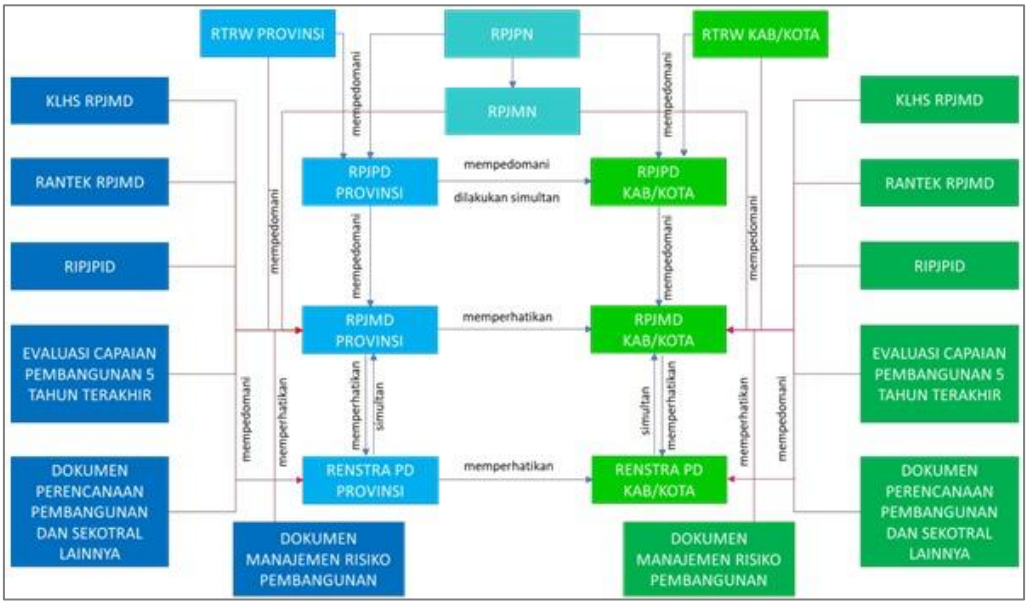
1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rentsra PD) Tahun 2025-2029 disusun dokumen perencanaan yang dibuat oleh semua perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi di setiap perangkat daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program/ kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau pemerintahan pilihan.

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD apabila dokumen tersebut lebih dahulu disusun/ ditetapkan dibandingkan dengan penyusunan RPJMD, begitupun sebaliknya apabila dokumen perencanaan/ sektoral lainnya yang disusun setelah RPJMD ini ditetapkan, maka dokumen tersebut harus mempedomani muatan dari RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan sektoral dan implementatif provinsi. Dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambar 1- 6
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen lainnya



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Mendukung keselarasan, sinerginitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka sistematika penulisan RPJMD terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, terdiri dari tinjauan terhadap Kondisi Umum Kondisi Daerah antara lain Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu juga memuat tentang Gambaran Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, bab ini menyajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu juga Memuat Strategis, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Dan Program-Program Prioritas Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, bab ini menjelaskan tentang daftar program perangkat daerah yang meliputi daftar program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah. Selain itu bab ini juga memuat tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, manajemen risiko perencanaan pembangunan daerah, dan tata kelola satu data Indonesia tingkat Kabupaten Dharmasraya. Bab ini juga dilengkapi dengan 2 lampiran :

Lampiran I Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran II Metadata Indikator Pembangunan Daerah

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum kondisi daerah disajikan menggunakan gambar peta, grafik dan tabel untuk data minimal 5 (lima) tahun terakhir, yaitu data tahun 2020 hingga tahun 2024, serta didukung penjelasan dan narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kondisi daerah serta beberapa indikator makro disandingkan capaian indikator nasional dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai perbandingan capaian pembangunan dengan daerah yang lebih luas.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat sebagai etalase atau pintu gerang Provinsi Sumatera Barat bagian Tenggaran yang berbatasan langsung dengan 2 provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, dan merupakan gerbang lintas Tengah yang terletak pada jalur jalan Lintas Sumatera, memiliki potensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah sekitar dan sekaligus sebagai pusat distribusi hasil produksi.Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan lahan yang besar. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah kabupaten dengan luas kawasan budaya terbesar dan proporsi luas kawasan lindung tersedikit di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah Kerajaan Dharmasraya perlu melestarikan situs budaya yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai potensi wisata budaya.

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48’25,367”- 141°’40,269`” LS dan 101°8’32,52’’-101°53’30,166”BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan

hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten

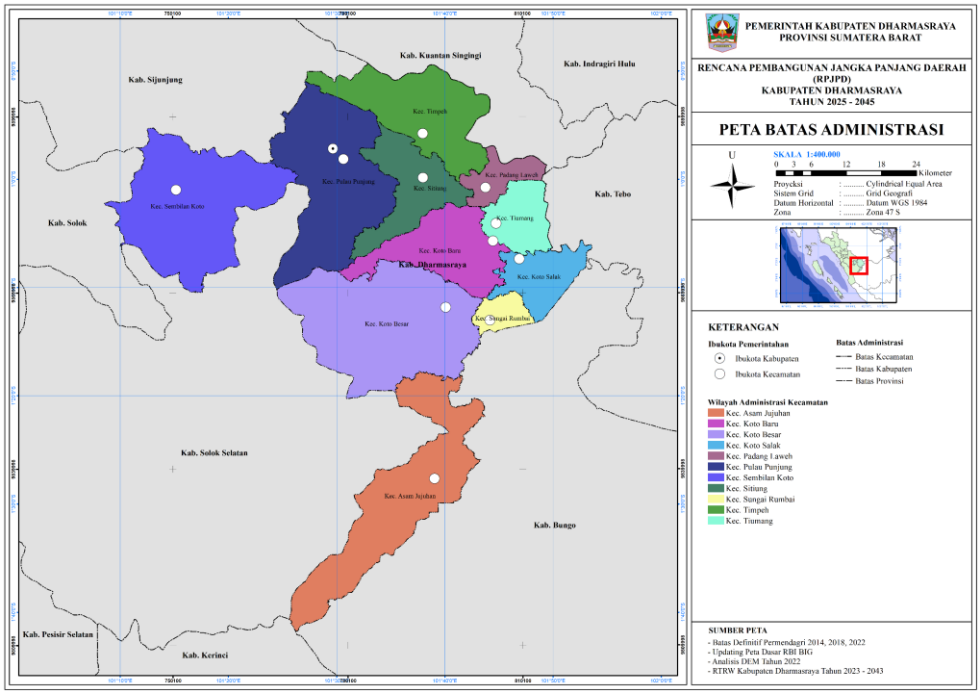
Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong. Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2- 1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21,813	4
2	Pulau Punjung	43,835	6
3	Sungai Rumbai	4,950	4
4	Sitiung	18,459	4
5	Sembilan Koto	46,655	4
6	Timpeh	28,711	5
7	Koto Salak	12,212	5
8	Tiumang	11,243	4
9	Padang Laweh	7,184	4
10	Asam Jujuhan	43,280	5
11	Koto Besar	53,780	7
Kab. Dharmasraya		**292.120**	**52**

Sumber : Perda No.1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2- 1
Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya

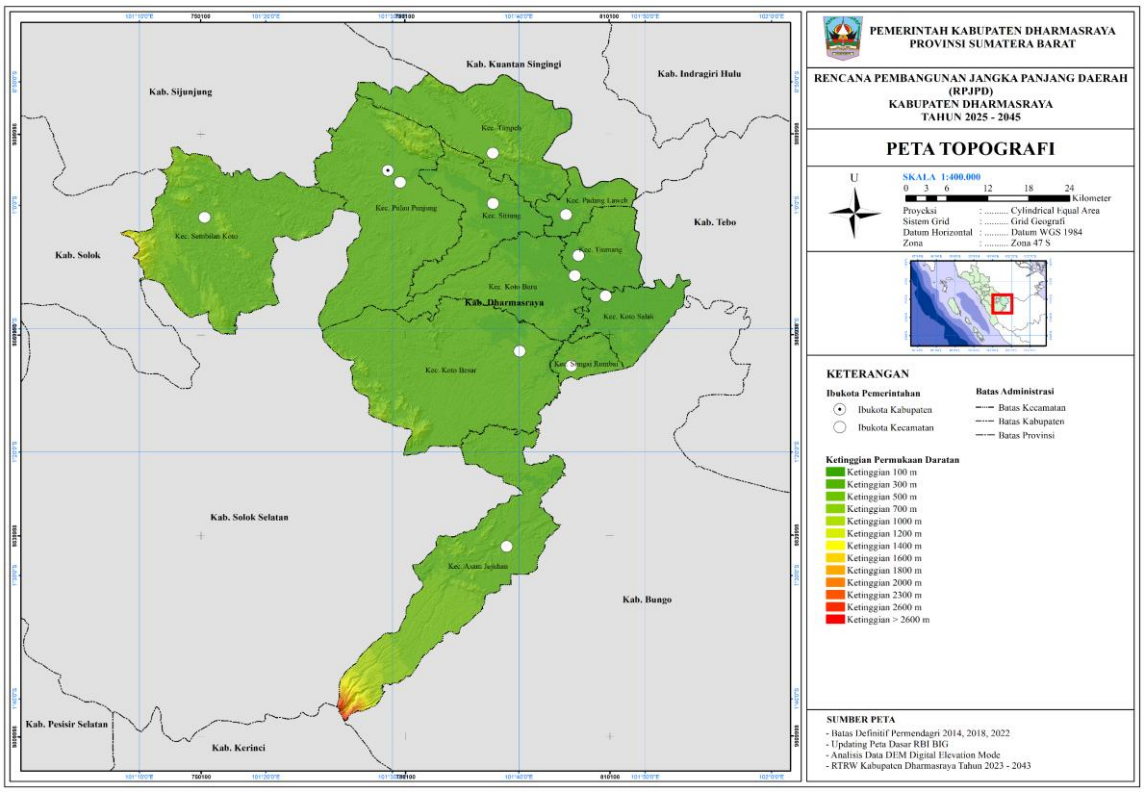


Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

B. Topografi dan Kelerengan

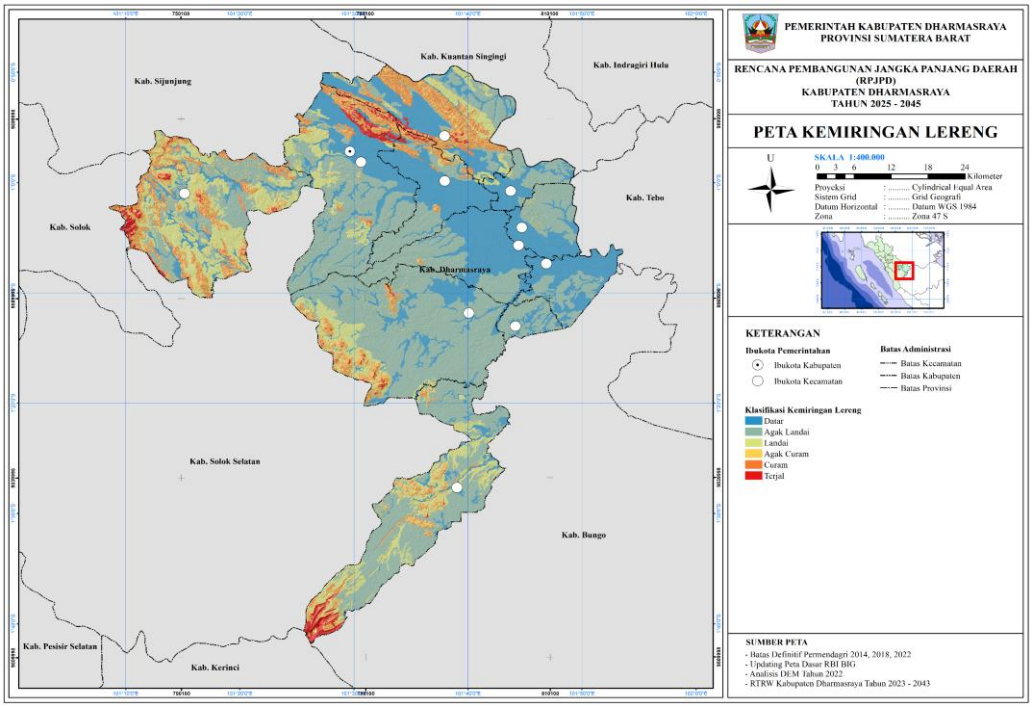
Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat (Gambar 2.2 dan Gambar 2.3).

Gambar 2- 2
Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2- 3
Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

C. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Selain sungai sumber mata air lainnya yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu berupa embung sebanyak 44 embung.

D. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

E. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 dan diupdating dengan data citra 2021 maka diperoleh hasil seperti berikut ini.

1. Lahan Pertanian
   Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 214.791 Ha (72,53% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.424 Ha (62,45%) dan karet seluas 21.874 Ha (7,49%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,47%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,12%).

2. Hutan
   Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 58,757 Ha (20,11% dari luas wilayah).

3. Permukiman
   Luas kawasan permukiman 5.026 Ha (1,70% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Untuk lebih jelasnya tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.4.

Tabel 2- 2
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman/ tempat kegiatan masyarakat	5,026	1.72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4,295	1.47
3	Perkebunan kelapa sawit	182,424	62.45
4	Perkebunan karet	21,874	7.49
5	Perkebunan campuran	3,087	1.06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0.12
7	Semak belukar	7,509	2.57
8	Ladang / tegalan/ palawija	6,198	2.12
9	Padang rumput/ alang-alang	219	0.08
10	Penambangan terbuka	137	0.05
11	Penampungan air	1	0.00
12	Bendungan	1	0.00
13	Danau	16	0.01

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
14	Empang	65	0.02
15	Hutan rimba	58,757	20.11
16	Irigasi	146	0.05
17	Sungai permanen	2,018	0.69
	Total Luas	**292.120**	**100**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades pada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

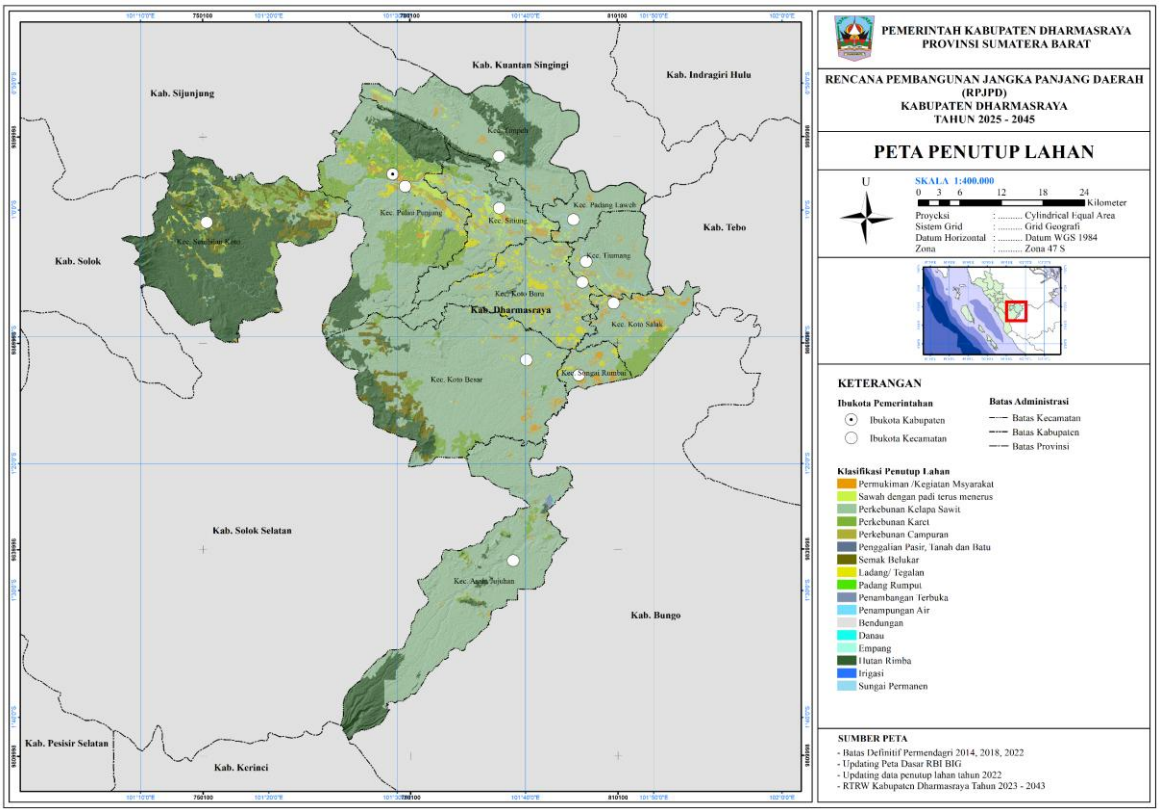
Penutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya di tertinggi yaitu di Perkebunan dengan luas 178.259,99 Ha, jika dilihat berdasarkan kecamatan tertinggi yaitu perkebunan yaitu di Kecamatan Koto Besar dengan luas 39.523,98 Ha. Kemudian hutan lahan kering sekunder dengan luas 31.191,20 Ha, hutan tanaman dengan luas 22.487,74 Ha.

Tabel 2- 3
Penutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

Penutupan Lahan	Kecamatan											
	Asam Jujuhan	Koto Baru	Koto Besar	Koto Salak	Padang Laweh	Pulau Punjung	Sembilan Koto	Sitiung	Sungai Rumbai	Timpeh	Tiumang	Grand Total (Ha)
Hutan Lahan Kering Primer	2.593,34						2.663,67					5.257,02
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.260,25		1.904,24			3.829,79	20.250,40	524,10		2.422,43		31.191,20
Hutan Tanaman		61,97	11.494,20			1.821,92	9.109,65					22.487,74
Lahan Terbuka	32,83		9,01			351,12	446,06	63,24		491,42		1.393,68
Perkebunan	37.211,27	18.979,30	39.523,98	8.504,59	5.006,54	27.466,77		7.463,31	3.798,98	22.046,83	8.258,43	178.259,99
Permukiman	85,13	1.404,87	810,72	871,36	259,37	877,19	42,93	938,90	918,95	357,89	580,26	7.147,58
Permukiman Transmigrasi					2,62					407,61		410,23
Pertambangan	57,77	96,70				83,80						238,28
Pertanian Lahan Kering	385,67	174,25		1.548,40	1.006,98	5.526,89	225,22	3.882,25		758,09	1.520,62	15.028,38
Pertanian Lahan Kering Campur	321,14	4,27	1,11	285,70	559,93	1.245,70	10.458,50	1.175,91		1.190,01		15.242,27
Sawah	8,35	1.009,41		719,09	233,19	1.852,92	925,42	3.861,31	232,04	237,30	712,01	9.791,03
Semak Belukar	142,10		36,58			485,29	2.517,32	174,53	0,39	796,79		4.152,98
Tubuh Air	182,31	82,12		282,52	115,12	294,18	15,42	375,07		1,20	172,20	1.520,14
Grand Total (Ha)	**43.280,16**	**21.812,89**	**53.779,82**	**12.211,66**	**7.183,75**	**43.835,58**	**46.654,58**	**18.458,62**	**4.950,37**	**28.709,57**	**11.243,51**	**292.120,52**

Sumber : BPKHTL Wilayah I Medan

Gambar 2- 4
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

F. Lahan Kritis

Kekritisan lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar, tetapi yang berpotensi kritis cukup besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 16.273 Ha (atau 5,57% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar dan Timpeh.

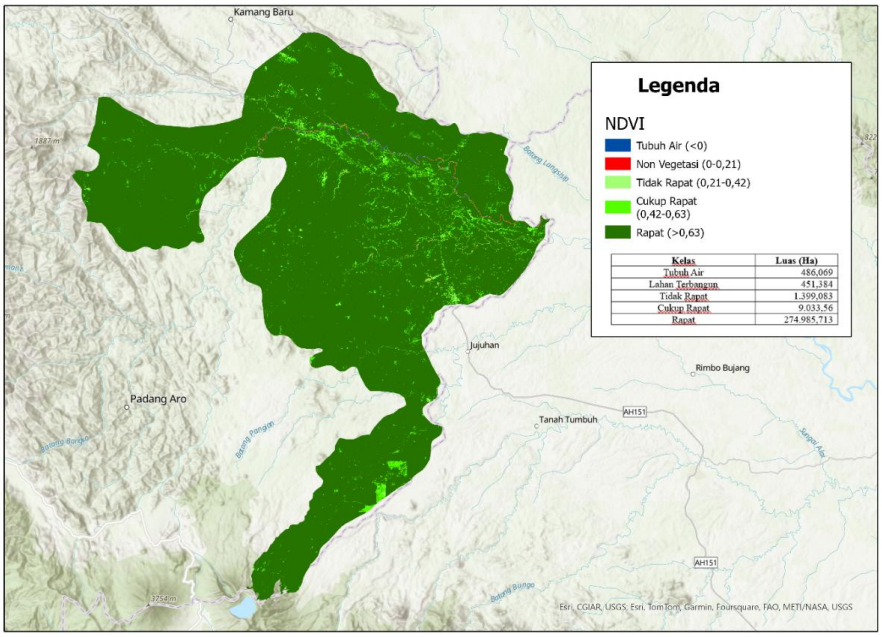
Tabel 2- 4
Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya

No	Lahan Kritis	Luas (Ha)	Persentase
1	Sangat Kritis	14.145	4,84%
2	Kritis	2.128	0,73%
3	Agak Kritis	225.324	77,13%
4	Potensial Kritis	44.677	15,29%
5	Tidak Kritis	5.846	2,00%
	Total	292.120	100,00%

Sumber : Matek RTRW Kab Dharmasraya, 2023-2043

Hasil indeks vegetasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) diperoleh dari hasil perekaman citra Landsat pada tahun 2023-2024. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa umumnya pada wilayah Kabupaten Dharmasraya memiliki kerapatan kanopi vegetasi yang rapat, hanya saja perlu diperhatikan bahwa NDVI hanya menggambarkan kondisi hijau daun yang terekam oleh satelit, sehingga tidak dapat memperlihatkan diversitas tanaman. Berdasarkan gambar ini juga diketahui adanya area yang mengalami pembukaan seperti di selatan kabupaten dan adanya jalur jalur untuk perkebunan sawit ditengah-tengah area kabupaten.

Gambar 2- 5
NDVI Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2024



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Penggunaan lahan untuk berbagai aktifitas seperti perkebunan sawit, pertanian, pertambangan berisiko untuk peningkatan lahan kritris. Berdasarkan jurnal terkait "Pemetaan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya Menggunakan GIS" (Gita, dkk) diperoleh distribusi lahan kritis pada 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 5
Distribusi Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Tidak Kritis (Ha)	Potensial Kritis (Ha)	Cukup Kritis (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	Persentase
1	Asam Jujuhan	3.112,70	31.743,80	2.349,30	606,00	0,10	37.811,90	12,8%
2	Koto Baru	314,40	14.516,70	1.199,80	239,50	-	16.270,40	5,5%
3	Koto Besar	3.218,30	50.594,60	3.315,80	209,80	-	57.338,50	19,4%
4	Koto Salak	245,10	13.005,40	612,40	160,90	-	14.023,80	4,8%
5	Padang Laweh	689,20	10.410,80	419,60	68,00	-	11.587,60	3,9%
6	Pulau Punjung	3.809,50	37.052,00	5.694,00	595,70	-	47.151,20	16,0%
7	Sembilan Koto	6.929,30	40.996,80	1.989,50	164,10	-	50.079,70	17,0%

No	Kecamatan	Tidak Kritis (Ha)	Potensial Kritis (Ha)	Cukup Kritis (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)	Persentase
8	Sitiung	1.130,30	16.768,30	1.023,80	290,40	-	19.212,80	6,5%
9	Sungai Rumbai	103,30	4.464,60	345,60	7,20	-	4.920,70	1,7%
10	Timpeh	1.579,50	29.189,90	1.442,70	30,60	-	32.242,70	10,9%
11	Tiumang	193,10	4.203,10	94,60	22,20	-	4.513,00	1,5%

Sumber: Gita Sofia dkk dalam Jurnal on Education "Pemetaan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya Menggunakan Sistem Informasi Geografis"

Berdasarkan tabel di atas diperoleh lahan sangat kritis terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 0,10 Ha, Lahan kritis paling luas terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 606 Ha. Cukup kritis paling luas terdapat di Kecamatan Pulau Punjung 5.694 Ha dan Potensian Kritis tersebar di seluruh kecamatan dan rata-rata potensi kategori cukup tinggi, paling luas potensia kritis terdapat di Kecamatan Koto Besar dengan luas 50.594,60 Ha.

G. Kawasan Karst

Sumatera Barat memiliki kawasan karst terluas setelah Aceh yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten kota. Kawasan karst merupakan bentang alam yang unik dan memiliki nilai esensial terhadap kehidupan makhluk hidup dimuka bumi. Kabupaten Dharmasraya memiliki luas kawasan karst sebesar 14,533 Ha.

Tinjauan lapangan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan di Nagari Gunung Selasih dan Nagari Timpeh. Dua lokasi karst ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai ekowisata. Kawasan gua/gua karst di Nagari Gunung Selasih berada di dalam kawasan hutan, yang saat ini dikelola oleh kelompok perhutanaan sosial dengan skema hutan desa yang memiliki luas lebih kurang 4000 Ha. Secara kasat mata kawasan hutan di sekitar gua ini masih terjaga dengan baik, meskipun juga masih terdapat penebangan liar di sekitar kawasan. Di sekitar gua terdapat sumber air. Gua ini sudah mulai dijadikan tempat pengambilan sarang burung walet dan objek wisata oleh masyarakat dan juga sudah ada pembangunan toilet di sekitar gua yang didanai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2- 6
Endokarst di Nagari Gunung Selasih (Kiri) dan Endokarst Gua



Cindua Mato (Kanan), Timpeh, Kabupaten Dharmasraya
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabuapten Dharmasraya

Sementara di Nagari Timpeh terdapat gua Cindua Mato, letaknya berada di tengah kebunan kelapa sawit. Di atas gua ini masih terdapat hutan yang terlindung keasliannya. Di sekitar gua terdapat aliran sungai yang hilang ke dalam gua. Namuan pada endokarst gua ini sudah terdapat coretan vandalisme.

Gambar 2- 7
Aliran air sungai karts (spring) Gua Suko, Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Kajian Perlindungan Kawasan Karst

Berdasarkan Sebaran luas jasa penyediaan air bersih di Kawasan Karst Kabupaten Dharmasraya diperoleh dengan total luas sebesar 57.052,96 Ha. Sebesar 39,11% atau 22.311,21 Ha dengan luas penyediaan air bersih dengan kategori sedang dan 28,55% atau 14.116,08 Ha dengan luas jasa penyediaan air bersih kategori tinggi, sedangkan kategori sangat rendah dengan persentase 5,98% atau 3.411,86 Ha.

Tabel 2- 6
Sebaran Luas Jasa Penyediaan Air Bersih di Kawasan Karst Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi	Luas dan Persentase
Sangat Tinggi (Ha)	14.116,08
Persentase	24,74%
Tinggi (Ha)	16.289,44
Persentase	28,55%
Sedang (Ha)	22.311,21
Persentase	39,11%
Rendah (Ha)	924,37
Persentase	1,62%
Sangat Rendah (Ha)	3.411,86
Persentase	5,98%
Total	**57.052,96**

Sumber : Kajian Perlindungan Kawasan Karst, 2021

Sedangkan dari jasa sumber daya genetik diperoleh sebesar 24.974,41 Ha dengan kategori rendah atau sekitar 43,77%. Kemudian kategori sangat tinggi dengan luas 10.502,49 Ha atau sekitar 18,41%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 7
Sebaran Luas Jasa Penyediaan Sumberdaya Genetik di Kawasan Karst Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi	Luas dan Persentase
Sangat Tinggi (Ha)	10.502,49
Persentase	18,41%
Tinggi (Ha)	6.617,17
Persentase	11,60%
Sedang (Ha)	6.511,49
Persentase	11,41%
Rendah (Ha)	24974,41
Persentase	43,77%
Sangat Rendah (Ha)	8.447,40
Persentase	14,81%
Total	**57.052,96**

Sumber : Kajian Perlindungan Kawasan Karst, 2021

H. Persentase Alih Fungsi Lahan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan konflik dan perubahan guna lahan di Kabupaten Dharmasraya antara lain :

- Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada lahan-lahan masyarakat;
- Tingginya kecenderungan alih fungsi lahan (lindung VS perkebunan, budidaya pertanian dan perkebunan VS perumahan);

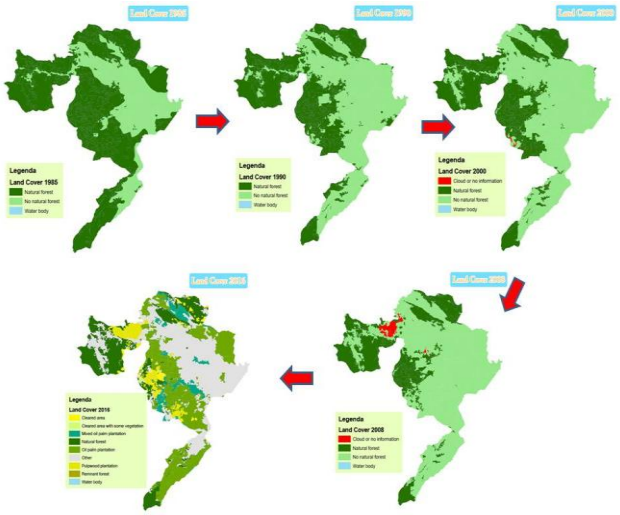
Salah satu masalah utama di Kabupaten Dharmasraya adalah alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari luasan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit oleh dunia usaha dengan izin dari pemerintah. Booming kelapa sawit oleh dunia usaha tersebut berakibat pada alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari hutan ke kelapa sawit, dari perkebunan karet ke kelapa sawit, maupun dari lahan pertanian ke kelapa sawit.

Pertumbuhan kegiatan di bidang perkebunan akan selalu terjadi sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Untuk skala usaha/kegiatan ekonomi menengah keatas membutuhkan lahan usaha untuk menggerakkan perekonomian korporasi dan memperoleh keuntungan secara finansial, Kabupaten Dharmasraya memiliki 9 (Sembilan) kegiatan perkebunan dan 1 (satu) kegiatan HTI dengan luas 83.482,07 Ha. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mapan dan kuat secara finansial serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka akan muncul ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk menambah penghasilan dengan

menjual kayu atau perkebunan skala masyarakat karena modal dan keahlian yang dibutuhkan untuk usaha ini relatif kecil dan sederhana.

Terjadi juga alih fungsi lahan dari hutan ke areal pertambangan yang akhirnya meninggalkan areal bekas tambang yang terbengkalai. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu diperlukan penambahan lahan untuk permukiman dan sarana-sarana terkait yang diperlukan, seperti sarana pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur yang diperlukan. Dari berbagai alih fungsi lahan dan kegiatan-kegiatan yang menyertainya mengakibatkan terjadinya dampak tidak langsung seperti perambahan dan fragmentasi kawasan hutan. Perubahan tutupan lahan 1985 – 2016 yang disajikan pada Gambar 2-6. di bawah ini yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan tutupan lahan yang drastis dari hutan ke budidaya antara tahun 1985 – 1990.

Gambar 2- 8
Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 1985 – 1990 – 2000 – 2008 - 2016



Sumber : Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Pemanfaatan Lahan berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan

kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.769 Ha (48,90% dari luas wilayah kabupaten)

- Kawasan hutan berdasarkan yaitu SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 80.819 Ha (28,24% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 48.272 Ha (16,74% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.409 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 150.213 Ha (51,10% dari luas wilayah).

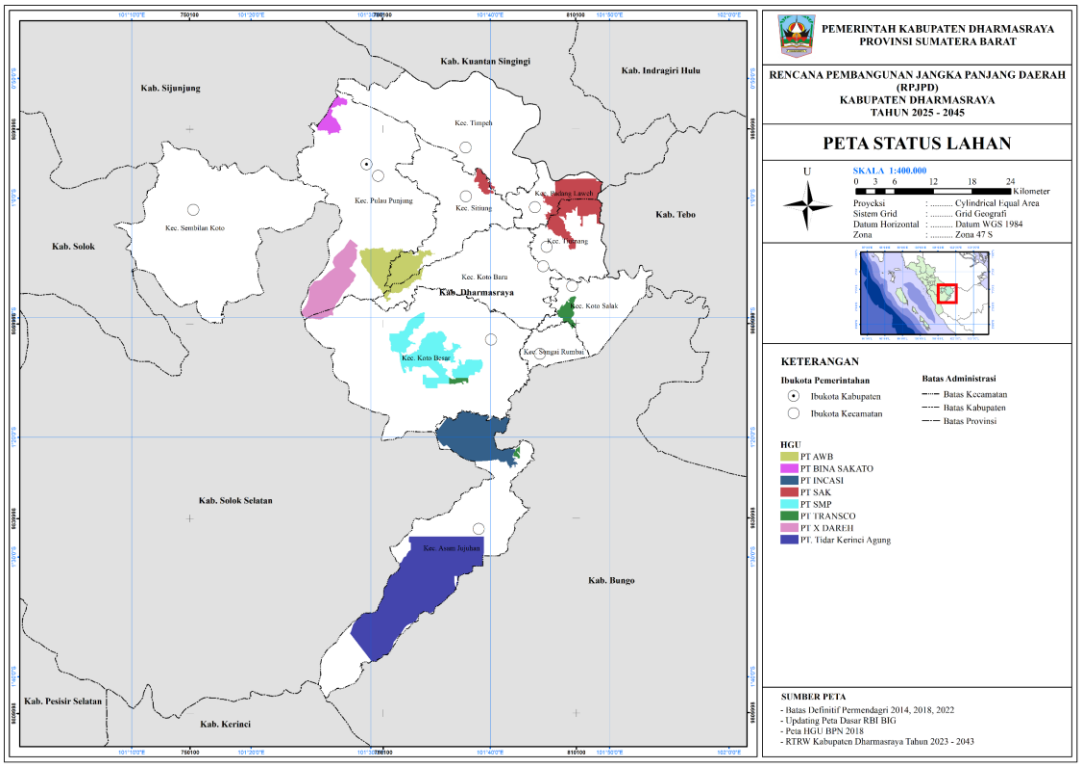
Untuk lebih jelasnya peruntukan lahan berdasarkan status di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.8 serta Gambar 2.9.

Tabel 2- 8
Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Dharmasraya

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	Ha	%
Kawasan Hutan	**88.582,06**	**30,32**
- Hutan Lindung (HL)	10.653,55	3,65
- Hutan Produksi (HP)	24.116,69	8,26
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	16.272,38	5,57
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.171,03	9,64
- Kawasan Cagar Alam	770,95	0,26
- Kawasan Suaka Alam	3,51	0.00
- Kawasan taman nasional (TN)	8.593.94	2,94
Perkebunan Besar	48.272	16,52
Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	7.895	2,70
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.526	0,86
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan-perundangan	**147.270**	50,41
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	158.387	49,59
Total Luas Kabupaten	**292.120**	**100,00**

Sumber: SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar 2- 9
Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

B. Kawasan Hutan

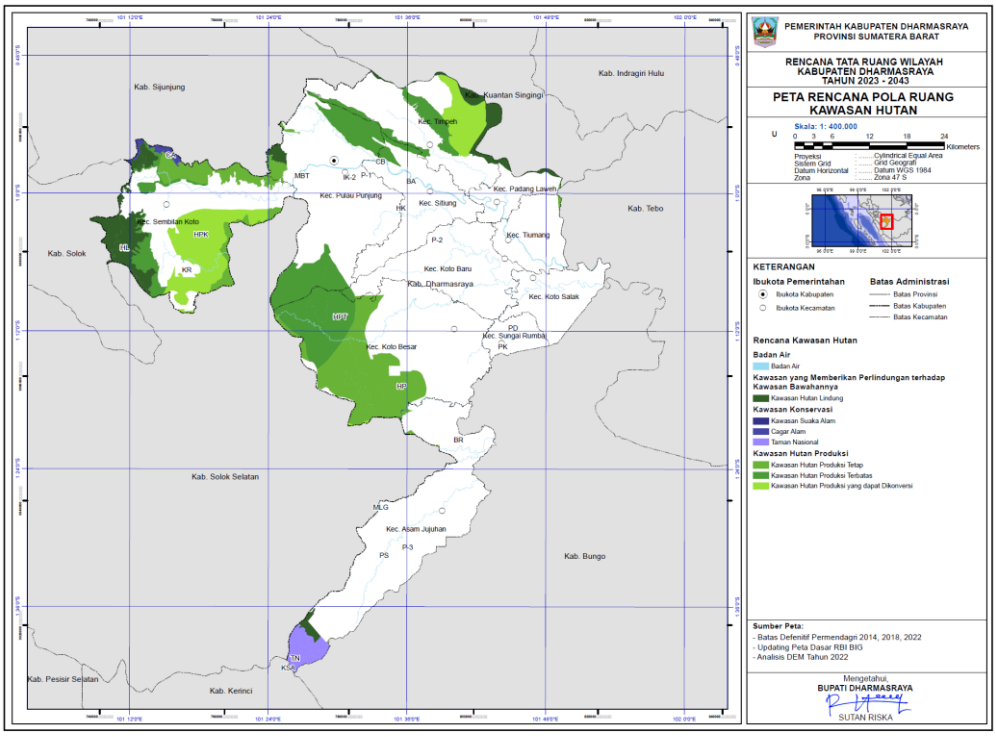
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut/II/2013 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, secara umum Kabupaten Dharmasraya di dominasi kawasan area penggunaan lain 206.481,76 Ha, hutan produksi terbatas 28.171, 03 Ha, hutan produksi tetap 24.092,22 Ha sedangkan hutan lindung sebesar 10.653,55 Ha.

Tabel 2- 9
Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya

No	Fungsi Kawasan	Total (Ha)
1	Areal Penggunaan Lain	206.481,76
2	Cagar Alam	770,95
3	Hutan (Kawasan) Suaka Alam/Wisata	3,51
4	Hutan Lindung	10.653,55
5	Hutan Produksi Terbatas	28.171,03
6	Hutan Produksi Tetap	24.092,22
7	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	16.296,86
8	Taman Nasional	2.947,20
9	Tubuh Air	2.151,73

Sumber : BPKHTL Wilayah I Medan

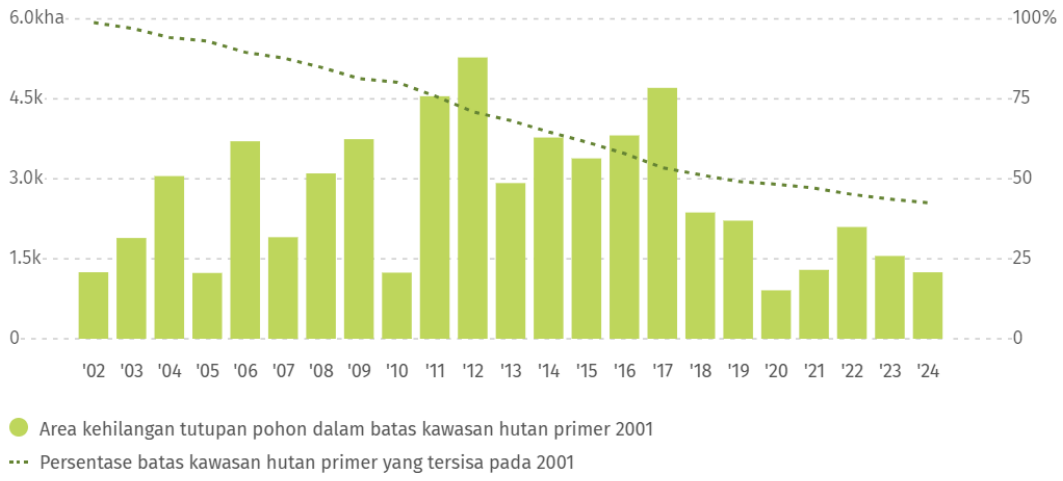
Gambar 2- 10
Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Berdasarkan data dari global forest watch dari tahun 2002-2024, Kabupaten Dharmasraya kehilangan 61,2 kha hutan primer basah, menyumbang 42% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Area total hutan primer basah di Kabupaten Dharmasraya berkurang 58% dalam periode waktu ini.

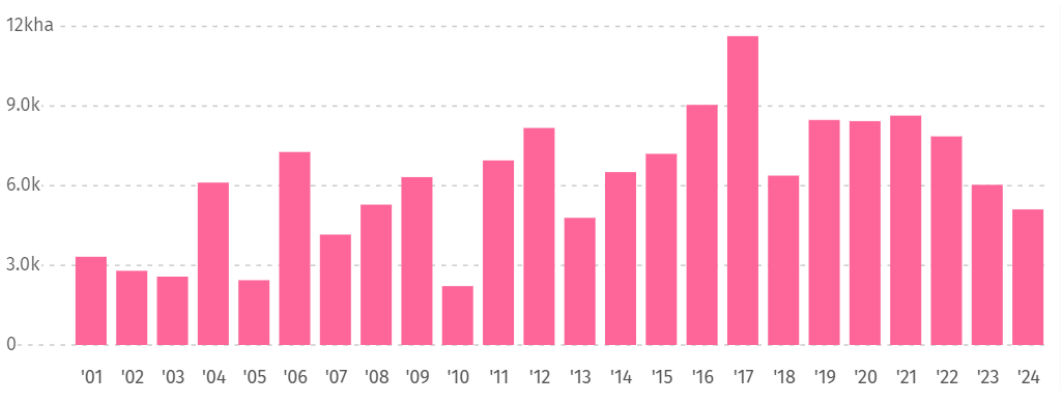
Gambar 2- 11
Grafik Kehilangan Hutan Primer di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2001-2024



Sumber : global forest watch

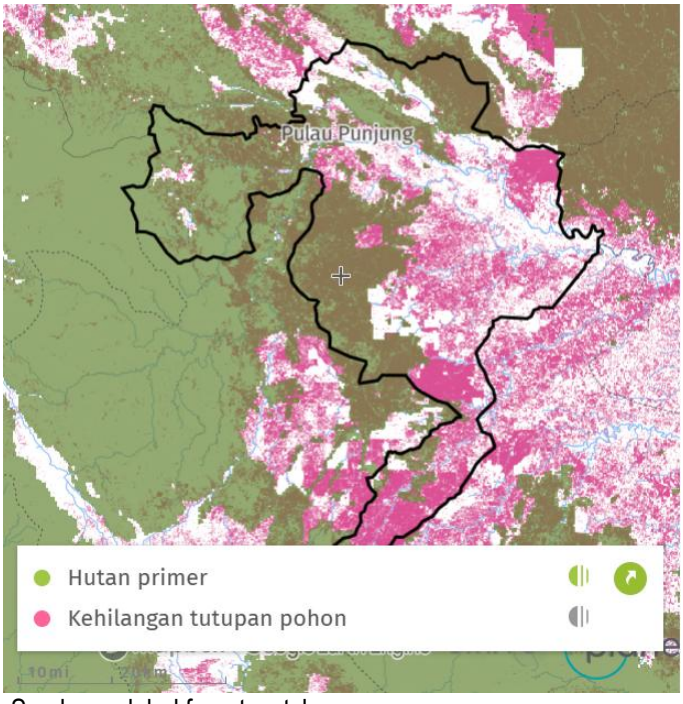
Dari tahun 2001 hingga 2024, Dharmasraya kehilangan 148 kha tutupan pohon, setara dengan 55% dari luas tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 79,9 Mt emisi CO_2e.

Gambar 2- 12
Grafik Kehilangan Tutupan Pohon di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2001-2024



Sumber : global forest watch

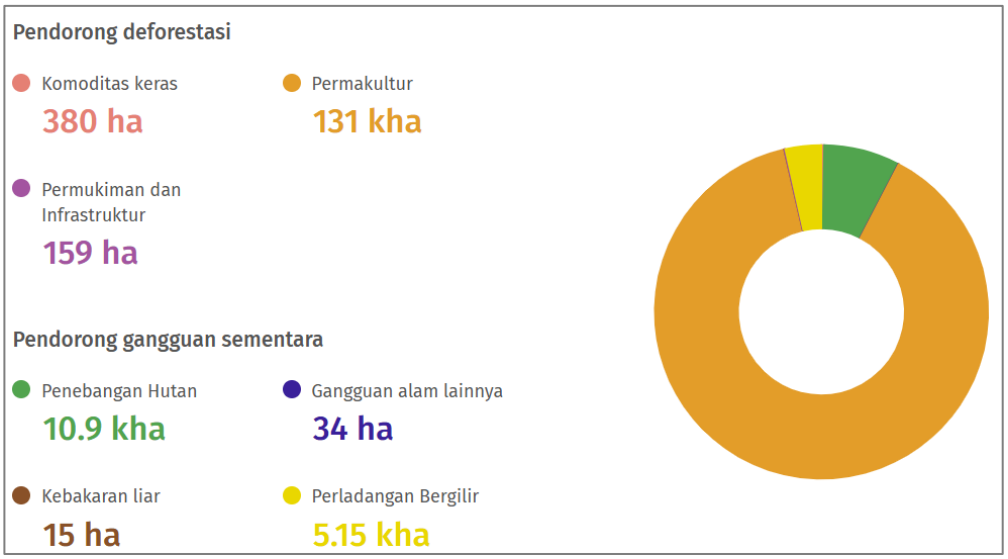
Gambar 2- 13
Kondisi Hutan Primer dan Kehilangan Tutupan Hutan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : global forest watch

Dharmasraya dari 2001 sampai 2024, 89% kehilangan tutupan pohon terjadi di wilayah tempat pendorong kehilangan yang dominan menyebabkan deforestasi.

Gambar 2- 14
Faktor Pendorong Dominan Kehilangan Tutupan Pohon Kabupaten Dharmasraya



Sumber: global forest watch

Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan dinamika sosial budaya, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Kabupaten Dharmasraya memiliki 5 perhutanan sosial terdiri dari hutan nagari/desa, hutan adat dan hutan kemasyarakatan (HKm). Perhutan sosial yang cukup luas terdapat di Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 4.332 Ha.

Tabel 2- 10
Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya

No.	No.SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Skema Persetujuan Pehutanan Sosial	Nama Persetujuan Perhutanan Sosial	Lokasi Nagari / Kecamatan	Luas Persetujuan (Ha)
1.	SK.3749/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/6/2017	Hutan Nagari/ Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Lubuk Simantuang	Gunung Selasih/ Pulau Punjung	4.332
2.	SK.3750/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/6/2017	Hutan Nagari/ Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Lubuk Karak	Lubuk Karak/ Sembilan Koto	1.708
3.	SK.1852/MENLHK-PSKL/	Hutan Adat	Masyarakat Hukum Adat	Koto Besar/Koto Besar	35

No.	No.SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Skema Persetujuan Pehutanan Sosial	Nama Persetujuan Perhutanan Sosial	Lokasi Nagari / Kecamatan	Luas Persetujuan (Ha)
	PKTHA/PSL.1/3/2019		(MHA) Rimbo Tolang & Ubou		
4.	SK.8145/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/8/2022	Hutan Nagari/ Hutan Desa	Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Banai	Banai/ Sembilan Koto	3.366
5.	SK.10544/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/9/2023	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sakato	Panyubarangan/ Timpeh	337

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) di Kabupaten Dharmasraya yaitu PT. PLN terdapat pada 2 nagari di Kecamatan Koto Besar, Nagari Bonjol dan Nagari Koto Besar dengan nomor PPKH SK.1493/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2022 pada kegiatan non- tambang dengan total luas 28,83 Ha dengan rincian Nagari Bonjol dengan luas 7,49 Ha dan Nagari Koto Besar dengan luas 21,33 Ha.

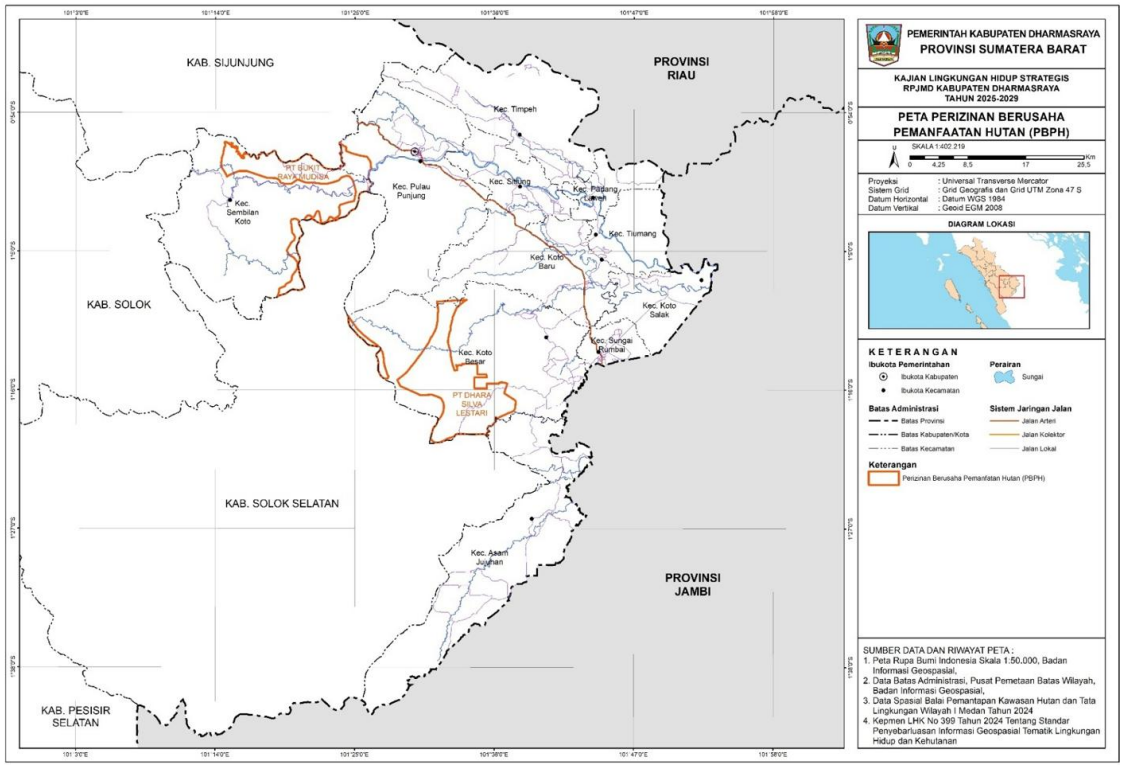
Dalam kawasan hutan juga terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), di Kabupaten Dharmasraya terdapat 2 badan usaha yaitu PT Bukit Raya Mudisa yang tersebar di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Pulau Punjung dengan total luas 10.122,21 Ha untuk kegiatan PHHK HP dan PT Dhara Silva Lestari terdapat di Kecamatan Koto Besar dan Koto Baru dengan luas total 13.805,59 Ha untuk kegiatan PHHK HP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 11
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Badan Usaha	No SK	KEGIATAN	NAGARI	Kecamatan	Total (Ha)
1	PT BUKIT RAYA MUDISA	SK.592/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021	PHHK HP	Banai	Sembilan Koto	774,79
				Bonjol	Koto Besar	708,05
				Koto Nan IV Dibawuah	Sembilan Koto	4.430,83
				Lubuk Karak	Sembilan Koto	882,52
				Silago	Sembilan Koto	2.047,06
				Sungai Dareh	Pulau Punjung	0,41
				Sungai Kambut	Pulau Punjung	1.278,55
			PHHK HP Total			10.122,21
2	PT DHARA SILVA LESTARI	SK.645/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021	PHHK HP	Bonjol	Koto Besar	9.658,09
				Koto Besar	Koto Besar	4.065,01
				Koto Padang	Koto Baru	82,49
			PHHK HP Total			13.805,59

Sumber : BPKHTL Wilayah I Medan

Gambar 2- 15
Peta Pemanfaatan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : BPKHTL Wilayah I Medan

C. Potensi Perkebunan

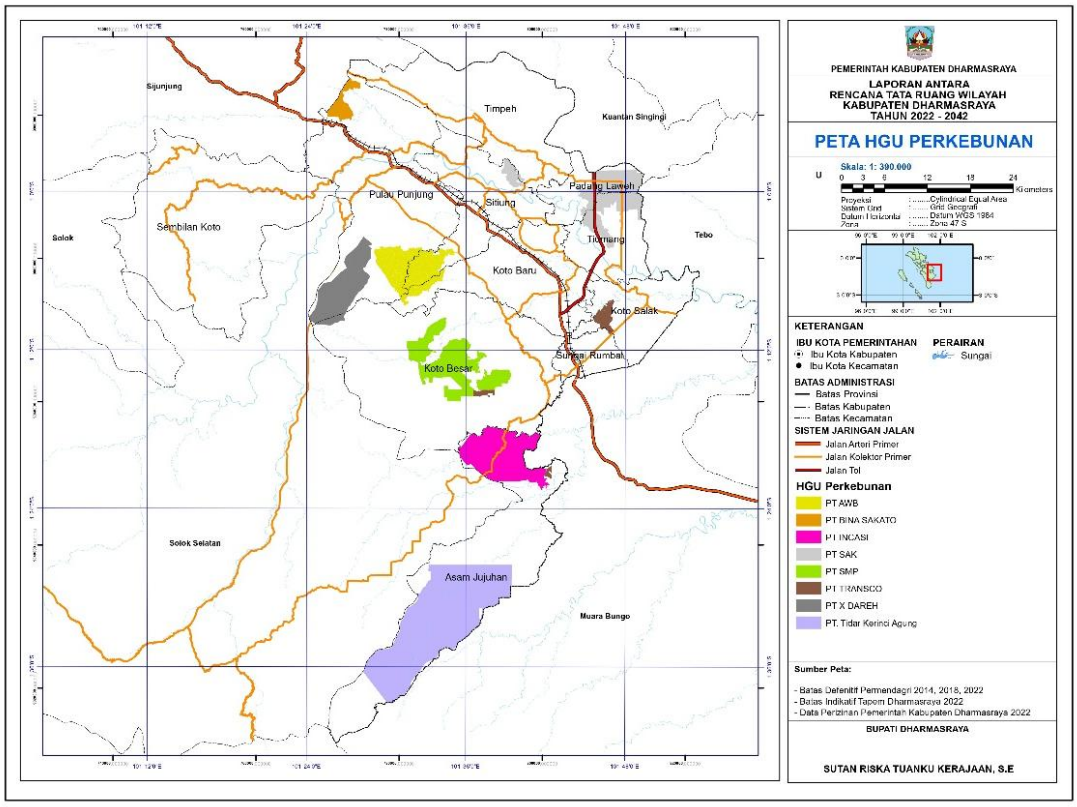
Berdasarkan data luas tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya komposisi pemanfaatan lahan yang dominan pada sektor perkebunan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dharmasraya Tahun 2024, proporsi penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, disusul dengan kawasan konservasi dan cadangan air yang strategis. Untuk perkebunan kelapa sawit pengelolaannya terdiri perkebunan rakyat dan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan.

Tabel 2- 12
Pemanfaatan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Perkebunan Kelapa Sawit	182.350	62,45
Perkebunan Karet	21.880	7,49
Kawasan Konservasi dan Embung	13.200	4,52
Hutan Produksi dan Lindung	27.500	9,42
Lahan Permukiman, Infrastruktur dll	47.190	16,12
Total	**292.120**	**100,00**

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dharmasraya, Bappeda Sumbar, 2024

Gambar 2- 16
Peta HGU Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya diperoleh produksi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah pada sektor perkebunan adalah kelapa sawit, tahun 2024 luas areal tanaman 34.378,54 Ha dengan produksi 127.906,45 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut untuk tanaman tahunan lainnya.

Tabel 2- 13
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Komoditi Perkebunan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
Tanaman Tahunan										
Karet	40.912,00	2.669,00	40.974,00	2.438,00	40.990,00	26.123,00	39.887,00	33.863,00	39.036,48	33.870,00
Kelapa	881,00	665,00	882,00	622,00	893,00	63,00	871,00	664,00	856,75	713,37
Kelapa Sawit	32.569,00	104.993,00	32.744,00	92.103,00	32.947,00	103.637,00	33.838,00	120.591,00	34.738,54	127.906,45
Kopi	350,00	157,00	296,00	159,00	370,00	16,00	264,00	136,00	199,00	101,76
Kakao	3.761,00	242,00	3.759,00	2.382,00	3.766,00	2.408,00	3.217,00	2.293,00	2.927,27	2.062,73
The	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambu Mete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lada	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	0,75	550,00
Tanaman Semusim										
Tebu	-	-	-		-	-	6,00	41,00	5,50	11,00
Tembakau	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Nilam	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Kelapa sawit merupakan komoditas utama Kabupaten Dharmasraya, baik dari sisi luas tanam maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2023), subsektor ini menyumbang lebih dari 45% output sektor pertanian, menjadikan Dharmasraya sebagai salah satu lumbung CPO *(Crude Palm Oil)* di bagian timur Sumatera Barat.

Namun, praktik pertanian sawit yang bersifat ekstensif, serta masih minimnya kepatuhan terhadap sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), menghadirkan risiko degradasi ekosistem jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lanskap berkelanjutan *(landscape approach)*[1]. Studi dari CIFOR (2022) menunjukkan bahwa integrasi sawit dengan tanaman sela atau peternakan dapat meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan.2

Karet berperan penting sebagai komoditas rakyat, terutama di Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, dan Koto Baru. Walaupun luasnya tidak sebesar sawit, namun karet memiliki nilai strategis sosial karena sebagian besar lahan dikelola oleh petani kecil; mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga; dan berkontribusi terhadap stabilisasi ekosistem jika dikelola dengan sistem agroforestri.

Namun sejak 2020, fluktuasi harga karet alam di pasar internasional menyebabkan penurunan minat petani.3 Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi karet rakyat melalui teknologi budidaya unggul, replanting, dan integrasi dengan sistem agroekologi *(agroforestry + silvopastoral system).*

Terdapat kawasan konservasi dan 44 embung aktif di Kabupaten Dharmasraya yang tersebar di seluruh kecamatan, berfungsi sebagai:

- Penyedia air irigasi untuk pertanian dan hortikultura;
- Cadangan air baku untuk wilayah permukiman;
- Pengendali banjir dan kekeringan musiman;
- Kawasan penyangga biodiversitas lokal.

Keberadaan embung juga dapat dikembangkan sebagai ekowisata berbasis nagari dan potensi perikanan air tawar berbasis komunitas. Studi dari Kementerian PUPR (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan embung yang kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan resiliensi iklim lokal dan ketahanan pangan mikro.4

Selain sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Dharmasraya menyimpan potensi sumber daya mineral dan kehutanan, antara lain:

- Emas aluvial di Kecamatan Timpeh dan Sungai Rumbai;
- Batu andesit dan kapur di bagian utara dan timur;
- Pasir dan kerikil untuk kebutuhan konstruksi regional;
- Hutan produksi dan hutan lindung seluas ±27.500 ha.

[1] Rist et al. (2010), *The Impacts of Oil Palm on Biodiversity*, Conservation Letters
[2] Moeliono et al. (2022), *Integrating Sustainability in Indonesia's Palm Oil Sector*, CIFOR Working Paper
[3] FAO (2021), *Revitalization of Natural Rubber in Asia-Pacific*
[4] Kementerian PUPR (2022), *Kajian Pemanfaatan Embung untuk Ketahanan Air dan Pangan*

Jika dikelola dengan prinsip *Good Mining Practices* dan kehutanan berkelanjutan *(Sustainable Forest Management)*, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru *(new growth engine)* sekaligus menopang komitmen pembangunan rendah karbon.[5]

Optimalisasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Dharmasraya harus diarahkan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas sawit dan karet dengan prinsip keberlanjutan;
2. Mengintegrasikan fungsi embung ke dalam sistem ketahanan air dan pangan lokal;
3. Mendorong pengelolaan mineral dan kehutanan berbasis tata kelola lingkungan dan partisipasi masyarakat;
4. Menghindari eksploitasi SDA yang tidak terkendali yang berisiko menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan ekonomi.

D. Sektor Pertanian

Komoditi unggulan sektor pertanian di kabupaten Dharmasraya dan komiditi unggulan perkecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis sektor basis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 14
Komoditi Unggulan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Komoditi Unggulan				
		Pertanian	Hortukultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
1	Sungai Rumbai	Jagung	Pisang, pepaya	Karet, kopi, kakao	Sapi, kambing, ayam kampong	Budidaya
2	Koto Besar	Jagung, Ubi Kapadi Ladangyu, ubi Jalar,	Manga, durian, papaya	Karet	Sapi, kambing, ayam petelur	Budidaya
3	Asam Jujuhan	Kacang Hijau, ubi kayu, ubi jalar, padi lading	Jeruk, nanas	Karet,kopi	Sapi, kerbau, kambing, ayam petelur, ayam pedaging	Perairan umum
4	Koto Baru	Jagung, kacang, tanah, padi sawah	Pisang, papaya	Karet,kelapa,pinang, kakao	Ayam pedaging	Perairan umum
5	Koto Salak	Jagung,, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu,padi sawah	Pisang, papaya, nanas	Karet, kelapa, kopi, kakao	Sapi, kerbau, ayam kampung, itik	Budidaya
6	Tiumang	Kacang tanah, ubi kayu, padi sawah	Manga,pisang,	Kelapa sawit,kakao	Sapi, ayam kampung, itik	Budidaya
7	Padang Laweh	Jagung, padi sawah	Durian,	Kelapa sawit, kopi,kakao	Ayam pedaging	Perairan umum
8	Sitiung	Jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, padi sawah	Jeruk	Kelapa sawit, kelapa,kakao	Ayam petelur, ayam pedaging	
9	Timpeh	Jagung, padi sawah	Jeruk	Kelapa sawit	Sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, itik	Budidaya
10	Pulau Punjung	Kedelai,kacang tanah,ubi kayu,padi sawah	Jeruk,papaya, nanas	Karet, kelapa, kopi	Ayam pedaging	Budidaya, perairan umum
11	Sembilan Koto	Jagung, padi sawah	Jeruk, pisang	Karet, kelpa, pinang,kakao	Sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, itik	Perairan umum

Sumber : Matek RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

[5] World Bank (2022), *Harnessing Natural Resources for Inclusive Development in Indonesia*

Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan yaitu seluas 241.400 Ha (74,10% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.309 Ha (62%) dan karet seluas 21.878 Ha (7,40%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,50%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,10%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 272.164,6 Ha (94%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

Tabel 2- 15
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Dharmasraya Hasil Kerangka Sampel Area (KSA)

Luas Panen (Hektar)	2021	5.226,46
	2022	9.984,60
	2023	9.619,48
	2024	10.318,73
Produksi (Ton)	2021	25.537,80
	2022	47.554,99
	2023	44.033,05
	2024	46.801,32
Produktivitas (Kuintal/Hektar)	2021	48,86
	2022	47,63
	2023	45,77
	2024	45,36

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel di atas Produksi padi Kabupaten Dharmasraya meningkat dari tahun 2023 menjadi 46.801,32 ton, sedangkan produktivitas tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 45,36 kuintal/ha.

E. Hortikultura

Produksi sayur unggulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah Kangkung dengan total produksi mencapai 3.023,25 Kuintal, mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan total produksi 4.636,75 Kuintal. Sedangkan buah-buahan dengan produksi tertinggi adalah semangka dengan produksi tahun 2023 adalah 2.030,50 kuintal, dan tahun 2024 sebanyak 11.368 kuintal.

Tabel 2- 16
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya (ha), 2023 dan 2024

Kecamatan	Bawang Merah		Bayam		Cabai Rawit		Kacang Panjang		Kangkung	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sungai Rumbai	–	–	8,5	11	4,5	6,5	6,75	7,5	9,75	12
Koto Besar	–	–	9	12	6	3	5	3	11	12
Asam Jujuhan	–	–	12	8	2	4	3	3	11	8
Koto Baru	–	–	14	12	1	1	–	4	15	11
Koto Salak	–	–	12	12	0,45	0,85	0,5	1,7	23,5	24
Tiumang	–	0,25	49	49	1	4	6	7	57	55
Padang Laweh	–	–	6,75	7,5	2	1,25	1,75	0,75	3,5	6,5
Sitiung	–	–	146	18	4	5	8	3	122	18
Timpeh	–	–	11,5	10	4,5	3,25	8,25	3,5	13,25	8,75
Pulau Punjung	–	0,5	28	32	0,75	–	7	7,5	23,5	34
Sembilan Koto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dharmasraya	**–**	**0,75**	**296,75**	**171,5**	**26,2**	**28,85**	**46,25**	**40,95**	**289,5**	**189,25**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Lanjutan Tabel

Kecamatan	Ketimun		Melon		Semangka		Terung		Cabai Keriting	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sungai Rumbai	1,5	1	–	2	6	9	5,5	5	2,25	7
Koto Besar	–	–	–	–	–	23	4	3	9,5	4,5
Asam Jujuhan	–	–	–	–	1	–	2	1	3	4
Koto Baru	–	–	–	–	3	3	–	–	3	3
Koto Salak	–	–	2,5	3	3	3	1	1,7	4	2,5
Tiumang	–	–	3	–	3	1	5	6	4	5
Padang Laweh	–	–	–	–	–	–	0,75	0,75	1,25	1,75
Sitiung	–	–	7	2	16	20	5	6	4	7
Timpeh	6	2,5	–	–	3	–	0,25	–	4,25	3,5
Pulau Punjung	9,5	7,5	–	–	–	1	3	5	6,25	3,75
Sembilan Koto	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
Dharmasraya	**17**	**11**	**12,5**	**7**	**35**	**60**	**26,5**	**28,45**	**43,5**	**44**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Tabel 2- 17
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya (kuintal), 2023 dan 2024

Kecamatan	Bawang Merah		Bayam		Cabai Rawit		Kacang Panjang		Kangkung	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sungai Rumbai	–	–	111	93	143	154	165	210	83	106
Koto Besar	–	–	210,5	91	185	39	79,6	60	162	91
Asam Jujuhan	–	–	119	60	59	92	66	40	109	59
Koto Baru	–	–	466	384	139	17	–	165	463	374
Koto Salak	–	–	494	501	70,7	18,65	270	34,4	714	912
Tiumang	–	14	386	248	20	78	177	167	488	269
Padang Laweh	–	–	570,5	467	76	55,75	297	45	412	465
Sitiung	–	–	1.455,00	396	111	130	122	95	1.652,00	440
Timpeh	–	–	113	43,5	282,3	72	226,5	69	245,75	51,25
Pulau Punjung	–	4	357	239	46,5	–	141	104	308	256
Sembilan Koto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dharmasraya	**–**	**18**	**4.282,00**	**2.522,50**	**1.132,50**	**656,4**	**1.544,10**	**989,4**	**4.636,75**	**3.023,25**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Lanjutan Tabel

Kecamatan	Ketimun		Melon		Semangka		Terung		Cabai Keriting	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sungai Rumbai	35	90	–	40	438	160	163	179	129	210
Koto Besar	–	–	–	–	–	5.770,00	62,8	70	270,6	178
Asam Jujuhan	–	–	–	–	20	–	126	49	88	122
Koto Baru	–	–	–	–	315	45	–	–	199	279
Koto Salak	–	–	298	694	740	716	79	114,85	2.866,00	54,35
Tiumang	–	–	350	–	405	400	202	197	149,75	127
Padang Laweh	–	–	–	–	–	–	178	163	69	101,5
Sitiung	–	–	70	110	43	4.237,00	252	221	124	245
Timpeh	113,5	74,5	–	–	69,5	–	19,75	–	216	109,5
Pulau Punjung	145	106	–	–	–	40	150	123	166,5	100
Sembilan Koto	–	–	–	–	–	–	–	–	141,75	71,5
Dharmasraya	**293,5**	**270,5**	**718**	**844**	**2.030,50**	**11.368,00**	**1.232,55**	**1.116,85**	**4.419,60**	**1.597,85**

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

F. Potensi Pertambangan

Selain sektor perkebunan, potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu potensi pertambangan. Potensi pertambanagn yang ada antara lain batu bara, andesit, batu kapur, batuan, biji besi, gamping, granits dan mangan. Penyebaran potensi tambang ini dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan peta Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan termasuk dalam wilayah pertambangan. Namun saat ini izin usaha pertambangan yang ada terdiri dari IUP pertambangan, IUP Operasi Produksi Pertambangan dan IUP Eksplorasi Pertambangan.

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suiseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah :

1. Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009 : 449.780,25 MT
2. Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA
3. Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA
4. Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS
5. Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
6. Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Padang. Laweh)

Tabel 2- 18
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya

No	Bahan Galian	Lokasi	Luas Sebaran (Ha)	Keterangan
1	Batubara	Kec. Asam Jujuhan	11.809	
		Kec. Padang Laweh	499	
		Kec. Tiumang	3.175	
		Kec. Timpeh	4.290	
2	Bitumen Padat	Kec. Padang Laweh	450	
		Kec. Timpeh	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Asam Jujuhan	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
3	Emas	Kec. Sembilan Koto	939	
		S. Batanghari		
		S. Batang Momong		
		Batang Pangian		
		S. Siat		
		Batang Piruko		
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan	680	
		Sembilan Koto	100	
5	Mangan	Kec. Timpeh	500	
6	Batugamping	Kampung Surau Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Banai Kec. Pulau Punjung		
7	Pasir Kuarsa	Sungai Siat	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Sungai Koto Balai		
8	Lempung	Kec. Pulau Punjung	200	
		Kec. Sitiung	50	
		Kec. Koto Baru	75	
		Kec. Koto Salak	50	
9	Batuan	Kec. Sembilan Koto	27	
		Kec. Pulau Punjung	96	
		Kec. Sitiung	260	
		Kec. Koto Salak	5	
		Kec. Koto Baru	100	
Luas Total			**23.306**	

Sumber : Matek RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi, sumberdaya hipotetik batu gunung (tingkat keyakinan 10% – 15%) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya luas sebarannya yaitu 239.446.200 m². Begitu juga dengan potensi sumberdaya tambang lainnya seperti potensi emas primer sekunder, batu bara, bijih besi, mangan, dan bitumen. Sebaran potensi batu gunung, hipotetik emas, batu bara, bijih besi, mangan dan bitumen di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 19
Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung di Kabupaten Dharmasraya

No	Potensi	Lokasi Sebaran	Satuan	Potensial	Keterangan
1	Hipotetik Batu Gunung	Gunung Medan	M²	944,1	Jutaan Ton
		Bukit Pintu	M²	119,242,200	
		Bukit Gadang	M²	13,310,000	
		Gunung Hulubanai	M²	2,989,300	
		Gunung Mangantai	M²	20,194,900	
		Bkt. S. Mujung	M²	13,850,800	
		Bkt. Ambacang	M²	63,644,000	
		Bkt. Bulangan	M²	5,270,900	
2	Emar Primer Sekunder (Places)	Bukit Gading			Sumberdaya Hipotetik
		Sepanjang Sungai Batanghari			
		Sepanjang Sungai Batang Momong			
		Batang Siat			
		Sungai Rotan			
		Batang pangian			
		Sungai Betung			
3	Batu Bara	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		12.254,91	
		Sumber Daya (MT)		2.911.043	
		Cadangan Layak Tambang/Miniable (MT)		9.545.773	
		Umur Tambang		18 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 60.000	
		Padang laweh			
		Luas Areal (Ha)		4.363.6	
		Sumber Daya (MT)		1.035.000	
		Cadangan Layak Tambang/Miniable (MT)		862.360	
		Umur Tambang		10 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 6000	
		Luas Areal (Ha)		4.415	
		Sumber Daya (MT)		468.000	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 5.500	
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		5.000	
		Sumber Daya (MT)			
		Cadangan Layak Tambang/ Miniable (MT)		8.410.000	
		Umur Tambang		24 tahun	
		Fe Total		61 – 70%	
		Sembilan Koto			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		1.160.000	
		Fe Total		61,4	

No	Potensi	Lokasi Sebaran	Satuan	Potensial	Keterangan
5	Mangan	Timpeh			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		860.000	
		Mn Total		40 s/d 48%	
6	Bintumen	Padang Laweh			
		Luas Areal (Ha)		1.300	
		Sumber Daya (MT)		2.801.176.772	
		Sumber Daya Minyak	Barrel	369.966.742	

Sumber : Matek RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 107.K/MB.01/MEM.B/2022, Wilayah Pertambangan di Sumatera Barat diperoleh WIUP Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

Tabel 2- 20
WIUP Kabupaten Dharmasraya dan Sekitarnya

Jenis Wilayah Pertambangan	Luas (Ha)
WPN	581.732,31
WPR	647,98
WUP	44.715.914,87
WUPK	2.819,78
Grand Total	45.301.114,93

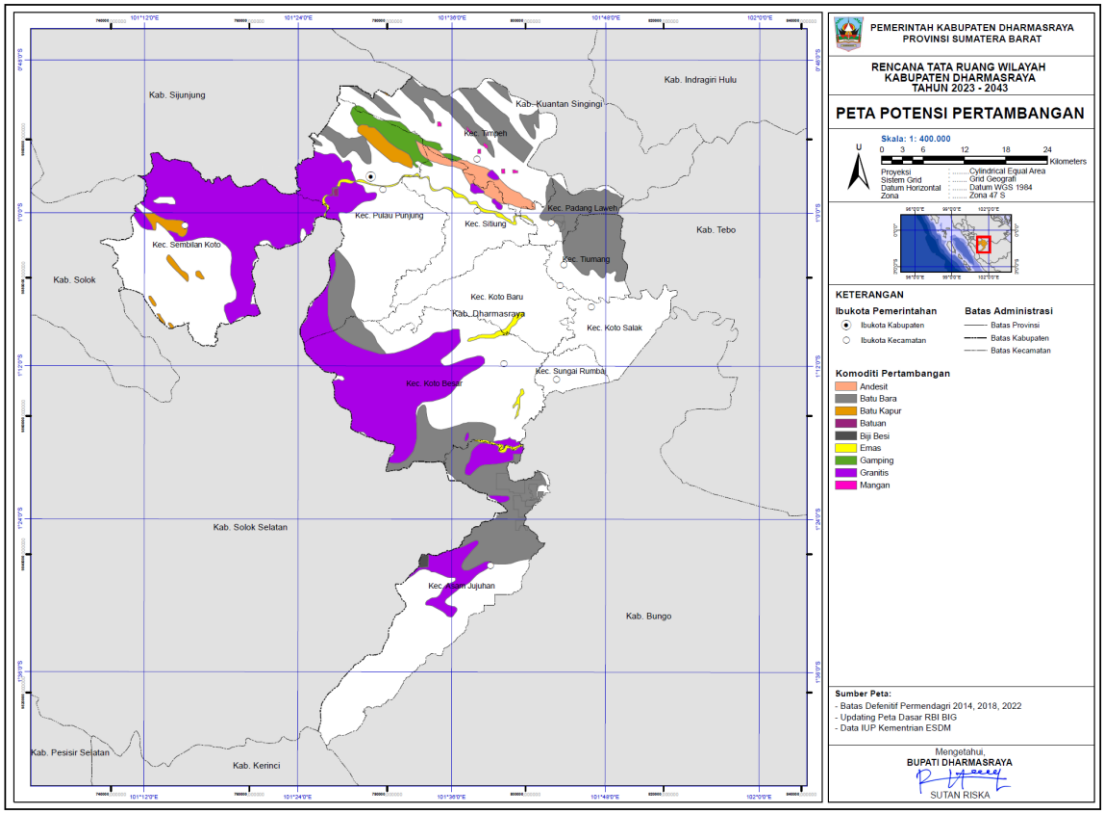
Sumber : Kepmen ESDM Nomor 107.K/MB.01/MEM.B/2022

Tabel 2- 21
Ijin Usaha (IUP) Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kategori	Luas Ha	Proporasi Dari Luas Kabupaten
1	IUP Pertambangan	2.526	0,86 %
2	IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.526	0,86 %
3	IUP Eksplorasi Pertambangan	17.587	5,87%
4	Wilayah Pertambangan	**292.120**	**100,00%**

Sumber : Matek RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2- 17
Potensi Pertambangan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

G. Sektor Pariwisata

Ruang lingkup Destinasi Pariwisata Kabupaten Dharmasraya meliputi antara lain :

1. Perwilayahan destinasi pariwisata
2. Pembangunan daya tarik wisata
3. Pembangunan aksesibilitas pariwisata
4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Perwilayahan destinasi pariwisata di Kabupaten Dharmasraya terbagi atas Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK). Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK) Peninggalan Kerajaan Dharmasraya dan sekitarnya, yang menjadi Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK) Dharmasraya adalah kawasan wisata peninggalan Kerajaan Dharmasraya pada Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Sitiung. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Dharmasraya adalah destinasi yang ada di Kecamatan Padang Laweh dan

Kecamatan Koto Besar serta yang menjadi Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK) Dharmasraya adalah Kecamatan Timpeh.

Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK) wisata alam, yang menjadi Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK) Dharmasraya adalah kawasan wisata alam pada Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Dharmasraya adalah destinasi yang ada di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Salak, serta yang menjadi Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK) Dharmasraya adalah Kecamatan Tiumang, dan Kecamatan Sungai Rumbai.

Tabel 2- 22
Objek Wisata Kabupaten Dharmasraya

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota /Kabupaten/jln Utama	Fasilitas Objek	Aksesbilitas	Transportasi	Ket
A.	**Kec. Sembilan Koto**							
1	Timbulun Lubuak Labu	Wisata Alam	Nagari Banai	50 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
2	Air terjun Barangin Kec. Sembilan Koto	Wisata Alam	Nagari lubuak Karak	45 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
B.	**Kec. Pulau Punjung**							
3	Bukik Tambun	Minat khusus	Nagari Kampung Surau	5 Km		Jalan Raya Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
4	Goa Ngalau Sungai Suko	Wisata Alam	Nagari Gunung Selasih	7 Km		Jalan Raya ,Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
5	Timbulun Indah	Wisata Bahari	Taratak Pulau Punjung	1 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua,	
6	Bendungan Batu Bakawuik	Wisata Bahari	Sungai Kambuik	7 Km	Kamar Mandi, Mushola	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
7	Goa Cigak	Wisata Alam	Kampung Surau	30 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua, Jalan Kaki	
8	RM.Rajo Sungai Dareh	Wisata Sejarah	Sungai Dareh	1 Km	Kamar Mandi, Peninggalan Sejarah	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
9	Bendungan Batang Mimpi	Wisata Bahari	Sei Dareh	2 Km		Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
10	Hot Spiring Sungai Belit	Wisata Alam	Sungai Belit	5 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua, Jalan Kaki	
C.	**Kec. Sitiung**							

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota /Kabupaten/jln Utama	Fasilitas Objek	Aksesbilitas	Transportasi	Ket
1	Goa Ngalau Sungai Sariak	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	13 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah, Sungai Batang Hari	Roda Empat, Roda Dua, *Phonton*	
2	Goa Ngalau Timbek	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	7 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah, Sungai Batang Hari	Roda Empat, Roda Dua, *Phonton*	
3	Aia Timbua	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah, Sungai Batang Hari	Roda Empat, Roda Dua, *Phonton*	
4	Mesjid Tua dan Makam-Makam Raja Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	5 Km	Peningalan Sejarah	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
5	Candi Padang Roco	Wisata Sejarah	Sei.Langsa Nagari Siguntur	17 Km	Peningalan Sejarah, Wc	Jalan Raya, Jalan Tanah, Sungai Batang Hari	Roda Empat, Roda Dua, *phonton*	
6	Candi Pulau Sawah	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km	Peningalan Sejarah,Wc	Jalan Raya, Jalan Tanah, Sungai Batang Hari	Roda Empat, Roda Dua, *phonton*	
7	Batik Tanah Like	Minat Khusus	Blok B	30 Km		Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
8	Rumah Gadang Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km	Peninggalan Sejarah	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
9	Puncak Gunung Medan	Wisata Alam	Gunung Medan	3 Km		Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
10	Candi Awank Mombiak	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	20 Km		Jalan raya, Jalan tanah, Sungai	Roda Empat, Roda Dua, *phonton*	
11	Candi Rambahan	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	20 Km		Jalan raya, Jalan tanah, Sungai	Roda Empat, Roda Dua, *phonton*	
D.	**Kec. Timpeh**							
12	Air Terjun Sungai Banang	Wisata alam	Timpeh	40 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
13	Goa Sungai Pinang	Wisata Alam	Timpeh	35 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
14	Goa Gadang Timpeh	Wisata Alam	Timpeh	40 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
15			Tabek	35 Km		Jalan	Roda	

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota /Kabupaten/jln Utama	Fasilitas Objek	Aksesbilitas	Transportasi	Ket
	Air Terjun Tujuh Tingkat	Wisata Alam				Raya Jalan Tanah	Empat, Roda Dua,	
16	Puncak Timpeh	Wisata Alam	Tabek	30 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
E.	**Kec. Koto Baru**							
17	Danau Baranang Siang	Wisata Bahari	Pulau Maianan	40 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
F.	**Kec. Padang Laweh**							
18	Rumah Gadang Padang Laweh	Wisata Sejarah	Padang Laweh	42 Km	Peningalan Sejarah	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
G.	**Kec. Koto Besar**							
19	Bendugan Batang Siat	Wisata Bahari	Abai Siat	35 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
20	Rumah Kerajaan Koto Besar	Wisata Sejarah	Koto Besar	10 Km	Peninggalan Sejarah	Jalan Raya	Roda Empat, Roda Dua	
H.	**Kec. Asam Jujuhan**							
21	Air Terjun Sungai Suyiu	Wisata Alam	Sungai Suyiu	60 Km		Jalan Raya, Jalan Tanah	Roda Empat, Roda Dua	
I.	**Kec. Koto Salak**							
22	Pulau Cinta	Wisata Bahari	Pulau Mainan	30 Km		Jalan Raya, Sungai Jalan tanah	Roda Empat, Roda Dua, Perahu	
J.	**Kec. Tiumang**							
23	Pantai Guli-Guli	Wisata Alam	Koto Bringin	27 Km		Jaln Raya	Roda Empat, Roda Dua	

Sumber : Dinas Pariwisata, Tahun 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009).

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu: jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Berdasarkan dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, pada kajian ini menggambarkan ambang batas jasa lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Dharmasraya yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

1. Daya Dukung Air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air Kabupaten Dharmasraya belum terlampaui yaitu sebesar 286.190,14 Ha atau sekitar 97,97% dan yang sudah terlampaui sebesar 5.931,90 Ha atau sekitar 2,03%.

Tabel 2- 23
Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
1	Asam Jujuhan	726.667.778,16	43.281,04	-	43.281,04
2	Koto Baru	442.411.058,67	21.641,91	170,98	21.812,89
3	Koto Besar	810.678.142,50	53.318,09	462,02	53.780,11
4	Koto Salak	293.654.616,88	12.086,20	125,46	12.211,66
5	Padang Laweh	172.676.628,86	7.183,75	-	7.183,75
6	Pulau Punjung	699.301.388,96	42.922,74	913,12	43.835,86
7	Sembilan Koto	525.026.105,96	45.201,70	1.452,94	46.654,65
8	Sitiung	412.259.084,14	16.209,46	2.249,16	18.458,62
9	Sungai Rumbai	132.332.564,15	4.779,45	170,92	4.950,37
10	Timpeh	431.411.305,46	28.453,16	256,41	28.709,57
11	Tiumang	240.270.895,75	11.112,63	130,88	11.243,51
	Grand Total	**4.886.689.569,50**	**286.190,14**	**5.931,90**	**292.122,04**
	Persentase		**97,97%**	**2,03%**	

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023

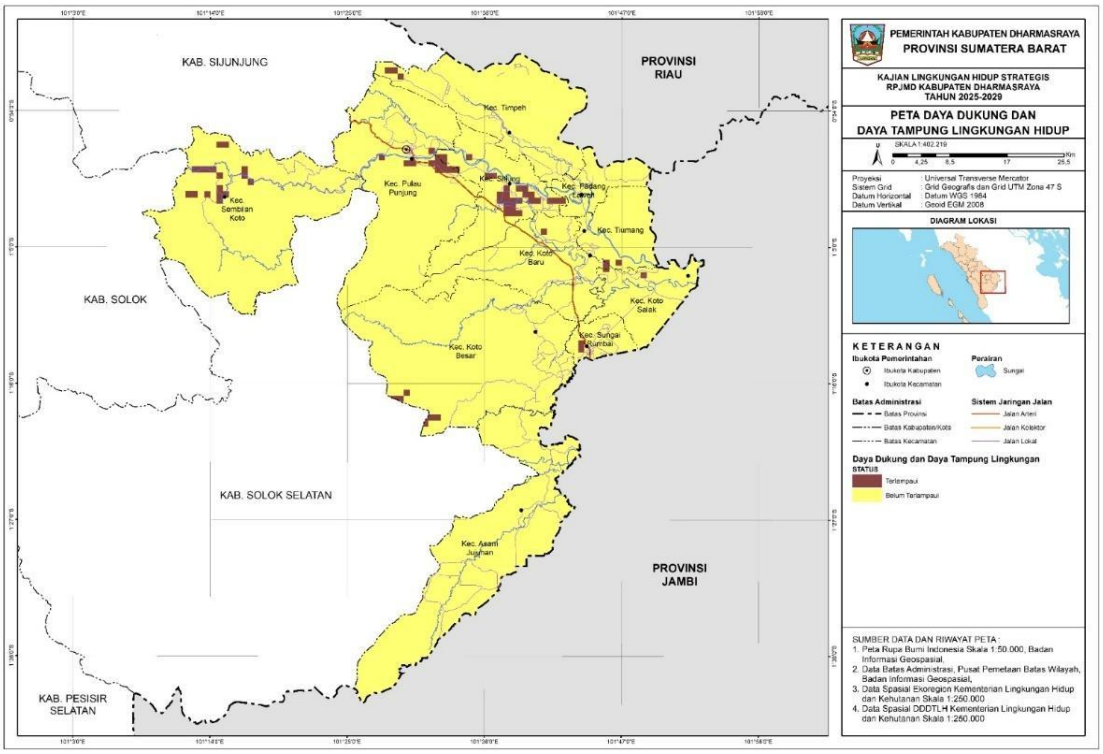
Tabel 2- 24
Ketersediaan Air di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Status	Ketersediaan (M3)	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Non-Domestik	Total Kebutuhan (m3)	Luas (Ha)
1	Asam Jujuhan	Belum Terlampaui	726.667.778,16	2.613.254,40	386.124.580,84	432.810.433,58	43.281,04
	Asam Jujuhan Total		726.667.778,16	2.613.254,40	386.124.580,84	432.810.433,58	43.281,04
2	Koto Baru	Belum Terlampaui	436.565.283,28	2.336.774,40	245.369.194,45	216.419.074,97	21.641,91
		Terlampaui	5.845.775,39	54.000,00	6.497.405,07	1.709.809,21	170,98

No	Kecamatan	Status	Ketersediaan (M3)	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Non-Domestik	Total Kebutuhan (m3)	Luas (Ha)
	Koto Baru Total		442.411.058,67	2.390.774,40	251.866.599,52	218.128.884,18	21.812,89
3	Koto Besar	Belum Terlampaui	806.196.474,52	3.523.651,20	451.654.411,54	533.180.937,47	53.318,09
		Terlampaui	4.481.667,99	3.196,80	5.000.659,97	4.620.212,57	462,02
	Koto Besar Total		810.678.142,50	3.526.848,00	456.655.071,51	537.801.150,05	53.780,11
4	Koto Salak	Belum Terlampaui	289.430.552,78	1.546.128,00	145.317.269,27	120.861.999,12	12.086,20
		Terlampaui	4.224.064,11	45.014,40	4.302.279,82	1.254.603,75	125,46
	Koto Salak Total		293.654.616,88	1.591.142,40	149.619.549,09	122.116.602,86	12.211,66
5	Padang Laweh	Belum Terlampaui	172.676.628,86	1.822.953,60	96.551.698,01	71.837.518,35	7.183,75
	Padang Laweh Total		172.676.628,86	1.822.953,60	96.551.698,01	71.837.518,35	7.183,75
6	Pulau Punjung	Belum Terlampaui	674.017.503,20	4.452.883,20	378.386.798,46	429.227.427,23	42.922,74
		Terlampaui	25.283.885,76	207.187,20	27.605.630,96	9.131.183,93	913,12
	Pulau Punjung Total		699.301.388,96	4.660.070,40	405.992.429,42	438.358.611,16	43.835,86
7	Sembilan Koto	Belum Terlampaui	509.714.088,12	3.470.515,20	46.620.184,84	452.017.045,08	45.201,70
		Terlampaui	15.312.017,84	311.904,00	17.447.439,61	14.529.427,55	1.452,94
	Sembilan Koto Total		525.026.105,96	3.782.419,20	64.067.624,45	466.546.472,63	46.654,65
8	Sitiung	Belum Terlampaui	350.888.703,61	2.396.649,60	184.350.494,39	162.094.578,27	16.209,46
		Terlampaui	61.370.380,54	552.960,00	68.156.237,59	22.491.609,53	2.249,16
	Sitiung Total		412.259.084,14	2.949.609,60	252.506.731,97	184.586.187,80	18.458,62
9	Sungai Rumbai	Belum Terlampaui	129.335.291,26	1.328.054,40	61.067.561,61	47.794.463,08	4.779,45
		Terlampaui	2.997.272,89	15.811,20	3.149.907,57	1.709.218,25	170,92
	Sungai Rumbai Total		132.332.564,15	1.343.865,60	64.217.469,18	49.503.681,33	4.950,37
10	Timpeh	Belum Terlampaui	427.796.239,63	3.125.692,80	241.869.391,57	284.531.599,82	28.453,16
		Terlampaui	3.615.065,83	62.726,40	3.745.246,77	2.564.116,39	256,41
	Timpeh Total		431.411.305,46	3.188.419,20	245.614.638,35	287.095.716,21	28.709,57
11	Tiumang	Belum Terlampaui	235.911.992,52	2.028.326,40	142.527.959,99	111.126.317,46	11.112,63
		Terlampaui	4.358.903,23	38.534,40	4.725.258,05	1.308.802,57	130,88
	Tiumang Total		240.270.895,75	2.066.860,80	147.253.218,04	112.435.120,02	11.243,51
	TOTAL		4.886.689.569,50	29.936.217,60	2.520.469.610,37	2.921.220.378,17	292.122,04

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023

Gambar 2- 18
Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya



Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah diperoleh asumsi kebutuhan air untuk hidup layak 1.600 m3/org/tahun. Berdasarkan asumsi tersebut, maka berikut dapat dilihat proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2- 25
Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ketersediaan	Proyeksi DDDT Air							
			2025	Kebutuhan Air	DDT Air	Status	2026	Kebutuhan Air	DDT Air	Status
1	Sungai Rumbai	132.332.564,15	24.934	39.894.976,00	3,32	Surplus	25.480	40.768.676	3,25	Surplus
2	Koto Besar	810.678.142,50	29.956	47.930.112,00	16,91	Surplus	30.627	49.003.747	16,54	Surplus
3	Asam Jujuhan	726.667.778,16	9.494	15.190.880,00	47,84	Surplus	9.489	15.181.765	47,86	Surplus
4	Koto Baru	442.411.058,67	34.280	54.847.488,00	8,07	Surplus	34.664	55.461.780	7,98	Surplus
5	Koto Salak	293.654.616,88	18.873	30.197.472,00	9,72	Surplus	19.151	30.641.375	9,58	Surplus
6	Tiumang	240.270.895,75	14.227	22.762.880,00	10,56	Surplus	14.457	23.131.639	10,39	Surplus
7	Padang Laweh	172.676.628,86	7.024	11.238.720,00	15,36	Surplus	7.151	11.441.017	15,09	Surplus
8	Sitiung	412.259.084,14	30.588	48.940.192,00	8,42	Surplus	31.083	49.733.023	8,29	Surplus
9	Timpeh	431.411.305,46	18.790	30.064.128,00	14,35	Surplus	19.188	30.701.488	14,05	Surplus
10	Pulau Punjung	699.301.388,96	49.979	79.966.224,00	8,74	Surplus	50.874	81.397.619	8,59	Surplus
11	Sembilan Koto	525.026.105,96	10.176	16.281.600,00	32,25	Surplus	10.355	16.568.156	31,69	Surplus
Kab Dharmasraya		4.886.689.569,50	248.498	397.596.672,00	12,29	Surplus	252.871	404.594.373	12,08	Surplus

(Lanjutan)

No	Kecamatan	Proyeksi DDDT Air											
		2027	Kebutuhan Air	DDT Air	Status	2028	Kebutuhan Air	DDT Air	Status	2029	Kebutuhan Air	DDT Air	Status
1	Sungai Rumbai	26.038	41.661.510	3,18	Surplus	26.609	42.573.897	3,11	Surplus	27.191	43.506.265	3,04	Surplus
2	Koto Besar	31.313	50.101.430	16,18	Surplus	32.015	51.223.702	15,83	Surplus	32.732	52.371.113	15,48	Surplus
3	Asam Jujuhan	9.483	15.172.656	47,89	Surplus	9.477	15.163.553	47,92	Surplus	9.472	15.154.455	47,95	Surplus
4	Koto Baru	35.052	56.082.952	7,89	Surplus	35.444	56.711.081	7,80	Surplus	35.841	57.346.245	7,71	Surplus
5	Koto Salak	19.432	31.091.803	9,44	Surplus	19.718	31.548.853	9,31	Surplus	20.008	32.012.621	9,17	Surplus
6	Tiumang	14.691	23.506.371	10,22	Surplus	14.929	23.887.174	10,06	Surplus	15.171	24.274.147	9,90	Surplus
7	Padang Laweh	7.279	11.646.955	14,83	Surplus	7.410	11.856.600	14,56	Surplus	7.544	12.070.019	14,31	Surplus
8	Sitiung	31.587	50.538.698	8,16	Surplus	32.098	51.357.425	8,03	Surplus	32.618	52.189.415	7,90	Surplus
9	Timpeh	19.595	31.352.359	13,76	Surplus	20.011	32.017.029	13,47	Surplus	20.435	32.695.790	13,19	Surplus
10	Pulau Punjung	51.784	82.854.637	8,44	Surplus	52.711	84.337.735	8,29	Surplus	53.655	85.847.380	8,15	Surplus
11	Sembilan Koto	10.537	16.859.756	31,14	Surplus	10.723	17.156.487	30,60	Surplus	10.912	17.458.442	30,07	Surplus
Kab Dharmasraya		257.322	411.715.234	11,87	Surplus	261.851	418.961.423	11,66	Surplus	266.459	426.335.144	11,46	Surplus

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023

Berdasarkan proyeksi daya dukung air Kabupaten Dharmasraya diperoleh hingga tahun 2029 status daya dukung air dinyatakan surplus namun terus mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam mempertahankan ketersediaan air. Berdasarkan kecamatan dapat dilihat DDT air yang cukup tinggi berada pada Kecamatan Asam Jujuhan, sedangkan DDT air terendah terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai.

2. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu lahan untuk menyediakan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan. Berdasarkan estimasi daya dukung pangan (beras) Kabupaten Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2030 masih dalam kondisi surplus dengan upaya LSD dipertahankan, LPP turun, produktivitas naik dan konsumsi turun. Jika diupayakan juga dengan peningkatan kali tanam makan estimasi kecukupan pangan hingga tahun 2030 masih surplus. Data luas panen Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 adalah 10.318,73 Ha dengan produksi 46.801,32 GKG/ton. Berdasarkan keputusan Menteri ATR BPN RI No.446.1/SK.PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 diperoleh Kabupaten Dharmasraya memiliki Lahan Baku Sawah dengan luas 4.629 Ha.

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu lahan untuk menyediakan pangan bagi populasinya secara berkelanjutan. Berdasarkan estimasi daya dukung pangan (beras) Kabupaten Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2030 masih dalam kondisi surplus dengan upaya LSD dipertahankan, LPP turun, produktivitas naik dan konsumsi turun. Jika diupayakan juga dengan peningkatan kali tanam makan estimasi kecukupan pangan hingga tahun 2030 masih surplus.

Tabel 2- 26
Estimasi Kecukupan Pangan Kabupaten Dharmasraya

				persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal				1,70	47,63	1,60	1,66
Perubahan Asumsi				1,20%	50,00	1,30	2,00
Estimasi	**Tahun**	**BAU (luas sawah menurun)**	**LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)**	**LSD + LPP Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun**	**LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik**
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	5.407,00	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
	2030	4.616,90	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
	2035	3.826,80	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
	2040	3.036,70	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
	2045	2.246,60	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12	4.638,12
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	17.462,78	17.462,78	17.462,78	17.462,78	17.462,78	17.462,78
	2025	18.998,79	18.998,79	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00
	2030	20.669,90	20.669,90	19.675,18	19.675,18	19.675,18	19.675,18
	2035	22.488,00	20.669,90	19.675,18	19.675,18	19.675,18	19.675,18
	2040	24.466,02	24.466,02	22.167,86	22.167,86	22.167,86	22.167,86
	2045	26.618,02	26.618,02	23.530,24	23.530,24	23.530,24	23.530,24
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	-1.067,81	-3.617,61	-3.154,82	-2.389,48	1.086,02	4.419,60
	2030	-5.359,09	-5.288,72	-4.293,99	-3.528,65	160,45	3.494,02
	2035	-9.797,36	-7.106,82	-5.503,18	-4.737,83	-822,02	2.511,56
	2040	-14.395,55	-9.084,84	-6.786,68	-6.021,33	-1.864,86	1.468,72
	2045	-19.167,72	-11.236,84	-8.149,06	-7.383,71	-2.971,79	361,79

1. Jasa Lingkungan

Profil daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu: jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Kabupaten Dharmasraya telah menyusun dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tersebut.

2. Jasa Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jasa penyediaan terdiri atas jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih, jasa penyediaan serat, jasa penyediaan energi, dan jasa penyediaan sumberdaya genetik

A. Jasa Penyediaan Pangan

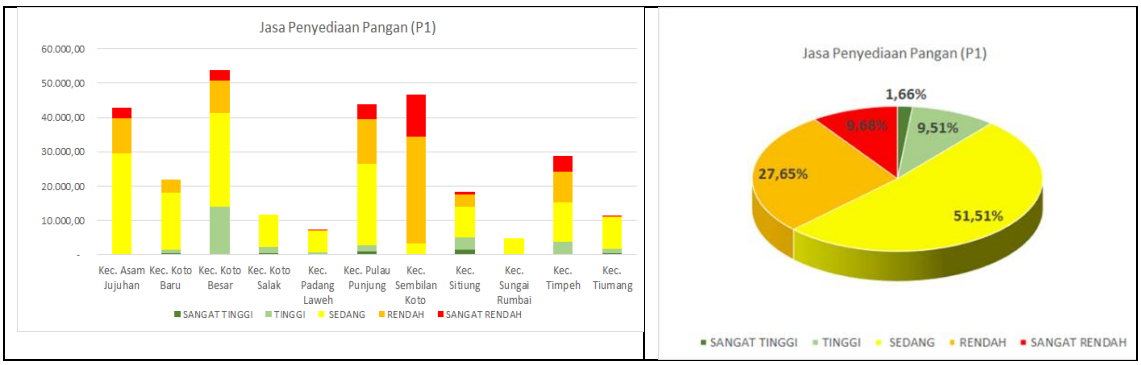
Merupakan Hasil hutan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang menyediakan makanan bagi manusia. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Daya dukung untuk jasa penyediaan pangan di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sedang dengan luas 149.995,64 Ha (51,51%), yang berada di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 29.214,97 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 27.389,65 Ha. Kategori selanjutnya adalah dengan daya dukung penyediaan pangan rendah dengan luas 80.524,24 (27,65%) Ha dan Sangat Rendah dengan luas 28.182,07 Ha (9,68%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 27
Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan		268,90	29.214,97	10.259,17	3.106,29	42.849,33
2	Koto Baru	474,25	987,76	16.514,90	3.844,08		21.821,00
3	Koto Besar	34,76	13.937,54	27.389,65	9.237,52	3.188,71	53.788,20
4	Koto Salak	563,67	1.749,85	9.489,45			11.802,98
5	Padang Laweh	19,24	685,93	6.299,76	149,60	31,20	7.185,72
6	Pulau Punjung	1.064,58	1.719,22	23.618,38	13.203,23	4.242,66	43.848,08
7	Sembilan Koto	269,74	91,43	3.050,36	31.037,24	12.221,15	46.669,92
8	Sitiung	1.619,42	3.378,88	9.009,48	3.477,82	978,98	18.464,58
9	Sungai Rumbai	7,15	76,96	4.868,49			4.952,60
10	Timpeh	337,64	3.569,39	11.304,53	9.115,15	4.390,82	28.717,52
11	Tiumang	435,70	1.216,12	9.235,67	200,42	22,25	11.110,16
Total		**4.826,16**	**27.681,99**	**149.995,64**	**80.524,24**	**28.182,07**	**291.210,10**

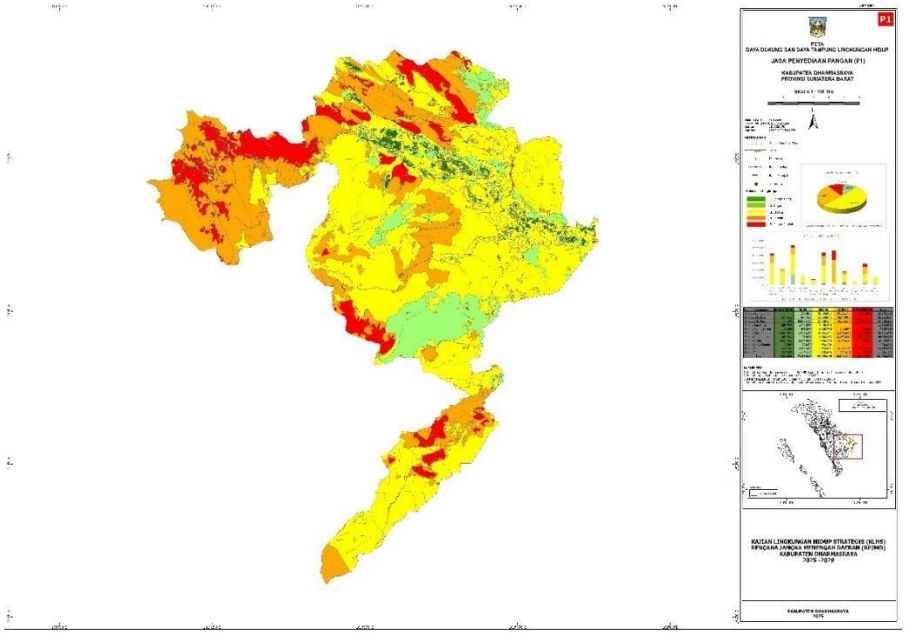
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 19
Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 20
Peta Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

B. Jasa Penyediaan Air Bersih

Merupakan Penyediaan air bersih dari sumber air permukaan dan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah

hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.

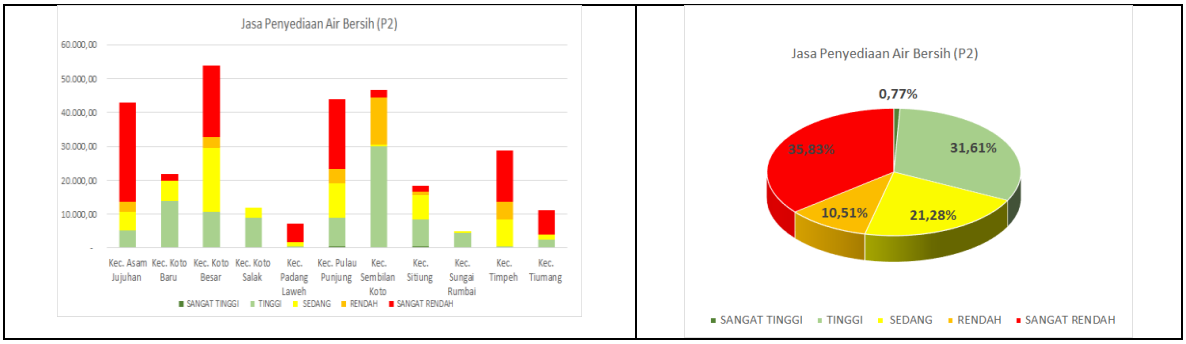
Daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Dharmasraya tertinggi berada kategori sangat rendah dengan luas 104.337,61 Ha (35,83%), jika dilihat berdasarkan kecamatan kategori sangat rendah sebagian berada di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 29.085,63 Ha. Kemudian kategori tinggi dengan luas 92.038,58 Ha (31,61%), kategori sedang dengan luas 61.978,22 Ha (21,28%), kategori rendah dengan luas 30.610,09 Ha (10,51%) dan kategori sangat tinggi dengan luas 2.245,59 Ha (0,77%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 28
Jasa Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	239,26	4.978,24	5.441,39	3.104,80	29.085,63	42.849,33
2	Koto Baru	201,18	13.635,77	5.954,07		2.029,98	21.821,00
3	Koto Besar	173,02	10.522,00	18.805,81	3.188,71	21.098,64	53.788,20
4	Koto Salak	157,22	8.888,72	2.757,04			11.802,98
5	Padang Laweh	175,17	441,08	1.171,08	31,28	5.367,12	7.185,72
6	Pulau Punjung	492,32	8.408,57	10.227,48	4.206,20	20.513,50	43.848,08
7	Sembilan Koto	127,23	29.978,83	318,93	13.971,91	2.273,02	46.669,92
8	Sitiung	398,65	7.948,77	7.377,99	979,31	1.759,86	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.397,42	550,79			4.952,60
10	Timpeh	59,43	512,81	7.903,35	5.105,63	15.136,30	28.717,52
11	Tiumang	217,72	2.326,36	1.470,28	22,25	7.073,55	11.110,16
Total		**2.245,59**	**92.038,58**	**61.978,22**	**30.610,09**	**104.337,61**	**291.210,10**

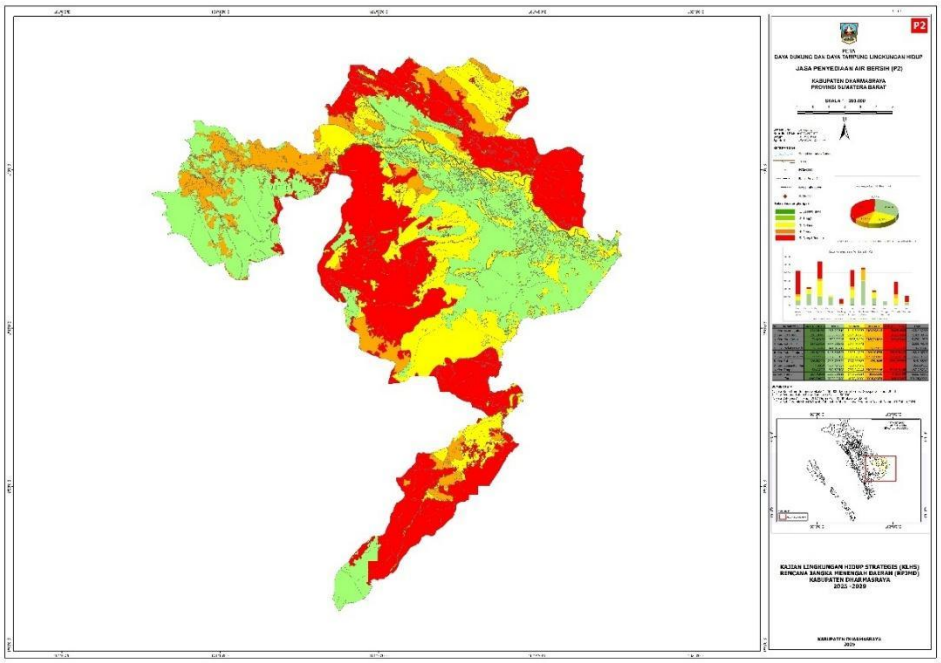
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 21
Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 22
Peta Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

C. Jasa Penyediaan Serat (*Fiber*)

Merupakan Hasil hutan, pertanian, dan perkebunan yang menghasilkan serat untuk pakaian, bahan bangunan, dan keperluan lainnya. Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical.

Daya dukung penyediaan serat di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori tinggi dengan luas 119.731,76 Ha (41,12%), jika dilihat berdasarkan kecamatan daya dukung penyediaan serat dengan kategori tinggi berada di Kecamatan Koto Besar dengan luas 24.832,51 Ha, kemudian Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 24.742,06 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 20.252,10 Ha. Selanjutanya daya dukung penyediaan serat kategori sedang dengan luas 76.297,85 Ha (26,20%), kategori sangat tinggi dengan luas 60.578,34 Ha (20,80%), kategori rendah dengan luas 31.659,05 Ha (10,87%) dan kategori

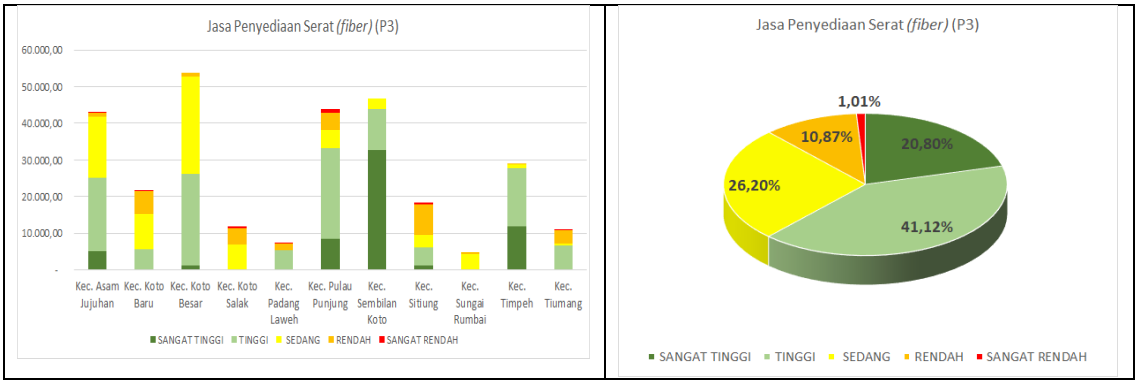
sangat rendah dengan luas 2.943,10 Ha (1,01%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 29
Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.987,31	20.252,10	16.492,12	1.111,41	6,38	42.849,33
2	Koto Baru	5,08	5.608,54	9.570,46	6.228,84	408,09	21.821,00
3	Koto Besar	1.247,90	24.832,51	26.679,97	1.027,83		53.788,20
4	Koto Salak			6.806,03	4.451,29	545,66	11.802,98
5	Padang Laweh	0,08	5.276,83	205,81	1.574,82	128,17	7.185,72
6	Pulau Punjung	8.598,38	24.742,06	4.722,65	4.848,18	936,81	43.848,08
7	Sembilan Koto	32.756,96	11.244,26	2.668,70			46.669,92
8	Sitiung	1.118,14	4.997,51	3.497,56	8.192,73	658,65	18.464,58
9	Sungai Rumbai		7,15	4.424,94	520,52		4.952,60
10	Timpeh	11.864,49	15.994,06	848,44	10,54		28.717,52
11	Tiumang		6.776,75	381,19	3.692,88	259,33	11.110,16
Total		**60.578,34**	**119.731,76**	**76.297,85**	**31.659,05**	**2.943,10**	**291.210,10**

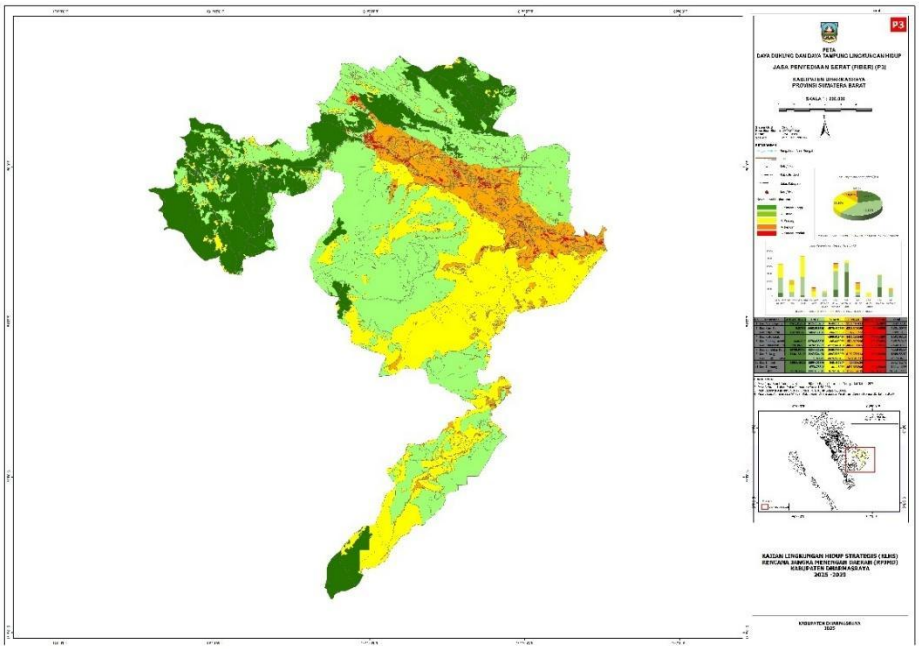
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 23
Jasa Penyediaan Serat (Fiber) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 24
Peta Jasa Penyediaan Serat (Fiber) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

D. Jasa Penyediaan Bahan Bakar (*Fuel*)

Merupakan Kayu bakar dan sumber energi lainnya yang dihasilkan dari ekosistem. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.

Daya dukung penyediaan bahan bakar di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sangat tinggi dengan luas 167.461,64 Ha (57,51%), jika dilihat berdasarkan kecamatan daya dukung penyediaan bahan bakar (*Fuel*) dengan kategori sangat tinggi berada di Kecamatan Koto Besar dengan luas 36.131,10 Ha, Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 34.126,73 Ha, dan Kecamatan Sembilan Koto dengan luas 31.112,86 Ha. Selanjutnya Daya dukung penyediaan bahan bakar kategori tinggi dengan luas 80.294,92 Ha (27,57%),

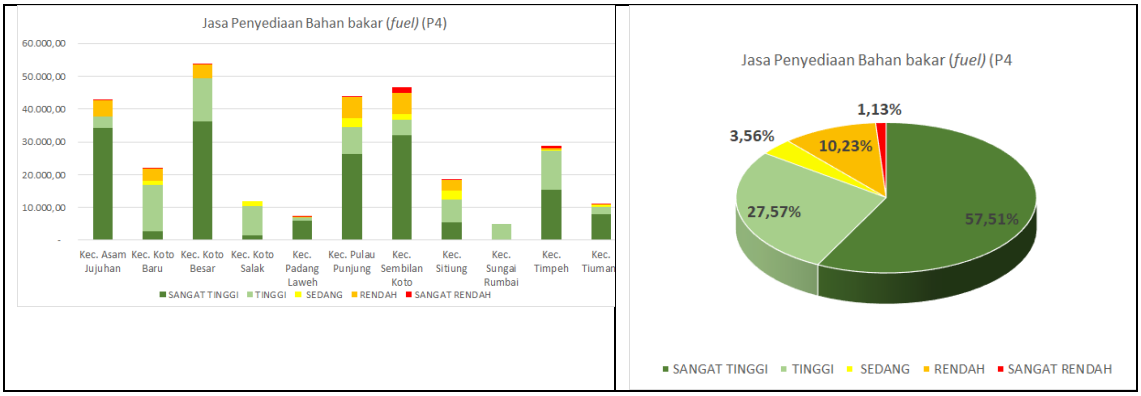
kategori rendah dengan luas 29.781,68 Ha (10,23%), kategori sedang dengan luas 10.378,77 Ha (3,56%) dan kategori sangat rendah dengan luas 3.293,09 Ha (1,13%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 30
Jasa Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	34.126,73	3.669,53	32,42	4.889,37	131,28	42.849,33
2	Koto Baru	2.799,36	14.177,17	1.037,09	3.805,23	2,16	21.821,00
3	Koto Besar	36.131,10	13.221,64	1,55	4.260,22	173,69	53.788,20
4	Koto Salak	1.437,75	9.024,07	1.341,16			11.802,98
5	Padang Laweh	5.890,41	993,42	166,99	47,94	86,96	7.185,72
6	Pulau Punjung	26.215,12	8.335,43	2.592,70	6.544,82	160,01	43.848,08
7	Sembilan Koto	32.112,86	4.719,10	1.558,37	6.481,47	1.798,12	46.669,92
8	Sitiung	5.361,96	7.052,95	2.784,11	3.256,15	9,40	18.464,58
9	Sungai Rumbai	41,81	4.910,79				4.952,60
10	Timpeh	15.310,63	12.083,01	94,06	474,23	755,59	28.717,52
11	Tiumang	8.033,91	2.107,79	770,33	22,25	175,88	11.110,16
Total		167.461,64	80.294,92	10.378,77	29.781,68	3.293,09	**291.210,10**

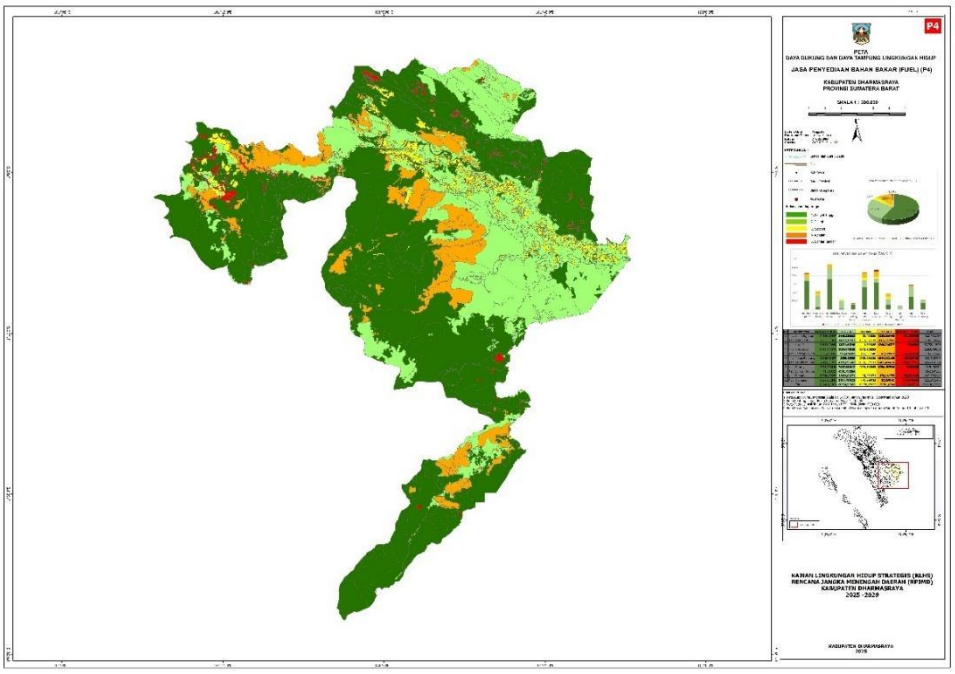
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 25
Jasa Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 26
Peta Penyediaan Bahan Bakar (Fuel) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

E. Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik

Merupakan Flora dan fauna yang menyediakan bahan baku untuk obat-obatan, penelitian, dan industri. Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumberdaya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks.

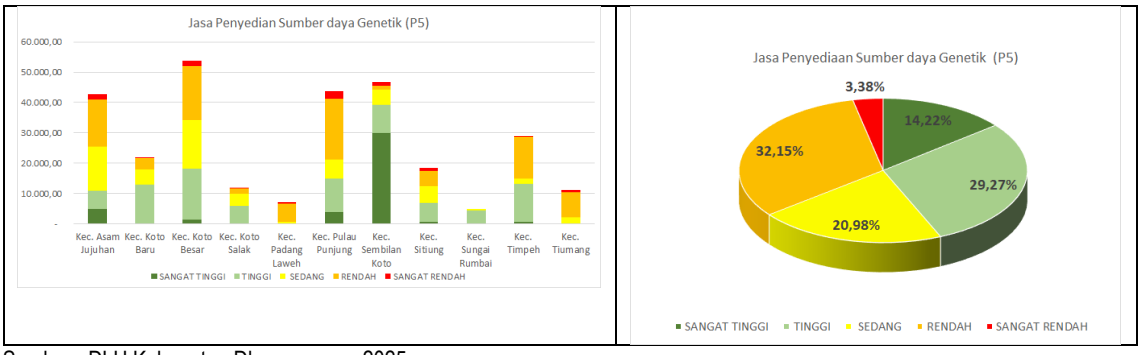
Daya dukung penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori rendah dengan luas 93.619,79 Ha (32,15%), jika dilihat berdasarkan kecamatan daya dukung penyediaan sumber daya genetik kategori rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 20.216,27 Ha. Selanjutnya daya dukung penyediaan sumber daya genetik kategori tinggi dengan luas 85.233,46 Ha (29,27%), kategoru sedang dengan luas 61.088,19 Ha (20,98%), kategori sangat tinggi dengan luas 41.412,59 Ha (14,22%), dan kategori sangat rendah dengan luas 9.856,07 Ha (3,38%).

Tabel 2- 31
Daya Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.974,81	5.913,27	14.433,77	15.585,79	1.941,69	42.849,33
2	Koto Baru	46,98	12.739,36	5.105,27	3.840,24	89,15	21.821,00
3	Koto Besar	1.313,67	16.780,46	16.134,62	17.838,80	1.720,65	53.788,20
4	Koto Salak	25,02	5.776,61	4.031,49	1.760,56	209,31	11.802,98
5	Padang Laweh	1,37	179,65	464,39	6.044,15	496,17	7.185,72
6	Pulau Punjung	3.995,97	11.000,87	6.118,09	20.216,27	2.516,89	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	9.437,70	5.072,03	1.031,15	1.270,25	46.669,92
8	Sitiung	678,78	6.081,89	5.547,10	5.168,98	987,84	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.397,42	550,79			4.952,60
10	Timpeh	512,81	12.722,51	1.702,45	13.772,15	7,60	28.717,52
11	Tiumang		203,73	1.928,19	8.361,70	616,54	11.110,16
Total		**41.412,59**	**85.233,46**	**61.088,19**	**93.619,79**	**9.856,07**	**291.210,10**

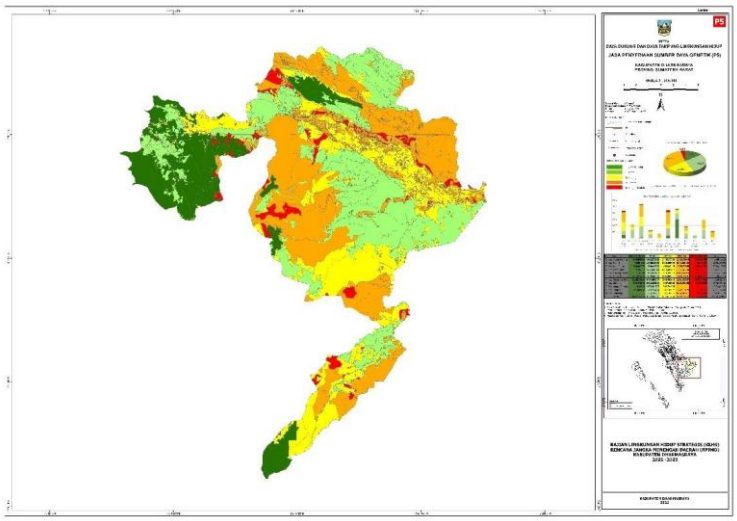
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 27
Jasa Penyediaan Sumber daya Genetik di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 28
Peta Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

3. Jasa Pengaturan

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Jasa pengaturan terdiri dari pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, permurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami (*pollination*) dan pengendalian hama dan penyakit.

A. Jasa Pengaturan Iklim

Merupakan Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon diokasida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Daya dukung pengaturan iklim di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan luas 183.164,67 Ha (62,90%) yang terdapat pada Kecamatan Koto Besar dengan luas 45.965,05 Ha, Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 32.083,77 Ha dan Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 24.069,84 Ha. Selanjutnya daya dukung pengaturan iklim kategori sangat tinggi dengan luas 45.024,76 Ha (15,46%), kategori rendah dengan luas 28.437,63 Ha (9,77%), kategori sedang dengan luas 26.120,82 Ha (8,97%) dan kategori sangat rendah dengan luas 8.462,22 Ha (2,91%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

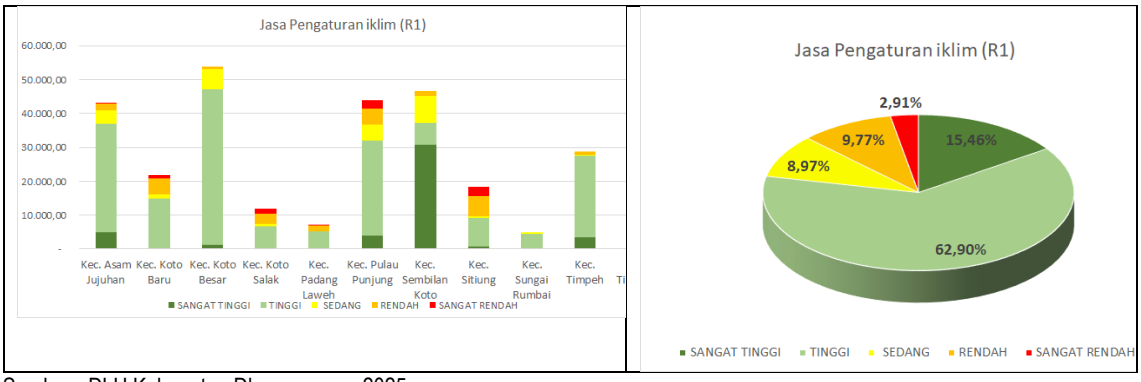
Tabel 2- 32
Jasa Pengaturan Iklim Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.987,31	32.083,77	3.921,34	1.850,52	6,38	42.849,33
2	Koto Baru		14.845,73	1.385,86	4.527,51	1.061,90	21.821,00
3	Koto Besar	1.247,90	45.965,05	5.875,47	699,78		53.788,20
4	Koto Salak		6.726,33	813,57	2.913,97	1.349,11	11.802,98
5	Padang Laweh		5.300,37	10,97	1.652,68	221,70	7.185,72
6	Pulau Punjung	3.955,84	27.963,50	4.922,89	4.686,56	2.319,29	43.848,08

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
7	Sembilan Koto	30.783,98	6.430,94	8.041,33	1.413,66		46.669,92
8	Sitiung	666,26	8.607,68	314,59	6.147,14	2.728,91	18.464,58
9	Sungai Rumbai		4.389,79	562,82			4.952,60
10	Timpeh	3.383,48	24.069,84	236,19	1.028,02		28.717,52
11	Tiumang		6.781,67	35,78	3.517,79	774,92	11.110,16
Total		**45.024,76**	**183.164,67**	**26.120,82**	**28.437,63**	**8.462,22**	**291.210,10**

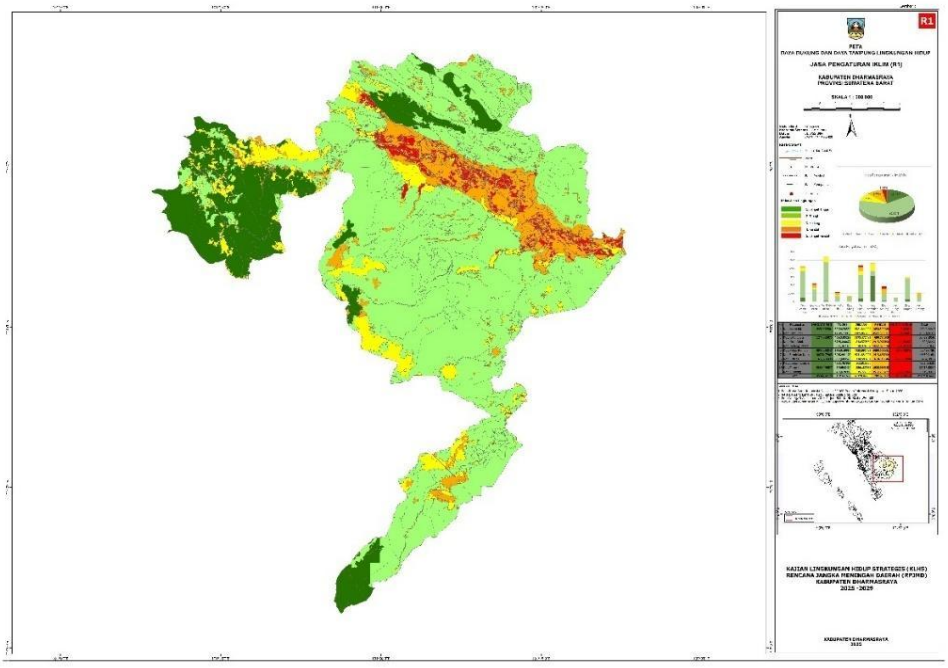
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 29
Jasa Pengaturan Iklim di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 30
Peta Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

B. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Merupakan Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

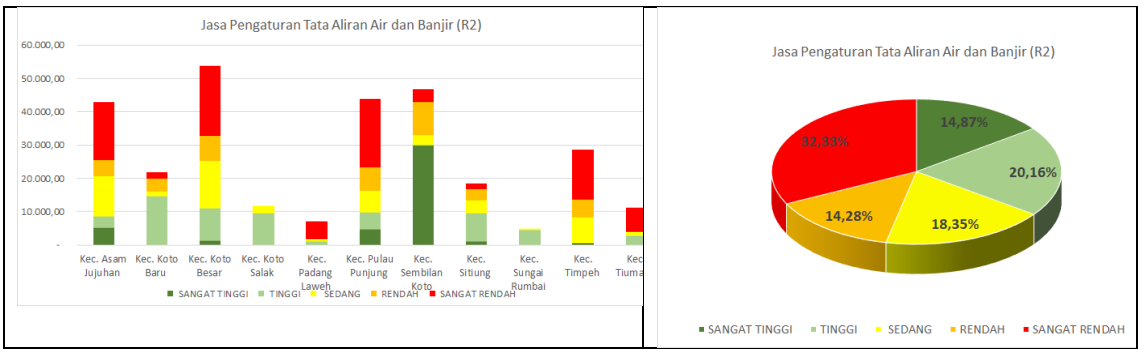
Daya dukung pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Dharmasraya Sebagian berada pada kategori sangat rendah dengan luas 94.153,54 Ha (32,33%), jika dilihat berdasarkan kecamatan daya dukung pengaturan tata aliran air dan banjir sangat rendah berada di Kecamatan Koto Besar dengan luas 21.093,63 Ha, Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 20.529,50 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 17.367,02 Ha. Selanjutnya jasa pengaturan tata aliran air dan banjir kategori tinggi dengan luas 58.716,53 ha (20,16%), kategori sedang dengan luas 53.431,69 Ha.

Tabel 2- 33
Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.151,45	3.483,81	12.008,89	4.838,15	17.367,02	42.849,33
2	Koto Baru	189,88	14.514,28	1.276,55	3.810,31	2.029,98	21.821,00
3	Koto Besar	1.319,24	9.648,26	14.323,88	7.403,19	21.093,63	53.788,20
4	Koto Salak	158,30	9.374,68	2.270,00			11.802,98
5	Padang Laweh	134,28	1.018,92	612,71	53,99	5.365,82	7.185,72
6	Pulau Punjung	4.694,50	5.046,23	6.507,43	7.070,42	20.529,50	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	247,27	2.898,17	9.944,82	3.720,87	46.669,92
8	Sitiung	1.087,48	8.392,20	3.900,10	3.316,20	1.768,60	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.355,12	593,09			4.952,60
10	Timpeh	515,75	56,49	7.801,77	5.138,95	15.204,57	28.717,52
11	Tiumang	196,00	2.579,26	1.239,10	22,25	7.073,55	11.110,16
Total		**43.310,06**	**58.716,53**	**53.431,69**	**41.598,28**	**94.153,54**	**291.210,10**

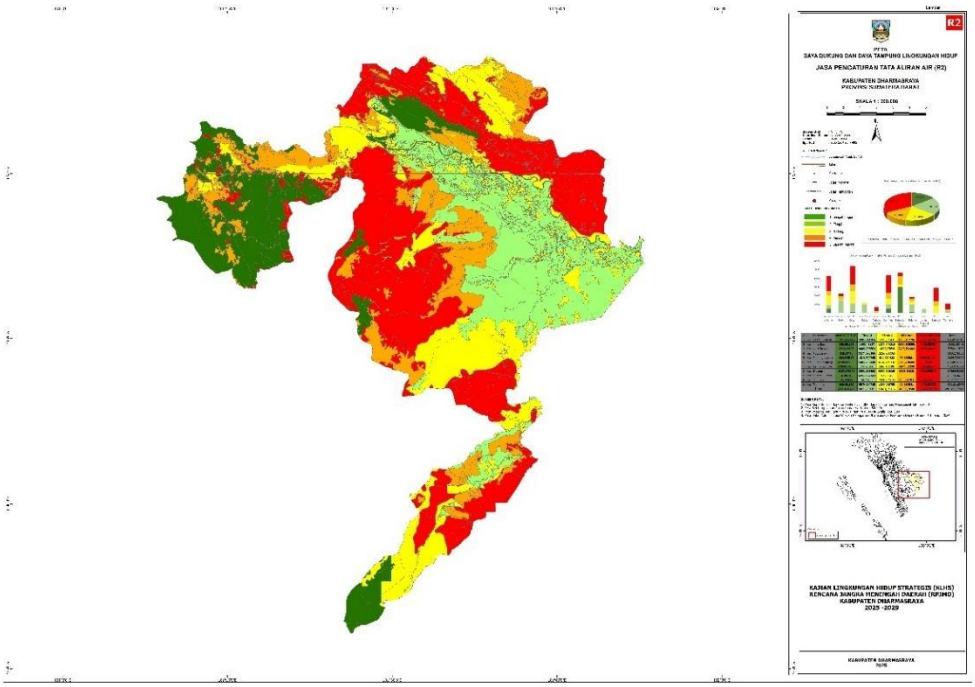
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 31
Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 32
Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

C. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

Merupakan Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan

bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

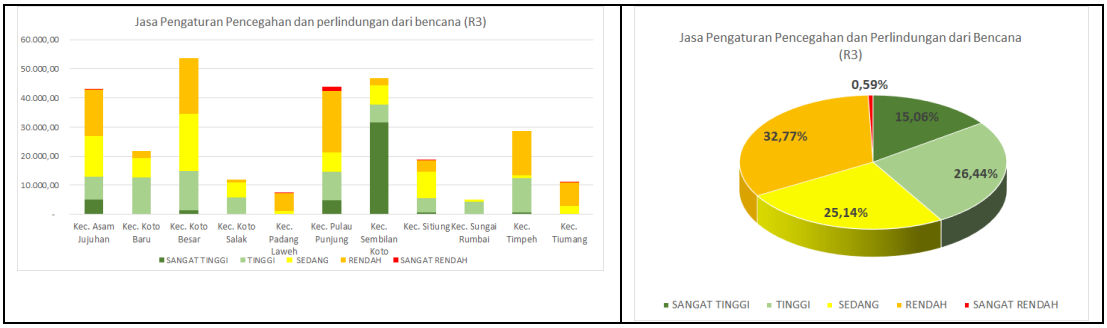
Daya dukung jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari Bencana di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori rendah dengan luas 95.420,24 Ha (32,77%), jika dilihat berdasarkan kecamatan daya dukung rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 21.141,12 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 19.372,99 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 15.865,99 Ha. Selanjutnya Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana dengan kategori tinggi dengan luas 77.006,36 Ha (26,44%), kategori sedang dengan luas 73.204,22 Ha (25,14%), kategori sangat tinggi dengan luas 43.863,17 Ha (15,06%) dan kategori sangat rendah dengan luas 1.716,12 Ha (0,59%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2- 34
Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.988,31	7.949,79	14.040,27	**15.865,99**	**4,97**	42.849,33
2	Koto Baru		12.630,91	6.533,14	**2.656,95**		21.821,00
3	Koto Besar	1.247,90	13.670,54	19.496,77	**19.372,99**		53.788,20
4	Koto Salak		5.661,16	5.151,49	**990,33**		11.802,98
5	Padang Laweh		45,64	1.184,77	**5.916,63**	**38,69**	7.185,72
6	Pulau Punjung	4.890,67	9.633,78	6.633,26	**21.141,12**	**1.549,25**	43.848,08
7	Sembilan Koto	31.554,28	6.159,05	6.719,29	**2.237,30**		46.669,92
8	Sitiung	669,20	4.892,60	9.060,51	**3.840,19**	**2,07**	18.464,58
9	Sungai Rumbai		4.359,51	593,09			4.952,60
10	Timpeh	512,81	12.003,17	989,39	**15.212,15**	**0,01**	28.717,52
11	Tiumang		0,21	2.802,22	**8.186,59**	**121,13**	11.110,16
Total		**43.863,17**	**77.006,36**	**73.204,22**	**95.420,24**	**1.716,12**	**291.210,10**

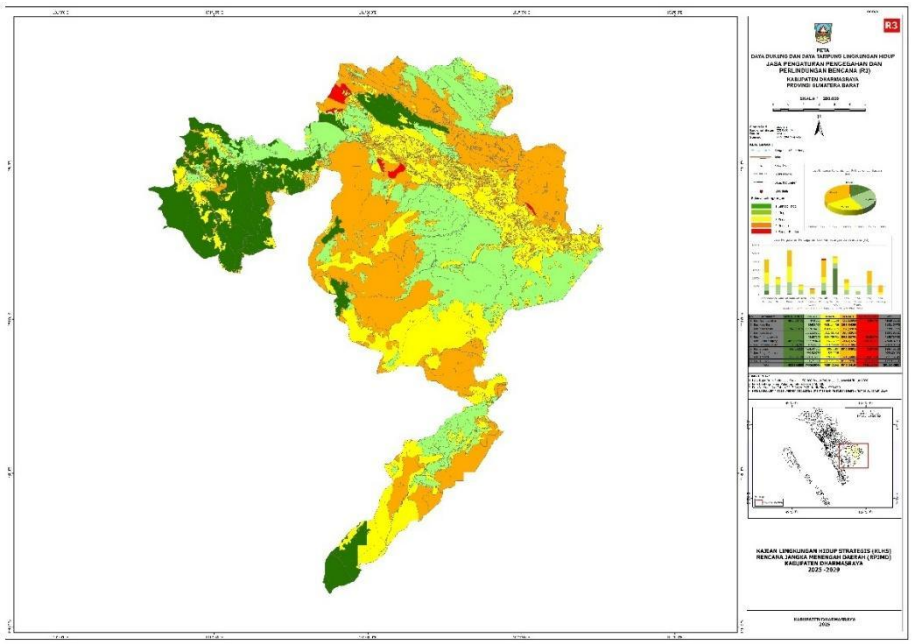
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 33
Jasa Pengaturan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 34
Peta Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

D. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

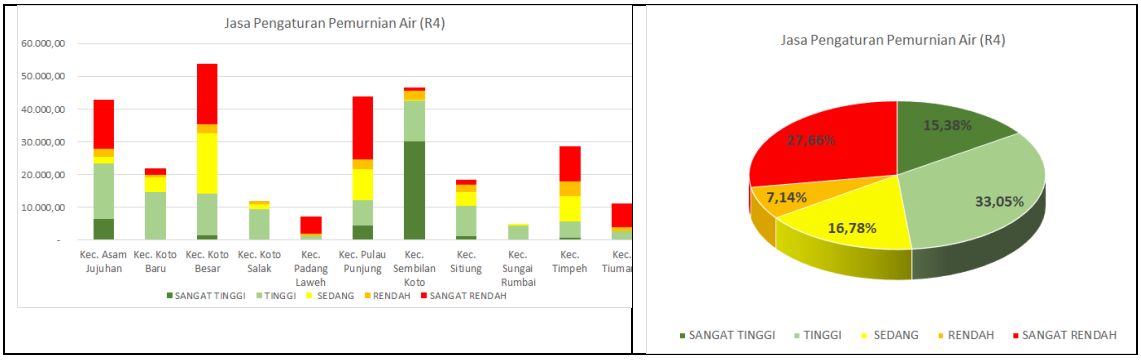
Merupakan Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar. Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurniah air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Tabel 2- 35
Jasa Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	6.411,87	17.061,21	2.005,63	2.488,11	14.882,51	42.849,33
2	Koto Baru	203,54	14.483,92	4.478,87	661,39	1.993,29	21.821,00
3	Koto Besar	1.437,52	12.710,27	18.545,22	2.750,68	18.344,50	53.788,20
4	Koto Salak	158,30	9.374,68	1.283,46	986,53		11.802,98
5	Padang Laweh	175,17	978,03	50,22	612,71	5.369,59	7.185,72
6	Pulau Punjung	4.432,12	7.707,25	9.575,30	2.942,34	19.191,06	43.848,08
7	Sembilan Koto	30.106,06	12.513,01	329,98	2.611,85	1.109,02	46.669,92
8	Sitiung	1.064,91	9.393,70	4.150,92	2.207,18	1.647,87	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.355,12	593,09			4.952,60
10	Timpeh	572,24	5.105,41	7.827,04	4.285,20	10.927,64	28.717,52
11	Tiumang	217,72	2.557,55	22,25	1.239,10	7.073,55	11.110,16
Total		**44.783,83**	**96.240,15**	**48.862,00**	**20.785,08**	**80.539,04**	**291.210,10**

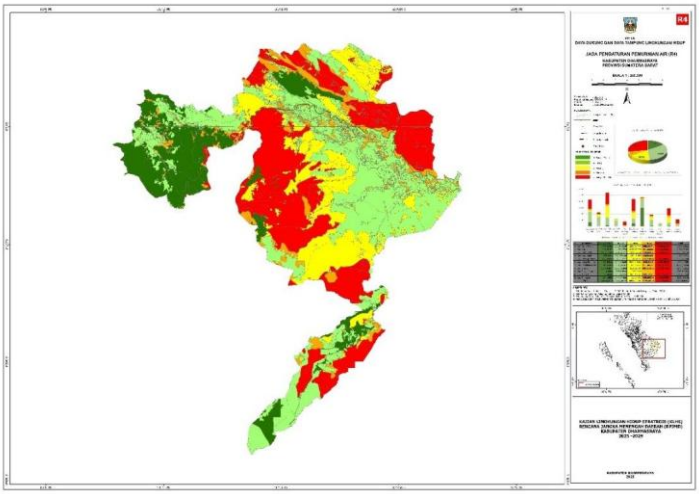
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 35
Jasa Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 36
Peta Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

E. Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah

Merupakan Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Jasa ekosistem/jasa lingkungan meliputi kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.

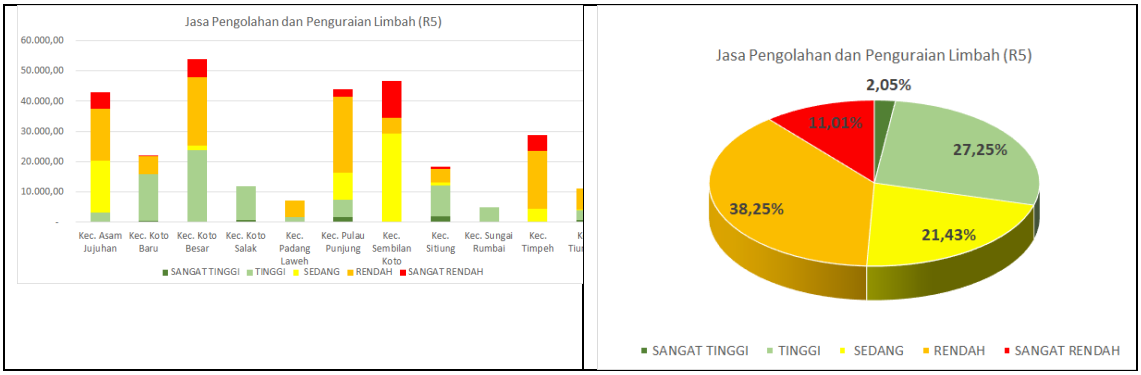
Daya dukung jasa pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori rendah dengan luas 111.396,47 Ha (38,25%), berdasarkan kecamatan daya dukung kategori rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 25.128,69 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 22.573,06 Ha dan Kecamatan Timpeh dengan luas 18.951,80 Ha. Sedangkan daya dukung pengolahan dan penguraian limbah kategori tinggi dengan luas 79.356,07 Ha (27,25%), kategori sedang dengan luas 62.411,23 Ha (21,43%), kategori sangat rendah dengan luas 32.069,67 Ha (11,01%) dan kategori sangat tinggi dengan luas 5.976,67 Ha (2,05%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 36
Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	13,74	3.193,50	17.254,20	16.963,36	5.424,53	42.849,33
2	Koto Baru	600,22	15.366,83	13,66	5.803,60	36,69	21.821,00
3	Koto Besar	69,43	23.844,73	1.377,21	22.573,06	5.923,77	53.788,20
4	Koto Salak	689,50	11.113,48				11.802,98
5	Padang Laweh	153,52	1.587,07	99,06	5.346,08		7.185,72
6	Pulau Punjung	1.786,77	5.671,43	8.826,19	25.128,69	2.435,00	43.848,08
7	Sembilan Koto			29.264,88	5.303,94	12.101,09	46.669,92
8	Sitiung	2.024,46	10.240,10	896,12	4.373,53	930,37	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.948,22				4.952,60
10	Timpeh	2,94	8,27	4.536,31	18.951,80	5.218,20	28.717,52
11	Tiumang	631,70	3.382,45	143,60	6.952,42		11.110,16
Total		**5.976,67**	**79.356,07**	**62.411,23**	**111.396,47**	32.069,67	**291.210,10**

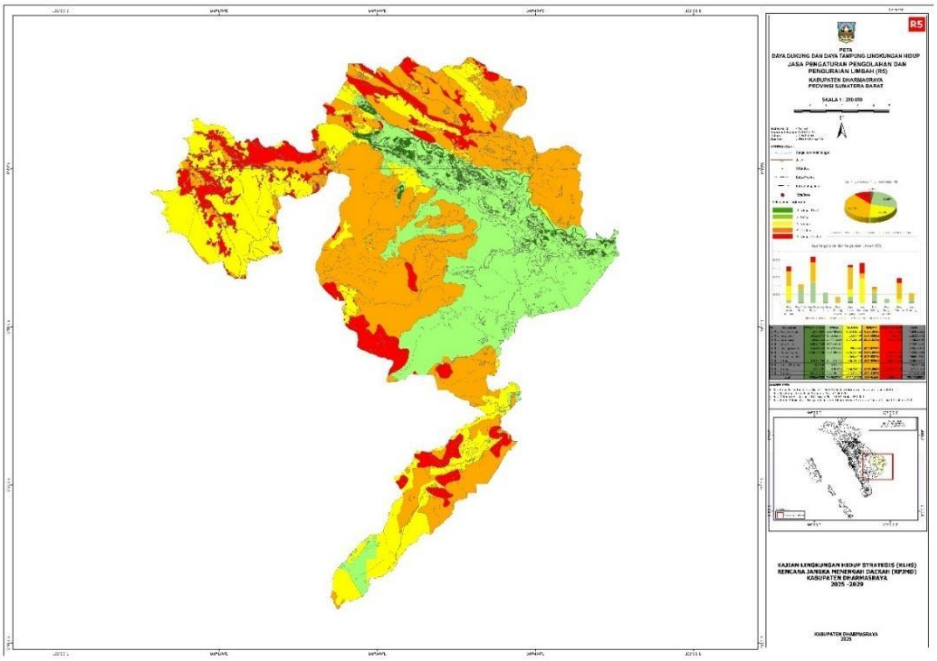
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 37
Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 38
Peta Jasa Pengolahan dan Penguraian Limbah Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

F. Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara

Merupakan Kapasitas mengatur sistem kimia udara. Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang,

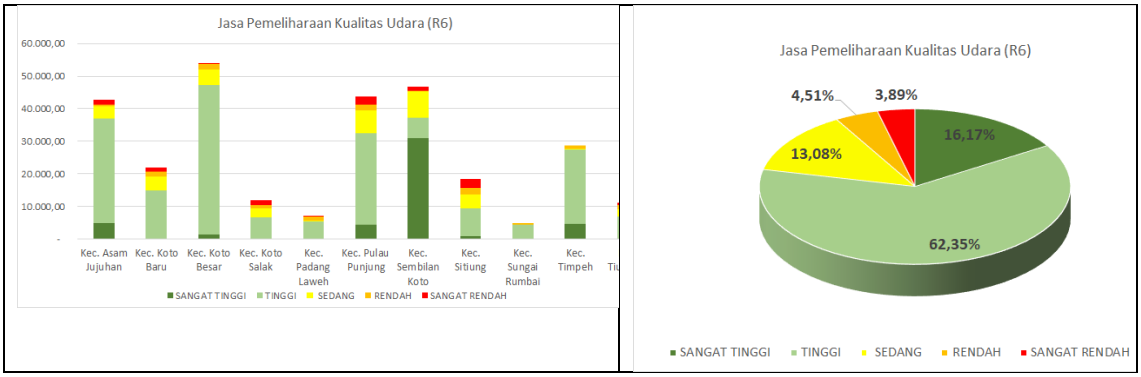
semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Tabel 2- 37
Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.987,31	32.083,77	3.679,83	571,22	1.527,20	42.849,33
2	Koto Baru		14.826,02	4.278,22	1.654,87	1.061,90	21.821,00
3	Koto Besar	1.247,90	45.965,05	4.842,36	1.718,81	14,08	53.788,20
4	Koto Salak		6.710,65	2.764,93	978,29	1.349,11	11.802,98
5	Padang Laweh		5.300,37	356,82	1.306,83	221,70	7.185,72
6	Pulau Punjung	4.337,12	28.068,28	7.015,08	1.891,23	2.536,37	43.848,08
7	Sembilan Koto	31.030,26	6.181,43	8.038,50	309,13	1.110,59	46.669,92
8	Sitiung	835,21	8.458,39	4.394,43	2.047,64	2.728,91	18.464,58
9	Sungai Rumbai		4.389,79		562,82		4.952,60
10	Timpeh	4.637,19	22.816,13	236,19	1.028,02		28.717,52
11	Tiumang		6.781,67	2.474,95	1.078,61	774,92	11.110,16
Total		**47.074,99**	**181.581,55**	**38.081,32**	**13.147,46**	**11.324,78**	**291.210,10**

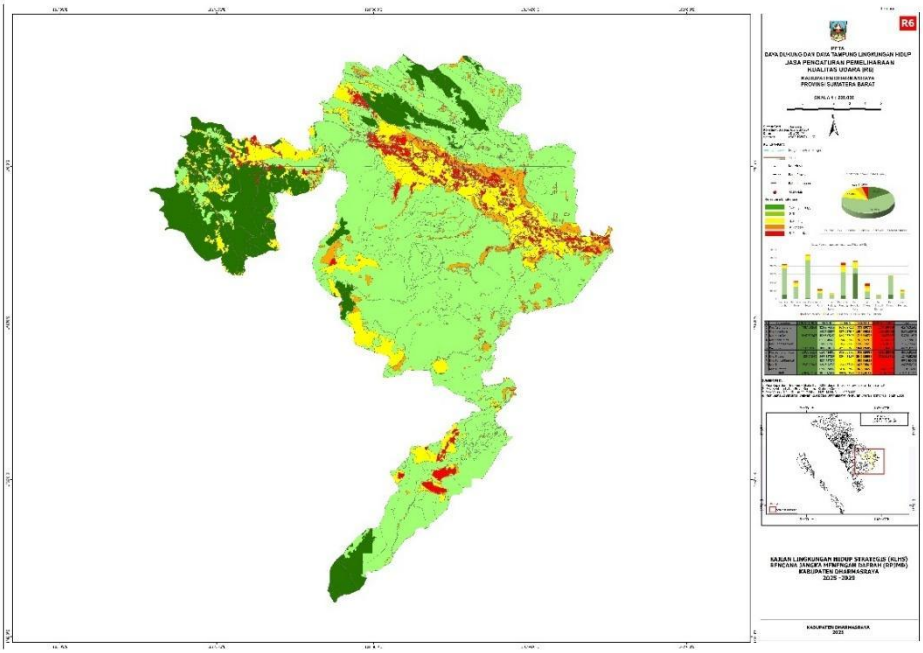
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 39
Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 40
Peta Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

G. Jasa Pengaturan penyerbukan alami (*pollination*)

Merupakan Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami. Penyerbukan alami (pollination) adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.

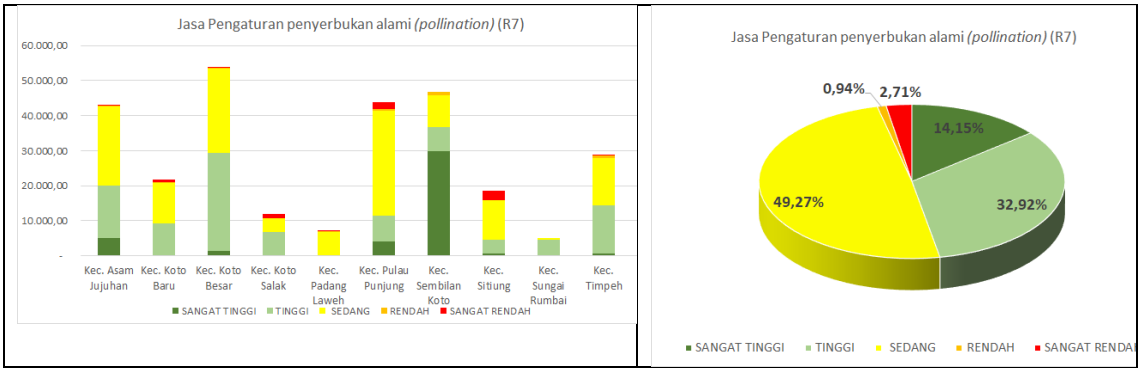
Daya dukung jasa pengaturan penyerbukan alami sebagian besar berada pada kategori sedang dengan luas 143.491,51 Ha (49,27%), berdasarkan kecamatan daya dukung dengan kategori sedang terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 30.022,71 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 24.163, 41 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 22.709,42 Ha. Sedangkan Daya dukung jasa pengaturan penyerbukan alami kategori tinggi dengan luas 95.867,35 Ha (32,92%), kategori sangat tinggi dengan luas 41.211,46 Ha (14,15%), kategori sangat rendah dengan luas 7.898,49 Ha (2,71%) dan kategori rendah dengan luas 2.741,28 Ha (0,94%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 38
Jasa Pengaturan penyerbukan alami (pollination) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.969,88	14.965,22	22.709,42	203,25	1,56	42.849,33
2	Koto Baru		9.314,05	11.544,94	41,67	920,35	21.821,00
3	Koto Besar	1.247,90	28.091,19	24.163,41	282,04	3,65	53.788,20
4	Koto Salak		6.750,91	3.839,17	10,94	1.201,95	11.802,98
5	Padang Laweh		37,57	6.795,80	109,31	243,04	7.185,72
6	Pulau Punjung	3.955,84	7.474,02	30.022,71	423,49	1.972,03	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	6.957,32	9.109,72	744,08		46.669,92
8	Sitiung	666,26	3.985,63	11.161,09	6,58	2.645,02	18.464,58
9	Sungai Rumbai		4.427,70	524,90			4.952,60
10	Timpeh	512,81	13.823,03	13.634,92	743,82	2,94	28.717,52
11	Tiumang		40,70	9.985,42	176,09	907,95	11.110,16
Total		**41.211,46**	**95.867,35**	**143.491,51**	**2.741,28**	7.898,49	**291.210,10**

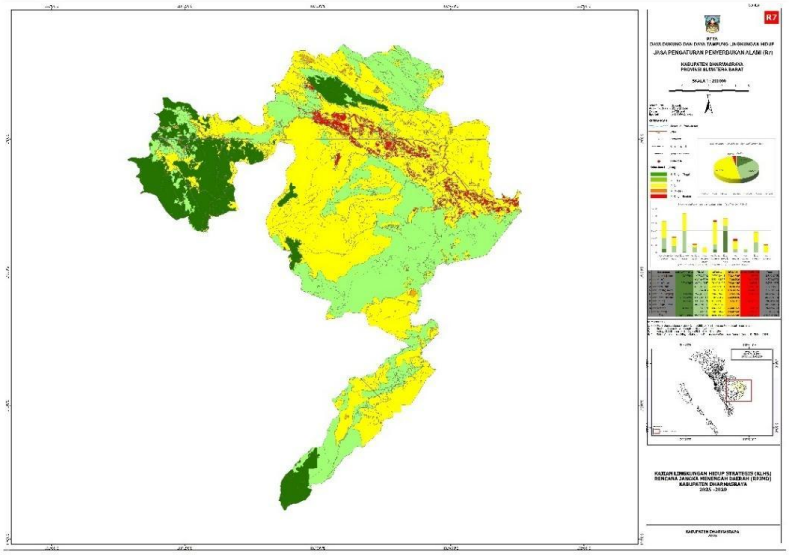
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 41
Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 42
Peta Jasa Pengaturan penyerbukan alami (pollination) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

H. Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit

Merupakan Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.

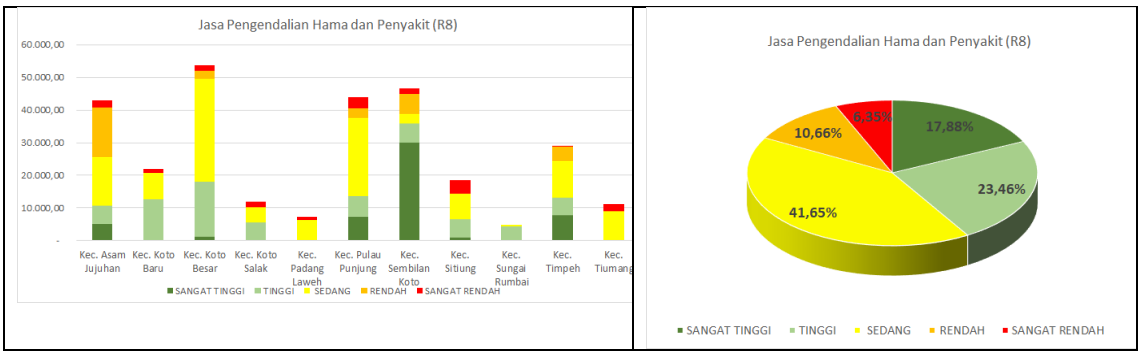
Daya dukung jasa pengendalian hama dan penyakit di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sedang dengan luas 121.280,55 Ha (41,65%), berdasarkan kecamatan daya dukung pengendalian hama dan penyakit dengan kategori sedang berada pada Kecamatan Koto Besar dengan luas 31.271,50 Ha, Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 23.914,19 Ha, dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 15.063,72 Ha. Sedangkan daya dukung jasa pengendalian hama dan penyakit kategori tinggi dengan luas 68.319,24 Ha (23,46%), kategori sangat tinggi dengan luas 52.064,26 Ha (17,88%), kategori rendah dengan luas 31.048,97 Ha (10,66%) dan kategori sangat rendah dengan luas 18.497,08 ha (6,35%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 39
Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	4.969,88	5.646,27	15.063,72	15.182,60	1.986,87	42.849,33
2	Koto Baru	52,29	12.580,67	7.973,52	36,69	1.177,84	21.821,00
3	Koto Besar	1.288,43	16.619,88	31.721,50	2.426,64	1.731,74	53.788,20
4	Koto Salak	1,05	5.628,75	4.520,19		1.653,00	11.802,98
5	Padang Laweh	0,08	29,59	6.363,92		792,12	7.185,72
6	Pulau Punjung	7.164,71	6.559,26	23.914,19	2.904,29	3.305,62	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.889,99	5.929,53	3.034,28	6.056,27	1.759,84	46.669,92
8	Sitiung	950,58	5.574,02	7.747,94	121,05	4.070,99	18.464,58
9	Sungai Rumbai	7,15	4.347,97	597,48			4.952,60
10	Timpeh	7.740,11	5.367,51	11.277,93	4.321,43	10,55	28.717,52
11	Tiumang		35,78	9.065,88		2.008,50	11.110,16
Total		**52.064,26**	**68.319,24**	**121.280,55**	**31.048,97**	18.497,08	**291.210,10**

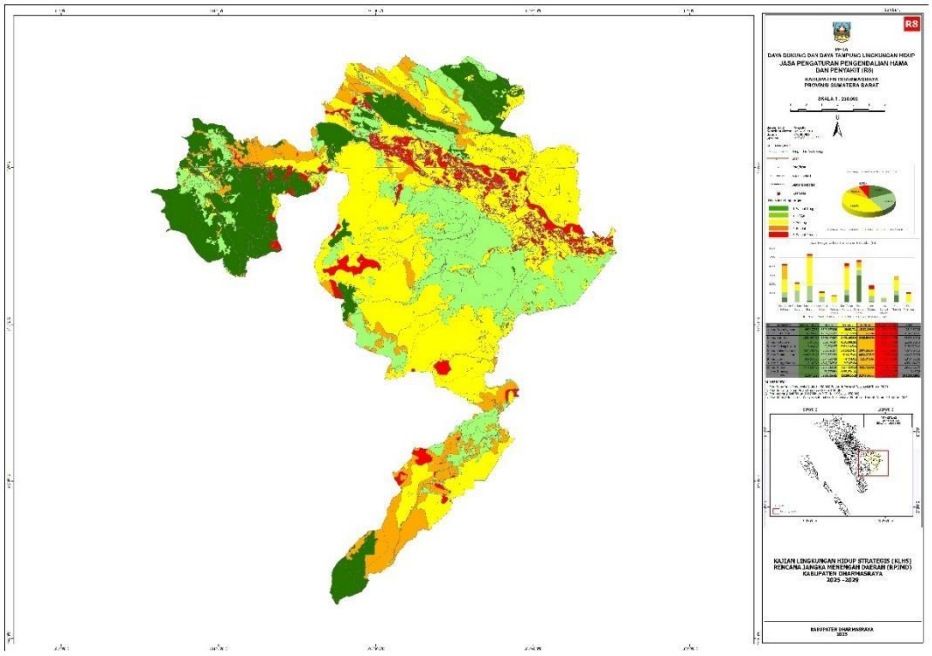
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 43
Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 44
Peta Jasa Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

4. Jasa Budaya

Jasa ekosistem budaya adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan

budaya tersebut. Jasa ekosistem budaya ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung.

A. Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (*sense of place*)

Merupakan Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, "kampung halaman" yang punya nilai sentimental. Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem/jasa lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

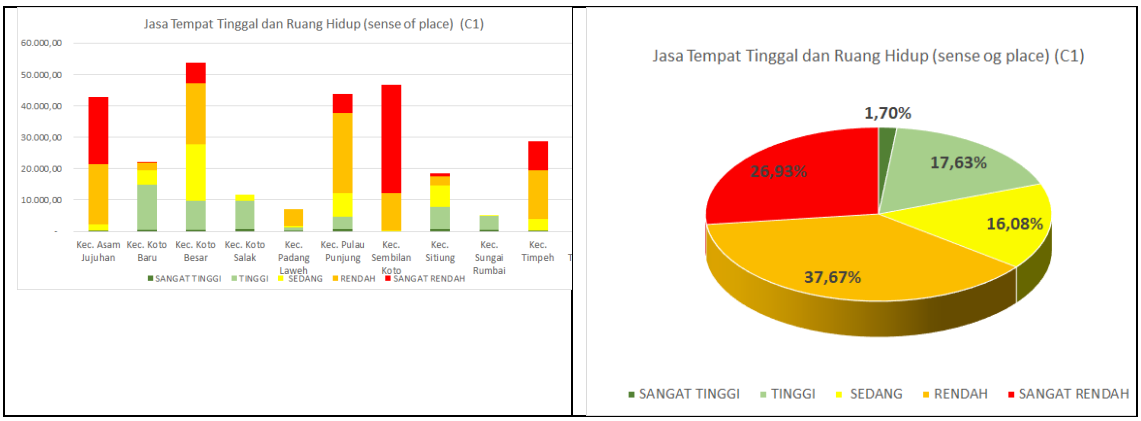
Daya dukung jasa tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori rendah dengan luas 109.689,20 Ha (37,67%), berdasarkan kecamatan Daya dukung jasa tempat tinggal dan ruang hidup kategori rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 25.644,97 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 19.432,13 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 19.409,46 Ha. Selanjutnya Daya dukung jasa tempat tinggal dan ruang hidup kategori sangat rendah dengan luas 78.421,58 ha (26,93%), kategori tinggi dengan luas 51.377,44 Ha (17,63%), kategori sedang dengan luas 46.812,45 Ha (16,08%) dan kategori sangat tinggi dengan luas 4.949,43 Ha (1,70%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 40
Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	196,06	41,44	1.852,80	19.409,46	21.349,56	42.849,33
2	Koto Baru	546,22	14.278,83	4.669,07	2.290,18	36,69	21.821,00
3	Koto Besar	604,63	9.224,22	17.951,62	19.432,13	6.575,60	53.788,20
4	Koto Salak	701,28	9.123,14	1.978,56			11.802,98
5	Padang Laweh	154,18	992,76	680,91	5.357,88		7.185,72
6	Pulau Punjung	804,82	3.792,59	7.559,88	25.644,97	6.045,82	43.848,08
7	Sembilan Koto	5,30	117,94	19,56	12.127,56	34.399,55	46.669,92
8	Sitiung	636,10	7.171,66	6.865,51	2.931,57	859,74	18.464,58
9	Sungai Rumbai	520,52	4.397,42	34,66			4.952,60
10	Timpeh	349,69	0,00	3.637,43	15.575,79	9.154,61	28.717,52
11	Tiumang	430,63	2.197,43	1.562,44	6.919,66		11.110,16
Total		**4.949,43**	**51.337,44**	**46.812,45**	**109.689,20**	**78.421,58**	**291.210,10**

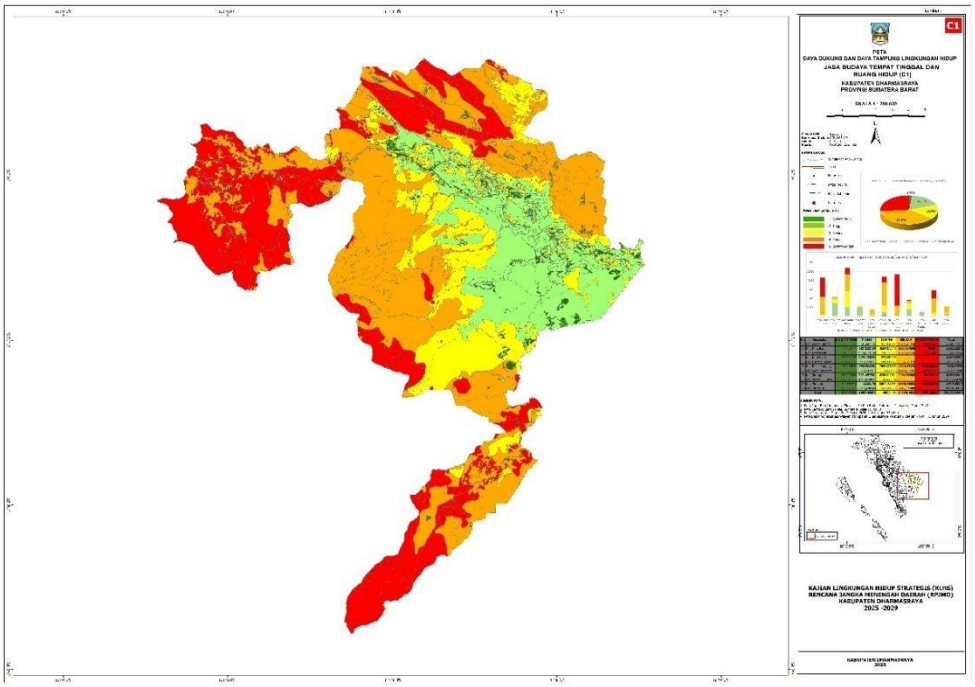
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 45
Jasa *Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) di Kabupaten Dharmasraya*



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 46
Peta Jasa Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (sense of place) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

B. Jasa Rekreasi dan Ecotourism

Merupakan Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa

negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ecotourism.

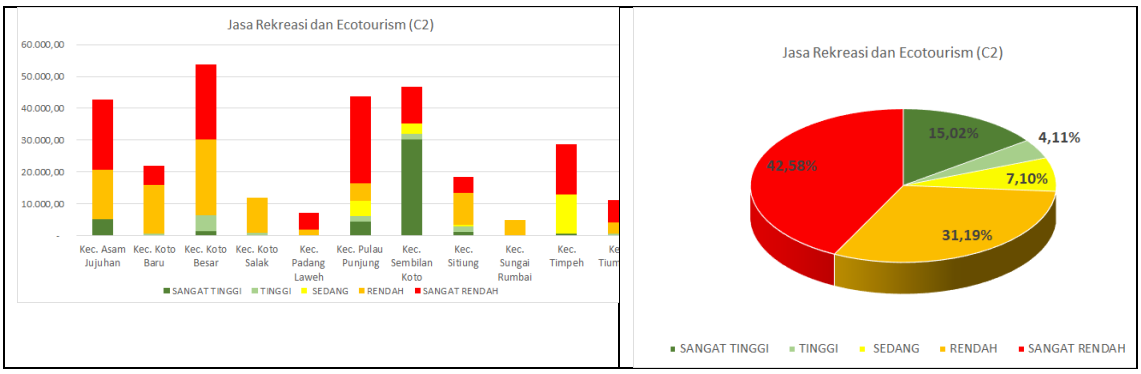
Daya dukung jasa Jasa Rekreasi dan Ecotourism di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sangat rendah dengan luas 123.992,86 Ha (42,58%), berdasarkan kecamatan Daya dukung jasa Jasa Rekreasi dan Ecotourism sangat rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 27.548,78 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 23.552,13 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 22.175,64 Ha. Selanjutnya Daya dukung jasa Jasa Rekreasi dan Ecotourism kategori rendah dengan luas 90.834,78 Ha (31,19%), kategori sangat tinggi dengan luas 43.736,80 Ha (15,02%), kategori sedang dengan luas 11.972,55 Ha (7,10%) dan kategori tinggi dengan luas 11.972,55 Ha (4,11%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2- 41
Jasa Rekreasi dan Ecotourism Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.217,38	17,44		15.438,88	22.175,64	42.849,33
2	Koto Baru	203,54	517,87	5,08	15.259,30	5.835,22	21.821,00
3	Koto Besar	1.433,56	4.974,08		23.828,43	23.552,13	53.788,20
4	Koto Salak	158,30	586,50		11.058,17		11.802,98
5	Padang Laweh	175,17	27,78	2,28	1.562,97	5.417,53	7.185,72
6	Pulau Punjung	4.432,12	1.820,57	4.670,91	5.375,70	27.548,78	43.848,08
7	Sembilan Koto	30.257,48	1.720,61	3.181,06		11.510,77	46.669,92
8	Sitiung	1.064,91	1.829,08	449,63	10.036,83	5.084,13	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	7,15		4.941,07		4.952,60
10	Timpeh	572,24		12.364,16	8,27	15.772,86	28.717,52
11	Tiumang	217,72	471,47		3.325,17	7.095,80	11.110,16
Total		**43.736,80**	**11.972,55**	**20.673,11**	**90.834,78**	**123.992,86**	**291.210,10**

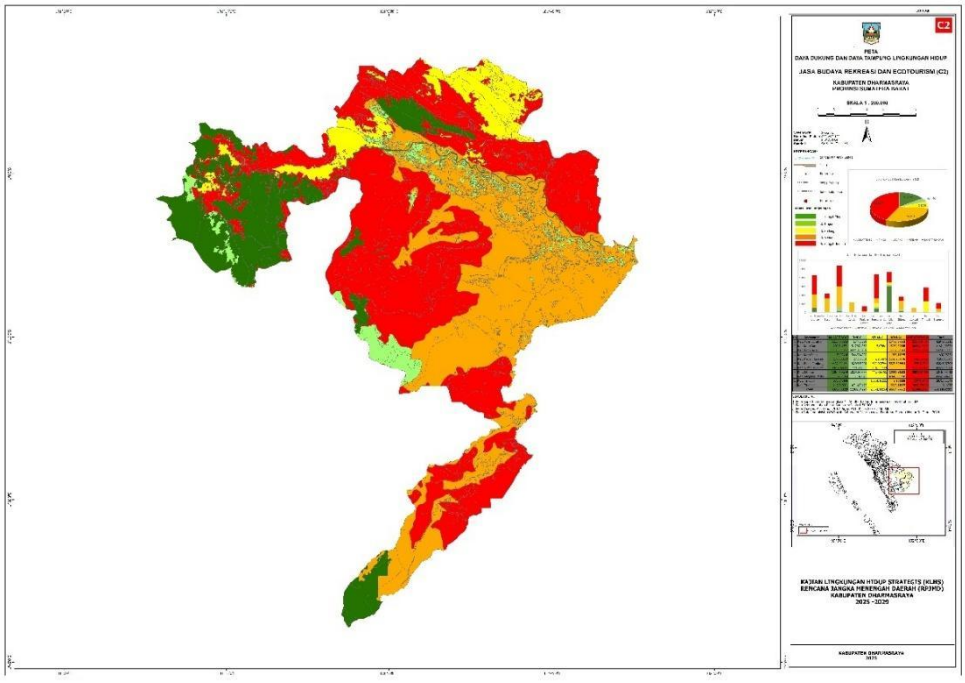
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 47
Jasa Rekreasi dan Ecotourism Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 48
Peta Jasa Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

C. Jasa Estetika

Merupakan Keindahan alam yang memiliki nilai jual. Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang

budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.

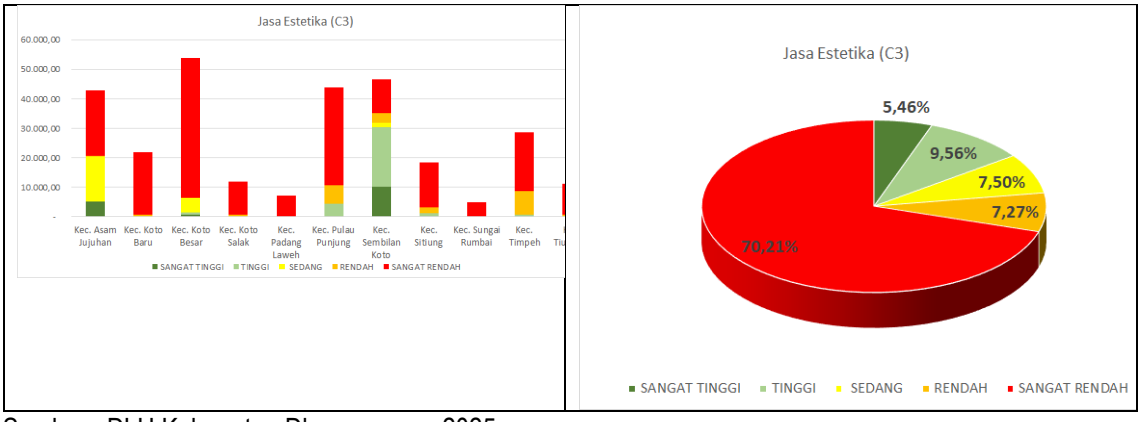
Daya dukung jasa estetika di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sangat rendah dengan luas 204.453,83 Ha (70,21%), berdasarkan kecamatan daya dukung estetika sangat rendah berada di Kecamatan Koto Besar dengan luas 47.385,60 Ha, Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 33.171,70 Ha, dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 22.327,97 Ha. Selanjutnya daya dukung jasa estetika kategori tinggi dengan luas 27.832,56 Ha (9,56%), kategori sedang dengan luas 21.844,17 Ha (7,50%), kategori rendah dengan luas 21.177,33 Ha (7,27%) dan Katgeori sangat tinggi dengan luas 15.902,21 Ha (5,46%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2- 42
Jasa Estetika Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.139,71	95,11	15.162,96	123,59	22.327,97	42.849,33
2	Koto Baru		201,18		429,40	21.190,42	21.821,00
3	Koto Besar	577,00	845,39	4.955,74	24,46	47.385,60	53.788,20
4	Koto Salak	3,11	154,11		563,42	11.082,34	11.802,98
5	Padang Laweh		175,17		23,01	6.987,55	7.185,72
6	Pulau Punjung	95,58	4.336,54		6.244,26	33.171,70	43.848,08
7	Sembilan Koto	10.086,80	20.165,81	1.725,47	3.112,79	11.579,04	46.669,92
8	Sitiung		1.064,91		2.089,56	15.310,11	18.464,58
9	Sungai Rumbai		4,39			4.948,22	4.952,60
10	Timpeh		572,24		8.131,14	20.014,14	28.717,52
11	Tiumang		217,72		435,70	10.456,75	11.110,16
Total		**15.902,21**	**27.832,56**	**21.844,17**	21.177,33	204.453,83	**291.210,10**

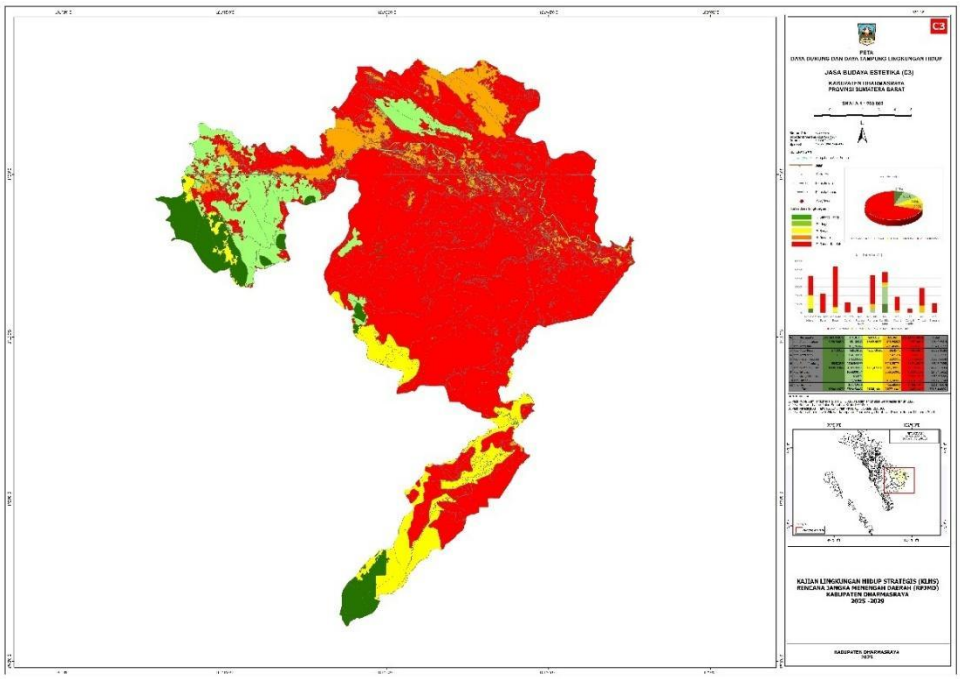
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 49
Jasa Estetika Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 50
Peta Jasa Budaya Estetika Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

5. Jasa Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya.

A. Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci kerberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.

Daya dukung Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan di Kabupaten Dharmasraya sebagian berada pada kategori sangat tinggi dengan luas 102.904,39 Ha (35,34%), berdasarkan kecamatan Daya

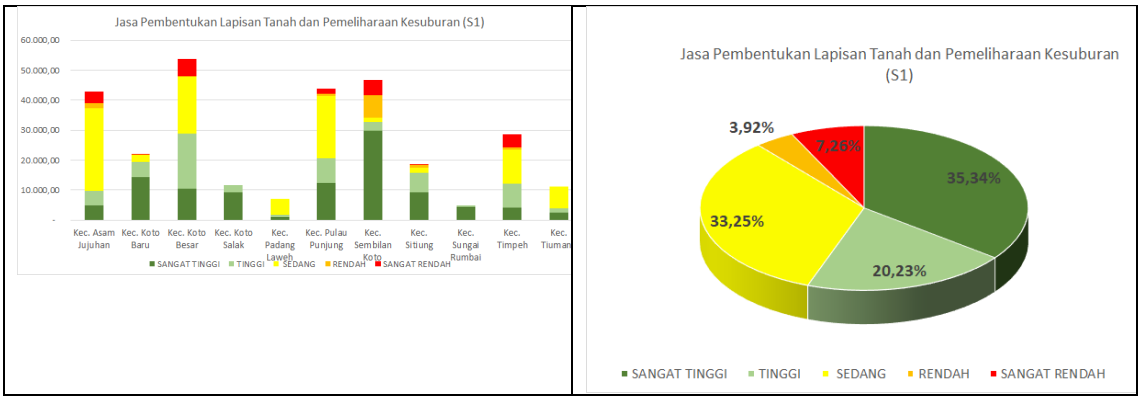
dukung Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan sangat tinggi berada di Kecamatan Sembilan Koto dengan luas 29.890,56 Ha, Kecamatan Koto Baru dengan luas 14.435,52 Ha dan Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 12.423,63 Ha. Selanjutnya Daya dukung Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan kategori sedang dengan luas 96.830,38 Ha (33,25%), kategori tinggi 58.915,31 Ha (20,23%), kategori sangat rendah 21.131,52 Ha (7,26%) dan kategori rendah dengan luas 11.428,49 Ha (3,92%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 43
Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.006,20	4.649,44	27.755,24	1.491,86	3.946,59	42.849,33
2	Koto Baru	14.435,52	5.056,45	2.292,34		36,69	21.821,00
3	Koto Besar	10.477,99	18.384,61	19.000,18	60,54	5.864,87	53.788,20
4	Koto Salak	9.374,20	2.428,78				11.802,98
5	Padang Laweh	937,71	806,94	5.441,07			7.185,72
6	Pulau Punjung	12.423,63	8.151,30	20.783,27	878,62	1.611,27	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.890,56	2.875,48	1.427,71	7.402,68	5.073,49	46.669,92
8	Sitiung	9.268,29	6.511,79	1.753,80	809,97	120,72	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4.355,12	597,48				4.952,60
10	Timpeh	4.181,93	7.991,66	11.281,24	784,82	4.477,88	28.717,52
11	Tiumang	2.553,24	1.461,39	7.095,54			11.110,16
Total		**102.904,39**	**58.915,31**	**96.830,38**	11.428,49	21.131,52	**291.210,10**

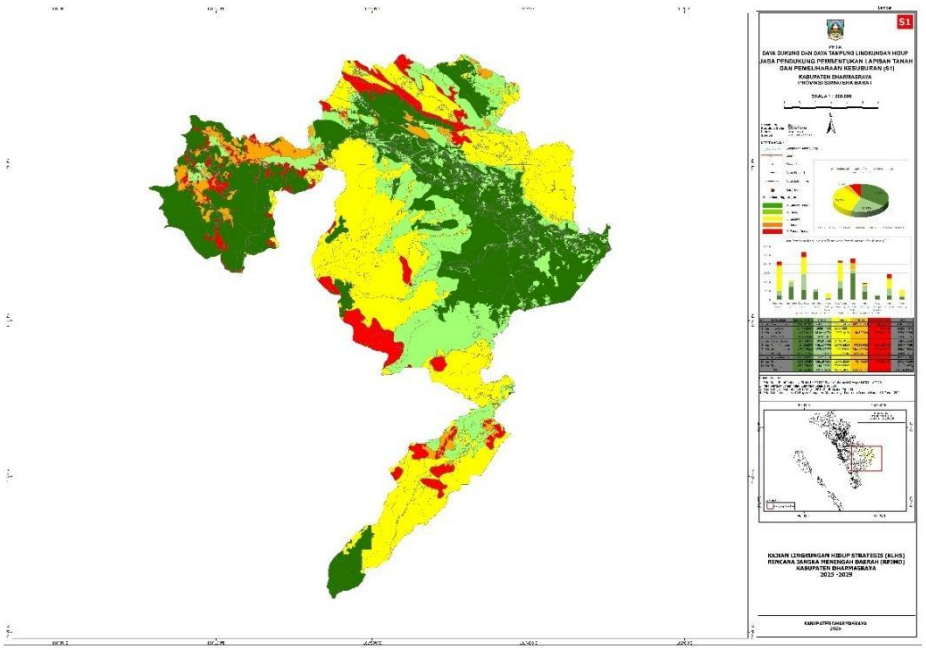
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 51
Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 52
Peta Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

B. Jasa Siklus hara (*nutrient*)

Merupakan Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian. Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfir, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosisntesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik lansung atau tidak lansung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervarisi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Daya dukung jasa siklus hara di Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori tinggi dengan luas 123.782,68 Ha (42,51%), berdasarkan kecamatan Daya dukung jasa siklus hara kategori tinggi berada di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 30.729,62 Ha, Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 27.826,60

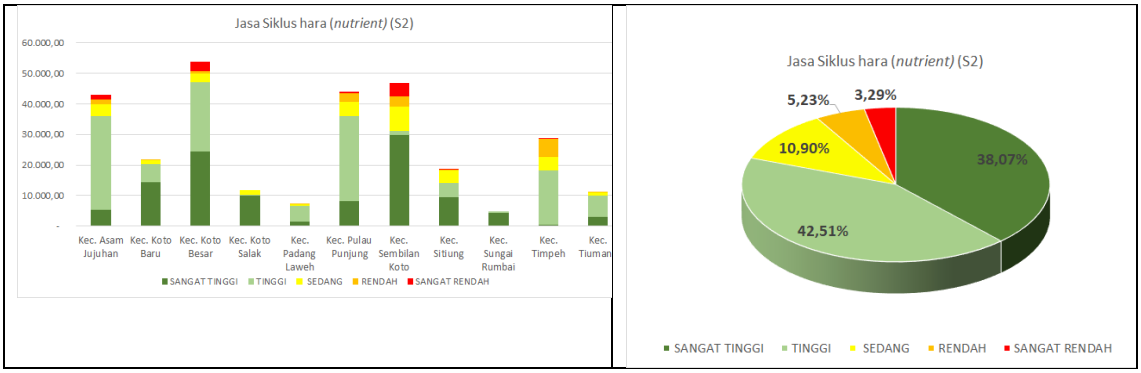
Ha, dan Kecamatan Koto Besar dengan luas 22.721,38 Ha. Selanjutnya Daya dukung jasa siklus hara kategori sangat tinggi dengan luas 110.850,57 Ha (38,07%), kategori sedang dengan luas 31.748,01 Ha (10,90%), kategori 15.238,36 Ha (5,23%) dan kategori sangat rendah dengan luas 9.590,48 Ha (3,29%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 44
Jasa Siklus Hara (Nutrient) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.240,41	30.729,62	3.886,66	1.440,84	1.551,79	42.849,33
2	Koto Baru	14.394,12	5.889,73	1.235,94	301,21		21.821,00
3	Koto Besar	24.319,36	22.721,38	2.817,18	814,54	3.115,74	53.788,20
4	Koto Salak	10.047,17	281,55	1.474,26			11.802,98
5	Padang Laweh	1.374,90	5.310,80	341,58	158,44		7.185,72
6	Pulau Punjung	8.245,59	27.826,60	4.585,65	2.883,26	306,98	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	1.118,27	8.028,33	3.289,81	4.374,71	46.669,92
8	Sitiung	9.484,68	4.637,74	4.057,88	283,95	0,32	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4.378,25	574,35				4.952,60
10	Timpeh	521,07	17.737,20	4.349,87	5.868,44	240,93	28.717,52
11	Tiumang	2.986,22	6.955,43	970,65	197,87		11.110,16
Total		**110.850,57**	**123.782,68**	**31.748,01**	15.238,36	9.590,48	**291.210,10**

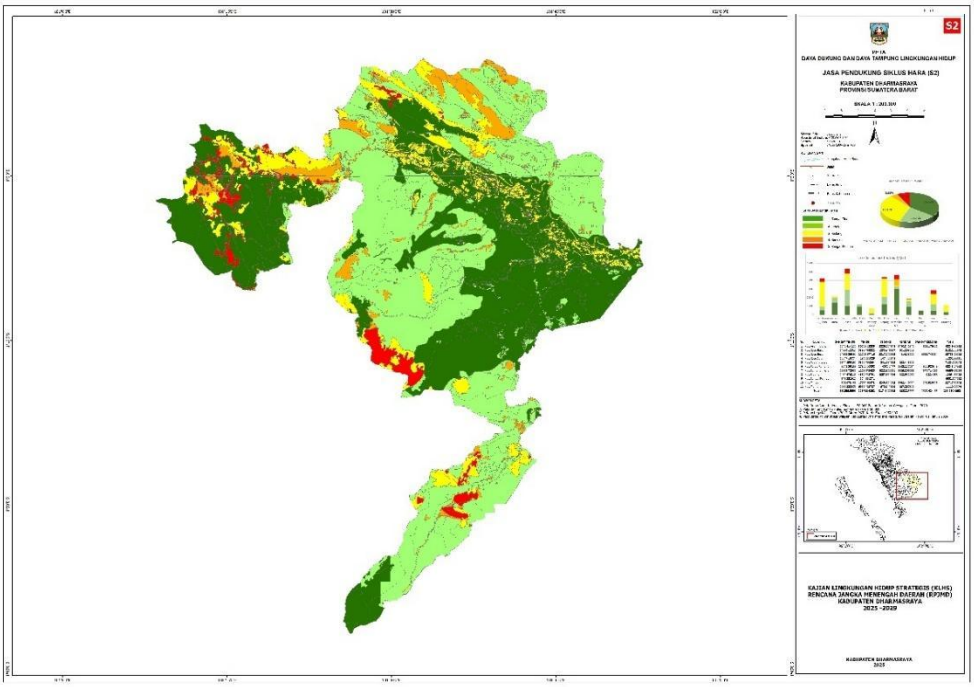
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 53
Jasa Siklus Hara (Nutrient) Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 54
Peta Jasa Siklus Hara (nutrient) Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

C. Jasa Produksi primer

Merupakan Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies. Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembutan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.

Daya dukung jasa produksi primer di Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori sangat tinggi dengan luas 96.879,76 Ha (33,27%), berdasarkan kecamatan Daya dukung jasa produksi primer sangat tinggi berada di Kecamatan Sembilan Koto dengan luas 29.858,79 Ha, Kecamatan Koto Baru dengan luas 14.623,04 Ha dan KecamatanKoto Besar dengan luas 10.536,26 Ha. Selanjutnya Daya dukung jasa produksi primer kategori tinggi dengan luas 45.376,53 Ha (15,58%), kategori rendah dengan luas 93.286,41 Ha (32,03%),

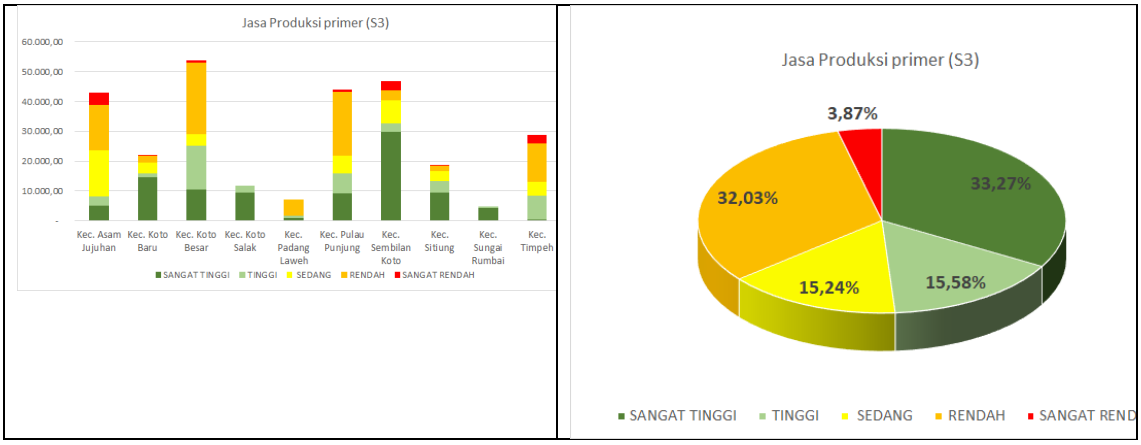
kategori sedang dengan luas 44.389,30 Ha (15,24%), dan kategori sangat rendah dengan luas 11.278,09 Ha (3,87%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 45
Jasa Produksi Primer Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.002,41	3.245,36	15.493,59	15.175,31	3.932,67	42.849,33
2	Koto Baru	14.623,04	1.344,01	3.538,58	2.278,68	36,69	21.821,00
3	Koto Besar	10.536,26	14.625,79	3.888,36	23.790,21	947,57	53.788,20
4	Koto Salak	9.531,42	2.271,56				11.802,98
5	Padang Laweh	1.071,99	653,04	60,52	5.400,18		7.185,72
6	Pulau Punjung	9.244,42	6.707,49	5.797,88	21.378,77	719,51	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	2.898,17	7.659,03	3.410,32	2.843,61	46.669,92
8	Sitiung	9.386,93	3.992,85	3.210,28	1.753,80	120,72	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4.359,51	593,09				4.952,60
10	Timpeh	515,75	7.801,77	4.697,37	13.025,33	2.677,30	28.717,52
11	Tiumang	2.749,24	1.243,41	43,70	7.073,82		11.110,16
Total		**96.879,76**	**45.376,53**	**44.389,30**	93.286,41	11.278,09	**291.210,10**

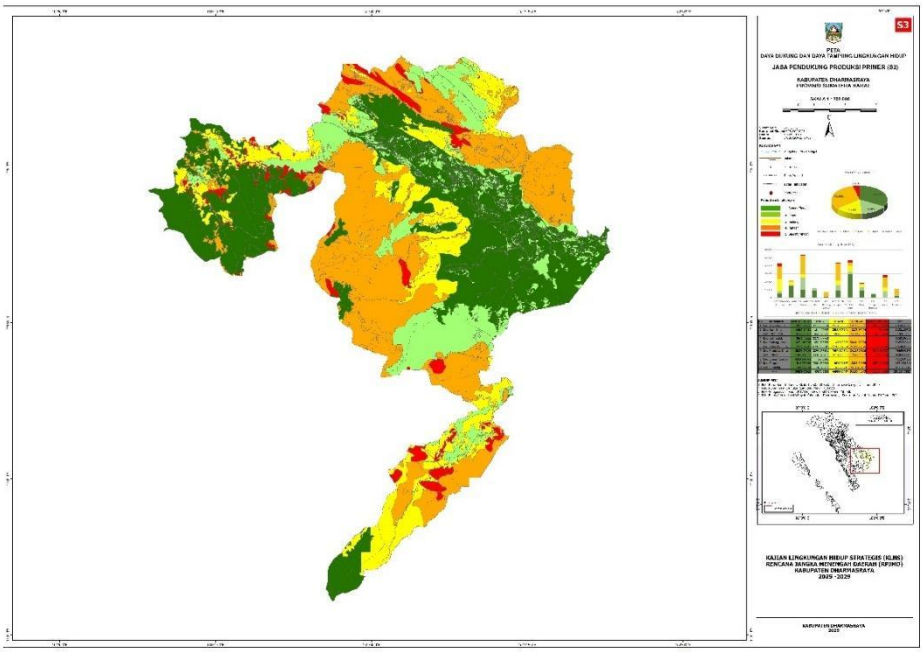
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 55
Jasa Produksi Primer Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 56
Peta Jasa Pendukung Produksi Primer



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

D. Jasa Biodiversitas

Merupakan Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

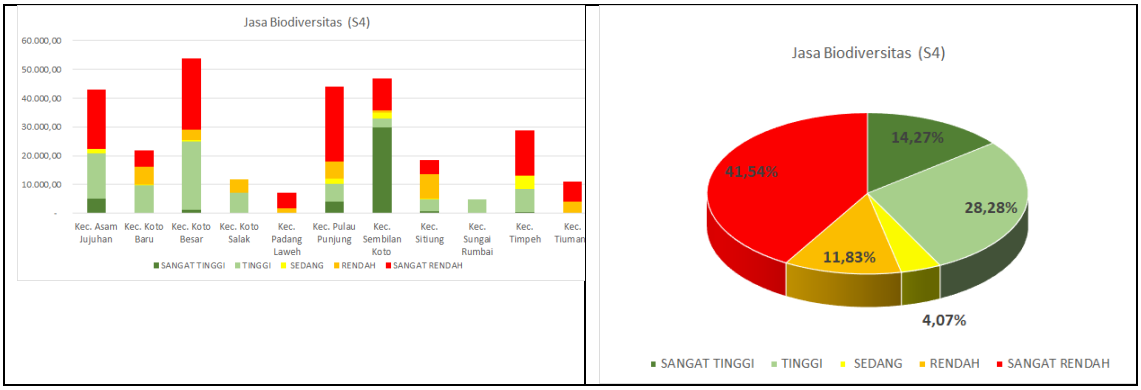
Daya dukung jasa biodiversitas di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berada pada kategori sangat rendah dengan luas 120.978,48 Ha (41,54%), berdasarkan kecamatan Daya dukung jasa biodiversitas kategori sangat rendah berada di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 26.004,43 Ha, Kecamatan Koto Besar dengan luas 24.852,68 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas 20.438,28 Ha. Sedangkan Daya dukung jasa biodiversitas kategori tinggi dengan luas 82.365,03 Ha (28,28%), kategori sangat tinggi dengan luas 41.562,17 Ha (14,27%), kategori rendag dengan luas 34.449,46 Ha (11,83%) dan kategori sedang dengan luas 11.854,96 Ha (4,07%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2- 46
Jasa Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Asam Jujuhan	5.168,89	15.504,80	1.737,36		20.438,28	42.849,33
2	Koto Baru	47,92	9.591,74	374,51	6.257,01	5.549,82	21.821,00
3	Koto Besar	1.313,28	23.702,13	530,05	3.390,06	24.852,68	53.788,20
4	Koto Salak	24,98	7.060,28	25,72	4.692,00		11.802,98
5	Padang Laweh		175,17	81,73	1.541,89	5.386,94	7.185,72
6	Pulau Punjung	3.955,84	6.183,25	2.016,06	5.688,50	26.004,43	43.848,08
7	Sembilan Koto	29.858,79	3.033,61	2.011,25	706,77	11.059,50	46.669,92
8	Sitiung	675,28	4.095,18	306,83	8.408,42	4.978,88	18.464,58
9	Sungai Rumbai	4,39	4.948,22				4.952,60
10	Timpeh	512,81	7.852,94	4.731,08	8,27	15.612,43	28.717,52
11	Tiumang		217,72	40,36	3.756,55	7.095,53	11.110,16
Total		**41.562,17**	**82.365,03**	**11.854,96**	34.449,46	120.978,48	**291.210,10**

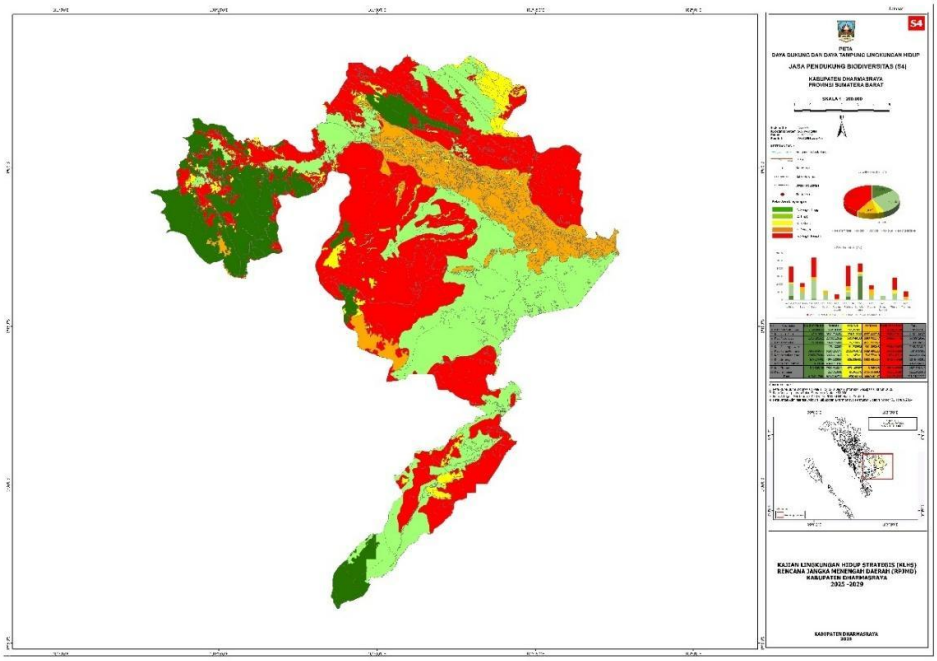
Sumber: DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 57
Jasa Biodiversitas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

Gambar 2- 58
Peta Jasa Biodiversitas Kabupaten Dharmasraya



Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya, 2025

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam

penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan).

Gambar 2- 59
Skema Pilar Ketahanan Pangan



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD KabupatenDharmasraya Tahun 2025-2029

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Cut off point IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing- masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

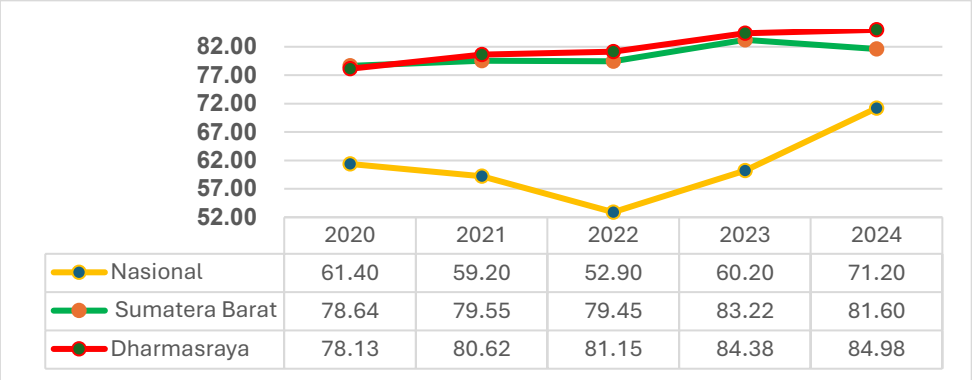
Tabel 2- 47
Klasifikasi Indeks Ketahan Pangan di Kabupaten Dharmasraya

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD KabupatenDharmasraya Tahun 2025-2029

Hasil perhitungan IKP tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2- 60
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	61.40	59.20	52.90	60.20	71.20
Sumatera Barat	78.64	79.55	79.45	83.22	81.60
Dharmasraya	78.13	80.62	81.15	84.38	84.98

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Nasional, Tahun 2025

Berdasarkan pengelompokan IKP, maka Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori tinggi atau berada pada kelompok 6, sedangkan nasional berada pada kelompok 5. Adapun salah satu aktor pendorong tingginya ketahanan pangan di Kabupaten Dharmasraya maupun provinsi Sumatera Barat pada umumnya adalah hampir semua kab/kota di Sumatera Barat memiliki sawah yang didukung oleh kondisi geografis yang memiliki banyak sungai serta sawah yang sudah didukung daerah irigasi (DI) yang cukup memadai.

Tabel 2- 48
Indeks Ketahan Pangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Kab/Kota	IKP	Ranking
Kepulauan Mentawai	53,86	19
Pesisir Selatan	86,71	8
Solok	82,56	15
Sijunjung	82,05	17
Tanah Datar	89,4	4
Padang Pariaman	85,08	10
Agam	86,92	7
Limapuluh Koto	82,59	14
Pasaman	82,09	16
Solok Selatan	85,6	9
Dharmasraya	84,98	11
Pasaman Barat	80,91	18
Kota Padang	89,63	3
Kota Solok	92,9	1
Kota Sawah Lunto	83,45	13

Kab/Kota	IKP	Ranking
Kota Padang Panjang	87,05	6
Kota Bukittinggi	92,86	2
Kota Payakumbuh	89,33	5
Kota Pariaman	84,08	12

Sumber : BPS, Tahun 2025

Dilihat dari perbandingan dari 19 kab/kota, maka 18 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori ketahanan pangan tinggi, kecuali Kabupaten Mentawai yang masih berada pada kategori sedang/ kategori 3.

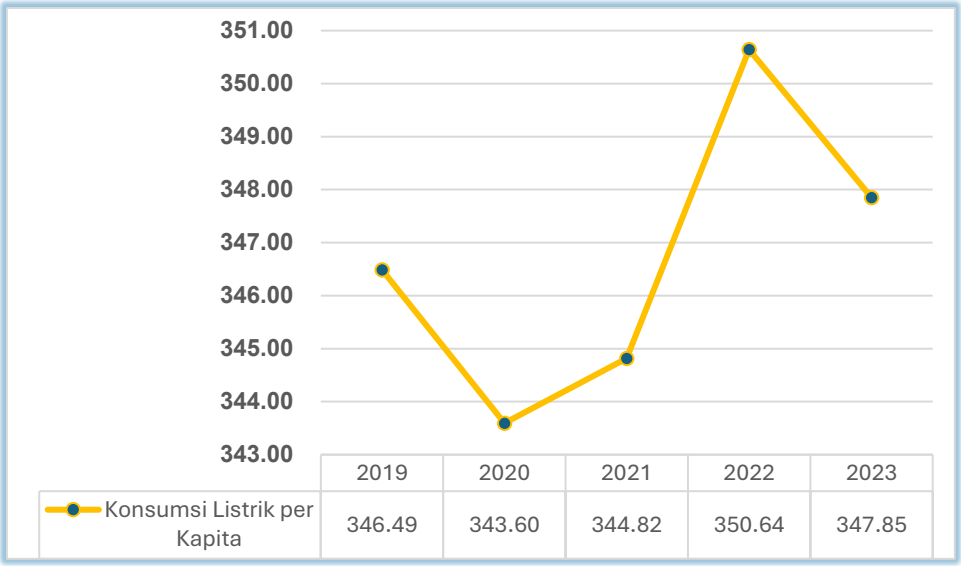
B. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Untuk lebih jelasnya Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.62.

.

Gambar 2- 61
Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 (kWh/orang)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tahun 2024 (data diolah)

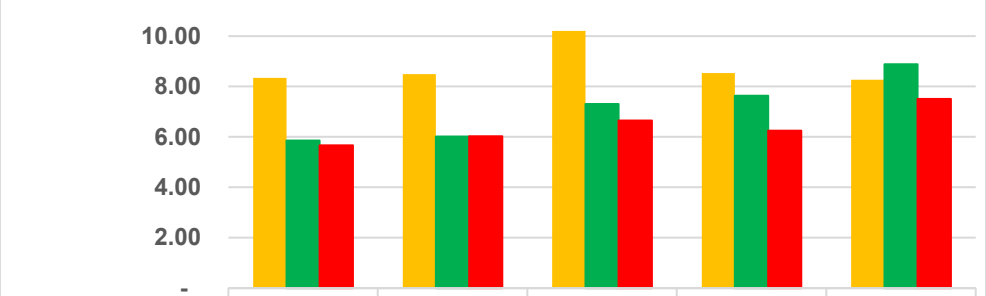
Untuk jangka panjang penggunaan listrik oleh masyarakat diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, selain untuk kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan industri, energi listrik juga semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk kendaraan listrik, baik untuk kendaraan roda 2 maupun untuk roda 4/lebih.

C. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah persentase penduduk dalam suatu wilayah yang asupan energinya secara rata-rata per hari berada di bawah kebutuhan minimum energi yang dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan aktif.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan kronis, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan cukup energi dari makanan dalam jangka waktu lama. Prevalensi ini dihitung berdasarkan data konsumsi pangan rumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan energi minimum rata-rata nasional (biasanya sekitar 2.100 kkal per orang per hari, tergantung kebijakan negara).

Tabel 2- 49
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8.34	8.49	10.21	8.53	8.27
Sumatera Barat	5.86	6.02	7.31	7.63	8.88
Dharmasraya	5.67	6.03	6.65	6.25	7.51

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa di tingkat nasional terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022, kemungkinan akibat dampak pandemi dan krisis global, namun kembali menurun pada 2023. di Provinsi Sumatera Barat terjadi tren kenaikan bertahap sejak 2020, dan pada 2024 angkanya lebih tinggi dari angka nasional. di Kabupaten Dharmasraya sendiri sudah memiliki tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan yang paling rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional selama empat tahun terakhir. Hingga tahun 2024 menunjukkan perbaikan nyata, yang patut dijadikan momentum untuk memperkuat program-program intervensi pangan, seperti diversifikasi pangan lokal, penguatan akses rumah tangga miskin terhadap pangan

bergizi, serta penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas dan upaya yang dapat dilakukan yaitu kolaboratif lintas sektor dan berkelanjutan diperlukan agar tren positif ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan kedepannya.

D. Kapasitas Air Baku

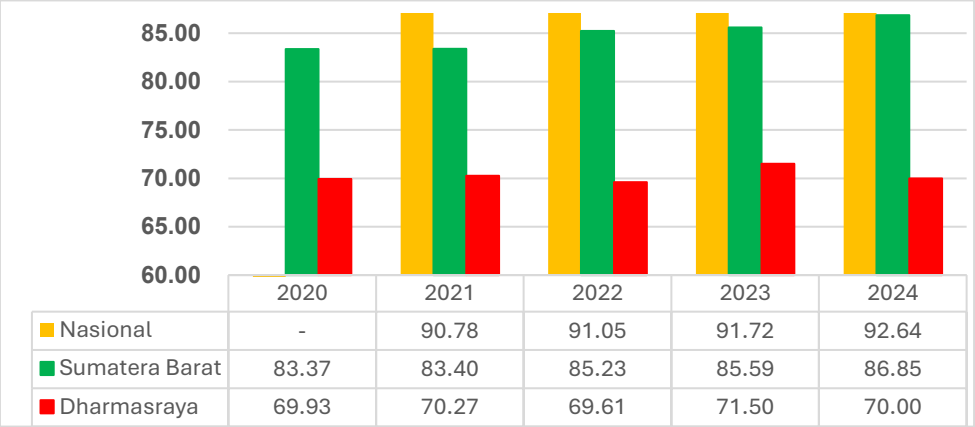
Kapasitas air baku adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Sumber air baku utama dapat diperoleh dari sungai Batanghari, dan embung-embung yang menyebar di seluruh kabupaten Dharmasraya, sehingga Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah yang memiliki sumber air baku yang besar, namun perlu usaha untuk menjadikan air tersebut layak sebagai air baku.

E. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Gambar 2- 62
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-	90.78	91.05	91.72	92.64
Sumatera Barat	83.37	83.40	85.23	85.59	86.85
Dharmasraya	69.93	70.27	69.61	71.50	70.00

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak relatif masih rendah dibandingkan kondisi ideal, yaitu sebesar 70 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Artinya dari sebanyak 57.401 rumah tangga yang ada, maka masih terdapat sekitar 17.200 rumah tangga yang masih belum terlayani air minum layak.

Untuk lebih jelasnya Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2- 50
Persentase Penduduk Yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	21,67	26,17	88,22	89,07	89,64
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	46.853	59,217	201.848	211.736	
Jumlah penduduk	Jiwa	216.202	226.265	228.801	237.724	

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2025

Pencapaian terkait cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukan kecenderungan meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah. Berdasarkan data lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 21,67% meningkat pada tahun 2024 menjadi 89,64%.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Untuk lebih jelasnya indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2- 51
Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	persen	-	60,72	-	-	
Sumatera Barat	persen	64,13	66,24	-	-	
Dharmasraya	persen	40,95	42,70	42,70	43,14	42,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 berfluktuatif. Tahun 2020, IKTL sebesar 40,95 dan tahun 2024 sebesar 42,55. Angka ini menunjukan masih ada lokasi lahan kritis karena masih adanya lahan yang belum dilakukan penanaman/penghijauan kembali, pembukaan lahan baru serta pengalihan fungsi lahan yang bersifat tanaman hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

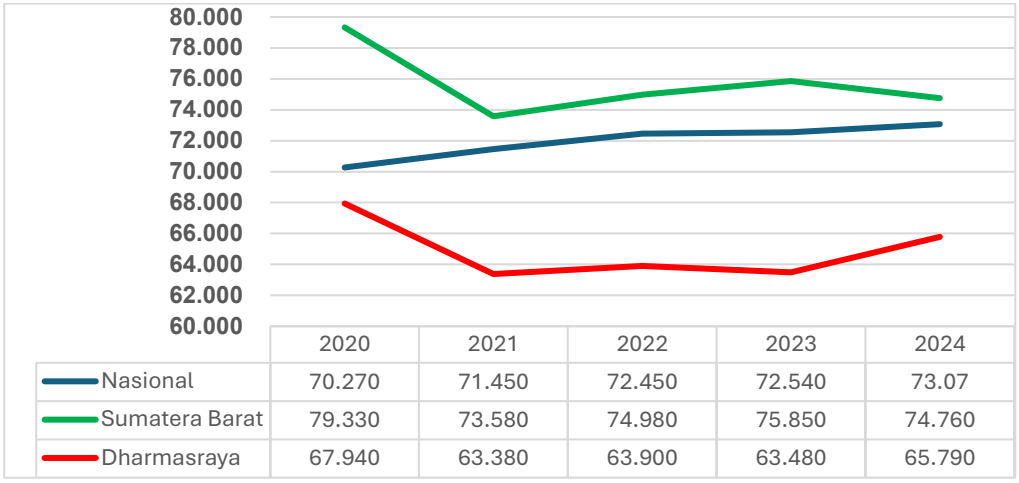
b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, dan tutupan ekosistem gambut.

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Indek kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.63.

Gambar 2- 63
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	70.270	71.450	72.450	72.540	73.07
Sumatera Barat	79.330	73.580	74.980	75.850	74.760
Dharmasraya	67.940	63.380	63.900	63.480	65.790

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

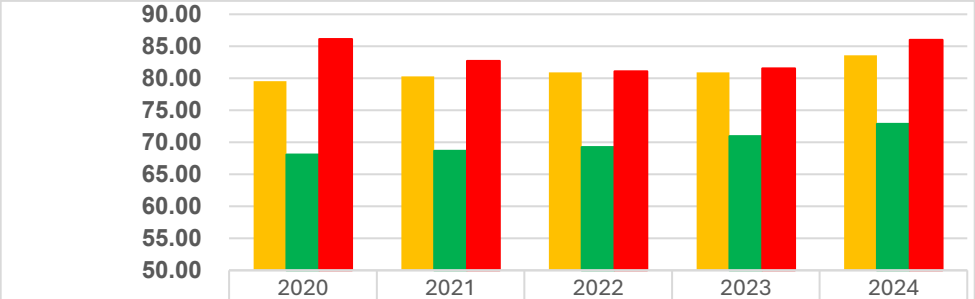
Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Nilai IKLH Kabupaten Dharmasraya masih berada pada kategori cukup yaitu dengan nilai 66 ≤ IKLH ≤ 74.sedangkan IKLH nasional dan provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan kondisi Dharmasraya. Kualitas lingkungan hidup dipengaruhui oleh kepadatan penduduk dan ativitas perekonomian suatu daerah. Salah satu aktivitas yang berdampak pada pencemaran air adanya pertambagan liar yang dilakukan oleh masyarakat pada aliran sungai.

c. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan

Perbandingan capaian indikator ini, baik untuk tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten Dharmasraya sendiri dapat dilihat pada gambar 2.45 di bawah :

Gambar 2- 64
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	79.53	80.29	80.92	80.92	83.60
Sumatera Barat	68.11	68.68	69.27	70.97	72.87
Dharmasraya	86.14	82.71	81.09	81.57	85.99

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025

Masih rendahnya capaian indikator ini mengindikasikan bahwa ke depan dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang cukup serius. Mengingat indikator ini merupakan salah satu indikator yang termuat di dalam SDGs/ TPB yang harus dicapai secara penuh 100 persen di tahun 2030.

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, capaian Akses Air Limbah Domestik di Kabupaten Dharmasraya untuk Wilayah Perkotaan telah mencapai 44,07% (24.635 RT) akses layak yang terdiri dari akses aman 0,72% (420 RT), Layak individu tidak termasuk aman 41,78% (23.331 RT) dan akses layak bersama 1,58% (884 RT). Sedangkan untuk akses yang belum layak masih terdapat sebesar 0,59% (330 RT). Sementara di daerah Perdesaan akses layak mencapai 53,27% (29.787 RT) yang terdiri dari akes aman 1,49% (875 RT), layak individu tidak termasuk aman 47,02% (26.249 RT) dan akses layak bersama 4,53% (2.532 RT) dimana masih terdapat 2,06% (1.150 RT) untuk untuk yang belum layak .

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Dharmasraya masih relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, namun demikian ke depan capaian ini mesti harus ditingkatkan agar mendekati 100 persen. Pada tahun 2024, dari sebanyak 57.401 rumah tangga yang ada di Dharmasraya, masih terdapat sebanyak 8.042 rumah tangga yang belum terlayani.

d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kinerja pengelolaan sampah merupakan hasil dari upaya pengurangan dan penanganan sampah, yang diukur dari berbagai indikator seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi, ditangani, dan dikelola, serta sampah yang belum terkelola. Berdasarkan data SIPSN KLHK diperoleh timbulan sampah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan tahun 2020 timbulan sampah sebesar

35.605,56 ton/tahun dan tahun 2024 meningkat menjadi 71.495 ton/tahun. Selanjutnya sampah terkelola meningkat dari tahun 2023, dari 79,65% menjadi 80,21% tahun 2024, jika dilihat tahun 2021-2022 persentase sampah terkelola mencapai angka 90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 52
PERSAMPAHAN

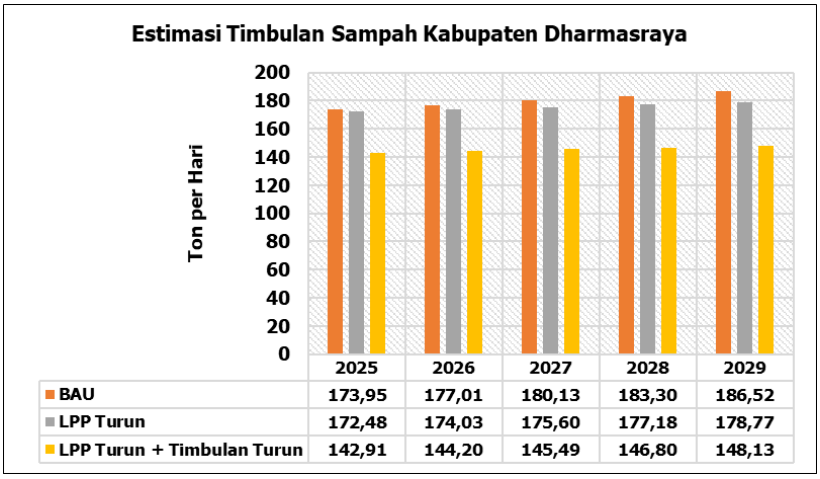
No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	35.605,56	37.411,62	37.831,10	46.791,24	71.495,00
2	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	3.175,08	4.244,20	5.709,93	12.633,63	19.303,65
3	%Pengurangan Sampah	8,92	11,34	15,09	27,00%	27,00%
4	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	21.984,68	29.448,20	30.130,75	33.689,67	51.476,40
5	%Penanganan Sampah	61,75	78,71	79,65	72%	72%
6	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	25.159,76	33.692,40	35.840,69	56.949,13	37.937,00
7	%Sampah Terkelola	70,66	90,06	94,74	79,65%	80,21%
8	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)	968,29	1.654,80	1.797,22	1.434,00	1.239,00
9	Recycling Rate (%)	2,72	4,42	4,75	3,06	1,73

Sumber : SIPSN KLHK

Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya termasuk pada kategori Kabupaten/Kota Sedang, berdasarkan estimasi proyeksi timbulan sampah hingga tahun 2029 diperoleh timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

Gambar 2- 65
Estimasi Timbulan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 (ton/hari)



Sumber: Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Hasil estimasi tersebut dapat disimpulkan dengan *Business As Usual* (BAU) timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 terus mengalami peningkatan, tahun 2029 timbulan sampah sebesar 186,52 ton/hari, kemudian jika LPP diturunkan maka timbulan sampah dapat diturunkan menjadi 178,77 ton/hari dan dengan upaya LPP turun serta timbulan turun maka timbulan sampah semakin menurun menjadi 148,13 ton/hari.

Area Berisiko Sanitasi Persampahan

Berdasarkan dokumen SSK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 diperoleh, Area berisiko sub-sektor persampahan diperoleh dari hasil data sekunder dan data primer. Data sekunder terkait sub-sektor persampahan terdiri dari jumlah sampah rumah tangga yang terangkut, jumlah TPS yang ada, jumlah TPS 3R dan jumlah pasar, sedangkan data primer yaitu indeks risiko sanitasi EHRA serta skor persepsi pokja atau SKPD. Instrumen ini menghasilkan peta area berisiko sanitasi dengan empat klasifikasi yaitu Sangat Tinggi, Resiko Tinggi, Resiko Sedang, dan untuk klasifikasi wilayah yang kurang memiliki risiko (skor 1). Terdapat 4 nagari berisiko sanitasi persampahan diantaranya 1 merupakan area berisiko sangat tinggi yaitu Nagari Banai Kecamatan IX Koto, dan 3 nagari lainnya dengan risiko tinggi yaitu Nagari Bonjol, Nagari Abai Siat dan Nagari Koto padang.

e. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) adalah persentase jumlah rumah tangga di suatu wilayah yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara penuh dari pihak penyedia layanan kebersihan, seperti pemerintah daerah atau perusahaan pengelola sampah.

Tabel 2- 53
Tingkat Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pelayanan Persampahan (persen rumah tangga)	5,00%	5,04%	5,02%	4,97%	5,38%
2	Volume sampah tak terkelola (ton/tahun)	32.430,49	33.167,43	61.099,95	64.664,39	43.389,41
	Persentase sampah tidak terkelola	91,08%	88,66%	91,45%	94,43%	98,17
3	Jenis sampah dominan (%)					
	sisa makanan	47%	48%	49%	52%	53%
	plastik	40%	38%	36%	30%	30%
	kayu/ranting	7%	7%	7%	9%	10%
	kertas/karton	4%	5%	6%	7%	5%
	logam	1%	1%	1%	1%	1%
	kain	1%	1%	1%	1%	1%
	jumlah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DLH Kab Dharmasraya, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sebesar 5,00% rumah tangga telah mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara penuh. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 5,04%, dan kembali mengalami penurunan tipis pada tahun 2022 menjadi 5,02%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat pelayanan menjadi 4,97%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,38%, menunjukkan adanya perbaikan dalam cakupan layanan persampahan.

Secara umum, meskipun peningkatannya belum signifikan, tren pelayanan persampahan menunjukkan upaya pemerintah atau pihak pengelola dalam memperluas cakupan layanan kepada rumah tangga. Namun, dengan cakupan yang masih di bawah 10%, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur, sosialisasi, dan efektivitas layanan persampahan, agar pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat lebih optimal.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Resiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu (1) bahaya, (2) kerentanan, dan (3) kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.

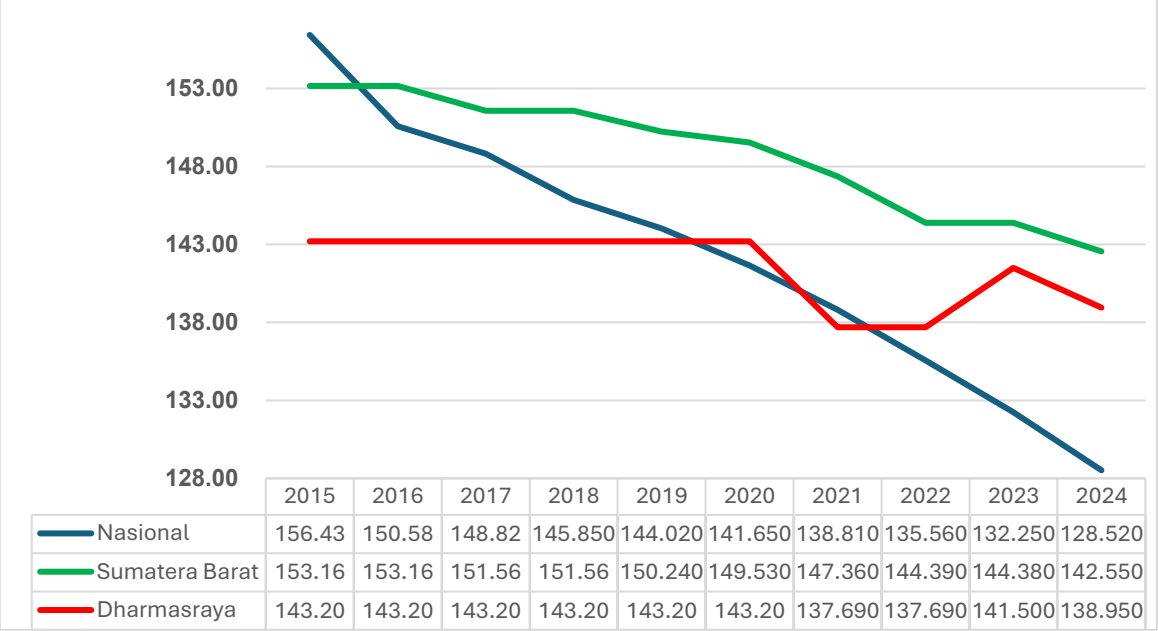
Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:

- Indeks <13 adalah Rendah
- Indeks 13 - 144 adalah Sedang

- Indeks >144 adalah Tinggi

Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2015-2024 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.66.

Gambar 2- 66
Indeks Risiko Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	156.43	150.58	148.82	145.850	144.020	141.650	138.810	135.560	132.250	128.520
Sumatera Barat	153.16	153.16	151.56	151.56	150.240	149.530	147.360	144.390	144.380	142.550
Dharmasraya	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	137.690	137.690	141.500	138.950

Sumber: BNPB, Tahun 2025

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Berdasarkan kategori di atas, maka Kabupaten Dharmasraya termasuk pada kategori sedang. Selanjutnya lebih detail indeks risiko per ancaman dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2- 54
Indeks Risiko Per-ancaman di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No.	Jenis Indeks Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Indeks risiko banjir	29,97	tinggi
2	Indeks risiko gempa bumi	17,98	tinggi
3	Indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan	30	tinggi
4	Indeks risiko bencana tanah longsor	9,99	sedang
5	Indeks risiko bencana kekeringan	19,98	tinggi
6	Indeks risiko bencana cuaca ekstrim	11,32	sedang

Sumber : BPBD, Tahun 2025

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 6 jenis bencana yang sering terjadi, diantara risiko yang memiliki risiko tinggi yaitu kebakaran hutan hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di saat musim panas serta adanya aktivitas masyarakat membuka lahan untuk dijadikan perkebunan. Risiko banjir selanjutnya yang tergolong pada risiko tinggi adalah banjir, banjir sering kali terjadi di saat musim hujan dengan kapasitas tinggi, banjir terjadi di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Koto Besar, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, dan Kecamatan Pulau Punjung. Untuk bencana gempa bumi juga menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, meskipun jarak Dharmasraya relatif jauh dari titik pusat gempa namun kejadian gempa tetap terasa meskipun dengan magnitudo yang tidak terlalu membahayakan. Sedangkan risiko tanah longsor tergolong sedang karena Dharmasraya hanya memiliki perbukitan yang relatif tidak banyak dan daerah yang relatif datar.

B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi. Upaya mengurangi dampak bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, dari rentang nilai 0 sampai 1, kabupaten dharmasraya baru mencapai 0,39, jauh di bawah capaian provinsi sebesar 0,8. Sehingga masih butuh strategi untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadao bencan ayang akan terjadi di masa yang akan datang.

C. Perubahan Iklim (Kerentanan Perubahan Iklim)

1. Kerentanan Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

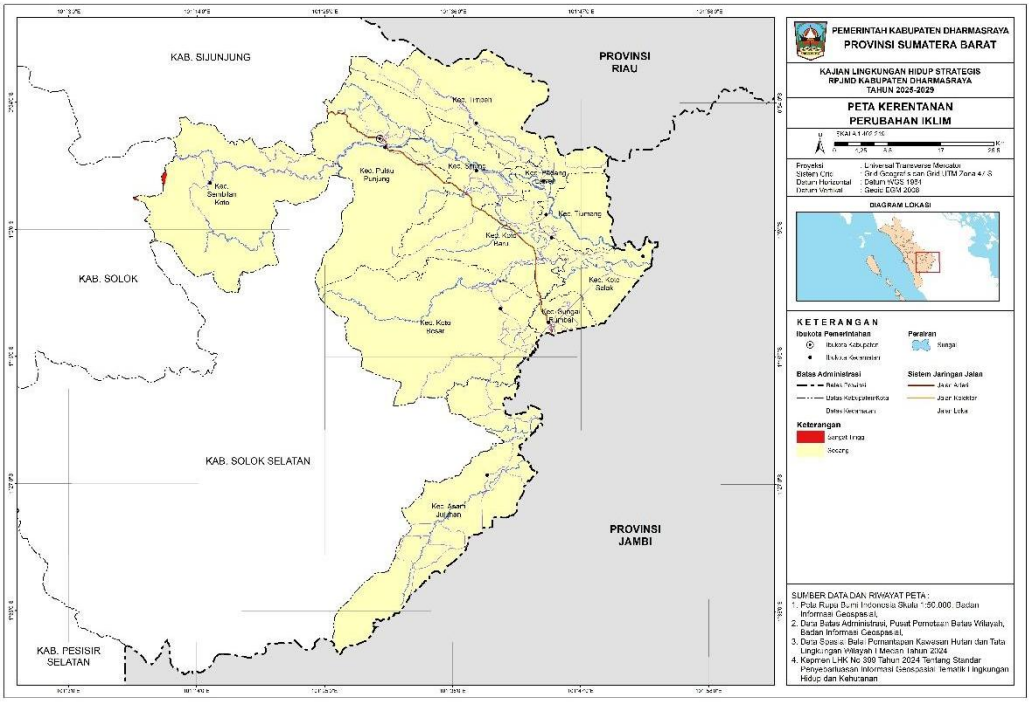
Tabel 2- 55
Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	0,54723	0,4589	3	3	3
SUNGAI RUMBAI	KURNIA KOTO SALAK	0,59112	0,6009	3	3	3
SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI TIMUR	0,56414	0,4002	3	3	3
SUNGAI RUMBAI	KURNIA SELATAN	0,555605	0,5549	3	3	3
KOTO BESAR	KOTO GADANG	0,521415	0,5159	3	3	3
KOTO BESAR	KOTO TINGGI	0,539375	0,6192	3	3	3
KOTO BESAR	BONJOL	0,33304	0,6284	5	5	5
KOTO BESAR	ABAI SIAT	0,417225	0,6034	3	3	3
KOTO BESAR	KOTO BESAR	0,393965	0,4584	3	3	3
KOTO BESAR	KOTO LAWEH	0,66575	0,5894	2	2	2
KOTO BESAR	KOTO RANAH	0,448675	0,5274	3	3	3
ASAM JUJUHAN	LUBUK BESAR	0,462855	0,3586	3	3	3
ASAM JUJUHAN	ALAHAN NAN TIGO	0,376845	0,3794	3	3	3
ASAM JUJUHAN	SUNGAI LIMAU	0,47843	0,5618	3	3	3
ASAM JUJUHAN	SINAMAR	0,445435	0,5024	3	3	3
ASAM JUJUHAN	TANJUNG ALAM	0,387845	0,5574	3	3	3
KOTO BARU	AMPANG KURANJI	0,44374	0,5487	3	3	3
KOTO BARU	KOTO BARU	0,51215	0,5919	3	3	3
KOTO BARU	SIALANG GAUNG	0,53895	0,6889	3	3	3
KOTO BARU	KOTO PADANG	0,436505	0,5999	3	3	3
KOTO SALAK	PADUKUAN	0,46225	0,4879	3	3	3
KOTO SALAK	PULAU MAINAN	0,520535	0,6559	3	3	3
KOTO SALAK	SIMALIDU	0,46529	0,6254	3	3	3
KOTO SALAK	KOTO SALAK	0,44041	0,5384	3	3	3
KOTO SALAK	AMPALU	0,48043	0,5144	3	3	3

Kecamatan	Desa	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
TIUMANG	KOTO BERINGIN	0,450855	0,5374	3	3	3
TIUMANG	SIPANGKUR	0,54745	0,5749	3	3	3
TIUMANG	SUNGAI LANGKOK	0,411215	0,4977	3	3	3
TIUMANG	TIUMANG	0,62191	0,5184	3	3	3
PADANG LAWEH	BATU RIJAL	0,61324	0,4999	3	3	3
PADANG LAWEH	MUARO SOPAN	0,467275	0,4757	3	3	3
PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	0,475215	0,5199	3	3	3
PADANG LAWEH	SOPAN JAYA	0,44094	0,4694	3	3	3
SITIUNG	SITIUNG	0,59047	0,5469	3	3	3
SITIUNG	SIGUNTUR	0,555625	0,6259	3	3	3
SITIUNG	GUNUNG MEDAN	0,671985	0,5359	3	3	3
SITIUNG	SUNGAI DUO	0,60005	0,6374	3	3	3
TIMPEH	PANYUBARANGAN	0,635635	0,4212	3	3	3
TIMPEH	TABEK	0,590915	0,5689	3	3	3
TIMPEH	TIMPEH	0,571565	0,4655	3	3	3
TIMPEH	TARATAK TINGGI	0,478695	0,4558	3	3	3
TIMPEH	RANAH PALABI	0,571495	0,4789	3	3	3
PULAU PUNJUNG	IV KOTO PULAU PUNJUNG	0,5462	0,5582	3	3	3
PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	0,65532	0,4757	3	3	3
PULAU PUNJUNG	TEBING TINGGI	0,507005	0,5554	3	3	3
PULAU PUNJUNG	SUNGAI KAMBUT	0,6022	0,6089	3	3	3
PULAU PUNJUNG	GUNUNG SELASIH	0,51935	0,5422	3	3	3
PULAU PUNJUNG	SIKABAU	0,59362	0,4277	3	3	3
IX KOTO	BANAI	0,43252	0,6178	3	3	3
IX KOTO	LUBUK KARAK	0,54148	0,5793	3	3	3
IX KOTO	SILAGO	0,538665	0,6518	3	3	3
IX KOTO	KOTO NAN IV DIBAWUAH	0,552055	0,3959	3	3	3

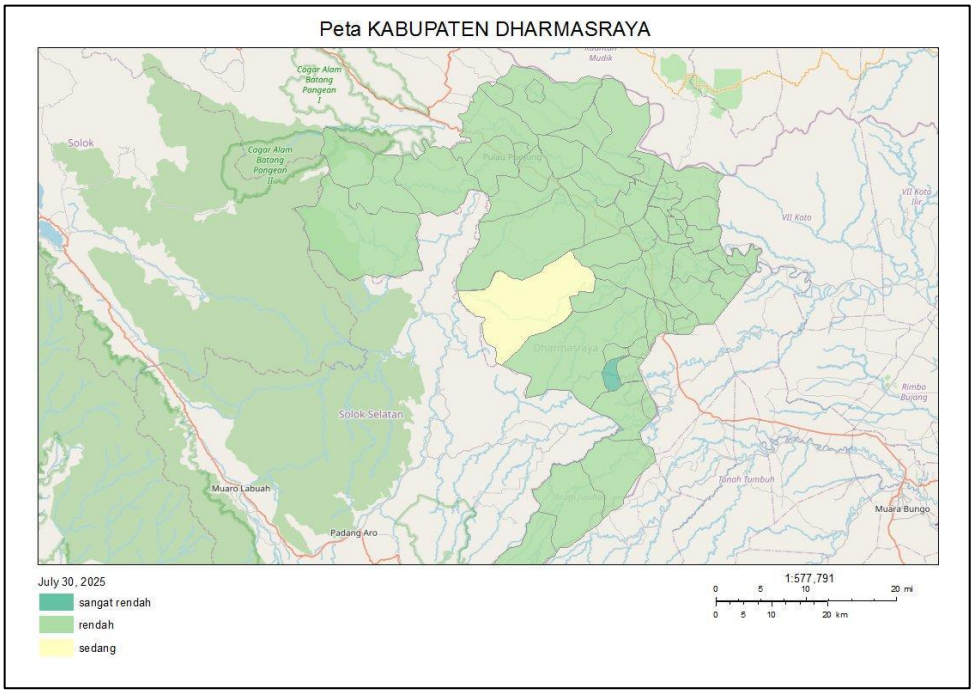
Sumber : SIDIK, KemenLHK

Gambar 2- 67
Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya



Sumber : BPKHTL Wilayah I Medan

Gambar 2- 68
Peta Risiko Perubahan Iklim Kabupaten Dharmasraya



Sumber : SIDIK, KemenLHK

Berdasarkan tabel di atas kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Dharmasraya termasuk ke dalam kategori sedang.

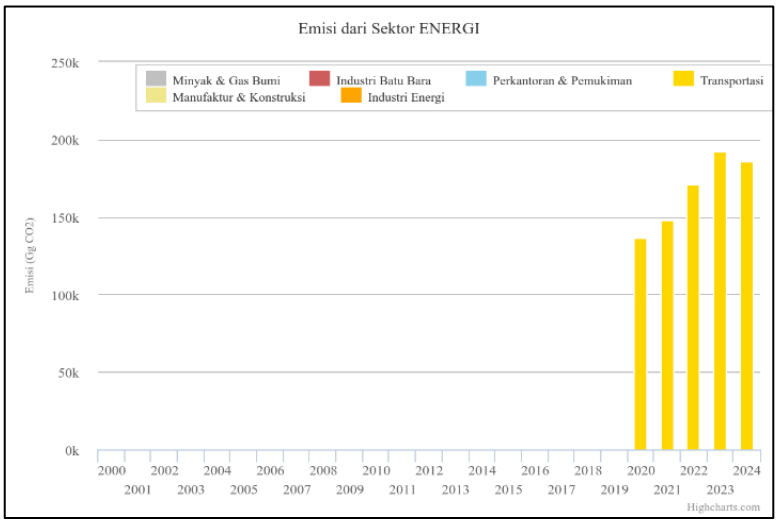
Tabel 2- 56
Luas Kerentanan Perubahan Iklim

Kecamatan	Nagari	Luas (Ha)
Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	99,16
	Lubuk Besar	1.678,57
	Sungai Limau	10,15
Koto Baru	Koto Padang	77,94
Koto Besar	Bonjol	7.294,15
	Koto Besar	4.062,02
Pulau Punjung	Sungai Dareh	51,10
	Sungai Kambut	108,87
Sembilan Koto	Banai	13.194,22
	Koto Nan IV Dibawuah	420,73
	Lubuk Karak	2.259,20
	Silago	7.379,87
Sitiung	Gunung Medan	29,37
Timpeh	Panyubarangan	15,98
	Tabek	8,63
	Timpeh	86,80
Grand Total		36.776,77

Sumber : BPKHTL I Medan

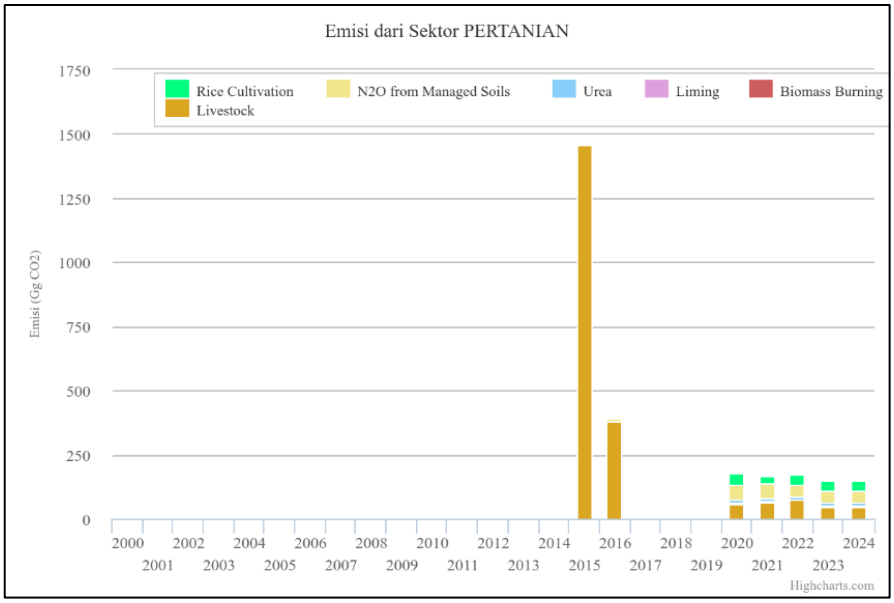
Berdasarkan tabel di atas terdapat 7 kecamatan dengan berbagai tingkat kerentanan, dengan total luas kerentanan perubahan iklim 36.776,77 Ha. Tingkat kerentanan yang luas terdapat di Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto 13.194,22 Ha. Berdasarkan data dari website signsmart KLHK terkait inventarisasi gas rumah kaca, diperoleh sumber emisi di Kabupaten Dharmasraya bersumber dari sektor energi, sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor limbah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2- 69
Inventarisasi GRK di Kabupaten Dharmasraya



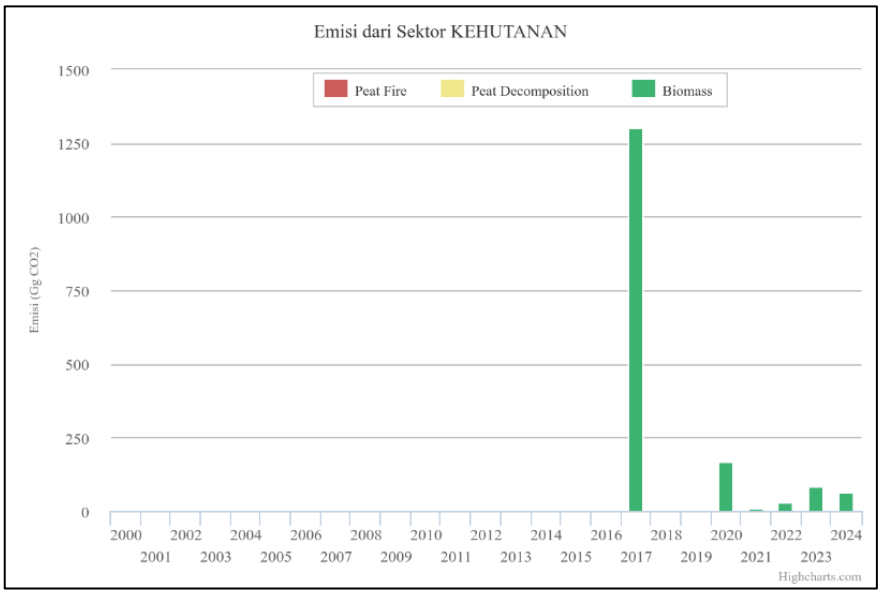
NO.	ITEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	MINYAK & GAS BUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	INDUSTRI BATU BARA	0,00	0,00	0,42	1,71	1,71	1,56	0,00
3.	PERKANTORAN & PEMUKIMAN	6,66	18,11	10,57	59,32	65,98	70,09	0,00
4.	TRANSPORTASI	0,00	0,00	136.531,84	147.980,27	171.293,61	192.634,51	185.959,93
5.	MANUFAKTUR & KONSTRUKSI	0,00	0,00	4,66	10,36	9,08	7,70	0,00
6.	INDUSTRI ENERGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6,66**	**18,11**	**136.547,48**	**148.051,66**	**171.370,39**	**192.713,86**	**185.959,93**

Emisi dari Sektor Energi



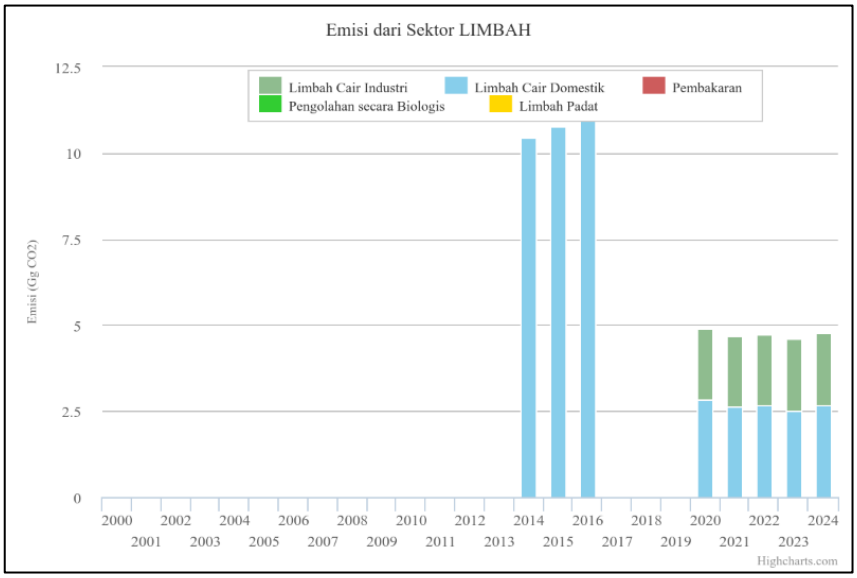
NO.	ITEM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	RICE CULTIVATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	29,58	39,45	39,10	40,53
2.	N2O FROM MANAGED SOILS	0,88	11,64	0,00	0,00	0,00	56,47	57,90	45,70	46,37	46,98
3.	UREA	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	11,86	12,27	8,84	9,95	9,96
4.	LIMING	1,54	1,57	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,80	4,77	4,89
5.	BIOMASS BURNING	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,06	0,27	0,36	0,34	0,35
6.	LIVESTOCK	1.454,61	378,09	0,00	0,00	0,00	56,63	62,56	72,54	48,90	46,71
	TOTAL	**1.457,03**	**391,34**	**2,86**	**0,00**	**0,00**	**177,27**	**167,36**	**171,69**	**149,43**	**149,42**

Emisi dari Sektor Pertanian



NO.	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PEAT FIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PEAT DECOMPOSITION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BIOMASS	1.303,32	0,00	0,00	168,90	8,03	30,19	85,93	62,85
	TOTAL	**1.303,32**	**0,00**	**0,00**	**168,90**	**8,03**	**30,19**	**85,93**	**62,85**

Emisi dari Sektor Kehutanan



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
10,46	10,76	11,06	0,00	0,00	0,00	2,83	2,63	2,67	2,53	2,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,46	10,76	11,06	0,00	0,00	0,00	4,90	4,70	4,74	4,60	4,75

Emisi dari Sektor Limbah
Sumber : Signsmart KLHK

Dalam mendorong masyarakat dan seluruh pihak untuk melaksanakan aksi lokal dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya adalah program berlingkup nasional yaitu program kampung iklim (ProKlim). Pelaksanaan program kampung iklim di Kabupaten Dharmasraya dalam adaptasi perubahan iklim seperti pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim. Sedangkan kegiatan mitigasi perubahan iklim yaitu pengelolaan sampah, limbah adat dan cair, menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Program kampung iklim di Kabupaten Dharmasraya sudah mulai sejak tahun 2016, Berikut program kampung iklim di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 2- 57
Program Kampung Iklim Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kelompok	Tahun	Jorong	Nagari
1	-	2016	Piruko Utara	Sitiung
2	-	2016	Padang Sidondang	Padang Sidondang
3	KWT Suka Maju	2017	Sungai Kalang I	Tiumang
4	KWT Mawar	2017	Salam Baru	Simalidu
5	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	2018	BKN	Sungai Duo
6	KWT Amanah	2018	Teluk Sikai	Sungai Duo
7	KWT Makmur	2019	Koto Ilalang	Sungai Langkok
8	KWT Albaroqah	2019	Piruko Tengah	Sitiung
9	KWT Sekar Agung	2020	Karya Budaya Timur	Sungai Duo
10	Kelompok Tani Peduli Lingkungan	2020	Kampung Tengah	Simalidu
11	KWT Karya Maju	2021	Karya Budaya Barat	Sungai Duo
12	KWT Teratai	2021	Kartika Indah	Sungai Duo
13	KWT Seroja	2021	Harapan Maju	Sungai Duo
14	KWT Anggrek	2021	Candra Kirana	Sungai Duo
15	-	2022	Rejo Sari I	Tiumang
16	-	2022	Padang Bintungan 3	Sialang Gaung
17	-	2023	Lubuk Bulang	Gunung Selasih
18	-	2023	-	Siguntur
19	-	2023	Agung Batu	Silago
20	-	2024	BKN 2	Sungai Duo
21	-	2024	Margo Mulyo	Sungai Duo
22	-	2024	Taman Sari	Sungai Duo
23	-	2024	Koto Agung Kiri	Sungai Duo
24	-	2024	Daulat	Sungai Duo

Sumber : DLH, 2024

D. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Tahunan)

Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.

Tabel 2- 58
Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Tahunan

SUMBER KARBON	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
ENERGI	136.547,60	148.051,80	171.370,53	192.714,00	185.960,08
IPPU	605,94	501,96	502,27	495,11	479,85
PERTANIAN	177,27	167,36	171,69	149,43	149,42
KEHUTANAN	168,9	8,03	30,19	85,93	62,91
LIMBAH	4,9	4,7	4,74	4,6	4,75
Total	137.504,61	148.733,86	172.079,42	193.449,08	186.657,00
Penurunan Tahunan (meningkat)		**8,17%**	**15,70%**	**12,42%**	**-3,51%**

Sumber : Signsmart KLHK dan Analisis Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Tabel 2-58 menyajikan data penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berdasarkan sektor dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor yang dianalisis meliputi Energi, IPPU (Industri Proses dan Penggunaan Produk), Pertanian, Kehutanan, dan Limbah. Data ditampilkan dalam satuan ton CO_2 ekuivalen dan menunjukkan total emisi setiap tahun, serta persentase penurunan tahunan. Pada tahun 2020, total emisi GRK tercatat sebesar 137.504,61 ton CO_2e. Emisi mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 193.449,08 ton CO_2e, sebelum menurun pada tahun 2024 menjadi 186.657,00 ton CO_2e.

Dari segi sektor, sektor Energi merupakan penyumbang terbesar emisi sepanjang periode, diikuti oleh sektor Pertanian dan Kehutanan. Upaya pengurangan emisi di sektor Kehutanan menunjukkan hasil yang cukup signifikan, dengan penurunan dari 168,9 di tahun 2020 menjadi hanya 62,91 di tahun 2024.

Persentase penurunan tahunan mengalami fluktuasi. Setelah peningkatan emisi sebesar 8,17% dari 2020 ke 2021, laju peningkatan bertambah menjadi 15,70% pada 2022, dan melambat menjadi 12,42% pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan emisi sebesar -3,51%. Hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam upaya pengendalian emisi GRK dibandingkan tahun sebelumnya.

E. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (Kumulatif)

Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun 2024 terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. Secara kumulatif, terjadi penurunan emisi GRK sebesar 35,75% hingga tahun 2024 dibandingkan dengan tahun dasar. Ini menunjukkan adanya progres signifikan dalam penurunan emisi secara keseluruhan meskipun terdapat fluktuasi tahunan.

Tabel 2- 59
Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Komulatif

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan kumulatif (meningkat)	-	-	-	-	35,75%

Sumber : Signsmart KLHK dan Analisis Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

2.1.1.7. Demografi

Kabupaten Dharmasraya memiliki karakteristik demografi yang khas sebagai daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Riau, dengan komposisi penduduk yang heterogen, kultur Minangkabau matrilineal, serta keberadaan komunitas transmigrasi. Dinamika demografi berperan penting dalam merancang arah pembangunan daerah, terutama dalam penyiapan sumber daya manusia produktif, penyediaan layanan dasar, serta pengendalian persebaran penduduk agar seimbang antar wilayah nagari.

Berdasarkan hasil proyeksi BPS dan Dukcapil, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai ± 244.000 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,66 % per tahun selama periode 2020–2024.

Tabel 2- 60
Indikator Utama Demografi Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	*2024
Jumlah Penduduk	Jiwa	228.600	231.217	234.713	239.900	244.000
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)	1,73	1,14	1,52	2,21	1,71
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km²	77	78	80	81	82
Rasio Ketergantungan	Persen (%)	46,10	45,92	45,71	45,52	45,38
Rasio Jenis Kelamin Penduduk		104,0	103,7	103,7	102,9	102,7
Jumlah Penduduk Usia Produktif (15–64 tahun)	Persen (%)	67,2	68,56	68,70	68,78	68,85

Sumber: BPS Sumbar, Dukcapil Dharmasraya, Proyeksi Bappeda 2024

A. Jumlah Penduduk

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Perkembangan jumlah penduduk disajikan dari data tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk lebih jelasnya jumlah, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut:

Tabel 2- 61
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sungai Rumbai	22.500	22.800	23.264	23.900	24.400
2	Koto Besar	26.900	27.200	27.547	28.700	29.300
3	Asam Jujuhan	9.500	9.400	9.414	9.500	9.500
4	Koto Baru	32.500	32.700	32.984	33.500	33.900
5	Koto Salak	17.600	17.700	17.964	18.300	18.600
6	Tiumang	13.100	13.300	13.456	13.800	14.000
7	Padang Laweh	6.500	6.500	6.636	6.800	6.900
8	Sitiung	28.300	28.700	29.210	29.600	30.100
9	Timpeh	16.900	17.200	17.508	18.000	18.400
10	Pulau Punjung	45.300	46.100	47.004	48.100	49.100
11	Sembilan Koto	9.400	9.500	9.726	9.800	10.000
Jumlah		**228.600**	**231.200**	**234.713**	**239.900**	**244.000**
Pertumbuhan			**1,14**	**1,52**	**2,21**	**1,71**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2024 mencapai 244.000 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, maka dapat diranking 3 (tiga) besar kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 49.100 jiwa atau 20,12 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 33.900 jiwa atau 13,89 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 30.100 jiwa atau 12,34 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.900 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

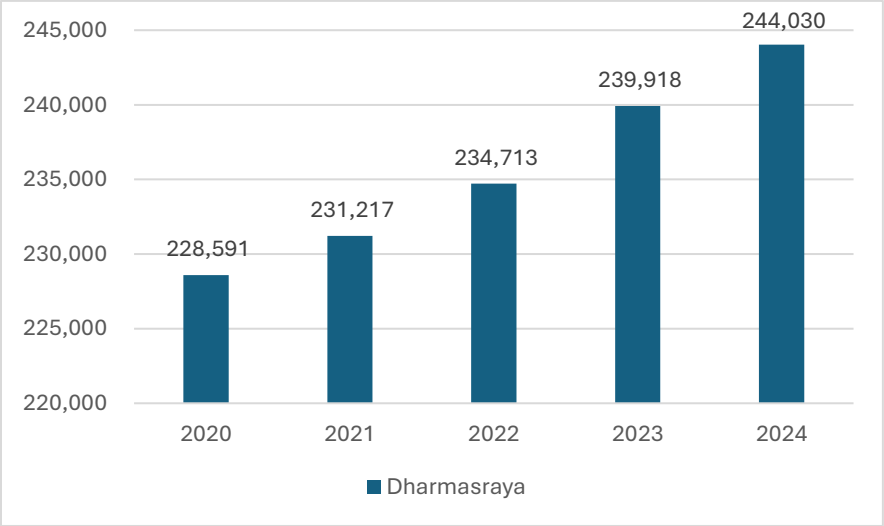
Laju Pertumbuhan penduduk digunakan untuk melihat dinamika kependudukan di suatu wilayah. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat adanya pertambahan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 228.600 jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk menjadi 244.000 jiwa. Apababila dibandingkan antara laju pertumbuhan, maka laju pertumbuhan penduduk Dharmasraya masih lebih tinggi dibandingkan nasional dengan provinsi Sumatera Barat. Pertambahan penduduk di Dharmasraya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya pertambahan penduduk oleh angka kelahiran maupun disebabkan oleh perpindahan penduduk yang masuk ke Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2- 62
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,01	1,58	0,70	1,06	1,04
Sumatera Barat	1,29	1,10	1,09	1,45	1,43
Dharmasraya	1,73	1,53	1,52	1,77	1,76

Sumber : BPS, Tahun 2025

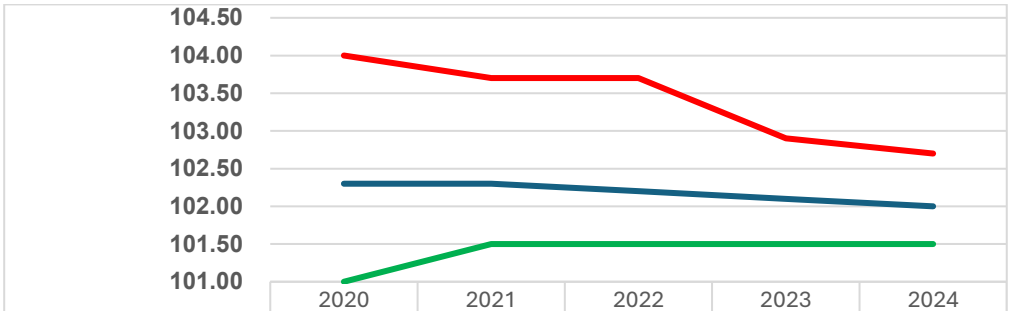
Gambar 2- 63
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



C. Rasio Penduduk

Rasio penduduk merupakan indikator yang memperbandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, apabila jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, maka rasio akan menunjukkan lebih dari 100, namun apabila jumlah perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, maka rasio penduduk menunjukkan nilai kurang dari 100.

Gambar 2- 64
Rasio Penduduk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	102.30	102.30	102.20	102.10	102.00
Sumatera Barat	101.00	101.50	101.50	101.50	101.50
Dharmasraya	104.00	103.70	103.70	102.90	102.70

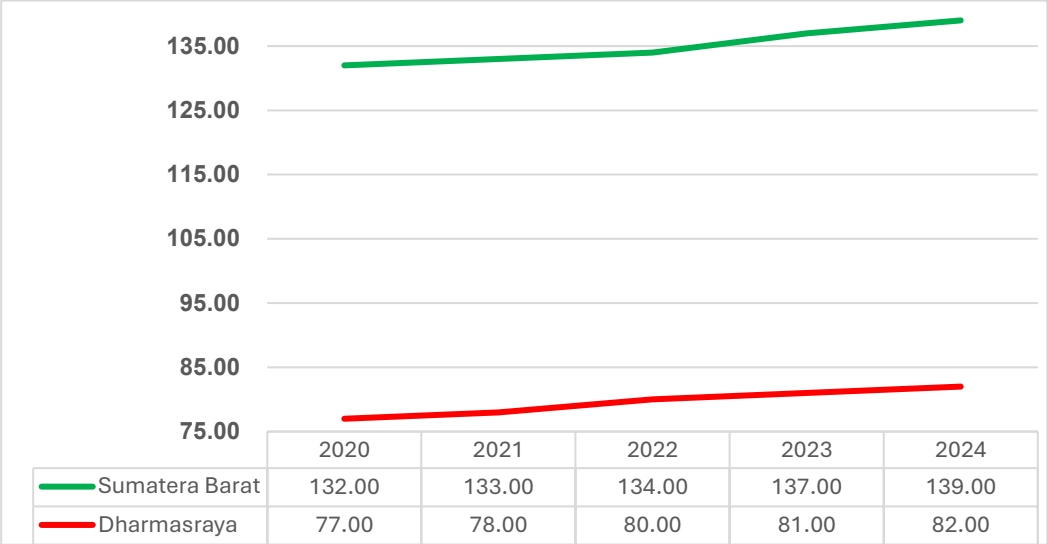
Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, maka pada ketiga wiayah di atas menunjukkan rasio penduduk di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

D. Kepadatan Penduduk

Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kepadatan penduduk selalu menunjukkan peningkatan kepadatan penduduk, dibandingkan dengan provinsi, maka kepadatan penduduk Dharmasraya masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi sebagian besar pemanfaatan wilayah digunakan untuk lahan perkebunan.

Gambar 2- 65
Rasio Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Barat	132.00	133.00	134.00	137.00	139.00
Dharmasraya	77.00	78.00	80.00	81.00	82.00

Sumber : BPS, Tahun 2025

E. Komposisi Penduduk

- Menurut Kelompok Umur

  Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebanyak 244.000 jiwa, yang terdiri dari 123.700 laki-laki dan 120.400 perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan struktur piramida penduduk yang cenderung muda, dengan dominasi pada kelompok usia produktif dan anak-anak.

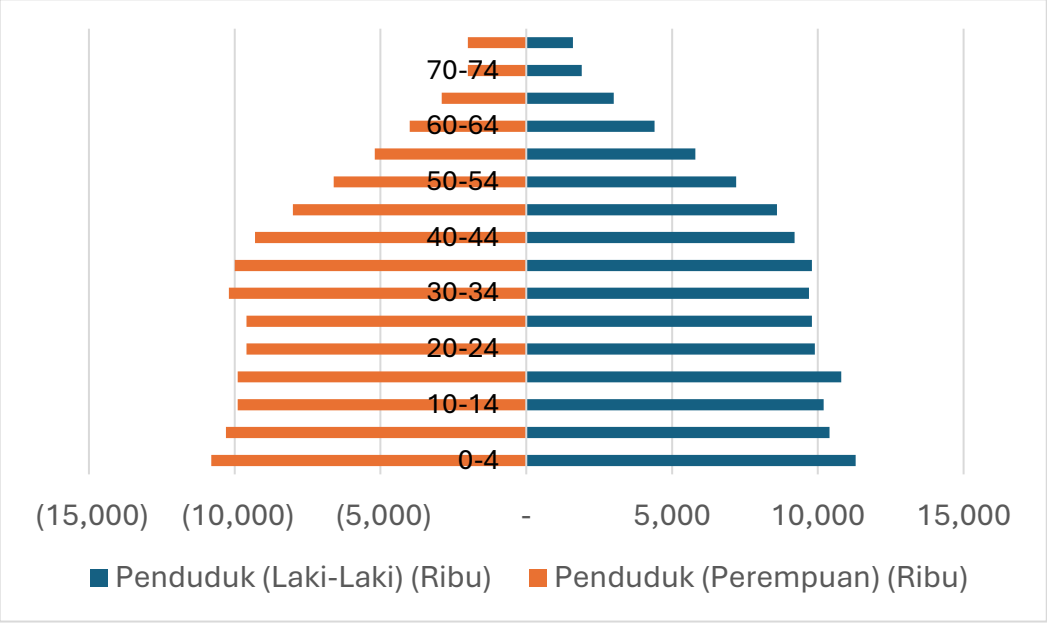
  Struktur penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 didominasi oleh penduduk usia muda dan produktif. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar dalam pengembangan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat kebijakan pembangunan SDM, membuka akses terhadap lapangan kerja, serta menyiapkan sistem pelayanan yang inklusif bagi semua kelompok usia, termasuk anak-anak dan lansia. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 66
Jumlah Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
0-4	11.300	10.800	22.000
5-9	10.400	10.300	20.600
10-14	10.200	9.900	20.100
15-19	10.800	9.900	20.700
20-24	9.900	9.600	19.500
25-29	9.800	9.600	19.500
30-34	9.700	10.200	19.900
35-39	9.800	10.000	19.900
40-44	9.200	9.300	18.500
45-49	8.600	8.000	16.700
50-54	7.200	6.600	13.800
55-59	5.800	5.200	11.100
60-64	4.400	4.000	8.400
65-69	3.000	2.900	5.900
70-74	1.900	2.000	3.900
75+	1.600	2.000	3.700
Jumlah/Total	**123.700**	**120.400**	**244.000**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Gambar 2- 67
Jumlah Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024



Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 di atas menunjukkan struktur muda dan produktif, yang berarti daerah ini memiliki potensi tenaga kerja besar. Namun, agar potensi ini menjadi kekuatan pembangunan, perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan perencanaan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (anak-anak dan lansia).

- Menurut Jenis kelamin

Rasio jenis kelamin dihitung sebagai perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, dinyatakan dalam angka per 100 perempuan. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, tercatat total penduduk sebanyak 244.000 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 123.700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 120.400 jiwa. Untuk lebih jelasnya rasio jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 68
Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Sungai Rumbai	104,8	104,8	104,6	103,7	103,3
Koto Besar	103,4	103,4	103,4	101,4	100,8
Asam Jujuhan	110,6	110,6	111,4	110,7	110,8
Koto Baru	100,5	100,5	100,4	99,6	99,3
Koto Salak	101,6	101,6	102	101,5	101,4
Tiumang	102,5	102,5	102,4	101,6	101,2
Padang Laweh	102,2	102,2	101,1	99,9	99,1
Sitiung	104,7	104,7	105,2	104,4	104,2
Timpeh	104,9	104,9	105,4	104,8	104,8
Pulau Punjung	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Sembilan Koto	104,7	104,7	106	104,7	104,7
Dharmasraya	**103,6**	**103,6**	**103,7**	**103**	**102,7**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

F. Trend Demografi Berdasarkan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.47 dan tabel 2.48.

Tabel 2- 69
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
239.920	248.110	268.020	287.200	303.347	317.246

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data BPS Kabupaten Dharmasraya

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada data BPS yang terdapat dalam buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-235 dan berpedoman pada skenario moderat yaitu pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2025 yaitu 1,8% akan mengalami penurunan 5 tahun berikutnya 2026 – 2030 menjadi 1,6%, 5 tahun berikutnya 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 5 tahun berikutnya 2036 – 2040 yaitu 1,1% dan 5 tahun berikutnya dari tahun 2041 – 2045 menjadi 0,9% sehingga diperkirakan penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 317.246 jiwa pada tahun 2045. Dengan demikian diperkirakan pertambahan jumlah pendudukdari tahun 2023 sampai tahun 2045 sebanyak lebih kurang 77.326 jiwa atau bertambah sekitar 32,23%.

Tabel 2- 70
Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2045

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2021	231.590
2	2022	235.780
1	2023	239.920
2	2024	244.030
3	2025	248.110
4	2026	252.150
5	2027	256.170
6	2028	260.150
7	2029	264.100
8	**2030**	**268.020**
9	2031	271.900
10	2032	275.750
11	2033	279.600
12	2034	283.420
13	2035	287.200
14	2036	290.359
15	2037	293.553
16	2038	296.782
17	2039	300.047
18	2040	303.347
19	2041	306.077
20	2042	308.832

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
21	2043	311.612
22	2044	314.416
23	2045	317.246

Sumber: RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Jumlah penduduk tahun 2021 sampai tahun 2035 merupakan data dari Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Proyeksi penduduk tahun 2036 hingga 2045 dilakukan dengan meneruskan kecenderungan penurunan pertumbuhan sebelumnya, yaitu 2036-2040 pertumbuhan penduduk 1,1% dan 2041-2045 pertumbuhan penduduk 0,9%. Dilihat dari kondisi saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebanyak 244.000 jiwa, sedangkan berdasarkan proyeksi dalam RPJPD jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 244.030 jiwa.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dharmasraya

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada data Dukcapil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang memuat data penduduk tahun 2018-2022 menjadi dasar untuk proyeksi sampai tahun 2045. Sama dengan proses proyeksi pada data BPS, yang berpedoman pada data terakhir Dukcapil tahun 2022 maka digunakan skenario moderat pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2025 yaitu 1,8% akan mengalami penurunan 5 tahun berikutnya 2025 – 2030 menjadi 1,6%, 5 tahun berikutnya 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 5 tahun berikutnya 2036 – 2040 yaitu 1,1% dan 5 tahun berikutnya dari tahun 2-41 – 2045 menjadi 0,9% sehingga diperkirakan penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 307.913 jiwa pada tahun 2045. Dengan demikian diperkirakan pertambahan jumlah pendudukdari tahun 2023 sampai tahun 2045 sebanyak lebih kurang 74.994 jiwa atau bertambah sekitar 32,20%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Dukcapil dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2- 71
Proyeksi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2045 berdasarkan Data Dukcapil

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
1	2021	226.265	
2	2022	228.801	
3	2023	232.919	
4	2024	237.112	
5	2025	241.380	
6	2026	245.242	
7	2027	249.166	

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
8	2028	253.153	
9	2029	257.203	
10	2030	261.318	
11	2031	264.715	
13	2032	268.157	
14	2033	271.643	
15	2034	275.174	
16	2035	278.751	
17	2036	281.818	
18	2037	284.918	
19	2038	288.052	
20	2039	291.220	
21	2040	294.424	
22	2041	297.074	
23	2042	299.747	
24	2043	302.445	
25	2044	305.167	
26	2045	307.913	

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Distribusi Penduduk

Sebaran Penduduk dimasa Depan berdasarkan Data BPS

Sebaran penduduk Kabupaten Dharmasraya diperkirakan masih paling banyak pada Kecamatan Pulau Punjung, Koto Baru, Sitiung dan Koto Besar. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2-50.

Tabel 2- 72
Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045

No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Koto Baru	33.924	35.082	37.897	40.609	42.892	44.857
2	Pulau Punjung	47.814	49.447	53.415	57.237	60.455	63.225
3	Sungai Rumbai	23.692	24.501	26.467	28.361	29.956	31.328
4	Sitiung	29.794	30.811	33.283	35.665	37.670	39.396
5	Sembilan Koto	9.886	10.223	11.043	11.834	12.499	13.072
6	Timpeh	17.821	18.430	19.909	21.333	22.533	23.565
7	Koto Salak	18.417	19.046	20.574	22.046	23.286	24.353
8	Tiumang	13.776	14.246	15.389	16.490	17.418	18.216
9	Padang Laweh	6.783	7.015	7.577	8.120	8.576	8.969

No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
10	Asam Jujuhan	9.796	10.131	10.944	11.727	12.386	12.954
11	Koto Besar	28.217	29.180	31.521	33.777	35.676	37.311
Jumlah		**239.920**	**248.110**	**268.020**	**287.200**	**303.347**	**317.246**

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Perhitungan dilakukan dengan menganggap proporsi penduduk setiap kecamatan sama dengan proporsi tahun 2022.

Proporsi Penduduk Perkotaan dan Pedesaan berdasarkan Data BPS

Gejala meningkatnya penduduk perkotaan di perkirakan juga akan terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan akan semakin meluas. Urbanisasi yang akan terjadi karena faktor migrasi dan juga disebabkan tingginya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan perkotaan di sepanjang jalur utama (Lintas Tengah). Kawasan-kawasan perkotaan tersebut diperkirakan akan menjadi pusat pelayanan jasa utama dimasa yang akan datang. Kecamatan yang diperkiraan mengalami proses urbanisasi tinggi adalah Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung. Namun 20 tahun ke depan diperkirakan nagari yang masih bersifat pedesaan saat ini sebahagian akan menjadi nagari yang bersifat perkotaan terutama pada ibukota kecamatan.

Proporsi penduduk perkotaan ini untuk wilayah kabupaten dengan basis ekonomi sumberdaya alam akan bertambah, tetapi tidak sebanyak yang berada di wilayah kota administrasi, sehingga diperkirakan proporsi penduduk perkotaan Dharmasraya tahun 2045 sebanyak 45% dari total penduduk. Dengan proporsi tersebut penduduk perkotaan Kabupaten Dharmasraya cukup besar,meskipun tidak berbeda jauh dengan proporsi penduduk kabupaten lainnya secara nasional sehingga sistem perkotaannya perlu ditata untuk mengantisipasi gejala urbanisasi dan pelayanan perkotaan.

Tabel 2- 73
Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Penduduk Perkotaan		Penduduk Pedesaan		Jumlah Penduduk
	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)	
2022	91.973	39,19	145.895	60,81	239.920
2025	101.725	41	146.385	59	248.110
2030	112.568	42	155.452	58	268.020
2035	123.496	43	163.704	57	287.200
2040	133.473	44	169.874	56	303.347
2045	142.761	45	174.485	55	317.246

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Tabel 2- 74
Perkiraan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2045 Berdasarkan Data Dukcapil

No	Kecamatan	Tahun					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Koto Baru	32.934	34.130	36.949	39.414	41.630	43.538
2	Pulau Punjung	46.419	48.105	52.079	55.553	58.677	61.365
3	Sungai Rumbai	23.001	23.837	25.806	27.527	29.075	30.407
4	Sitiung	28.924	29.975	32.451	34.616	36.562	38.237
5	Sembilan Koto	9.597	9.946	10.767	11.486	12.131	12.687
6	Timpeh	17.301	17.930	19.411	20.706	21.870	22.872
7	Koto Salak	17.880	18.529	20.060	21.398	22.601	23.636
8	Tiumang	13.374	13.860	15.004	16.005	16.905	17.680
9	Padang Laweh	6.585	6.824	7.388	7.881	8.324	8.705
10	Asam Jujuhan	9.511	9.856	10.670	11.382	12.022	12.573
11	Koto Besar	27.393	28.388	30.733	32.783	34.627	36.213
Jumlah		**232.919**	**241.380**	**261.318**	**278.751**	**294.424**	**307.913**

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2023 sebesar 121.680 jiwa atau 50,71% dan jumlah penduduk perempuan sebesar 118.250 atau 49,29%, sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 103. Angka rasio jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya diperkirakan hingga tahun 2045 terus menurun, sehingga pada tahun 2045 diproyeksikan rasio jenis kelamin sebesar 101 dimana persentase penduduk laki-laki 50,29% dan persentase penduduk perempuan sebesar 49,71% (seperti terlihat pada Tabel 2.53).

Tabel 2- 75
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki- Laki	121.680	125.600	134.900	143.720	152.585	159.558
Perempuan	118.250	122.550	133.120	143.490	150.762	157.688
Rasio	103	102	101	100	101	101

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2- 76
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14 Tahun	62.330	63.200	66.260	68.910	69.770	72.967
15 – 64 Tahun	164.890	170.690	182.870	193.840	203.242	212.555
>65 Tahun	12.710	14.260	18.890	24.460	30.335	31.725
Angka Ketergantungan	**46**	**45**	**47**	**48**	**49**	**49**

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Penduduk Usia Produktif

Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut kelompok umur diketahui bahwa kelompok umur terbanyak berada pada usia rata-rata penduduk adalah 0 - 4 tahun dengan jumlah terbanyak yakni 21.660 jiwa atau 9,03% dari total seluruh penduduk. Penduduk yang tergolong usia produktif yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah 164.890 jiwa atau 68,72% dari total penduduk, sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif yaitu dengan jumlah 75.040 jiwa atau 31,28% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya proyeksi jumlah penduduk usia produktif dapat dilihat pada tabel 2-166 pada baris kelompok umur 15 – 64 tahun.

Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Angka ketergantungan penduduk pada tahun 2023 yaitu sebesar 46 dan diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada tahun 2045 yaitu sebesar 49.

Penduduk Usia Tua

Penduduk usia tua atau penduduk yang berusia 65 tahun keatas pada tahun 2023 sebesar 12.710 jiwa atau 5,3% dari jumlah penduduk keseluruhan. Pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk usia tua sebesar 31.725 jiwa atau 10% dari jumlah penduduk.

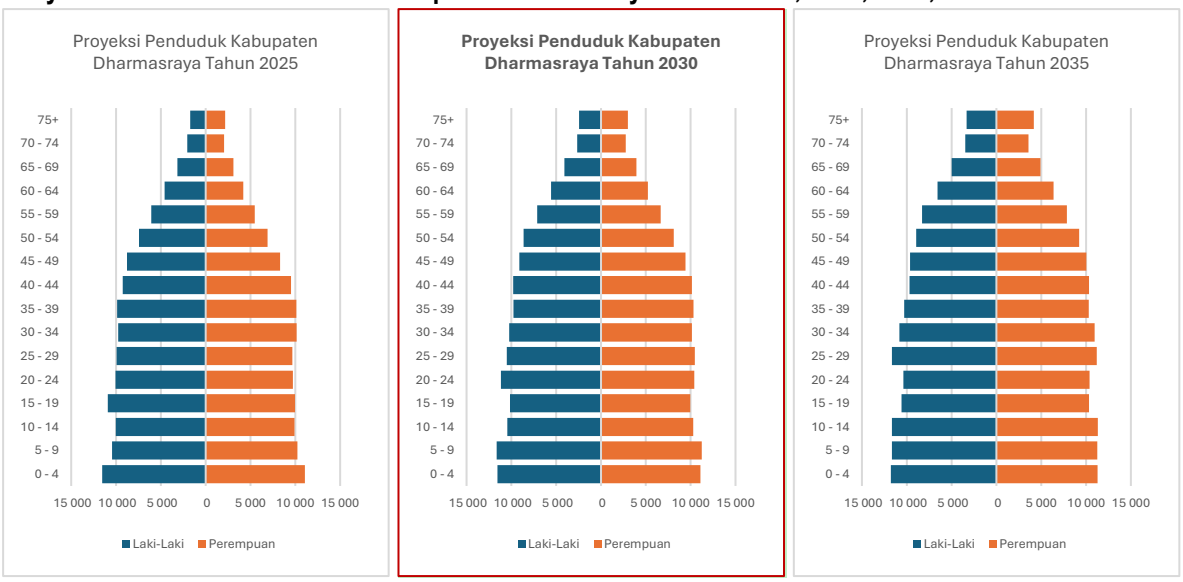
Bonus Demografi

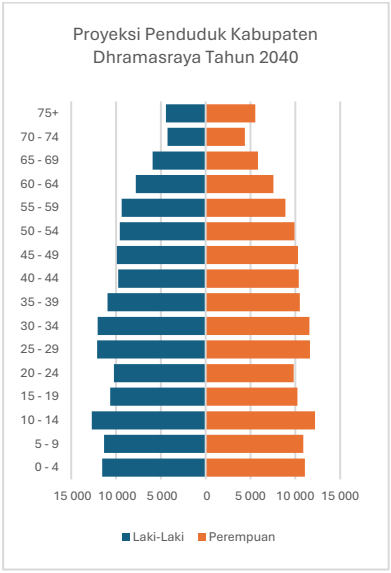
Bonus demografi terjadi pada saat 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan orang tua, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut. Jika dilihat dari proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya dan kondisi saat ini bonus demografi telah terjadi (2023)

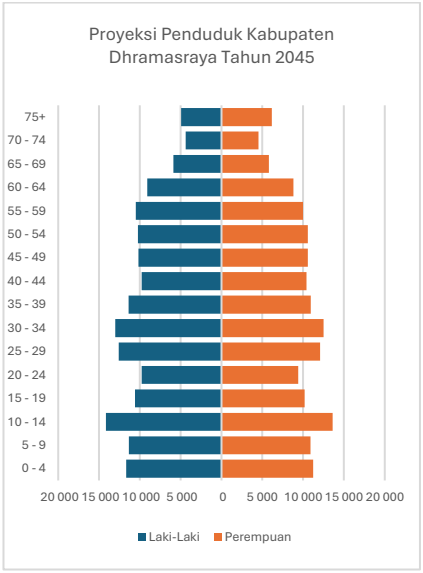
dan akan berlanjut sampai tahun rencana 2045, dimana angka ketergantungan kurang dari 50 (tabel 2-166).

Selanjutnya, akan terjadi jendela peluang (window of opportunity), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia selama 10 tahun mulai dari 2020. Penurunan rasio ini disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit. Namun Kabupaten Dharmasraya sepertinya tidak mengalami window opportunity disebabkan angka ketergantungan terendah dicapai pada angka 45. Untuk lebih jelasnya Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 dapat dilihat pada Gambar 2.70.

Gambar 2- 70
Proyeksi Piramida Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045







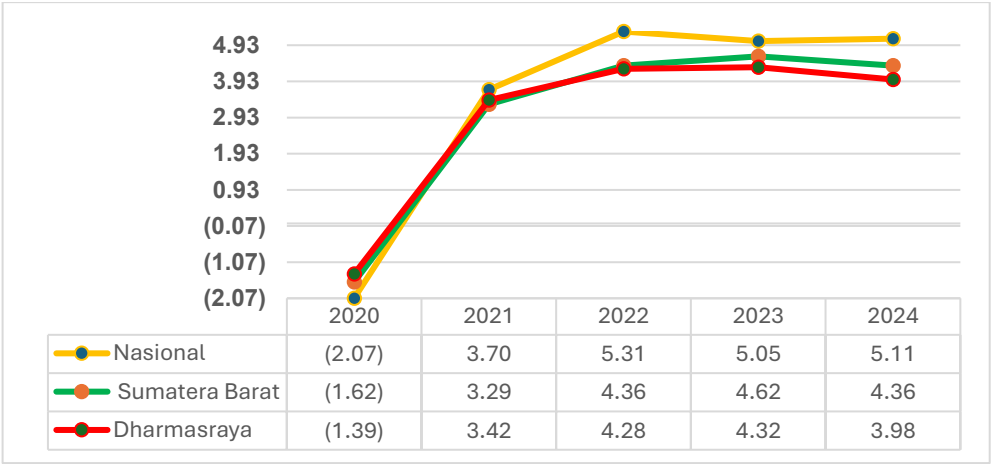
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.71 di bawah :

Gambar 2- 71
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	(2.07)	3.70	5.31	5.05	5.11
Sumatera Barat	(1.62)	3.29	4.36	4.62	4.36
Dharmasraya	(1.39)	3.42	4.28	4.32	3.98

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya terkena Dampak Pandemi COVID-19, dimana Ekonomi Dharmasraya terkontraksi sebesar -1,39%, lebih baik dibandingkan Provinsi Sumbar (-1,62%) dan Nasional (-2,07%). Hal ini mencerminkan resiliensi ekonomi lokal, meskipun tekanan akibat pandemi tetap terasa. Dilihat pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami tahap pemulihan awal, dimana perekonomian Dharmasraya tumbuh positif 3,42%, menunjukkan pemulihan yang cukup cepat, pertumbuhan ini sejalan dengan tren nasional dan provinsi. Sedangkan pada tahun 2022: Puncak Pertumbuhan, Dharmasraya mencatat pertumbuhan 4,28%, namun mulai tertinggal dari pertumbuhan Sumbar (4,36%) dan nasional (5,31%), dimana adanya indikasi bahwa pemulihan ekonomi masih berjalan, namun belum optimal dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan trens pertumbuhan Tahun 2023–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya Cenderung Stabil, Tapi Melambat, dimana pertumbuhan stagnan pada angka 4,32% di 2023, lalu melambat menjadi 3,98% di 2024. Penurunan ini bisa disebabkan antara lain sektor unggulan belum tumbuh maksimal, ketergantungan pada komoditas primer yang terpengaruh harga global dan belum optimalnya investasi atau belanja pemerintah daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya terkontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19. Selanjutnya dari tahun 2021-2024 atau pasca pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk lebih jelasnya Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2- 77

Nilai, Kontribusi, dan Petumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d 2024

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Rp juta)					Kontribusi (persen)					Pertumbuhan (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.139.969	2.254.377	2.299.422	2.367.215	2.418.000	28,71	29,24	28,60	28,22	28,83	(0,76)	5,35	2,00	2,95	2,15
B	Pertambangan dan Penggalian	564.964	464.576	471.523	482.551	463.340	7,58	6,03	5,86	5,75	5,52	0,69	(17,77)	1,50	2,34	(3,98)
C	Industri Pengolahan	406.790	436.466	443.531	451.345	458.110	5,46	5,66	5,52	5,38	5,46	(3,35)	7,30	1,62	1,76	1,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.208	1.245	1.287	1.339	1.400	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(6,52)	3,06	3,36	4,08	4,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	980	960	938	930	930	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	(2,08)	(2,04)	(2,27)	(0,88)	0,05
F	Konstruksi	980.207	1.021.066	1.041.881	1.105.433	1.157.170	13,15	13,24	12,96	13,18	13,80	(5,31)	4,17	2,04	6,10	4,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.054.774	1.103.408	1.167.864	1.229.913	1.298.350	14,15	14,31	14,53	14,66	15,48	(0,34)	4,61	5,84	5,31	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan	437.326	469.079	489.640	516.410	543.420	5,87	6,08	6,09	6,16	6,48	(13,18)	7,26	4,38	5,47	5,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.565	59.069	68.228	72.718	77.150	0,73	0,77	0,85	0,87	0,92	(15,19)	8,26	15,50	6,58	6,09
J	Informasi dan Komunikasi	648.765	695.212	738.919	797.145	841.980	8,70	9,02	9,19	9,50	10,04	7,89	7,16	6,29	7,88	5,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152.700	163.242	172.541	179.267	191.730	2,05	2,12	2,15	2,14	2,29	0,73	6,90	5,70	3,90	6,95
L	Real Estat	159.414	162.797	169.357	179.855	189.460	2,14	2,11	2,11	2,14	2,26	0,04	2,12	4,03	6,20	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	1.402	1.407	1.500	1.597	1.670	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	(5,67)	0,33	6,63	6,45	4,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.647	463.697	537.435	546.615	593.230	6,06	6,01	6,68	6,52	7,07	(0,93)	2,67	15,90	1,71	8,53
P	Jasa Pendidikan	207.286	210.988	220.605	225.103	232.040	2,78	2,74	2,74	2,68	2,77	4,11	1,79	4,56	2,04	3,08

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Rp juta)					Kontribusi (persen)					Pertumbuhan (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.664	144.906	151.263	161.543	170.170	1,86	1,88	1,88	1,93	2,03	7,11	4,50	4,39	6,80	5,34
R, S, T, U	Jasa lainnya	54.308	57.204	63.757	68.167	73.010	0,73	0,74	0,79	0,81	0,87	(9,40)	5,33	11,46	6,92	7,10
T O T A L		**7.454.968**	**7.709.700**	**8.039.690**	**8.387.147**	**8.711.160**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**103,86**	**(1,39)**	**3,42**	**4,28**	**4,32**	**3,86**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor pertanahan masih menjadi sektor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB, yaitu sebesar 28,83 persen. Selanjutnya sektor kedua terbesar di tahun 2023 dalam pembentukan nilai PDRB adalah sektor perdagangan sebesar 15,48 dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 13,18 persen.

Dilihat dari tren perkembangan PDRB Tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terlihat adanya perubahan kontribusi sektor yang cukup signifikan dalam membentuk nilai PDRB. Salah satu sektor dengan kontribusi turun yaitu sektor pertambangan, kontribusinya dari 7,58 persen di tahun 2020 turun menjadi 5,52 persen di tahun 2024.

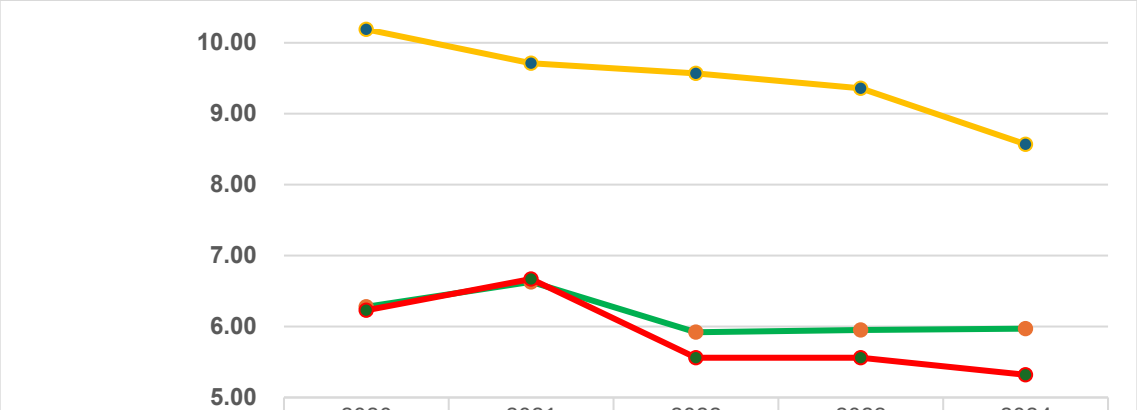
Sektor yang cukup meningkat kontribusinya diantaranya ada pada sektor konstruksi, dan sektor perdagangan sebagai sektor utama pembentuk nilai PDRB, masing-masing meningkat dari 14,05 persen menjadi 15,48 persen di tahun 2024, dan untuk sektor konstruksi juga memperlihatkan percepatan perkembangan dari 13,15 persen menjadi 13,80 di tahun 2024, sedangkan untuk sektor perdagangan juga meningkat dari 14,15 persen menjadi 15,48 persen. Adapun sektor yang cukup meningkat pesat yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dimana d tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 8,70 persen, naik menjadi 10,04 persen di tahun 2024. Sedangkan sektor lainnya cenderung tidak memperlihatkan perubahan kontribusi yang cukup signifikan.

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapatan perkapita di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.72

Gambar 2- 72
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10.19	9.71	9.57	9.36	8.57
Sumatera Barat	6.28	6.63	5.92	5.95	5.97
Dharmasraya	6.23	6.67	5.56	5.56	5.32

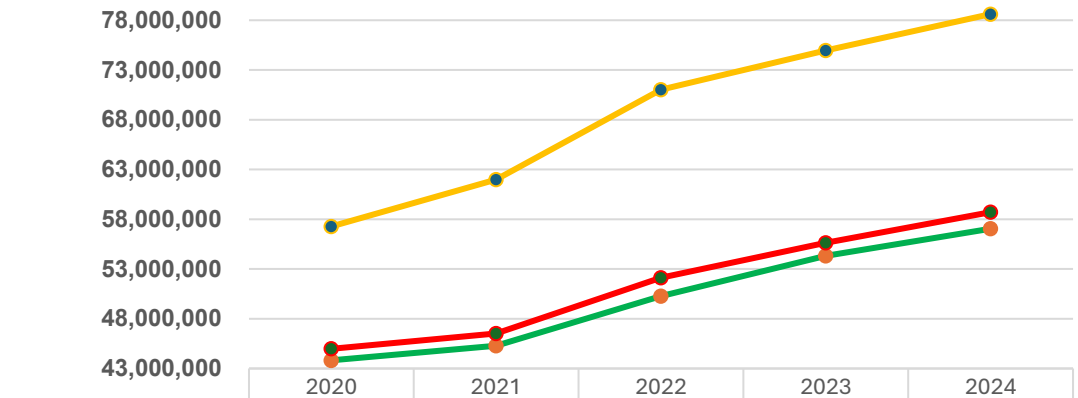
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini. dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020-2024 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

C. PDRB perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Untuk lebih jelasnya PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.73.

Gambar 2- 73
PDRB Perkapita (rupiah) di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	57,281,745	61,988,136	71,030,843	74,964,700	78,617,419
Sumatera Barat	43,825,660	45,293,752	50,264,408	54,326,757	57,047,184
Dharmasraya	44,981,490	46,513,300	52,120,970	55,626,380	58,712,535

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

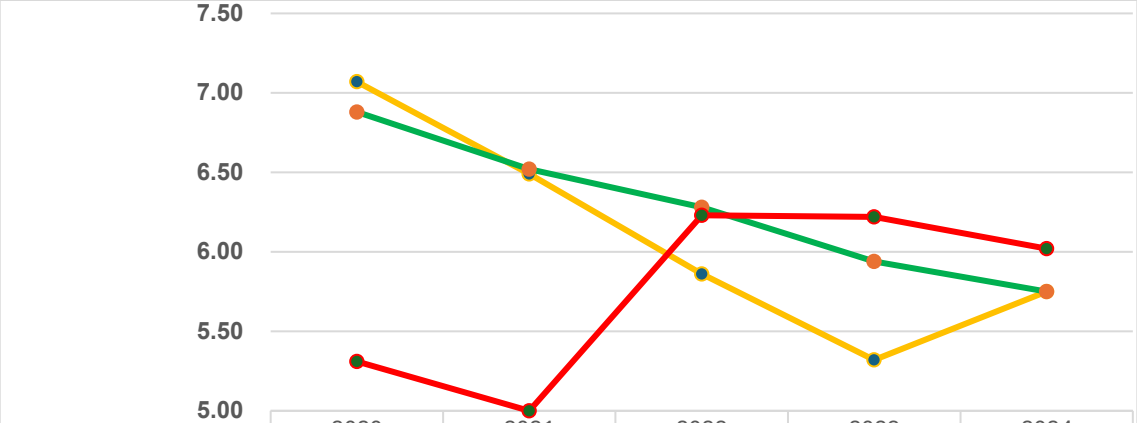
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari PDRB perkapita memperlihatkan perembangan yang cukup baik, PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya terlihat sudah berada di atas PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Namun masih berada di bawah PDRB perkapita nasional.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2- 74
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	5.75
Sumatera Barat	6.88	6.52	6.28	5.94	5.75
Dharmasraya	5.31	5.00	6.23	6.22	6.02

Tingkat pengangguran terbuka di Dharmasraya dari tahun 2021 ke tahun 2022 terlihat meningkat.

E. Ketimpangan Pendapatan/Rasio Gini

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.

Untuk lebih jelasnya rasio gini Kabupaten Dharmasraya, nasional dan provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.75

Gambar 2- 75
Rasio Gini Tahun 2019-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
b. Pengetahuan (knowledge)
c. Standar hidup layak (decent standard of living)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

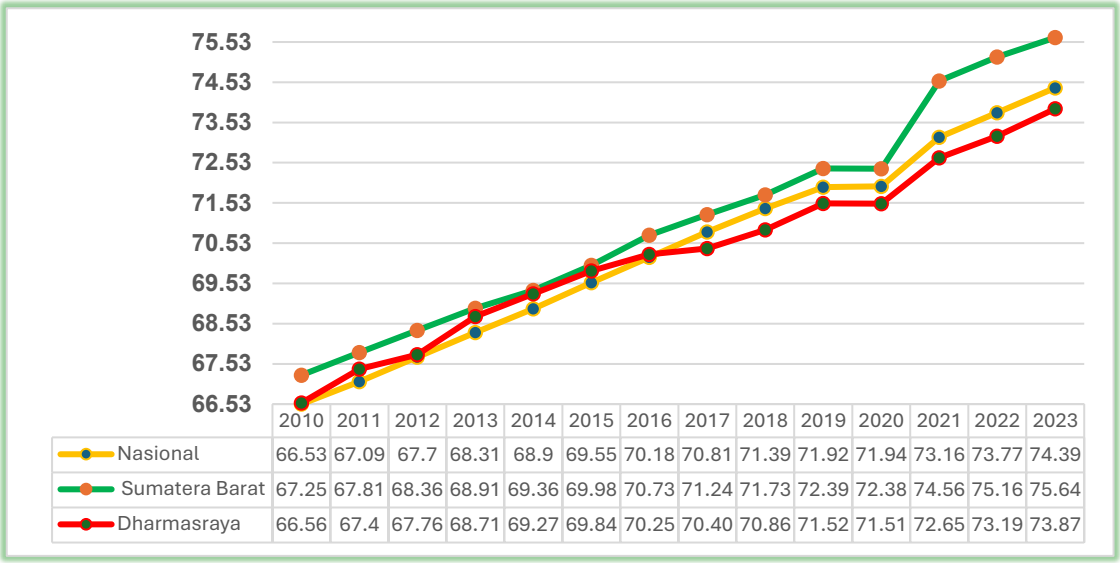
Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif

mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60;
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70;
3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80;
4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.76.

Gambar 2- 76
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	66.53	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94	73.16	73.77	74.39
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	74.56	75.16	75.64
Dharmasraya	66.56	67.4	67.76	68.71	69.27	69.84	70.25	70.40	70.86	71.52	71.51	72.65	73.19	73.87

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2025

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan ketiga wilayah tersebut dari tahun 2010 hingga tahun 2015 tergolong pada kategori sedang. Dan mulai tahun 2016 secara bersamaan IPM beralih menjadi kategori tinggi atau sudah lebih tinggi dari capaian nilai 70.

G. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas No. 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang

penyampaian informasi mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025 – 2030, agar termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. IKAD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 yaitu 3,61. Indeks ini termasuk dalam kategori sedang menuju tinggi (rentang 3,51–4,00) dan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan, koperasi, BPR, dan lembaga keuangan mikro lainnya.

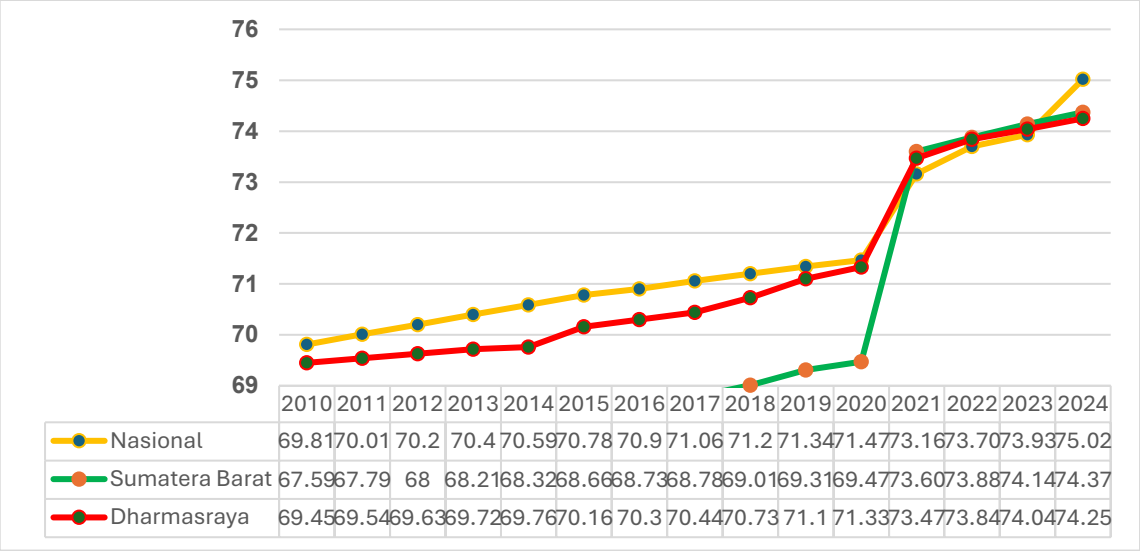
Nilai IKAD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 sebesar 3,61 mencerminkan kemajuan yang cukup baik dalam akses keuangan masyarakat. Namun, integrasi lebih kuat dengan program pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta pemerataan akses layanan keuangan di wilayah pedesaan tetap menjadi prioritas untuk peningkatan nilai IKAD pada periode RPJMD 2025–2030. Dengan integrasi indikator ini dalam dokumen perencanaan, diharapkan arah pembangunan daerah lebih inklusif secara ekonomi dan berbasis data.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

UHH merupakan Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Idealnya UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.77.

Gambar 2- 77
Usia Harapan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (Tahun)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	69.81	70.01	70.2	70.4	70.59	70.78	70.9	71.06	71.2	71.34	71.47	73.16	73.70	73.93	75.02
Sumatera Barat	67.59	67.79	68	68.21	68.32	68.66	68.73	68.78	69.01	69.31	69.47	73.60	73.88	74.14	74.37
Dharmasraya	69.45	69.54	69.63	69.72	69.76	70.16	70.3	70.44	70.73	71.1	71.33	73.47	73.84	74.04	74.25

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

UHH Kabupaten Dharmasraya meningkat seiring dengan perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat. Disini dapat dilihat UHH Dharmasraya dari tahun 2010 hingga 2020 lebih baik dibandingkan dengan Provinsi atau rata-rata selisih lebih tinggi sekitar 2 tahun. Namun setelah adanya perhitungan Usia Harapan Hidup Long Form Sensus Penduduk 2020 (UHH LF SP2020) terdapat penyesuaian perhitungan, sehingga UHH Dharmasraya sedikit di bawah Provinsi Sumbar namun tetap berada di atas nasional.

B. Angka Kematian Ibu

AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya.

AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah. Pada Tabel 2.78 dapat dilihat

perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024.

Gambar 2- 78
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	77,02	257,59	201	84	187
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	3	14	7	3	6
Jumlah kelahiran hidup	orang	3.895	3658	3.482	3.562	3.207

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya rentang waktu tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami penutunan yang cukup signifikan yaitu 77,02 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus). Namun pada tahun 2021 kasus AKI meningkat menjadi 257,59 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19, namun di tahun 2022 sudah terjadi penurunan menjadi 201 per 100.000 kelahiran hidup, dimana kasus kematian ibu melahirkan dari 14 kasus tahun 2021 dan 7 kasus pada tahun 2022 menjadi 3 kasus Pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 6 kasus.

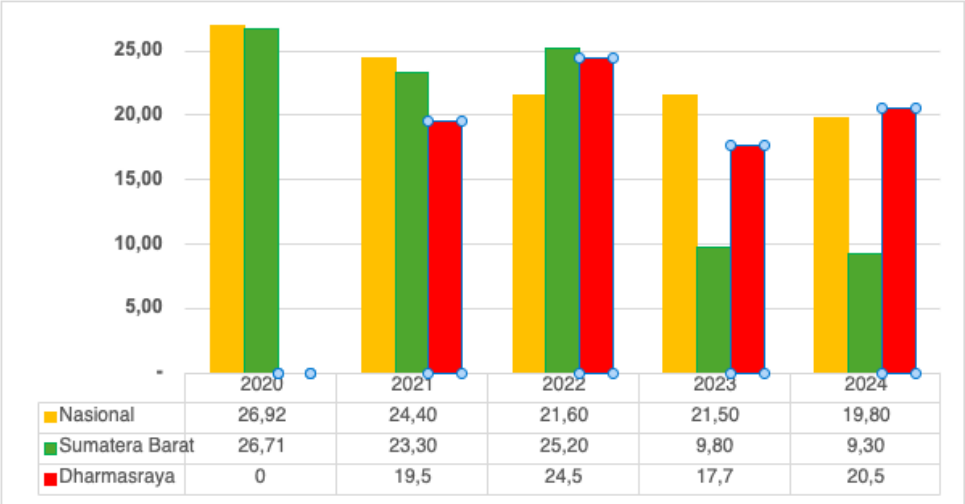
C. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010, maka stunting dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Sangat pendek: Zscore < -3,0
b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Untuk lebih jelasnya Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.79.

Gambar 2- 79
Prevalensi Stunting di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	26,92	24,40	21,60	21,50	19,80
Sumatera Barat	26,71	23,30	25,20	9,80	9,30
Dharmasraya	0	19,5	24,5	17,7	20,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa angka prevalensi stunting berdasarkan data SSGI di Kabupaten Dharmasraya yaitu 19,5%, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Ini indikasi awal bahwa intervensi dasar mulai membuahkan hasil. Kemudian pada tahun 2022 terjadi lonjakan menjadi 24,5%, di atas provinsi dan nasional. Kemungkinan disebabkan oleh dampak pasca-pandemi COVID-19, penurunan daya beli masyarakat, atau lemahnya cakupan intervensi spesifik. Sedangkan tahun 2023 Dharmasraya berhasil menurunkan angka menjadi 17,7%, menunjukkan perbaikan signifikan dan responsif terhadap kondisi tahun sebelumnya. Dan berdasarkan data tahun 2024, kembali naik menjadi 20,5%, lebih tinggi dari nasional (19,8%) dan provinsi (9,3%). Ini menunjukkan tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan intervensi dan efektivitas program lintas sektor. Ini menjadi fokus penting bahwa konsistensi pelaksanaan program dan keberlanjutan intervensi harus dijaga, terutama pada kelompok sasaran berisiko tinggi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi stunting di Dharmasraya berhasil diturunkan pada tahun 2023, namun belum stabil karena kembali meningkat pada tahun 2024, artinya masih terdapat permasalahan signifikan dengan rata-rata provinsi (Sumbar), yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan program. Intervensi telah dilakukan secara terstruktur, namun disparitas wilayah dan keberlanjutan program masih menjadi tantangan.

Adapun inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penurunan sekaligus pencegahan stunting ini adalah melalui pelaksanaan bapak/ibu angkat terhadap kasus stunting. Balita stunting secara mum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun makanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan kesehatan

lingkungan. Oleh sebab itu program bapak/ibu angkat stunting lebih diprioritaskan bagai keluarga miskin. Sedangkan untuk upaya lain yang dilakukan adalah melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan oleh instansi terkait.

D. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

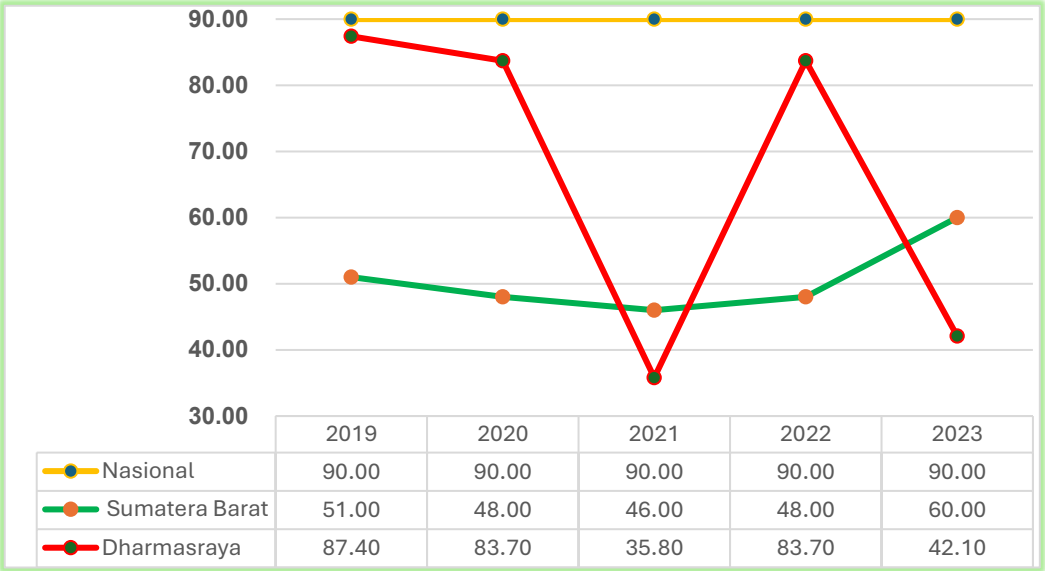
Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting :

a. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
b. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.80.

Gambar 2- 80
Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Sumatera Barat	51.00	48.00	46.00	48.00	60.00
Dharmasraya	87.40	83.70	35.80	83.70	42.10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

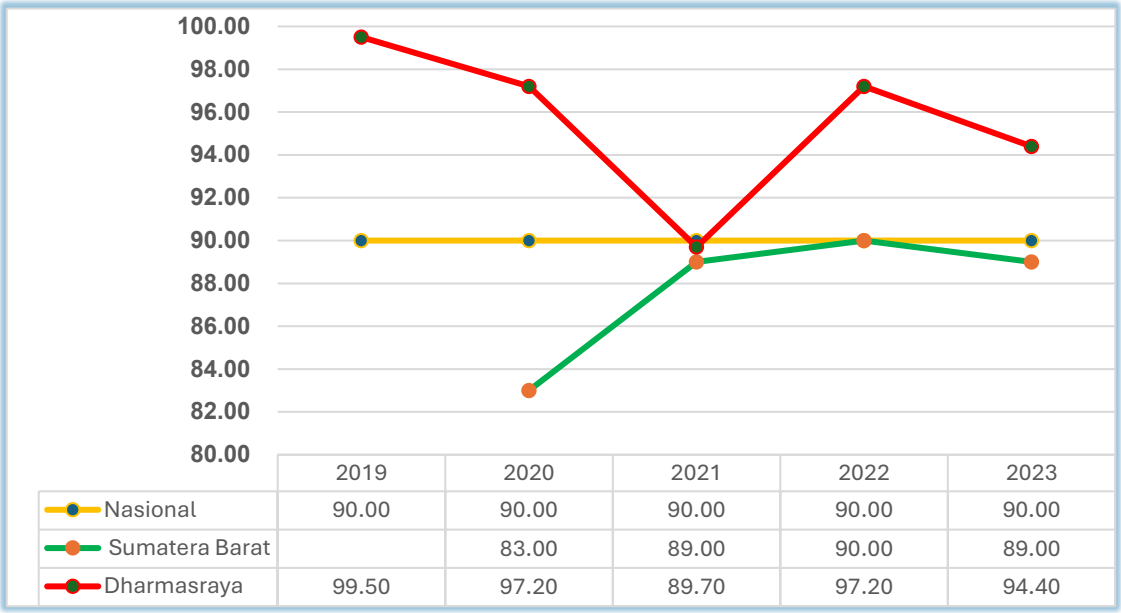
Penemuan dan pengobatan kasus TB di Kabupaten Dharmasraya terlihat fluktuatif, namun dengan capaian yang cukup berhasil atau lebih tinggi rata-rata capaian Provinsi. Hal ini perlu penanganan lebih komprehensif agar kasus TB ke depan dapat diantisipasi dan ditekan agar jumlah kasus TB dapat berkurang di masyarakat.

E. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Tratment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.81.

Gambar 2- 81
Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Sumatera Barat		83.00	89.00	90.00	89.00
Dharmasraya	99.50	97.20	89.70	97.20	94.40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Kinerja keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Dharmasraya bisa termasuk memiliki keberhasilan yang cukup tinggi. Hal ini didukung oleh tersedianya sarana prasarana serta tenaga kesehatan yang menangani kasus ini cukup memadai. Sehingga diharapkan dengan adanya berbagai arah pembangunan bidang kesehatan terutama untuk pencegahan kasus TB untuk jangka menengah dan jangka panjang berdampak pada berkurangnya kasus TB, terutama pada permukiman yang belum memiliki sanitasi belum layak atau permukiman kumuh.

F. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.

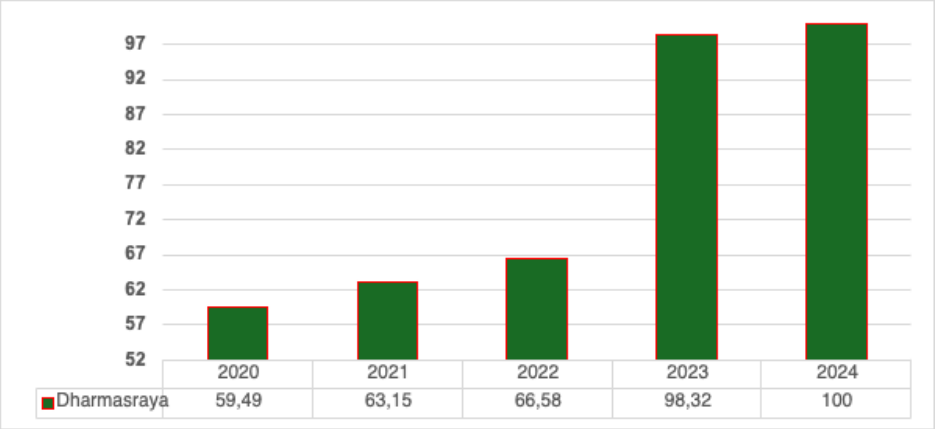
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.

2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.82.

Gambar 2- 82
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Capaian kepesertaan JKN atau BPJS kesehatan di Dharmasraya sudah hampir mencapai 100 persen atau Universal Health Coverage (UHC). Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau. Dengan demikian target ke jangka pendek Dharmasraya sudah dapat mencapai UHC untuk mencapai pemerataan da keterjangkauan layanan kesehatan untuk semua lapisan masyakat.

G. Indeks Keluarga Sehat

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat, antara lain kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup. Aspek tersebut dihitung berdasarkan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat. yaitu sebagai berikut :

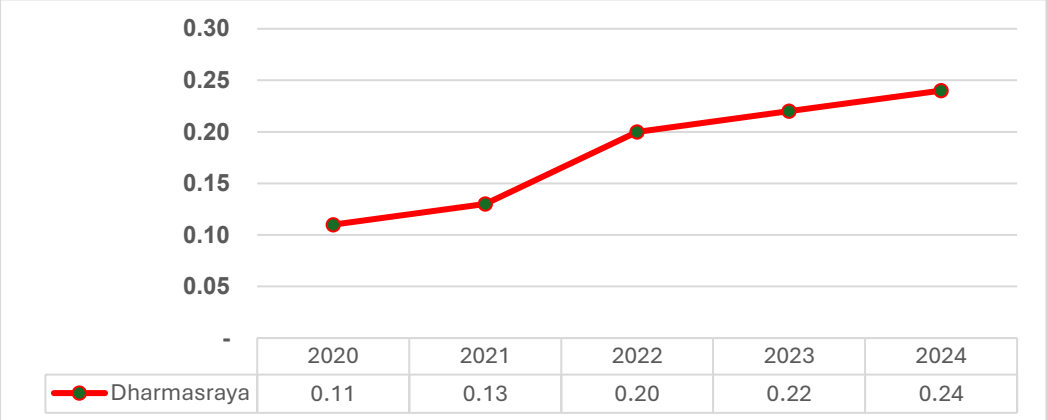
1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
   Tidak semata membatasi jumlah anak dalam keluarga, program KB juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.
   Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit yang bisa berakibat fatal seperti polio, campak, dan difteri. Untuk mendapatkan imunisasi wajib, Anda bisa membawa anak ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas medis lain yang menyediakannya.
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.
   Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian ASI eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat. Maka dari itu, bila terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala tuberkulosis, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Oleh karena itu, bila terdapat anggota keluarga yang menderita hipertensi, ingatkan ia agar selalu menerapkan gaya hidup sehat, meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter, serta melakukan kontrol teratur.
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarga penderitanya. Namun, sebenarnya hal ini dapat dicegah

bila ditangani dengan baik dan sedini mungkin. Bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, dampingi dan ajak dia untuk berobat ke psikiater guna mendapatkan penanganan yang tepat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok. Sudah kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif. Perlu Anda pahami bahwa menjadi perokok pasif sama berbahayanya dengan menjadi perokok aktif. Jadi, jika di keluarga Anda ada yang merokok, bujuk dan bantulah dia agar bisa berhenti. Jika tidak bisa, ingatkan dia untuk merokok di luar rumah.
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi finansial keluarga dapat tetap terjaga walau sedang membutuhkan biaya berobat.
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang Anda pakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang disebabkan oleh buang air besar sembarangan, seperti tifus, cacingan, diare, atau disentri.

Perkembangan indek keluarga sehat (IKS) Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar di bawah :

Gambar 2- 83
Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk (1) Literasi membaca, dan (2) Numerasi. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Berdasarkan Rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi seluruh satuan pendidikan dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK sudah mencapai kategori baik, namun pada kemampuan numerasi masih berkategori sedang. Satuan pendidkan di Kabupaten Dharmasraya baik negeri dan sekolah swasta berjumlah 234 satuan pendidikan, yang terdiri dari 168 SD, 40 SMP, 19 SMA san 9 SMK.

Pada tingkat SD umum negeri dan swasta, capaian kemampuan literasi mencapai 77,54%. Di jenjang SMP umum, capaian sedikit menurun menjadi 76,75%. Sementara itu, capaian tertinggi tercatat pada jenjang SMA umum, yakni sebesar 79,82%. Sebaliknya, capaian terendah terdapat pada jenjang SMK umum, yaitu 73,95%.

Secara detail capaian kemampuan literasi sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.78 di bawah :

Tabel 2- 78
Capain Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Jenjang pendidikan	Satuan	Kemampuan Literasi
1	SD Umum Negeri dan Swasta	persen	77,54
2	SMP Umum Negeri dan Swasta	persen	76,75
3	SMA Umum Negeri dan Swasta	persen	79,82
4	SMK Umum Negeri dan Swasta	persen	73,95

Sumber : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan literasi siswa di Kabupaten Dharmasraya tergolong baik, sementara kemampuan numerasi tergolong sedang. Ini artinya peningkatan kemampuan dibidang numerasi sangat dibutuhkan agar SDM Kabupaten Dharmasraya bisa bersaing di era global.

2. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat Nasional untuk Numerasi

Sama halnya dengan Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca, Asesmen Nasional untuk Numerasi diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Capaian kemampuan numerasi pada berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Kemampuan numerasi diukur dalam bentuk persentase satuan pendidikan (sekolah) yang berhasil mencapai Standar Kompetensi Minimal (SKM) sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada jenjang SD Umum Negeri dan Swasta, capaian numerasi adalah 61,92%, untuk jenjang SMP, capaian meningkat menjadi 68,23%, SMA menunjukkan capaian tertinggi, yaitu 74,04%, sementara itu, capaian pada SMK tercatat sebesar 63,42%. Untuk lebioh jelasnya kemampuan kemampuan numerasi sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.79 di bawah :

Tabel 2- 79
Capain Kemampuan Numerasi Pada Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK (persen) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Jenjang pendidikan	Satuan	Kemampuan Numerasi
1	SD Umum Negeri dan Swasta	persen	61,92
2	SMP Umum Negeri dan Swasta	persen	68,23
3	SMA Umum Negeri dan Swasta	persen	74,04
4	SMK Umum Negeri dan Swasta	persen	63,42

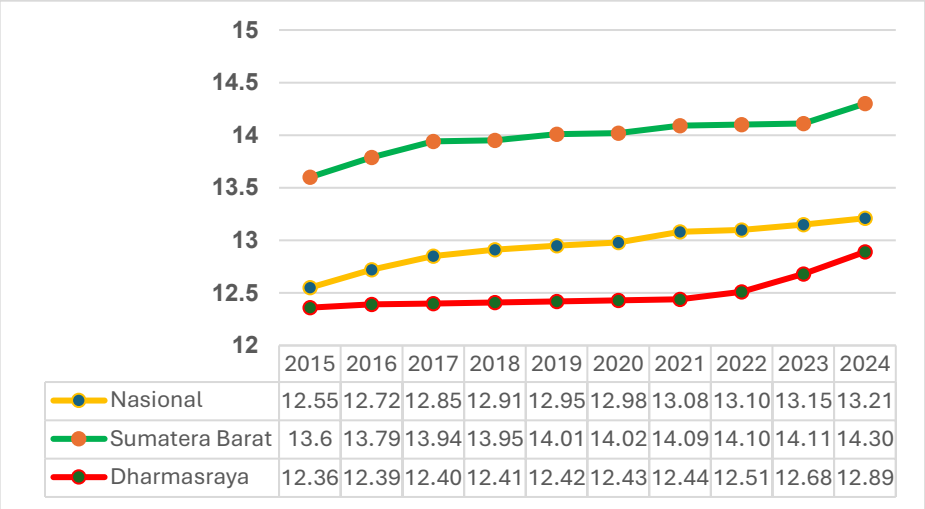
Sumber : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas secara umum, capaian numerasi satuan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif, terutama di jenjang SMA. Namun, capaian yang masih rendah di jenjang SD dan SMK perlu mendapat perhatian khusus. Untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penguatan literasi numerasi sejak dini di jenjang SD melalui pembelajaran kontekstual dan menyenangkan, peningkatan kapasitas guru, khususnya di SMK, dalam menyampaikan materi numerasi dengan pendekatan yang relevan dengan dunia kerja dan monitoring dan evaluasi rutin terhadap sekolah-sekolah yang belum mencapai SKM, serta pemberian dukungan khusus untuk mempercepat peningkatan capaian.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.84.

Gambar 2- 84
Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (indeks)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98	13.08	13.10	13.15	13.21
Sumatera Barat	13.6	13.79	13.94	13.95	14.01	14.02	14.09	14.10	14.11	14.30
Dharmasraya	12.36	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43	12.44	12.51	12.68	12.89

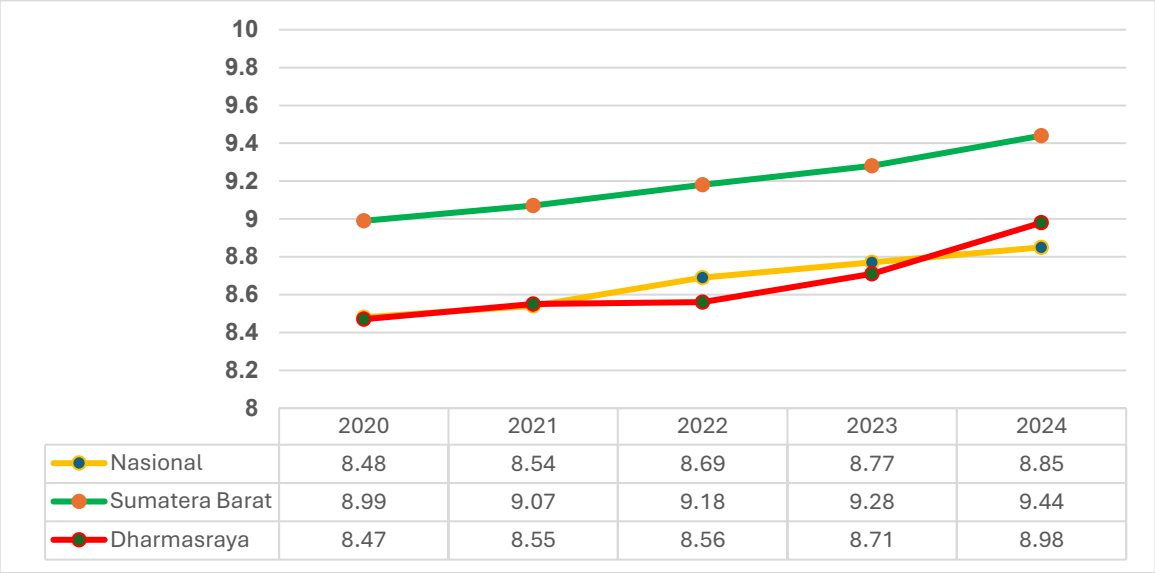
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2025

HLS setiap tahunnya selalu meningkat, dan pada tahun 2022 ke tahun 2023, begitupun tahun 2023 ke tahun 2024 terlihat adapnya percepatan peningkatan nilai, sehingga terlihat sudah hampir menyamai HLS nasional. Dengan capaian sebesar 12,89 tahun, maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata penduduk usia 7-25 tahun sudah dapat menamatkan pendidikan SMA/MA/SMK dan sudah berada pada pendidikan perguruan tinggi tahun pertama.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.85.

Gambar 2- 85
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8.48	8.54	8.69	8.77	8.85
Sumatera Barat	8.99	9.07	9.18	9.28	9.44
Dharmasraya	8.47	8.55	8.56	8.71	8.98

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Dengan melihat perkembangan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah cukup berkembang dengan baik, meskipun pada dasarnya rata-rata lama sekolah merupakan dampak dari pelayanan pendidikan jangka panjang/ menengah yang telah dilakukan sejak beberapa periode sebelumnya , setidaknya hal ini sudah memperlihatkan percepatan dan sudah lebih baik dibadingkan dengan capaian nasional.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi

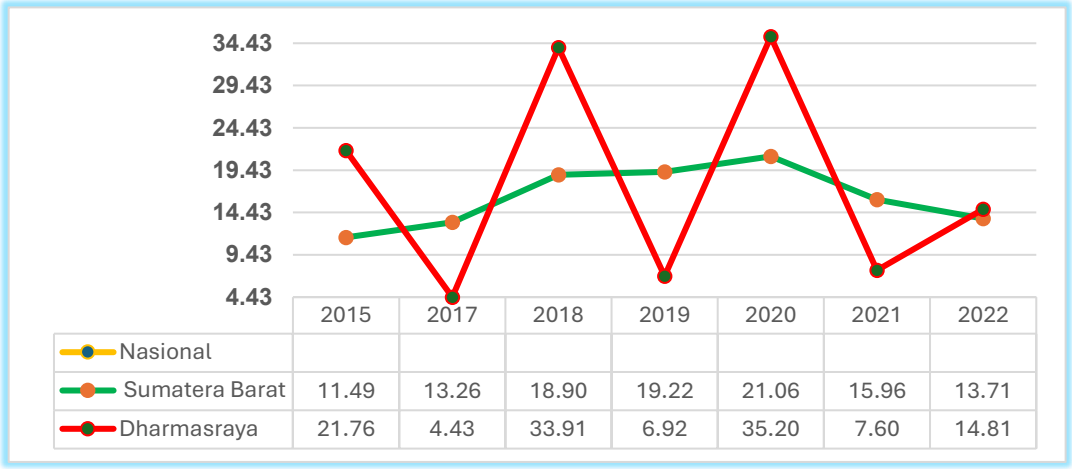
pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).
Jenjang pendidikan tinggi mencakup:

1. Diploma I-IV
2. S1
3. S2
4. S2 Terapan
5. S3

Adapun Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2022 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.86

Gambar 2- 86
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2022 (persen)



	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional							
Sumatera Barat	11.49	13.26	18.90	19.22	21.06	15.96	13.71
Dharmasraya	21.76	4.43	33.91	6.92	35.20	7.60	14.81

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Capaian indikator ini setiap tahunnya selalu berfluktuasi, diluar valid atau tidaknya data untuk indikator ini. Maka secara umum realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebanyak 35,20 persen penduduk Dharmasraya sudah megenyam pendidikan tinggi.

6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja Dibidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Untuk

Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Penndidikan dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2- 80
Pengelompokan Bidang Keahlian Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
Tidak/ belum tamat SD SD/ MI/ SDLB/ Paket A SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMLB/ Paket C SMK MAK	Diploma I/ II/ III Diploma IV S1 S2 S2 Terapan S3

Sumber : Surat Edaran Bersama Menteri PPN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024.

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Sejak pemekaran Kabupaten Dharrnasraya lulusan pendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat jumlahnya. Konsekwensi dari peningkatan jumlah tersebut dibutuhkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian pendidikan menengah dan tinggi tersebut. Saat ini sudah banyak lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang ditampung bekerja di Kabupaten Dharmasraya maupun di luar kabupaten. Walaupun tingkat kewirausahan nasional sebesar 3% (masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN) diharapkan lulusan pendidikan menengah dan tinggi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (wirausaha) dalam bentuk UMKM sekaligus mampu menampung tenaga kerja yang dibutuhkan dari kegiatan kewirausahaan tersebut. Dengan proses tersebut diharapkan capaian angka persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut kondisi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 81
Persentase Kondisi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023

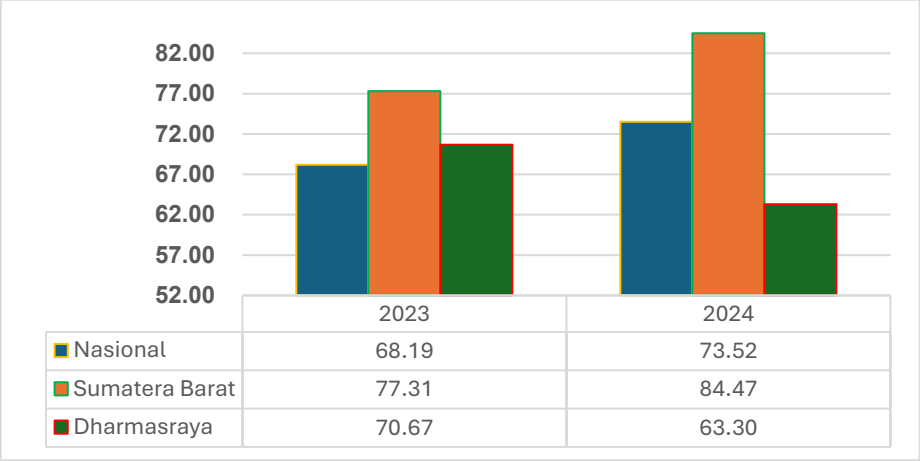
Kabupaten	Tahun	
	2022	2023
Dharmasraya	71,77	76,73

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kemampuan, akses, dan budaya literasi masyarakat suatu daerah. IPLM menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki keterampilan membaca, menulis, mengakses informasi, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan literasi melalui berbagai program, seperti penguatan perpustakaan daerah dan nagari, gerakan literasi sekolah, serta kampanye membaca di tengah masyarakat. Namun, hasil pengukuran IPLM tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian serius.

Gambar 2- 87
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa nilai IPLM Kabupaten Dharmasraya sebesar 70,67, lebih tinggi dari rata-rata nasional (68,19) namun masih di bawah Provinsi Sumatera Barat (77,31). Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat Dharmasraya berada pada tingkat sedang ke atas, dengan dampak positif dari program-program literasi berbasis komunitas dan perpustakaan yang mulai berjalan. Sementara jika dilihat pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan IPLM Dharmasraya menjadi 63,30, selisih hampir 7,4 poin dari tahun sebelumnya,

sedangkan nilai nasional meningkat menjadi 73,52, dan Sumatera Barat melonjak ke angka 84,47, menunjukkan kemajuan pesat secara umum di luar Kabupaten Dharmasraya. Penurunan ini membuat posisi Dharmasraya tertinggal dari kedua benchmark, dan mengindikasikan adanya kemunduran dalam capaian atau keberlanjutan program literasi.

Penurunan nilai IPLM Kabupaten Dharmasraya dari 70,67 di tahun 2023 menjadi 63,30 pada tahun 2024 merupakan fokus penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan dan efektivitas program-program literasi. Dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan dan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, Kabupaten Dharmasraya berpotensi mengejar ketertinggalan dan bahkan menjadi pelopor literasi berbasis nagari di masa mendatang.

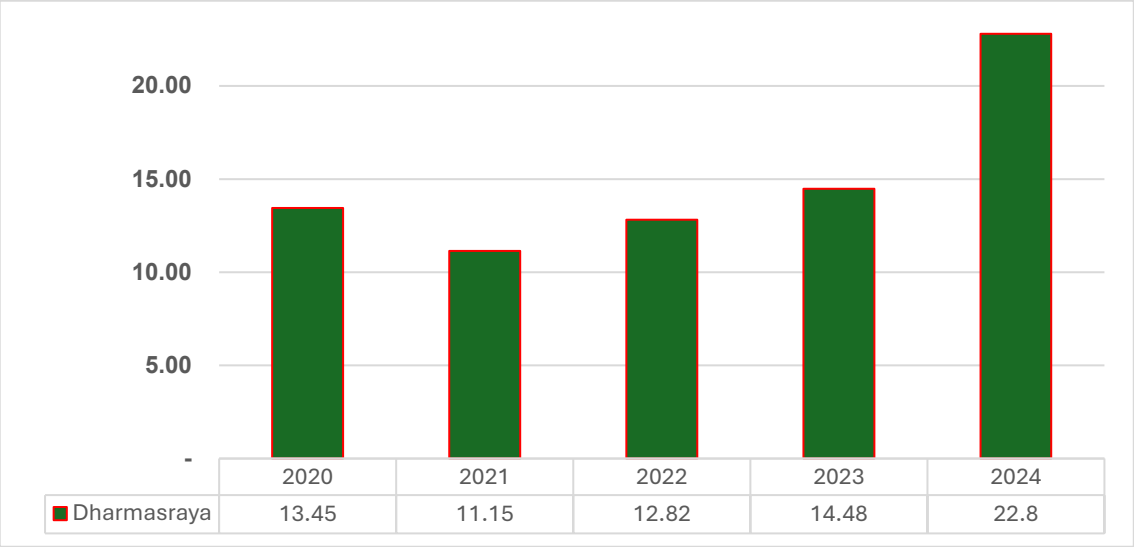
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkatperlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Untuk lebih jelasnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.88.

Gambar 2- 88
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Dilihat dari capaian data di atas, maka terlihat bahwa cakupan BPJS ketenagakerjaan tahun 2022 baik di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Dharmasraya masih relatif rendah. Masih rendahnya komitmen sektor pekerja formal, sektor pekerja informal maupun sektor pekerja kostruksi untuk keikutsertaan pada BPJS ketenagakerjaan menggambarkan masih belum besarnya komitmen perusahaan akan kesehatan dan resiko kerja yang ada di dunia kerja pada umumya. Jika dilihat berdasarka tahun 2020 capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya sebesar 11,15 meningkat menjadi 22,8 di Tahun 2024.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi

penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikatorini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. Saat ini baru 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal yaitu sebagai ASN.

2.2.5. Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Dharmasraya meskipun dengan etnis yang heterogen memiliki basis adat dan agama yang menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun. Akan tetapi beberapa masalah agama dan budaya perlu menjadi catatan untuk membangun kehidupan yang harmonis dimasa depan. Masalah perbedaan cara pandang dan pemahaman keagamaan kadang-kadang bisa memicu ketegangan sosial. Pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran dan adanya lembaga yang memayungi kehidupan keagamaan menjadi dasar bersama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

Generasi muda sangat rentan terhadap pergeseran nilai budaya yang diidorong oleh teknologi informasi. Kurangnya ruang ekspesi dan sosialisasi menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memberi mudarat. Oleh karena itu dibutuhkan wadah ruang dan lembaga untuk memperkuat identitas, menanamkan nilai dan berekspresi bagi mereka.

Kabupaten Dharmasraya memiliki akar historis budaya dimana namanya diambil dari Kerajaan Dharmasraya yang pernah jaya setelah kerajaan Sriwijaya runtuh dimana Dharmasraya menjadi kerajaan terbesar di Sumatera. Identitas budaya ini menjadi aset budaya yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Berbagai kegiatan konservasi dan festival berdasarkan jejak historis masa lalu perlu diteruskan dan ditambah.

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Di Kabupaten Dharmasraya, IPK menjadi salah satu indikator kunci

dalam menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

Kabupaten Dharmasraya, yang terletak di Sumatera Barat, memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Keberagaman adat, seni, bahasa, dan tradisi masyarakat Minangkabau memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi pembangunan kebudayaan daerah. Namun, meskipun daerah ini memiliki warisan budaya yang kaya, masih ada tantangan dalam hal pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Meski data capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) saat ini belum tersedia, ini merupakan kesempatan untuk memulai pembangunan sistem pengelolaan data kebudayaan yang lebih baik di Kabupaten Dharmasraya. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengumpulan data dan integrasi berbagai pihak, Kabupaten Dharmasraya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kebudayaan lokal, serta merancang kebijakan yang lebih efektif untuk pelestarian dan pengembangan budaya di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa kebudayaan bukan hanya sebuah warisan, tetapi juga aset yang dapat digunakan untuk memajukan daerah secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan pengelolaan yang baik, IPK dapat digunakan sebagai alat ukur yang penting dalam merencanakan pembangunan daerah berbasis budaya.

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat harmonisasi antar umat beragama di suatu daerah. IKUB mengukur sejauh mana toleransi, saling menghormati, dan kerukunan hidup antar masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda dapat terwujud. Di Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan daerah dengan keberagaman agama yang cukup signifikan, IKUB menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hubungan sosial dan keharmonisan antar umat beragama.

a. Keberagaman Agama di Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk dengan berbagai latar belakang agama, di antaranya Islam, Kristen, Hindu. Keberagaman ini memberi tantangan dan peluang dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Kerukunan antar umat beragama menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

b. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) antara lain: penyelenggaraan Dialog Antar Agama: Pemerintah daerah rutin

menyelenggarakan forum-forum dialog antar umat beragama, yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar agama dan mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul karena perbedaan keyakinan. Selain itu Pemerintah daerah juga melibatkan tokoh agama sebagai pemimpin dalam membina kerukunan umat beragama di tingkat lokal. Kegiatan keagamaan bersama, seperti acara keagamaan lintas agama, sering diadakan untuk memperkuat solidaritas antar umat beragama.

Meskipun data dari segi angka Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Dharmasraya belum ada tetapi kerukunan umat beragama sudah terjada dan memiliki potensi untuk berkembang. Dengan adanya program yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, kerukunan antar umat beragama dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu terus mendorong inisiatif untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai perbedaan, agar Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi contoh daerah dengan kerukunan umat beragama yang tinggi.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan keluarga di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama:

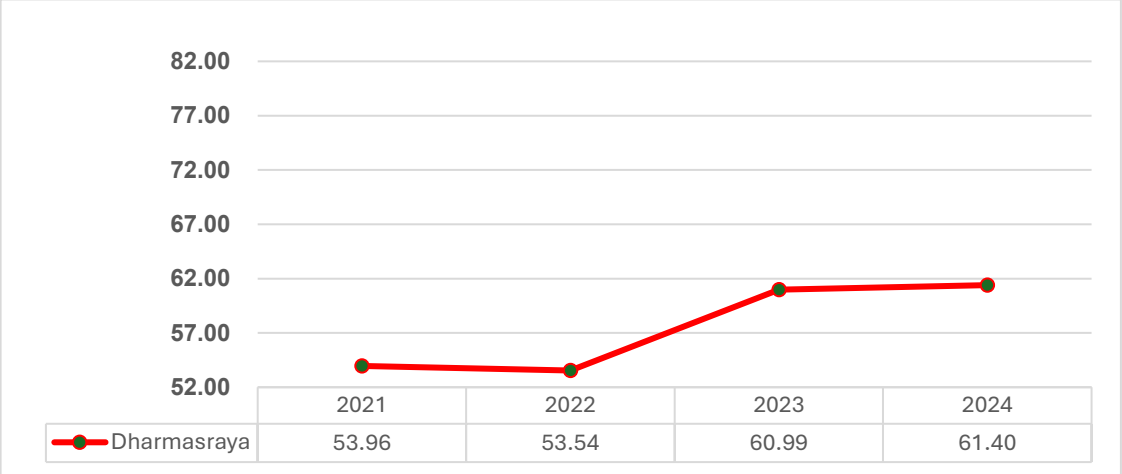
1. Kemandirian
   Menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, termasuk ekonomi, pekerjaan, dan kepemilikan jaminan sosial.
2. Keharmonisan
   Mencerminkan kualitas hubungan dalam keluarga, seperti komunikasi antar anggota keluarga, tingkat kekerasan dalam rumah tangga, serta waktu kebersamaan antar anggota keluarga.
3. Ketangguhan
   Menggambarkan daya tahan keluarga dalam menghadapi tekanan atau krisis, seperti ketahanan terhadap pengaruh negatif media, narkoba, atau permasalahan sosial lainnya.

Capaian indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Dharmasraya hanya terdapat pada tahun 2024 yaitu 62,76. Sementara data yang tersedia dari tahun 2021-2024 yaitu data capaian indeks pembangunan kualitas keluarga.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga

dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya gambaran terkait indeks pembangunan kualitas keluarga dapat dilihat pada Gambar 2.89.

Gambar 2- 89
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dinas SOSP3APPKB Tahun 2025

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Dharmasraya meningkat dari tahun ke tahun dan mulai mengalami percepatan sejak tahun 2021. Indeks ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Dharmasraya baik dari segi kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Agar pembangunan di Kabupaten Dharmasraya maju yang berbudaya dan berkelanjutan maka kualitas keluarga menjadi pondasi utama pembangunan. Akselerasi ini terus diharapkan terjadi sampai tahun 2045 sehingga tercipta kualitas keluarga yang tinggi.

B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu

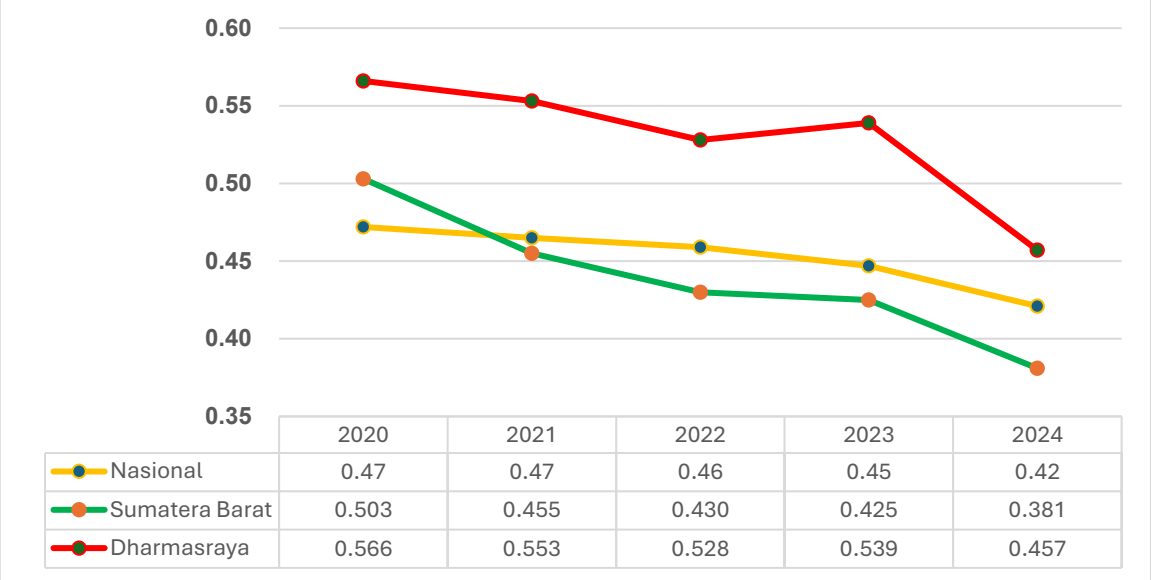
a. Dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari
   - indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)
   - proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20),

b. Dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari
   - indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas
   - persentase anggota legislatif

c. Dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili
   - indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0-1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada Gambar 2.90.

Gambar 2- 90
Indeks Ketimpangan Gender (indeks) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0.47	0.47	0.46	0.45	0.42
Sumatera Barat	0.503	0.455	0.430	0.425	0.381
Dharmasraya	0.566	0.553	0.528	0.539	0.457

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

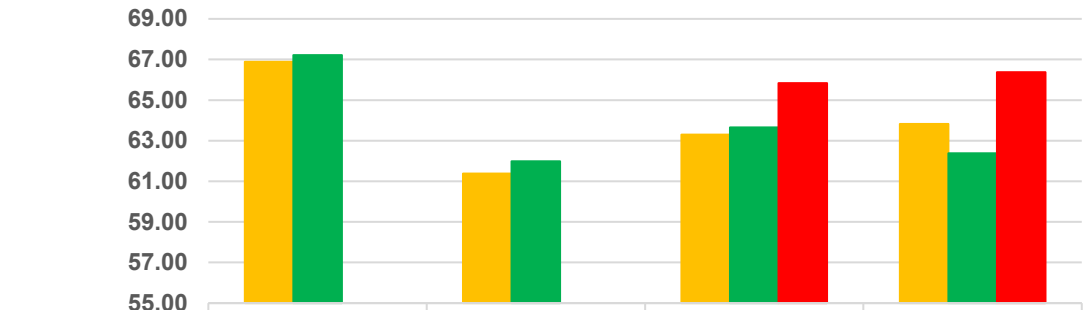
Perkembangan IKG nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Dharmasraya menunjukkan penurunan nilai secara konsisten. Hal ini menunjukkan perkembangan yang membaik dengan menurunnya ketimpangan gender.

C. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan anak di suatu wilayah telah berhasil.

Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di selam 2 tahun terakhir menunukkan perbaikan, naik dari 65,84 menjadi 66,37. Capaian IPA Dharmasraya tahun 2023 lebih tinggi dari IPA nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan IPA Dharmasraya dengan nasional, dan provinsi dapat dilihat pada grafik dibawah.

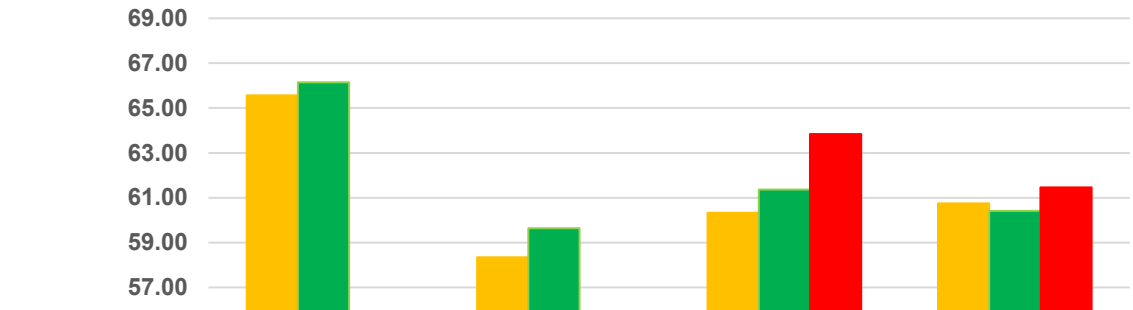
Gambar 2- 91
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023
Nasional	66.89	61.38	63.30	63.83
Sumatera Barat	67.21	61.98	63.65	62.38
Dharmasraya			65.84	66.37

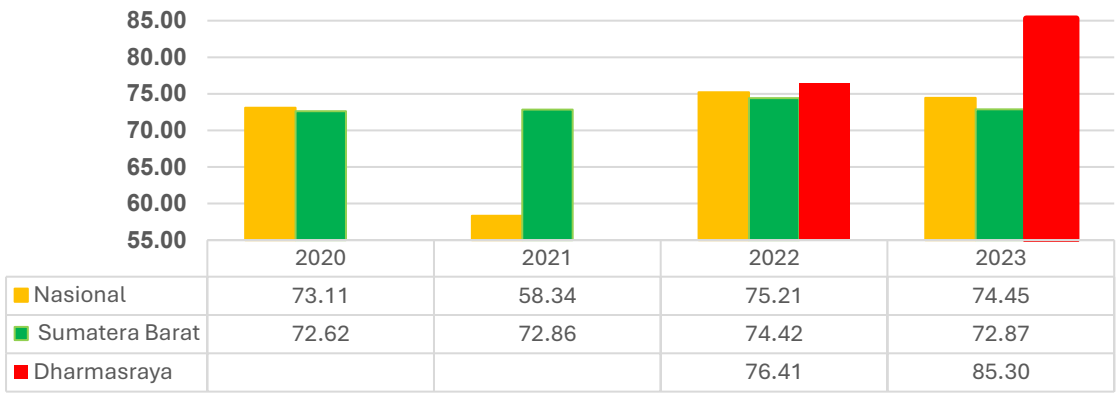
Indeks perlindungan anak terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Pemenuhan Khsus Anak (IPKA). Untuk pencapaian IPHA dan IPKA di tahun 2022 dan tahun 2023 Dharmasraya selalu lebih tinggi dari nasional dan provinsi.

Gambar 2- 92
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023
Nasional	65.56	58.34	60.33	60.75
Sumatera Barat	66.15	59.64	61.37	60.42
Dharmasraya			63.84	61.46

Gambar 2- 93
Indeks Pemenuhan Khusus Anak (IPHA) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023
Nasional	73.11	58.34	75.21	74.45
Sumatera Barat	72.62	72.86	74.42	72.87
Dharmasraya			76.41	85.30

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam dimensi dan variabel yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih fokus pada kesenjangan gender.

Gambar 2- 94
Indeks Pembangunan Gender (indeks) Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



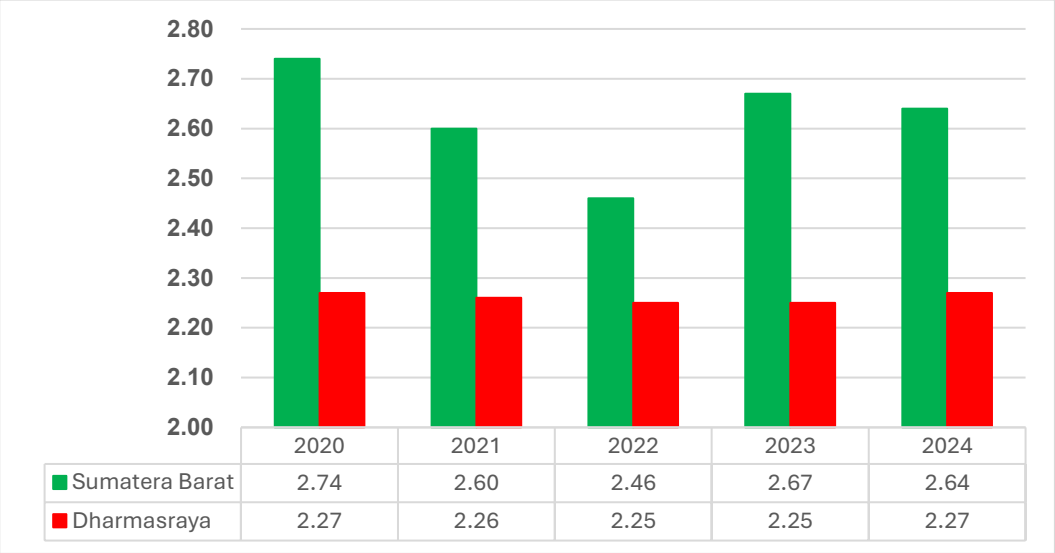
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	91.06	91.27	91.63	91.85	91.85
Sumatera Barat	94.17	94.34	94.72	94.93	92.25
Dharmasraya	88.31	88.32	88.56	89.11	89.71

Sumber : BPS. Tahun 2025

E. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu.

Gambar 2- 95
Angka Kelahiran Total (indeks) Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Barat	2.74	2.60	2.46	2.67	2.64
Dharmasraya	2.27	2.26	2.25	2.25	2.27

Sumber : BPS. Tahun 2025

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan adalah jumlah rata-rata pengeluaran yang dibelanjakan oleh satu orang (per kapita) dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berdasarkan Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya mengalami tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2020, pengeluaran tercatat sebesar Rp939.416,67, kemudian meningkat menjadi Rp943.666,67 pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut pada 2022 sebesar Rp970.833,33, dan pada 2023 menjadi Rp991.750,00. Di tahun 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan mencapai angka tertinggi dalam periode lima tahun, yaitu Rp1.021.166,67.

Tabel 2- 82
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertahun	(Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	11,273,000	11,324,000	11,650,000	11,901,000	12,254,000
Perbulan	(Ribu Rupiah/Orang/ Bulan)	939,416.67	943,666.67	970,833.33	991,750.00	1,021,166.67

Sumber : https://www.bps.go.id/ dan Hasil Analisis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif selama 2020–2024. Hal ini bisa menjadi indikator pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, meskipun perlu dilihat dalam konteks inflasi dan distribusi pendapatan.

2.3.2. Produktivitas Total Daerah

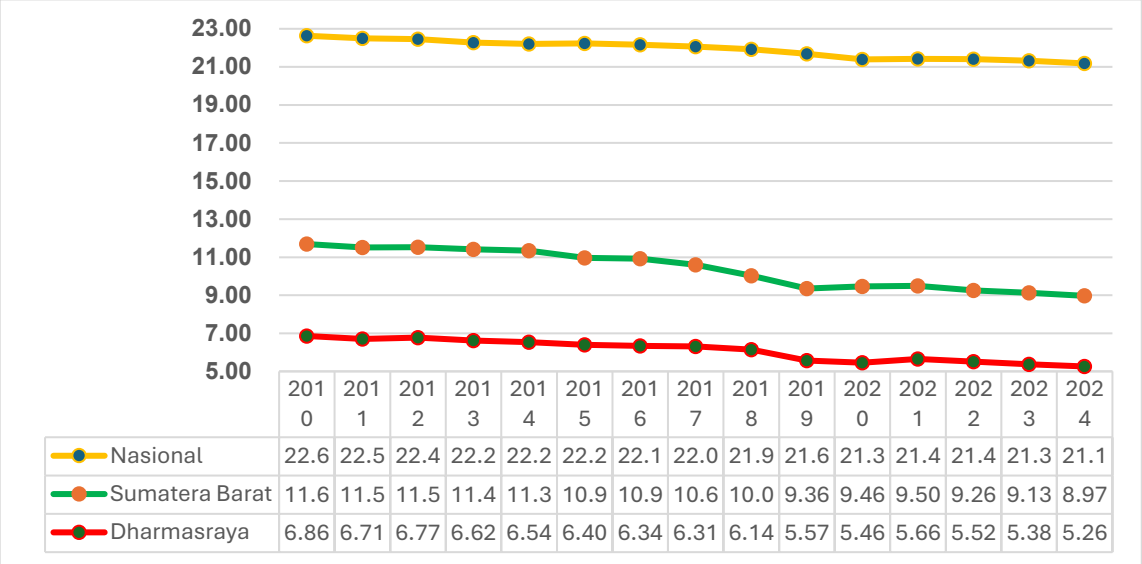
Produktivitas Total Daerah adalah ukuran yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas suatu wilayah (daerah) dalam menggunakan seluruh sumber dayanya (tenaga kerja, modal, lahan, teknologi, dll.) untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan output (produk domestik regional bruto/PDRB) dari input-input yang digunakan.

2.3.3. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), karena berperan dalam menciptakan nilai tambah dari proses transformasi bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Di Kabupaten Dharmasraya, kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan selama 15 tahun terakhir, meskipun kontribusinya tetap lebih baik dibanding rata-rata provinsi.

Tabel 2- 83
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (persen)



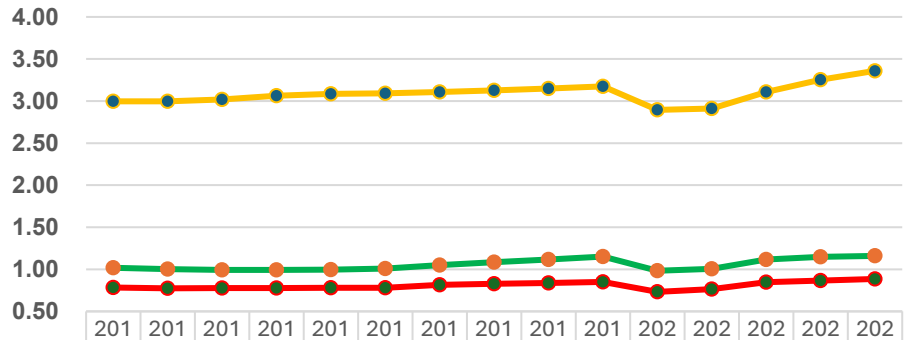
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	22.6	22.5	22.4	22.2	22.2	22.2	22.1	22.0	21.9	21.6	21.3	21.4	21.4	21.3	21.1
Sumatera Barat	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	10.9	10.9	10.6	10.0	9.36	9.46	9.50	9.26	9.13	8.97
Dharmasraya	6.86	6.71	6.77	6.62	6.54	6.40	6.34	6.31	6.14	5.57	5.46	5.66	5.52	5.38	5.26

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya masih relatif rendah dan cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa perlu dilakukan transformasi ekonomi daerah dari sektor primer menuju sektor sekunder melalui hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan rantai nilai. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan infrastruktur, sektor industri pengolahan dapat menjadi pengungkit baru pertumbuhan ekonomi Dharmasraya yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Akomodasi dan Makan Minum merupakan bagian dari sektor tersier (jasa) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dari sisi pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Di Kabupaten Dharmasraya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang lambat namun konsisten, mencerminkan adanya potensi yang belum tergarap secara optimal.

Tabel 2- 84
Kontribusi PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2024 (persen)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	3.00	3.00	3.02	3.06	3.09	3.09	3.11	3.13	3.15	3.17	2.90	2.91	3.11	3.25	3.36
Sumatera Barat	1.02	1.00	0.99	0.99	1.00	1.01	1.05	1.09	1.12	1.15	0.98	1.01	1.12	1.15	1.16
Dharmasraya	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.82	0.83	0.84	0.85	0.73	0.77	0.85	0.87	0.89

Pada tahun 2010, kontribusi sektor Akomodasi & Mamin sebesar 0,78% dari total PDRB, setelah sempat stagnan selama lima tahun, kontribusi mulai perlahan naik dari tahun 2016 (0,82%) hingga mencapai 0,89% pada tahun 2024, artinya, dalam 15 tahun kontribusi sektor ini hanya naik sebesar 0,11 poin persentase, atau pertumbuhan yang sangat lambat.

Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya masih tergolong rendah dan bertumbuh lambat selama periode 2010–2024. Dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, sektor ini belum memainkan peran signifikan dalam perekonomian daerah. Namun demikian, peluang pengembangannya terbuka luas apabila ada dorongan kebijakan yang fokus pada pariwisata, pengembangan UMKM kuliner, dan peningkatan infrastruktur pendukung.

C. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)

Kabupaten Dharmasraya, meskipun memiliki potensi pariwisata yang kaya, masih menghadapi tantangan besar dalam hal menarik wisatawan mancanegara. Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata adalah jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Namun, saat ini data mengenai jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya belum tercatat dengan jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sistem pemantauan yang efisien atau keterbatasan data yang terintegrasi dari berbagai sektor terkait pariwisata.

Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Dharmasraya memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan wisata internasional. Pemantauan yang lebih baik, promosi yang intensif, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung akan meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

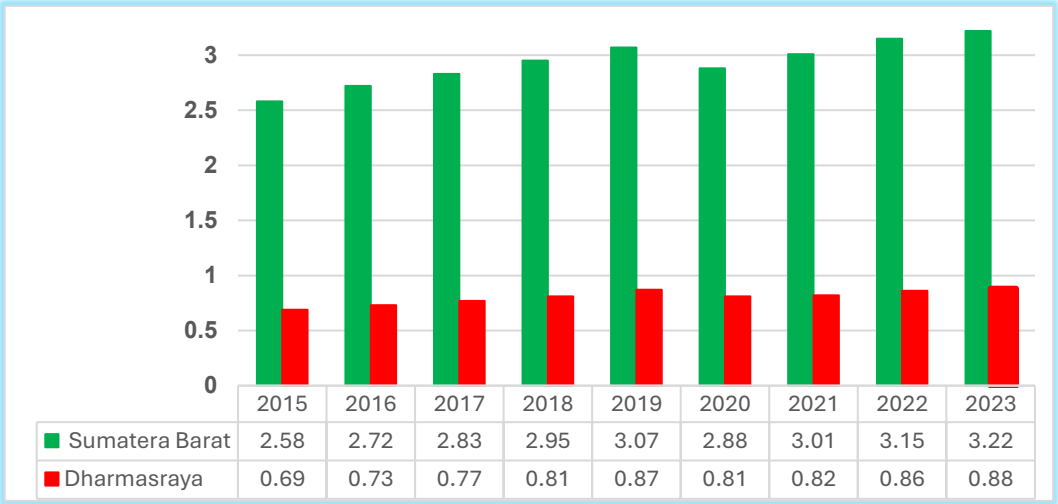
D. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari mis-interpretasi. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk :

1) Fesyen
2) Kuliner
3) Kriya
4) Film, Animasi dan Video
5) Pengembang Permainan
6) Aplikasi
7) Musik
8) Seni Pertunjukan
9) Fotografi
10) Desain Komunikasi Visual
11) Televisi dan Radio
12) Seni Rupa
13) Desain Produk
14) Periklanan
15) Penerbitan
16) Arsitektur
17) Desain Interior

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.96.

Gambar 2- 96.
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat	2.58	2.72	2.83	2.95	3.07	2.88	3.01	3.15	3.22
Dharmasraya	0.69	0.73	0.77	0.81	0.87	0.81	0.82	0.86	0.88

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ekonomi kreatif sangan berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya masih banyak wilayah-wilayah yang masih lemaj penerimaan signal telekomunikasi sehingga ekonomi kreatif yang umumnya berplatfom digital kurang mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Dengan pembangunan telekomunikasi dan pembangunan sumberdaya manusia peningkatan industri kreatif akan tumbuh berkembang di Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya akan terjadi akselerasi yang memperkecil gap atau perbedaan pencapaian Kabupaten Dharmasray adibanding Provinsi Sumatera Barat.

E. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi PDRB untuk sektor non pertanian. Walaupun saat ini sekitar 48% masih didominasi oleh kegiatan sektor industri pangan, namun melihat prospek dimasa yang akan datang jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian akan semakin berkembang sesuai dengan fungsi atau posisi Kabupaten Dharmasraya terhadap Provinsi Sumatera Barat sebagai pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat dibagian Tenggara. Adapun proporsi jumlah usaha kecil dan

menengah non pertanian di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 85
Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah Non Pertanian di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Persen	45	49	52	53	54

Sumber : Dinas Kumperdag Tahun 2024 dan Olahan Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) non-pertanian di Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau menunjukkan tren positif sepanjang 2020–2024, mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang mengarah pada diversifikasi dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk masa yang akan datang diperlukan perluasan akses permodalan melalui KUR, koperasi, atau program CSR, pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi bagi pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan akses pasar melalui pameran, e-commerce, atau kemitraan dengan perusahaan besar serta kebijakan perlindungan dan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

F. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2- 86
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Dharmasraya	794	888	957	1045	1170

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 2-86 yang menunjukkan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat adanya

peningkatan yang konsisten dalam jumlah industri kecil dan menengah di wilayah tersebut setiap tahunnya. Berikut adalah analisis dari data tersebut:

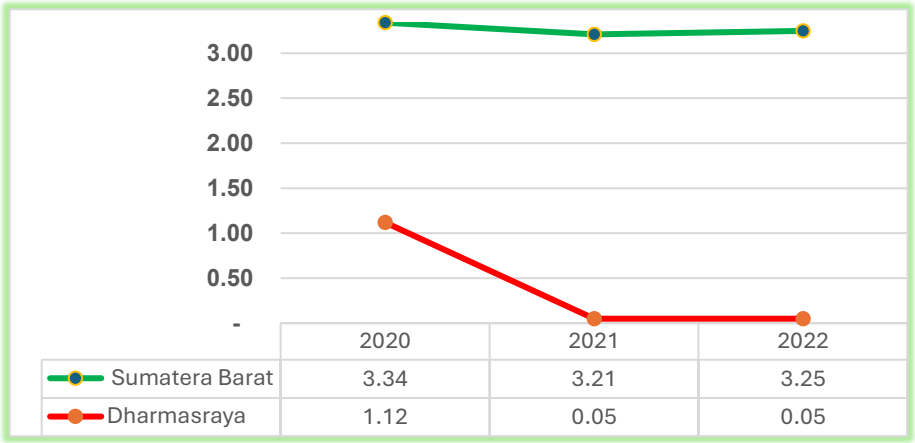
Dari analisis data tersebut, terlihat bahwa jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Dharmasraya mengalami tren peningkatan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata sekitar 90 industri setiap tahun menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam sektor industri ini. Implikasi untuk Ekonomi Lokal Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah ini mencerminkan adanya perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya pertumbuhan sektor industri, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB daerah.

G. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Untuk lebih jelasnya Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.97.

Gambar 2- 97
Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) di Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya



	2020	2021	2022
Sumatera Barat	3.34	3.21	3.25
Dharmasraya	1.12	0.05	0.05

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

H. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan kontribusi sektor koperasi terhadap perekonomian daerah. Data yang tercatat dari Dinas Kumperdag memberikan gambaran tentang perubahan rasio volume usaha koperasi yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan ekonomi daerah. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2- 87
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	24	23	22	41	43

Sumber : Dinas Kumperdag, Tahun 2025

.Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa sektor koperasi di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi yang signifikan, namun menunjukkan tren positif di tahun 2023 dan 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Namun, pemulihan yang terjadi pada tahun 2023 dan proyeksi peningkatan yang pesat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor koperasi di Kabupaten Dharmasraya semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi lokal.

Peningkatan rasio ini juga mencerminkan keberhasilan program-program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah daerah yang mungkin mencakup peningkatan akses permodalan, pelatihan manajerial, dan bantuan pemasaran. Di masa depan, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada koperasi untuk menjaga tren pertumbuhan positif ini, meningkatkan daya saing koperasi, dan memperluas jangkauan pasar, yang akan memperkuat kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya.

I. Return on Asset (RoA BUMD)

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat

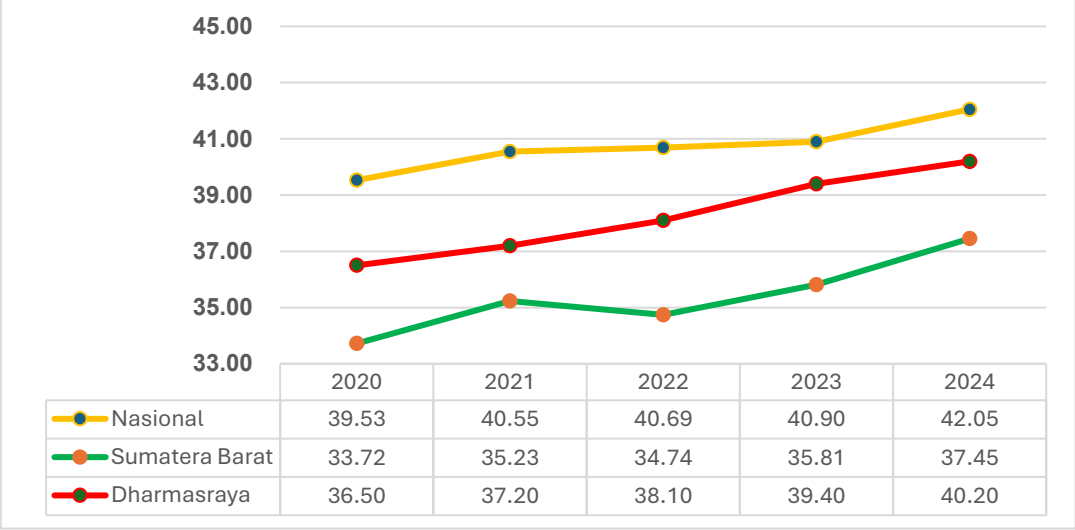
produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sampai saat ini Kabupaten Dharmasray abelum memiliki BUMD, akan tetapi untuk masa yang akan datang Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk mengembangkan BUMD disektor pertanian dan perkebunan (CPO, IKM logam) dan layanan infrastruktur (air minum, sanitasi dan energi).

J. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Lapangan kerja formal adalah semua jenis pekerjaan yang terikat pada peraturan dan sistem kerja yang resmi, baik di sektor pemerintah maupun swasta/ perusahaan. Dengan adanya lapangan kerja formal maka diharapkan tenaga kerja dapat menerima hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya dapat menerima upah/ gaji sesuai dengan upah minimum regional ataupun besaran gai yang ditetapkan oleh perintah, selain itu setiap tenaga kerja juga menerima hak terhadap jaminan sosial ketenaga kerjaaan (BPJS ketenagakerjaan) dan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) ataupun hak-hak lain yang telah diatur. Di sisi lain pekeja juga memiliki kewajiban yang jelas terhadap perusahaan/ lembaga dimana tenaga kerja ditempatkan.

Tabel 2- 88
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	39.53	40.55	40.69	40.90	42.05
Sumatera Barat	33.72	35.23	34.74	35.81	37.45
Dharmasraya	36.50	37.20	38.10	39.40	40.20

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025

K. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase perempuan usia kerja yang aktif mencari atau sudah bekerja dari total jumlah perempuan usia kerja dalam suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat dalam perekonomian dan pasar tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan rasio perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perempuan di Kabupaten Dharmasraya berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 2- 89
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	Realisasi (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	58.56	59.47	55,80	60,02	58,76

Sumber : Dinas Nakertrans, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tercatat sebesar 58.56%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah perempuan usia kerja di Kabupaten Dharmasraya aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Di tahun 2021, terjadi peningkatan pada TPAK perempuan, yaitu menjadi 59.47%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam pemberdayaan perempuan, di mana lebih banyak perempuan yang masuk ke angkatan kerja, mungkin karena adanya program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan peluang kerja yang lebih luas. Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sedikit mengalami penurunan menjadi 55.80%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi lapangan pekerjaan, atau dampak dari kondisi pasca-pandemi yang masih dirasakan pada sektor-sektor tertentu. Di tahun 2023, terjadi pemulihan yang signifikan dengan rasio 60.02%. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang kembali aktif dalam pasar kerja, kemungkinan besar karena adanya peningkatan kualitas lapangan kerja, serta upaya pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan akses permodalan untuk perempuan. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 58.76%, meskipun tetap berada dalam angka yang cukup baik. Penurunan ini bisa mencerminkan tantangan tertentu dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, namun tetap menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

L. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dimana TPAK merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Simanjuntak, 2005:45). Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya digambarkan melalui tabel 2.90.

Tabel 2- 90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	72,72	73,04	77,84	73,93	74,45
Jumlah angkatan kerja	Orang	136.507	141.468	119.814	143.054	135.394
Jumlah penduduk 10 tahun ke atas	Orang	187.711	193.674	153.923	193.499	181.859

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025
Keterangan :
* : sumber Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas pada tahun 2024 terlihat bahwa jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yaitu 181.859 orang, dimana angkatan kerja berjumlah 135.394 orang dan bukan angkatan kerja berjumlah 91.659 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,45%. Jika dilihat berdasarkan perkembangan dari tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 72,72% dan tahun 2024 menjadi 74,45%. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan sektor jasa. Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi yang masih kurang dan dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan banyak penduduk memilih untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk Kabupaten Dharmasraya yang memilih bekerja di sektor informal daripada di sektor formal.

M. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah untuk Peningkatan Pelayanan Publik;Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah.

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

- Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif 60,01 - 100,00
- Inovatif 35,00 – 60,00
- Kurang Inovatif 0,01 - 34,99
- Tidak Dapat Dinilai 0

Indeks inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren yang positif dan progresif dalam pembangunan inovasi dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar dalam peningkatan skor indeks inovasi daerah selama lima tahun terakhir. Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 91
Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah skor	indeks	3	48,07	57,84	55,61	63,
kategori	-	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

Dalam 5 tahun, Dharmasraya berhasil keluar dari status “Kurang Inovatif” tahun 2020 dan tahun 2021-2024 secara konsisten berada di kategori kabupaten “Inovatif”. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya kerja kreatif, mengembangkan solusi pelayanan publik yang adaptif, dan menindaklanjuti dan mendokumentasikan inovasi secara sistematis.

Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah dari 3,00 pada tahun 2020 menjadi 63,00 di tahun 2024 merupakan tonggak keberhasilan penting bagi Kabupaten Dharmasraya. Namun, keberhasilan ini harus dilanjutkan dengan langkah nyata agar inovasi menjadi budaya kerja dan alat strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

2.3.4. Penerapan Ekonomi Hijau

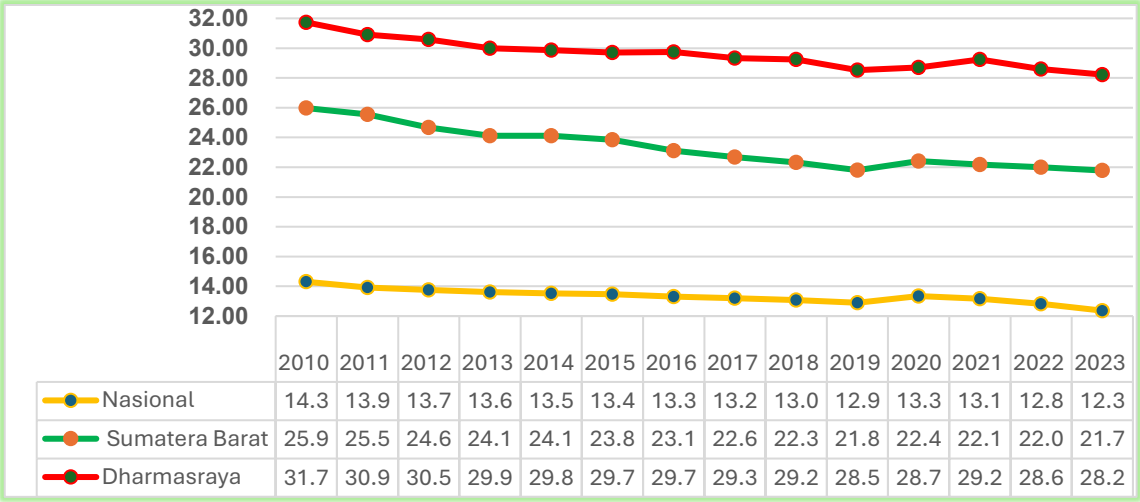
Ekonomi hijau memberi perhatian untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rasio ini menggambarkan peran sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan nilai PDRB. pada daerah berkembang, maka kontribusi sektor pertanian relatif besar. Namun apabila wayah tersebut bergerak menuju menuju negara maju, maka kontribusi ini akan semakin menurun. Untuk lebih jelasnya rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2010-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.98.

Gambar 2- 98.
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2023



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	14.3	13.9	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.0	12.9	13.3	13.1	12.8	12.3
Sumatera Barat	25.9	25.5	24.6	24.1	24.1	23.8	23.1	22.6	22.3	21.8	22.4	22.1	22.0	21.7
Dharmasraya	31.7	30.9	30.5	29.9	29.8	29.7	29.7	29.3	29.2	28.5	28.7	29.2	28.6	28.2

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Walaupun trend nasional, Sumatera Barat, dan Dharmasraya sama-sama menurun, namun terlihat laju penurunan yang semakin kecil. Usaha untuk meningkatkan produktivitas, cetak sawah, perbaikan embung, merupakan langkah meningkatkan hasil sektor pertanian dan peningkatan, serta penghijauan dan program-program hutan kerakyatan diharapkan mampu mengembalikan peranan sektor tersebut dalam sumbangannya terhadap produksi wilayah.

2. Tingkat Produkstivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan tenaga kerja sektor pertanian dalam menghasilkan produk/output. semakin tinggi produktivitas tenaga

kerja sektor pertanian maka semakin tinggi kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. semakin tinggi produktivitas tenaga kerja sektor pertanian maka semakin tinggi kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2- 92
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Dharmasraya

Indikator/ Variabel	Satuan	2022	2023
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp juta/ orang	7.219	6.960
nilai PDRB ADHB sektor pertanian	Rp juta	3.254.823	3.466.881
Jumlah tenaga kerja sektor pertanian	orang	45.085	49.808

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2024

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja sektor pertanian terlihat pada tabel di atas berdampak pada nilai produksi sektor pertanian sebagai konsekwensi logisnya. Namun jika kita perhatikan produktivitas setiap tenaga kerja mengalami penurunan artinya sektor pertanian menampung tenaga kerja tetapi tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena sifat sektor pertanian sebagai pertambahan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing return*).

2.3.5. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023. Selanjutnya Masyarakat Digital adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. semakin tinggi capaian IMDI maka aktivitas yang dijalankan masyarakat secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang semakin terbiasa. Capaian indeks masyarakat digital Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2- 93
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2022-2023

No.	Wilayah/ Pilar	2022	2023	2024
1	**Nasional**	**37,8**	**43,18**	**43,34**
	Infrastruktur dan Ekosistem	40,24	57,09	52,70
	Keterampilan Digital	49,35	56,59	58,25
	Pemberdayaan	22,06	26,19	25,66
	Pekerjaan	40,35	32,14	38,09
2	**Sumatera Barat**	**42,26**	**44,75**	**44,13**
	Infrastruktur dan Ekosistem	46,22	60,85	55,17
	Keterampilan Digital	56,93	60,11	59,86
	Pemberdayaan	26,83	26,02	25,65
	Pekerjaan	39,88	38,59	36,47
3	**Dharmasraya**	**40,25**	**46,9**	**43,31**
	Infrastruktur dan Ekosistem	44,83	60,62	54,34
	Keterampilan Digital	50,09	65,95	60,45
	Pemberdayaan	24,92	23,73	23,09
	Pekerjaan	42,38	38,62	36,59

Sumber : BPSDM Komdigi, Tahun 2025

Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Dharmasraya semakin membaik melebihi rata-rata nasional. Artinya, kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital melebihi rata-rata nasional baik dalam hal infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan (lihat tabel 2-20). Akan tetapi, indeks tersebut berada di bawah rata-rata Sumatera Barat kecuali untuk pekerjaan. Dengan kondisi yang ada, infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital dan pemberdayaan perlu ditingkatkan sehingga mendekati atau menyamai rata-rata keberhasilan Provinsi Sumatera Barat.

2.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat memenuhi permintaan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah, serta untuk menilai stabilitas harga barang-barang tersebut dalam periode waktu tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci terkait kedua komponen tersebut. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya data terkait Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok tidak tersedia.

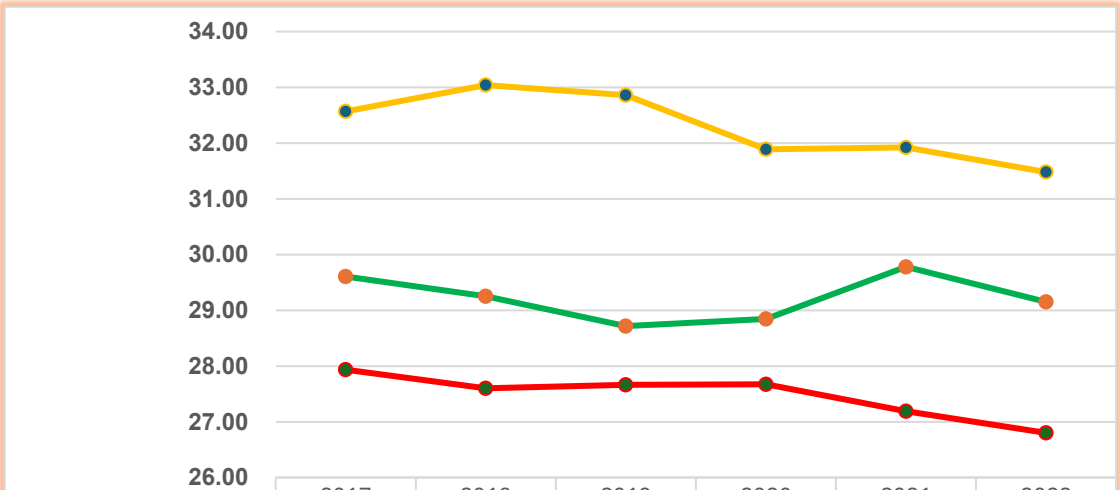
2. Pembentukan Modal Tetap Brutto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB kabupaten

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Untuk lebih jelasnya Pembentukan Modal Tetap Brutto Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.99.

Gambar 2- 99.
Pembentukan Modal Tetap Brutto Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 (kWh/orang)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	32.57	33.04	32.86	31.89	31.92	31.48
Sumatera Barat	29.61	29.25	28.72	28.85	29.78	29.15
Dharmasraya	27.93	27.60	27.66	27.67	27.19	26.80

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Rasio PMTB terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya di Dharmasraya, hal serupa juga terjadi di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

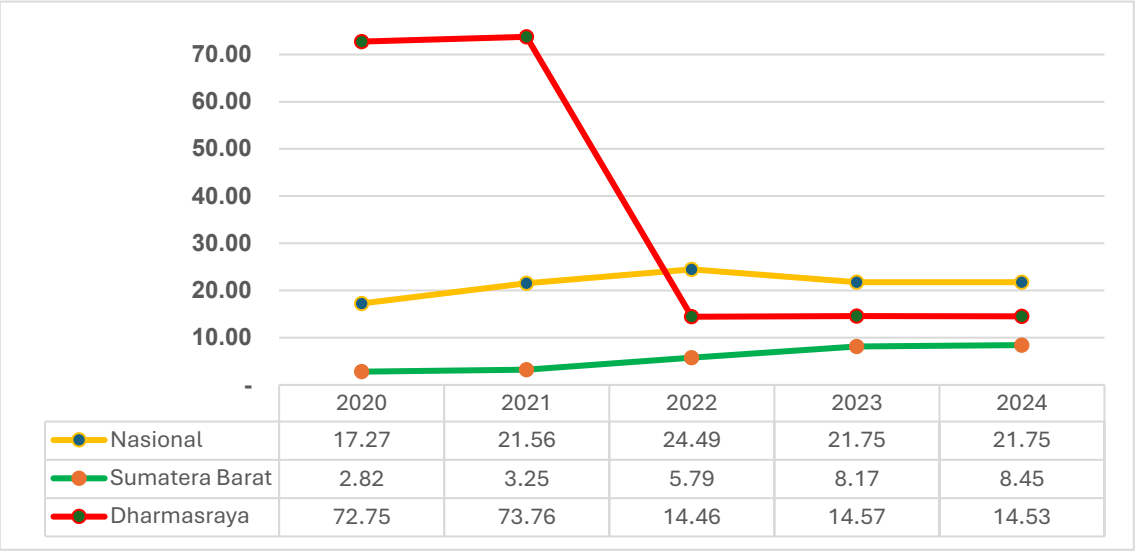
Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB kabupaten.

Dilihat dari sisi iterpretasonya, maka ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global. Ekspor barang dan jasa Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.100.

Gambar 2- 100.
Ekspor Barang Dan Jasa Nasional, Provinsi dan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2019-2022 (persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	17.27	21.56	24.49	21.75	21.75
Sumatera Barat	2.82	3.25	5.79	8.17	8.45
Dharmasraya	72.75	73.76	14.46	14.57	14.53

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Dilihat dari ekspor barang dan jasa nasional, mengalami peningkatan yang stabil dari 2020 hingga 2022, namun mengalami penurunan sedikit pada 2023 dan 2024. Ini mencerminkan pemulihan yang solid setelah dampak pandemi COVID-19, dengan sektor ekspor yang cukup tangguh di tengah tantangan ekonomi global. Sedangkan untuk Sumatera Barat meskipun ada peningkatan dari 2020 hingga 2024, kontribusi ekspor provinsi ini tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka nasional dan Kabupaten Dharmasraya, mencerminkan bahwa masih banyak peluang yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk daerah.

Walaupun indicator ini memiliki angka yang sangat tinggi pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Dharmasraya, persentase ekspor Dharmasraya mengalami fluktuasi tajam, yang mungkin mencerminkan ketergantungan pada beberapa produk unggulan dan ketidakstabilan kondisi pasar global. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi penyebab fluktuasi tersebut dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih stabil untuk mempertahankan kontribusi ekspor yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor barang dan jasa di Kabupaten Dharmasraya memiliki dinamika yang khas dan menunjukkan potensi besar yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

2.3.7. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

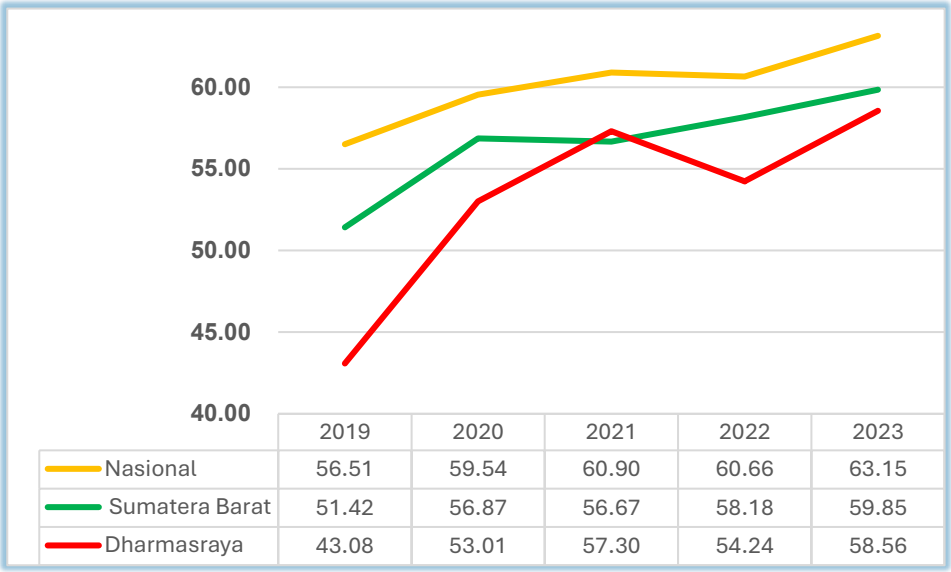
a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah(kabupaten/kota) makapengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap,dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum layak
4. Memiliki akses sanitasi layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.101.

Gambar 2- 101.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	56.51	59.54	60.90	60.66	63.15
Sumatera Barat	51.42	56.87	56.67	58.18	59.85
Dharmasraya	43.08	53.01	57.30	54.24	58.56

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut relevan baik untuk tingkat nasional, provinsi sumatera barat maupun Dharmasraya. Secara umum melihat capaian di atas maka sebagian besar (lebih dari 50 persen) rumah tangga sudah memiliki hunian layak. Sehingga degan adanya tren kenaikan maka diharapkan dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat, maka perkembangan indikator ini juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

2. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri diukur dari hasil perhitungan Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.

Adapun klasifikasi Status Desa

1) Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.
2) Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.
3) Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.

4) Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.
5) Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

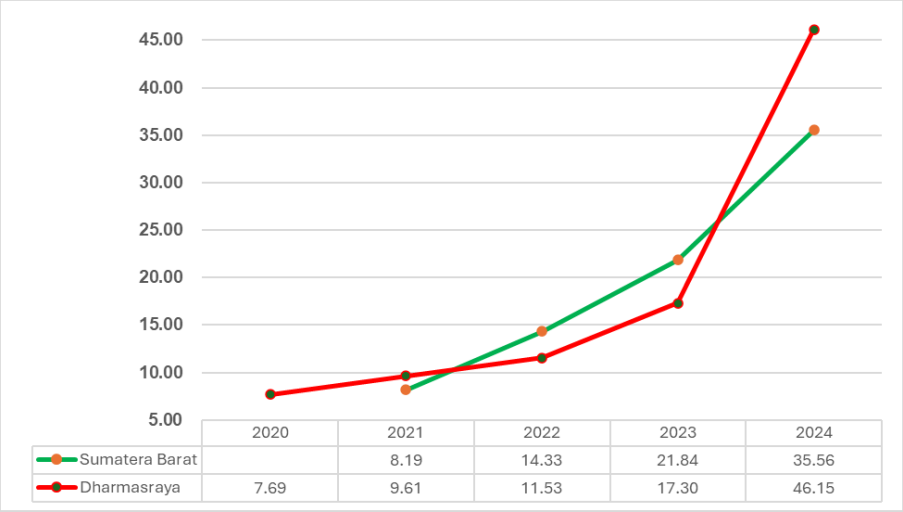
Untuk lebih jelasnya jumlah nagari berdasarkan status Idm dapat dilihat pada Tabel 2.94 dan 2.102.

Tabel 2- 94
Jumlah Nagari berdasarkan Status IDM di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	Nagari	4	5	6	9	24
2	Maju	Nagari	16	20	24	33	20
3	Berkembang	Nagari	28	24	20	10	8
4	Tertinggal	Nagari	4	3	2	-	-
5	Sangat Tertinggal	Nagari	-	-	-	-	-
Jumah Nagari		Nagari	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**

Sumber : Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Tahun 2025

Gambar 2- 102.
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah nagari mandiri di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan, mencapai 46,15% di tahun 2024 dari 17,31%

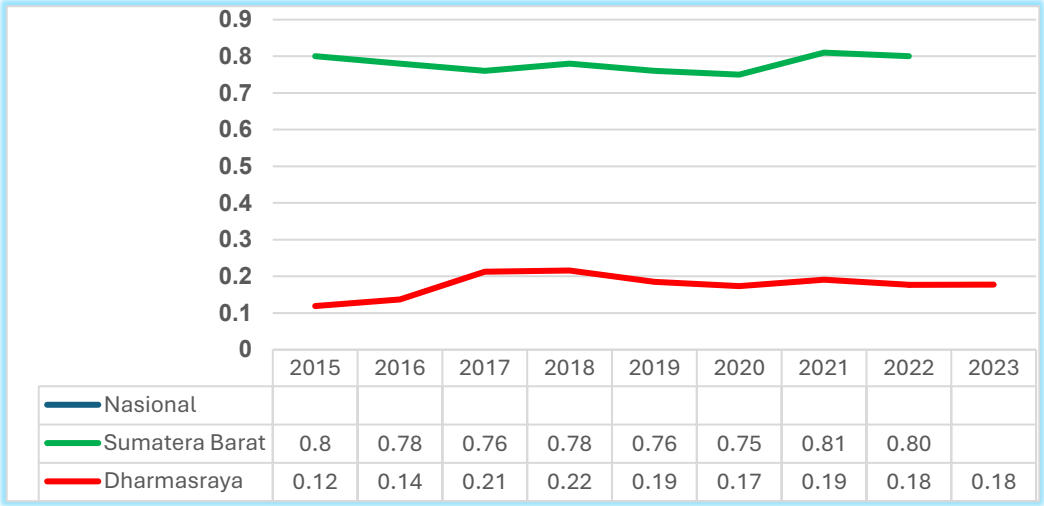
di tahun 2023. Jika trend ini berlanjut tidak mustahil pada tahun 2030 seluruh nagari di Kabupaten Dharmasraya menjadi nagari yang berstatus mandiri.

2.3.8. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Gambar 2- 103.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional									
Sumatera Barat	0.8	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.81	0.80	
Dharmasraya	0.12	0.14	0.21	0.22	0.19	0.17	0.19	0.18	0.18

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Data diatas hanya merupakan realisasi pajak daerah Kabupaten Dharmasraya dimana, belum termasuk realisasi pajak yang berasal dari masyarakat, perusahaan swasta dan instansi pemerintah vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah kabupaten tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.
Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:

- Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).
- Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.
- Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya

Terhitung sejak Januari 2024, perhitungan inflasi Sumatera Barat terdapat penambahan kabupaten/kota sampel IHK, dimana sebelumnya hanya dilakukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan saat ini terdapat penambahan di Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kabupaten/kota sampel IHK saat ini sudah berjumlah 4 daerah. Penambahan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Dharmasraya dilakukan pasca penyesuaian diagram timbang tahun dasar perhitungan inflasi menggunakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan hal tersebut,tracking inflasi Provinsi Sumatera Barat ke depan akan memperhitungkan kondisi dan risiko yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten tambahan tersebut. Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/kota sampel inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2- 95
Inflasi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota sampel inflasi pada Januari 2024 (persen)

Indikator	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasaman Barat
% mtm	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% ytd	-0,32	-0,09	-0,27	-0,25	-0,19
% yoy	2,57	2,43	1,38	2,28	3,73

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,72. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan

indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,34 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,38 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,57 persen. Sementara itu dua indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,77 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Dharmasraya bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,25 persen.

3. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. Dimana dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.

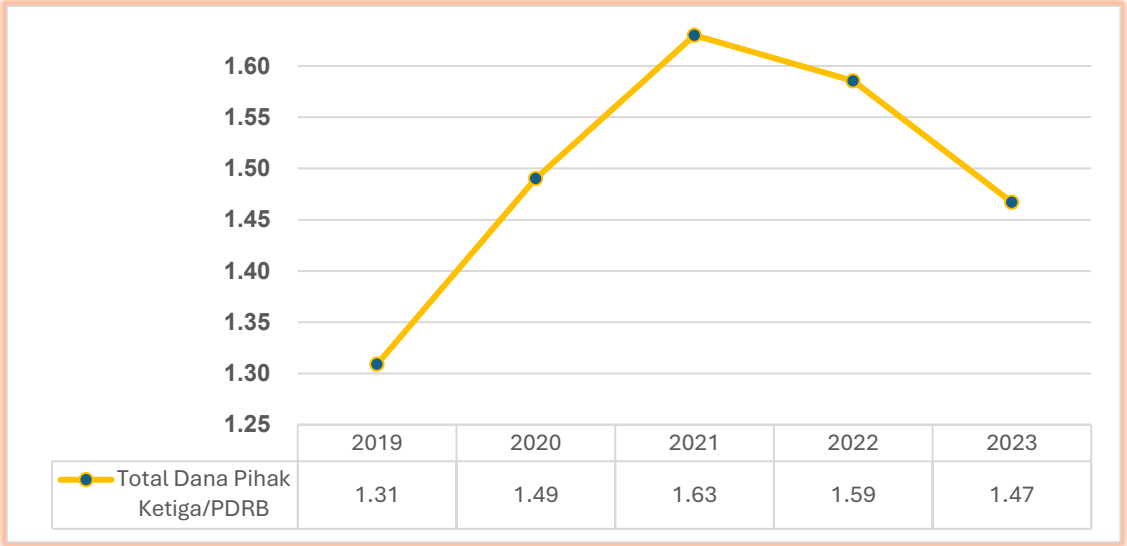
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Adapun Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.96. dan Gambar 2.104.

Tabel 2- 96
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022-2023 (persen)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (persen)	1,31	1,49	1,63	1,59	1,47
Total dana pihak ketiga (juta rupiah)	135.473,11	152.691,36	175.331,79	193.974,85	195.797,80
Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	10.349.563,17	10.245.774,26	10.756.664,94	12.233.469,95	13.345.769,26

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2- 104
Total Dana Pihak Ke Tiga di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

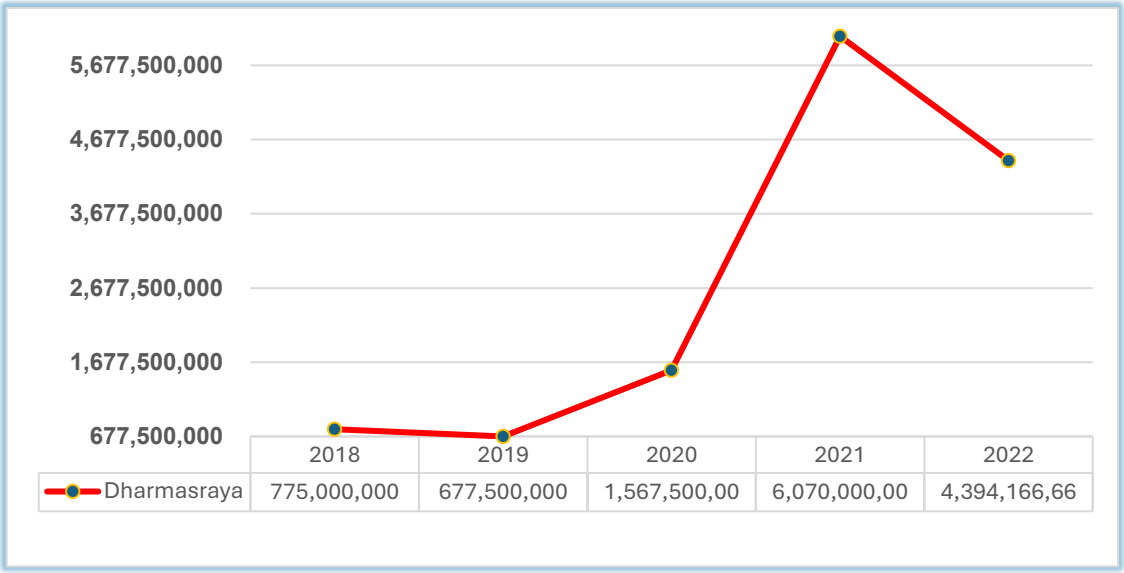
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Dharmasraya cukup fluktuatif, berkisar antara 1,3 sampai 1,63 persen. Hal ini menggambarkan masih kecilnya DPK yang dikelola oleh perbankan di Dharmasraya dibandingkan nilai PDRB yang ada di tahun tersebut.

4. Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya . Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata dapat dilihat pada gambar 2.105 dan tabel 2.97.

Gambar 2- 105.
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rupiah) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Tabel 2- 97
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat	Juta rupiah	1.312.685	864.482,5	727.069,167	1.570.570	1.358.113,33
Dharmasraya	Juta rupiah	775	677,5	1.567,5	6.070	4.394,17
kontribusi	**Persen**	**0,06**	**0,08**	**0,22**	**0,39**	**0,32**

Sumber : Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024

Perkembangan nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat adanya peningkatan nilai yang cukup signifikan. Namun apabila dibandingkan dengan nilai transaksi di Provinsi Sumatera Barat, maka kontribusi nilai saham Kabupaten Dharmasraya masih sangat kecil yaitu sekitar 0,32 persen.

5. Total Kredit/PDRB

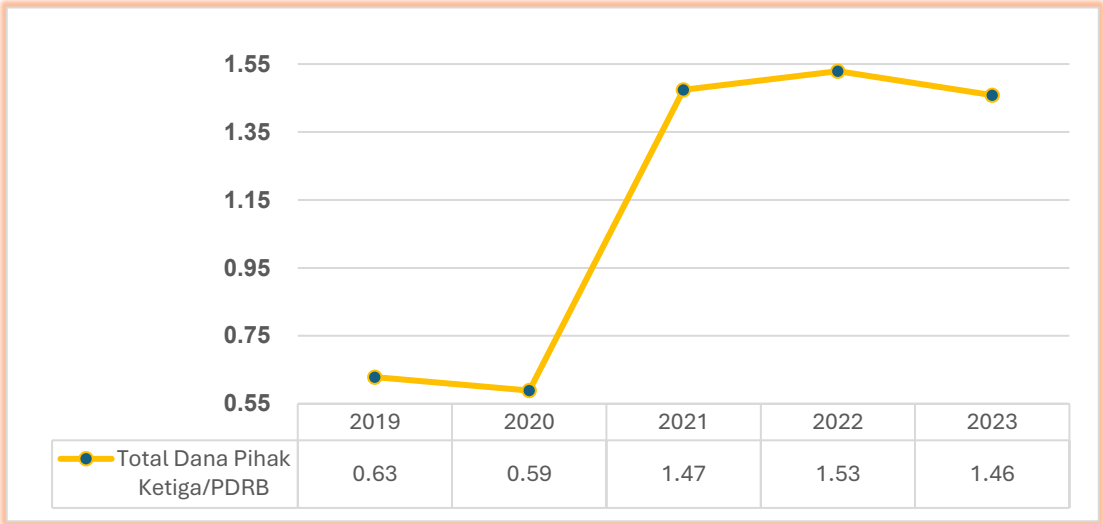
Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kab/kota.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Total Kredit /PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. Untuk lebih jelasnya Total Kredit /PDRB dapat dilihat pada Gambar 2.106.

Gambar 2- 106
Total Kredit /PDRB di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022 (persen)



	2019	2020	2021	2022	2023
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	0.63	0.59	1.47	1.53	1.46

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Perbankan di wilayah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024 (data diolah)

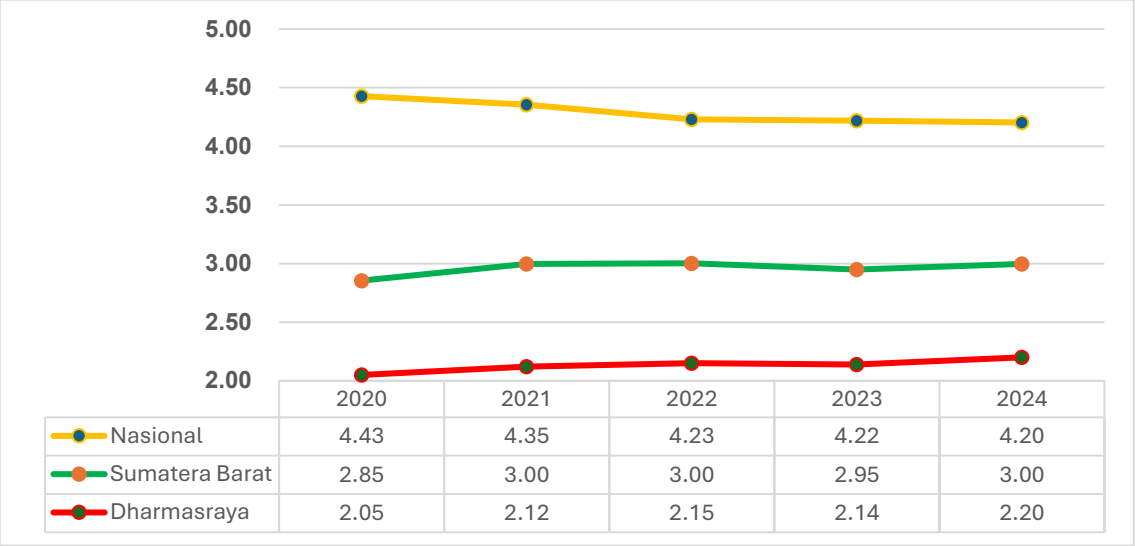
Tidak jauh berbeda dengan dana pihak ketiga yang dikelola oleh perbankan, total kredit yang dikelola oleh perbankan juga tergolong relatif kecil dibandingkan dengan PDRB yang ada di tahun tersebut

6. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menunjukkan rasio sektor keuangan dan asuransi di suatu kab/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menggambarkan kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi di kab/kota dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai yang dihasilkan oleh sektor sektor jasa keuangan dan asuransi , semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Untuk lebih jelasnya Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2019-2023 (persen) dapat dilihat pada Gambar 2.107.

Gambar 2- 107
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	4.43	4.35	4.23	4.22	4.20
Sumatera Barat	2.85	3.00	3.00	2.95	3.00
Dharmasraya	2.05	2.12	2.15	2.14	2.20

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

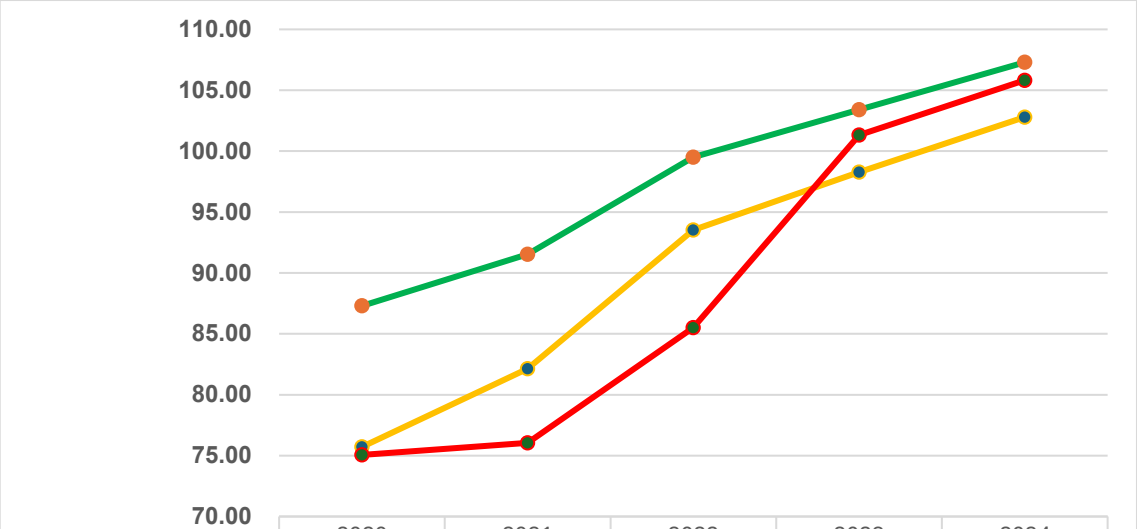
Perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi di Dharmasraya apabila dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat relatif rendah. Namun dilihat dari kecenderungan perkembangannya, dapat dilihat perkembangannya masih cukup berpeluang dapat mengalami peningkatan yang positif.

7. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk/output. semakin tinggi produktivitas maka semakin bagus rata-rata kinerja tenaga kerja di suatu wilayah. Tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan cara membagi nilai PDRB ADHB pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah

tenaga kerja. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.98 di bawah.

Tabel 2- 98
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	75.71	82.13	93.54	98.28	102.79
Sumatera Barat	87.30	91.53	99.50	103.41	107.29
Dharmasraya	75.06	76.04	85.52	101.32	105.82

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, tahun 2025 (data diolah)

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Dharmasraya terlihat adanya peningkatan dari 75,06 juta rupiah/orang naik menjadi 105,04 juta/orang, mampu melampaui kondisi provinsi mulai tahun 2023. Kondisi ini meperlihatkan semakin tingginya kemampuan keuangan yang mampu dihasilkan oleh tenaga kerja yang ada di Dharmasraya, terutama yang berasal dari sektor pertanian dan sektor lain yang sedang berkembang.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi merupakan indikator penting dalam mengukur relevansi dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan vokasional dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi menunjukkan adanya fluktuasi yang menarik. Pada tingkat

provinsi, persentase ini mengalami turun dari 73,61% pada tahun 2022 menjadi 72,71% pada tahun 2023. Namun di Kabupaten Dharmasraya memperlihatkan peningkatan dari 71,77 persen menjadi 76,73 persen.

Tabel 2- 99
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi/Kab/Kota	Tahun	
		2022	2023
1	Kepulauan Mentawai	79,10	83,04
2	Pesisir Selatan	72,39	74,60
3	Solok	76,36	72,96
4	Sijunjung	76,17	76,94
5	Tanah Datar	84,25	77,10
6	Padang Pariaman	73,82	70,29
7	Agam	71,50	76,58
8	Lima Puluh Kota	73,41	69,02
9	Pasaman	79,91	79,80
10	Solok Selatan	65,10	70,62
11	**Dharmasraya**	**71,77**	**76,73**
12	Pasaman Barat	68,06	72,22
13	Kota Padang	73,54	67,02
14	Kota Solok	79,86	80,12
15	Kota Sawahlunto	70,12	73,27
16	Kota Padang Panjang	74,68	73,80
17	Kota Bukittinggi	70,75	69,77
18	Kota Payakumbuh	73,39	78,08
19	Kota Pariaman	71,21	71,80
	Provinsi Sumatera Barat	**73,61**	**72,71**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari data ini, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya berhasil meningkatkan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi,

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai
berikut:

1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
2) Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
3) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
4) Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH : Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2- 100
Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Reformasi Hukum

No	Kategori	Nilai	Prediket
1	AA	>90-100	istimewa
2	A	>80-90	sangat baik
3	BB	>70-80	baik
4	B	>60-70	cukup baik
5	CC	>50-60	cukup

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022

Pada tahun 2023, nilai indeks reformasi hukum Kabupaten Dharmasraya yaitu 67,92 atau kategori C (cukup baik), sehingga masih perlu perbaikan kinerja untuk mencapai kategori yang lebih baik untuk kedepannya.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

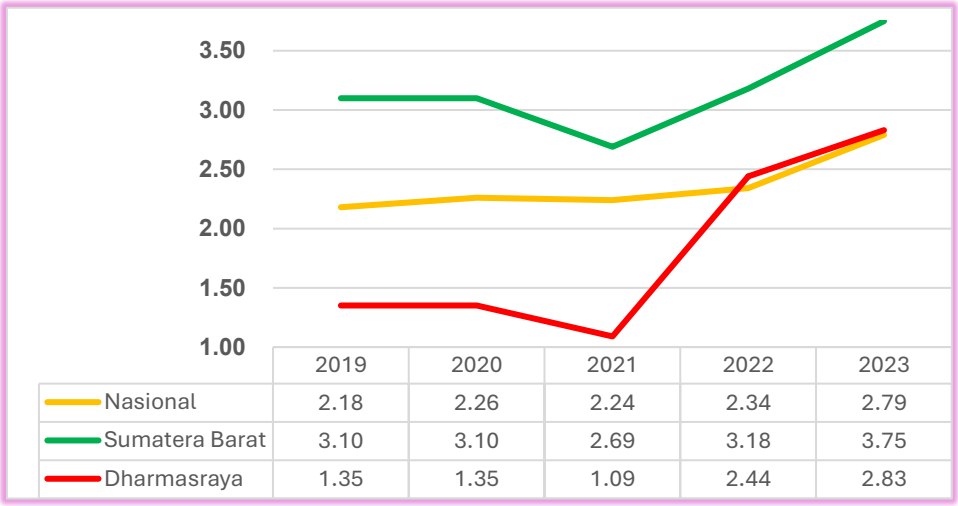
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti di bawah ini

1) 4,2 – 5,0 Memuaskan
2) 3,5 – < 4,2 Sangat Baik
3) 2,6 – < 3,5 Baik
4) 1,8 – < 2,6 Cukup
5) < 1,8 Kurang

Untuk lebih jelasnya indeks sitem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada Gambar 2.108.

Gambar 2- 108
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2.18	2.26	2.24	2.34	2.79
Sumatera Barat	3.10	3.10	2.69	3.18	3.75
Dharmasraya	1.35	1.35	1.09	2.44	2.83

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun terdapat peningkatan yang signifikan mulai tahun 2021, dimana indek Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Dharmasraya sudah menyamai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, meskipun masih dibawah rata-rata provinsi. Dengan kondisi ini dibutuhkan percepatan peningkatan pengelolaan sistem informasi berbasis elektronik untuk mengejar ketertinggalan dari Provinsi Sumatera Barat.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) Keadilan (Fairness); (2). Partisipasi (Participation); (3). Akuntabilitas (Accountability); (4). Transparansi (transparency); (5). Berdayaguna (useful); dan (6). Aksesibilitas (accessibility)

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan sesuai dengan Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik seperti ppada Tabel 2.101.

Tabel 2- 101
Kategori, Nilai dan Prediket Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya

No	Kategori	Nilai	Prediket
1	0,00 - 1,00	F	gagal
2	1,01 – 1,50	E	sangat buruk
3	1,51 – 2,00	D	buruk
4	2,00-2,50	C-	cukup (dengan catatan)
5	2,51-2,00	C	cukup
6	3,01-3,50	B-	baik (dengan catatan)
7	3,51-4,00	B	baik
8	4,01-4,50	A-	sangat baik
9	4,51 – 5,00	A	pelayanan prima

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2024

Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik akan meningkatkan indeks pelayanan publik. Semakin sedikit keluhan atau pengaduan masyarakat, semakin cepat waktu pelayanan, semakin transparan biaya-retribusi dan menggunakan sistem informasi maka akan meningkatkan indeks pelayanan publik, meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Saat ini indeks pelayanan publik Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.102 dibawah ini.

Tabel 2- 102
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	3,39	3,93	3,86	3,21

Sumber : Bagian Organissi Setda, Tahun 2025

4. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Sampai saat ini Kabupaten Dharmasraya belum pernah melakukan survei penilaian integritas (SPI) KPK. Dimasa yang akan datang perlu dilakukan survei ini mengingat survei ini penting untuk menetapkan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Dharmasraya.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin antikorupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Pada rilis IPAK 2021, BPS mencatatkan nilai 3,88, meningkat dari tahun 2020 yaitu 3,84. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi, terutama di lingkup keluarga dan komunitas.

Dari hasil IPAK ini, BPS memberikan beberapa rekomendasi untuk upaya pemberantasan korupsi dan edukasi antikorupsi. Pada 2021, BPS menekankan pentingnya penanaman budaya integritas dan nilai antikorupsi mulai dari lingkup keluarga sedari dini. Peningkatan penyebaran informasi antikorupsi juga perlu dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, ormas, dan yang lainnya.

Saat ini Indeks Korupsi Indonesia meninggi dari tahun sebelumnya. Untuk menekannya diperlukan upaya bersama melawan korupsi baik dalam lingkup keluarga, dunia usaha, pemerintahan dan lingkungan sekitar. Kabupaten Dharmasraya belum pernah melakukan perhitungan indeks tersebut. Agar maju, berbudaya dan berkelanjutan angka indeks ini perlu diketahui sebagai bagian dari keberhasilan berbudaya pada saat Indonesia emas.

bentangan yang memanjang juga telah melakukan hal yang sama. Pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum selain di Ibukota Kabupaten Pulau Punjung juga dikonsentrasikan di Pusat Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Sitiung untuk mendekatkan pelayanan kabupaten.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil mencatat capaian yang sangat positif dalam indikator *Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang Diselesaikan*, dengan tingkat penyelesaian mencapai 80-90% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan atau temuan terkait pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Dharmasraya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum

dan administratif yang berlaku. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menjalankan fungsi penegakan Perda secara optimal. Kinerja ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, perangkat daerah, hingga partisipasi masyarakat yang semakin sadar hukum.

2. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Pelaporan Ranham (rencana aksi Nasional Ham) merupakan implementasi dari Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025 dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tatacara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Azazi manusia.

Sasaran strategi Ranham Fokus pada 4 (empat) sasaran aksi Ham), yaitu :

1. Hak Perempuan,
2. Hak Anak,
3. Hak Penyandang Disabilitas, dan
4. Hak Kelompok Masyarakat Adat.

Terhadap 4 kelompok sasaran aksi ham ini, terdapat 6 rencana aksi yang harus dilaporkan daerah kabupaten/kota, yakni;

1. Aksi 1 (kelompok sasaran perempuan) indikatornya adalah memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga dibidang usaha mikro kecil dan menengah, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dibidang usaha mikro kecil dan menengah.
2. Aksi 2 (kelompok sasaran penyandang disabilitas), indikatornya menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas dan meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.
3. Aksi 3 (kelompok sasaran penyandang disabilitas), dengan indikator menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum dipusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
4. Aksi 4 (kelompok sasaran penyandang disabilitas), indikatornya implementasi pemeberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang

disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya dengan kriteria keberhasilan meningkatnya jumlah daerah yang mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

5. Aksi 5 (kelompok sasaran penyandang disabilitas),dengan indikator membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan jasa Trasnportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dalam ruang lingkup kewenangan daerah. Kriteria keberhasilannya meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas disektor transportasi darat, laut dan udara.

Masa pelaporan aksi sebanyak 3 triwulan, yaitu pada priode B04 (Bulan April), priode B08 (pada bulan Agustus) dan priode B12 pada bulang Desember. Tingkat penilaian tertinggi berada diangka 100, sementara Kabupaten Dharmasraya hanya berada diangka rata-rata 80-90 hal ini disebabkan karena belum tersedianya program yang sesuai dengan sasaran aksi ham, terutama yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memiliki data terkait Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya.

4. Indeks Demokrasi Indonesia

Sampai saat ini, Kabupaten Dharmasraya belum memiliki data spesifik terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disebabkan karena penyusunan dan publikasi IDI secara nasional dilakukan pada tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang dirancang untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Meskipun indikator ini sangat penting dalam memotret kualitas demokrasi, penyusunannya masih terbatas pada skala provinsi karena keterbatasan data, metodologi, dan cakupan wilayah. Oleh karena itu, tidak tersedianya data IDI untuk Kabupaten Dharmasraya bukan mencerminkan ketiadaan perhatian terhadap isu demokrasi di daerah, melainkan karena belum adanya pendataan atau pengukuran IDI secara khusus di tingkat kabupaten

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Persentase Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara wilayah dan instansi menjadi dasar membangun daerah dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada diluar daerah. Kerjasama perlu dilakukan dalam penyediaan prasarana, konservasi kawasan dan situs bersejarah, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kerjasama antar wilayah tersebut meliputi pembangunan konektivitas jaringan jalan pada daerah berbatasan, kerjasama seperti pengelolaan dan penelitian kawasan dan situs bersejarah, pengembangan pendidikan tinggi dan vokasional, dan kerjasama mensinergikan upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan serta kerjasama dan koordinasi pengelolaan DAS Batanghari.

2. Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

Pada indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial, tidaknya terdapat laporan atau data resmi terkait kejadian konflik sosial di wilayah Kabupaten Dharmasraya selama lima tahun terakhir. Tidak tersedianya data konflik sosial ini dapat dimaknai sebagai tidak ditemukannya kasus konflik sosial yang signifikan, baik yang bersifat horizontal antarwarga maupun vertikal antara masyarakat dan lembaga. Dengan kata lain, kondisi sosial masyarakat cenderung kondusif, stabil, dan tidak memunculkan situasi yang dikategorikan sebagai konflik sosial oleh instansi yang berwenang.

2.4.4. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020–2024 cukup baik dengan capaian positif pada beberapa indikator utama, meskipun masih menghadapi tantangan serius pada aspek pemerataan dan keberlanjutan layanan pendidikan. Untuk lebih jelasnya data capaian indikator bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 103
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Dhramasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	-	71,01	72,11	73,17	81,3

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	-	-	-	-	94,23
3	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	-	-	-	-	84,92
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persentase	-	-	-	-	21,84
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	-	-	-	-	100,00
6	indeks Pemerataan Guru	Indeks	-	-	88,81	35,43	28,51
7	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	-	46,29	46,30	56,77	76,29
8	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	-	100	100	100	100
9	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	-	-	-	-	94,08
10	APK PAUD sederajat	Persentase	68,62	69,68	119,66	72,84	72,44
11	APK SD/Mi sederajat	Persentase	106,62	106,49	106,49	99,43	89,28
12	APK SMP/MTs sederajat	Persentase	103,30	96,75	96,75	80,44	85,78

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD, pada tahun 2021–2024: meningkat dari 71,01% menjadi 81,3%. Terdapat tren peningkatan akses PAUD, yang menunjukkan semakin banyak orang tua menyadari pentingnya pendidikan usia dini, namun cakupan belum maksimal. Perlu penguatan layanan PAUD di daerah yang belum mendapatkan pelayanan dan integrasi dengan Posyandu dan PAUD Terpadu.

Capaian indikator Jumlah Anak Usia 7–12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS), dimana pada tahun 2024 capaian sebesar 94,23%. Capaian yang tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar, namun masih ada sekitar 6% anak usia sekolah yang belum terjangkau. Ini perlu dicermati dengan pendekatan inklusi dan afirmasi, sedangkan Jumlah Anak Usia 13–15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS), dimana sesuai dengan data capaian 2024 sebesar 84,92%, artinya masih terdapat lebih dari 15% anak usia SMP yang belum terlibat dalam pendidikan formal. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi keluarga, atau kurangnya fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama di wilayah tertentu.

Capaian pada indikator Jumlah Warga Usia 7–18 Tahun Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar/Menengah tapi berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pada tahun 2024 sebesar 21,84%. Capaian ini masih relatif rendah, menandakan rendahnya jangkauan pendidikan nonformal (kesetaraan). Hal ini bisa jadi karena rendahnya sosialisasi program Paket A/B/C atau terbatasnya lembaga penyelenggara kesetaraan. Perlu didorong dengan inovasi, kolaborasi dengan PKBM dan Dinas Sosial.

Dilihat dari capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal, dengan capaian tahun 2024 sudah 100%. Capaian ini menunjukkan keberpihakan terhadap pendidikan berbasis kearifan lokal dan hal ini mendukung penguatan karakter dan budaya lokal anak didik, sementara pada Indeks Pemerataan Guru, pada 2022–2024 mengalami penurunan menurun dari 88,81 tahun 2022 menjadi 35,43 tahun 2023 dan 28,51 pada tahun 2024. Dilihat dari capaian ini perlu terobosan baru dalam peningkatan kinerja pemerataan guru di Kabupaten Dharmasraya. Penurunan tajam ini menunjukkan distribusi guru yang tidak merata dan terkonsentrasi di pusat kecamatan atau perkotaan. Perlu kebijakan insentif khusus bagi guru di daerah yang jauh dari pusat kota kabupaten serta penguatan sistem zonasi penempatan guru. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik dilihat berdasarkan data capaian tahun 2021–2024 mengalami kenaikan dari 46,29% menjadi 76,29%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM guru secara konsisten. Masih ada peluang untuk menyelesaikan sisa guru yang belum tersertifikasi agar semua pendidik memenuhi standar kompetensi nasional.

Untuk capaian persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui pada tahun 2021–2024 sudah 100%, dimana tata kelola administrasi pendidikan sudah berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lembaga pendidikan. Pada indikator Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra tahun 2024 sudah 94,08%, capaian ini memperkuat peran pendidikan dalam pelestarian bahasa daerah dan penguatan identitas lokal, sesuai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal.

Indikator APK PAUD Sederajat tahun 2020–2024 terlihat berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 capaian 68,62%, tahun 2022 meningkat mencapai 119,66%, dan tahun 2024 menurun menjadi 72,44%. Ketidakkonsistenan ini bisa disebabkan oleh perbedaan metode pelaporan, migrasi penduduk, atau kebijakan pendaftaran ulang. Perlu peningkatan validasi data dan pemetaan ulang kebutuhan layanan PAUD. Sedangkan APK SD/MI Sederajat dari tahun 2020–2024 mengalami penurunan dari 106,62% menjadi 89,28%. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikit anak usia di luar jenjang yang berada di bangku SD, namun bisa juga menunjukkan penurunan akses di beberapa wilayah. Perlu evaluasi terhadap daya tampung dan pemerataan

SD/MI di nagari. Sementara pada capaian APK SMP/MTs Sederajat tahun 2020–2024 mengalami penurunan dari 103,30% menjadi 85,78%. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam keberlanjutan pendidikan dari SD ke SMP. Kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan fasilitas SMP di beberapa nagari atau faktor ekonomi.

Penurunan APK terutama pada jenjang SMP mengindikasikan tantangan dalam keberlanjutan pendidikan menengah pertama, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, jarak sekolah, atau kurangnya daya tarik sekolah lanjutan. Pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah utama untuk menjamin kualitas pembelajaran yang merata. Meski demikian, peningkatan pada aspek sertifikasi guru dan pengembangan muatan lokal menunjukkan arah pembangunan pendidikan yang responsif terhadap konteks lokal dan peningkatan kompetensi SDM pendidik.

Pada bidang pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya yang selaras dengan program nasional yaitu pembangunan Sekolah Rakyat, yang memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan menjangkau kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat berperan besar dalam menjangkau kelompok ini, terutama anak-anak putus sekolah, keluarga miskin, dan masyarakat di daerah terpencil yang belum bisa mengakses sekolah formal secara rutin dan mendukung target pendidikan inklusif dan berkeadilan.

Selain itu pemerintah daerah juga mengembangkan kemampuan berbahasa terutama pada para pelajar di Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah mengembangkan literasi peningkatan berbahasa. Dimana dengan dunia yang semakin terhubung secara digital dan internasional, penguasaan bahasa Inggris menjadi pintu masuk menuju dunia yang lebih luas. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyiapkan generasi muda Dharmasraya agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun wirausaha. Penguasaan Bahasa Inggris dianggap sebagai keterampilan dasar yang sangat penting dalam menghadapi tantangan era digital dan pasar tenaga kerja yang semakin terbuka.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada urusan pemrinthaan bidang kesehatan, dari 23 indikator, terdapat 2 indikator yang tidakmemiliki data capaian dari tahun 2020-2024. Kinerja bidang kesehatan menunjukkan perkembangan positif pada sebagian besar indikator. Keberhasilan terlihat dalam mempertahankan akreditasi RS rujukan, penanganan krisis kesehatan dan KLB, peningkatan akreditasi

Untuk lebih jelasnya capaian indikator bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2- 104
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	77,02	257,59	201	84	187
2	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	8,98	7,72	11,7	9	13
3	prevalensi stunting	Persentase	-	19,5	24,6	17,7	20,5
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	NA	NA	43.9	42.1	49,8
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	83,7	35,8	43,9	42,1	50,7
6	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	430	273	371	456	510
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase	59,49	63,15	66,58	98,32	100
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	50	51	75	80	100
9	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	100	100	100	100	100
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	-	-	-	-	-
11	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	57.61	82.84	100	100	88.04
12	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	66.42	97.17	99.66	99.72	91.39
13	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	68.59	99.23	100	100	91.97
14	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	59.88	67.70	100	100	96.33
15	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	64.11	66.40	100	100	96.71
16	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	41'11	100	100	100	97.37
17	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	99.79	96.31	100	100	95.62
18	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	15.47	58.66	100	100	99.32
19	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	81.83	89.36	100	100	99.06

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
20	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persentase	83.62	99.49	100	100	100
21	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	70.15	83.96	100	100	100
22	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	97.36	100	100	100
23	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan, tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari masing-masing indikator bidang kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 77,02 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian melonjak tajam menjadi 257,59 pada 2021. Namun, terjadi penurunan drastis di tahun-tahun berikutnya, menjadi 201 (2022), 84 (2023), dan 187 (2024). Peningkatan AKI pada 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan kesehatan ibu. Upaya perbaikan layanan kesehatan maternal terlihat mulai menunjukkan hasil positif di 2022–2023, meskipun kembali meningkat di 2024.

Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2020 tercatat sebesar 8,98 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 7,72 pada 2021, lalu meningkat pada 2022 menjadi 11,7. Angka ini kembali turun menjadi 9 (2023) dan naik lagi menjadi 13 pada 2024. Kenaikan AKB di tahun 2022 dan 2024 menunjukkan perlunya penguatan sistem pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan perawatan neonatal.

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan yang positif. Dimulai dari 19,5% pada 2021, turun menjadi 17,7% di 2023 sebelum meningkat kembali ke 20,5% di 2024. Penurunan di tahun 2023 mencerminkan keberhasilan program intervensi gizi, namun peningkatan pada 2024 menandakan perlunya evaluasi efektivitas program dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Data cakupan ini mulai tersedia sejak 2022 dengan capaian 43,9%, sedikit menurun menjadi 42,1% di 2023, dan meningkat lagi menjadi 49,8% pada 2024. Peningkatan capaian ini mencerminkan penguatan upaya deteksi dini dan pengobatan TBC, meskipun perlu ditingkatkan agar mencapai target nasional.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Capaian indikator ini sempat turun drastis dari 83,7% pada 2020 menjadi 35,8% di 2021. Namun, terjadi peningkatan yang konsisten hingga mencapai 50,7% di tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen pengobatan dan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi.

Insidensi Tuberkulosis
Insidensi TBC sempat turun dari 430 per 100.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 273 di 2021, namun meningkat kembali menjadi 510 di tahun 2024. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh peningkatan cakupan penemuan kasus atau memburuknya faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap penyebaran TBC.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten. Dari 59,49% pada tahun 2020, meningkat terus hingga mencapai 100% pada 2024. Artinya, seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya telah terdaftar sebagai peserta JKN, yang menjadi fondasi penting bagi pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan
Indikator ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari 50% (2020) menjadi 100% (2024). Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Capaian indikator ini stabil pada angka 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil menjamin ketersediaan sarana, prasarana, dan logistik kesehatan secara konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada layanan kesehatan untuk ibu dan anak, indikator Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan meningkat signifikan dari 57,61% (2020) menjadi puncaknya 100% pada 2022–2023, sebelum sedikit menurun ke 88,04%

di 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesadaran, namun perlu perhatian untuk mempertahankan capaian maksimal secara konsisten, sementara ibu bersalin, angka cakupan meningkat dari 66,42% (2020) ke 99,72% (2023), namun mengalami sedikit penurunan menjadi 91,39% pada 2024. Capaian yang hampir menyeluruh ini menunjukkan efektivitas program persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, meski tetap perlu pemantauan khusus terhadap daerah dengan akses sulit.

Pada indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, Cakupan meningkat stabil dari 68,59% (2020) menjadi 100% pada 2022–2023, lalu sedikit turun ke 91,97% pada 2024. Penurunan ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memastikan semua bayi mendapatkan intervensi kesehatan dasar sejak dini. Dan Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan menunjukkan perbaikan dari 59,88% (2020) menjadi 100% pada 2022–2023, namun kembali turun menjadi 96,33% di 2024. Penurunan meskipun kecil, tetap penting untuk dikaji agar tidak terjadi tren penurunan lebih lanjut.

Dilihat pada capaian layanan kesehatan berdasarkan kelompok usia, Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dari 64,11% (2020), cakupan meningkat hingga 100% pada 2022–2023, lalu sedikit menurun ke 96,71% di 2024. Ini menunjukkan peningkatan akses layanan preventif dan kuratif anak usia sekolah, namun tetap dibutuhkan penguatan promosi kesehatan di institusi pendidikan.

Pada indikator Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan terdapat lonjakan luar biasa dari 41,11% (2020) ke 100% di 2021–2023, yang kemudian turun sedikit menjadi 97,37% pada 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok usia kerja dengan program kesehatan, namun fluktuasi kecil tetap perlu diawasi agar tidak berlanjut.

Capaian indikator jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan mengalami penurunan dari 99,79% (2020) menjadi 96,31% (2021), namun kembali membaik ke 100% pada 2022–2023 dan sedikit turun ke 95,62% di 2024. Lansia merupakan kelompok rentan, sehingga perlu pendekatan layanan kesehatan berbasis komunitas untuk menjaga stabilitas cakupan.

Untuk layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular (PTM), pada indikator Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan meningkat signifikan dari 15,47% (2020) menjadi 100% pada 2022–2023 dan 99,32% pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan deteksi dan penanganan dini penyakit kronis, serta efektivitas program skrining PTM. Sedangkan pada

inidikator Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan mengalami kenaikan dari 81,83% (2020) ke 100% di tahun 2022–2023, dan tetap tinggi di 99,06% pada 2024. Ini mencerminkan tingginya cakupan layanan bagi penderita DM, namun diperlukan inovasi untuk menjangkau sisa populasi yang belum terlayani.

Selain itu layanan untuk gangguan kesehatan khusus berupa indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan dengan cakupan sudah sangat baik, dari 83,62% (2020) ke 100% sejak 2022. Ini menandakan pelayanan kesehatan jiwa telah menjadi bagian dari sistem layanan kesehatan primer, namun diperlukan jaminan kesinambungan layanan dan rehabilitasi komunitas. Sementara pada indikator Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan cakupan meningkat dari 70,15% (2020) ke 100% sejak 2022. Ini menunjukkan peningkatan kapasitas deteksi dan layanan untuk kasus TBC, mendukung pencapaian target eliminasi TBC nasional. Pada indikator Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan, capaian konsisten sangat tinggi (100% di hampir semua tahun), mencerminkan keseriusan Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan layanan kepada kelompok berisiko tinggi. Hal ini penting dalam upaya mencegah peningkatan kasus baru HIV.

Secara keseluruhan, capaian indikator bidang kesehatan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kemajuan positif, terutama pada aspek cakupan JKN, peningkatan kompetensi SDM kesehatan, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Namun demikian, beberapa indikator seperti AKI, AKB, stunting, dan pengendalian tuberkulosis masih menunjukkan fluktuasi yang perlu menjadi perhatian khusus. Diperlukan intervensi terintegrasi, penguatan sistem kesehatan primer, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar target pembangunan kesehatan dapat tercapai secara berkelanjutan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Terdapat beberapa indikator kinerja pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi ukuran yang dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Perkembangan indikator capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2- 105
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kinerja sistem irigasi	Indeks		70,40	-	70,65	72,45
2	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak	Persentase	69,93	70,27	69,61	71,50	70
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	49,75	50,02	58,09	58,16	54,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Tahun 2025, BPS, Tahun 2025
Ket : Kolom yang kosong belum ada data dari Dinas PUPR

Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 70,40, naik sedikit menjadi 70,65 pada tahun 2023, dan mencapai 72,45 di 2024. Meskipun tidak ada data tahun 2020, tren yang terbentuk menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi secara keseluruhan mengalami perbaikan dari segi operasi, pemeliharaan, dan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Peningkatan ini mencerminkan adanya intervensi yang cukup efektif, seperti rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan kelembagaan petani pemakai air (P3A), serta perbaikan sistem manajemen dan pengawasan. Namun demikian, laju peningkatannya tergolong lambat, sehingga ke depan dibutuhkan investasi yang lebih masif dan berkelanjutan untuk menjamin optimalisasi fungsi irigasi mendukung ketahanan pangan.

Pada indikator tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi dan tren penurunan pada akhir periode. Capaian tahun 2020 sebesar 49,75%, naik sedikit menjadi 50,02% di 2021. Kemudian terdapat peningkatan signifikan pada 2022 sebesar 58,09%, yang relatif stabil pada 2023 (58,16%), namun kembali turun menjadi 54,58% di tahun 2024. Meskipun sempat menunjukkan peningkatan kemantapan jalan pada 2022 dan 2023, penurunan di tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur jalan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor anggaran, cuaca ekstrem, atau beban lalu lintas yang tinggi yang mempercepat kerusakan jalan. Penurunan ini harus menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah, karena kemantapan jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat, distribusi

logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 106
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	Persentase	0	0	2,13	4,35	5,28
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum}	Persentase	89,07	89,31	89,55	89,79	90,03
5	Persentase Sertiflkasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sepanjang tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator ini menunjukkan angka 100% secara konsisten, yang berarti seluruh warga korban bencana yang membutuhkan hunian layak berhasil difasilitasi. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam merespons bencana, efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta kolaborasi lintas sektor yang berjalan optimal (Dinas PUPR, BPBD, Dinas Sosial, dll). Keberhasilan ini perlu dipertahankan dengan penguatan sistem pendataan korban, penyediaan hunian sementara yang layak, dan cadangan anggaran untuk pembangunan rumah tetap.

Sementara pada indikator Jumlah Warga Negara Terdampak Relokasi yang Memperoleh Rumah Layak Huni, menunjukkan capaian 100% dari 2020 hingga 2024, menandakan bahwa seluruh warga yang direlokasi akibat program pemerintah (misalnya pembangunan infrastruktur atau pengurangan risiko bencana) mendapatkan fasilitas rumah yang sesuai standar kelayakan. Capaian penuh ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak tempat tinggal warga, dan komitmen terhadap penyediaan hunian terencana dan layak. Relokasi yang berhasil dan layak huni akan membantu mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru di masa depan.

Capaian indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 0–10 Ha yang Ditangani sebagai kewenangan kabupaten yaitu menunjukkan tren meningkat dari 0% (2020–2021) menjadi 2,13% (2022), 4,35% (2023), dan 5,28% (2024). Kenaikan ini mencerminkan mulainya intervensi pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh, terutama dengan program skala kecil (0–10 Ha), dan meningkatnya perhatian terhadap kualitas lingkungan permukiman dan penataan ruang di wilayah padat penduduk. Namun, dengan capaian masih di bawah 10%, upaya ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Ke depan, strategi yang dapat dilakukan adalah: identifikasi kawasan kumuh secara terpadu melalui SK Kumuh, Sinergi program penanganan fisik dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau kolaborasi dengan pusat/provinsi

Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), menunjukkan peningkatan secara bertahap dari 89,07% (2020) menjadi 90,03% (2024). Walaupun pertumbuhan hanya sekitar 0,25% per tahun, hal ini menunjukkan konsistensi dalam pembangunan prasarana dasar permukiman (jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, dan sanitasi), keberlanjutan program perumahan berbasis PSU baik pada kawasan baru maupun permukiman lama. Capaian mendekati 90% adalah prestasi positif, namun peningkatan tahunan yang lambat menunjukkan adanya hambatan teknis atau fiskal. Pemerintah daerah dapat

mempertimbangkan integrasi program PSU dengan pembangunan kawasan perumahan bersubsidi dan perluasan cakupan program PSU ke daerah yang belum tertangani, terutama di wilayah pedesaan.

Secara keseluruhan, capaian indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek pemenuhan hunian layak, khususnya bagi kelompok rentan (korban bencana dan warga relokasi). Namun, upaya penanganan kawasan kumuh dan peningkatan cakupan PSU perlu ditingkatkan, baik dari sisi volume maupun kualitas intervensinya.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 107
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa ketiga indikator ini menunjukkan capaian 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Artinya, seluruh warga negara yang berada di wilayah yang berisiko bencana telah mendapatkan akses terhadap informasi mengenai potensi dan risiko bencana, layanan edukasi dan pelatihan terkait pencegahan serta kesiapsiagaan, dan layanan penyelamatan dan evakuasi saat bencana terjadi. Capaian ini menunjukan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah memiliki sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dan responsif, termasuk koordinasi antara BPBD, aparat keamanan, dinas terkait, dan masyarakat, menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan/lahan serta sosialisasi dan edukasi kebencanaan dilakukan secara masif, kemungkinan melalui sekolah, media lokal, dan forum masyarakat. Hal ini menjadi indikator keberhasilan program tanggap darurat

dan mitigasi bencana, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.

Seluruh indikator urusan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya terkait kebencanaan di Kabupaten Dharmasraya mencapai kinerja optimal (100%) dalam lima tahun berturut-turut (2020–2024). Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, menyediakan sistem evakuasi dan penyelamatan yang siap digunakan saat terjadi bencana, dan menumbuhkan budaya tanggap bencana di tengah masyarakat.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pada urusan pemerintahan bidang sosial, terdapat sebanyak 27 indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 108
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Karban Bencana Pravinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	80	80	80	80	80
2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	90	90	90	90	90
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase			90	70	70
4	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase			90	70	70
5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase			90	70	70
6	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase			90	70	70

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase			90	70	70
8	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	99,70	99,35	99,11	99,37	99,01
9	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	-	4	1	-	2
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase				100	100
11	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase	-	4	1	-	2
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial danjatau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100
13	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persentase	100	100	100	100	100
14	Indeks Lansia Berdaya	Indeks					56,80
15	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	0	31	100	100	100
16	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	7	38	100	100	100
17	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	9	47	100	100	100
18	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi	Persentase	17	21	100	100	100

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	sosial dasar tuna sosial diluar panti						
19	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	17028	7754	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3PPKB, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa capaian kinerja pasa indikator Persentase Pekerja Sosial/TKS/Relawan Sosial yang Menangani Bencana Sesuai Standar dari tahun 2020-2024 yaitu 80%. Capaian stagnan pada angka 80% menunjukkan bahwa sebagian besar SDM sosial telah memenuhi standar dalam penanganan bencana, namun masih terdapat ruang peningkatan. Perlu upaya pelatihan lanjutan, pelibatan relawan terverifikasi, dan penguatan SOP tanggap darurat.

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial dengan capaian dari tahun 2020-2024 adalah 90%, yang mana kinerja ini konsisten tinggi menandakan keberhasilan pelatihan dan pengembangan SDM sosial. Namun, peningkatan ke 100% tetap diperlukan untuk menjamin layanan berkualitas dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat.

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, dengan capaian 90% (2022), 70% (2023–2024), dimana terjadi penurunan 20% pada dua tahun terakhir perlu mendapat perhatian serius. Kemungkinan kendala distribusi bantuan, pendataan, atau akses pelayanan sosial perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan capaian 90% (2022), dan 70% (2023–2024). Tren yang sama seperti indikator sebelumnya. Perlindungan anak yang rentan harus menjadi prioritas, terutama pasca pandemi dan bencana sosial/ekonomi yang meningkatkan jumlah anak dalam situasi sulit.

Pada indikator Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, dengan capaian 90% (2022), dan 70% (2023–2024). Terjadi penurunan kualitas layanan terhadap lansia terlantar berisiko meningkatkan ketimpangan kesejahteraan kelompok usia lanjut. Intervensi berbasis komunitas seperti program lansia mandiri dan rumah ramah lansia bisa menjadi solusi. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan capaian 90% (2022), 70% (2023–2024), penurunan ini bisa disebabkan peningkatan populasi musiman atau dampak ekonomi. Strategi perlindungan sosial perlu diperluas ke intervensi berbasis

pemberdayaan dan rehabilitasi jangka panjang. Begitu juga dengan indikator Persentase PPKS (di luar HIV/AIDS & NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dengan capaian 90% (2022), dan 70% (2023–2024). Hal ini menandakan terjadinya penurunan seragam seperti pada kelompok rentan lainnya mengindikasikan lemahnya kesinambungan program bantuan sosial atau minimnya monitoring pasca penyaluran bantuan.

Untuk indikator Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar, dengan capaian 99,70% (2020), mengalami penurunan menjadi 99,01% (2024). Walau angkanya masih tinggi, penurunan bertahap perlu diwaspadai. Ini bisa menjadi cerminan tekanan anggaran atau perlambatan distribusi bantuan. Peningkatan efektivitas targeting dan efisiensi distribusi sangat penting. Sedangan pada Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi capaian kinerja 4% (2021), 1% (2022), 2% (2024), angka sangat rendah menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi belum optimal. Diperlukan program pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan mentoring kewirausahaan berbasis lokal.

Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin, dengan capaian 100% (2023–2024), terjadi peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir mencerminkan suksesnya sistem informasi kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Ini mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial secara keseluruhan. Untuk persentase Keluarga Miskin & Rentan yang Tergraduasi dari Kemiskinan dengancapaian 4% (2021), 1% (2022), dan 2% (2024), diman acapaian sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa bantuan sosial bersifat konsumtif dan belum berhasil menciptakan kemandirian. Transformasi dari bantuan ke pemberdayaan menjadi agenda penting.

Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, dengan capaian tahun 2020-2024 adalah 100%, dimana angka ini menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat, distribusi bantuan, dan logistik bencana sudah berjalan sangat baik dan tepat waktu di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan pada indikator Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial dengan capaian tetap 100%, sehingga keberhasilan ini melengkapi indikator sebelumnya. Pemulihan pasca-bencana yang tuntas sangat penting untuk mencegah kemiskinan struktural pasca krisis.

Pada Indeks Lansia Berdaya, dengan capaian tahun 2024 yaitu 56,80. Angka indeks menunjukkan lansia memiliki tingkat kemandirian dan partisipasi sosial sedang. Perlu peningkatan layanan kesehatan, kegiatan produktif, dan akses layanan digital agar lansia tetap berdaya dan tidak bergantung, sedangkan pada indikator Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (Disabilitas, Anak, Lansia, Tuna Sosial,

Korban Bencana), dengan capaian tahun 2020-2021 hanya 0–38%, dan mengalami peningkatan tahun 2022-2024 menjadi 100%. Lompatan capaian menunjukkan bahwa strategi rehabilitasi sosial luar panti telah berhasil diimplementasikan secara luas sejak 2022. Ini mencerminkan komitmen kuat dalam penjangkauan, asesmen, dan rehabilitasi kelompok rentan.

2.4.5. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif. Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang tenaga kerja terdiri dari 6 (enam) indikator, dengan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 109
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persentase	28,4	31,2	33,5	35,1	36,8
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	98.689	94.997	93.774	93.783	93.983
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		14.780	12.096	12.335	13.366	11.934
4	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
5	Persentase Pekerja Informal	Persentase	63,5	62,8	61,9	60,6	59,8

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	17.391	14.991	17.198	21.112	22.174

Sumber: Dinas Nakertrans, Tahun 2025

Sesuai dengan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya, indikator ini menunjukkan peningkatan yang stabil dan signifikan, dari 28,4% pada tahun 2020 menjadi 36,8% pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan program pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas.

Pada Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri, capaian indikator ini menunjukkan tren penurunan, tahun 2020 dari 98.689 orang, meningkat menjadi 93.983 orang pada tahun 2024. Penurunan ini relatif kecil, namun konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja, terbatasnya lowongan kerja yang tersedia, dan dampak ekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih di beberapa sektor.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem penempatan kerja berbasis digital, serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha untuk menciptakan peluang kerja baru di dalam negeri. Sedangkan Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial, terjadi penurunan dari 14.780 pekerja tahun 2020 menjadi 11.934 pekerja tahun 2024. Ini merupakan indikasi menurunnya komitmen sebagian perusahaan dalam menjalankan prinsip hubungan industrial yang sehat dan adil. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, karena perlindungan hak-hak pekerja adalah fondasi penting bagi kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas dunia usaha. Diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, edukasi kepada perusahaan, dan fasilitasi dialog sosial secara aktif.

Untuk capaian indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, masih sangat rendah dan tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan tahun2020-2022 cenderung stagnan pada 0,03% dan pada tahun 2023–2024 menurun menjadi 0,02%. Ini menandakan bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan akses yang memadai ke sektor kerja formal. Pemerintah

daerah perlu mendorong kebijakan afirmatif, pelatihan kerja inklusif, dan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja disabilitas.

Capaian Persentase Pekerja Informal menunjukkan penurunan secara bertahap, dari 63,5% tahun 2020 menjadi 59,8% tahun 2024. Penurunan ini merupakan indikator positif, menandakan pergeseran ke arah formalitas pekerjaan yang lebih terlindungi dan berkesinambungan. Namun demikian, jumlah pekerja informal masih tergolong tinggi, sehingga strategi formaliasi UMKM, perluasan akses perlindungan sosial, dan peningkatan literasi ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sementara Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya, jumlah tenaga kerja yang memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya mengalami peningkatan signifikan, dari 17.391 orang tahun 2020 menjadi 22.174 orang tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan melalui pengawasan ketenagakerjaan, pelaporan pelanggaran, serta sosialisasi peraturan kepada pemberi kerja dan pekerja.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan dilembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui indeks pemenuhan hak anak, dan rasio kekerasan terhadap anak. Berikut disampaikan capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 2- 110
Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	65,84	66,37	belum rilis
2	Persentase Anggaran Responsif gender	Persentase	-	-	4,81
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100
4	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang beperspektif gender dan hak anak sesuai standart	Persentase	-	100	100
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,37	61,46	-

No.	Indikator Outcome	satuan	2022	2023	2024
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khususyang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100

Sumber : DINSOSP3APPKB

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian pada indikator indeks Perlindungan Anak mulai tercatat pada tahun 2022 dengan skor 65,84, dan mengalami peningkatan menjadi 66,37 pada 2023, sementara untuk tahun 2024 datanya belum dirilis. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan layanan perlindungan anak. Meskipun peningkatannya belum signifikan, tren ini menunjukkan arah yang positif.

Anggaran Responsif Gender baru tercatat pada tahun 2024 sebesar 4,81%. Angka ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran mulai diimplementasikan. Namun, nilainya masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan secara bertahap agar lebih proporsional dan berdampak nyata terhadap pengarusutamaan gender di berbagai sektor.

Capaian indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2022–2024), dengan angka 100%. Artinya, seluruh perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang teridentifikasi berhasil mendapatkan layanan pendampingan dan perlindungan secara komprehensif. Ini menunjukkan sistem layanan rujukan dan koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya.

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar, dimana dilihat capaian tahun 2023 dan 2024, pelaksanaan PUSPAGA mencapai 100% sesuai standar, menandakan bahwa layanan edukasi keluarga telah mengadopsi perspektif gender dan hak anak secara penuh. Ini penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak dari lingkungan rumah tangga.

Indeks IPHA tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 63,37 (tahun 2022) menjadi 61,46 (tahun 2023). Penurunan ini menjadi alarm penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi aspek-aspek pemenuhan hak anak yang belum maksimal, seperti hak identitas, pendidikan, kesehatan, atau partisipasi. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan layanan dasar di wilayah terpencil atau belum optimalnya sinergi antar-lembaga.

Selama tiga tahun terakhir tahun 2022–2024, Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif menunjukkan capaian sempurna sebesar 100%, yang berarti semua anak yang memerlukan perlindungan khusus (seperti anak korban kekerasan, anak disabilitas, atau anak terlantar) berhasil diintervensi dan mendapatkan layanan sesuai standar. Ini merupakan capaian yang sangat positif dari aspek perlindungan anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Capaian indikator pada urusan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 111
Capaian dan Target di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	27,75	36,51	36,51	80,82	88,56
2	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	85,60	94	87,80	88,50	91,20
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	Covid	12	22	10	2
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	covid	87	89	96	71

Sumber : Dinas Pangan Perikanan, Tahun 2025

Capaian indikator persentase jumlah cadangan pangan**,** Tren kenaikan tajam sejak 2023 menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Namun, peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir perlu diikuti dengan mekanisme penyimpanan dan distribusi yang efisien agar ketahanan pangan benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

Capaian indikator pola pangan harapan PPH menunjukkan variasi konsumsi pangan yang ideal, dimana skor PPH di atas 85% secara konsisten menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Dharmasraya mendekati komposisi pangan seimbang dan beragam. Meskipun sempat turun sdi tahun 2022, tren secara umum tetap positif. Capaian tahun 2024 sebesar 91,20 menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi gizi dan diversifikasi konsumsi, ketersediaan bahan pangan pokok dan pelengkap yang cukup dan efektivitas program intervensi gizi dan pangan lokal.

persentase daerah rentan rawan pangan menunjukkan penurunan daerah rawan pangan, meskipun sempat meningkat pada 2022, penurunan drastis dalam dua tahun terakhir menandakan bahwa penanganan rawan pangan yang lebih tepat sasaran, efektivitas program penguatan ekonomi masyarakat dan pertanian dan intervensi sosial dan pangan yang berkelanjutan di wilayah rentan. pada 2024

capaian hanya 2% menunjukkan hampir tidak ada lagi wilayah yang mengalami kerawanan pangan ekstrem.

Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan dimana capaian kinerja menunjukkan peningkatan kualitas pangan segar dari 2021 hingga puncaknya di 2023. Namun, penurunan tajam ke 71% di tahun 2024 menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh penurunan pengawasan atau pengujian mutu pangan, keterbatasan SDM dan lonjakan produksi lokal yang tidak diimbangi peningkatan kontrol mutu.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kasus pertanahan di Kabupaten Dharmasraya adalah sengketa tanah yang seringkali terjadi karena kurangnya kejelasan tentang status kepemilikan tanah, serta kurangnya pengawasan dan pengelolaan tanah oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya kinerja bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2- 112
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	100	100	100	100	100
2	persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat	Persentase	20,24	25,74	36,61	39,58	41,22

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2025

Capaian indikator Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan menunjukkan hasil 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut (tahun 2020–2024). Hal ini menandakan bahwa seluruh target penyediaan tanah obyek landreform, yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, telah tersedia dan siap untuk didistribusikan kepada subjek yang berhak setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah memiliki tata kelola pertanahan yang efektif, proses inventarisasi dan legalisasi aset tanah berjalan sesuai regulasi dan dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) berjalan baik, sehingga target reformasi agraria dapat dicapai secara optimal.

Capaian indikator Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Memiliki Sertifikat mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan capaian

hampir dua kali lipat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kemajuan berarti dalam penertiban dan legalisasi aset tanah milik pemerintah daerah. Hal ini penting karena sertifikasi tanah milik pemda dapat menekan konflik agraria dan tumpang tindih kepemilikan, memberikan kepastian hukum atas aset daerah, yang menjadi syarat penting dalam pengelolaan anggaran berbasis aset dan memudahkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur sosial dan pelayanan dasar. Namun demikian, meski trennya meningkat, capaian 41,22% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 58,78% aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat, yang berarti masih ada ruang besar untuk perbaikan ke depan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi.

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) bersama-sama dengan indeks kualitas udara (IKU) dan indeks tutupan lahan (ITH) akan menentukan nilai Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) suatu kawasan. IKLH Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun berada pada kategori kurang, walaupun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Terdapat penurunan pada indeks kualitas air menjadi 51,11 tahun 2024 dari tahun sebelumnya 54, Kemudian IKU terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 91,97 di tahun 2024 dan indeks kualitas lahan juga terjadi penurunan mendai 42,55 tahun 2024.

Berikut disampaikan capaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 2- 113
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	-	46,67	51,38	54	51,11
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	84,49	85,32	83,28	91,97
3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	-	42,7	42,7	43,14	42,55
4	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persentase	100	100	100	100	100
5	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100 (alahan nan tigo, lubuk besar, TKA)	100	100 (sinam ar, TKA)	100
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	-	-	33,67	N/A	N/A

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa Indeks kualitas air menunjukkan tren meningkat dari 2021 hingga 2023, namun sedikit menurun pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan kualitas air, meskipun perlu peningkatan pada pemantauan dan pengendalian pencemaran sumber air secara berkelanjutan.

Kondisi yang menyebabkan IKA masih dalam kondisi tercemar diantaranya meliputi meliputi:

- Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke Badan Air. Alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya air karena hutan adalah daerah tangkapan air akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air di daerah sekitarnya. Sensitifitas ekosisten hutan terletak pada tutupan lahannya, semakin baik tutupan lahannya semakin bagus fungsi tanggapan air nya.

- Penambangan emas skala kecil (PESK) yang masih menggunakan merkuri Proses penambangan emas yang dilakukan secara tradisional dengan penarikan biji emas dengan menggunakan Hg menghasilkan limbah (taiing) pada proses pencucian, yang umumnya masih mengandung merkuri namun dibuang begitu saja langsung ke badan air atau ke permukaan tanah tanpa perlakuan yang menyebabkan air dan tanah tercemar merkuri, akibatnya terjadi akumulasi mercuri pada tanah dan tanaman pangan maupun biota air.
- Masih terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan air limbah domestik, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan
- Masih Kurangnya Fasilitas Buang Air Besar pada Kawasan Pemukiman Masyarakat.
- Masih adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair. Dari hasil pengawasan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan, 9 (sembilan) usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 60% telah taat terhadap ketentuan pengelolaan limbah cair, 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan atau 33% kurang taat serta 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan atau 7% tidak taat terhadap ketentuan. Ketidak taatan umumnya terdapat pada aspek pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dan kepemilikan izin air pembuangan air limbah.
- Perilaku Kehidupan Sosial Masyarakat terhadap Lingkungan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

Kualitas udara tergolong sangat baik selama lima tahun terakhir, bahkan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian emisi, terutama dari sektor transportasi dan industri.

Nilai indeks tutupan lahan relatif stabil, menunjukkan belum banyak perubahan dalam kondisi tutupan vegetasi di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Ini menandakan pentingnya langkah-langkah pelestarian dan rehabilitasi lahan, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan.

Capaian kinerja indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan tahun 2020-2024 sudah 100%. Capaian ketaatan penuh selama lima tahun menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perizinan dan kepatuhan lingkungan telah berjalan optimal. Perlu dipastikan bahwa ketaatan ini juga mencakup aspek substansi teknis dan operasional, bukan hanya administratif.

Pada indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), capaian sudah 100%, artinya upaya pemberdayaan masyarakat hukum adat sudah

sepenuhnya ditingkatkan dan peran strategis MHA dalam menjaga kearifan lokal dan pelestarian lingkungan berbasis komunitas.

Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan, capaian sudah 100%, dengan penyelesaian beberapa kasus spesifik seperti Alahan Nan Tigo, Lubuk Besar, dan Sinamar. Tingkat penyelesaian sengketa yang maksimal menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini juga mencerminkan respons cepat dan tepat dari aparat penegak hukum serta sinergi dengan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, data yang tersedia hanya data tahun 2022 yaitu 33,67**.** Indeks yang tersedia pada 2022 menunjukkan pengelolaan sampah masih berada pada tingkat rendah. Ketidaktersediaan data pada tahun-tahun lainnya menandakan adanya keterbatasan sistem pemantauan dan pelaporan. Dibutuhkan penguatan kelembagaan, infrastruktur pengelolaan sampah, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Fokus utama dari urusan ini adalah memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan akurat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Penyelenggaraan urusan ini terus mengalami perkembangan, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi. Data kependudukan yang akurat menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan data dalam urusan ini menjadi prioritas yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya. Adapun perkembangan terhadap pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 114
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	-	36	55	64	66
2	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	-	-	28	38	38
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	-	100	100	100	100
4	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	83,85	89,00	92,87	92,89	94,19
5	Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase	-	-	28,20	38,46	38,46

Sumber : Disdukcapil, Tahun 2025

Capaian indikator persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA), empat tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong kesadaran pentingnya identitas legal bagi anak-anak. Upaya jemput bola, layanan KIA keliling, dan integrasi dengan sekolah perlu terus ditingkatkan untuk mencapai target nasional.

Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan, meskipun terjadi peningkatan pemanfaatan data, angkanya masih tergolong rendah. Ini menandakan masih terbatasnya integrasi data kependudukan dengan layanan lintas sektor. Perlu penguatan sistem interoperabilitas data antar-perangkat daerah dan lembaga pelayanan publik lainnya.

Cakupan pengelolaan profil kependudukan, seluruh wilayah telah terlayani dalam pengelolaan profil kependudukan, yang menunjukkan pencapaian optimal dalam cakupan layanan dasar adminduk. Hal ini menjadi pondasi penting dalam pelayanan publik berbasis data.

Capaian indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, menunjukkan tren yang sangat positif. Akses masyarakat terhadap dokumen dasar seperti KTP, KK, dan akta kelahiran semakin luas. Strategi layanan proaktif dan kolaboratif patut diteruskan untuk mencapai cakupan 100%.

Pada indikator Persentase Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik, capaian tahun 2022 yaitu 28,20% dan tahun 2023–2024

mengalami peningkatan menjadi 38,46%, meski terdapat peningkatan, angka ini masih menunjukkan bahwa integrasi layanan berbasis data kependudukan belum optimal.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Dharmasraya meliputi Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa, Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) dan Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat. Lebih jelasnya capaian indikator bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 115
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa	Indeks	0,6953	0,7135	0,7326	0,7522	0,7868
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	Persentase	53,84	59,13	64,42	69,71	75
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	19,23	21,15	26,92	34,61	40,38

Sumber : Dinas PMD, Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan berkelanjutan pada IDM setiap tahun selama periode 2020–2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan pembangunan desa dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan ekologi. Nilai 0,7868 pada 2024 menandakan bahwa secara umum desa-desa di Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori maju menuju mandiri. Hal ini merupakan indikator positif dari keberhasilan program-program pemberdayaan dan pembangunan berbasis desa.

Untuk indikator Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa dukungan

terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari, PKK, Karang Taruna, dan lainnya terus diperkuat. Hal ini berdampak langsung pada peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nagari. Kenaikan hingga 75% pada 2024 mencerminkan semakin banyaknya nagari yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan, baik melalui pelatihan, bantuan teknis, maupun pendampingan. Begitu juga dengan capaian Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakui dan memperkuat keberadaan lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat. Peningkatan sebesar lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun mengindikasikan bahwa aspek sosial-budaya lokal mulai mendapatkan perhatian yang proporsional dalam pembangunan desa. Fasilitasi ini sangat penting dalam menjaga nilai-nilai lokal, mediasi sosial, dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada urusan peemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat indikator-indikator baru sehingga data yang tersedia pada umumnya baru data tahun 2024, untuk lebih jelasnya capaian masing-masing indikator dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2- 116
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	-	-	-	-	62,76
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	-	-	-	-	71,63
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase	-	-	-	-	82,33
4	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	-	-	-	-	14,80
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	-	-	-	-	83,50

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	-	-	-	-	40,38
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Persentase	2,27	2,26	2,25	2,25	2,27
8	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifzc Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Persentase	-	-	-	-	17,2
9	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (mCPR)	Persentase	81,10	83,43	65,45	70,19	72,18
10	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	10,29	8,17	20,76	12,53	9,55
11	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	80,00	82,70	83,15	84.35	85,37
12	Persentase Kampung KB Mandiri	Persentase	-	40	40	40	43

Sumber : DINSOSP3APPKB, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2020–2024, capaian indikator bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kecenderungan dari tren peningkatan, fluktuasi, hingga stagnansi.

Pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) baru tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 62,76. Meskipun belum tersedia data sebelumnya, capaian ini menjadi baseline penting. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Dharmasraya berada pada kategori sedang dan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) data yang tersedia pada tahun 2024 dengan capaian 71,63. Ini menunjukkan bahwa isu-isu kependudukan mulai diperhitungkan dalam pembangunan daerah secara strategis, dan menjadi modal penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut metode modern menunjukkan capaian yang cukup tinggi yaitu 82,33% pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pasangan usia subur di Kabupaten Dharmasraya telah

memperoleh akses terhadap alat/cara kontrasepsi yang aman dan modern, menunjukkan kecenderungan yang sangat positif.

Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) tercatat sebesar 14,80% di tahun 2024. Meskipun belum tersedia data tren tahunan, nilai ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian perempuan yang mengalami kehamilan tanpa perencanaan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus melalui edukasi dan penguatan akses terhadap layanan KB yang lebih inklusif.

Indeks Pengasuhan Keluarga dengan Remaja berada pada angka tinggi yaitu 83,50 di tahun 2024. Ini menandakan pola pengasuhan keluarga terhadap remaja berada dalam kondisi baik, yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan karakter dan pencegahan perilaku berisiko pada remaja.

Pada indikator Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri pada tahun 2024 sebesar 40,38%. Capaian ini menjadi titik awal untuk menilai kemandirian kampung KB dan menunjukkan bahwa masih diperlukan intervensi lanjutan untuk meningkatkan keberdayaan kampung secara menyeluruh.

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) menunjukkan tren yang stabil selama lima tahun terakhir. Capaian berfluktuasi antara 2,25 hingga 2,27, yang berarti Kabupaten Dharmasraya berhasil menjaga angka kelahiran tetap pada kisaran ideal. Ini menjadi indikasi bahwa program KB berjalan cukup efektif. Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15–19 tahun) di tahun 2024 dengan nilai 17,2. Nilai ini menandakan adanya kejadian kehamilan pada kelompok usia remaja, yang perlu mendapatkan perhatian melalui pendekatan edukasi, sosialisasi kesehatan reproduksi, serta penguatan peran keluarga dan institusi pendidikan.

Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 83,43%, namun mengalami penurunan drastis di 2022 menjadi 65,45%, merupakan dampak dari gangguan layanan saat masa pandemi. Meski demikian, pada 2023 dan 2024 terjadi pemulihan dengan capaian naik kembali menjadi 72,18%.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) juga mengalami fluktuasi tajam. Terjadi penurunan dari 10,29% di 2020 menjadi 8,17% pada 2021, namun melonjak tajam menjadi 20,76% pada tahun 2022. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh pembatasan layanan akibat pandemi COVID-19. Angka ini kemudian kembali menurun secara signifikan di 2023 dan 2024 menjadi 9,55%, menunjukkan pemulihan yang baik terhadap layanan KB. Sementara pada persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga

menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Dari 80,00% pada 2020, terus naik hingga mencapai 85,37% pada 2024. Ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam program ketahanan keluarga dan menjadi indikator bahwa program edukasi keluarga cukup berhasil diterima masyarakat.

Pada indikator Persentase Kampung KB Mandiri mengalami stagnansi, dengan capaian tetap di angka 40% sejak tahun 2021 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi baru, baik dari sisi pendampingan maupun pemberdayaan kelembagaan agar kampung KB mampu mandiri secara fungsional dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut di atas, ke depan perlu dilakukan intervensi yang lebih adaptif, fokus pada perbaikan layanan pascapandemi, peningkatan peran lintas sektor, dan optimalisasi edukasi publik demi mendukung pembangunan keluarga dan kependudukan yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada urusan pemerintahan bidang perhubungan, capaian kinerja dilihat berdasarkan indikator persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. Data yang tersedia hanya pada tahun 2020-2021, dimana capaian tahun 2020 yaitu 75% dan tahun 2021 capaian sudah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 117
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	75	100	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No.

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya mulai dari OPD sampai ke nagari. Model aplikasi yang dikembangkan baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan baik yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilayani mandiri oleh OPD. Lebih jelasnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 2- 118
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	-	1,09	2,41	2,82	3,61

Sumber : Dinas Kominfo, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, di Kabupaten Dharmasraya, capaian Indeks SPBE menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks SPBE tercatat sebesar 1,09, yang mencerminkan tahap awal transformasi digital pemerintahan. Nilai ini masih tergolong rendah, mengindikasikan bahwa integrasi teknologi dalam proses pemerintahan saat itu masih terbatas pada tahap inisiasi atau manual sebagian. Dalam waktu tiga tahun terakhir Kabupaten Dharmasraya berhasil meningkatkan nilai SPBE secara signifikan. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan capaian menjadi 2,41, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan signifikan pada aspek perencanaan, kebijakan, layanan elektronik, serta tata kelola data dan sistem informasi di lingkup pemerintahan daerah.

Peningkatan terus berlanjut di tahun 2023 dengan nilai 2,82, dan kemudian melonjak lebih tinggi lagi menjadi 3,61 pada tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah bergerak menuju kategori “Baik” dalam implementasi SPBE (berdasarkan klasifikasi nasional SPBE: nilai 2,6–3,5 dikategorikan “Baik”, dan nilai 3,6 ke atas menuju kategori “Sangat Baik”).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus menunjukkan komitmen dalam penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dari sejumlah capaian indikator outcome yang menggambarkan peningkatan aktivitas kelembagaan, pengawasan, fasilitasi pelatihan, serta transformasi usaha kecil dari sektor informal ke formal.

Secara umum, terjadi tren positif dalam beberapa indikator strategis, seperti persentase koperasi aktif, transformasi usaha kecil ke sektor formal, dan pertumbuhan wirausaha baru, meskipun terdapat fluktuasi pada indikator lain yang menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan dan kualitas koperasi.

Tabel 2- 119
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	21	8	8	75	6
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	25	25	23	18	20
3	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	32	33	35	36	37
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	23	33	33	43	24
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	12	14	6	6	5
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	20	40	41	50	55
7	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	10	11	12	13	15
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kumperdag, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan kemajuan dalam aspek kuantitatif seperti jumlah koperasi aktif, jumlah wirausaha baru, serta transformasi usaha informal menjadi formal. Namun, dari sisi kualitas dan keberlanjutan, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal peningkatan koperasi yang berkualitas dan perluasan akses ekspor bagi UKM.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. Hal ini terlihat dari berbagai indikator outcome dalam bidang penanaman modal yang menunjukkan hasil cukup signifikan, baik dari sisi realisasi investasi, pelayanan perizinan, penyelesaian hambatan usaha, maupun pemanfaatan data/informasi investasi.

Capaian indikator menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberikan kemudahan berusaha kepada investor dan pelaku usaha lokal, melalui penyederhanaan perizinan, penyelesaian masalah usaha, serta pemanfaatan data investasi yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Tabel 2- 120
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	92,29	163,04	385,00	203,00	102,00
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100,00	282,00	55,00	133,00	115,00
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	-	-	-	100,00	100,00
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	-	-	100	100	-

Sumber : Dinas PMTSP, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Urusan Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kinerja yang kuat dan responsif terutama dalam pelayanan perizinan, penyelesaian hambatan usaha, dan pemanfaatan data. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi pada realisasi investasi dan peningkatan jumlah investor, yang menunjukkan pentingnya konsistensi strategi promosi investasi dan penciptaan peluang investasi baru yang berkelanjutan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen dalam pengembangan pemuda, baik dari sisi prestasi olahraga, kewirausahaan, maupun kegiatan kepramukaan. Berbagai program pembinaan pemuda yang dilaksanakan berhasil mendorong peningkatan partisipasi serta pencapaian yang membanggakan di level nasional dan provinsi.

Tabel 2- 121
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perolehan Medali Emas pada event nasional dan provinsi	buah	2	8	103	26	42
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase					26,61
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan						23,08

Sumber : Disbudparpora, Tahun 2025

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang positif dan potensial. Prestasi medali emas di ajang kompetisi melonjak pada 2022, sementara rasio wirausaha pemuda yang cukup tinggi di 2024 menunjukkan adanya semangat kemandirian ekonomi di kalangan generasi muda. Partisipasi dalam kepramukaan juga menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter pemuda.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,24 di tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah memulai langkah awal dalam membangun sistem tata kelola statistik yang terpadu dan berkualitas. Ke depan, tantangan terbesar terletak pada penguatan komitmen lintas OPD, peningkatan

kualitas SDM statistik, dan digitalisasi sistem data agar IPS dapat meningkat dan data menjadi dasar utama perencanaan pembangunan.

Tabel 2- 122
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks					2,24

Sumber : Dinas Kominfo, Tahun 2025

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian merupakan urusan yang krusial dalam mendukung keamanan informasi pemerintah daerah, terutama di era digitalisasi dan keterbukaan data saat ini. Tanpa sistem persandian yang memadai, potensi kebocoran informasi strategis dan gangguan terhadap komunikasi data pemerintah dapat meningkat. Sementara untuk data tahun 2020-2025 tidak tersedia. Ketiadaan data capaian urusan persandian selama lima tahun terakhir menjadi catatan penting untuk segera dilakukan penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem pengamanan informasi, diharapkan ke depan persandian dapat menjadi bagian strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, andal, dan berbasis digital.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan pemerintahan di bidang kebudayaan selama periode 2020–2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan potensi budaya lokal. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, dengan fokus pada pelestarian warisan budaya tak benda, peningkatan peran masyarakat adat, serta penguatan identitas budaya daerah.

Pemerintah daerah juga telah mengupayakan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, termasuk melalui dukungan terhadap sanggar seni, festival budaya daerah, serta pencatatan kekayaan budaya lokal ke dalam basis data nasional.

Tabel 2- 123
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	-	54,05	54,05	72,97	100
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	-	10,5	33,5	34,5	54,5
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	-	10,5	33,5	34,5	54,5

Sumber : Dinas Budparpora, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian urusan pemerintahan bidang kebudayaan terlihat bahwa Secara umum, indikator kinerja bidang kebudayaan menunjukkan tren positif, baik dari sisi kuantitas kegiatan maupun keberlanjutan dampak sosial budaya yang dihasilkan. Dilihat berdasarkan indikator, peningkatan jumlah kegiatan pelestarian budaya dari tahun ke tahun dan beberapa kekayaan budaya lokal berhasil diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Semenetara berdasarkan indikator dukungan Infrastruktur, pembangunan dan revitalisasi sarana kebudayaan seperti gedung pertunjukan, rumah adat, dan museum daerah mulai menunjukkan dampak positif dalam mendukung aktivitas budaya masyarakat. Pemberdayaan Komunitas Budaya, tumbuhnya komunitas budaya yang aktif menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelestarian budaya daerah dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan seni dan budaya juga meningkat berkat dukungan program pendidikan karakter berbasis budaya. Dengan adanya Pandemi COVID-19 sempat menghambat kegiatan budaya secara langsung pada 2020–2021, terutama kegiatan yang bersifat pertunjukan publik dan masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM pelaku budaya, serta digitalisasi data dan dokumentasi budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Selama kurun waktu 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Budparpora telah menunjukkan komitmen yang terus meningkat dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya daerah. Meskipun tidak terdapat data pada tahun 2020, tren capaian indikator bidang kebudayaan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan progresif. Fokus utama

diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, peningkatan pengakuan warisan budaya, serta penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda (WBTb). Ketiga indikator tersebut menggambarkan peran aktif daerah dalam menjaga identitas budaya lokal serta memperkuat eksistensi budaya Dharmasraya di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 2- 124
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	indeks	-	26,11	26,12	68,64	73,70
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	100	100	-	-	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2025

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pada periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan pengelolaan koleksi nasional serta naskah kuno. Meskipun data tahun 2020 untuk nilai tingkat kegemaran membaca belum tersedia, capaian indeks pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan yang sangat positif.

Capaian indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat yang meningkat tajam pada tahun 2023 dan 2024 menandakan keberhasilan berbagai program literasi dan layanan perpustakaan dalam menjangkau masyarakat luas. Sedangkan pengelolaan koleksi nasional dan naskah kuno pada awal tahun (2020 dan 2021) berada pada tingkat 100%, menandakan optimalisasi dalam pemeliharaan dan pengamanan koleksi penting perpustakaan.

Tabel 2- 125
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	76,50	87,11	87,00	87,00	96,39
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase		100	100	100	100

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase				50	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2025

2.4.6. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Dharmasraya secara spesifik difokuskan pada subsektor perikanan budidaya, mengingat wilayah ini tidak memiliki laut maupun perairan pesisir. Urusan perikanan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi produksi maupun konsumsi ikan oleh masyarakat. Hal ini menjadi indikator keberhasilan program pembangunan sektor perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2- 126
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya serta Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	209,5	228,2	230,15	249,35	350,48
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	21975,5	26.880,12	24.891,11	25.224,10	27.105,49
3	Angka Konsumsi Ikan	kg/ tahun	36,25	36,94	37,6	40,15	41,11

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2025

Produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 209,5 ton dan meningkat signifikan menjadi 350,48 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan kapasitas nelayan lokal, serta pengelolaan potensi perairan umum yang lebih optimal.

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi besar dalam perikanan budidaya, terutama air tawar. Produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan tren kenaikan. Dari 21.975,5 ton pada tahun 2020, produksi meningkat menjadi

27.105,49 ton di tahun 2024. Hal ini didorong oleh dukungan berbagai program pemerintah dalam bentuk bantuan benih, pakan, pelatihan teknis budidaya, serta pengembangan kelembagaan pembudidaya.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dari ikan juga tercermin dari naiknya angka konsumsi ikan. Pada tahun 2020, angka konsumsi ikan masyarakat berada di angka 36,25 kg/kapita/tahun dan terus meningkat hingga mencapai 41,11 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan industri perikanan lokal sekaligus mendukung upaya penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati peningkatan budidaya ikan dalam mendukung pengembangan *one village one product* di Kabupaten Dharmasraya pada komoditi budidaya ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan pariwisata di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat menunjukkan lonjakan pertumbuhan di awal, namun terdapat fluktuasi signifikan yang menggambarkan tantangan di lapangan, baik dari sisi kunjungan wisatawan maupun penguatan ekosistem pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama. Untuk lebih jelasnya capaian urusan pemerintahan bidang pariwisata di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.127.:

Tabel 2- 127
Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	8,40	23,61	50,37	-46,17	-42,94
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	5,88	12,00	18,00	24,00	30,00

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	7,14	14,29	21,43	30,38	37,97

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

Berdasarakan data di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator outcome yang menggambarkan dinamika pertumbuhan wisatawan dan penguatan kelembagaan pelaku ekonomi kreatif di daerah.

Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 8,40% pada tahun 2020 menjadi 23,61% (2021) dan mencapai puncaknya pada 50,37% (2022). Peningkatan ini menandakan adanya upaya promosi dan pembukaan kembali destinasi wisata pasca pembatasan pandemi. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan pertumbuhan kunjungan wisatawan secara drastis, masing-masing -46,17% dan -42,94%. Penurunan ini mencerminkan beberapa kemungkinan permasalahan, antara lain:

- Kurangnya atraksi baru dan inovatif yang mampu menarik wisatawan.
- Masih terbatasnya infrastruktur dasar seperti akses jalan menuju objek wisata, fasilitas publik, serta akomodasi yang memadai.
- Keterbatasan promosi digital dan kerja sama lintas sektor dalam pengembangan pariwisata daerah.

Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Capaian indikator ini meningkat dari 5,88% (2020) menjadi 30,00% (2024). Tren ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan hukum atas produk dan jasa kreatif mereka, melalui hak cipta, merek dagang, dan sertifikasi lainnya. Hal ini merupakan hasil dari pembinaan yang konsisten, fasilitasi legalitas, serta kemitraan lintas sektor yang mulai tumbuh di bidang ekonomi kreatif. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 32 unit akibat pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi kreatif, terutama pada subsektor yang bergantung pada interaksi fisik, seperti seni pertunjukan, pariwisata, kuliner, dan fashion. Banyak pelaku ekonomi kreatif mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hingga harus menutup usaha. Namun, setelah pandemi mereda, terjadi proses pemulihan yang didorong oleh berbagai faktor dan kebijakan.

Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Indikator ini juga menunjukkan tren positif, naik dari 7,14% (2020) menjadi 37,97% (2024). Capaian ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, validasi, serta penguatan kapasitas pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, forum, hingga pengembangan kelembagaan.

Dari ketiga capaian indikator di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun indikator kelembagaan pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun penurunan signifikan jumlah kunjungan wisatawan perlu menjadi perhatian serius. Ke depan, penguatan destinasi unggulan, promosi terintegrasi, pengembangan event berkala, serta penyediaan infrastruktur pendukung menjadi kunci penting dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Dharmasraya.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Bidang pertanian di Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selama periode 2020–2024, berbagai indikator menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi akibat faktor eksternal maupun tantangan struktural. Dibidang pertanian komoditi padi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya. Dengan total luas sawah sebanyak 6.023 Ha berdasarkan PERDA LP2B No. 18 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya berkeinginan bisa memenuhi kebutuhan akan pangan bagi masyarakat sehingga tercapainya kemandirian pangan.

Selain padi komoditi pertanian di Kabupaten Dharmasraya yaitu jagung, kelapa sawit, karet dan peternakan. Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian indikator sektor pertanian di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.128.

Tabel 2- 128
Capaian Indikator Sektor Pertanian di Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	-	74,82	111,19	96,23	108,77
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	-	102,98	189,81	45,88	304,26
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	-	-	116,54593	44,7365334	111,8675
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Persentase	11,51	55,22	60,96	62,87	60,64
6	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase	-	88,46	111,40	119,03	104,74
7	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Persentase	-	-	-	-	100,00
8	Persentase penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pertanian, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan menunjukkan tren yang cukup stabil dengan peningkatan dari 74,82% (2021) menjadi 111,19% (2022) dan 108,77% (2024). Meskipun sempat menurun menjadi 96,23% (2023), namun capaian ini tetap menunjukkan bahwa produktivitas sektor tanaman pangan relatif terjaga.

b) Peningkatan Produksi Hortikultura

Kinerja hortikultura mengalami fluktuasi tinggi. Setelah mengalami kenaikan dari 102,98% (2021) ke 189,81% (2022), terjadi penurunan drastis pada 2023 sebesar 45,88%, sebelum melonjak kembali menjadi 304,26% (2024). Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketergantungan pada musim, pasar, atau perubahan teknis budidaya yang perlu diantisipasi lebih baik ke depan.

c) Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Produksi peternakan juga sempat melonjak pada 2022 (116,54%), namun turun drastis menjadi 44,73% (2023), lalu naik kembali ke 111,87% (2024). Hal ini menandakan adanya kerentanan terhadap penyakit, pakan, atau harga pasar yang mempengaruhi performa subsektor peternakan.

d) Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan sebagai LP2B

Indikator ini menunjukkan stabilitas yang sangat baik**,** yaitu tetap pada angka 99,45% selama lima tahun. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan fungsi lahan pertanian dari alih fungsi ke sektor non-pertanian.

e) Peningkatan Produksi Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

Indikator agregat ini meningkat dari 11,51% (2020) ke 62,87% (2023) meskipun sedikit menurun di 2024 (60,64%). Capaian ini menunjukkan arah yang positif terhadap sinergi pengembangan subsektor secara terpadu.

Peningkatan Produksi Perkebunan

- Terdapat tren peningkatan dari 88,46% (2021) menjadi 119,03% (2023), meskipun kembali turun ke 104,74% (2024). Fluktuasi ini umum terjadi akibat variabel harga pasar, serangan hama, dan curah hujan.
- Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)
- Tercapai 100% pada 2024, menunjukkan kesigapan dan efektivitas layanan kesehatan hewan di Kabupaten Dharmasraya.

Persentase Penanganan Bencana Pertanian

- Selama lima tahun, capaian indikator ini konsisten pada 100%, menandakan respons cepat dan kesiapsiagaan yang sangat baik terhadap gangguan produksi seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama.
- Persentase SDM Penyuluh yang Ditingkatkan
- Kapasitas penyuluh pertanian berada pada 100% konsisten dari 2020–2024, menunjukkan perhatian besar dalam peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pelatihan dan pendampingan lapangan.

Secara umum, kinerja urusan pertanian Kabupaten Dharmasraya menunjukkan arah yang positif, didukung oleh perlindungan lahan, peningkatan SDM, serta penanganan risiko pertanian yang responsif. Ke depan, fokus kebijakan dapat diarahkan pada penguatan daya tahan produksi hortikultura dan peternakan, pemanfaatan teknologi budidaya, serta peningkatan nilai tambah dan akses pasar untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedepan Kabupaten Dharmasraya memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian di wilayah Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 2020–2024, capaian indikator sektor pertanian menunjukkan kinerja positif dan menjadi fondasi penting dalam mendukung program unggulan Bupati, khususnya dalam pengembangan OVOP (*One Village One Product*), hilirisasi produk pertanian, serta program sawah pokok murah.

Dari capaian masing-masing indikator di atas, dapat dilihat bahwa adanya peluang besar bagi pengembangan produk unggulan nagari melalui program OVOP, di mana setiap nagari dapat diarahkan untuk mengembangkan komoditas berbasis potensi lokal seperti sayuran hortikultura, beras organik, ayam kampung, atau produk olahan lainnya. Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hilirisasi, dimana komoditas perkebunan menunjukkan peningkatan produksi secara konsisten, dengan capaian 119,03% di 2023. Hal ini mendukung pengembangan produk olahan kelapa sawit,

karet, kelapa, atau coklat sebagai bagian dari penguatan rantai nilai dan industrialisasi pertanian tingkat nagari.

Program hilirisasi padi – dari gabah ke produk bernilai tambah, dimana berdasarkan data produksi tanaman pangan dan stabilitas lahan LP2B (99,45% konsisten) memberi dasar kuat untuk pengembangan hilirisasi padi. Salah satu fokus program Bupati adalah mendorong petani tidak lagi menjual dalam bentuk gabah, tetapi telah melalui proses pasca-panen dan pengemasan, sehingga menghasilkan beras unggul siap konsumsi dengan nilai jual lebih tinggi. Dukungan terhadap mesin penggilingan modern (*Rice Milling Unit*/RMU) , kemasan berlabel, hingga branding lokal menjadi bagian penting dalam mewujudkan hal ini.

Selain itu konsep Sawah Pokok Murah, dalam rangka menjamin akses pangan masyarakat dengan harga terjangkau, konsep sawah pokok murah yang dicanangkan Bupati bertumpu pada ketersediaan dan perlindungan lahan sawah serta stabilisasi harga input produksi. Konsistensi cakupan lahan pertanian yang dilindungi, serta keberhasilan 100% dalam pengendalian penyakit dan bencana pertanian, memperlihatkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki ketahanan dasar untuk memastikan stabilitas pasokan pangan lokal melalui skema harga subsidi input atau distribusi hasil panen dari kelompok tani mitra ke masyarakat.

Pemberdayaan sumberdaya manusia penyuluh dan validasi data pertanian, dimana saat ini capaian 100% peningkatan SDM penyuluh setiap tahun memperkuat pelaksanaan program berbasis pendampingan langsung ke petani. Penyuluh menjadi motor dalam mengenalkan inovasi pertanian, pendampingan hilirisasi, dan transformasi mindset petani dari “berorientasi hasil panen” menjadi “berorientasi nilai tambah”.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor perdagangan melalui fasilitasi izin usaha, perbaikan sarana perdagangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta promosi produk lokal. Capaian indikator yang ditunjukkan dalam tabel mengindikasikan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal ekspor barang. Untuk lebih jelasnya capaian indikator bidang perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 129
Capaian Indikator Bidang Perdagangan di Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	13,6	100	100	100	100

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	32,43	32,43	32,43	32,43	37,83
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	90	91	92	93	94
4	Nilai Ekspor Barang	Persentase	0	0	0	0	0
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase	100	100	100	100	100
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	50	55	60	65	70

Sumber : Dinas Kumperdag, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
   Indikator ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 13,6% pada tahun 2020 menjadi 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan upaya aktif Pemerintah Daerah dalam mempermudah akses legalitas bagi pelaku usaha perdagangan melalui pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Perdagangan
   Capaian kualitas sarana perdagangan (pasar, kios, lapak, dsb.) terjaga stabil pada 32,43% dari 2020 hingga 2023, dan meningkat menjadi 37,83% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan secara bertahap terhadap fasilitas perdagangan rakyat seperti pasar tradisional dan area penjualan produk lokal.
3. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Indikator ini menunjukkan tren positif, dari 90% (2020) menjadi 94% (2024). Capaian ini menandakan efektivitas intervensi pengendalian harga melalui operasi pasar, pemantauan distribusi barang, dan kolaborasi dengan pelaku usaha untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
4. Nilai Ekspor Barang
   Selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), nilai ekspor barang masih nol (0%). Hal ini menjadi catatan penting bahwa sektor perdagangan di Dharmasraya masih berfokus pada pasar domestik. Perlu adanya langkah strategis untuk mendorong produk unggulan lokal seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan agar mampu menembus pasar ekspor, paling tidak melalui kerja sama lintas daerah dan fasilitasi sertifikasi mutu serta promosi luar negeri.
5. Penanganan Pengaduan Konsumen
   Capaian penanganan pengaduan konsumen berada pada tingkat maksimal 100% setiap tahun dari 2020–2024. Ini menunjukkan sistem pelayanan perlindungan

konsumen berjalan sangat baik, baik melalui saluran aduan langsung maupun digital.

6. Promosi Produk Lokal
   Tingkat fasilitasi promosi produk lokal menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 50% (2020) menjadi 70% (2024). Hal ini mencerminkan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pelaku UMKM dan industri lokal dalam meningkatkan daya saing produk mereka melalui kegiatan pameran, marketplace, branding, dan promosi digital.

   Berdasarkan capaian indikator urusan perdagangan menunjukkan keberhasilan dalam pelayanan perizinan, perlindungan konsumen, dan promosi produk lokal dan stabilisasi harga kebutuhan pokok tetap terjaga baik. Dengan penguatan strategi hilirisasi, peningkatan mutu produk, serta pemanfaatan teknologi informasi, sektor perdagangan Dharmasraya berpotensi lebih berkembang dan mampu menembus pasar yang lebih luas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Saat ini telah dibangun Pasar Modern melalui pembiayaan APBN di Sungai Rumbai, sebagai salah satu sarana penunjang fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai etalase/pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat yang melayani kecamatan-kecamatan hinterland. Kehadiran pusat perdagangan modern seperti Pasar Modern Sungai Rumbai. Pasar ini juga menjadi etalase baru bagi pelaku UMKM dan pedagang ritel di Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya. perbaikan bertahap terhadap kualitas pasar rakyat. Revitalisasi pasar-pasar rakyat di berbagai nagari seperti Pulau Punjung, Timpeh, Koto Baru, dan Sitiung serta pasar-pasar lainnya menjadi target utama dalam pemerintahan Dharasray Tahun 2025-2029. Sinergi antara pembangunan pasar modern dan pembenahan pasar tradisional ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan kompetitif.

Kedepan diharapkan produk-produk lokal hasil UMKM dan pertanian telah mendapatkan ruang lebih luas di Pasar Modern Sungai Rumbai dan dalam berbagai kegiatan bazar dan pameran di pasar rakyat. Ini menjadi bagian integral dari program "Bangga Buatan Dharmasraya", mendorong masyarakat membeli dan mengonsumsi produk sendiri. Pengembangan bidang perdagangan terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana perdagangan menjadi lebih representatif juga mendukung pemasaran produksi komoditi unggulan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berupaya mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya daerah

melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian sudah mengupayakan banyak hal agar capaian kinerja indicator ini semakin meningkat setiap tahunnya. Namun masih banyak ditemui bermacam kendala dalam pelaksanaannya. Upaya ini tercermin dari capaian tiga indikator utama dalam urusan perindustrian, yaitu realisasi investasi sektor industri, izin usaha industri, dan ketersediaan informasi industri yang akurat dan terkini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2- 130
Capaian Indikator Bidang Perindustrian di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Persentase	-	3,34	1,3	2,9	6,7
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	60	70	73,14	75,68	80,3
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Kumperdag, Tahun 2025

Berdasarkan capaian indikator di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri
   Realisasi investasi sektor industri selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 6,7%, meningkat dari hanya 1,3% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Dharmasraya masih dalam tahap awal pengembangan, terutama pada skala kecil dan menengah. Kenaikan pada 2024 turut dipengaruhi oleh mulai tumbuhnya unit-unit industri berbasis produk unggulan, seperti pengolahan keripik tempe, rendang kemasan, dan produk kerajinan. Meski demikian, belum terbentuknya kawasan industri dan minimnya investasi skala besar tetap menjadi tantangan utama.

2. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
   Capaian penerbitan izin usaha industri menunjukkan peningkatan konsisten dari 60% pada 2020 menjadi 80,3% pada 2024. Hal ini menunjukkan iklim perizinan yang semakin kondusif, serta kemudahan akses OSS (Online Single Submission). Pertumbuhan perizinan didorong oleh dorongan legalisasi unit-unit produksi OVOP, yang mulai bertransformasi dari usaha informal ke arah formal dan

teregistrasi. Proses fasilitasi pendampingan dari OPD teknis juga berperan dalam membantu pelaku usaha memperoleh izin industri rumah tangga, khususnya pada sentra-sentra OVOP di nagari.

3. Tersedianya Informasi Industri yang Lengkap, Akurat dan Terkini. Sejak tahun 2022, indikator ini tercapai secara optimal dengan 100% realisasi, menunjukkan bahwa Pemda telah memiliki sistem data industri dan IKM yang lebih tertata dan mutakhir. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun klaster industri OVOP, mengidentifikasi rantai pasok, serta menyusun roadmap pembinaan produk unggulan nagari. Kedepannya, data industri berbasis nagari ini dapat disinergikan dengan *dashboard* OVOP Dharmasraya untuk mempermudah promosi dan kemitraan usaha secara digital.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi merupakan bagian dari urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara prinsip diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang seimbang antarwilayah. Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), tidak terdapat pelaksanaan program dan kegiatan yang secara khusus masuk dalam urusan bidang transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Fokus pembangunan daerah lebih diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan sektor produktif, seperti pertanian, infrastruktur dasar, dan UMKM, sehingga program transmigrasi belum menjadi agenda prioritas daerah.
- Tidak adanya usulan pembukaan kawasan transmigrasi baru, serta minimnya kebutuhan akan relokasi penduduk antarwilayah di dalam maupun ke luar daerah.

2.4.7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini tercermin melalui dua indikator utama, yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua indikator ini menggambarkan kualitas tata kelola, perencanaan, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2- 131
Capaian Indikator Bidang Sekretariat Daerah di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	bobot	3,51	2,88	3,5	-	-
3	Nilai SAKIP	bobot	63,44	63,98	64,07	64,65	67,24

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada capaian indikator NEKPPD, terjadi penurunan kinerja pada tahun 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh gangguan operasional selama pandemi COVID-19, serta adaptasi terhadap kebijakan baru seperti integrasi sistem pelaporan. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan ke angka yang mendekati capaian tahun 2020, menandakan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan, dan data untuk tahun 2023–2024 belum tersedia, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap tren lima tahunan belum bisa dilakukan secara lengkap.

Capaian indikator SAKIP, terjadi tren peningkatan yang konsisten setiap tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kinerja berbasis hasil (result-based management). Peningkatan nilai dari 63,44 (2020) menjadi 67,24 (2024) mengindikasikan perbaikan dalam perencanaan kinerja, pelaporan, dan evaluasi, meskipun masih dalam kategori sedang, dimana capaian ini dapat dijadikan dasar untuk mendorong reformasi birokrasi lebih lanjut di tingkat sekretariat daerah, khususnya dalam efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah.

2. Sekretariat DPRD

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya pada periode Tahun 2025-2029 menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Meskipun beberapa target belum tercapai sepenuhnya, upaya perbaikan berkelanjutan terus dilakukan untuk mencapai standar pelayanan prima. Dengan sinergi yang lebih kuat antara seluruh elemen Sekretariat dan dukungan penuh dari anggota DPRD, diharapkan capaian di masa mendatang dapat lebih optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Tabel 2- 132
Capaian Indikator Bidang Sekretariat DPRD di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100	100	100	100	100

2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	50	100	50	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2025

2.4.8. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Bidang Perencanaan memiliki peran strategis dalam menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah agar tercapai secara terukur, terarah, dan berkelanjutan. Capaian indikator outcome selama tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan kinerja konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, yang akan menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk periode RPJMD 2025–2029. Dilihat berdasarkan capaian sasaran perencanaan secara keseluruhan, kinerja perencanaan dilaksanakan oleh Bapperida. Secara keseluruhan capaian kinerja perencanaan berada pada kategori memuaskan dan sangat tinggi. Lebih jelasnya capaian indikator bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 133
Capaian Indikator Bidang Perencanaan di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	95	95	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	90	90	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	87,67	87,67	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	87,67	87,67	100	100	100

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Tahun 2020 dan 2021 berada pada angka 95%, menunjukkan bahwa pada awal periode RPJMD, sinkronisasi dengan RKPD sudah sangat baik. Mulai tahun 2022 hingga 2024, capaian kinerja sudah 100%, hal ini mencerminkan bahwa seluruh program dan kegiatan RKPD telah sepenuhnya sejalan dengan RPJMD, sehingga erdapat peningkatan kinerja yang konsisten dan

signifikan dalam mengintegrasikan perencanaan tahunan dengan dokumen jangka menengah.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) tahun 2020-2021 sudah mencapai 90% dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2022–2024.Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perangkat daerah telah sepenuhnya menyelaraskan Renstra mereka dengan arah kebijakan RPJMD. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau ketidaksesuaian arah program.

Untuk capaian indikator persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun 2020 dan 2021 sudah mencapai 87,67%, dan pada tahun 2022 hingga 2024 meningkat menjadi 100%. Perbaikan yang signifikan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia telah meningkat, baik dalam hal integrasi program maupun penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, sementara pada indikator Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan capaian 87,67% di tahun 2020–2021 dan meningkat menjadi 100% di tahun 2022–2024. Kondisi ini mencerminkan peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi teknis dalam perencanaan infrastruktur yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara keseluruhan, Bidang Perencanaan Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal penyelarasan dokumen perencanaan. Semua indikator mencapai angka maksimal (100%) sejak tahun 2022, menunjukkan efektivitas sistem perencanaan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana.

2. Keuangan

Bidang Keuangan memiliki peran vital dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Indikator urusan pemerintah bidang keuangan terdiri dari 9 (sembilan) indikator. Capaian indikator keuangan selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menggambarkan upaya optimalisasi belanja, penguatan pendapatan, dan perbaikan sistem tata kelola keuangan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Capaian masing-masing indikator pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 134
Capaian Indikator Bidang Keuangan di Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	38,43	33,25	33,39	34,56	37,80
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	97,26	90,48	67,28	93,52	94,96
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	(114,06)	(742,37)	40,30	(14,89)	91,20
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	8,37	8,46	11,86	12,37	11,16
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	75,00	75,00	75,00	90,00	90,00

Sumber : BKD, Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Outcome Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD mengalami fluktuasi, tahun 2020 dengan capaian 38,43%, mengalami penurunan menjadi 33,25% di tahun 2021 dan kembali meningkat hingga 37,80% di tahun 2024.Penurunan awal menunjukkan efisiensi alokasi belanja pegawai, namun peningkatan di tahun terakhir perlu dicermati agar tidak membebani anggaran daerah, terutama untuk belanja produktif.

Pada indikator Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik capaian tahun 2020-2024 pada angka 38,91%. Konsistensi ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga proporsi belanja infrastruktur sebagai prioritas

pelayanan publik. Namun, stagnasi juga bisa menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas output dari belanja tersebut.

Capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar mengalami penurunan tajam dari 97,26% di tahun 2020 ke 67,28% di tahun 2022, namun pulih menjadi 94,96% di tahun 2024. Penurunan signifikan di tahun 2022 perlu dievaluasi lebih lanjut, kemungkinan terkait pergeseran program atau keterlambatan eksekusi anggaran. Peningkatan kembali menunjukkan perbaikan dalam manajemen pelaksanaan anggaran urusan wajib.

Pada indikator Penurunan SILPA pada tahun 2020 dan 2021, nilai SILPA negatif sangat besar (-114,06% dan -742,37%), mengindikasikan adanya SILPA yang sangat tinggi, tidak sesuai dengan target penurunan. Kemudian membaik pada tahun 2022 menjadi 40,30%, dan mencapai 91,20% pada tahun 2024. Kinerja pengelolaan kas dan penyerapan anggaran menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2022. Hal ini mencerminkan penguatan perencanaan dan realisasi anggaran yang lebih baik.

Pada indikator Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu, capaian konsisten 100% setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian ini menandakan tata kelola administrasi keuangan yang disiplin dan sesuai dengan regulasi, serta merupakan indikator penting dalam menjaga opini WTP dari BPK. Sedangkan pada indikator persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari 8,37% di tahun 2020 menjadi 12,37% di tahun 2023, namun turun kembali menjadi 11,16% di tahun 2024. Meningkatnya kontribusi PAD menunjukkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Namun, fluktuasi di akhir periode menjadi sinyal penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Untuk indikator Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital dengan capaian 75% hingga tahun 2022, lalu meningkat menjadi 90% di tahun 2023–2024. Perkembangan ini menunjukkan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin matang. Penerapan sistem informasi keuangan digital mempercepat transparansi, efisiensi, dan pengawasan anggaran.

Dari kondisi tersebut di atas secara umum, kinerja keuangan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal efisiensi belanja, peningkatan realisasi program wajib pelayanan dasar, pengendalian SILPA, serta modernisasi sistem keuangan digital. Meski demikian, beberapa indikator masih menunjukkan ketidakstabilan yang memerlukan intervensi strategis.

3. Kepegawaian

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) merupakan prioritas strategis dalam reformasi birokrasi. Melalui penguatan perencanaan kebutuhan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupaya meningkatkan profesionalitas dan kinerja ASN. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara konsisten mendorong penguatan manajemen kepegawaian yang berbasis meritokrasi. Sistem merit menjadi landasan utama dalam pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, promosi jabatan, hingga penilaian kinerja, yang semuanya ditujukan untuk menciptakan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Data capaian indikator kepegawaian periode 2020–2024 memberikan gambaran progres upaya pembinaan dan pengelolaan ASN secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 135
Capaian Indikator Bidang Perindustrian di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58,04	62,86	71,7	83,19	81,6
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	-	93,9	-	75	82
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	-	-	62,5	63,2	29,1
4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	21	20,2	31,4	33,3	55,3
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	-	-	4,8	8,7	16,7

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Outcome Indikator Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan konsisten dari 58,04 di tahun 2020 menjadi 83,19 tahun 2023, dengan sedikit penurunan ke 81,6 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas ASN, yang mencakup aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dan akan menjadi evaluasi untuk mempertahankan konsistensi mutu ASN.

Untuk indikator Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi, terlihat pada tahun 2021 capaian sebesar 93,9%, kemudian mengalami penurunan

pada tahun 2023 menjadi 75% dan tahun 2024 meningkat menjadi 82%. Penurunan sempat terjadi di tengah periode, kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian analisis kebutuhan jabatan atau dinamika kebijakan pusat. Namun tren akhir menunjukkan perbaikan dalam perencanaan kebutuhan ASN yang berbasis formasi riil.

Indikator Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan dengan capaian tahun 2022 yaitu 62,5%, meningkat ke 63,2% di tahun 2023, namun turun tajam menjadi 29,1% pada tahun 2024. Penurunan signifikan di tahun 2024 dapat mengindikasikan keterbatasan anggaran, hambatan teknis pelaksanaan pelatihan, atau kurangnya prioritas pelatihan. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan program pelatihan berjalan optimal ke depan. Sementara capaian pada indikator Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi tahun 2021 sebesar 21% menjadi 55,3% di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas SDM ASN melalui skema sertifikasi formal. Hal ini penting sebagai ukuran kompetensi yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indiaktor Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis tahun 2022 capaian 4,8% menjadi 16,7% di tahun 2024. Meskipun masih relatif rendah, tren positif ini menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi teknis mulai berjalan dan diperluas. Penguatan anggaran dan desain pelatihan berbasis kebutuhan organisasi dapat meningkatkan capaian ini secara signifikan.

Selama periode 2020–2024, Bidang Kepegawaian Kabupaten Dharmasraya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam aspek profesionalitas dan peningkatan kapasitas ASN. Beberapa indikator, seperti indeks profesionalitas ASN dan sertifikasi kompetensi, mengalami peningkatan yang kuat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pelatihan dan pengembangan teknis yang belum merata, serta fluktuasi dalam perencanaan kebutuhan ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Salah satu strategi utamanya adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, baik di tingkat dasar, manajerial, maupun fungsional. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara bertahap meningkatkan kualitas dan cakupan pelatihan ASN sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM aparatur. Capain dari indikator ini tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 136
Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	0,9	13,2	20,6	23,9	25,2

Sumber : BKPSDM, Tahun 2025

Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator bidang pendidikan dan pelatihan hanya sebesar 0,9%, namun terus meningkat menjadi 25,2% pada 2024. Dilihat dari kenaikan yang konsisten setiap tahun menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi ASN mulai berjalan secara terencana dan terukur. Peningkatan ini juga sejalan dengan prinsip meritokrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, di mana ASN diberi akses pelatihan yang sesuai dengan jenjang jabatan dan kebutuhan organisasi. Meskipun menunjukkan capaian positif 25,2% di tahun 2024 masih menunjukkan bahwa mayoritas ASN belum terjangkau oleh program pengembangan kompetensi, sehingga masih terdapat ruang perbaikan.Tantangan yang mungkin dihadapi meliputi keterbatasan anggaran pelatihan, kapasitas penyelenggaraan diklat, serta penyusunan program berbasis kebutuhan riil ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan berbasis data dan inovasi. Berikut ini merupakan capaian indikator outcome Litbang selama tahun 2020–2024 yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan penelitian dan pengembangan tahun 2025–2029. Lebih jelasnya capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2- 137
Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerahyang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	100
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	71,42857	84,21053	91,176471	100	100
3	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi	Persentase	0,7	100	100	100	100

No	Indikator Outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	terkait Riset dan Inovasi di Daerah						
4	Pengeluaran Iptek dan Inovasi	Persentase PDRB	0,00282	0,008788	0,0085667	0,023445631	-

Sumber : Bapperida, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan pada tahun 2023-2024 sudah 100%. Capain ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi Litbang sebagai dasar kebijakan pembangunan. Hal ini mencerminkan penguatan fungsi Litbang sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan daerah. Ketiadaan data pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sistem dokumentasi dan pelaporan masih perlu diperkuat.

Pada indikator Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan, terjadi peningkatan konsisten dari tahun ke tahun hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Ini menandakan bahwa produk inovasi yang dihasilkan semakin relevan dan aplikatif dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Konsistensi pemanfaatan inovasi ini merupakan modal penting untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah. Sementara capaian pada indikator Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah terjadi peningkatan drastis dari 0,7% pada tahun 2020 menjadi 100% mulai tahun 2021 menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan riset dan inovasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Litbang yang dilaksanakan oleh OPD maupun mitra eksternal.

Untuk capaian kinerja indikator Pengeluaran Iptek dan Inovasi terhadap PDRB, meski secara persentase terhadap PDRB masih tergolong kecil, terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pendanaan riset dan inovasi. Ketersediaan data tahun 2024 perlu dipastikan guna menjaga keberlanjutan pengukuran efektivitas investasi Litbang. Artinya capaian indikator Litbang menunjukkan tren positif secara umum, dengan pemanfaatan inovasi dan rekomendasi kebijakan yang sudah optimal di tahun-tahun terakhir dan komitmen fasilitasi dan pembinaan oleh pemerintah daerah telah meningkat tajam sejak 2021.

2.4.9. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Indikator pada urusan inspektorat daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1, Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Capaian masing-masing indikator dapar dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 138
Capaian Indikator Inspektorat Daerah di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		47,06%	63,93%	52,38%	64,86%	50,91%
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,000	3,000	2,390	2,996	2,903
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Sumber : Inspektorat, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, bahwa capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Tertinggi pada tahun 2023 (64,86%) dan terendah di awal (47,06%) serta kembali menurun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi antar-OPD dalam menindaklanjuti temuan BPK masih belum konsisten. Penurunan capaian di tahun 2022 dan 2024 perlu menjadi perhatian karena dapat berimplikasi pada opini BPK dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara umum.

Setelah mencapai Level 3 (terdefinisi) pada 2020–2021, maturitas SPIP mengalami penurunan cukup signifikan pada 2022 (2,39). Meski mengalami perbaikan di tahun-tahun selanjutnya, namun capaian 2024 (2,90) belum kembali ke Level 3 secara penuh. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern, terutama pada aspek perencanaan risiko, pengendalian aktivitas, dan pemantauan internal di perangkat daerah.

Capaian yang stabil pada Level 3 menandakan bahwa Inspektorat Dharmasraya sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengawasan secara

menyeluruh dan terintegrasi, serta mampu memberikan *assurance* atau tingkat keyakinan yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau auditor bahwa suatu proses, laporan, atau sistem telah berjalan sesuai dengan standar, peraturan, dan prinsip tata kelola yang baik terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun stagnasi ini juga berarti belum ada peningkatan ke Level 4 (Manajemen), yang merupakan target nasional dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (*Stranas PK*). Untuk itu, dibutuhkan transformasi peran APIP dari sekadar auditor internal ke agen pembina tata kelola.

2.4.10. Unsur Kewilayahan

Untuk unsur kewilayahan merupakan kinerja dari Pemerintah Kecamatan yang ada di Kabuapten Dharmasraya, Capaian indikator Unsur kewilayahan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari capaian sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan capaian indeks kepuasan masyarakat.

Tabel 2- 139
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	REALISASI		
		2022	2023	2024
1	Kecamatan Asam Jujuhan	70,53	69,94	74,62
2	Kecamatan Koto Baru	66,1	77,39	78,15
3	Kecamatan Koto Besar	63,96	72,45	73,81
4	Kecamatan Koto Salak	60,61	67,18	69,33
5	Kecamatan Padang Laweh	66,1	67,94	71,94
6	Kecamatan Pulau Punjung	71,53	71,57	72,09
7	Kecamatan Sembilan Koto	65,02	61,08	62,62
8	Kecamatan Sitiung	60,93	61,08	66,08
9	Kecamatan Sungai Rumbai	72,62	72,37	78,12
10	Kecamatan Timpeh	71,41	60,05	69,89
11	Kecamatan Tiumang	65,83	61,46	69,89

Sumber : Bagian Organisasi Setda, Tahun 2025

Tabel 2- 140
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Kecamatan Asam Jujuhan	81,59	81,5	75,5
2	Kecamatan Koto Baru	80,7	80	81,5

3	Kecamatan Koto Besar	80,5	87,25	90,13
4	Kecamatan Koto Salak	80,61	80	75
5	Kecamatan Padang Laweh	77,09	80	81,2
6	Kecamatan Pulau Punjung	80,7	89,85	81,53
7	Kecamatan Sembilan Koto	80	89,85	80
8	Kecamatan Sitiung	81,64	87,25	85,53
9	Kecamatan Sungai Rumbai	78,18	87,25	88,56
10	Kecamatan Timpeh	80,5	87,25	80,7
11	Kecamatan Tiumang	80,61	80	80

Sumber : Bagian Organisasi Setda, Tahun 2025

2.4.11. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Selama periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi, stabilitas sosial-politik, dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian indikator utama pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan. Lebih jelasnya capaian masing-masing indikator tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 141
Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No.	Indikator Outcome	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	62,5	62,5	62,5	62,5	85
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	10,14	10,14	10,14	10,14	-
3	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	3	5	5	5	10

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada indikator Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik, capaian di angka 62,5% dari tahun 2020 hingga 2023, meningkat signifikan ke 85% di tahun 2024. Konsistensi dalam pelaksanaan pendidikan politik selama empat tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kader partai, Kenaikan tajam pada 2024 menandakan adanya peningkatan intensitas dan cakupan kegiatan pendidikan politik, yang

mungkin didorong oleh agenda politik nasional (misalnya, persiapan pemilu atau Pilkada) dan peningkatan ini juga mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendidik kader secara lebih masif dan terstruktur.

Pada indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif, capaian stabil di 10,14% dari 2020 hingga 2023, namun data untuk 2024 tidak tersedia. Angka yang stagnan selama empat tahun menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan signifikan dalam keaktifan organisasi kemasyarakatan (ormas),hal ini berakibat pada terbatasnya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah daerah, kurangnya insentif atau kemitraan yang mendorong ormas berperan aktif dalam pembangunan sosial-politik dan ketidakhadiran data tahun 2024 menyiratkan perlunya perbaikan dalam pelaporan dan pengelolaan data ormas.

Selanjutnya pada indikator Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan terlihat capaian tahun 2023 yaitu 3% meningkat menjadi 10% pada 2024. Kinerja dalam penyelesaian konflik sosial menunjukkan tren yang positif dan konsisten, naik secara bertahap pada tahun 2021-2023 dari 3% menjadi 5%, dan tahun 2024 meningkatkan menjadi 10%. Kondisi ini mencerminkan peran aktif Forkopimda, tokoh masyarakat, dan perangkat Kesbangpol dalam mediasi dan penyelesaian konflik berbasis komunitas dan peningkatan signifikan di 2024 menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini dan respons cepat konflik semakin efektif dijalankan.

2.4. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 dilakukan untuk menilai sejauh mana visi dan misi kepala daerah telah diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan dicapai dalam bentuk kinerja. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2024merupakan evaluasi terhadap capaian target kinerja berdasarkan misi serta tingkat capaiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2- 142
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Dharmasraya Periode Pelaksanaan Tahun 2021 - Tahun 2024

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur															
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57	60	63	49,71	58,09	58,16	54,59	93,79	101,91	96,93	86,65
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65	70	80	26,17	88,22	89,07	89,64	43,72	135,72	127,24	112,05
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92	95	97	51,92	55,77	60	94,45	57,69	60,62	63,16	97,37
Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	22,7	28,89	36,14	43,04	50,67	41	4,35	10,58	5,28	142,37	12,04	24,58	10,42

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rasio pemukiman layak huni	persen	85	85,85	88,65	91,45	94,25	91,45	84,3	92.18	86,29	106,52	95,09	4,21	91,55
Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,2	69,1	69,75	71,3	79,76	79,76	76,37	72,45	116,95	115,43	109,49	101,61
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia															
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,66	71,82	71,98	72,13	72	72,3	73,04	74,82	100,14	100,67	101,47	103,73
Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69	71,87	72,05	71,53	71,90	72,24	74,25	100,03	100,29	100,51	103,05
Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48	8,49	8,49	8,55	8,56	8,71	8,98	100,83	100,94	102,59	105,77
	Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,45	12,45	12,44	12,51	12,68	12,89	100,00	100,56	101,85	103,53
Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89	89,17	89,34	88	88,56	89,11	89,71	99,43	99,51	99,93	100,41
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing															

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	2,5	2,9	4,2	4,5	3,42	4,28	4,32	3,86	136,80	147,59	102,86	85,78
	Gini rasio	indeks	0,275	0,27	0,265	0,26	0,255	0,268	0,287	0,291	0,233	99,26	108,30	111,92	91,37
Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	43,81	44,79	45,76	46,52	52,12	55,63	58,71	108,62	118,97	124,19	128,31
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	3,25	3,4	3,6					-	-	-	-
Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5,88	5,68	5,49	5,29	5	6,23	6,22	6,02	85,03	109,68	113,30	113,80
Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,08	6,02	5,97	6,67	5,56	5,56	5,32	108,63	91,45	92,36	89,11
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien															
Tujuan : Mewujudkan Tata kelolaPemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	60	65	70	73	46,58	50,2	57,28	3,92	77,63	77,23	81,83	5,37
Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3.066	3.194	3.322	3,45	3,88	3,93	3,322	3,83	0,13	0,12	0,10	111,01

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	63,98	64,07	64,65	67,24	91,40	91,53	92,36	96,06
	Nilai LPPD	Skor	3,51	3,60	3,65	3,70	3,75	2,88	3,5			80,00	95,89	-	-
Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	indeks	1,35	1.625	1,9	2.175	2,45	1,09	2,41	2,83	3,61	0,07	126,84	0,13	147,35
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	65	68	71	62,87	62,86	83,19	84,65	101,40	96,71	122,34	119,23
Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21				3,21	-	bbf	-	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	80	81	82	83	81,76	88,67		84,65	102,20	109,47	-	101,99
Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri	persen	7,69	11,53	15,38%	19,23	23,07	7,69	9,62	11,54	46,15	66,70	6.254,88	60,01	200,04
Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,8195	0,8354	0,8437	0,828	0,8474	0,8464	0,8651	101,11	103,40	101,32	104,48
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7056	0,7127	0,7198	0,7087	0,7221	0,7436	0,7798	101,45	102,34	104,34	108,34

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,595	0,601	0,607	0,6039	0,6282	0,6667	0,7154	102,51	105,58	110,93	117,86
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan															
Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	68	71,1	71,4	71,7	72	63,38	63,9	63,48	65,79	89,14	89,50	88,54	91,38
Sasaran : Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	indeks	143,2	135	130	125	120	137,69	137,69	130,03	134,81	101,99	105,92	104,02	112,34
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah															
Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	n/a	1	3	6	10	1	1	1	2	100,00	33,33	16,67	20,00

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	2	2	2	2	-0,6	12,37	36,67	19,39	(30,00)	618,50	1.833,50	969,50
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	80	85	90	100	100	100	100	129,87	125,00	117,65	111,11
Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	n/a	1	3	6	10	1	1	1	2	100,00	33,33	16,67	20,00

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2025

2.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2020-2024

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD, dan serta indikator, strategi dan arah kebijakan terkait pada 7 (tujuh) perangkat daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang berkewajiban dalam melaksanakan SPM, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Satpol PP dan Kebakaran;
6. BPBD; dan
7. Dinas SOSP3APPKB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesui klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana Warga Negara yang tidak mampu lebih diprioritaskan dalam menerima Pelayanan Dasar untuk memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun kategori warga tidak mampu dimaksud adalah :

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
c. kondisi bencana; dan/atau

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, telah dirumuskan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan permasalahan mendasar yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan Standar

Pada urusan pendidikan,pada tahun 2024 telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu secara keseluruhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 100 persen. Untuk bidang kesehatan, secara umum pencapaian indikator SPM adalah 100 persen kecuali indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,72%.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 89,07 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,50 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan target penerima layanan dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2-143.

Tabel 2- 143
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
1. PENDIDIKAN									
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	Setiap Tahun	100			100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	100	Setiap Tahun	100	98,40		100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	Setiap Tahun	100	88,04		100	100
2. KESEHATAN									
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	57,61	82,84	100	100	88,04
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	66,42	97,17	99,66	99,72	91,39
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	68,59	99,23	100	100	91,97
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	59,88	67,70	100	100	96,33
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	64,11	66,05	100	100	96,71
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	41,81	100	100	100	97,37
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	99,79	95,04	100	100	95,62
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	15,47	58,66	100	100	99,32

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	81,83	89,36	100	100	99,06
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	83,62	99,49	100	100	100
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	70,15	83,96	100	100	100
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	Setiap Tahun	100	97,36	100	100	100
3. PEKERJAAN UMUM									
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	100	Setiap Tahun	95	85,43		89,07	89,64
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100	Setiap Tahun	88	91,73		92,5	92,5
4. PERUMAHAN RAKYAT									
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
5. TRANTIBUMLINMAS									
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	12,6
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
6. SOSIAL									
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	Setiap Tahun	100	100		100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

2.6. CAPAIAN SDG's TAHUN 2020-2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,

Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);

16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia bertujuan untuk meraih 17 tujuan melalui pengembangan 169 target dan 319 indikator TPB/SDGs. Pemerintah baik Tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota berperan aktif sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan urusan dan kewenangannya, terdapat 319 indikator TPB/SDGs yang dibagi kewenangannya menjadi 4 kategori, yakni :

1. Kewenangan Pusat sebanyak 308 indikator,
2. Kewenangan Provinsi sebanyak 235 indikator,
3. Kewenangan Kabupaten sebanyak 220 indikator, dan
4. Kewenangan Kota sebanyak 222 indikator.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

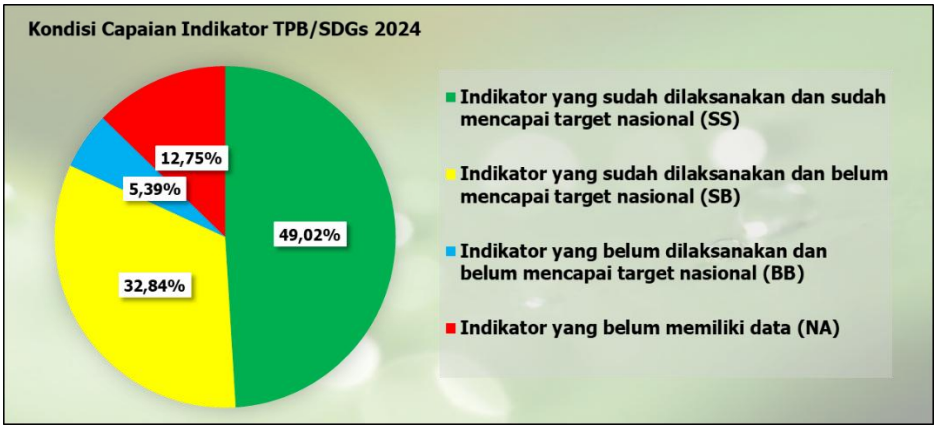
Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pembiayaan ataupun terkait optimalisasi sistem pendokumentasian kegiatan kegiatan terkait yang masih belum optimal. Berikut dapat dilihat capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksakan dan mencapai target adalah sebanyak 100 indikator (49,02%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 67 indikator (32,84%), indikator yang belum dilakukan dan belum mencapai target nasional adalah sebanyak 11 indikator (5,39%) dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 26 indikator (12,75%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2- 144
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	100	49,02%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	67	32,84%
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	11	5,39%
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	26	12,75%
TOTAL		**204**	**204**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Gambar 2- 109
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 145
Rekapitulasi Ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Dharmasraya

No.	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator	Ketidakter capaian (%)
1	Tanpa Kemiskinan	13	8	0	2	23	34,78
2	Tanpa Kelaparan	8	1	0	2	11	9,09
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	13	0	3	34	38,24
4	Pendidikan Berkualitas	5	7	0	1	13	53,85
5	Kesetaraan Gender	8	4	0	2	14	28,57
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	6	3	1	17	52,94
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	0	0	0	1	0,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	10	0	3	19	52,63

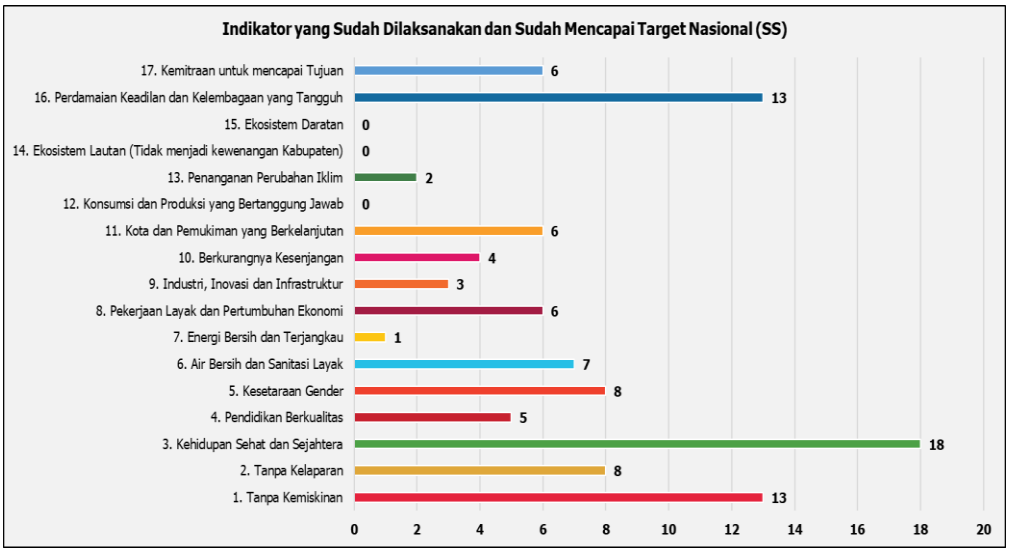
No.	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator	Ketidakter capaian (%)
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	4	1	1	9	55,56
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	1	0	2	7	14,29
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	1	1	1	9	22,22
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	3	2	0	5	100,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
15	Ekosistem Daratan	0	2	1	1	4	75,00
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	13	4	1	3	21	23,81
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	3	2	4	15	33,33
		100	**67**	**11**	**26**	204	
	Ketercapaian			**49,02%**			

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

2.6.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indicator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 100 indikator atau dengan persentase 49,02%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat Gambar berikut.

Gambar 2- 110
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya



Tabel 2- 146
Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

					2020	2021	2022	2023	2024
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 7-8% Target 2030 : 2,72-3,18	6,230	6,670	5,560	5,560	5,320
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 95%	69,76%	78,71%	79,75%	94,28%	96,34%
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 2,8 juta	4.502	5.182	7.337	6.531	6.613
4	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 63%.	1,94	1,84	1,83	96,22	96,43
5	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 65%	275,55	83,43	65,45	100	100
6	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 94,78%	99,97	98,40	98,40	99,48	99,49
7	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 82,2%	55,73	39,03	90,71	81,05	84,92
8	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	Meningkat menjadi 77,4%.	89,38	90,84	95,68	96,45	97,16
9	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena	BPBD	Menurun	0	0	0	0	0

					2020	2021	2022	2023	2024
		dampak bencana per 100.000 orang.							
10	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Meningkat menjadi 39 daerah Target daerah : ada	0	0	0	1	1
11	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	±7581000000	±5000000000	±1000000000	±2000000000	±1200000000
12	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	1
13	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BKD	Meningkat	54,16	53,20	48,44	53,96	55,12
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dispaperi	Menurun	1,25	1,24	1,12	1,30	1,24
15	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 17%	0,24	0,23	0,15	0,84	1,50
16	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dispaperi	Menurun menjadi 8,5 %	0	0	0	0	0
17	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	5,00%	8,30%	7,60%	2,63%	2,40%

					2020	2021	2022	2023	2024
18	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Menurun	9,12	2,63	3,04	4,65	4,31
19	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 28%	NA	NA	NA	9,53	9,62
20	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 50%	1334 (74,19%)	79,000	589 (70,8%)	2003 (73,9%)	2238 (72,7 %)
21	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dispaperi	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	191,35	100,10	203,30	92,30	95,45
22	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 306	77,02	382,72	200,29	168,44	187,09
23	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	99,62	99,32	99,66	99,80	100,00
24	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 85 %	91,74	94,70	94,97	94,97	94,97
25	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24	8,98	7,90	7,30	9,3/1.000 KH	13,6 / 1.000 KH
26	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi <0,5%	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
27	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 245	198,89	128,16	159,50	179,20	210,58

					2020	2021	2022	2023	2024
28	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	0
29	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 300	52	52	52	52	52
30	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Menurun	66,667	NA	NA	100	100
31	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi Dharmasraya 11 kecamatan	9	0	0	0	0
32	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 35. Target daerah : semua kecamatan	0	0	0	0	0
33	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	1.643	NA	14.513	31.903 (20%)	28.160 (17,7%)
34	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 280 Target daerah : Semua Puskesmas (13)	52	52	52	15	15

					2020	2021	2022	2023	2024
35	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 65%	81,10	83,43	65,45	100	100
36	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Meningkat	49,49	71,24	76,10	228.699 (98,05%) (UHC)	242.141 (100,83%) (UHC)
37	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi minimal 95% Target RPJPD Dharmasraya 2030 : 100%	49,49	71,24	76,10	228.699 (98,05%) (UHC)	242.141 (100.83%) (UHC)
38	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Meningkat	100	100	100	100	100
39	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat	5,05	7,37	7,38	5,91	6,25
40	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 84,2%	92,3%	90,7%	92,4%	89,8%	91,6%
41	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 81%	80,36%	82,76%	86,21%	84,75%	89,66%
42	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8,47	8,55	8,56	8,710	8,980
43	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 96,1%	156.326,000	99,40%	98,71%	99,59%	99,85%
44	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat	NA	99,97%	99,28%	99,59%	99,85%

					2020	2021	2022	2023	2024
45	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,003	0,001	0,004	0,010	0,004
46	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,059	0,000	0,148	0,176	0,104
47	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,007	0,000	0,005	0,016	0,013
48	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 70%	100	100	100	100	100
49	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 38 tahun Target daerah menurun	NA	NA	NA	2,052	0,881
50	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 9,9%	10,29	0,00	0,00	12,53	8,96
51	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 85%	58,01	83,43	65,45	100	100

					2020	2021	2022	2023	2024
52	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskominfo	Meningkat	NA	NA	93,40	92,50	94,16
53	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPR	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	120	120	120	120	120
54	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (Dharmasraya 11 kecamatan 52 desa/nagari)	52	52	52	52 (ODF)	52 (ODF)
55	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Meningkat	NA	21	28	52	52
56	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DPUPR	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1	1	1	1	1
57	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUPR	Meningkat	0,35	0,46	0,55	0,54	0,63
58	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUPR	8 WS	1	1	1	1	1

					2020	2021	2022	2023	2024
59	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUPR	10 WS (skala nasional)	1	1	1	1	1
60	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Dinas LH	10-16%	BK	BK	BK	20,83	22,98
61	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Bapperida	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	47,39	47,38	52,60	56,14	59,16
62	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Distrans dan naker	Meningkat	56,39	52,40	55,12	56,00	62,52
63	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Diskumperdag	25%	NA	NA	26,98	40,84	39,53
64	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Distrans dan naker	Meningkat	15.621,39	15.703,37	17.140,48	17.140,48	18.713,71
65	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP	Meningkat	21	21	21	41	41
66	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMPTSP	Menurun (mendekat)	0	0	2	2	2
67	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Diskumperdag	Meningkat	15,799	14,681	15,443	10,720	12,419
68	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo	Meningkat	NA	NA	93,40	92,50	94,16
69	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	Meningkat	48,50	NA	76,01	77,73	82,62
70	10.1.1*	Koefisien Gini.	Bapperida	Menurun menjadi 0,36	0,28	0,27	0,29	0,29	0,23
71	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Bapperida	Menurun menjadi 7-8%	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32

					2020	2021	2022	2023	2024
72	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri. Indikator RPJPD (Persentase Desa Mandiri)	DPMD	Meningkat paling sedikit 2.000 desa Target RPJPD Kab Dharmasraya 2030 : 21,15 persen	4	5	6	9	24
73	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum	ada Target : tidak ada kebijakan diskriminatif	0	0	0	0	0
74	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Disbudparpora	ada	13	56	99	102	106
75	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,034	0,058	0,005	0,146	0,062
76	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Menurun menjadi 30% Target RPJPD Kab. Dharmasraya 136,94-126,94	143,20	138,81	134,16	130,03	130,03
77	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	ada	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
78	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	±7581000000	±5000000000	±1000000000	±2000000000	±1200000000
79	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	KRP, PRB, Renkon
80	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	0	1	1	1

					2020	2021	2022	2023	2024
81	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,03	0,06	0,01	0,15	0,06
82	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesbangpol	Menurun	1	1	1	0	0
83	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesbangpol	Menurun	0	0	0	0	0
84	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Badan Kesbangpol	Meningkat	100	95,22	92,95	100	100
85	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,02	0,06	0,07	0,17	0,07
86	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DinsosP3AP2KB	Menurun	0,03	0,01	0,03	0,52	0,21
87	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BKD	Meningkat	96,86	92,75	95,01	94,83	95,52
88	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKD	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	hasil pemeriksaan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Hasil pemeriksaan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Hasil pemeriksaan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Hasil pemeriksaan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP
89	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Bag. Organisasi	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 50%	63,440	63,980	64,070	64,650	67,240

					2020	2021	2022	2023	2024
		Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
90	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bag PBJ	Meningkat menjadi 80%	-	0	0	92,27	115,51
91	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	NA/60,17	37 OPD/ 46,58	26 OPD/ 50,2	57,280	?
92	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). **Indikator Lokal** Indeks kepatuhan pelayanan publik	Bag. Organisasi	Meningkat menjadi: Kabupaten/Kota: 80%	NA	81,760	88,620	90,420	90,420
93	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	Meningkat menjadi 85%	89,38	90,84	95,68	96,45	97,16
94	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum	ada Target : tidak ada kebijakan diskriminatif	0	0	0	0	0
95	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskominfo	Meningkat	48,50	NA	76,01	77,73	82,62

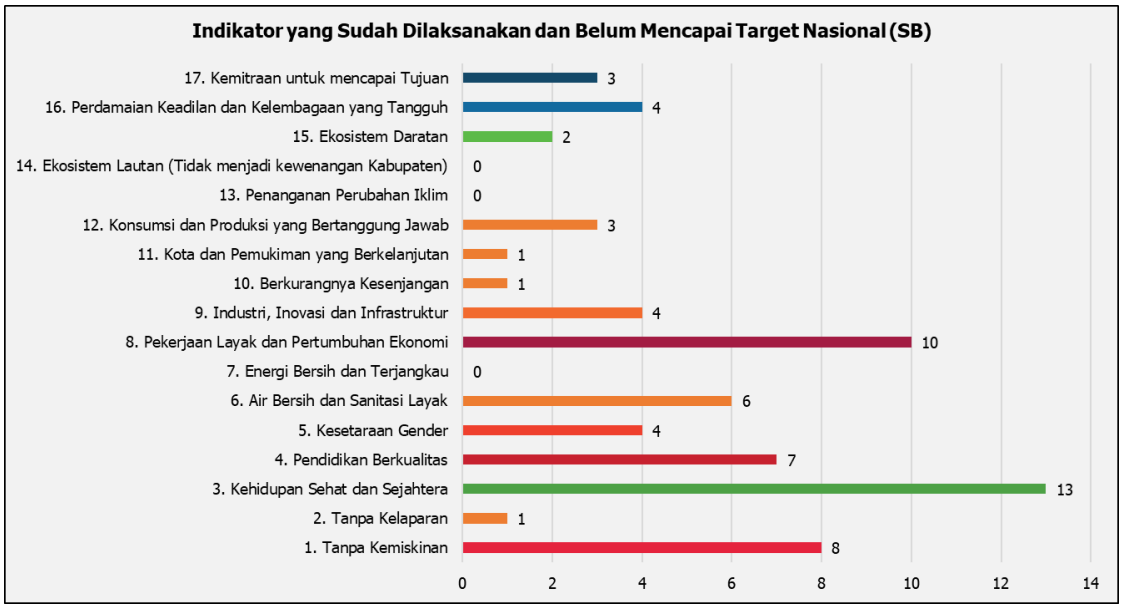
					2020	2021	2022	2023	2024
96	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Meningkat	99%	100%	100%	100%	100%
97	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Meningkat	83%	87%	94%	100%	100%
98	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	ada	Tersedia	Tersedia	Tersedia	ada	ada
99	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Meningkat	10.497	8.883	59.780	28.998	12.058
100	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Meningkat	96,12%	100%	100%	97,06%	100%

Sumber : Analisis capaian SDGs Kabupaten Dharmasraya, 2025

2.6.2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indicator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 67 indikator atau dengan persentase 32,84%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2- 111
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya



Tabel 2- 147
Rekapitulasi Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB) di Kabupaten Dharmasraya

					2020	2021	2022	2023	2024
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Distrans dan naker	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	7,88%	16,61%	20,22%	21,00%	17,95%
2	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 17,12%	20,19%	10,41%	2,03%	0,68%	5,13%
3	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	59,86%	85,49%	88,22%	89,07%	89,64%
4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	87,28%	91,73%	92,20%	92,40%	92,50%
5	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Bag. Perekonomian dan SDA	Meningkat menjadi 100%	16,74%	22,84%	22,32%	NA	23,23%
6	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 151 ribu	17.024	7.754	5.677	3.458	3.458
7	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 81,5 ribu	0	7.754	5.677	3.458	3.458
8	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 450	0	0	2	2	3

					2020	2021	2022	2023	2024
9	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Menurun	12,89	5,21	4,87	5,00	5,76
10	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	14,377	8,800	9,000	14,02/1000KH	15,5/1000KH
11	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Menurun	8,73	8,75	6,58	9,75	9,93
12	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	51,92	17,31	25,00	17,31	21,15
13	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Meningkat	140,54	140,54	83,87	83,87	83,87
14	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 5,4%	NA	NA	13,393	1.453 (3,39%)	3.944 (9,03%)
15	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24,3%	11.239,00	26.485,00	29.124,000	137.212 (88,01%)	137.838 (86,45%)
16	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Disdukcapil	Menurun	0,259	0	0	NA	NA
17	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi angka 0,02%	NA	NA	NA	NA	NA
18	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 66%	71,52	9,79	31,71	12,53	8,96

					2020	2021	2022	2023	2024
19	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DinsosP3AP2KB	Meningkat menjadi 23,5%	23,38	25,40	17,16	19,79	20,39
20	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DinsosP3AP2KB	Menurun menjadi 2,28	9,71	8,14	NA	7,85	6,90
21	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Menurun	0	0	0	0	0
22	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	NA	NA	NA	1.625	2.508
23	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	Meningkat	11.335	11.441	11.595	Jumlah anak anak SD : 1) kelas 4 : 4327. 2) kelas 6: 4472 . 3) kelas 9: 2926	Jumlah anak anak SD : 1) kelas 4 : 4336. 2) kelas 6: 4370 . 3) kelas 9: 2897 Jumlah anak MI: 1) Kelas 4: 157 2) Kelas 6: 148 Kelas 9: .....
24	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 114,09%	107,23	106,49	106,49	106,84	107,77
25	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 106,94%	91,26	96,75	96,75	90,19	97,09
26	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 77,2%	47,64	46,50	47,51	0,49	0,43
27	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Meningkat	SD : 99,04 SMP : 76,76	SD : 99,06 SMP : 76,2	SD : 99,31 SMP : 76,64	SD : 99,94 SMP : 76,47	SD : 98,34 SMP : 80,57

					2020	2021	2022	2023	2024
28	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan	Meningkat	48,214	46,552	46,552	NA	NA
29	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	Meningkat	75,269	50,319	86,304	49,410	0,000
30	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DinsosP3AP2KB	bertambah sebanyak 16 (Target Daerah 'Meningkat"	2,000	7,000	8,000	0,000	0,000
31	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DinsosP3AP2KB	Meningkat	8,33	6,67	6,67	6,67	6,67
32	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM	Meningkat	25,34	26,67	26,62	24,71	22,99
33	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DinsosP3AP2KB	Meningkat	0	0	0	0,05	0,05
34	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	59,86%	85,49%	88,22%	89,07%	89,64%

					2020	2021	2022	2023	2024
		layanan sumber air minum layak.							
35	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	Meningkat	NA	NA	NA	0,002	0,002
36	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUPR	Meningkat menjadi 100%	76,5%	76,6%	74,5%	72,92%	71,26%
37	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DPUPR	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000
38	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUPR	Meningkat	0,96%	0,91%	1,24%	1,21%	1,18%
39	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DPUPR	Meningkat	55,35	52,73	53,18	54,00	51,11
40	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Bapperida	Meningkat	2,133	2,000	2,110	2,067	2,054
41	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Bapperida	Meningkat	2,19	-83,78	13,75	13,75	9,09
42	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Distrans dan naker	Meningkat	90,30	90,30	90,30	97,34	95,85
43	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Distrans dan naker	51%	41,07	38,17	40,15	42,16	48,07
44	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Distrans dan naker	Menurun Target RPJPD	5,08%	5,00%	6,23%	6,23%	6,22%

					2020	2021	2022	2023	2024
				Dharmasraya 2030 = 5%					
45	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Distrans dan naker	Menurun	5,00%	29,29%	25,32%	4,80%	5,30%
46	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Distrans dan naker	Meningkat	0	19,30%	26,10%	30,60%	21,70%
47	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Disbudparpora	Meningkat menjadi 8%	NA	NA	NA	0,044%	0,038%
48	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disbudparpora	Meningkat	15.768	101.394	126.596	188.463	101.453
49	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Disbudparpora	Meningkat	48,34	44,92	47,25	34,50	47,26
50	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Bapperida	Meningkat	5,46%	5,66%	5,52%	5,38%	5,26%
51	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Diskumperdag	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB	-3,35%	7,30%	1,62%	1,76%	1,50%
52	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Diskumperdag	Meningkat	NA	NA	NA	13,51	NA
53	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Diskumperdag	Meningkat	1.170	NA	NA	43,89	33,30
54	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Distrans dan naker	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	7,88	16,61	20,22	21,00	17,95
55	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LH	Meningkat menjadi 80%	6,70	78,71	79,65	79,59%	72,27%
56	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LH	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	8.613,00	22.999,00	20.063,00	95.918,76	99.565,30

					2020	2021	2022	2023	2024
57	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (per hari)	Dinas LH	20 ton per hari (skala nasional) Perlu ditetapkan target lokal	0,0170	0,0000	0,0000	0,0003	0,0005
58	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH	Meningkat	1	1	1	1	1
59	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH	Meningkat	17,46	1,87	1,87	21,12	20,33
60	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas LH	ada	0	0	0	1	1
61	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesbangpol	Menurun	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
62	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DinsosP3AP2KB	Meningkat	8,33	6,67	6,67	6,67	6,67
63	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DinsosP3AP2KB	Meningkat	4,76	3,33	3,33	8,33	8,33
64	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	Meningkat	94,94	96,47	0,00	98,10	96,37
65	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BKD	Meningkat	1,68%	2,06%	1,69%	1,37%	1,27%

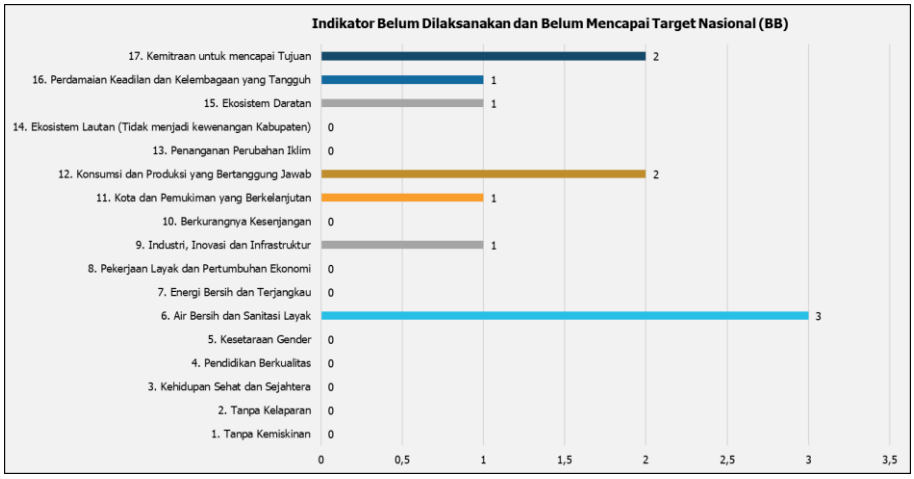
					2020	2021	2022	2023	2024
66	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BKD	Di atas 12%	0,81%	0,77%	0,88%	0,87%	0,76%
67	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BKD	Meningkat	8,41	9,03	11,50	14,11	12,07

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

2.6.3. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 11 indikator atau dengan persentase 5,39%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar 2.112 dan Tabel 2.148.

Gambar 2- 112
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya



Tabel 2- 148
Indikator TPB/SDGs Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB)

					2020	2021	2022	2023	2024
1	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
2	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
3	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DPUPR	ada	0	0	0	0	0
4	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Bapperida	Meningkat	0	0	0	0	0

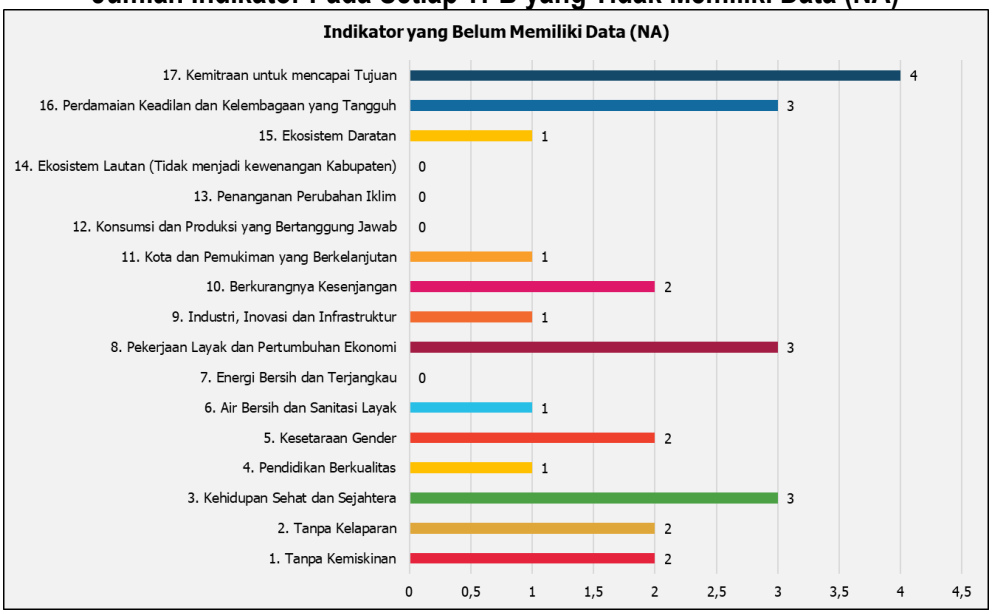
					2020	2021	2022	2023	2024
5	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DPUPR	Ada	0	0	0	0	0
6	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
7	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
8	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas LH	Meningkat	0	0	0	0	0
9	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	Meningkat	0	0	0	0	0
10	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag PBJ	ada	0	0	0	0	0
11	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Adm Pembangunan	ada	0	0	0	0	0

Sumber : Analisis Data OPD, 2025

2.6.4. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 26 indikator atau 12,75%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Gambar 2.113.

Gambar 2- 113
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data (NA)



2.7. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih

pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelolaan keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.7.1. Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah, serta menggunakan rasio-rasio keuangan Daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

Dalam periode analisis tahun 2020-2024 dan Semester Satu Tahun 2025 terjadi beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan, yang juga akan mempengaruhi proyeksi kinerja masa datang. Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020 dan tahun 2021 masih dipengaruhi upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga belanja daerah mengalami banyak penyesuaian terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, khususnya tentang pajak daerah dan transfer ke pemerintahan kabupaten/kota. Implementasi undang - undang tersebut selain menuntut peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih efisien dan efektif, juga memperkuat desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal perpajakan dan retribusi melalui restrukturisasi jenis pajak dan penetapan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan besar bagi daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi risiko ketergantungan pada dana TKD melalui diversifikasi pendapatan dengan berbagai pendanaan alternatif dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

3.7.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang semakin baik. Opini WTP pada tahun 2024 tersebut merupakan Opini WTP yang ke-10 (sepuluh) kalinya yang diterima secara berturut-turut.

Kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Berdasarkan peraturan ini, terdapat penyesuaian rekening belanja yang dimulai pada tahun 2021,. Perkembangan pengelolaan keuangan Kabupaten Dharmas Tahun 2020 s.d. 2024 dan Semester Satu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 149
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020- 2024 dan Semester Satu Tahun 2025 (Rp juta)

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Semester I)	Rata-rata pertumbuhan pertahun
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*
4	PENDAPATAN DAERAH	990.191	978.921	911.077	937.513	970.830	497.488	-0,16
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.878	82.829	108.011	115.996	108.377	57.369	-3,53
4.1.01	Pajak Daerah	17.752	20.496	21.634	23.692	25.084	20.526	4,05
4.1.02	Retribusi Daerah	1.862	2.411	2.760	2.450	65.935	28.702	570,56
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.064	3.525	4.324	4.832	5.348	5.529	7,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.201	56.398	79.293	85.022	12.010	2.612	-26,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	872.426	838.657	786.486	819.526	850.690	427.960	-11,51
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325	787.385	727.854	770.899	792.449	416.648	-11,46
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101	51.272	58.632	48.627	58.241	11.312	-8,62
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887	57.434	16.580	1.991	11.762	12.119	88,73
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.050	26.548	16.580	1.991	71	41	206,84
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.837	30.886	-	-	11.691	12.078	-0,58
5	BELANJA DAERAH	985.750	917.048	939.371	931.495	1.013	413.868	9033,42
5.1	BELANJA OPERASI	659.030	638.707	696.160	680.834	793.194	357.654	-7,71
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043	380.290	380.049	373.990	454.926	255.056	-7,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.948	246.613	304.834	278.076	304.014	99.109	-2,36
5.1.05	Belanja Hibah	54.875	11.804	11.277	28.767	34.254	3.490	0,31
5.1.	Bantuan Sosial	164	-	-	-	-	-	-22,22
5.2	BELANJA MODAL	194.525	166.253	132.791	137.284	102.188	4.098	-33,96
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751	51.541	48.053	39.031	24.237	2.191	-38,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.053	85.986	15.750	45.092	28.954	421	-8,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.664	22.155	66.364	50.168	45.055	28	6,43

Kode Akun	Uraian Akun	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Semester I)	Rata-rata pertumbuhan pertahun
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057	6.570	2.624	2.752	3.810	1.265	97,29
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	243	131	193	0,28
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924	164	369	3.924	2.485	146	190,73
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924	164	369	3.924	2.485	146	190,73
5.4	BELANJA TRANSFER	107.271	111.924	110.050	109.453	115.315	20.571	-16,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933	1.861	2.659	1.218	1.984	-	33,56
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.338	110.063	107.391	108.235	113.331	51.969	-10,57
6	PEMBIAYAAN DAERAH	3.893	8.334	70.207	40.412	46.430	2.585	163,22
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893	8.334	70.207	40.412	46.430	4.085	163,94
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.893	8.334	70.207	40.412	46.430	4.085	163,94
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0	0	1.500	0	1.500	-22,22
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0	0	1.500	0	1.500	-22,22
6.3	SILPA	8.335	70.207	41.912	46.430	4.078	86.165	585,45

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

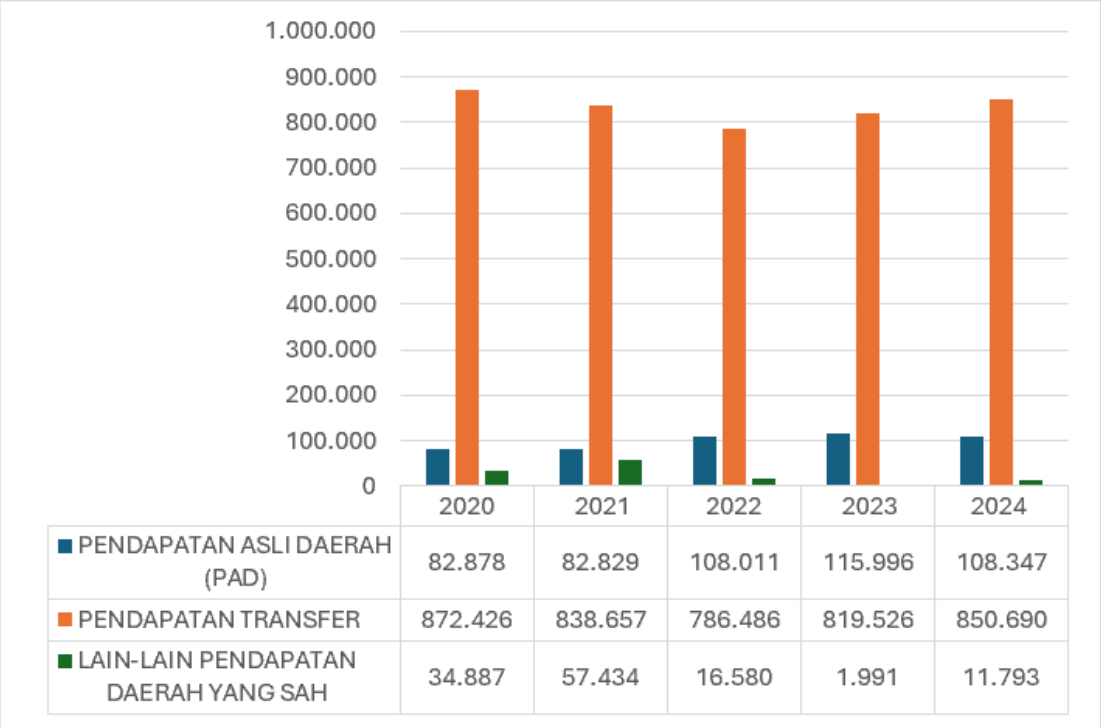
A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
2. Pendapatan Transfer yang meliputi :
   a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Desa dan Insentif Fiskal;
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2- 114
Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.878	82.829	108.011	115.996	108.347
PENDAPATAN TRANSFER	872.426	838.657	786.486	819.526	850.690
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887	57.434	16.580	1.991	11.793

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana transfer, yaitu transfer pusat dan transfer dari pemerintah provinsi. Total ketergantungan terhadap dana trasfer berada pada kisaran 86 sampai dengan 87 persen untuk setiap tahunnya. Sedangkan peran PAD hanya sebesar 11,16 persen, adanya tren meningkatnya PAD terhadap perannya dalam pendanaan pembangunan, namun hal ini belum memperlihatkan kemandirian keuangan daerah yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat saat adanya refokusing anggaran yang dilaukan pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena adanya kasus covid-19, maka cukup berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga disini dapat dilihat pentingnya meningkatkan kemandirian dan ketangguhan perekonomian daerah dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang bisa saja terjadi ke depannya.

Gambar 2- 115
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

PAD	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020 (Rp. Juta)	2021 (Rp. Juta)	2022 (Rp. Juta)	2023 (Rp. Juta)	2024 (Rp. Juta)	
Pendapatan Asli Daerah	82.878	82.829	108.011	115.996	108.370	7,79
Pendapatan Transfer	872.426	838.657	786.486	819.526	850.690	-0,52
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	34.887	57.434	16.580	1.991	11.762	99,06
Total	**990.191**	**978.921**	**911.077**	**937.513**	**970.822**	**-0,40**

Sumber : BKD Kabupaten Dharmasraya, 2025 (diolah)

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.

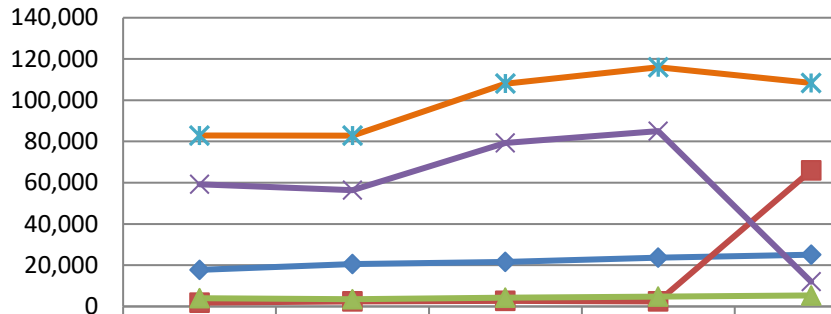
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, termasuk juga pendapatan BLUD adalah merupakan bagian dari Pendapatan Retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyetaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat dan PT Balairung.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan TGR, jasa giro, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah dan pendapatan dari pengembalian.

Gambar 2- 116
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2020-2024 (Rp juta



	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	17,752	20,496	21,634	23,692	25,093
Retribusi Daerah	1,862	2,411	2,760	2,450	65,942
Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,064	3,525	4,324	4,832	5,348
Lain-lain PAD Yang Sah	59,201	56,398	79,293	85,022	11,988
Total	82,878	82,829	108,011	115,996	108,370

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Secara umum setiap tahunnya PAD cenderung memperlihatkan peningkatan, pada tahun 2020 hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 karena reklasifikasi pendapatan kapitasi puskesmas ke Lain-Lain Pendapatan yang sah. Penyumbang nilai PAD terbesar tercatat dari lain-lain PAD yang sah, pendapatan BLUD merupakan penerimaan jasa pelayanan, namun pada tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur, pendapatan jasa layanan BLUD dipindah menjadi retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan retribusi daerah.

B. Pendapatan Transfer

Untuk kabupaten/ kota, pendapatan transfer yang diterima berasal dari dana transfer pusat atau disebut dengan Transfer ke daerah (TKD), dan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah provinsi yang berada di atasnya, ataupun berasal dari transfer pemerintah daerah lain atau disebut dengan pendapatan transfer antar daerah.

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat
   Pengalokasian transfer ke daerah setiap tahunnya menjadi bagian dari peraturan presiden tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari :
   1) DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan, pajak pajak bumi dan bangunan (PBB) serta cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas alam, panas bumi, dan perikanan.

   2) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto dan ditetapkan dalam APBN.

      Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Besaran DAU dapat dilihat dari formula berikut :
      DAU = Alokasi dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

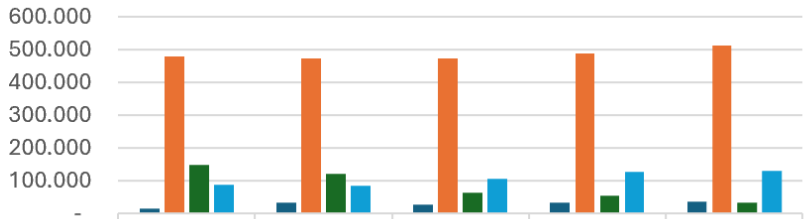
      Besaran alokasi dasar diperoleh dari besaran gaji PNS Daerah, sedangkan celah fiskal dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan dengan alokasi DAU celah fiskal nasional. Untuk celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

      Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Sedangkan kapasitas fiskal ditetapkan setiap tahunnya oleh kementerian

keuangan, di tahun 2024 ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 127 tahun 2024, kapasitas fiskal Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah kategori sangat rendah yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,851. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1,5 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU sejak tahun 2016, bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan data penduduk dari BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan pencatatan sipil.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terdiri dari DAK fisik, dan DAK non fisik. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarannya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Dana Alokasi Khusus Non Fisik konsisten menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam mendukung operasionalisasi layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan Pada Tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan pemerintah pendidikan dan kesehatan.
4) Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan instrumen kebijakan baru dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, yang diperkenalkan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Berbeda dengan Dana Insentif Daerah (DID) sebelumnya yang berbasis output kinerja, DIF lebih menekankan insentif berbasis outcome, terutama dalam pengendalian inflasi, percepatan belanja, dan kinerja pelayanan publik prioritas.

Gambar 2- 117
Perkembangan Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.148	33.663	29.385	35.246	37.078
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.356	472.416	472.528	489.147	512.945
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.942	121.884	64.466	56.562	34.621
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053	85.881	107.191	126.857	131.739

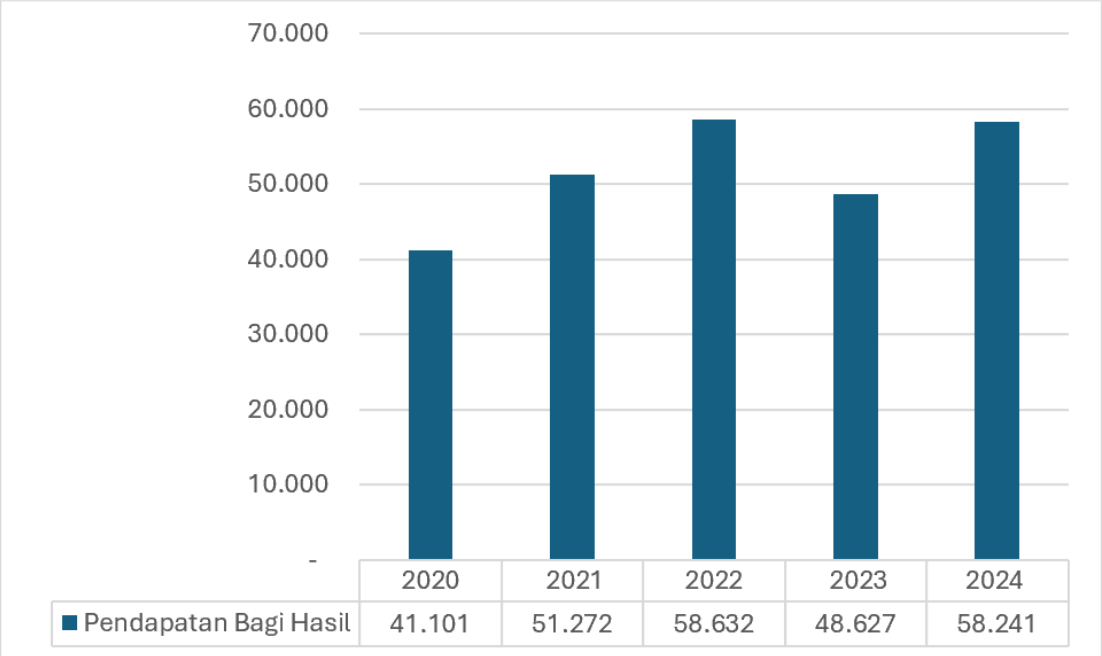
Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Merujuk tabel diatas dapat dijabarkan realiasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada kondisi 5 tahun terakhir (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) hampir setiap tahun mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adanya peningkatan penerimaan pajak serta adanya perubahan regulasi seperti UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdampak pada besaran dan jenis DBH yang diterima daerah. Selain itu adanya penambahan jenis Dana Bagi Hasil baru seperti DBH Sawit. (2) Dana Transfer Umum (DAU), merupakan sumber pendapatan yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Proporsi pagu Dau antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah antara propinsi dan kabupaten/kota. (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilihat dari 5 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya refocusing anggaran serta perubahan kebijakan. Penurunan ini merupakan bagian dari penataan ulang kebijakan atau penyesuaian anggaran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam penggunaan dana publik (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, mengalami kenaikan yang disebabkan adanya program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah.

2. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan transfer antar daerah diperoleh dari pendapatan bagi hasil, serta batuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota, pada APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d. 2024 maka pendapatan transfer ini berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun bagi hasil pajak tersebut.

Gambar 2- 118
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Pendapatan transfer yang diperoleh dari bagi hasil pajak menunjukkan rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar 10 persen. Pendapatan transfer antar daerah ini merupakan bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah yang penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Rekening Kas Daerah. Adanya peningkatan dana bagi hasil ini dalam kurun 5 tahun terakhir memperlihatkan keseriusan daerah dalam mengejar realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Pajak Pendapatan

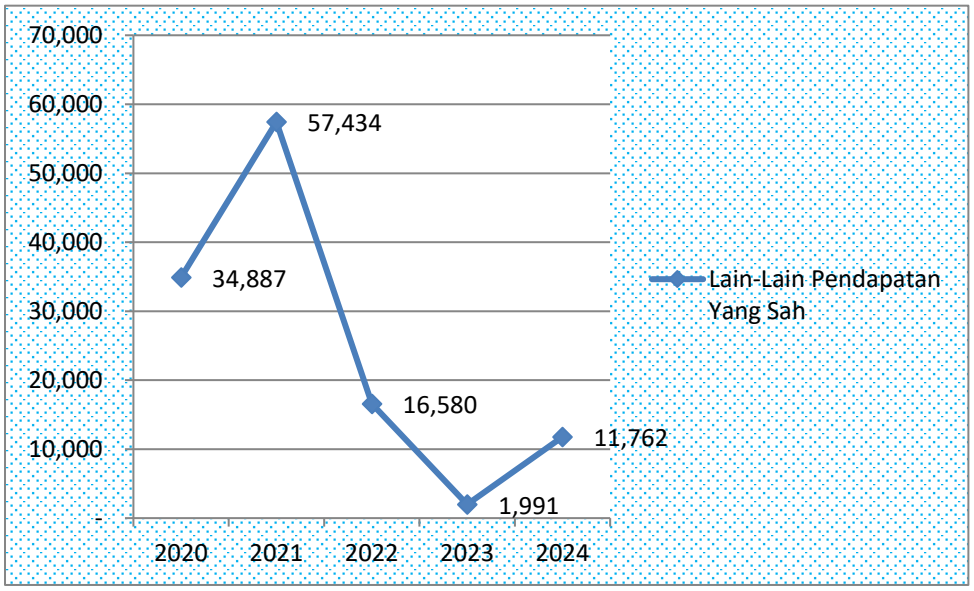
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun terakhir bersumber dari Dana Hibah dengan perkembangannya fluktuatif cenderung menurun. Penerimaan yang signifikan pada tahun 2021 adalah penerimaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penerimaan Dana BOS pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih tercatat di Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, namun pada tahun 2022 sampai 2025 ini tercatat di Pendapatan Transfer Pusat DAK Non Fisik, sehingga terjadi penurunan pada tahun 2022 s.d. 2024.

Gambar 2- 119
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)



Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

B. Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan.

Belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang ditujukan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

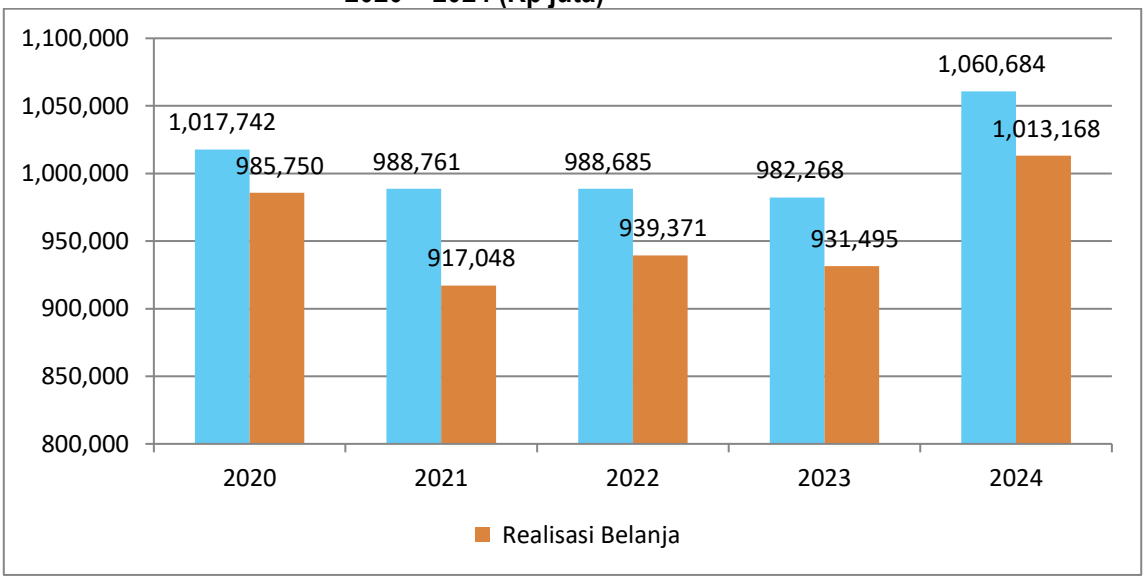
Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja, maka wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daeran dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah, belanja daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun Tahun 2021 s.d. 2024 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 Belanja Daerah sebesar Rp985.750.172.888,95 mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat Covid-19 menjadi Rp917.048.156.325,65,, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp939.371.337.181,35. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan Belanja Daerah menjadi Rp931.495.282.968,76, dan tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp1.013.181.960.607,29.

.

Gambar 2- 120
Perkembangan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2024 (Rp juta)

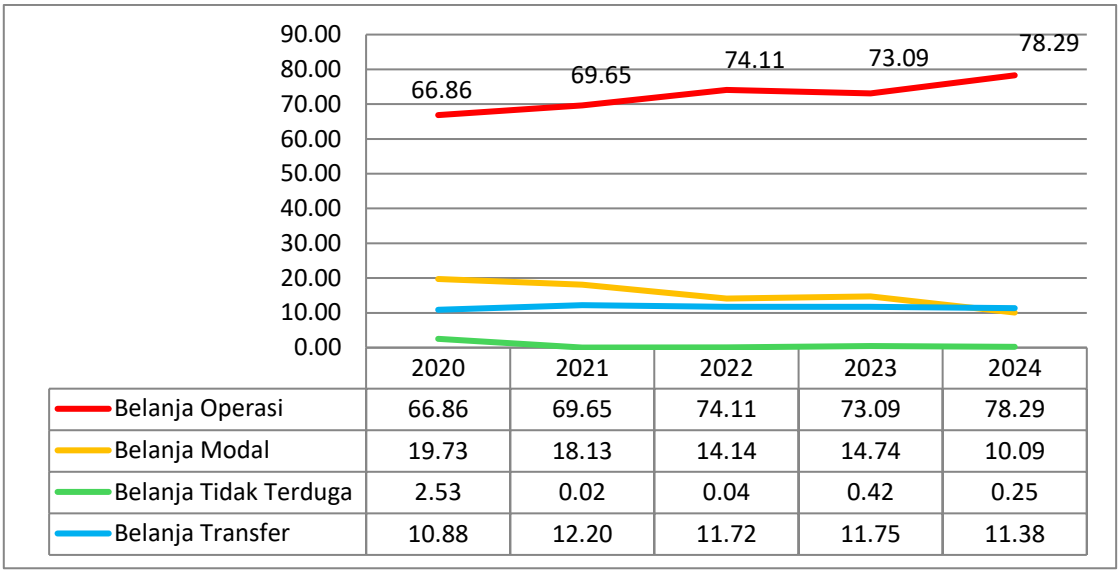


Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Berdasarkan Komposisinya, Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya paling besar digunakan untuk Belanja Operasi, dengan rata-rata proporsi mencapai 72,40% terhadap total Belanja Daerah dalam lima tahun terakhir. Belanja operasi ini cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun ada penurunan sedikit dari tahun 2022 sebesar 74,11% menurun menjadi 73,09% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 78,29% karena adanya penambahan belanja pegawai dari pengangkatan PPPK.

Sedangkan belanja yang mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya adalah belanja Modal. penurunan rata-rata Belanja Modal dari tahun 2020 s.d. 2024 terjadi sebesar 14,37%.

Gambar 2- 121
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)



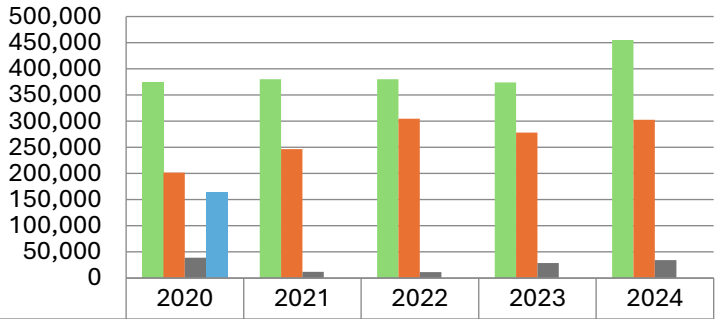
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	66.86	69.65	74.11	73.09	78.29
Belanja Modal	19.73	18.13	14.14	14.74	10.09
Belanja Tidak Terduga	2.53	0.02	0.04	0.42	0.25
Belanja Transfer	10.88	12.20	11.72	11.75	11.38

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berfluktuasi pada tahun 2021 sebesar Rp638.706.924.536,16 meningkat menjadi Rp793.193.580.793,13 pada tahun 2024 kalau dilihat dari pertumbuhan rata rata pertahunnya sebesar 7,77%. Belanja Pegawai merupakan proporsi terbesar dalam Belanja Operasi. Pada tahun 2021 Belanja Pegawai mencapai Rp380.289.821.307,81 dan meningkat menjadi Rp454.911.665.442,94 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66 % dari total belanja operasi tahun 2022 s.d. 2024

Gambar 2- 122
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



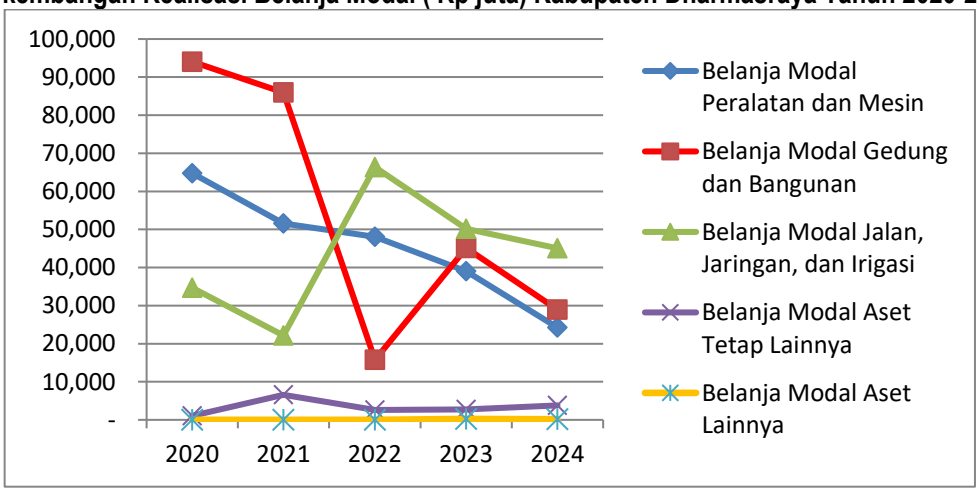
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	374,255	380,289	380,048	373,990	454,925
Belanja Barang dan Jasa	201,505	246,612	304,834	278,076	302,410
Belanja Hibah	38,795	11,804	11,277	28,767	34,253
Belanja Bantuan Sosial	164,000	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

B. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun terakhir berfluktuatif dengan tahun 2020 menjadi belanja modal tertinggi yakni mencapai Rp194.525.452.178,27 Kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi Rp102.187.717.063,16. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah tahun 2024, proporsi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya baru mencapai 10,09%.. Rendahnya belanja modal ini adalah karena terbatasnya sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan kebijakan untuk lebih mengutamakan belanja wajib dan mengikat khususnya, dan belanja operasi umumnya.

. **Gambar 2- 123**
Perkembangan Realisasi Belanja Modal (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

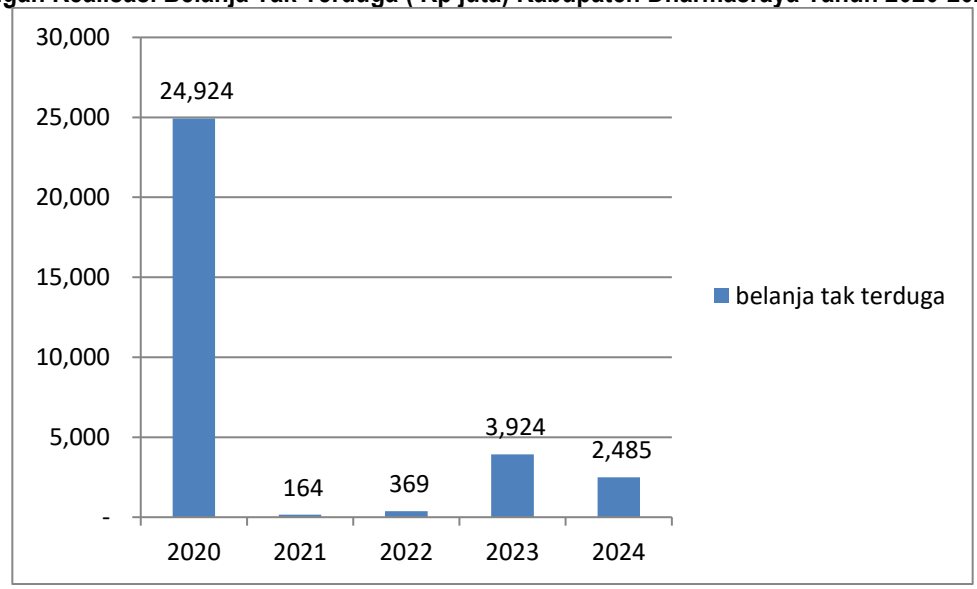
C. Belanja Tidak Terduga

Selama empat tahun terakhir, belanja tidak terduga dalam APBD Kabupaten Dharmasraya telah menjadi instrumen krusial dalam menavigasi berbagai tantangan darurat dan krisis. Alokasi ini menunjukkan pola penggunaan yang dinamis dan responsif terhadap kondisi aktual di lapangan. Pada tahun 2020 realisasi belanja tidak terduga merupakan anggaran yang di *recofusing* untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, berupa penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi masyarakat dan jaring pengaman sosial sebesar Rp24.924.272.319,00. **Memasuki** tahun 2021 dan 2022 terjadi pergeseran alokasi Belanja Tak Terduga seiring dengan meredanya pandemi. Pada tahun 2023, Belanja Tak Terduga naik sedikit menjadi Rp3.924.380.709,00, namun Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.485.520.287,00. Belanja Tak terduga pada tahun 2024 yang digunakan untuk penanganan bencana alam banjir dan kebakaran, serta pengembalian sisa dana hibah rekonstruksi ke pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, pengelolaan belanja tidak terduga di Kabupaten Dharmasraya telah berkembang dari sekadar responsif menjadi lebih antisipatif. Inovasi sistem pemantauan digital dan kolaborasi dengan akademisi menjadi faktor pendorong efektivitas penggunaan dana. Tantangan kedepan terletak pada penyempurnaan mekanisme verifikasi dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan dampak optimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

. .

Gambar 2- 124
Perkembangan Realisasi Belanja Tak Terduga (Rp juta) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



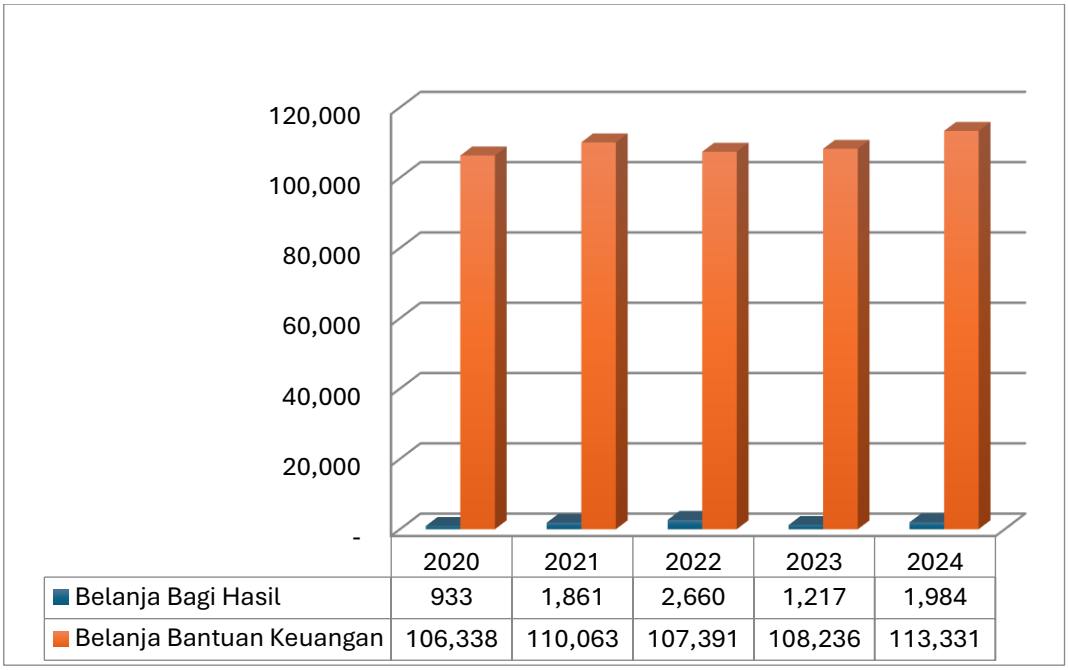
Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh Belanja Bantuan Keuangan. Pada tahun 2024 proporsi Belanja Bantuan Keuangan mencapai 98,28% dari total belanja Transfer. Dalam lima tahun terakhir, belanja Transfer berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

.

Gambar 2- 125
Perkembangan Realisasi Realisasi Belanja Transfer (Rp juta) Tahun 2020-2024



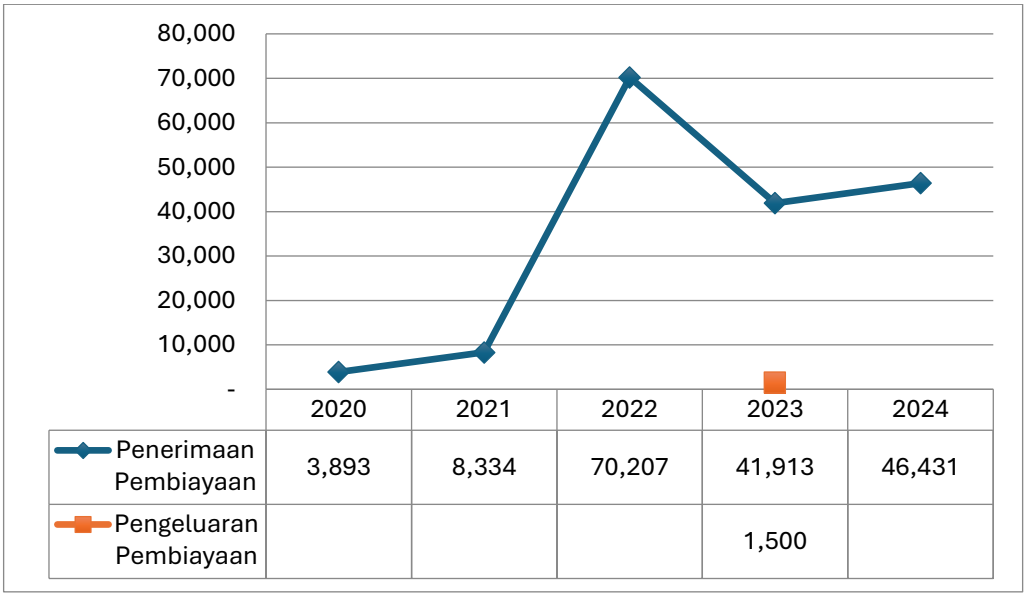
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bagi Hasil	933	1,861	2,660	1,217	1,984
Belanja Bantuan Keuangan	106,338	110,063	107,391	108,236	113,331

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode Tahun 2020-2024 berfluktuasi. Penerimaan pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp3.893.451.613,32, meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp70.206.985.982,71 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp46.430.539.477,05. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terutama digunakan untuk penambahan investasi pada BUMD atau penyertaan modal, dan pada tahun 2023 terdapat Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00.

Gambar 2- 126
Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)



	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	3,893	8,334	70,207	41,913	46,431
Pengeluaran Pembiayaan				1,500	

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pembiayaan yang strategis. Pengelolaan SiLPA ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas kepatuhan, efisiensi, dan nilai manfaat bagi pembangunan daerah. Pada tahun 2022 merupakan penerimaan SiLPA tertinggi pada 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp70.206.985.982,71 yang berasal dari efisiensi belanja. Untuk Tahun 2024, penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp46.430.539.477,05.

Pengalaman lima tahun terakhir membuktikan bahwa pengelolaan SiLPA di Kabupaten Dharmasraya telah berkembang dari sekadar instrumen penyeimbang anggaran menjadi alat strategis untuk mengakselerasi program prioritas, mengantisipasi ketidakpastian fiskal dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ke depan termasuk optimalisasi waktu penyerapan dan penguatan sistem pengawasan preventif untuk memastikan setiap rupiah SiLPA memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Dharmasraya digunakan untuk penambahan investasi pada BUMD atau penyertaan modal. Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar Rp.1,5 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menjadikan penyertaan modal ke PT Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) sebagai salah satu instrumen strategis dalam pengeluaran pembiayaan APBD.

Alokasi ini bertujuan untuk memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan nilai aset daerah. Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan skema khusus dimana keuntungan bank akan dikembalikan sebagai bagi hasil untuk membiayai program sosial daerah.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp46.430.539.477,05 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.060.684.455.529,00 adalah 100,00%.
Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 sebagaimana dalam tabel berikut :

Gambar 2- 127
Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

TA	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)
2020	1.017.742.329.264,32	8.334.425.206,49	0,82
2021	988.760.523.928,00	70.206.985.982,71	7,10
2022	968.160.008.840,00	41.912.532.080,16	4,33
2023	982.267.918.085,00	46.430.539.477,05	4,72
2024	1.060.684.455.529,00	4.085.069.988,55	0,39

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 cenderung menurun, pada tahun 2024 rasio SILPA merupaan yang terendah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya :

1) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2) Harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

Tabel 2- 150
Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi				
		2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025 (Semester I)
4	PENDAPATAN DAERAH	978.920.717.101,87	911.076.883.278,80	937.513.290.365,65	970.829.566.108,79	479.015.338.113,32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.829.461.520,87	108.010.790.645,80	115.996.029.005,65	108.377.358.192,79	47.631.870.350,32
4.1.01	Pajak Daerah	20.495.633.388,25	21.634.156.143,46	23.692.000.465,50	25.084.543.485,78	16.578.701.805,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.411.365.382,00	2.759.700.350,00	2.449.560.848,00	65.934.612.330,00	23.278.428.163,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411,00	4.324.065.836,00	4.832.210.107,00	5.347.929.006,00	5.529.319.459,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.397.892.339,62	79.292.868.316,34	85.022.257.585,15	12.010.273.371,01	2.245.420.923,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	838.657.002.069,00	786.486.021.026,00	819.526.123.990,00	850.689.858.617,00	420.308.182.848,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	787.384.510.329,00	727.854.055.483,00	770.898.639.315,00	792.448.801.416,00	409.187.324.959,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.272.491.740,00	58.631.965.543,00	48.627.484.675,00	58.241.057.201,00	11.120.857.889,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.434.253.512,00	16.580.071.607,00	1.991.137.370,00	11.762.349.299,00	11.075.284.915,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.548.313.512,00	16.580.071.607,00	1.991.137.370,00	71.350.441,00	36.508.460,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.885.940.000,00	-	-	11.690.998.858,00	11.038.776.455,00
5	BELANJA DAERAH	917.048.156.325,65	939.371.337.181,35	931.495.282.968,76	1.013.181.960.607,29	319.530.373.571,00
5.1	BELANJA OPERASI	638.706.924.536,16	696.160.075.415,49	680.833.715.658,76	793.193.580.793,13	298.145.808.315,00
5.1.01	Belanja Pegawai	380.289.821.307,81	380.048.882.570,44	373.990.257.238,36	454.925.701.972,94	238.451.872.451,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.612.992.141,35	304.834.151.224,05	278.076.015.874,40	304.013.952.063,19	59.512.955.864,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.804.111.087,00	11.277.041.621,00	28.767.442.546,00	34.253.926.757,00	180.980.000,00
5.2	BELANJA MODAL	166.252.751.216,49	132.791.374.992,86	137.284.235.323,00	102.187.717.063,16	667.408.715,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.541.549.729,92	48.052.940.621,00	39.031.009.865,00	24.237.257.450,00	432.448.161,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.986.356.136,57	15.750.482.106,12	45.091.507.154,00	28.954.072.575,16	14.001.454,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.155.213.262,00	66.363.505.690,74	50.167.680.309,00	45.054.989.838,00	27.930.100,00

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi				
		2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025 (Semester I)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.569.632.088,00	2.624.446.575,00	2.751.538.825,00	3.810.397.200,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	242.499.170,00	131.000.000,00	193.029.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	164.439.330,00	369.162.297,00	3.924.380.709,00	2.485.520.287,00	146.489.050,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	164.439.330,00	369.162.297,00	3.924.380.709,00	2.485.520.287,00	146.489.050,00
5.4	BELANJA TRANSFER	111.924.041.243,00	110.050.724.476,00	109.452.951.278,00	115.315.142.464,00	20.570.667.491,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.861.178.243,00	2.659.549.476,00	1.217.315.278,00	1.984.369.824,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	110.062.863.000,00	107.391.175.000,00	108.235.636.000,00	113.330.772.640,00	20.570.667.491,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	8.334.425.206,49	70.206.985.982,71	40.412.532.080,16	46.430.539.477,05	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.334.425.206,49	70.206.985.982,71	41.912.532.080,16	46.430.539.477,05	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206,49	70.206.985.982,71	41.912.532.080,16	46.430.539.477,05	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	1.500.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	1.500.000.000,00	-	-
6.3	SILPA	70.206.985.982,71	41.912.532.080,16	46.430.539.477,05	4.078.144.978,55	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

2.2.1.2. Pendapatan Daerah Perkapita

Pada tahun 2020, pendapatan daerah per kapita Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar Rp 4,331,715. Angka ini menunjukkan besaran pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam masyarakat, berdasarkan total pendapatan daerah dan jumlah penduduk. Tahun 2021 mencatat sedikit penurunan menjadi Rp 4,233,775 per kapita, meskipun tetap berada pada angka yang hampir setara dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat penurunan yang lebih signifikan, dengan Rp 3,881,663 per kapita. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak situasi ekonomi, seperti penurunan pendapatan dari sektor-sektor tertentu, baik itu akibat pandemi COVID-19 atau fluktuasi sektor ekonomi lainnya. Tahun 2023 memperlihatkan pemulihan, dengan angka Rp 3,907,641 per kapita. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perekonomian daerah, yang kemungkinan besar berhubungan dengan pertumbuhan sektor-sektor yang lebih stabil atau adanya kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi. Sedangkan pada tahun 2024, Rp 3,978,291 per kapita menunjukkan peningkatan lebih lanjut, meskipun masih berada di bawah angka 2020, menandakan bahwa perekonomian daerah mulai pulih secara bertahap. Untuk lebih jelasnya pendapatan daerah perkapita tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2- 151
Pendapatan Daerah Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indkator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah Per Kapita	Rupiah per Kapita	4,331,715	4,233,775	3,881,663	3,907,641	3,978,291
Pendapatan Daerah	Rupiah	990,191,146,482	978,920,717,102	911,076,883,279	937,513,290,366	970,822,454,589
Jumlah penduduk	Jiwa	228,591	231,217	234,713	239,918	244,030

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa abel ini menggambarkan pendapatan daerah per kapita yang fluktuatif selama periode 2020-2024, dengan penurunan pada tahun 2022 dan pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Penurunan yang terjadi pada 2022 dapat dikaitkan dengan dampak dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi daerah. Sementara itu, jumlah penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Dharmasraya harus diimbangi dengan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Pemulihan pendapatan daerah yang tercatat pada tahun 2023 dan proyeksi positif untuk 2024 menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Dharmasraya sedang dalam jalur pemulihan yang baik.

2.2.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator ini mengukur sejauh mana kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan operasional tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja daerah. Tabel berikut menunjukkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk periode tahun 2020 hingga 2024

Tabel 2- 152
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	8.41	9.03	11.50	12.45	10.70
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp Juta	82,877.84	82,829.46	108,010.79	115,996.03	108,370.25
Belanja Daerah	Rp Juta	985,747.17	917,048.16	939,371.34	931,495.28	1,013,167.92

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2025

Pada tahun 2020, Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 8.41%. Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 8.41% dari total belanja daerah dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, pada tahun tersebut, lebih dari 91% dari belanja daerah masih bergantung pada sumber pendanaan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman daerah. Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan pada Kemandirian Keuangan Daerah, yang mencapai 9.03%. Peningkatan ini menunjukkan adanya usaha yang lebih baik dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh peningkatan sektor-sektor pendapatan daerah, seperti pajak daerah atau retribusi yang lebih tinggi.

Tahun 2022 mencatatkan angka Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 11.50%, yang merupakan kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta lebih sedikitnya ketergantungan pada dana transfer pusat untuk pembiayaan belanja daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan kinerja sektor pajak dan retribusi, serta pemanfaatan sumber daya daerah secara lebih optimal. Pada tahun 2023, Kemandirian Keuangan Daerah kembali meningkat menjadi 12.45%. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi yang terus berkembang, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Peningkatan rasio ini juga menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, Kemandirian Keuangan Daerah diperkirakan sedikit menurun menjadi 10.70%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penurunan dalam PAD pada beberapa sektor, atau peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan PAD. Meskipun ada penurunan, rasio ini tetap menunjukkan upaya yang signifikan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kemandirian keuangan daerah, meskipun dengan tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, di mana PAD semakin berperan dalam membiayai belanja daerah. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi. Namun, penurunan proyeksi pada tahun 2024 menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih hati-hati dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat lebih mandiri dalam pendanaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel berikut menunjukkan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang mencakup dua indikator utama: kategori kapasitas fiskal daerah dan rasio kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal mengukur sejauh mana suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD), dengan menggunakan rasio untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan luar.

Tabel 2- 153
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kategoru Kapasitas fiskal daerah	bobot	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah
Rasio Kapasitas fiskal daerah	indeks	0.54	0.40	1.26	0.97	0.85

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2025

Pada tahun 2020, kategori kapasitas fiskal Kabupaten Dharmasraya adalah Rendah, dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 0.54. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sumber pendanaan dari luar daerah, seperti transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa daerah belum sepenuhnya mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD.

Pada tahun 2021, kategori kapasitas fiskal menurun menjadi Sangat Rendah, dengan rasio 0.40. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat semakin meningkat, dan ada kemungkinan bahwa kondisi ekonomi di tahun 2021 belum memberikan ruang yang cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu mencari strategi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penerimaan PAD guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Pada tahun 2022, ada peningkatan yang signifikan dalam rasio kapasitas fiskal daerah yang mencapai 1.26. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan menggunakan pendapatan asli daerah mengalami perbaikan. Kategori kapasitas fiskal pun naik menjadi Rendah, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kemandirian fiskal. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh peningkatan sektor pajak atau penerimaan lainnya yang lebih baik pada tahun tersebut.

Pada tahun 2023, rasio kapasitas fiskal mengalami penurunan menjadi 0.97, dengan kategori kapasitas fiskal tetap berada pada level Rendah. Penurunan ini mencerminkan penurunan pada pendapatan asli daerah atau peningkatan belanja daerah yang melebihi peningkatan pendapatan. Meskipun terjadi penurunan, rasio ini masih menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Pada tahun 2024, rasio kapasitas fiskal diperkirakan akan sedikit menurun menjadi 0.85, dengan kategori kapasitas fiskal kembali menjadi Sangat Rendah. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, pendapatan asli daerah belum cukup untuk mendanai kegiatan daerah secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.

Secara keseluruhan, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Pada awalnya, Kabupaten Dharmasraya memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dengan ketergantungan besar pada dana transfer dari pusat. Namun, pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam rasio kapasitas fiskal, yang mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mengoptimalkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.

Meskipun ada penurunan kembali pada tahun 2023 dan proyeksi penurunan pada tahun 2024, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal, antara lain dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak, meningkatkan efisiensi

belanja daerah, dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Hal ini akan memungkinkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal.

2.2.1.5. Tax Buoyancy/Elastisitas Pajak

Tax Buoyancy atau Elastisitas Pajak mengukur hubungan antara pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Nilai Tax Buoyancy yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pendapatan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, yang menandakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Sebaliknya, nilai Tax Buoyancy yang lebih rendah dapat menunjukkan ketidakmampuan sistem pajak untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya Tax Buoyancy Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2- 154
***Tax Buoyancy*/Elastisitas Pajak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tax Buoyancy	Persentase	5.34	4.52	1.30	2.20	1.53
Pertumbunan pajak	Persentase	(7.44)	15.46	5.55	9.51	5.91
Pertumbuhan PDRB (ADHK)	Persentase	(1.39)	3.42	4.28	4.32	3.86

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2025

Pada tahun 2020, Tax Buoyancy tercatat sebesar 5.34%, yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak tumbuh cukup tinggi meskipun di tengah situasi yang tidak menentu, seperti dampak pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 relatif responsif terhadap kondisi ekonomi yang melambat. Pada tahun 2021, Tax Buoyancy menurun menjadi 4.52%. Penurunan ini mungkin terkait dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, meskipun ada penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan yang berusaha merespons pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun terjadi penurunan, nilai ini tetap menunjukkan elastisitas pajak yang cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022, nilai Tax Buoyancy menurun lebih jauh menjadi 1.30%. Penurunan yang signifikan ini mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor pajak dalam beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan beban ekonomi di tingkat masyarakat. Di sisi lain, ini juga mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum mampu mengimbangi atau beradaptasi sebaik mungkin dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil.

Di tahun 2023, nilai Tax Buoyancy mengalami kenaikan menjadi 2.20%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan lebih baik dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan ini juga mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan, di mana sektor pajak mulai beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang lebih dinamis. Sedangkan pada tahun 2024, Tax Buoyancy diproyeksikan mencapai 1.53%. Meskipun ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, nilai ini masih mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan pajak meskipun tingkat elastisitasnya lebih rendah. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pajak di Kabupaten Dharmasraya tetap memiliki daya tanggap terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan sedikit penurunan dalam efektivitas pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, Tax Buoyancy Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah, dengan adanya penurunan yang cukup tajam pada tahun 2022 yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global dan nasional. Namun, ada tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023 dengan angka Tax Buoyancy yang mulai membaik, meskipun masih perlu upaya peningkatan sistem perpajakan untuk mencapai efisiensi yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Tax Buoyancy antara lain dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

2.2.1.6. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan mendanai belanja daerah merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana kapasitas keuangan daerah mampu membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri, terutama dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat. Berdasarkan data pada periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan bertahap dalam kemampuan keuangannya, sebagaimana terlihat pada bobot kemampuan keuangan daerah dan nominal kapasitas pembiayaannya.

Tabel 2- 155
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2.023	2024
Bobot Kemampuan Keuangan Daeah	bobot	rendah	rendah	rendah	rendah	sedang
Kemampuan Keuangan Daeah	Rupiah			243.646.521.356		308.703.940.087

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2025

Selama empat tahun berturut-turut, kemampuan keuangan daerah berada pada kategori “rendah”, mencerminkan keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai belanja secara mandiri. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten Dharmasraya terhadap dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Selain itu, rendahnya kemampuan keuangan juga disebabkan oleh kontribusi PAD yang masih belum optimal.

Pada 2022, kemampuan keuangan daerah tercatat sebesar Rp243,65 miliar, dan meningkat menjadi Rp308,70 miliar pada tahun 2024. Meskipun pada 2023 tidak dicantumkan nilai nominal, kategori bobotnya tetap berada pada level “rendah”. Namun, peningkatan signifikan pada 2024 menandai perbaikan fiskal daerah. Terjadi peningkatan kategori bobot dari “rendah” menjadi “sedang”, mencerminkan peningkatan kinerja fiskal daerah. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan penerimaan daerah, efisiensi belanja, dan pengelolaan fiskal secara lebih mandiri. Peningkatan ini juga mengindikasikan ruang fiskal yang mulai membaik untuk mendukung belanja pembangunan dan layanan publik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya mengalami tren positif dalam meningkatkan kemampuan fiskal untuk membiayai belanja daerah. Meski selama beberapa tahun masih berada pada kategori “rendah”, lonjakan bobot ke level “sedang” pada tahun 2024 menjadi sinyal baik terhadap kemandirian fiskal daerah. Upaya optimalisasi PAD, pengendalian belanja, dan strategi pembangunan ekonomi lokal perlu terus dilanjutkan agar tren peningkatan ini dapat berkelanjutan di periode RPJMD 2025–2030.

2.2.1.7. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal mengukur proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja modal digunakan untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur serta aset yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Rasio Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 2- 156
Rasio Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
rasio belanja modal	Persentase	19.73	18.13	14.14	14.74	10.09
Belanja Modal	Rp Juta	194,525.45	166,252.75	132,791.37	137,284.24	102,187.72
Belanja Daerah	Rp Juta	985,747.17	917,048.16	939,371.34	931,495.28	1,013,167.92

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2025

Pada tahun 2020, rasio belanja modal Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 19.73%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 20% dari total belanja daerah dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal. Rasio ini menunjukkan komitmen yang cukup besar dari pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing daerah.

Pada tahun 2021, rasio belanja modal menurun menjadi 18.13%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya penyesuaian anggaran untuk fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau peningkatan alokasi untuk belanja rutin yang mendukung operasional pemerintahan dan sektor lainnya. Meskipun ada penurunan, angka ini tetap menunjukkan fokus yang relatif besar terhadap belanja modal.

Pada tahun 2022, rasio belanja modal kembali menurun menjadi 14.14%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mungkin lebih menekankan pada belanja operasional dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung pemulihan pasca-pandemi. Walaupun demikian, alokasi belanja modal yang lebih kecil tidak berarti penurunan dalam kualitas pembangunan infrastruktur, namun lebih kepada prioritas terhadap sektor lain dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Pada tahun 2023, rasio belanja modal sedikit membaik dengan 14.74%. Peningkatan kecil ini mengindikasikan bahwa ada penyesuaian anggaran yang memungkinkan alokasi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, rasio belanja modal diproyeksikan akan menurun lebih lanjut menjadi 10.09%. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan belanja daerah, porsi untuk belanja modal relatif lebih kecil. Hal ini bisa mencerminkan perubahan prioritas anggaran atau meningkatnya kebutuhan belanja rutin untuk kegiatan pemerintahan, yang secara langsung mendukung pelayanan publik.

Secara keseluruhan, rasio belanja modal Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun penurunan ini menunjukkan penyesuaian anggaran, yang sering kali disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi atau prioritas sektor lain, namun pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan rasio belanja modal yang menurun, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan bahwa belanja modal tetap fokus pada proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

2.2.1.8. Rasio Belanja Pegawai

Rasio Belanja Pegawai yaitu mengukur proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Rasio ini sangat penting untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pegawai dibandingkan dengan total belanja daerah, yang pada gilirannya mencerminkan kebijakan fiskal dan efisiensi pengelolaan sumber daya di daerah. Untuk lebih jelasnya rasio belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 157
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
rasio belanja pegawai	Persentase	42.41	41.47	40.46	40.15	44.90
Belanja pegawai	Rp Juta	418,043.15	380,289.82	380,048.88	373,990.26	454,911.67
Belanja Daerah	Rp Juta	985,747.17	917,048.16	939,371.34	931,495.28	1,013,167.92

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2025

Pada tahun 2020, rasio belanja pegawai Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar 42.41%**.** Angka ini menunjukkan bahwa hampir 42.5% dari total belanja daerah digunakan untuk membayar pegawai. Meskipun ini dapat menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah, angka ini juga menandakan adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor produktif lainnya.

Pada tahun 2021, rasio belanja pegawai sedikit menurun menjadi 41.47%**.** Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya usaha pemerintah daerah untuk menyeimbangkan belanja pegawai dengan sektor-sektor lain yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun masih tetap tinggi.

Pada tahun 2022, rasio belanja pegawai lebih lanjut menurun menjadi 40.46%**.** Hal ini menunjukkan langkah positif dari pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi pembelanjaan pegawai dan kemungkinan alokasi yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur**,** pendidikan, dan kesehatan. Penurunan rasio ini juga bisa jadi merupakan upaya untuk mengurangi beban anggaran yang tidak langsung berkontribusi pada pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, rasio belanja pegawai kembali menurun menjadi 40.15%**.** Meskipun ada penurunan, angka ini masih cukup tinggi dan perlu diperhatikan agar tidak mengurangi porsi anggaran untuk pembangunan daerah yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

Proyeksi rasio belanja pegawai untuk tahun 2024 diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 44.90%**.** Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti penambahan jumlah pegawai atau kenaikan gaji pegawai yang berdampak pada total belanja pegawai yang lebih besar. Peningkatan rasio ini harus diimbangi dengan perencanaan yang baik agar tidak mengurangi efektivitas belanja untuk sektor-sektor lain yang sangat penting.

Secara keseluruhan, rasio belanja pegawai Kabupaten Dharmasraya menunjukkan fluktuasi yang dapat mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam mengelola alokasi anggaran dengan bijak. Meskipun pada tahun 2020 rasio belanja pegawai cukup tinggi, upaya penurunan secara bertahap hingga 2023 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk efisiensi belanja, sambil tetap memastikan kesejahteraan pegawai. Namun, dengan proyeksi kenaikan pada tahun 2024, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran yang hati-hati agar tidak mengganggu pembiayaan untuk sektor-sektor lain yang lebih produktif, seperti infrastruktur dan program sosial yang dapat langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

2.2.1.9. Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang mengambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas yang dimilikioleh suatu organisasi, termasuk organisasi Pemerintah Daerah, secara umum transaksi yang mempengaruhi neracadaerah adalah transaksi yang berasal dari transaksi dari belanja modal dan pembiayaan, jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang mengambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas. Perkembangan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,53% per tahun, dari Rp2.382.449,85 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2.433.321,64 juta pada tahun 2024. Jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan dari Rp69.754,43 juta pada tahun 2020 menjadi Rp91.085,21 juta pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sebesar 6,90% per tahun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

Sejalan dengan kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka jumlah investasi jangka panjang pun meningkat. Pada tahun 2020, jumlah investasi

jangka panjang berjumlah Rp27.452,00 juta dan meningkat menjadi Rp28.952,00 juta pada tahun 2024, atau meningkat rata-rata sebesar 1,34% per tahun. Aset Tetap juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kebijakan belanja modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2020, aset tetap berjumlah Rp2.210.869,13 juta dan meningkat menjadi Rp2.275.355,89 juta pada tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,72% per tahun. Aset Lainnya mengalami penurunan dari Rp74.374,29 juta pada tahun 2020 menjadi Rp37.928,53 juta pada tahun 2024 atau rata-rata minus 15,49% per tahun. Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020-2024 mengalami penurunan dari Rp35.955,98 juta pada tahun 2020 menjadi Rp30.029,81 juta pada tahun 2024 atau rata-rata minus 4,40% per tahun. Secara keseluruhan jumlah kewajiban (Utang) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Aset maupun jumlah Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2- 158
Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (Rp juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per tahun (%)
ASET						
A . Aset Lancar						
Kas di Kas Daerah	6.154,89	66.539,15	34.291,75	38.613,69	1.714,29	-27,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	3,14	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,99	-	-	-	6,93	62,59
Kas BLUD di Bank	1.525,23	3.456,32	7.567,81	4.551,41	1.271,42	-4,45
Kas BLUD di Bendahara Penerimaan	0,48	0,19	0,86	7,40	-	-100,00
Kas BLUD di Bendahara Pengeluaran	1,00	43,79	-	-	1,12	2,77
Kas di BOS	645,58	154,48	52,11	21,74	36,38	-51,28
Kas Lainnya	-	312,18	123,26	3.240,62	1.054,93	
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak	34.309,13	36.232,22	38.486,80	40.215,98	25.343,80	-7,29
Penyisihan Piutang Pajak	(24.365,36)	(26.498,47)	(28.707,66)	(30.635,26)	(15.864,20)	-10,17
Piutang Retribusi	242,69	767,33	946,83	1.143,45	6.774,18	129,85
Penyisihan Piutang Retribusi	(100,95)	(486,86)	(647,24)	(888,11)	(1.305,86)	89,65
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	3.524,57	10,28	12,03	13,59	14,97	-74,47
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	(17,62)	(0,05)	(0,06)	(0,07)	(0,07)	-74,47
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.821,96	18.281,80	11.378,15	10.974,35	6.011,95	0,81
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(923,33)	(2.215,65)	(3.046,53)	(2.964,85)	(2.961,04)	33,82
Piutang Transfer pemerintah pusat	6.505,39	-	-	3,08	-	-100,00
Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya	8.967,72	9.630,36	9.186,49	17.958,97	21.749,01	24,79
Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	0,46	
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	(0,00)	
Belanja Dibayar Dimuka	231,01	1.558,22	276,67	214,62	274,61	4,42

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per tahun (%)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
Penyisihan Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
Piutang Lainnya	13,05	13,05	-	-	-	-100,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(1,31)	(13,05)	-	-	-	-100,00
Persediaan	27.219,31	38.086,90	46.047,26	34.728,83	46.962,34	14,61
Jumlah Aset Lancar	69.754,43	145.872,21	115.968,53	117.202,58	91.085,21	6,90
B. Investasi Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investasi Non Permanen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investasi Permanen	**27.452,00**	**27.452,00**	**27.452,00**	**28.952,00**	**28.952,00**	**1,34**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	27.452,00	27.452,00	27.452,00	28.952,00	28.952,00	1,34
Investasi Jangka Panjang	**27.452,00**	**27.452,00**	**27.452,00**	**28.952,00**	**28.952,00**	**1,34**
C. A set Tetap	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Tanah	649.170,78	667.421,01	642.128,84	643.277,19	642.497,52	-0,26
Peralatan dan Mesin	310.784,96	365.830,50	409.319,89	438.393,70	457.431,42	10,15
Gedung dan Bangunan	665.269,93	828.611,66	881.692,58	1.076.301,01	1.129.296,59	14,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	.268.023,95	1.347.104,39	1.417.084,54	1.474.867,53	1.520.820,09	4,65
Aset Tetap Lainnya	105.717,57	108.279,89	110.099,52	44.898,47	48.963,92	-17,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.119,89	11.750,54	12.734,43	14.752,74	5.391,71	-53,28
Akumulasi Penyusutan	(901.217,95)	(1.055.277,21)	(1.190.948,11)	(1.362.023,21)	(1.529.045,37)	14,13
Jumlah Aset Tetap	**2.210.869,13**	**2.273.720,78**	**2.282.111,69**	**2.330.467,44**	**2.275.355,89**	**0,72**
D. Aset Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Tuntutan Ganti Rugi	293,26	293,26	287,91	287,91	287,91	-0,46
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Aset Tak Berwujud	3.834,41	4.013,27	4.345,01	4.444,31	4.557,48	4,41

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata per tahun (%)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.569,82)	(1.906,48)	(2.233,32)	(2.566,80)	(2.873,51)	16,32
Aset Lain-lain	213.829,47	205.255,94	201.056,18	206.655,46	213.870,86	0,00
Penyusutan Aset Lain-lain	(142.013,03)	(148.585,50)	(157.064,21)	(168.544,34)	(179.071,16)	5,97
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	2.689,40	-	-	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	7.386,33	1.156,96	
Jumlah Aset Lainnya	**74.374,29**	**59.070,49**	**49.080,97**	**47.662,85**	**37.928,53**	**-15,49**
JUMLAH ASET	**2.382.449,85**	**2.506.115,49**	**2.474.613,19**	**2.524.284,87**	**2.433.321,64**	**0,53**
KEWAJIBAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
A. Kewaiiban Jangka Pendek	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4,90	765,40	257,85	654,56	140,79	131.52
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	2.661,67	102,62	83,14	64,23	3.032,86	3.32
Utang Belanja	33.289,42	12.286,45	11.321,74	12.902,30	21.964,96	-9.87
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	4.891,20	4.891,20	4.891,20	4.891,20	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**35.955,98**	**18.045,68**	**16.553,93**	**18.512,29**	**30.029,81**	**-4.40**
B. Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**35.955,98**	**18.045,68**	**16.553,93**	**18.512,29**	**30.029,81**	**-4.40**
EKUITAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Ekuitas	2.346.493,87	2.488.069,81	2.458.059,25	2.505.772,59	2.403.291,83	0,60
JUMLAH EKUITAS	**2.346.493,87**	**2.488.069,81**	**2.458.059,25**	**2.505.772,59**	**2.403.291,83**	**0,60**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.382.449,85**	**2.506.115,49**	**2.474.613,19**	**2.524.284,87**	**2.433.321,64**	**0,53**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2025

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan kewajiban untuk memberikan pelayaan kepada masyarakat), untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif (Ritonga, 2014 p.107). Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim, 2007 : 230)

Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat dari tingkat kualitas Neraca berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok Akun Neraca yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Lancar *(current ratio),* Rasio Cepat *(quick ratio),* Rasio Kas *(cash ratio),* Rasio Total Utang terhadap Aset, dan Rasio Utang terhadap Ekuitas/Modal.

Rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar tahun 2020 sebesar 194%, yang berarti kemampuan membayar kewajiban jangka pendek hampir 1,94 kali lipat, meningkat pada tahun 2021 sebesar 808,35%, tahun 2022 sebesar 700,55%, tahun 2023 sebesar 633,11% dan tahun 2024 sebesar 303,32% dengan pertumbuhan rata-rata pertahun positif sebesar 60,41%.

Rasio cepat tahun 2020 sebesar 118,30%, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid lebih dari 1,18 kali lipat. Rasio cepat meningkat pada tahun 2021 sebesar 597,29%, tahun 2022 sebesar 422,38%, tahun 2023 sebesar 445,51% dan tahun 2024 sebesar 146,93%. Terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun positif sebesar 78,52%.

Rasio kas menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2020 rasio kas sebesar 21,36 % atau 0,21 kali lipat, kurang dari angka 1 terhadap utang lancarnya. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar 387,88%, 252,87% dan 233,17%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka sebesar 9,94% pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena kecilnya nilai kas di kas daerah per 31 Desember 2024. Penurunan rasio ini masih dalam batas wajar, karena masih menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun positif sebesar 394,40%.

Rasio solvabilitas memperlihatkan kemampuan suatu organisasi melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas/modal. Rasio total utang terhadap total aset memperlihatkan seberapa besar aset yang dimiliki dibiayai (didanai) dari utang, semakin besar nilainya berarti semakin besar pembiayaan yang berasal dari utang. Pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membiayai asetnya dengan utang bergerak stagnan, sebesar 1,51% dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini disimpiulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya konsisten membiayai utang dengan penambahan asetnya.

Kemampuan melunasi total Utang juga dapat dilihat dari perbandingan antara total Utang dengan Ekuitas/Modal. Rasio total Utang terhadap Ekuitas/Modal dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menurun dari 1,53 % pada tahun 2020 menjadi 1,25% pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih relatif kecil, dan kondisi seperti ini perlu dipertahankan pada masa mendatang. Tabel berikut ini memperlihatkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024.

Tabel 2- 159
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%)
A	**Rasio Likuiditas**						
1	Rasio Lancar	194,00	808,35	700,55	633,11	303,32	60,41
2	Rasio Cepat	118,30	597,29	422,38	445,51	146,93	78,52
3	Rasio Kas	21,36	387,88	252,87	233,17	9,94	394,40
B	**Solvabilitas**						
1	Rasio Utang terhadap total aset	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
2	Rasio Utang terhadap total ekuitas	1,53	0,73	0,67	0,74	1,25	4,75

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025 (diolah)

3.7.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya disusun sebagai acuan dalam mengarahkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penyusunan kerangka ini mempertimbangkan proyeksi kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka menengah, kapasitas fiskal daerah, serta potensi sumber pendanaan lainnya dari pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat. Dalam periode Tahun 2025-2029, kebutuhan pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan analisa data keuangan daerah dalam lima tahun terakhir dan perkembangan sosial ekonomi baik didaerah maupun nasional, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat maka dilakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 – 2030 dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan terkait Pendapatan Daerah:

- Pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Penyusunan peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan, dan tata kelola pajak daerah.
- Penerapan peraturan pelaksanaan terkait terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- Kebijakan Pajak Daerah berupa pemberian Insentif Pajak Daerah
- Penyusunan peraturan pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum, peningkatan layanan retribusi, dan tata kelola retribusi daerah.
- Penerapan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah
- Intensifikais pendapatan daerah melalui pendataan wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak secara berkala
- Pendataan potensi PAD
- Peningkatan PAD sebagai Beban Bersama Seluruh OPD
- Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Nagari untuk meningkatkan retribusi
- Penerapan transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik baik melalui aplikasi online maupun qris diantaranya pembayaran PBB_P2, pajak restoran, pajak hotel, retribusi pasar, sewa aset, pajak hiburan dan parkir.
- Peningkatan transparansi pendapatan dan belanja daerah melalui aplikasi dasboard APBD yang dapat diakses secara real time.
- Integrasi pelayanan dan pembayaran digital lintas Perangkat Daerah
- Penerapan insentif bagi pembayar pajak dan retribusi serta perlunya sangsi bagi yang tidak patuh dalam pembayaran pajak.
- Perbaikan data dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB sesuai harga pasar terkini.
- Pendirian BUMD sebagai sumber PAD yang berkinerja serta memiliki akuntabilitas keuangan.
- Siosialisasi pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk peningkatan dari opsen PKB dan BBNKB
- Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi dan Edukasi terkait Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PBB-P2, BPHTB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi
- Melakukan Kerjasama dengan PLN terkait Pemungutan PBJT Tenaga Listrik
- Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang sejalan dengan peningkatan kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Daerah baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur dan lainnya mencakup pengkodean aset, geolokasi, status hukum, status pemanfaatan dan nilai aset.
- Penilaian ulang seluruh Aset Daerah untuk menginventarisasi aset-aset yang berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi Pendapatan Asli Daerah

2. Belanja Daerah

a. Kebijakan belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan mandatori spending diantaranya:

- Bidang pendidikan
  Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Bidang kesehatan
  Mandatori bidang kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, alokasi tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan mandatori tersebut ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

- Alokasi Dana Desa
  Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- Belanja pegawai
  Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD yang wajib diterapkan pada tahun 2027.

- Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
  Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah dan/ atau desa.

- Bantuan keuangan partai politik
  Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Pemenuhan mandatori spending diselaraskan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah untuk mencapai target-target pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Dharmasraya Sejahtera Merata, dengan berbagai inovasi.

b. Kebijakan belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, antara lain:
   - Pengalokasian belanja untuk pemenuhan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM)
   - Mengalokasikan belanja daerah selain belanja prioritas hanya untuk belanja wajib dan mengikat serta belanja perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan untuk perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
   - Pengalokasi belanja dalam rangak penyelarasan program prioritas nasional, provinsi dengan kabupaten.
   - Pengalokasian anggaran untuk belanja program prioritas perangkat daerah/ sektoral.

3. Pembiayaan Daerah

   Kebijakan pembiayaan daerah dialokasikan dalam bentuk kebijakan:
   - Pengalokasian penerimaan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya
   - Peningkatan penyertaan modal ke pihak ketiga (BUMD, BUMN, BUMNag) untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil.

4. Proyeksi Belanja Bersifat Wajib

   Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030, belanja bersifat wajib menjadi salah satu komponen utama yang harus direncanakan dengan cermat dan akurat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib memenuhi kewajiban untuk menyediakan anggaran yang memadai dalam mendanai kegiatan yang bersifat wajib, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik.

   Untuk lebih jelasnya proyeksi belanja bersifat wajib dapat dilihat pada Tabel 2-154.

5. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama *Earmark*

   Belanja wajib atau mandatory spending dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030 merujuk pada anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja ini memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Di bawah ini adalah narasi terkait belanja wajib

yang diatur dalam berbagai undang-undang yang relevan, yang harus diakomodasi dalam APBD Kabupaten Dharmasraya.

- Bidang Pendidikan
  Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 49 ayat (1), dana untuk pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan lainnya, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan yang cukup besar untuk memastikan bahwa pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik, merata, dan berkualitas. Alokasi ini mencakup pembiayaan infrastruktur pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pendidikan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.

- Bidang Kesehatan
  Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 171 ayat (2), (3), dan (4) serta Pasal 172 ayat (1), anggaran kesehatan pemerintah daerah wajib dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, di luar gaji tenaga medis. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus menyediakan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

a. Alokasi Dana Desa
   Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 72 ayat (3), dana desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah minimal harus dialokasikan sebesar 10% dari total pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur desa, pengembangan ekonomi lokal, dan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung pemberdayaan ekonomi daerah.

b. Belanja Pegawai
   Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pada Pasal 146 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1), pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai, termasuk tunjangan guru dan belanja pegawai daerah lainnya, dengan porsi minimal 30% dari total belanja APBD. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan pegawai daerah dan memastikan mereka dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

c. Belanja Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pada Pasal 146 ayat (1), pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik dengan porsi minimal 40% dari total belanja APBD. Ini meliputi pembangunan jalan, peningkatan fasilitas publik, serta pengembangan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas antar wilayah dalam Kabupaten Dharmasraya.

d. Belanja bagi Hasil PDRB kepada Desa
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang HKPD, pada Pasal 72, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan untuk desa harus minimal 10% dari total pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Alokasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, mempercepat pembangunan ekonomi daerah, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

e. Bantuan Keuangan untuk Partai Politik
Menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, pada Pasal 34, bantuan keuangan untuk partai politik harus dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pendidikan politik, dan pemahaman publik terhadap proses politik yang ada.

Belanja wajib atau mandatory spending yang diatur oleh berbagai undang-undang menjadi dasar yang sangat penting dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030. Setiap alokasi belanja wajib harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kewajiban hukum dan konstitusional dapat terlaksana dengan baik, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan desa, serta pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar semua program yang didanai dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

6. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pada penentuan prioritas rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026-2030 maka harus mengacu sepenuhnya pada Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa

a. Prioritas I yakni dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :
   - Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial)
   - Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

b. Prioritas II yakni dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 2- 160
Proyeksi Belanja Bersifat Wajib di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2030

No	URAIAN	Realisasi 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA DAERAH	**1,013,167,924,077**	**1,095,525,345,302**	**1,139,737,787,871**	**1,143,152,501,235**	**1,146,577,458,739**	**1,150,012,691,115**
	BELANJA PEGAWAI	**454,911,665,443**	**550,000,000,000**	**425,041,223,361**	**426,035,251,161**	**427,033,665,534**	**428,036,521,774**
	Tunjangan Guru	**64,705,443,592**	**83,569,887,000**	**83,569,887,000**	**83,569,887,000**	**83,569,887,000**	**83,569,887,000**
	Belanja Pegawai – Tunjangan Guru	390,206,221,851	466,430,113,000	341,471,336,361	342,465,364,161	343,463,778,534	344,466,634,774
1	**Rasio Belanja Pegawai (dikurangi Tunjangan Guru) dari Belanja Daerah**	**38.51**	**42.58**	**29.96**	**29.96**	**29.96**	**29.95**
A	**BELANJA BARANG DAN JASA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (A)**	**8,779,882,510**	**54,778,574,011**	**57,910,779,585**	**49,193,141,765**	**39,967,945,904**	**31,243,747,543**
B	**BELANJA MODAL (B)**	**102,187,717,063**	**140,018,237,891**	**350,937,816,708**	**361,021,339,873**	**371,616,518,736**	**381,714,810,047**
	Belanja Modal Tanah						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,237,257,450	36,971,100,000	63,913,005,706	59,320,449,204	55,013,140,978	59,977,707,566
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,954,072,575	58,546,333,785	113,838,670,879	117,978,952,590	114,440,828,508	113,751,000,443
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45,054,989,838	40,500,804,106	169,186,140,123	179,721,938,080	198,162,549,250	203,986,102,038
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,810,397,200	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
	Belanja Modal Aset Lainnya	131,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
C	**BELANJA HIBAH MENDUKUNG INFRASTRUKTUR PUBLIK (C)**	**34,253,926,757**		**-**	**-**	**-**	**-**

No	URAIAN	Realisasi 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
D	BELANJA INFRASTRUKTUR LAINNYA (JIKA ADA) (D)	113,330,772,640					
	TOTAL A+B+C+D	258,552,298,970	194,796,811,902	408,848,596,292	410,214,481,638	411,584,464,639	412,958,557,590
	BELANJA TRANSFER	1,984,369,824	119,728,533,400	117,616,297,140	117,616,297,140	117,616,297,140	117,616,297,140
	Belanja Daerah – Belanja Transfer	1,011,183,554,253	975,796,811,902	1,022,121,490,731	1,025,536,204,095	1,028,961,161,599	1,032,396,393,975
2	Rasio Belanja Infrastruktur Publik dari Belanja Daerah (dikurangi Belanja Transfer)	25.57	19.96	40.00	40.00	40.00	40.00

Sumber : hasil Analisis, Tahun 2025

Tabel 2- 161
Proyeksi Besaran APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2030

Kode Akun	Uraian Akun	Baseline 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**970.822.454.589**	**1.097.025.345.302**	**1.141.237.787.871**	**1.144.652.501.235**	**1.148.077.458.739**	**1.151.512.691.115**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**108.370.246.673**	**206.241.825.116**	**250.454.267.685**	**253.868.981.049**	**257.293.938.553**	**260.729.170.929**
4.1.01	Pajak Daerah	25.092.743.486	75.446.026.630	96.894.314.125	97.461.947.762	97.954.413.147	98.369.178.641
4.1.02	Retribusi Daerah	65.941.537.340	115.690.573.480	138.216.290.684	140.817.779.405	143.497.312.787	146.257.232.171
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006	7.947.929.006	8.186.366.876	8.431.957.882	8.684.916.619	8.945.464.118
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.988.036.841	7.157.296.000	7.157.296.000	7.157.296.000	7.157.296.000	7.157.296.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**850.689.858.617**	**878.885.366.971**	**878.885.366.971**	**878.885.366.971**	**878.885.366.971**	**878.885.366.971**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	792.448.801.416	832.189.209.800	832.189.209.800	832.189.209.800	832.189.209.800	832.189.209.800
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.241.057.201	46.696.157.171	46.696.157.171	46.696.157.171	46.696.157.171	46.696.157.171

Kode Akun	Uraian Akun	Baseline 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.762.349.299**	**11.898.153.215**	**11.898.153.215**	**11.898.153.215**	**11.898.153.215**	**11.898.153.215**
4.3.01	Pendapatan Hibah	71.350.441	134.000.000	134.000.000	134.000.000	134.000.000	134.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.690.998.858	11.764.153.215	11.764.153.215	11.764.153.215	11.764.153.215	11.764.153.215
5	**BELANJA DAERAH**	**1.013.167.924.077**	**1.095.525.345.302**	**1.139.737.787.871**	**1.143.152.501.235**	**1.146.577.458.739**	**1.150.012.691.115**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**793.179.544.263**	**830.778.574.011**	**666.183.674.023**	**659.514.864.222**	**652.344.642.863**	**645.681.583.928**
5.1.01	Belanja Pegawai	454.911.665.443	550.000.000.000	425.041.223.361	426.035.251.161	427.033.665.534	428.036.521.774
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.013.952.063	270.778.574.011	231.142.450.662	223.479.613.060	215.310.977.329	207.645.062.154
5.1.05	Belanja Hibah	34.253.926.757	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**102.187.717.063**	**140.018.237.891**	**350.937.816.708**	**361.021.339.873**	**371.616.518.736**	**381.714.810.047**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.237.257.450	36.971.100.000	63.913.005.706	59.320.449.204	55.013.140.978	59.977.707.566
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.954.072.575	58.546.333.785	113.838.670.879	117.978.952.590	114.440.828.508	113.751.000.443
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.054.989.838	40.500.804.106	169.186.140.123	179.721.938.080	198.162.549.250	203.986.102.038
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.810.397.200	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	131.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.485.520.287**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.485.520.287	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**115.315.142.464**	**119.728.533.400**	**117.616.297.140**	**117.616.297.140**	**117.616.297.140**	**117.616.297.140**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**1.984.369.824**	**5.134.311.500**	**5.134.311.500**	**5.134.311.500**	**5.134.311.500**	**5.134.311.500**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.330.772.640	114.594.221.900	112.481.985.640	112.481.985.640	112.481.985.640	112.481.985.640
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**46.430.539.477**	**-1.500.000.000**	**-1.500.000.000**	**-1.500.000.000**	**-1.500.000.000**	**-1.500.000.000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**46.430.539.477**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.430.539.477					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Kode Akun	Uraian Akun	Baseline 2024	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	4.085.069.989	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis

2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, untuk mengurangi perbedaan capaian sasaran pembangunan secara menyeluruh. Dengan mengacu pada data dan analisis di atas, maka permasalahan utama dirumuskan sebagai berikut:

2.8.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan serta dan fenomena yang terungkap di Kabupaten Dharmasraya berupa komponen Pembangunan Manusia, ekonomi, budaya dan lingkungan.

1. Kesehatan

Kondisi indikator kesehatan melalui Angka Kematian Bayi tahun 2024 yaitu 15,4/1000 klh atau 39 kasus, Angka Kematian Ibu melahirkantahun 2023 setinggi 245/100.000, dan Prevalensi stunting (6,09), dimana kondisi capainnya telah jauh dibawah rata-rata kondisi provinsi.

Angka keberhasilan pengobatan TBC Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional sementara cakupan penemuan dan pengobatan TBC meskipun fluktuatif angkanya tetapi rata-rata masih lebih tinggi dari kondisi provinsi Sumbar. Sementara, usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Dharmasraya relatif sama dengan UHH Provinsi Sumbar yang berada diatas rata-rata nasional menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif tinggi.

Akar masalah kesehatan terutama pada ketimpangan pemerataan layanan kesehatan, persoalan tingkah laku hidup bersih, serta masih tingginya angka kelahiran kelahiran. Angka kelahiran, TFR kabupaten (2,6) relative jauh tinggi dari rata-rata nasional (2,19). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana juga akan berdampak pada pebaikan kesehatan. Selain itu penerapan pola hidup bersih masyarakat juga perlu ditingkatkan. Ketersediaan air bersih masih perlu ditingkatkan demikian juga dengan ketersediaan sanitasi jamban masyarakat meskipun sudah cukup tinggi masih perlu ditingkatkan.

2. Pendidikan

Capaian IPM, untuk komponen rata rata pendidikan di Dharmasraya relative masih rendah dibandingkan capaian Propinsi. Juga diikuti, capaian angka partisipasi pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Masalah utama adalah pada

pemerataan akses untuk seluruh jenjang pendidikan, kurangnya daya beli masyarakat untuk pembiayaan pendidikan, rendahnya kapasitas guru dan kepala sekolah terhadap manajemen sekolah, serta kualitas cognitive, karakter, adab, dan relevansi pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi anak usia sekolah. Dengan demikian, sasaran program pendidikan wajib belajar 13 tahun yang akan diterapkan menjadi tantangan untuk berhasil dijalankan di Kabupaten Dharmasraya.

3. Perlindungan Sosial

Kabupaten Dharmasraya, meskipun menunjukkan pertumbuhan pembangunan di beberapa sektor, masih menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan cakupan perlindungan sosial yang merata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Data dan pengamatan di lapangan mengindikasikan adanya beberapa permasalahan krusial pada indikator perlindungan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.

a. Cakupan Program Perlindungan Sosial yang Belum Optimal:

- Identifikasi dan Pemutakhiran Data: Permasalahan mendasar seringkali terletak pada akurasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat miskin dan rentan. Hal ini menyebabkan banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terjangkau, sementara ada potensi penerima yang tidak tepat sasaran.
- Akses dan Sosialisasi Program: Meskipun berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS Kesehatan), dan lainnya telah berjalan, namun akses masyarakat, khususnya di wilayah pelosok atau terpencil, masih terbatas. Kurangnya sosialisasi yang masif dan mudah dipahami juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses program-program tersebut.

b. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Dasar:

- Kesehatan: Meskipun BPJS Kesehatan berupaya mencakup seluruh masyarakat, masih terdapat tantangan dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan. Persoalan antrean panjang, ketersediaan tenaga medis, dan obat-obatan di beberapa puskesmas atau rumah sakit di Dharmasraya masih menjadi keluhan.

- Pendidikan: Anak-anak dari keluarga miskin dan rentan masih menghadapi risiko putus sekolah. Meskipun ada bantuan pendidikan, namun biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya masih menjadi beban bagi orang tua, yang pada akhirnya dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas.

c. Kerentanan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga yang Rendah:

- Sektor Informal yang Dominan: Sebagian besar masyarakat Dharmasraya bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap dan tanpa jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan, karena tidak memiliki bantalan pengaman finansial.
- Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga: Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan inflasi secara langsung mengikis daya beli masyarakat, terutama keluarga miskin yang pendapatannya terbatas. Program bantuan sosial yang ada kadang belum cukup untuk menopang kebutuhan dasar mereka sepenuhnya.

d. Koordinasi dan Sinergi Antar-Lembaga yang Perlu Ditingkatkan:

- Meskipun banyak pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan sosial (pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat), namun koordinasi dan sinergi antar-lembaga masih perlu diperkuat. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan data yang terintegrasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada demi mencapai hasil yang maksimal.

4. Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk menghadirkan program perlindungan lintas sektoral terintegrasi dan berkesinambungan melalui penyelanggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2022 dengan indeks perlindungan anak sebesar 76,41. Angka ini lebih tinggi dari capaian provinsi (70,01) dan nasioanl (75,21). Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai KLA tingkat Madya, sehingga untuk tahun ini pemerintah setempat berupaya untuk mengoptimalkan peranan pemangku kepentingan yang ada untuk meningkatkan capaian menjadi KLA tingkat Nindya, dengan berbagai program seperti rumah ibadah ramah anak melalui masjid ramah anak.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tingkat nagari atau desa sebagai sarana advokasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Salah satu

hasilnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami anak sebagai korban kekerasan kepada lembaga layanan perlindungan anak, tetapi kasus yang dilaporkan .bersifat parsial dan masih banyak permasalahan terhadap anak yang terjadi tapi enggan dilaporkan.

Akar masalah utama adalah kurangnya advokasi, ketersediaan ruanga dan fasilitas untuk anak bermain, serta partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat terutama pada tingkat nagari dengan melibatkan berbagai pihak.

5. Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Dharmasraya cukup berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari Sumbar sampai pertengahan periode 2000 tetapi kemudian berhasil berkurang menyamai tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Dibandingkan dengan 19 kab/kota di Sumbar, Dharmasraya berada di urutan tertinggi ke-9, atau pada urutan 2 dari kabupaten yang ada. Kondisi terakhir di Tahun 2024, Tingkat kemiskinan pada angka 5,32 persen atau sebanyak 15.250 jiwa. Tingkat kemiskinan Sumbar jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Penurunan kemiskinan lebih lanjut akan menghadapi tantangan dalam mengentaskan kemiskinan pada kantong-kantong kemiskinan di kawasan relatif terisolir dan penduduk di sektor pertanian yang memiliki lahan terbatas.

Sesuai dengan analisi sebelumnya, penyebab utama kemiskinan Dharmasraya adalah tingginya tingkat inflasi, relative tingginya angka pengangguran, produktivitas kerja rendah, dan kurangnya diversifikasi pekerjaan anggota rumah tangga.

6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kenetagakerjaan Kabupaten

Cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditingkat nasional masih rendah dan cakupan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah. Sementara cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan yang tinggi tetapi masih dbawah cakupan Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sosial ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya komitmen sektor formal dan kondisi besarnya proporsi tenaga kerja non formal, sehingga perlu komitmen cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih luas.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Saat ini pekerja di sektor formal yang menyandang disabilitas sangat rendah. Hal ini dikarenakan daya serap dan kemauan para penyandang untuk memasuki sektor formal. Dimasa yang akan datang dibutuhkan sosialisasi dan keberpihakan berbagai pihak terutama yang bergerak disektor formal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kapasitasnya.

7. **Jaminan Lapangan Kerja yang layak**

Perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pola U. Tingkat pengangguran terbuka menurun dalam periode tertentu. Pada periode ini tingkat pengangguran Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Ini terjadi pada era boom komoditi mulai tahun 2000-an. Akan tetapi sejak berakhirnya boom komoditi mulai pada tahun 2015, terlihat tingkat pengangguran terbuka secara konsisten meningkat kembali hampir menyamai tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Saat ini angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya masih berada pada angka 6,02% dari total penduduk angkatan kerja, proporsi pengangguran didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi, sedangkan Pendidikan rendah relative sedikit menganggur. Di lain sisi daya serap tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian. Sehingga jaminan lapangan kerja yang layak di Kabupaten Dharmasraya masih menjadi tantangan pembangunan daerah serta perlu diatasi karena masih sedikitnya jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Masalah utama pengangguran adalah rendahnya investasi, terbatasnya keterampilan kerja, kurangnya inovasi pembangunan untuk berbagai bidang dan sektor ekonomi.

8. **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inclusif**

Indeks ketimpangan gender menurun di Kabupaten Dharmasraya selama 3 tahun terakhir, namun masih tinggi jika dibanding dengan rata-rata Sumatera Barat. Akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial yang membatasi hak dan peluang perempuan, serta pola piker keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan.

Masalah utama adanya Bias gender dalam pembangunan yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, rendahnya pasar tenaga kerja perempuan dan akses keuangan, termasuk masalah berkaitan dengan kenakalan, dan hubungan sosial yang tidak harmonis berdasarkan aspek gender. Oleh karena itu dibutuhkan program kesetaraan gender yang meliputi program penguatan gender dan budaya.

Aspek Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

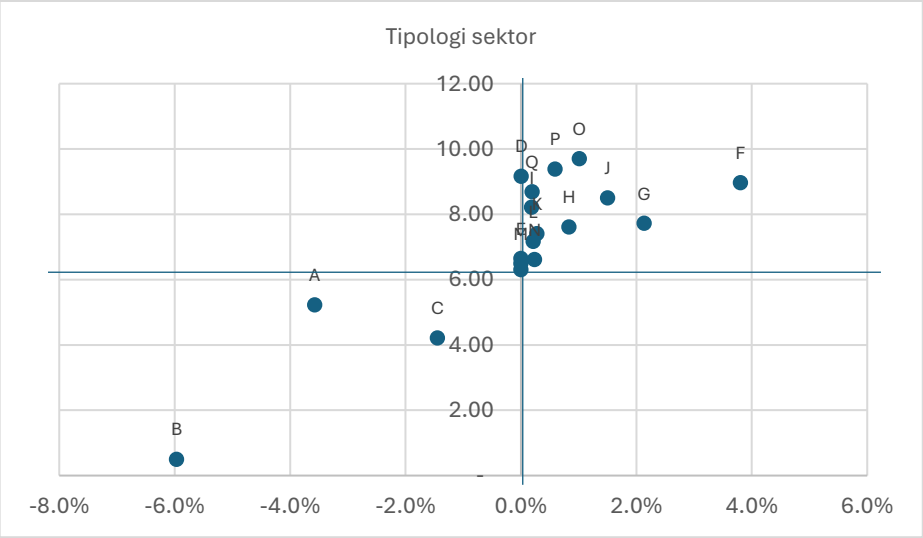
Permasalahan pada aspek pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam antara lain:

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya pada 2000 – 2014, rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Barat. Hal ini dipicu oleh "comodity boom" perkebunan dan pertambangan. Akan tetapi dengan berakhirnya boom komoditi tersebut dan diiringi kemudian dengan merosotnya harga komoditi sawit, karet dan hasil tambang maka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kemudian menurun hampir menyamai pertumbuhan rata-rata Sumatera Barat dan nasional.

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang selama ini bergantung pada pertumbuhan sub sektor perkebunan khususnya komoditi sawit dan sub sektor pertambangan ini dimasa depan tidak bisa terlalu diharapkan banyak untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Era "comodity boom" perkebunan sudah berakhir dan sumberdaya pertambangan daerah akan berkurang dan habis. Untuk menghasilkan stabilitas ekonomi daerah, dimasa depan perlu dikembangkan komoditi pertanian berbasis permintaan lokal dan industri berbasis pertanian yang tahan terhadap guncangan fluktuasi ekonomi.

Gambar 2- 128
Matriks Tipologi Sektor Berdasarkan Laju Pertumbuhan dan Perubahan Kontribusi PDRB Tahun 2010-2023



Perubahan kontribusi PDRB 2010- 2023 (%)

Keterangan:

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
J. Informasi dan Komunikasi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
L. Real Estat
M. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R. Jasa lainnya

Sumber : Analisis Bapperida Tahun 2024

Kontribusi sektor primer dalam PDRB (pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian) yang menjadi sektor basis kabupaten selama 2010-2022 terus menurun. Kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari 31,1% menjadi 27,5% (-3,6%), dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar -6,0%. Laju pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masingnya hanya 5,23% dan 0,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasaraya yang selama ini bertumpu pada sektor primer dimasa depan akan mengalami perlambatan dimana sektor pertanian kontribusi dan pertumbuhannya akan melambat sementara sektor pertambangan dan penggalian stagnan dan akan menurun. Akibat tidak berkembangnya kegiatan lanjutan sektor pertanian menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja sektor formal maupun informal, sehingga perlu peningkatan kegiatan industri pengolahan berbasis pertanian agar terjadi penyerapan tenaga kerja secara formal dan informal.

Demikian juga sektor sekunder industri pengolahan yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan daerah dalam melakukan transformasi ekonomi ternyata dalam periode yang sama juga mengalami penurunan kontribusi (-1,4%) dengan laju pertumbuhan lambat (4,22%). Sementara kontribusi sektor dengan kontribusi meningkat paling besar yaitu sektor konstruksi (3,8%) dan sektor perdagangan dan jasa (2,1%). Sektor-sektor jasa lainnya seperti administrasi pemerintahan dan pendidikan juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

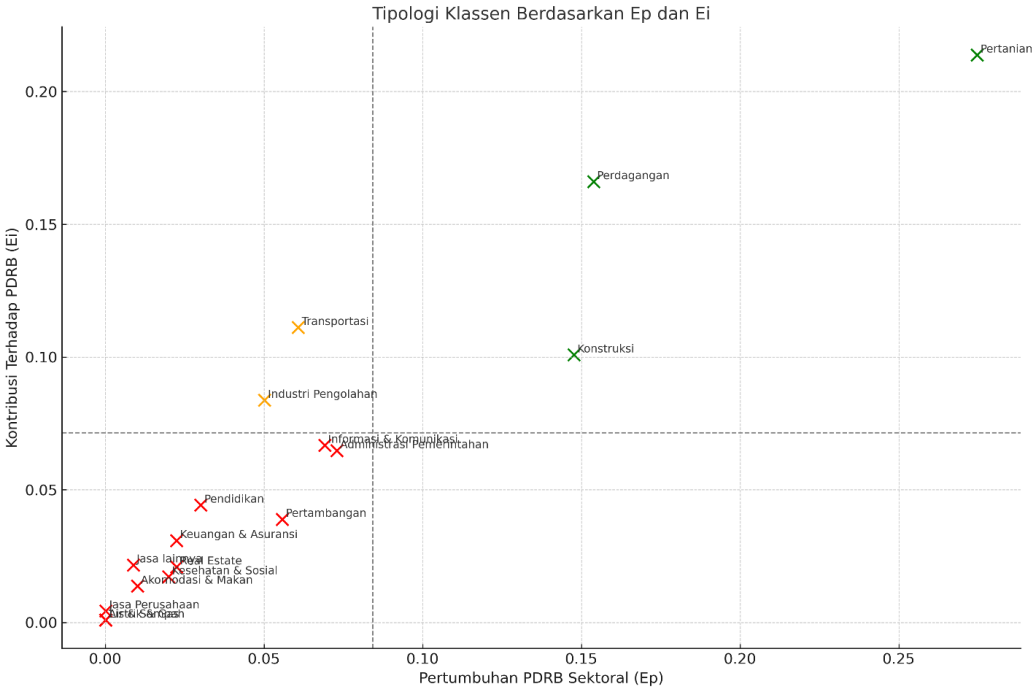
Pertumbuhan sektor basis (pertanian, pertambangan dan industri) yang melambat dengan kontribusi PDRB berkurang menandakan bahwa dimasa depan Kabupaten Dharmasaraya perlu berinovasi dan bertransformasi mengembangkan sumber daya alam komoditi pertanian dan industri hasil pertanian yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi global dengan menurunnya permintaan hasil perkebunan sawit dan karet sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Dharmasraya dengan basis ekonomi perkebunan. Dengan penurunan permintaan

tersebut, kegiatan industri tidak berkembang. Ketidakpastian pasar dan harga internasional dari komoditi perkebunan menjadi masalah yang perlu diantisipasi di masa depan. Pengembangan sektor industri, diversifikasi komoditi hortikultura dan membangun ketahanan pangan lokal berdasarkan permintaan lokal menjadi alternatif solusi pembangunan ekonomi.

Dilihat berdasarkan analisis typologi klassen, yang terdiri dari :

1. Hijau (Kuadran I): Maju dan tumbuh cepat
2. Oranye (Kuadran II): Maju tapi tertekan
3. Merah (Kuadran IV): Tertinggal

Gambar 2- 129
Analisis Typologi Klassen Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024



Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen terhadap struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar sektor ekonomi masih berada dalam posisi tertinggal. Tipologi ini membagi sektor ke dalam empat kuadran berdasarkan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB Dharmasraya ($\bar{Ep}$ = 0,0843) dan Sumatera Barat ($\bar{Ei}$ = 0,0714). Hasilnya menunjukkan bahwa hanya tiga sektor yang masuk dalam Kuadran I, yaitu kategori *maju dan tumbuh cepat*, yakni sektor Pertanian, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi tinggi secara lokal maupun dibandingkan rata-rata provinsi, sehingga menjadi tulang punggung utama perekonomian Dharmasraya dan perlu terus didukung melalui kebijakan strategis serta investasi berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat dua sektor yang masuk dalam Kuadran II atau kategori *maju tapi tertekan*, yaitu Industri Pengolahan dan Transportasi. Kedua sektor ini memiliki peran penting di tingkat provinsi, namun kontribusinya di Dharmasraya masih rendah. Ini menunjukkan adanya potensi pengembangan yang belum optimal, sehingga perlu dorongan lebih lanjut agar sektor tersebut tumbuh secara lokal.

Menariknya, tidak ada sektor yang masuk dalam Kuadran III (*berkembang cepat*), yang berarti Dharmasraya belum memiliki sektor baru yang tumbuh signifikan secara lokal meskipun belum dominan secara provinsi. Sebaliknya, terdapat banyak sektor yang masuk dalam Kuadran IV atau kategori *sektor tertinggal*. Sektor-sektor ini meliputi Pertambangan, Listrik dan Gas, Air dan Sampah, Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, serta Jasa Lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sektor belum berkembang baik secara kontribusi lokal maupun provinsi, dan perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Dharmasraya tahun 2024 masih didominasi oleh sektor primer dan konstruksi. Sementara itu, sektor jasa dan industri lainnya belum menunjukkan daya saing yang kuat. Proyeksi ke depan menuntut diversifikasi ekonomi, penguatan sektor tertinggal melalui pelatihan dan insentif, serta keberlanjutan pembangunan sektor-sektor unggulan. Dengan strategi sektoral yang tepat, Dharmasraya berpeluang memperkuat struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis Shift Share tahun 2024 terhadap struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini sebagian besar didorong oleh faktor keunggulan kompetitif (RS) dan struktur sektoral (IM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sektor unggulan Dharmasraya yang menunjukkan kontribusi positif signifikan terhadap perekonomian daerah berdasarkan *Total Shift Share (TSS)* adalah:
   - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (+Rp 3.935 miliar): menjadi motor utama ekonomi daerah, ditopang keunggulan struktur dan daya saing lokal.
   - Perdagangan Besar dan Eceran (+Rp 2.204 miliar): tumbuh kuat berkat kontribusi struktural yang besar, meski daya saingnya sedikit negatif.
   - Konstruksi (+Rp 2.116 miliar): menunjukkan potensi besar baik secara struktural maupun kompetitif, mengindikasikan pembangunan infrastruktur yang aktif.

- Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan positif meski disertai tantangan daya saing di beberapa sub-sektor.

2. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi (RS positif) walau secara struktur belum dominan:

   - Administrasi Pemerintahan (+Rp 1.046 miliar) dan Real Estate (+Rp 322 miliar) menunjukkan peran penting dalam meningkatkan daya saing lokal.
   - Jasa Kesehatan dan Sosial serta Jasa Keuangan dan Asuransi juga mengalami pertumbuhan yang stabil.

3. Sektor yang mengalami tekanan kompetitif (RS negatif) meskipun memiliki struktur kuat:

- Industri Pengolahan, Transportasi, dan Pendidikan menghadapi tantangan daya saing dan perlu perhatian khusus dalam peningkatan produktivitas serta efisiensi.

Struktur ekonomi Dharmasraya saat ini masih bertumpu pada sektor tradisional seperti pertanian dan perdagangan, namun menunjukkan transformasi ke arah sektor jasa dan infrastruktur. Strategi pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada:

- Penguatan sektor dengan RS tinggi melalui investasi dan peningkatan kapasitas SDM.
- Reorientasi sektor dengan RS negatif agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar.
- Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

Secara keseluruhan, Dharmasraya menunjukkan potensi pertumbuhan daerah yang positif, namun memerlukan kebijakan sektoral yang lebih tepat sasaran untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing ekonomi lokal.

2. Penerapan ekonomi hijau

Ekonomi hijau memberi perhatian untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kabupaten Dharmasraya dengan basis ekonomi perkebunan monokultur sawit menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun karena karakteristik komoditi ini yang menurunkan kualitas hara dan mengurangi ketersediaan air serta mendorong banyaknya alihfungsi kawasan hutan. Demikian juga eksploitasi bahan tambang yang tidak terbarukan juga mengancam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dimasa depan, diiversifikasi komoditi dan mata pencaharian penduduk perlu dilakukan

dengan mendorong perkembangan ekonomi hijau. Percepatan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan serta ekonomi kreatif menjadi alternatif untuk mewujudkan ekonomi hijau.

Perhatian perlu diberikan kepada sektor ekonomi kreatif. Rasio sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kabupaten Dharmasaraya pada tahun 2023 hanya 0,69%, jauh dibawah rasio Provinsi Sumatera Barat 3,22%. Program percepatan pengembangan industri kecil seperti kriya dan kuliner pengolahan hasil pertanian dan pariwisata perlu diprioritaskan dimasa depan. Belum optimalnya hilirisasi produk hasil pertanian dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian sehingga Kabupaten Dharmasraya saat ini hanya sebagai penghasil bahan baku. Selain itu belum adanya perusahaan daerah yang mengelola dan mengolah hasil sumberdaya alam daerah.

Berdasarkan indeks capaian LQ, dan Tipology, maka sektor ekonomi yang masih potensial untuk ditingkatkan ke depan adalah berkaitan dengan sektor pertanian (sawit, karet, kedele, dan kelapa), industri pengolahan pertanian (biodiesel, turunan pakan ternk dan pupuk), perdagangan (jasa perparkiran dan pusat usaha baru), Kawasan ekonomi dan wisata baru, serta pengembangan jasa sosial kemasyarakatan.

Sementara berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) tahun 2024, struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa terdapat tujuh sektor yang tergolong sebagai sektor basis atau unggul. Sektor-sektor ini memiliki nilai LQ lebih dari 1, yang berarti kontribusi relatifnya terhadap perekonomian Dharmasraya lebih besar dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ketujuh sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (LQ = 1,29), Pertambangan dan Penggalian (1,44), Konstruksi (1,46), Informasi dan Komunikasi (1,04), Real Estate (1,07), Administrasi Pemerintahan (1,13), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,17). Keunggulan komparatif ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi di sektor-sektor tersebut dan menjadi fondasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, terdapat sepuluh sektor yang dikategorikan sebagai sektor non-basis dengan nilai LQ kurang dari 1. Beberapa di antaranya adalah Industri Pengolahan (LQ = 0,60), Perdagangan Besar dan Eceran (0,93), Transportasi dan Pergudangan (0,55), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,73), serta Jasa Pendidikan (0,68). Meskipun beberapa sektor non-basis ini memiliki nilai kontribusi absolut yang besar terhadap PDRB, mereka masih memiliki konsentrasi ekonomi yang lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi, sehingga belum menjadi sektor unggulan secara komparatif. Sektor-sektor non-basis ini cenderung melayani kebutuhan internal daerah dan belum banyak berorientasi keluar wilayah.

Secara umum, hasil LQ ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Dharmasraya masih sangat bertumpu pada sektor-sektor primer dan konstruksi. Ke

depan, strategi pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor basis melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan hilirisasi, serta mendorong sektor-sektor non-basis agar dapat berkembang menjadi sektor unggulan baru. Diversifikasi ekonomi menjadi penting agar ketergantungan terhadap sektor tertentu dapat dikurangi dan ketahanan ekonomi daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Ketimpangan Ekonomi

Mengatasi ketimpangan ekonomi yang melebar sangat penting untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebelum 2015, ketimpangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dengan indikator Indeks Gini tetap terjaga lebih rendah dari Nasional dan Sumbar. Sumberdaya lahan yang luas dan peluang ekonomi yang besar menjadikan kemakmuran bagi semua lapisan penduduk menjadi lebih merata. Akan tetapi terlihat bahwa sejak 2017 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya mulai cenderung meningkat.

Ketimpangan akan menurun dengan terbuka luasnya peluang lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Akan tetapi ketimpangan ekonomi juga berasal dari ketimpangan akses terhadap lahan. Indeks Gini yang meningkat menunjukkan juga distribusi penguasaan lahan yang semakin timpang dan peluang kerja yang sempit bagi sebagian penduduk perdesaan. Di masa depan pemerataan distribusi lahan pertanian dan membuka peluang akses pekerjaan bagi penduduk tuna lahan disektor pertanian dimana mereka dapat memanfaatkan lahan untuk budidaya pertanian akan menurunkan angka Indeks Gini dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

4. Perdesaan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Beberapa nagari di Kabupaten Dharmasraya seperti Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Sitiung dan Koto besar akan tumbuh menjadi kawasan perkotaan pusat pertumbuhan ekonomi. Kota-kota ini perlu dilengkapi dengan kawasan dan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung investasi. Terbukanya akses regional pantai timur dan pantai barat melewati Kabupaten Dharmasraya membawa peluang ekonomi untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumatera Barat.

Dengan demikian, permasalahan ketimpangan adalah pengembangan akses dan kesempatan penduduk untuk usaha ekonomi dan pelayanan public secara merata, ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi membutuhkan fokus pada pengembangan komoditi unggulan sebagai penggerak pertumbuhan kawasan. Kabupaten Dharmasaraya masih perlu menemukenali dan mengembangkan potensi kawasan perdesaan dengan komoditi unggulan masing-masing selain sawit dan karet, Jagung, Kedele dan Kelapa.

Rendahnya daya saing UMKM, dan kesenjangan antara pedesaan dan kota karena belum adanya spesialisasi dan diferensiasi produk nagari. Untuk itu diperlukan pemanfaatan sumberdaya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Permasalahan perekonomian salah satunya dapat diatasi dengan One Village One Product (OVOP), dimana program ini meriuiapakan salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Aspek Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Wilayah

1. Konektivitas Antar Wilayah

Belum meratanya kemantapan jalan di wilayah kecamatan. Salah satu dapat dilihat dari masih adanya akses jalan aspal dari ibukota kecamatan yang belum terhubung dengan ibukota kabupaten. Terdapat 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Asam Jujuhan yang belum terhubung dengan Ibukota Kabupaten karena untuk akses menuju ibu kota kabupaten melewat jalan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang masih berupa jalan tanah. Diperlukan kebijakan provinsi dalam pembangunan jalan Kecamatan Asam Jujuhan ke Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dengan kebutuhan jalan lebih kurang 10 Km.

Pengembangan konektivitas antara wilayah dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada kawasan perbatasan Sumatera Barat (Dharmasraya - Solok Selatan pada ruas Abai Sangir – Sei. Dareh; Dharmasraya - Solok pada ruas Alahan Panjang – Kiliran Jao) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu Ruas jalan Simpang Lintas Sumatera sampai Batas Kabupaten Solok Selatan merupakan jalan penghubung antar Kabupaten sepanjang 45,88, km yang terdiri dari : Ruas Jalan Juntion - Abai sepanjang 12,6 Km, Simpang Abai - PT.PSET sepanjang 10 Km, Simpang PT.PSET - Simpang Kelapa sepanjang 10 Km dan Simpang Kelapa - Batas Solok Selatan sepanjang 13,28 Km. Dilihat berdasarkan status jalan, Jalan Simpang Lintas (Juntion) - Abai sepanjang 12,6 Km merupakan Jalan Provinsi. Untuk itu perlu Peningkatan status ruas Simpang Abai - PT.PSET sepanjang 10 Km, Simpang PT.PSET - Simpang Kelapa sepanjang 10 Km dan Simpang Kelapa - Batas Solok Selatan sepanjang 13,28 Km menjadi jalan provinsi karena merupakan jalan penghubung antar kabupaten.

Selain itu masih banyak jalan-jalan dan jembatan pada ruas jalan kabupaten yang rusak dan perlu penanganan prioritas dan begitu pula kerusakan jalan dan jembatan akibat adanya bencana banjir dan longsor di Kabupaten Dharmasraya. Begitu juga dengan jaringan jalan lokal dan lingkungan yang perlu penanganan serta pembangunan jalan diperlukan seiring dengan pembangunan jaringan drainase. Hal ini dapat dilihat

beberapa ruas jalan terutama jalan yang berada pada lingkungan perkotaan yang tidak memiliki drainase.

2. Infrastruktur lainnya

Penyediaan infrastruktur lainnya yang belum memadai terjadi secara merata di seluruh kecamatan seperti air minum akibat masih rendahnya capaian pelayanan air minum perpipaan, belum adanya perusahaan daerah air minum, masih rendahya capaian pelayanan persampahan, masih minimnya jaringan drainase dan sanitasi lingkungan. Selain itu masih adanya area blank spot dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik.

Merupakan hasil dari upaya pengurangan dan penanganan sampah, yang diukur dari berbagai indikator seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi, ditangani, dan dikelola, serta sampah yang belum terkelola.

Berdasarkan data SIPSN KLHK diperoleh timbulan sampah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan tahun 2020 timbulan sampah sebesar 35.605,56 ton/tahun dan tahun 2024 meningkat menjadi 71.495 ton/tahun. Selanjutnya sampah terkelola meningkat dari tahun 2023 79,65% menjadi 80,21% tahun 2024, jika dilihat tahun 2021-2022 persentase sampah terkelola mencapai angka 90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.47. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Dharmasraya

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	35.605,56	37.411,62	37.831,10	46.791,24	71.495,00
2	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	3.175,08	4.244,20	5.709,93	12.633,63	19.303,65
3	%Pengurangan Sampah	8,92	11,34	15,09	27,00%	27,00%
4	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	21.984,68	29.448,20	30.130,75	33.689,67	51.476,40
5	%Penanganan Sampah	61,75	78,71	79,65	72%	72%
6	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	25.159,76	33.692,40	35.840,69	56.949,13	37.937,00
7	%Sampah Terkelola	70,66	90,06	94,74	79,65%	80,21%
8	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)	968,29	1.654,80	1.797,22	1.434,00	1.239,00
9	Recycling Rate (%)	2,72	4,42	4,75	3,06	1,73

Sumber : SIPSN KLHK

Tabel 3.48. Tingkat Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pelayanan Persampahan (persen rumah tangga)	5,00%	5,04%	5,02%	4,97%	5,38%
2	Volume sampah tak terkelola (ton/tahun)	32.430,49	33.167,43	61.099,95	64.664,39	43.389,41
	Persentase sampah tidak terkelola	91,08%	88,66%	91,45%	94,43%	98,17
3	Jenis sampah dominan (%)					
	sisa makanan	47%	48%	49%	52%	53%
	plastik	40%	38%	36%	30%	30%

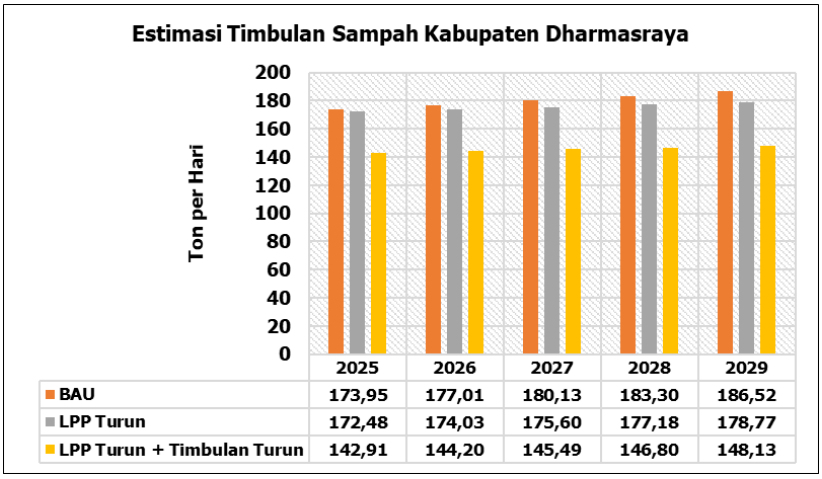
	kayu/ranting	7%	7%	7%	9%	10%
	kertas/karton	4%	5%	6%	7%	5%
	logam	1%	1%	1%	1%	1%
	kain	1%	1%	1%	1%	1%
	jumlah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DLH Kab Dharmasraya, 2025

Berdasarkan tingkat pelayanan persampahan diperoleh tingkat pelayanan persampahan mengalami peningkatan dari tahun 2023 menjadi 5,38%. Sedangkan jenis sampah dominan berasal dari sisa makanan yaitu 53%.

Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya termasuk pada kategori Kabupaten/Kota Sedang, berdasarkan estimasi proyeksi timbulan sampah hingga tahun 2029 diperoleh timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.



Gambar 3.40. Estimasi Timbulan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 (ton/hari)

Sumber: Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya

Hasil estimasi tersebut dapat disimpulkan dengan *Business As Usual* (BAU) timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 terus mengalami peningkatan, tahun 2029 timbulan sampah sebesar 186,52 ton/hari, kemudian jika LPP diturunkan maka timbulan sampah dapat diturunkan menjadi 178,77 ton/hari dan dengan upaya LPP turun serta timbulan turun maka timbulan sampah semakin menurun menjadi 148,13 ton/hari.

3. Berketahanan Energi, Air dan Kemandiarian Pangan

Sistem interkoneksi regional telah menghadirkan distribusi energi antar wilayah. Permasalahan ketahanan energi di kabupaten masih relevan menjadi isu lokal. Pada

daerah perdesaan yang jauh dengan topografi yang sulit diakses, potensi energi lokal bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi yang murah dan berkelanjutan.

Ketersediaan air bersih untuk kebutuhan pengairan pertanian dan kebutuhan permukiman masih menjadi masalah prioritas untuk ditangani di Kabupaten Dharmasraya. Masih cukup rendahnya ketersediaan air bersih tersebut menyebabkan perlunya percepatan peningkatan produksi air. Prasarana irigasi dengan kondisi baik sebesar 79,76 % sementara masih cukup banyak hamparan sawah yang membutuhkan pengairan irigasi. Pemenuhan pengairan irigasi yang sangat vital bagi produksi pertanian masih perlu terus ditambah dan direhabilitasi agar mencapai kondisi ideal untuk melayani lahan produktif yang masih membutuhkan

Ketahanan pangan menjadi isu nasional untuk negara sebesar Indonesia. Ditingkat lokal, fluktuasi harga pangan menjadi salah satu pendorong perlunya memperkuat ketahanan pangan lokal. Penguatan ketahanan pangan ini membutuhkan sistem pendukung budidaya persawahan seperti pengairan berupa irigasi dan embung, penyediaan pupuk dan bantuan peralatan untuk pengolahan lahan tidur dan alihfungsi lahan menjadi sawah. Selain pengembangan lahan sawah perlu dilakukan diversifikasi komoditi hortikultura. Oleh karenanya, Dharmasraya nanti akan menjadi lumbung protein Sumatra (daging dan Kedele) dan penyediaan produk turunan perkebunan sawit, dan kelapa.

4. **Perumahan dan permukiman yaitu masih ada kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni**

5. **Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

   IRB Kabupaten Dharmasarya tahun 2023 (137,7) termasuk rendah diantara kabupaten di Sumatera Barat. Meskipun tingkat kerawanan bencana daerah termasuk rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat tetapi fokus terhadap kerawanan bencana banjir perlu menjadi perhatian. Kerawanan bencana alam banjir terdapat di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung yang berdampak terhadap permukiman yang luas. Dimasa depan, daerah rawan banjir yang luas akibat intensitas hujan ekstrim akan terjadi dalam kala ulang yang lebih singkat. Antisipasi perlu dilakukan dengan menjaga tutupan lahan hutan dan membangun struktur penanggulangan banjir pada tempat-tempat penting.

   Fluktuasi iklim global yang semakin ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau membutuhkan antisipasi selain terhadap banjir juga dalam penyediaan air baku untuk pertanian dan air minum.. Untuk mengatasi gap penyediaan air baku untuk pertanian dan air minum berbagai upaya perlu dilakukan dengan percepatan pembangunan bendung dan embung.

6. Lingkungan Hidup Berkualitas

Nilai Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya rendah diukur dari variabel kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Hal ini menandakan bahwa dibutuhkan pengendalian dalam pembangunan yang bisa merusak lingkungan hidup. Menjaga kualitas lingkungan dilakukan dengan mengendalikan permasalahan yang ditimbulkan oleh:

a. perubahan fungsi hutan untuk kegiatan pertanian,
b. pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan pertambangan yang tidak terkendali, dan kegiatan
c. pertambangan yang tidak mematuhi kaidah pemanfaatan dan restorasi, dan
d. Masih lemahnya kelembagaan dan aturan pengendalian tambang liar yang mencemari tanah dan sungai.

Meskipun luas kawasan hutan Kabupaten Dharmasraya tercatat 88.582 Ha (30,32%) dari luas wilayah) akan tetapi luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya hanya 58,757 Ha (20,11%). Luas tutupan hutan yang sempit ini menjadi masalah lingkungan hidup yang penting untuk diperhatikan dimasa depan karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan keseluruhan. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan perlu dikendalikan dengan ketat. Sementara pemulihan kawasan hutan perlu dilakukan secara bertahap. Langkah yang perlu dilakukan adalah mempertahankan hutan yang ada dengan cara pemanfaatan hasil hutan non kayu sehingga mencegah pengurangan tutupan lahan dan erosi sehingga tidak terjadi kekritisan lahan dan hutan menjadi lestari..

Luas tutupan hutan yang sempit ini menjadi masalah lingkungan hidup yang penting untuk diperhatikan dimasa depan karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan keseluruhan. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan perlu dikendalikan dengan ketat. Sementara pemulihan kawasan hutan perlu dilakukan secara bertahap. Langkah yang perlu dilakukan adalah mempertahankan hutan yang ada dengan cara pemanfaatan hasil hutan non kayu sehingga mencegah pengurangan tutupan lahan dan erosi sehingga tidak terjadi kekritisan lahan dan hutan menjadi lestari.

Lingkungan permukiman sebagai cerminan lingkungan budidaya yang dihuni manusia membutuhkan infrastruktur dan sarana pelayanan yang memadai. Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, penyediaan air minum layak dan aman, sanitasi aman serta hunian layak membutuhkan perhatian yang lebih mengingat kondisi saat ini penyediaan infrastruktur dan sarana permukiman tersebut masih perlu ditingkatkan.
Sebagai wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan Sumatera Barat Bagian Tenggara, Kabupaten Dharmasraya perlu melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang

bersifat wilayah, salah satunya pelayanan dan pengolahan persampahan dan pengolahan limbah tinja dan limbah B3.

Masalah sertifikasi Hutan sangat diperlukan segera diselesaikan, agar dalam jangka panjang Kawasan Hutan bisa merupakanbagian dari SDA yang akan memperoleh penerimaan dari nilai Karbon yang dicadangkan.

7. **Sarana dan Prasarana Wilayah**

   Kabupaten Dharmasraya sudah berdiri selama 21 tahun. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Selain perkantoran, juga masih minimnya sarana perdagangan (pasar) representatif dan secara umum masih berupa pasar dengan bangunan semi permanen dan secara umum pasar yang ada merupakan pasar nagari.

Aspek Tata Kelola Pemerintah

1. Transformasi digital

   Transformasi digital membutuhkan sistem pengolahan informasi, infrastruktur teknologi (jaringan dan pusat data) dan sumberdaya manusia yang melek teknologi untuk mengoperasikannya. Kemampuan transformasi digital untuk mengkoordinasikan data pembangunan akan memudahkan kegiatan manajemen pemerintahan. Digitalisasi pemerintah belum optimal hal ini terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Masalah transformasi digital menyangkut masalah penataan sistem manjemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan peningkatan literasi teknologi digital oleh masyarakat. Saat ini pelayanan teknologi digital di masyarakat baru meliputi 46,9% dari kebutuhan masyarakat. Ini artinya belum separoh dari kebutuhan masyarakat belum terpenuhi.

   Masalah dalam penataan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia terampil, dan hambatan budaya terhadap perubahan. Konektivitas internet dan kurangnya akses teknologi menghambat implementasi. Pendanaan yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sistem Teknologi Informasi. Kesenjangan literasi digital masih cukup tinggi. Masih banyak wilayah terpencil dan pedesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital seperti konektivitas internet yang buruk dan kurangnya akses terhadap perangkat teknologi, sehingga kedepannya tidak ada lagi daerah tidak mendapatkan sinyal di Kabupaten Dharmasraya.

   Dengan konektivitas wilayah yang telah terbangun dan direncanakan dibangun, kabupaten Dharmasraya akan semakin terintegrasi melalui Kerjasama ekonomid

aerah dengan tujuh kabupaten yang berbatasan di wilayah Sumatera Bagian Tengah. Dalam lima sampai sepuluh tahun lagi diharapkan konektivitas wilayah akan semakin tinggi. Kabupaten Dharmasraya akan menjadi daerah lintasan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan integrasi konektivitas perlu diikuti dengan integrasi kegiatan ekonomi dengan wilayah sekitar. Dengan posisi strategisnya konektivitas yang semakin terjalin akan mendorong interaksi perekonomian regional. Pengembangan jalan regional yang menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Integrasi wilayah ini tidak hanya akan mempercepat arus barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang berkembangnya pasar, sarana pendukung pertanian, akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan berkembangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan skala regional. Kabupaten Dharmasraya perlu menyiapkan berbagai fasilitas pendukung perdagangan, pertanian serta pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala regional yang mengintegrasikan wilayah perbatasan.

2. Integrasi Pengembangan Wilayah

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang berbasis pertanian dan perkebunan membutuhkan integrasi dengan wilayah sekitar (untuk penyediaan bahan baku) agar tercapai skala ekonomi dan mebutuhkan jaringan transportasi untuk eksport dalam lingkup regional. Saat ini bahan baku yang tersedia umumnya diolah diluar Kabupaten Dharmasraya (pertanian lahan basah) sehingga nilai tambah diperoleh oleh wilayah sekitar diluar Kabupaten Dharmasraya. Dimasa yang akan datang dibutuhkan pengintegrasian ekonomi mulai dari bahan baku sampai hilirisasi agar nilai tambah diperoleh oleh Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus mendukung terjadinya ekonomi yang berintegrasi secara domestik dan regional secara bersamaan. Perkembangan ekonomi yang terintegrasi ini membutuhkan ruang dan sarana prasarana terkait dengan peningkatan kebutuhan akan permukiman yang merupakan kebutuhan lanjutan jika ekonomi berkembang. Salah satu kebutuhan lebih lanjut adalah berupa sarana dan prasarana hunian yang layak dan terjangkau.

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di perbatasan provinsi yang dilewati jalan regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan perannya penting bagi keamanan wilayah. Lalu lintas kriminalitas dan penyelundupan barang terlarang bisa dicegah pada pintu masuk wilayah seperti di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu karena posisi di perbatasan, daerah juga rawan untuk kegiatan kriminalitas antar daerah. Pencegahan kriminalitas dan penguatan koordinasi keamanan antar daerah dan antar instansi perlu ditingkatkan.

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di jalur regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan kabupaten bisa berperan penting bagi penanganan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Rumah sakit di kabupaten masih kurang memadai untuk menangani korban kecelakaan berat. Peningkatan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan untuk kecelakaan lalu lintas atau trauma center perlu diupayakan. Selain itu juga meningkatkan pelayanan puskesmas-puskesmas yang berpotesni untuk dijadikan sebagai rumah sakit type D.

Dengan posisi strategis Kabupaten Dharmasraya yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi serta Kabupaten Solok, Solok Selatan serta Kabupaten Sijunjung maka posisi tersebut menjadi jalur lintas bagi demand pariwisata bagian selatan terutama Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga ceruk tersebut dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya mengembangkan supply (atraksi) wisata sebelum menuju ke Solok dan Pesisir Selatan sebagai pusat pariwisata Sumatera Barat Bagian Selatan. Oleh sebab itu perlu didukung aksesibilitas yang tinggi menuju kawasan tersebut.

3. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

   Prestasi Kabupaten Dharmasraya Sejak tahun 2015 selama 8 (delapan) kali berturut-turut menerima WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai reformasi birokrasi Kabupaten Dharmasraya terus meningkat setiap tahun meskipun masih belum tinggi dengan kategori nilai CC. Pembenahan regulasi dan tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

   Masalah dalam regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah meliputi berbagai hal seperti tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang kompleks yang mengakibatkan hambatan terhadap investasi dan perkembangan ekonomi daerah. Selain itu kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum terintegrasi mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

   Berbagai program dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan seperti melakukan harmonisasi regulasi untuk memastikan konsistensi kebijakan dan meneruskan reformasi birokrasi untuk menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur administratif. Kompetensi aparatur daerah perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Demikian juga pengembangan dan integrasi sistem informasi yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik serta mendukung kebijakan publik yang tepat.

4. Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah

   Akses pelayanan hukum yang inklusif dibutiuhkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan oleh sebab itu dibutuhkan penyusunan produk hukum yang inklusif yang melibatkan semua stakeholders terutama kelompok masyarakat. Perlu diidentifikasi

kebutuhan produk hukum terutama yang terkait dengan kewenangan daerahdan penilaian produk tersebut, apakah sudah mencerminkan keadilan atau belum. Dengan demikian keamanan daerah akibat dari produk hukum yang berkeadilan akan mudah dilakukan
Kerjasama Antar Wilayah

Kerjasama antara wilayah dan instansi perlu dilakukan dalam penyediaan prasarana, konservasi kawasan dan situs bersejarah, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kerjasama antar wilayah tersebut meliputi pembangunan konektivitas jaringan jalan pada daerah berbatasan dan kerjasama pengembangan badan usaha ekonomi daerah dan nagari dengan lembaga ekonomi di daerah lain. Sementara kerjasama antar lembaga bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama seperti pengelolaan dan penelitian kawasan dan situs bersejarah dengan lembaga pelestarian cagar budaya dan perguruan tinggi, pengembangan pendidikan tinggi dan vokasional dengan perguruan tinggi, dan kerjasama mensinergikan upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan serta kerjasama dan koordinasi pengelolaan DAS Batanghari.

5. Beagama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
   Kabupaten Dharmasraya meskipun dengan etnis yang heterogen memiliki basis adat dan agama yang menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun. Akan tetapi beberapa masalah agama dan budaya perlu menjadi catatan untuk membangun kehidupan yang harmonis dimasa depan. Masalah perbedaan cara pandang dan pemahaman keagamaan kadang-kadang bisa memicu ketegangan sosial. Pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran dan adanya lembaga yang memayungi kehidupan keagamaan menjadi dasar bersama untuk menwujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

   Generasi muda sangat rentan terhadap pergeseran nilai budaya yang diidorong oleh teknologi informasi. Masalah utama adalah kurangnya ruang ekspesi dan sosialisasi menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memberi mudarat. Oleh karena itu dibutuhkan wadah ruang dan lembaga untuk memperkuat identitas, menanamkan nilai dan berekspresi bagi mereka.

   Kabupaten Dharmasraya memiliki akar historis budaya dimana namanya diambil dari Kerajaan Dharmasraya yang pernah jaya setelah kerajaan Sriwijaya runtuh dimana Dharmasraya menjadi kerajaan terbesar di Sumatera. Identitas budaya ini menjadi aset budaya yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Berbagai kegiatan konservasi dan festival berdasarkan jejak historis masa lalu perlu diteruskan dan ditambah.

   Dengan demikian, permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah

yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk diselesaikan yaitu:

Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama melalui peningkatan kualitas capaian gizi, kesehatan, akses pendidikan dini, dan mutu pendidikan yang mengkombinasikan capaian kognitive psikomotorik, IT dan karakter dan Agama. Ini sangat perlu dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka. Pada dasarnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya.

6. Masih tingginya angka kemiskinan

Dilihat berdasarkan data tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 5,56%, angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Dharmasraya, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang masih relatif rendah.

Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Perekonomian Kabupaten Dharmasraya masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2023 meningkat positif, meskipun sangat melambat pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan

ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Perekonomian Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; sektor pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan kontruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK terbesar yaitu pada: sektor Informasi dan Komunikasi: jasa lainnya; dan akomodasi. Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDBR di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukan dari Rasio Gini Dharmasraya. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Dharmasraya semakin menurun.

Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2020 sebesar 67,94 masuk dalam kategori cukup. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualiatas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.

Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Dharmasraya terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Dharmasraya yang sebesar 130,03 di tahun 2023, atau pada kategori sedang.

Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 57,28 (CC) meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 50,20 (CC). Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya

2.8.2. Permasalahan Perurusan Pemerintahan

Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

   Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Kabupaten Dharmasraya yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

   - Angka rata-rata lama sekolah lebih rendah dari provinsi dan nasional;
   - Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas pembelajaran (seperti ruang kelas SD dan SMP) dalam kondisi baik;
   - Masih relatif rendahnya dimensi pengetahuan/ pendidikan dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat

- Masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE), ruang kelas dan UKS
- belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD
- belum optimalnya pelaksanaan pendidikan ke-orangtuaan (Parenting) dan peran orang tua di sekolah
- Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya tenaga pendidik pada sekolah dasar
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah serta pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SD dan SLTP

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

- Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terjadinya pendarahan saat melahirkan, usia ibu saat hamil, masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan, masih ada persalinan ditolong oleh non kesehatan.
- Belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin, masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi. Masih ditemui remaja anemia, ibu hamil KEK.
- Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

- Masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, disebabkan oleh penyakit infeksi dan kekurangan gizi.
- Kematian pada bayi juga disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan,
- Kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

c. Prevalensi Malnutrisi

Masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil menderita kurang energi protein akan berpengaruh pada gangguan fisik, mental dan kecerdasan anak, juga meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi.

d. Persentase Rumah Tangga PHBS

- masih rendahnya indikator PHBS yaitu merokok, dimana indikator merokok sangat mempengaruhi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kabupaten Dharmasraya sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok seharusnya dengan adanya peraturan tersebut memperkuat orang tidak merokok.
- Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam
- Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam di Kabupaten Dharmasraya sudah semua kasus kejadian luar biasa tertangani
- Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Permasalahan yang terjadi pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Dharmasraya adalah belum semua masyarakat yang beresiko mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasilitas kesehatan.
- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular
- Masih adanya ditemui kasus pasung pada ODGJ berat, dan masih kurangnya peranan keluarga dalam pendampingan pasien minum obat pada kasus TBC dan ODGJ berat.
- Visite Rate
- Masih kurangnya pemahaman fasilitas kesehatan dengan definisi operasional (DO) visite rate.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya, proposrsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 58,15%.
- Pembangunan jalan tidak diiringi dengan pembangunan drainase jalan kabupaten terutama pada daerah rawan genangan
- Sebagian besar kondisi jembatan tidak baik
- Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
- Masih kurangnya dinding pengamanan sungai terutama pada kawasan perumahan dan permukiman
- Belum seluruh rumah tangga terlayani air minum perpipaan
- Kelembagaan pengelolaan air minum masih berupa UPT Air Minum
- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman;
- rumah masyarakat sudah memiliki tangki septik tetapi belum semuanya memenuhi ketentuan teknis.
- Terbatasnya pelayanan sedot tinja
- Kurangnya sarana dan prasarana IPLT
- Belum semua PD memiliki gedung miulik sendiri dan yang representatif
- Minimnya regulasi terkait bangunan gedung

- Belum adanya rencana rinci/RDTR yang ditetapkan sebagai rujukan bagi perizinan yang berskala besar, dimana RTRW merupakan rencana umum sehingga ketentuan-ketentuan rinci tidak dapat ditampilkan secara spesifik
- Belum optimalnya peran kelembagaan penataan ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- Masih belum terpenuhinya kecukupan prasarana dan sarana umum (PSU) permukiman.
- Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
- Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak tertangani
- Masih adanya gangguan trantibum
- Masih kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang trantibum
- Wilayah kerja pemadan kebakaran belum sesuai dengan standar pelayanan.
- Belum adanya pembentukan nagari tangguh bencana
- Masih kurangnya SDM yang terlatih dalam menanggulangi kebencanaan
- Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum semua PD memiliki akses kaum disabilitas
- Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat
- Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah, hal ini terlihat dari data perkembangan IPG tahun 2018 hingga tahun 2022, maka perkembangan IPG Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan positif, namun perkembangannya tidak sebagus nasional dan provinsi.
- Masih adanya kasus kekerasan pada anak;
- Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;

Permasalahan Pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Belum semua peserta lulusan pelatihan ditempatkan pada dunia kerja

- Masih adanya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
- Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
- Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Keragaman konsumsi pangan masih rendah
- Kebiasaan/pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- Pemanfaatan pangan lokal non beras sebagai sumber energi belum maksimal

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Belum seluruhnya tanah milik pemerintah bersertifikat
- Belum semua sekolah dan instansi pemerintah memiliki sertifikat
- Masih adanya konflik pertanahan di masyarakat
- Masih belum adanya pemetaan tanah milik ulayat

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
- Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan sampah di TPA
- Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di TPA
- Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya capaian penerbitan kartu identitas anak
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan kematian

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM..
- Belum berkembangnya skala usaha BUMNag
- Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Nagari

- Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
- Belum adanya pembangunan nagari berbasis kawasan

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih ada pasangan usaha subur yang belum berKB
- Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Masih kurangnya rambu-rambu atau perangkat jalan sehingga sering terjadi kecelakaan
- Belum adanya dokumen kebijakan terkait lalu lintas atau master plan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
- Belum adanya terminal angkutan orang

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (keterbukaan informasi publik)
- Belum seluruhnya sistem informasi berjalan secara terintegrasi
- Belum seluruh nagari memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM)
- Belum kurang updatenya perangkat daerah memberikan informasi publik

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang pembubaran koperasi yang tidak aktif
- Masih rendahnya komitmen pengurus koperasi dalam peningkatan kinerja dan volume usaha
- Belum seluruhnya UMKM dapat meningkatkan akses terhadap pasar offline dan online
- Masih terbatasnya akses UMKM dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Masih adanya regulasi yang belum mendukung dalam peningkatan investasi daerah
- Masih terdapatnya sistem data base perizinan secara manual

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Masih kurangnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
- Masih kurangnya pembinaan cabang olahraga prestasi
- Belum optimalnya pemanfaatan GOR

- Masih terdapatnya beberapa cabang olahraga yang belum memiliki pelatih bersertifikat
- Masih kurangnya pemuda berprestasi
- Belum optimalnya jumlah organisasi pramuka yang aktif

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Masih kirangnya ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral
- Belum handalnya pencatatan data sektoral di SKPD
- Belum seluruh nagari dan kecamatan terbentuk sebagai nagari statistik dan kecamatan statistik

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
- Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
- Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Masih kurangnya group kesenian yang dapat dibina
- Masih kurangnya kesenian daerah yang dilestarikan.
- Belum optimalnya peran serta lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan
- Sedikitnya Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan
- Masih belum optimalnya inventarisasi dan observasi benda dan tak benda cagar budaya yang ditetapkan

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Belum adanya gedung layanan perpustakaan
- Masih rendahnya minat baca
- Masih rendahnya layanan kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
- Masih belum optimalnya manajemen perpustakaan (daerah, sekolah dan TBM)

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Belum semua OPD dan nagari mengelola arsip secara baku

Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi perikanan
- Relatif rendahnya produktifitas perikanan budidaya

- Menurunnya kualitas air mengakibatkan produksi dan keanekaragaman perikanan tangkap menurun

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Belom optimalnya inventarisasi dan pengelolaan destinasi
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- Belum adanya even tahunan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
- Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat,
- Pengelolaan limbah pertanian dan limbah ternak yang belum terkelola

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Secara umum pasar yang ada tidak representatif
- Pengelolaan sampah pasar yang belum optimal
- Masih adanya alat-alat metrologi yang belum terstandar

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Masih rendahnya daya saing produk IKM
- Belum optimalnya pemanfaatan IKM Logam

Permasalahan Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

- Masih kurangnya ketersediaan dan keakuratan data
- Pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

Keuangan

- Masih tingginya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah terhadap dana tranfer

Kepegawaian

- Rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS
- terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansi
- belum adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan

Pendidikan dan Pelatihan

- Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya aparatur

Penelitian dan Pengembangan

- Masih kurangnya lembaga untuk melakukan kerjasama penelitian
- Masih kurangnya inovasi yang diciptakan OPD dalam pelaksanaan urusan

Permasalahan Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya penanganan masalah kasus penyakit masyarakat dan Konflik Sosial
- Belum optimalnya forum-forum Strategis Kesbangpol yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
- Lemahnya system pelaporan dari nagari dan kecamatan mengenai situasi dan kondisi daerah.
- maraknya penyalahgunaan kasus narkoba dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Tokoh masyarakat adat setempat.
- permasalahan mengenai Konflik yang terjadi mengenai batas tanah ulayat telah di adakan koordinasi dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara perusahan dengan warga masyarakat dengan melibatkan pemda dan Aparat yang berwajib.

2.8.3. Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya

2.8.3.1. Isu Global

Pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari dinamika global yang menghadirkan berbagai tantangan strategis. Meskipun berskala nasional dan internasional, dampaknya dapat dirasakan secara langsung di tingkat daerah, termasuk pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hingga pelayanan publik. Adapun tantangan global utama yang berpotensi memengaruhi arah pembangunan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global

Ketidakstabilan ekonomi global ditandai oleh fluktuasi harga komoditas, tingginya suku bunga global, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa. Ketidakpastian ekonomi global merupakan salah satu tantangan eksternal yang signifikan terhadap keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi global ditandai oleh fluktuasi harga komoditas, suku bunga global yang tinggi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa. Kondisi ini memiliki implikasi nyata terhadap pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan pada sektor pertanian dan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet, Kabupaten Dharmasraya sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Penurunan permintaan dan harga komoditas dapat berdampak langsung pada pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi lokal, penguatan hilirisasi, dan pengembangan pasar domestik menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Pertama, fluktuasi harga komoditas global, khususnya komoditas pertanian dan perkebunan seperti sawit, karet, dan batu bara, sangat berdampak pada daerah yang perekonomiannya bergantung pada sektor primer. Penurunan harga komoditas di pasar global akan menyebabkan berkurangnya pendapatan petani dan pelaku usaha lokal, serta berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan angka kemiskinan, memperlemah konsumsi rumah tangga, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua, kebijakan suku bunga global yang tinggi, terutama dari bank sentral negara-negara maju seperti The Fed (AS) dan ECB (Eropa), dapat menekan arus investasi dan likuiditas ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya terhadap daerah antara lain adalah terhambatnya realisasi investasi, meningkatnya biaya pendanaan bagi sektor swasta, serta terhambatnya pembangunan infrastruktur atau program strategis yang memerlukan pembiayaan dari luar daerah. Kondisi ini berpotensi memperlambat transformasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah.

Ketiga, perlambatan ekonomi di negara-negara besar berdampak pada melemahnya permintaan ekspor Indonesia, termasuk dari sektor-sektor unggulan daerah. Hal ini menyebabkan rantai nilai ekspor terganggu dan menurunkan kontribusi ekspor terhadap pendapatan masyarakat di daerah. Kabupaten atau kota yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar internasional akan merasakan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan daerah.

Secara keseluruhan, ketidakpastian ekonomi global memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memperkuat fondasi ekonomi lokal dengan mendorong diversifikasi ekonomi, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan daya saing sektor UMKM dan industri kreatif. Selain itu, pengelolaan fiskal yang hati-hati, penguatan jejaring kerja sama antarwilayah, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat menjadi bagian integral dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan di tengah tekanan global yang terus berubah.

2. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan

Perubahan iklim global, seperti naiknya suhu rata-rata bumi, pergeseran pola hujan, serta meningkatnya intensitas bencana alam (banjir, kekeringan, dan tanah longsor) memberikan dampak nyata terhadap sektor pertanian dan lingkungan di Kabupaten

Dharmasraya. Sebagai daerah dengan basis ekonomi agraris, penurunan produktivitas lahan, gangguan pola tanam, serta meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan dapat mengganggu ketahanan pangan, memicu konflik sumber daya, dan mengancam stabilitas sosial masyarakat. Tindakan mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk perlindungan kawasan hutan, pengelolaan DAS, serta pengembangan pertanian berkelanjutan, menjadi semakin mendesak.

Pertama, perubahan iklim berdampak langsung pada penurunan produktivitas sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan yang tidak menentu mengganggu siklus tanam dan panen, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Di banyak daerah, terutama yang bergantung pada pertanian rakyat, hal ini menimbulkan penurunan pendapatan petani dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga. Ketergantungan terhadap pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal membuat daerah sangat rentan terhadap gejolak iklim yang ekstrem.

Kedua, krisis lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta berkurangnya tutupan hutan menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada keseimbangan alam dan daya dukung lingkungan. Hal ini tidak hanya mengganggu produktivitas ekonomi jangka panjang, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis yang merusak infrastruktur, pemukiman, dan fasilitas umum.

Ketiga, tekanan terhadap sumber daya alam dan terganggunya penghidupan masyarakat akibat perubahan iklim berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Ketimpangan akses terhadap lahan subur, air bersih, dan sumber daya lainnya bisa memicu konflik horizontal, pergeseran mata pencaharian secara paksa (misalnya dari petani menjadi buruh informal), dan migrasi internal yang tidak terencana. Jika tidak ditangani secara tepat, hal ini dapat memunculkan masalah sosial baru seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, hingga meningkatnya beban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar.

Oleh karena itu, dalam merespons dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan, pembangunan daerah harus diarahkan pada strategi adaptasi dan mitigasi iklim, seperti pembangunan pertanian ramah lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), serta peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan integrasi perencanaan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial.

3. Transformasi Teknologi Digital Global

Kemajuan teknologi digital di tingkat global menciptakan tekanan dan tuntutan baru terhadap digitalisasi di semua lini, termasuk pelayanan publik dan sektor ekonomi lokal. di Kabupaten Dharmasraya, tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi

dalam tata kelola pemerintahan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika tidak direspons dengan cepat, hal ini berisiko memperlebar kesenjangan digital antarwilayah dan menghambat daya saing daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong percepatan transformasi digital secara inklusif, termasuk penguatan ekosistem UMKM digital, pendidikan berbasis teknologi, serta layanan publik berbasis elektronik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, salah satu dinamika strategis yang terus berkembang adalah percepatan transformasi teknologi digital. Pandemi global, disrupsi rantai pasok, serta perubahan pola konsumsi dan produksi mendorong negara-negara di dunia untuk memperkuat sistem digital sebagai penopang ekonomi dan pemerintahan. Di sisi lain, tekanan ekonomi global menyebabkan keterbatasan fiskal, penurunan investasi, dan konsolidasi anggaran baik di tingkat nasional maupun daerah yang berimplikasi pada lambatnya adopsi teknologi, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal dan infrastruktur yang terbatas.

Pertama, percepatan digitalisasi global menimbulkan kesenjangan antara daerah yang telah siap dengan infrastruktur dan sumber daya digital, dan daerah yang masih tertinggal secara teknologi. Ketertinggalan dalam transformasi digital menyebabkan pelayanan publik daerah menjadi kurang efisien, kurang transparan, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

Kedua, sektor ekonomi lokal terutama UMKM, pertanian, dan perdagangan tradisional menghadapi tekanan akibat perubahan perilaku pasar yang semakin berbasis digital. Ketika pasar global dan nasional bergerak menuju ekonomi digital, daerah yang belum mampu menyediakan akses teknologi, literasi digital, dan ekosistem bisnis berbasis digital akan tertinggal dalam hal daya saing ekonomi, pengembangan pasar, dan penciptaan nilai tambah lokal.

Ketiga, dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, digitalisasi seharusnya menjadi solusi efisiensi dan peningkatan produktivitas. Namun, keterbatasan anggaran akibat tekanan fiskal, tingginya suku bunga global, dan menurunnya investasi membuat transformasi digital di daerah cenderung terhambat. Hal ini memperlambat integrasi sistem informasi pemerintah, pengembangan smart city, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi digital.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, daerah perlu memperkuat kebijakan dan program transformasi digital yang inklusif, dengan prioritas pada:

- Peningkatan literasi digital masyarakat dan ASN;
- Penyediaan infrastruktur TIK yang merata hingga pedesaan;
- Penguatan ekosistem UMKM digital;
- Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis elektronik (SPBE);
- Dan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan pemerintah pusat.

Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan daerah tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah disrupsi global yang terus berlangsung.

4. **Ketegangan Geopolitik Global dan Krisis Pangan mepengaruhi Rantai Pasok dan Inflasi Daerah**

   Konflik geopolitik regional, seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah maupun Asia Timur, berdampak terhadap stabilitas rantai pasok global, terutama di sektor energi dan pangan. Implikasinya terasa dalam bentuk lonjakan harga bahan pangan, pupuk, dan energi yang menekan inflasi di daerah. Kabupaten Dharmasraya berpotensi terdampak melalui naiknya biaya produksi pertanian dan berkurangnya daya beli masyarakat. Ketahanan pangan lokal dan penguatan kemandirian pasok menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah di tengah ketidakpastian global.

   Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik internasional seperti konflik regional (perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah dan Asia Timur) serta krisis pangan global menjadi faktor eksternal yang memberikan tekanan nyata terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Dharmasraya. Ketegangan antarnegara tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok global, fluktuasi harga energi dan bahan pangan, serta meningkatnya risiko inflasi yang merembes hingga ke tingkat lokal.

   Pertama, konflik geopolitik global menyebabkan gangguan terhadap distribusi pangan, pupuk, dan energi, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi sektor pertanian dan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya. Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk dan pangan tertentu menjadikan harga barang-barang kebutuhan pokok sangat sensitif terhadap situasi global. Akibatnya, masyarakat lokal menghadapi kenaikan harga bahan pokok, yang pada gilirannya menurunkan daya beli dan meningkatkan beban hidup terutama bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

   Kedua, gangguan rantai pasok global juga berdampak pada sektor perdagangan dan distribusi di tingkat daerah. Biaya logistik yang meningkat akibat naiknya harga bahan bakar global memperbesar ongkos distribusi barang ke dan dari Kabupaten Dharmasraya, terutama karena letak geografisnya yang relatif jauh dari pusat industri utama. Hal ini dapat memperlemah daya saing produk lokal dan memperlambat pergerakan ekonomi domestik.

Ketiga, tekanan inflasi akibat krisis pangan dan energi berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program sosial dan ekonomi, di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan sosial serta keterbatasan fiskal. Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) pun terdampak karena naiknya harga bahan baku dan biaya produksi, yang pada akhirnya menekan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah gejolak global, Kabupaten Dharmasraya perlu memperkuat ketahanan ekonomi lokal, antara lain melalui:

- Penguatan ketahanan pangan lokal dengan mendukung produksi pertanian berbasis teknologi dan efisien sumber daya,
- Diversifikasi ekonomi dan pasar, agar tidak terlalu bergantung pada sektor atau komoditas tertentu,
- Serta pengembangan logistik dan distribusi yang lebih efisien untuk memperkecil dampak rantai pasok global yang terganggu.

Di tengah ketidakpastian global, kemandirian daerah dalam penyediaan kebutuhan dasar dan stabilitas harga menjadi kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, krisis pangan, disrupsi rantai pasok, serta dampak perubahan iklim telah menciptakan tekanan yang kompleks terhadap pembangunan daerah. Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian, sumber daya alam, dan ekonomi daerah skala kecil-menengah, berada dalam posisi yang rentan terhadap gejolak eksternal tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu mengarahkan respons kebijakan yang bersifat adaptif, proaktif, dan kontekstual, dengan berfokus pada tiga strategi utama:

1. **Penguatan Ketahanan Pangan Daerah**

   Krisis pangan global dan gangguan rantai pasok berdampak pada lonjakan harga pangan dan kelangkaan komoditas tertentu. Kabupaten Dharmasraya sebagai wilayah agraris memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

   Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan dengan mendorong:

   - Diversifikasi komoditas pangan lokal (tidak hanya bergantung pada padi),
   - Modernisasi pertanian berbasis teknologi tepat guna,

- Pengembangan lumbung pangan desa dan sistem distribusi lokal,
- Peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani.

Langkah ini akan menurunkan ketergantungan pada pasokan luar daerah atau impor, menstabilkan harga pangan di tingkat lokal, serta menjaga ketahanan gizi masyarakat.

2. **Penguatan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

Fluktuasi harga komoditas global dan tekanan inflasi berdampak pada pendapatan petani, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketahanan ekonomi lokal menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan lapangan kerja.

Respon kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain:

- Mendorong hilirisasi komoditas unggulan (seperti kelapa sawit, karet, dan pertanian pangan),
- Pemberdayaan UMKM berbasis lokal dengan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar digital,
- Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata lokal,
- Pemanfaatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dengan memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, Dharmasraya tidak hanya bertahan dari tekanan global, tetapi juga tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

3. **Integrasi Isu Perubahan Iklim dalam Kebijakan Daerah**

Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi telah menjadi isu ekonomi, sosial, dan pembangunan. Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah yang memiliki hutan, lahan pertanian, serta DAS penting, harus menjadikan adaptasi iklim sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

Pemerintah daerah perlu:

- Mengintegrasikan risiko iklim ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJPD, KLHS dokumen perencanaan (KLHS RPJPD, RPJMD dan RTRW), serta dalam dokumen RTRW,
- Mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi di fasilitas publik,
- Rehabilitasi kawasan hutan dan perlindungan sumber air,
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana iklim.

Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, perlindungan aset publik, dan kelangsungan mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian dan perdesaan.

2.8.3.2. Isu Nasional dan Regional

Isu strategis nasional yang relevan diadopsi dalam rencana pembangunan Kabupaten Dharmasraya :

1) **Hilirisasi, ketahanan pangan dan pembangunan berwawasan lingkungan.**

   Kecilnya rasio sektor industri dalam PDRB menjadi dasar untuk meningkatkan hilirisasi komoditi pertanian dan pertambangan. Ketahanan pangan di kabupaten dilakukan melalui intensifikasi, refungsi sawah dan pencetakan sawah baru. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan menjadi pedoman kabupaten untuk mempertahankan tutupan hutan dan kelestarian ekosistem DAS Batanghari.

2) **APBN 2025–2029 diprediksi akan terus fokus pada penguatan sektor produktif, SDM, dan belanja sosial**

   Dalam periode 2025–2029, pembangunan nasional diproyeksikan akan menghadapi sejumlah tantangan strategis yang turut memengaruhi pembangunan di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Dharmasraya. Tantangan ini terutama terkait dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan fiskal pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

   Pemerintah pusat diperkirakan akan tetap mempertahankan arah kebijakan fiskal yang berfokus pada penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan belanja sosial. Fokus ini menjadi penting dalam menjawab tantangan nasional seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.

   Bagi Kabupaten Dharmasraya, tantangan nasional ini memiliki beberapa implikasi penting:

   a. **Ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah**
      Sebagai kabupaten yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal, Dharmasraya masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Ketika APBN diarahkan pada efisiensi belanja dan fokus pada program prioritas nasional, akan terjadi pengetatan seleksi dan pengawasan alokasi anggaran, sehingga daerah perlu semakin mampu menyusun program pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional agar tetap memperoleh dukungan pendanaan yang optimal.

b. Tuntutan terhadap Peningkatan Sektor Produktif Lokal

Dengan fokus APBN pada penguatan sektor produktif, maka pemerintah daerah perlu memacu pengembangan sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, serta UMKM. Dharmasraya harus mampu menyesuaikan strategi pembangunan ekonominya agar sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

c. Peningkatan Mutu SDM dan Pelayanan Dasar

Tantangan nasional berikutnya adalah bagaimana daerah bisa mempercepat pencapaian indikator pembangunan manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Karena APBN nasional akan terus diarahkan untuk mendukung penguatan SDM, maka Pemkab Dharmasraya dituntut untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana pendidikan dan kesehatan agar betul-betul berdampak pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengurangan stunting, serta pemenuhan layanan dasar berkualitas.

d. Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi dan inflasi, belanja sosial nasional akan tetap menjadi prioritas. Namun, dengan keterbatasan fiskal pusat dan peningkatan kebutuhan sosial di daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus aktif memperkuat mekanisme perlindungan sosial lokal, baik melalui integrasi data kemiskinan (DTKS), pemanfaatan dana desa untuk program padat karya, maupun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tantangan nasional terkait ekonomi dan kebijakan fiskal akan terus menuntut daerah seperti Kabupaten Dharmasraya untuk lebih adaptif, terukur, dan sinergis dalam merancang program pembangunan. Selaras dengan arah APBN 2025–2029 yang memprioritaskan sektor produktif, SDM, dan belanja sosial, Pemkab Dharmasraya harus memperkuat perencanaan berbasis data, mendorong inovasi pendanaan daerah, dan memastikan bahwa seluruh program pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3) Tekanan Defisit dan Kewajiban Utang terhadap Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam periode perencanaan 2025–2029, pemerintah pusat masih dihadapkan pada tantangan besar berupa tekanan defisit anggaran dan meningkatnya kewajiban pembayaran utang, baik dari sisi pokok maupun bunga. Kondisi ini menjadi

tantangan struktural dalam pengelolaan fiskal nasional dan memberikan dampak signifikan terhadap daerah, termasuk Kabupaten Dharmasraya.

Pasca pandemi dan dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah pusat berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan belanja produktif dan kewajiban fiskal. Namun, proyeksi defisit yang masih tinggi dan rasio utang yang meningkat menyebabkan ruang fiskal APBN menjadi semakin sempit, dan ini berpotensi mengurangi fleksibilitas anggaran untuk mendanai berbagai program pembangunan di daerah.

Dampak terhadap Kabupaten Dharmasraya:

1. Potensi Penurunan atau Penyesuaian Transfer ke Daerah
   Dengan prioritas fiskal nasional yang lebih ketat, terdapat kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap besaran transfer ke daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Insentif Fiskal. Kabupaten Dharmasraya, yang memiliki keterbatasan PAD dan ketergantungan pada transfer pusat, akan menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas jika alokasi tersebut berkurang atau dibatasi secara lebih selektif.

2. Pengetatan Akses Pendanaan Infrastruktur
   Dalam situasi fiskal yang terbatas, pendanaan proyek infrastruktur dari pusat, terutama melalui skema berbasis pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) atau pembiayaan investasi pemerintah, akan semakin kompetitif dan selektif. Hal ini dapat menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur dasar di Dharmasraya, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik, terutama jika tidak didukung oleh kesiapan teknis dan dokumen yang matang dari daerah.

3. Dorongan Kemandirian Fiskal Daerah yang Lebih Kuat
   Dalam jangka menengah, tekanan fiskal nasional akan mendorong kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih menuntut kemandirian keuangan daerah. Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, efisiensi belanja, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta untuk pendanaan alternatif pembangunan.

4. Risiko Perlambatan Program Sosial dan Ekonomi di Daerah
   Ketika beban fiskal nasional meningkat akibat utang dan bunga, ada risiko bahwa alokasi anggaran untuk program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan akan ditekan. Hal ini dapat memperlambat upaya

peningkatan kualitas hidup masyarakat di Dharmasraya, terutama di wilayah pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan.

Tekanan defisit dan kewajiban utang pemerintah pusat menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi oleh Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, efisien, dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

4) Transfer ke daerah (TKD) kemungkinan terbatas karena belanja nasional fokus ke PSN

Dalam periode perencanaan nasional 2025–2029, arah kebijakan fiskal Indonesia diperkirakan akan tetap fokus pada penyelesaian dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya infrastruktur berskala besar yang mendukung konektivitas antarwilayah, energi, pangan, dan hilirisasi industri. Meskipun tujuan PSN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang, implikasinya terhadap daerah perlu dicermati secara serius.

Salah satu konsekuensi utama dari fokus ini adalah potensi pengetatan ruang fiskal bagi pemerintah pusat, yang berdampak pada terbatasnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Dampak terhadap Pembangunan Kabupaten Dharmasraya:

1. Tekanan terhadap Kapasitas Pembiayaan Program Prioritas Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang secara fiskal masih sangat bergantung pada TKD, berpotensi mengalami pengurangan atau stagnasi pertumbuhan dana transfer, khususnya untuk mendanai infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program sosial. Hal ini dapat memperlambat pencapaian target pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pendanaan alternatif.
2. Kesenjangan antara Proyek Nasional dan Kebutuhan Lokal
   Fokus anggaran pusat pada PSN nasional belum tentu selalu selaras dengan prioritas kebutuhan spesifik daerah seperti pembangunan jalan lokal, irigasi pertanian kecil, pasar rakyat, atau layanan dasar di pedesaan. Akibatnya, terjadi risiko marginalisasi pembangunan lokal, terutama di wilayah yang tidak menjadi lokasi langsung proyek PSN, seperti Dharmasraya.
3. Meningkatnya Tuntutan Kemandirian Fiskal Daerah. Dalam situasi transfer fiskal yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengefisienkan belanja

daerah, serta mengembangkan skema pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan swasta (KPBU), BUMDes, maupun integrasi program lintas sektor.

4. Pentingnya Integrasi Program Daerah dengan Arah Pembangunan Nasional Untuk tetap memperoleh dukungan pendanaan, daerah harus mampu menyelaraskan perencanaan daerah dengan prioritas nasional, baik melalui usulan program yang mendukung PSN secara tidak langsung (seperti infrastruktur penunjang, pendidikan vokasi, dan ketahanan pangan), maupun dengan menunjukkan kesiapan teknis dan kelayakan proyek.

Berdasarkan hal tersebut, terbatasnya ruang fiskal untuk transfer ke daerah akibat fokus belanja nasional pada PSN merupakan tantangan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perencanaan yang adaptif, realistis, dan proaktif, agar pembangunan di daerah tetap berlanjut secara berkeadilan. Peningkatan efisiensi fiskal, inovasi pembiayaan lokal, serta penguatan sinergi program dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal nasional.

Pendapatan negara masih bergantung di sektor tambang dan ekspor komoditas yang volatilitasnya berdampak ke alokasi dana pusat. Salah satu tantangan struktural nasional dalam periode 2025–2029 adalah masih tingginya ketergantungan pendapatan negara terhadap sektor pertambangan dan ekspor komoditas, seperti batubara, nikel, dan kelapa sawit. Meskipun sektor ini menjadi andalan dalam menopang penerimaan negara, sifatnya yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global menjadikan pendapatan negara rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan internasional. Ketika harga komoditas internasional menurun atau terjadi pelemahan ekspor akibat perlambatan ekonomi global, maka pendapatan negara dari pajak dan royalti juga akan menurun. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kapasitas belanja pemerintah pusat, termasuk alokasi dana transfer ke daerah, serta kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan program strategis.

Dampak yang akan dirasakan Kabupaten Dharmasraya kedepan yaitu:

1. Potensi Penurunan Dana Transfer Akibat Fluktuasi Penerimaan Pusat Kabupaten Dharmasraya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai sebagian besar program pembangunan. Ketika pendapatan nasional melemah akibat penurunan harga komoditas, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian anggaran, termasuk dalam belanja ke daerah. Ini akan berdampak pada terhambatnya program prioritas, khususnya di sektor pelayanan dasar, infrastruktur, dan bantuan sosial.
2. Volatilitas Harga Komoditas Berdampak Ganda, Kabupaten Dharmasraya sendiri memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan pertanian

yang sebagian besar juga diekspor atau dikaitkan dengan harga pasar global. Volatilitas harga menyebabkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal tidak stabil, dan berdampak pada konsumsi, investasi, serta potensi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Hal ini menciptakan tantangan ganda: ketidakpastian di tingkat pusat dan ketidakpastian ekonomi lokal secara bersamaan.

3. Ketergantungan terhadap Ekonomi Ekstraktif Perlu Dikurangi
   Ketergantungan pusat terhadap sektor tambang mencerminkan perlunya perubahan arah ekonomi, baik nasional maupun daerah, ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Bagi Dharmasraya, ini menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian pangan, industri pengolahan skala kecil, pariwisata, dan UMKM berbasis digital.
4. Pentingnya Sinergi Perencanaan Fiskal dan Ekonomi Lokal dalam situasi fiskal nasional yang tidak stabil akibat ketergantungan komoditas, daerah tidak bisa hanya menunggu bantuan pusat. Perlu sinergi antara perencanaan fiskal daerah dengan arah pembangunan ekonomi lokal yang adaptif, efisien, dan mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang ada di wilayah sendiri.

   Terkait hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, menyikapinya dengan membuat terobosan dan inovasi agar mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan daerah harus mengembangkan strategi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyikapinya dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi strategis. Pemerintah daerah menyadari bahwa ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat tidak dapat terus dipertahankan. Oleh karena itu, langkah konkret diambil untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, upaya efisiensi belanja juga menjadi fokus utama agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan strategi ini, Kabupaten Dharmasraya diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.

5) Peluang untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan terbukanya akses wilayah.

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang terletak di perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat mempunyai keunggulan lokasi karena berada pada titik simpul jalur penghubung wilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Pulau Sumatera. Pengembangan dua akses jalan wilayah akan memicu pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dua akses tersebut yaitu:

1) Akses bebas hambatan Dharmasraya – Kuansing – Rengat

Akses jalan ini membuka hubungan antara jalan arteri primer lintas tengah dan lintas timur di wilayah tengah Pulau Sumatera. Pengembangan akses ini akan menjadikan kawasan tenggara Kabupaten Dharmasraya akan berpeluang berkembang sebagai simpul perdagangan dan jasa antar wilayah yang meliputi kabupaten berbatasan seperti Kabupaten Kerinci, Bungo, dan Solok Selatan.

2) Akses Lintas Selatan Alahan Panjang – Kiliran Jao
Akses ini akan membuka akses yang dekat antara Provinsi Riau melalui Kiliran Jao dengan Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang akan mengembangkan kegiatan perdagangan dan pariwisata antar wilayah. Pengembangan jalur ini juga akan membuka keterisoliran Kecamatan Sembilan Koto.

2.8.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis Daerah Kabupaten Dharmasraya yang dapat dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan yaitu:

1) Kesehatan untuk Semua
Meskipun berbagai indikator kesehatan di Kabupaten Dharmasraya sudah relatif lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat akan tetapi target peningkatan kualitas taraf kesehatan untuk semua masih perlu dilakukan dengan memeratakan akses kesehatan untuk masyarakat berpendapatan rendah, mengurangi tingkat kelahiran yang masih tinggi, dan penangan kesehatan sanitasi lingkungan yang layak.

2) Pendidikan Berkualitas yang Merata
Partisipasi pendidikan di Kabupaten Dharmasaraya menjadi masalah penting pembangunan. Anak-anak, remaja dan pemuda perlu diberi pendidikan yang layak dengan proporsi yang semakin besar untuk setiap jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Berbagai program pembangunan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan perlu dilakukan

3) Perlindungan Sosial yang Adaptif
Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan perlindungan anak perlu dibangun menyasar kantong-kantong kemiskinan di kabupaten. Program ini membutuhkan program terpadu dan melibatkan dukungan masyarakat luas. Oleh karena itu program perlindungan sosial dilakukan bukan saja sebagai program sektoral tetapi juga sebagai gerakan sosial. Sementara mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya membutuhkan upaya yang kreatif dan serius mengingat kendala besarnya proporsi tenaga kerja non formal dan banyaknya lapangan kerja di

sektor usaha mikro dan kecil. Stagnannya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perkebunan dan pertambangan sehingga laju penyerapan tenaga kerja akan berkurang menjadi kendala untuk mewujudkan jaminan sosial dimasa depan.

4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dimasa depan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak bisa lagi terlalu bergantung pada pertumbuhan sektor pertanian perkebunan, pertambangan sehingga dimasa depan Kabupaten Dharmasaraya perlu berinovasi dan bertransformasi mengembangkan sumber daya alam dari komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perternakan dan industri hasil pertanian yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor industri, diversifikasi komoditi hortikultura dan membangun ketahanan pangan lokal berdasarkan permintaan lokal menjadi alternatif solusi pembangunan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, dimana sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, namun disisi lain sektor lain mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingan dengan pertanian. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Dharmasraya yang bertumpu pada sektor pertanian maka sektor yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian perlu ditingkatkan.

5) Penerapan Ekonomi Hijau (disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Kabupaten Dharmasraya perlu mendiversifikasi ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian perkebunan monokultur sawit dan pertambangan. Percepatan pembangunan di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perikanan serta ekonomi kreatif menjadi alternatif untuk mewujudkan ekonomi hijau.dimasa depan. Program pembangunan untuk diversifikasi produk pertanian hijau dan percepatan pengembangan industri kecil seperti kriya dan kuliner pengolahan hasil pertanian dan pariwisata perlu diprioritaskan dimasa depan.

6) Transformasi Digital

Transformasi digital perlu menjadi program percepatan pembangunan daerah. Penataan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan membangun literasi digital masyarakat secara merata menjadi keharusan untuk membangun daerah yang maju dimasa depan.

7) Integrasi Pengembangan Wilayah sebagai Lumbung Protein

Dengan Perkembangan interkoneksi wilayah yang menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera maka membuka peluang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Integrasi wilayah ini membuka peluang berkembangnya pasar, sarana pendukung pertanian, akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal dan berkembangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan skala regional. Kabupaten

Dharmasraya perlu menyiapkan berbagai fasilitas pendukung perdagangan, pertanian serta pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala regional yang mengintegrasikan wilayah perbatasan.

8) Perdesaan dan Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Dharmasraya perlu membangun kemandirian dalam pelayanan perkotaan. Kabupaten Dharmasraya perlu membangun kemandirian dalam pelayanan kesehatan, pendidikan (menengah, vokasi dan pendidikan tinggi), serta sarana rekreasi dan belanja. di kawasan perkotaan untuk mengurangi kebocoran konsumsi penduduk dan untuk melayani kabupaten yang berbatasan seperti Kabupaten Solok Selatan, Pesisir Selatan, Kerinci, Bungo, dan Kuantan Singingi.

9) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur administratif dan meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan adanya harmonisasi regulasi dan.dukungan aparatur daerah yang kompeten. Reformasi birokrasi dan dukungan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kompetensi aparatur didukung transformasi digital menjadi titik kritis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

10) Keamanan Wilayah
Dengan posisi di perbatasan, Kabupaten Dharmasrasya rawan untuk kegiatan kriminalitas antar daerah. Kabupaten Dharmasraya memliki peran penting bagi keamanan wilayah lintas provinsi. Pencegahan kriminalitas lintas provinsi dan penyelundupan barang terlarang bisa dilakukan pada pintu masuk wilayah seperti di Kabupaten Dharmasraya. Pencegahan kriminalitas dan penguatan memerlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi keamanan antar daerah dan antar instansi.
Mengingat posisi Kabupaten Dharmasraya di jalur regional Lintas Tengah Sumatera menjadikan kabupaten bisa berperan penting bagi penanganan kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Peningkatan rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan untuk kecelakaan lalu lintas atau trauma center perlu diupayakan.

11) Stabilitas Ekonomi Makro
Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya dimasa depan dilakukan dengan mengembangkan produksi daerah yang tahan guncangan ekonomi global. Pertanian berbasis perkebunan dan pertambangan yang rentan terhadap guncangan permintaan pasar global perlu diseimbangkan dengan pengembangan komoditi pertanian berbasis permintaan lokal dan industri berbasis pertanian yang tahan terhadap guncangan fluktuasi ekonomi. Ketimpangan ekonomi berdasarkan indikator Indeks Gini sudah lebih rendah dari Provinsi sumbar dan Nasional akan tetapi

pemerataan ekonomi dan kesejahteraan dengan meningkatkan akses lahan untuk masyarakat tuna lahan akan mempercepat pengurangan ketimpangan ekonomi lebih lanjut.

12) Kerjasama Antar Wilayah dan Lembaga

Kerjasama antara wilayah dan instansi menjadi dasar membangun daerah dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada diluar daerah. Potensi Kerjasama dengan Korea Selatan, Arab dan Thailand, berupa Kerjasama perlu dilakukan dalam penyediaan prasarana, konservasi kawasan dan situs bersejarah, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kerjasama antar wilayah tersebut meliputi pembangunan konektivitas jaringan jalan pada daerah berbatasan, kerjasama seperti pengelolaan dan penelitian kawasan dan situs bersejarah, pengembangan pendidikan tinggi dan vokasional, dan kerjasama mensinergikan upaya pelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan serta kerjasama dan koordinasi pengelolaan DAS Batang Hari.

13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten/Kota)

Dua isu strategis dalam aspek beragama dan berkebudayaan yaitu, pertama, pentingnya memperkuat nilai agama dan budaya bagi generasi muda. Nilai agama penting ditanamkan pada generasi muda untuk menjaga akhlak dan menghindari perilaku menyimpang dipadukan. Penanaman nilai agama dipadukan dengan memperkuat identitas budaya yang menjadi jati diri putra daerah. Untuk itu berbagai wadah perlu dikembangkan di tingkat nagari. Fasilitas untuk mewujudkan potensi diri/ekspresi diri dan sosialisasi dalam bentuk kegiatan budaya dan agama perlu cukup disediakan.

Kedua, pentingnya membangun dengan bertumpu pada aset multikultural penduduk Dharmasaraya. Penduduk Kabupaten Dharmasraya multietnis terutama Minangkabau dan Jawa dilatarbelakangi sejarah Kerajaan Dharmasraya. Kekayaan budaya yang ada menjadi dasar untuk pengembangan berbagai produk budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi ekonomi dan pariwisata.

14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Ketimpangan gender yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi menjadi salah satu isu penting pembangunan daerah. Ketimpangan terjadi pada dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan di sektor pendidikan. Perlu program prioritas untuk meningkatkasn kesehatasn reproduksi dan akses perempuan dalam pendidikan, khususnya ibu hamil dan balita stunting. Akan tetapi disisi lain, angka TPAK perempuan kabupaten yang sudah relatif baik dibanding rata-rata provinsi menjadi modal untuk mempercepat pengurangan ketimpangan gender.

15) Lingkungan Hidup Berkualitas

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penting diagendakan pengelolaan kelestarian alam untuk kesejahteraan bersama. Beberapa isu pembangunan yaitu:

- Sungai Batanghari memberi kehidupan bagi kawasan sepanjang DAS Batanghari sehingga perlu dilihat dari dua sisi yaitu pemanfaatan potensi alam dan konservasi,
- Sungai Batanghari dan sungai kecil lainnya yang menjadi sumber irigasi dan air bersih, potensi air bakunya perlu ditingkatkan ketersediaannya dimasa depan mengingat cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan yang semakin meningkat,
- Area DAS perlu dipertahankan fungsi ekologisnya dimana kawasan hutan minimal 30 % dari luas wilayah perlu dipenuhi. Untuk itu, kegiatan konservasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga nilai jasa lingkungan dan pemulihan lahan kritis.
- kawasan sepanjang sungai Batanghari dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi hijau seperti sebagai kawasan wisata yang dipadukan dengan wisata sejarah dan pertanian minapolitan.
- Peningkatan kualitas permukiman layak huni
- Pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir sampah
- Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi layak.

16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kebutuhan energi di kabupaten secara umum telah mencukupi akan tetapi pada daerah perdesaan yang jauh dengan topografi yang sulit diakses, potensi energi lokal bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi yang murah dan berkelanjutan. Ketersediaan air bersih untuk permukiman masih rendah masih menjadi masalah prioritas untuk ditangani. Sementara pemenuhan pengairan irigasi yang sangat vital bagi produksi pertanian masih perlu terus ditambah dan direhabilitasi agar mencapai kondisi ideal layanan area pertanian.

Kabupaten Dharmasraya perlu memperkuat ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan menjadi isu nasional untuk negara sebesar Indonesia. Ditingkat lokal, Ketidakpastian pasar ekspor komoditi perkebunan sawit, karet, Kelapa, Kedele serta protein Daging menjadi salah satu pendorong perlunya memperkuat ketahanan pangan lokal. Penguatan ketahanan pangan membutuhkan sistem pendukung budidaya persawahan seperti pengairan berupa irigasi dan embung, penyediaan pupuk dan bantuan peralatan untuk pengolahan lahan tidur dan alihfungsi lahan menjadi sawah. Selain pengembangan lahan sawah, diversifikasi komoditi pertanian wilayah melalui pengembangan hortikultura perlu dilakukan.

17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

IRB Kabupaten Dharmasarya termasuk lebih rendah diantara kabupaten di Sumatera Barat. Akan tetapi tingkat kerawanan bencana daerah termasuk rendah dibandingkan daerah lain. IRB Kabupaten Dharmasraya perlu ditingkatkan terutama mengantisipasi kerawanan bencana banjir yang rawan terjadi di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung.

18) Rendahnya kemandirian fiskal Dharmasraya

Salah satu tantangan internal utama yang dihadapi Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun ke depan adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mencerminkan belum optimalnya kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berdampak langsung pada fleksibilitas dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun dan mengeksekusi program pembangunan sesuai dengan prioritas lokal. Hal ini juga berpotensi menghambat percepatan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, dan kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Di tengah dinamika fiskal nasional dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan kelembagaan pengelola PAD, digitalisasi sistem pemungutan, hingga peningkatan kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Jika tidak segera diatasi, rendahnya kemandirian fiskal dapat menjadi hambatan struktural bagi Dharmasraya dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam lima tahun ke depan, salah satu tantangan internal yang krusial bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah tingkat kemandirian fiskal yang masih tergolong rendah. Saat ini, sekitar 85% sumber pembiayaan pembangunan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta jenis dana perimbangan lainnya. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 15% terhadap total APBD, yang menunjukkan masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya kapasitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, baik dari sisi potensi yang belum tergali secara maksimal, lemahnya basis data objek pajak dan retribusi, maupun dari sisi efektivitas pemungutan dan pengawasan. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas, dan kemampuan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal menjadi tidak optimal.

Jika situasi ini tidak segera dibenahi, maka ketergantungan terhadap pusat akan terus berlanjut dan menghambat upaya mewujudkan kemandirian serta keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan nyata melalui reformasi fiskal daerah, penguatan kelembagaan pendapatan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan PAD.

Selain rentan terhadap guncangan fiskal akibat ketergantungan pada dana pusat, rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Dharmasraya juga membawa dampak serius lainnya bagi pembangunan daerah, antara lain:

1. Terbatasnya Kapasitas Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Publik. Dengan PAD yang kecil, kemampuan daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi sangat terbatas. Hal ini berpotensi menunda pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
2. Ketergantungan yang Tinggi pada Kebijakan dan Prioritas Pemerintah Pusat. Ketergantungan pada dana transfer pusat menyebabkan pembangunan daerah sering kali harus mengikuti pola dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal yang unik di Dharmasraya.
3. Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Aparatur. Ruang fiskal yang sempit juga membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah, sehingga berdampak pada kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Keterbatasan Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Minimnya dana mandiri membatasi ruang untuk pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM lokal, yang sejatinya sangat penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi kemiskinan.
5. Risiko Penurunan Kepercayaan Publik. Ketidakmampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang memadai akibat keterbatasan dana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.8.4. Isu Strategis Dalam Dokumen Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

Sedangkan untuk isu paling strategis pembangunan berkelanjutan daerah dirumuskan berdasarkan hasil isu panjang konsultasi publik, isu-isu dokumen perencanaan lainnya yang telah disusun sebelum Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Thaun 2025-2029. Berikut dapat dilihat daftar isu panjang pembangunan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya.

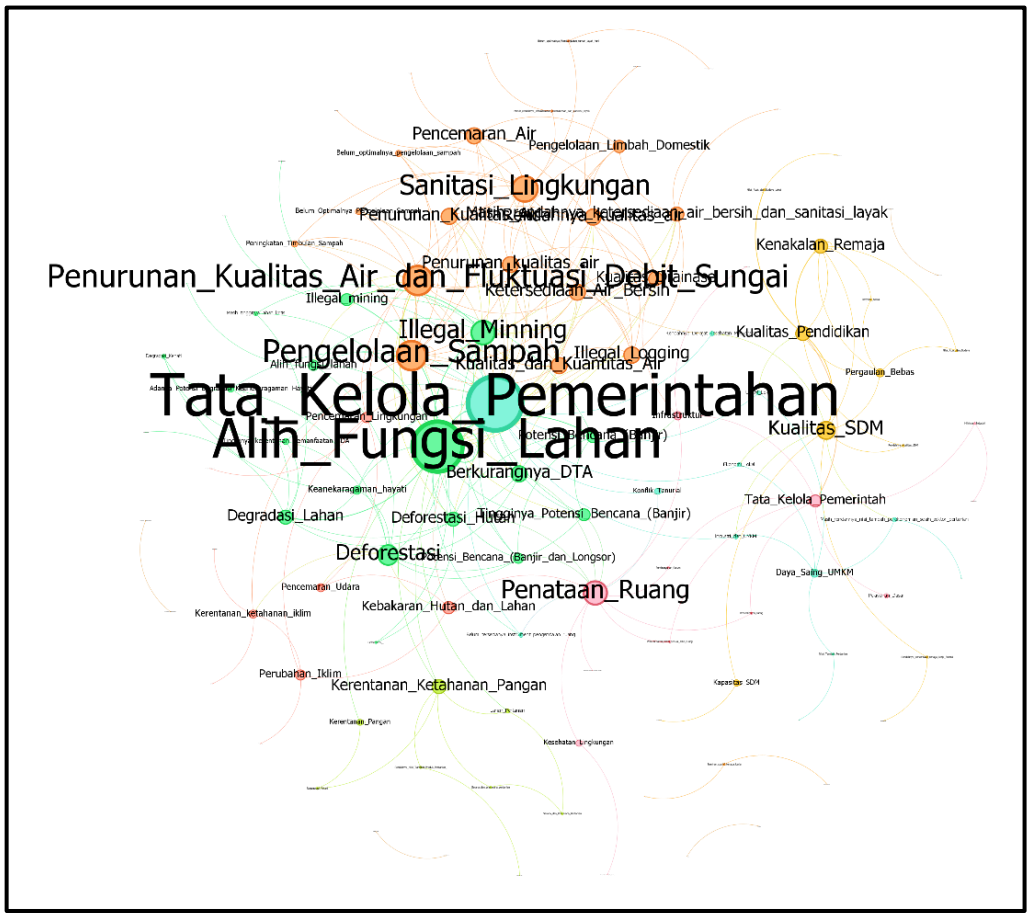
Tabel 2- 162
Daftar Isu Panjang Pembangunan BerkelanjutanDalam Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan di Kabupaten Dharmasraya

Sumber Isu	No	Daftar Isu Panjang
Karakteristik Wilayah	1	Rendahnya kualitas air
	2	Kerentanan Ketahanan Pangan
	3	Rendahnya daya tampung tempat tinggal dan ruang hidup
	4	Tingginya Potensi Bencana (Banjir)
	5	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah
	6	Tingginya kerentanan Pemanfaatan SDA
	7	Adanya Potensi Degradasi Keanekaragaman Hayati
	8	Kerentanan ketahanan iklim
Isu Berdasarkan Konsultasi Publik (KP1) Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	9	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
	10	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pertanian
	11	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasrana fasilitas umum
	12	Pencemaran air
	13	Masih rendahnya ketersediaan air bersih
	14	Pencemaran udara
	15	Belum optimalnya pengelolaan sampah
	16	Alih fungsi lahan
	17	Degradasi lahan dan lahan kritis
	18	Ketidakcukupan pangan
	19	Belum optimalnya ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan
	20	Hilirisasi produk pertanian belum terpenuhi
	21	potensi bencana (banjir, angin kencang, dan longsor)
	22	deforestasi
	23	Masih rendahnya nilai tambah industri
	24	Masih rendahnya nilai tambah pertanian
	25	Belum optimalnya perkembangan industri, koperasi dan UMKM
	26	Rendahnya kualitas SDM
	27	Belum optimalnya pendidikan ABS-SBK
	28	Berkurangnya daerah tangkapan air

Sumber Isu	No	Daftar Isu Panjang
	29	Masih maraknya penyakit sosial (narkoba, merokok dan pergaulan bebas)
	30	Rendahnya implementasi penataan ruang
Isu KLHS RPJMD 2021-2026	31	Penurunan Kualitas Air
	32	Peningkatan Timbulan Sampah
	33	Illegal mining
	34	Alih Fungsi Lahan
	35	Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	36	Rendahnya nilai Tambah Produk Pertanian
Isu KLHS RTRW Tahun 2023-2043	37	Penurunan kualitas air
	38	Alih fungsi lahan
	39	Belum tersedianya instrument pengendalian ruang
	40	Masih rendahnya infrastruktur permukiman dan sanitasi layak
	41	Masih rendahnya nilai tambah perekonomian selain sektor pertanian
	42	Konflik Tenurial
Isu KLHS RPJPD Tahun 2025-2045	43	Rendahnya persentase tenaga kerja formal
	44	Belum optimalnya pengelolaan sampah
	45	Masih tingginya lahan kritis
	46	Masih rendahnya ketersediaan air bersih dan sanitasi layak
	47	Belum optimalnya Pembangunan rumah layak huni

Selanjutnya dilakukan dalam menentukan isu strategis dalam Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan simulasi terhadap isu panjang yang sudah diidentifikasi dengan Aplikasi Gephi untuk memvisualisasikan keterkaitan antar isu dan menunjukkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2- 130
Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan Antar Isu



Hasil identifikasi berdasarkan keterkaitan isu, selanjutnya disepakati isu pembangunan berkelanjutan paling strategis Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya tata kelola
2. Alih fungsi lahan
3. Penurunan kualitas air dan fluktuasi debit sungai
4. Tingginya potensi bencana
5. Rendahnya kualitas SDM
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien melalui partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Oleh karena itu, penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rumusan perencanaan teknokratik melalui visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga terciptanya perencanaan yang Tematik-Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) serta dapat diukur capaian keberhasilannya.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dimana RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dimana tata cara dan tahapan hingga sistematika yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun visi, misi yang dicantumkan pada RPJMD merujuk pada visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2024, sedangkan tujuan, dan sasaran dirumuskan untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Adapun secara skematik sesuai dengan muatan RPJMD, maka keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan hingga program maupun kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 3. 1
Arah Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan



Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menjadi muatan pada bab ini, sedangkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah serta Program Perangkat daerah akan menjadi muatan pada Bab II. Sedangkan Kegiatan dan Sub Kegiatan akan menjadi muatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

3.1.1. Kebijakan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

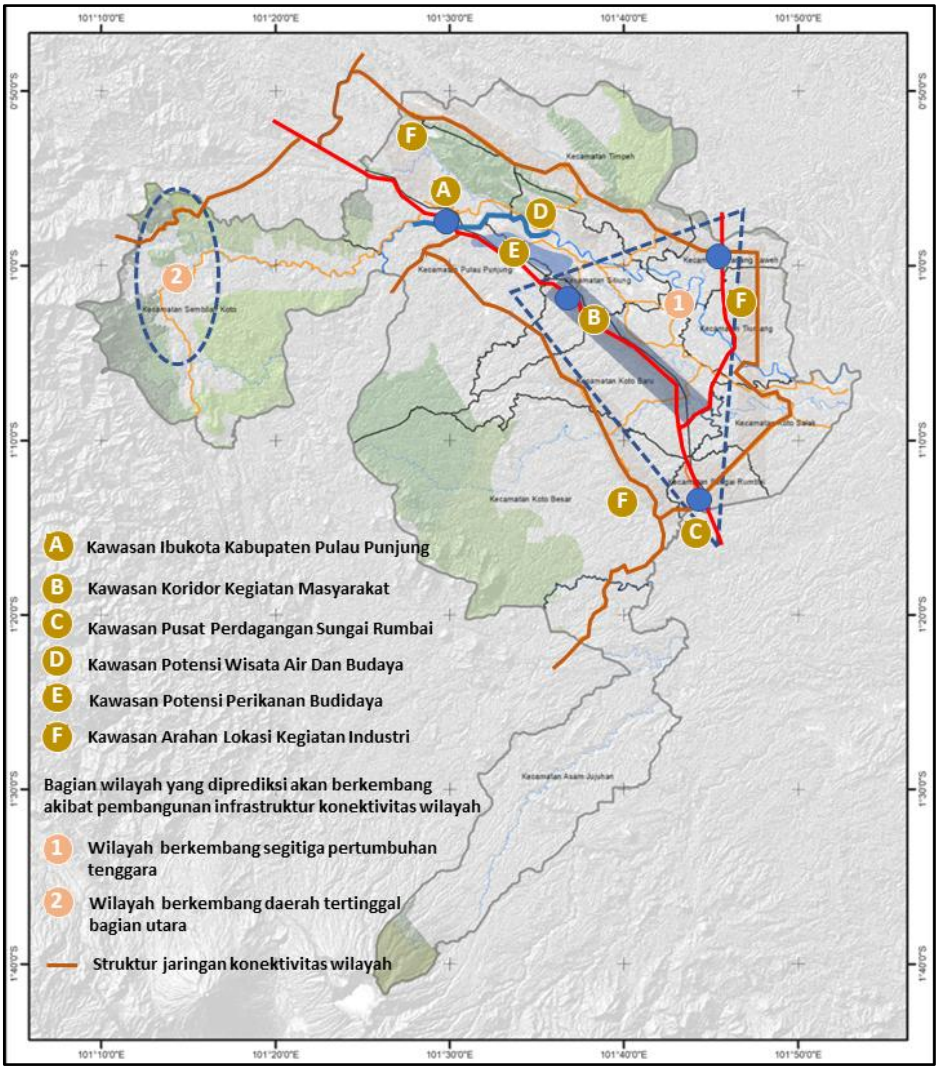
Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat yang sedang berkembang dengan cepat. Perkembangan ini disebabkan potensi sumberdaya alam yang beragam dan potensi lokasi wilayah. Konektivitas antar

wilayah yang sedang dan akan dibangun melewati Kabupaten Dharmasaraya yaitu Feeder Tol Dharmasraya – Rengat, konektivitas antara Alahan Panjang – Kiliran Jao dan antara Solok Selatan/Kerinci – Kabupaten Dharmasraya. Konektivitas wilayah ini diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan lingkar timur dan lingkar barat Kabupaten Dharmasraya.

Pengembangan konektivitas ini akan memacu perkembangan wilayah dimasa depan yang dapat digambarkan sebagai wilayah segitiga pertumbuhan tenggara yang menghubungkan Kawasan Sungai Rumbai, Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat dan Kawasan Padang Laweh. Sementara dibagian utara, wilayah tertinggal di Kecamatan Sembilan Koto dengan potensi lahan yang luas yang masih mungkin dibudidayakan berpeluang untuk berkembang karena akan dilewati oleh jalan Alahan Panjang – Kiliran Jao.

Konsepsi pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 2
Konsep Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya



Adapun tujuan penataan ruang kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2043 yaitu Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan. Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Tabel 3- 1
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat	Mengembangkan budidaya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
		Mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya; dan
		Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi
2	Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi Sumatera Barat	Mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi.
		Mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya; dan
		Mengembangkan daerah jaringan irigasi kabupaten
3	Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.	Mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
		meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (*born stock centre*).
4	Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi Sumatera Barat	mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan memperhatikan daya dukung, daya tampung yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.
5	Pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan; dan.
		Melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan

No	Kebijakan	Strategi
		mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan
6	Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.	Mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar.
		Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten Dharmasraya dan wilayah sekitar.
		Menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau Private.
7	Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.	Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis.
		Mengembangkan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya di bagian tengah Pulau Sumatera.
8	Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batanghari dan DAS Akuaman.	Mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung.
		Mepertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem.
		Menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
9	Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau .	a. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui: 1. Mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera; 2. Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan

No	Kebijakan	Strategi
		3. Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
		b. Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui: 1. menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih; 2. menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan; 3. menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; 4. menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan; dan 5. menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.
		Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
10	Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya mengingat dengan posisi Kabupaten Dharmasraya di perbatasan Provinsi Sumatera Barat	perlu kegiatan pencegahan (preventif) kriminalitas melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas antar wilayah

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Di samping itu, dalam RTRW 2043 ditetapkan pula kawasan-kawasan strategis berskala nasional maupun provinsi. Kawasan strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu kawasan strategis nasional Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan Kawasan Strategis Sungai Rumbai yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3- 2
Program Utama Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 untuk 5 Tahun Pertama

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
A	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**	
1	**Sistem Pusat Permukiman**	
1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	
	a. Pengembangan PKL Pulau Punjung	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung
	- Peningkatan sarana prasarana pasar.	Kecamatan Pulau Punjung
	- Pembangunan terminal penumpang tipe B.	Kecamatan Pulau Punjung
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan	Kecamatan Pulau Punjung
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Pulau Punjung
	- Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.	Kecamatan Pulau Punjung
	- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kecamatan Pulau Punjung
	- Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.	Kecamatan Pulau Punjung
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Pulau Punjung
	b. Pengembangan PKL Sungai Rumbai	
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Pengembangan sarana pasar.	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Pembangunan terminal penumpang tipe A.	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Pembangunan rest area.	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai
1.2	Pusat-pusat Lainnya	
	a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) (*Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh*)	
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK
	- Legalisasi Peraturan Bupati Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK
	- Pembangunan pelayanan pendidikan SLTA	Koto Baru, Padang Laweh
	- Peningkatan prasarana pasar kawasan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi)	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK
	b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) (*Kawasan Sungai Limau, Kawasan Silago, Kawasan Pinang Makmur, Kawasan Koto Salak, Kawasan Tiumang, Kawasan Koto Besar*)	
	- Pengembangan Kawasan Nagari melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL
	- Mendorong pertumbuhan Kawasan Nagari dan pengembangan akses bagi Nagari tertinggal	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL
	- Pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL
	- Peningkatan pelayanan puskesmas	Kecamatan Koto Besar, Koto Salak, Tiumang
	- Penambahan sarana pendidikan khususnya Pembangunan SLTA	Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Sembilan Koto
	- Peningkatan prasarana pasar lingkungan.	Seluruh PPL
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Seluruh PPL
	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).	Seluruh PPL
2	**Sistem Jaringan Prasarana**	
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	
	A. Sistem Jaringan Jalan	
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Dharmasraya
	2. Pengembangan Jalan Arteri Primer	Kabupaten Dharmasraya
	3. Pengembangan jalan kolektor primer kewenangan provinsi	Kabupaten Dharmasraya
	- Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)	Kecamatan Pulau Punjung
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)	Kecamatan Koto Besar
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).	Kecamatan Koto Salak

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singing, Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)	Kecamatan Padang Laweh
	4. Pengembangan Kolektor Sekunder Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Dharmasraya
	5. Pengembangan Lokal Primer	Kabupaten Dharmasraya
	6. Pengembangan Jalan lingkungan Primer	Kabupaten Dharmasraya
	7. Pembangunan Jaringan Jalan Tol Dharmasraya – Rengat	Kabupaten Dharmasraya
	8. Pengembangan jalan khusus	Tersebar di seluruh Kecamatan
	9. Pembangunan Terminal	
	- Pengembangan terminal tipe A	Kecamatan Sungai Rumbai
	- Pengembangan terminal tipe B	Kecamatan Pulau Punjung
	Pembangunan Jembatan	
	Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Sitiung
	Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh
	Pengembangan jembatan lainnya	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Asam Jujuhan
	Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api	
	a. Pengembangan jaringan jalur kereta api Jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau	Kabupaten Dharamsraya
	b. Pengembangan stasiun penumpang	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung
	c. Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten
	d. Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Dharmasraya
	Program Transportasi Sungai	
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh
	Pengembangan transportasi wisata air	Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur
	Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan berupa lintas penyebrangan dalam kabupaten	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung
	Program Pengembangan Prasarana Terminal	
	Pembangunan terminal tipe B	Kawasan Pulau Punjung
	Pembangunan terminal tipe A	Kawasan Sungai Rumbai
	Program Pembangunan Jalan Tol	
	Penyusunan Dokumen Feasibility Study	Kabupaten Dharmasraya
	Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Dharmasraya
	Penyusunan Dokumen Amdal	Kabupaten Dharmasraya
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	Penyusunan Dokumen Andalalin	Kabupaten Dharmasraya
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya
	Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api	
	Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten
	Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara	Kabupaten Dharmasraya
2.2	Sistem Jaringan Energi	
	Program kelistrikan masyarakat	Kecamatan nagari/jorong yang belum memiliki akses jaringan listrik
	Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.	Seluruh kecamatan
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Asam Jujuhan
	Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Dharmasraya
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok – Asahan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar
	Pengembangan Saluran Distribusi	Seluruh Kecamatan
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi	
	1. Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada wilayah blank spot telekomunikasi (16 nagari)	Pulau Punjung; Koto Baru; Sungai Rumbai; Koto Besar; Asam Jujuhan; Tiumang; Padang Laweh; Timpeh; Sembilan Koto;
	2. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai
	3. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.	Seluruh Kecamatan
	4. Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan
	5. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan
	6. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
	A. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi	
	1. pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sembilan Koto
	2. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh
	3. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar
	4. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh
	5. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung
	6. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Dharmasraya
	7. Peningkatan pengairan pada seluruh persawahan di Kabupaten Dharmasraya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang,Padang Laweh, Sembilan Koto, Timpeh, Asam Jujuhan
	8. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada sawah non irigasi.	Kabupaten Dharmasraya
	9. Pembangunan embung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai.
	10. Perlindungan terhadap mata air sumber pengairan.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai
	11. Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI	Daerah tangkapan air sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.
	B. Penanganan Sungai	
	1. Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.	Seluruh kecamatan
	2. Penanggulangan banjir	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang
	3. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul	Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.
2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	1. Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	2. Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	3. Pengembangan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan
	4. pengembangan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan
	5. Pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	6. Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Koto Besar.
	7. Pembangunan sumur dangkal	Seluruh kecamatan
	8. Pembangunan sumur pompa	Seluruh kecamatan
	9. Pembangunan bak penampungan air hujan	Seluruh kecamatan
	10. Pembangunan terminal air	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	11. Pembangunan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	
	1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Timpeh
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	1. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Sitiung
	2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	Kecamatan Sitiung
	d. Sistem jaringan persampahan	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	1. Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai
	2. Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.
	3. Pembangunan dan Pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh
	4. Pengembangan penerapan konsep 3R dan Bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.	Seluruh kecamatan
	5. Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan
	6. Pengembangan TPS3R	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung
	7. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh kecamatan
	8. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan
	9. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan
	e. Sistem jaringan evakuasi bencana	
	1. Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	2. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar
	3. Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan
	f. Sistem drainase di wilayah Kabupaten	
	1. Penyusunan *masterplan* drainase	Kabupaten Dharmasraya
	2. Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Besar

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	3. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar.
	4. Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar
	5. Pengembangan sumur resapan	Seluruh Kecamatan
B	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**	
1	Kawasan Lindung	
1.1	Badan Air	
	1. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Seluruh Kecamatan
	2. Pengembangan tanggul Sungai	Seluruh Kecamatan
	3. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh Kecamatan
	4. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Seluruh Kecamatan
1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	4. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	5. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	6. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	7. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis.	Kecamatan Sembilan Koto
	9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan
1.3	Kawasan perlindungan setempat	
	1. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air	Seluruh Kecamatan
	2. Pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang disepanjang pantai	Seluruh Kecamatan
	3. Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Seluruh Kecamatan
	4. Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai, dan Sempadan Danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	Seluruh Kecamatan
	5. Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk	Seluruh Kecamatan
	6. Perlindungan kawasan sempadan sungai	Sepanjang sungai Batanghari
	7. Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m)	Seluruh Kecamatan
1.4	Kawasan konservasi	
	1. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan cagar alam a. Suaka Alam b. Cagar Alam	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto
	2. Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto
	3. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto
	4. Rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto
	5. Pelestarian alam (Taman Nasional Kerinci Seblat)	Kecamatan Asam jujuhan
1.5	Kawasan Cagar Budaya	
	1. Kajian zonasi kawasan cagar budaya	Kecamatan Sitiung
	2. Penyusunan rencana detil pengembangan kawasan inti cagar budaya	Kecamatan Sitiung
	3. Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.	Kecamatan Sitiung
	4. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.	Kecamatan Sitiung
	5. Preservasi dan rehabilitasi situs budaya	Kecamatan Sitiung
	6. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata	Kecamatan Sitiung
2	Kawasan Budidaya	
2.1	Perwujudan Kawasan hutan produksi	
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Tiumang Kecamatan padang laweh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	
	4. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	
	5. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	
	6. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam	
	7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat	
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis	
	9. Pemanfaatan hutan tanaman	
	10. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	
	11. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan	
2.2	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Sembilan Koto
	1. Pengembangan lokasi industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.	
	2. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan	
	3. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	
	4. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	
	5. Pengembangan sentra perkebunan	
2.3	Perwujudan Kawasan Pertanian	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	A. Kawasan Tanaman Pangan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Koto Besar
	1. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan	
	2. Pemantapan batas LSD dan evaluasi kembali peruntukan	
	3. Peningkatan jaringan irigasi	
	4. Peningkatan intensifikasi lahan	
	5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi	
	6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	
	7. Pemgembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	
	B. Kawasan Hortikultura	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sitiung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Besar
	1. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura	
	2. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran	
	3. Pengembangan sentra agropolitan	
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura	
	C. Kawasan Perkebunan	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang;

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar
	1. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan	
	2. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	
	3. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi,panen,pasca panen dan pemasaran	
	4. Pengembangan sentra perkebunan	
	5. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan	
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan	Kecamatan Pulau Punjung
	1. Pengembangan sentra budidaya perikanan darat	
	2. Peningkatan kapasitas sarana pendukung budidaya (Balai Benih *Ikan* di Koto Baru dan *Bornstock* Center di Pulau Punjung)	
	3. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	
	4. Pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.	
2.5	Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi	
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Pulau Punjung
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Asam Jujuhan
	Kawasan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Asam Jujuhan
	1. Pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan	
	2. Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan	
	3. Pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang	
	4. Perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang	
	5. Pembinaan pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta	
	6. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.	
	7. Relokasi tambang rakyat.	
	8. Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.	
	9. Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.	
2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Koto Baru Kecamatan Koto Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Timpeh

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Salak
	1. Pengembangan wisata budaya	
	2. Pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster	
	3. Pengembangan kawasan wisata pada lahan ex pertambamgan	
	4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata	
2.8	Perwujudan Kawasan permukiman	
	A. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan:	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan	
	2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	
	3. Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan	
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	
	6. Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah	
	7. Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan	
	8. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kawasan perkotaan
	9. Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat	Kawasan perkotaan
	10. Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	PKL, PPK, PPK
	11. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.	PKL, PPK, PPK, PPL
	12. Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	PKL
	B. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan:	Seluruh Kecamatan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan	Kawasan perdesaan
	2. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku	Kawasan perdesaan
	3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	Kawasan perdesaan
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	Kawasan perdesaan
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	Seluruh kecamatan yang terindikasi rawan bencana
	6. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan
	7. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	PKL, PPK, PPK, PPL
	8. Peningkatan sanitasi lingkungan.	Seluruh kecamatan
	9. Peningkatan jalan lingkungan/nagari	Seluruh kecamatan
	10. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Koto Besar
2.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh
	1. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
	2. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
	3. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**	
1	**Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)**	
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	
	Pengawasan terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kecamatan Asam Jujuhan
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Penyangga TNKS	Kecamatan Asam Jujuhan
2.	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**	
	Perwujudan kawasan strategis Sungai Rumbai	
	1. Pembangunan pusat perdagangan (kawasan pasar dan terminal tipe A).	Kecamatan Sungai Rumbai
	2. Pembangunan rest area	Kecamatan Sungai Rumbai
	3. Pembangunan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal	Kecamatan Sungai Rumbai
	4. Peningkatan jalan lokal dan lingkungan.	Kecamatan Sungai Rumbai
	5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai
	6. Pembangunan sarana pengelolaan persampahan.	Kecamatan Sungai Rumbai

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
3.	**Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**	
3.1	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;	
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Perikanan Budidaya	
	1. Penyusunan masterplan kawasan minapolitan perikanan	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru
	2. Pembangunan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru
	3. Pembangunan sarana pendukung budidaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri	
	1. Peningkatan prasarana jalan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar.
	2. Penataan kembali lalu lintas angkutan umum dan barang	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar
3.2	kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya	
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya	
	1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.	
	2. Pengadaan transportasi wisata sungai.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung
	3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung
	4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batangharidari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung
	5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung
	6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya d	Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat	
	1. Pembangunan fasilitas pusat kegiatan olahraga terpadu	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru
	2. Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI
	3. Pembangunan fasilitas kesehatan untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru
3.3	kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	Perwujudan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati	
	1. Penyediaan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh
	2. Pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

3.1.2. Kebijakan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 lima tahun pertama dari periode RPJPD, dan merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1.2.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi adalah gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya pada RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Visi jangka panjang Kabupaten Dharmasraya sampai pada tahun 2045 yaitu:

“DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”.

Pengertian dari visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Maju : Optimalisasi pemanfaatan kekayaan aset ekonomi untuk kemakmuran daerah

Berbudaya : Masyarakat yang cerdas berlandaskan iman dan taqwa serta memiliki identitas budaya yang kuat

Berkelanjutan : Pembangunan dengan menjaga kelestarian ingkungan

Visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya mencerminkan potensi dan karakteristik daerah serta keselarasan dengan visi nasional yang mengandung visi “maju” dan “berkelanjutan”.

3.1.2.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Misi adalah agenda untuk yang ditetapkan untuk mencapai visi daerah. Terdapat delapan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dharmasraya.

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat.
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Pengertian dari masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera

Maju dan sejahteranya suatu wilayah membutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang terdidik dan sehat. Oleh sebab itu misi pertama dalam RPJPD ini berkosentrasi pada transformasi sosial agar masyarakat menjadi terdidik, sehat dan sejahtera.

Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.

Dengan terjadinya transformasi sosial diharapkan diikuti dengan terjadinya transformasi kegiatan ekonomi yang saat ini masih bertumpu pada pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi dengan adanya hilirisasi sehingga membentuk ketahan ekonomi lokal

Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.

Transformasi sosial dan ekonomi perlu diiringi dengan tata kelola yang semakin maju.Oleh sebab itu transformasi tata kelola menjadi misi ketiga untuk mencapai Dharmasraya Maju yang berbudaya dan berkelanjutan.

Misi 4 Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah.

Kepastian penegakan supremasi hukum kerukunan masyarakat dan stabilitas ekonomi makro merupakan persyaratan bagi Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi Kabupaten Maju yang Berbudaya dan Berkelanjutan. Supremasi hukum menjamin terjadinya peningkatan peradaban (civilization) dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat untuk mencapai keberlanjutan.

Misi 5 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai "ABS-SBK", pelestarian aset budaya dan ekologi.

Melalui ketahanan budaya Kabupaten Dharmasraya dapat menangkal efek negatif dari budaya global yang negatif sehingga ciri-ciri budaya lokal semakin berkembang dengan kesepakatan bersama berupa penegakan nilai ABS-SBK. Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari berbagai suku perlu melestarikan aset dan lingkungan budaya yang ada sehingga diperoleh ketahanan sosial budaya dan lingkungan yang kondusif.

Misi 6 Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.

Ketimpangan antar wilayah terutama perdesaan dan perkotaan perlu dipersempit dengan cara membangun wilayah secara merata di Kabupaten Dharmasraya, begitu juga dengan sasaran pembangunan baik manusia dan alam perlu dilakukan dengan prinsip keadilan yang berkelanjutan

Misi 7 Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat

Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di Tenggara Sumatera Barat perlu dikukuhkan dengan menjadikan Kabupaten Dharmasraya menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkannya.

Misi 8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Sebagai Kabupaten yang lebih muda dari kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat karena kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Sijunjung maka saat ini kesinambungan pembangunan daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian sehingga rakyat menjadi sejahtera.

3.1.2.3. Arah dan Sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah tahapan dan prioritas dalam menjalankan misi pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Arah kebijakan pembangunan dirinci untuk setiap misi pembangunan pada setiap tahapan pambangunan lima tahunan.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasasarkan Misi Dan Lima Tahunan

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lebih tinggi.	Penguatan daya saing SDM dan pemerataan kesejahteraan	Pemantapan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing sebagai basis pembangunan.
2	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal.	Peningkatan produktifitas dan diversifikasi komoditi bernilai tambah tinggi dan mewujudkan dukungan infrastruktur pendukung ketahanan pangan lokal	Penguatan sistem agribisnis komoditi strategis dan unggulan	Pengembangan daya saing komoditi dan produk strategis dan unggulan daerah berorientasi pasar di luar wilayah	Pemantapan pembangunan daerah berbasis komoditi strategis dan unggulan
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang maju.	Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) ASN, penataan kelembagaan dan regulasi pembangunan, serta digitalisasi pengelolaan pemerintahan.	Peningkatan koordinasi dan efisiensi pengelolaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.	Peningkatan integrasi pengelolaan pembangunan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha	Pemantapan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
4	Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakkan supremasi hukum, kerukunan	Peningkatan kinerja kelembagaan untuk mewujudkan	Pemantapan supremasi hukum keamanan, kerukunan dan	Peningkatan integrasi kelembagaan keamanan,	Pemantapan integrasi kelembagaan keamanan,

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	masyarakat, dan stabilitas ekonomi makro daerah.	daerah yang aman, rukun dan bebas korupsi serta stabilitas ekonomi makro daerah.	stabilitas ekonomi makro daerah.	kerukunan dan stabilitas ekonomi makro daerah.	kerukunan dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK”, pelestarian aset budaya dan ekologi	Peningkatan internalisasi nilai ABS-SBK, serta peningkatan pelestarian aset budaya dan pelestarian lingkungan.	Pemantapan internalisasi nilai ABS-SBK, serta pemantapan pelestarian dan pemanfaatan aset budaya dan lingkungan.	Pemantapan budaya hidup ABS-SBK dan optimalisasi pemanfaatan aset budaya dan jasa lingkungan sebagai aset pembangunan daerah.	Pemantapan fungsi sosial budaya dan ekologi sebagai kabupaten yang regius, berbudaya dan alam lestari
6	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Peningkatan pemerataan pembangunan ekonomi dan dukungan infrastruktur antar kecamatan.	Pemantapan pemerataan pembangunan ekonomi dan dukungan infrastruktur antar kecamatan.	Optimalisasi potensi pembangunan wilayah berdasarkan keunggulan potensi masing-masing kecamatan.	Pemantapan pemerataan pembangunan wilayah kabupaten
7	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di tenggara Sumbar	Peningkataan konektivitas antar sub wilayah dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Pemantapan konektivitas antar sub wilayah dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana prioritas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi intra wilayah dan antar wilayah di tenggara Sumatera Barat	Pemantapan pembangunan sarana dan prasarana prioritas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi intra wilayah dan antar wilayah di tenggara Sumatera Barat
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sumber : Perda No.6 Tahun 2024

Sedangkan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-209 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 3- 4
Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2030

Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
			2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)
Misi 1	Transformasi Sosial			
IE1	Kesehatan untuk Semua			
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75	76
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:			
A	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	120	100
B	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14,6	12
3.	Penanganan Tuberkulosis:			
A	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	persen	90	92
b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	persen	95	94
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	98,32	100,00
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			
5.	Hasil Pembelajaran:			
A	persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	persen	L : 70,00; N : 64,00	L : 72,25; N : 66,51
1)	Literasi Membaca	persen	70	72,25
2)	Numerasi	persen	64	66,51
B	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,1	10,76
C	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,39	14,79
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	3,02	13,53
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	77,03	78,53
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			
8.	Tingkat Kemiskinan	persen	2,92-3,36	1,99-2,33
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	33,09	44,40

Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
			2025	2030
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	11,64	19,14
Misi 2	Transformasi Ekonomi			
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
11.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	persen	5,37	6,47
12.	Pengembangan Pariwisata			
A	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	1,12	1,295
13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	persen	0,939	1,067
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
A	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	persen	11,13	12,64
B	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	persen	3,77	5,07
C	Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	4,68	6,13
D	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	5,554	6,432
e	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	0,05764	0,05712
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,7	5
b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	46,55	53,09
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	61,22	63,22
17.	Indeks Inovasi Daerah	indeks	58,39	65,69
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			
18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	27	25
b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah/ orang	73	75
IE6	Transformasi Digital			
19.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	indeks	53,52	60,14
1E7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
20.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	persen	100	100
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	28	28
22.	Ekspor Barang dan Jasa	persen	55	56
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
23.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
a	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persen	61,7	71,28
b	Persentase Desa Mandiri	persen	15,38	21,15
Misi 3	Transformasi Tata Kelola			

Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
			2025	2030
IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
24.	Indeks Reformasi Hukum	indeks	70,65	75,65
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	2,83	3,37
26.	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4	4,3
27.	Anti Korupsi	Anti Korupsi		
a	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	nilai	70	73
b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	4	4,25
Misi 4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
IE10	Hukum Berkeadilan, dan Keamanan Daerah			
28.	Indeks Reformasi Hukum	persen	70	72
29.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	persen	100	100
30.	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	100
IE11				
31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,5	1
32.	Tingkat Inflasi	persen	2,80 - 3,60	2,33 - 3,43
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	5,13	15
b	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	364.257	720.635
c	Total Kredit/PDRB	persen	16,74	21
34.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	persen	2,26	2,5
IE12	Kerjasama antar wilayah			
35.	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	persen	100	100
36.	Persentase Penyelesaian Konfilk Sosial	persen	100	100
Misi 5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52	56
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75	77
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65	67
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,52-0,51	0,48-0,46
b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80	82,5
1E15	Lingkungan Hidup Berkualitas			
41.	Indeks Tutupan Lahan	indeks	46	50

Misi/Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
			2025	2030
42.	Kualitas Lingkungan Hidup			
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	72,82	73,88
b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	13,83	34,51
c	Pengelolaan Sampah			
-	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	26,47	42,35
-	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	28,79	48,37
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
a	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/ orang	893,00	1.298,00
b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	5,96	4,78
c	Ketahanan Air	Ketahanan Air		
-	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,03
-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	3	9,5
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	137,69	136,94-126,94
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,82	73,88
Misi 6	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan			
Misi 7	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat			
Misi 8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah			

Sumber : Perda No.6 Tahun 2024

3.1.3. Rekomendasi Kebijakan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Rumusan rekomendasi juga mempertimbangkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 Tahap I dalam rangka **Perkuatan Fondasi Transformasi**. Skenario dan rekomendasi dalam Upaya penyelesaian permasalahan terkait isu paling strategis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3- 5
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
1	**Belum optimalnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**			
		1. Meningkatkan kapasitas tata Kelola menuju *good governance* 2. Meningkatkan pemanfataan sistem informasi berbasis digital dalam tata Kelola 3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian good governance 4. Mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 5. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan	1.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	06.02.3,03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.06.02.3,03.0007. Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			
	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
				(Satu)Daerah Kabupaten/Kota
	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).			
	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.			
	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.			
	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			
	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah. 2.11.11.2.03. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (per hari)		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.11.2.01.0019. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah. 2.11.11.2.01.0021. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 2.11.08.2.01.0003. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	16.6.1.(B) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi		4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Indikator Lokal Indeks kepatuhan pelayanan publik		4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.04 Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2	**Alih Fungsi Lahan**			
	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	1. Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dalam menunjang Pembangunan berkelanjutan 2. Mengembangkan pola permukiman dan infrastruktur hemat lahan 3. Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan 4. Meningkatkan potensi ekonomi di dalam dan di luar kawasan hutan tanpa mengubah fungsi 5. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk pengendalian alih fungsi lahan (jasa lingkungan) 6. Meningkatkan peranan tokoh lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan 7. Memperkuat kebijakan terkait ancaman alih fungsi lahan 8. Meningkatkan alternatif mata pencaharian Masyarakat berbasis SDA lokal berkelanjutan 9. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang dengan mempedomani RTRW 10. Mengembangkan basis data spasial terkait perubahan tutupan lahan (pemetaan lokasi-lokasi rawan konversi lahan hutan menjadi non-hutan)	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat, 2. Program penanganan kerawanan pangan	1. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota 2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.			
	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		1. 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2. 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3. 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN	1. 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota 3. 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
		11. Memperkuat legalitas kawasan hutan	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 4. 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 5. 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 6. 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	dalam Daerah Kabupaten/ Kota 4. 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota 5. 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain 6. 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 7. 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8. 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota 9. 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten /Kota 10. 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
				11. 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota 12. 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01.0003. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Program Penanggulangan Bencana Daerah	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. 2. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3. PROGRAMPENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 5. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN	1.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 1.2 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
			MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 6. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	(PPLH) Kabupaten/Kota. 5.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 5.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. 6.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 6.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten/Kota
	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		1. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2. PROGRAMPENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 4. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	1.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 3.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. 4.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 4.2 Peningkatan

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
			TERKAIT DENGAN PPLH 5. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. 5.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 5.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten/Kota
3	**Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah**			
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1. Mendorong pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 2. Desentralisasi pengelolaan sampah 3. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat lokal 4. Intensifikasi pendidikan pengurangan sampah 5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah non formal 6. Revitalisasi peranan ninik mamak, tokoh lokal dalam pengelolaan sampah 7. Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle) yang mendukung system ekonomi sirkular. 8. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah B3 9. Menumbuhkembangkan sistim pengelolaan sampah sistim 3R (reduce-reuse-recycle) 10. Meningkatkan peran TPST dan TPS3R dalam pengelolaan persampahan 11. Optimalisasi pemantauan kinerja pengelolaan persampahan secara berkala.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.			
	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.		1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 2. Program Pemasaran Pariwisata. 3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. 2. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. 3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
		12. Mengembangkan sistem hilirisasi produk berbasis sampah 13. Mengembangkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya.	Pariwisata. 2. Program Pemasaran Pariwisata. 3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. 3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah. 2.11.11.2.03. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (kg)		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.11.2.01.0019. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah. 2.11.11.2.01.0021. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 2.11.08.2.01.0003. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01.0003. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
4	**Penurunan Kualitas Air dan Fluktuasi Debit Sungai**			
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1. Mengembangkan akses untuk menjamin ketersediaan air minum dan memperluas jangkauannya 2. Meningkatkan validitas data hidrologi daerah (inventarisasi sumber-sumber air baku, jumlah rumahtangga, kawasan, dll yang sudah terlayani dan belum terlayani kebutuhan air bersih dan air baku, serta membuat Neraca Air Bersih dan Air baku). 3. Mengembangkan system drainase terpisah dengan air limbah domestik sebagaimana diamanatkan pada diamanatkan pada Pasal 7 PermenPUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 4. Mengembangkan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan air pada DAS 5. Mengembangkan kawasan permukiman yang memperhatikan ketersediaan RTH sebagai areal resapan air untuk tetap menjaga ketersediaan air setempat. 6. Meningkatkan pengawasan dan kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Program Pengelolaan Pendidikan	1. Melakukan Sosialisasi atau bimtek pembelajaran digital bagi para guru kelas; 2. Melakukan pengadaan kursi roda, toilet dan prioritas layanan disabilitas lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan DinsosP3APPKB
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
				dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/ nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota--> pemanfaatan ulang air limbah
	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).			
	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.			
	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			
	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	1.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 1.2 Pemulihan Pencemaran dan/atau

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
			2. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 5. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 6. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota. 5.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 5.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. 6.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 6.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
5	**Rendahnya kualitas sanitasi lingkungan**			
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	1. Meningkatkan akses sanitasi yang layak dan aman serta penyediaan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	sumber air minum layak dan berkelanjutan.	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah dan sampah dalam mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan 4. Meningkatkan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar sektor melalui program-program pemerintah dalam ketersediaan air bersih dan sanitasi layak (contoh STBM) 6. Meningkatkan peran serta kader kesehatan dan lembaga dalam peningkatan pemicuan bagi masyarakat terkait sanitasi	Penyediaan Air Minum	dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Lingkungan 4. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Lingkungan 4. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis		Program Pengelolaan Pendidikan	1. Melakukan Sosialisasi atau bimtek pembelajaran digital bagi para guru kelas; 2. Melakukan pengadaan kursi roda, toilet dan prioritas layanan disabilitas lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).			Dinas Kesehatan dan DinsosP3APPKB
	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.			
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/nagari) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Program : Pengembangan Perumahan Program : Kawasan Permukiman Program : Perumahan dan kawasan permukiman kumuh Program : Peningkatan PSU	Kegiatan : Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi Sub Kegiatan : Legalisasi kebijakan bidang PKP Kegiatan : Pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyelenggaraan PSU perumahan Sub Kegiatan : Penyediaan PSU di Perumahan menunjang fungsi hunian
	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah. 2.11.11.2.03. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

No	Indikator TPB Terkait Isu	Rekomendasi Kebijakan	Program	Kegiatan /Sub Kegiatan
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (per hari)		2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0019. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah. 2.11.11.2.01.0021. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
			2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01.0003. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

3.2.1. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu : **"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045".** Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusi,
   Misi ini berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
   Misi ini bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
   Tujuan misi ini yaitu mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas,
   Misi ini bertujuan bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri,

Tujuan misi ini untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,
   Misi ini ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
   Misi ini dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur,
   Misi ini diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026

b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029

4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
   b. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
   c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

3.2.2. Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu: **SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju

juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip no one left behind.

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM

8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diuur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut :

Tabel 3- 6
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran Visi	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		2. Indeks Biru Ekonomi Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3. Kontribusi Setor PDRB Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 –5,10	3,39 – 3,96
		2. Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam kebijakan kewilayahan, Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batanghari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten

Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama Kabupaten Dharmasraya :

a. Peluang Perkembangan Pertanian Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan yaitu seluas 241.400 Ha (74,10% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.309 Ha (62%) dan karet seluas 21.878 Ha (7,40%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,50%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,10%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 272.164,6 Ha (94%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. - Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah; Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan. - Pengembangan pertanian perkebunan; Pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat. Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet. - Pengembangan pertanian hortikultura; Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kabupaten Dharmasaraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buahbuahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago.
b. Peluang Perkembangan Pertambangan Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan ekspoitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.
c. Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama.

Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1) Pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi, terdiri atas : - Mengembangkan budi daya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan. - Mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian dan perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi lainnya; dan - Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
2) Pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi, terdiri atas : - Mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi. - Mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten. - Mengembangkan jaringan irigasi kabupaten
3) Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi, terdiri atas: - Mengembangkan kawasan perikanan budi daya. - Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (born stock centre).
4) Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi yaitu mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.
5) Pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, terdiri atas : - Mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan. - Melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan.
6) Pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi, terdiri atas : - Mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar. - Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar. - Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Private.
7) Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata, terdiri atas : - Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis. - Mengembangkan wisata budaya yang terpadu

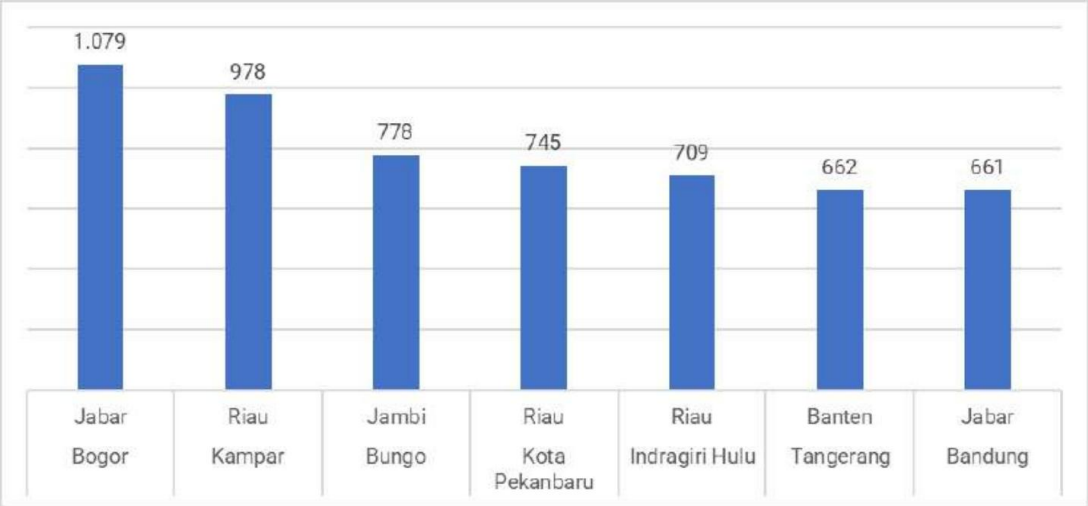
dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

8) Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian DAS, terdiri atas : - Mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung.- Mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. - Menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
9) Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau, terdiri atas : - Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui :
   a. Mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.
   b. Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten.
   c. Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.

   - Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui :
     a) Menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih.
     b) Menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan.
     c) Menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman.
     d) Menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan.
     e) Menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.

   - Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien. Kabupaten Dharmasraya perlu mengembangkan ekonominya sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Dharmasraya lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kabupaten Solok. Walaupun demikian daerah tujuan ekspor dari Kabupaten Dharmasraya tersebar dari Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu di Provinsi Riau, serta Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi.

Gambar 3. 3
Orientasi Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Secara Spatial



Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan quality dan sustainable tourism, termasuk melalui urban renewal, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan MICE economy; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung high value economy dan industri.

3.3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien melalui partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Oleh karena itu, penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rumusan perencanaan teknokratik melalui visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga terciptanya

perencanaan yang Tematik-Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) serta dapat diukur capaian keberhasilannya.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dimana RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dimana tata cara dan tahatapan hingga sistematika yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun visi, misi yang dicantumkan pada RPJMD merujuk pada visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2024, sedangkan tujuan, dan sasaran dirumuskan untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan dapat diukur dengan menggunakan indikator luaran.

3.3.1. Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2025- 2029 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

Gambar 3. 4
Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029



Visi ini mencerminkan aspirasi pembangunan yang menekankan pada keadilan sosial yang inklusif dan berkeadilan serta menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Artinya, seluruh lapisan masyarakat di setiap wilayah Dharmasraya harus merasakan manfaat pembangunan, tanpa kesenjangan yang tajam baik secara geografis maupun sosial.

Adapun defenisi kalimat Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 yaitu:
SEJAHTERA
Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara reginal dan nasional.

MERATA
Kabupaten Dharmasraya diharapan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari

Tabel 3- 7
Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Visi	Indikator	Target	
			2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	60	140,47
		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,37	6,47
2	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,94-4,46	2,72-3,18
		b. Rasio gini (Indeks)	0,168	0,145
		c. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,95

No.	Sasaran Visi	Indikator	Target	
			2025	2030
3	Peningkatan daya saing daerah	a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	4,2
		b. Indeks Daya Saing Daerah	3,25	3,6
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	a. Indeks Pembangunan Manusia	76,03	79,33
		b. Tingkat produktivitas tenaga kerja	103,30	121,01
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,88

Sumber : Hasil Analisisi Tim Penyusun RPJMD Tahun 2025-2029

Visi tersebut sudah diselaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045. Keselarasan antara visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3- 8
Penyelarasan antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

VISI RPJPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025-2045	VISI RPJMN TAHUN 2025-2029	RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025-2029
DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN	BERSAMA MEWUJUDKAN INDOENSIA MAJU MENUJU INDOENSIA EMAS 2045	SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN	DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029

3.3.2. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1

“Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata”

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi yang mesti disediakan oleh pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya peningkatan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mengurangi Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata berbagai hambatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Salah satunya berupa infrastruktur terkait konektivitas. Dengan adanya konektivitas yang memadai maka dapat mengurangi biaya ekonomi dalam sektor transportasi sekaligus menjadi pemicu percepatan pembangunan wilayah. Selanjutnya infrastruktur dasar yang terdiri dari air minum sanitasi serta kebutuhan rumah tinggal yang layak serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang layak

Misi 2

“Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien”

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah maka aspek efisiensi dan efektifitas merupakan unsur pokok yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan, baikyang bersifat makro, maupun target yang sesuai dengan prioritas daerah

Misi 3

“Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan”

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang disepakati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi ini adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan serta terbangunnya komitmen stakeholders untuk menjaga lingkungan lestari.

Misi 4

“Membangun SDM untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata”

Pembangunan di bidang sumberdaya manusia diarahkan dalam peningkatan daya saing sumberdaya manusia terutama pada dimensi pengetahuan, umur panjangdan hidup sehat yang menjadi pembentuk penilaian indikator indek pembangunan manusia. Dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan terutama bidang kesehatan, pendidikan dan bidang terkait lainnya.

Misi 5
"Transformasi ekonomi"
Guna meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi suatu wilayah diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi ini adalah perkembangan PDRB, dan peningkatan pendapatan masyarakat

Misi 6
"Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi"
Dharmasraya memandang pentingnya kehidupan sosial dipelihara, dibina, dan dikembangkan menjadi kekuatan milik masyarakat. Untuk itu arah kebijakan adalah penyiapan satuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotongroyong. Sementara itu, adat merupakan modal kulturan yang melekat, sehingga dapat dikembangkan lagi penerapannya untuk kehidupan di nagari nagari. Arah kebijakan adalah memperkuat kelembagaan adat, sinergitas dan kontrol lembaga adat terhadap penghidupan masyarakat.

Sedangkan keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025029 dengan misi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3- 9
Keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		RPJM Nasional Tahun 2025-2029	
1	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	5	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agramaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan		Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2	Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		RPJM Nasional Tahun 2025-2029	
			Pelayanan Publik yang Efektif		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
				6	~~Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan~~
				1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
3	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	2	lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi anar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	1	Pendidikan Merata, kesehatan berkualitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.
5	Transformasi ekonomi	2	Lumbung pangan nasional, dan ekonomi berkelanjutan	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		4	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		7	tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM		

RPJMD Dharmasraya Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		RPJM Nasional Tahun 2025-2029	
				6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
					Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agramaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
6	transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	6	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
				8	Memperkuar penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi anar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024-2030

Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dengan capaiannya terlihat pada hasil akhir (*final outcame*). Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan untuk pencapaian tujuan,

dikuantifikasikan melalui indikator kinerja secara spesifik, terukur, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (*long term outcame*).

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Perumusan tujuan dan sasaran yang efektif dirumuskan melalui pendekatan penjejangan kinerja sesuai pembagian peran dan kinerja secara berjenjang (*cascading*). Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus media untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun rencana berjalan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perumusan dan penetapan target IKU memedomani target kinerja sasaran visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Sehingga adanya kesinambungan pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 setiap pelaksanaan lima tahunan. Kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pelaksanaan periodesasi Tahun 2025-2029 mengacu kepada target tahun 2030 sebagai landasan penetapan target IKU RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan visi “Dharmasraya Sejahtera Merata”, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad untuk mewujudkan masyarakat Dharmasraya yang sejahtera, dan pembangunan yang merata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Dharmasraya, yang diukur dari sasaran visi yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Secara Inklusif Melalui peningkatan pendapatan, produktivitas sektor unggulan (pertanian, UMKM, industri lokal), dan kesempatan kerja yang luas.
2. Meratanya Akses Pelayanan Dasar yang Berkualitas Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar sampai ke wilayah terpencil dan tertinggal.
3. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah Dengan penekanan pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan antarwilayah/kecamatan melalui program intervensi terpadu.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan nilai-nilai karakter, dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.
5. Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Responsif Fokus pada pelayanan publik yang cepat dan akuntabel, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim

Dengan pelestarian hutan, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan sistem pertanian berkelanjutan.

7. Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Melalui pemberdayaan desa, penguatan kelembagaan lokal, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat.

Sedangkan tujuan dan sasaran misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan penjejangan kinerja (*cascading outcame*), diuraikan berikut ini.

Tabel 3- 10
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA.									
Tujuan : Pemerataan Akses dan pengembangan Infrastruktur Daerah		Indeks Kinerja Infrastruktur	indeks	60	65	70	80	85	90
	Sasaran : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
		Indeks kinerja sistem irigasi	indeks	70	72	74	76	78	80
	Sasaran : Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	60	65	70	80	85	90
	Sasaran : Mningkatkan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar	Akses Rumah tangga terhadap Konsumsi Air Minum	persen	72	73	75	80	85	90
		Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	6,52	7,85	9,23	10,62	12	16,51

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 2 : TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN									
Tujuan : meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola yang berinteritas dan adaptif		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	indeks	4	4,1	4,2	4,35	4,5	4,6
		Indeks reformasi birokrasi	indeks	76	78	80	82	83	85
		Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5	3,55	3,57	3,6	3,7	4,75
	Sasaran : Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP	bobot	B	BB	BB	BB	A	A
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks reformasi hukum	indeks	70	70,1	70,25	70,35	70,5	70,65
		Indeks Inovasi Daerah	indeks	65	67	70	80	85	90
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85	86	86,5	87	87,2	87,5
		Indeks SPBE	indeks	3,65	3,7	3,8	3,85	3,9	4
		Indeks masyarakat digital indonesia	indeks	53,52	55	56	58	60	60,14
		Indeks Pelayanan Publik	indeks	4	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3
Misi 3 : MENGEMBANGKAN SISTEM, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PELESTARIAN LINGKUNGAN									

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,82	73,04	73,25	73,46	73,67	73,88
	Sasaran : meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas air	indeks	71,4	71,44	71,64	71,84	72,04	72,24
		Indeks Kualitas Udara	indeks	75,86	76,16	76,46	76,76	77,06	77,36
Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Tutupan Lahan	indeks	69,93	70	70,07	70,14	70,21	70,25
	Sasaran : meningkatnya resiliensi terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	indeks	129	128	127	126	125,5	124
Misi 4 : MEMBANGUN SDM UNTUK MENUNJANG DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA									
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76,03	76,5	77	78	79	79,33
	Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata	Usia Harapan Hidup	tahun	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76
	Sasaran : Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	Harapan lama sekolah	tahun	14,39	14,4	14,5	14,6	14,7	14,79
		Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,1	10,2	10,4	10,55	10,6	10,76

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80	80,5	81	81,5	82	82,5
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65	65,5	66	66,2	66,5	67
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,52	0,515	0,5	0,55	0,5	0,48
Misi 5 : TRANSFORMASI EKONOMI									
Tujuan : Terwujudnya stabiitas ekonomi makro		Pertumbuhan PDRB	persen	5,25	5,5	5,6	5,7	5,8	5,95
		Gini Rasio	indeks	0,168	0,15	0,14	0,12	0,1	0,092
		tingkat inflasi	persen	2,80 - 3,60	2,75	2,7	2,5	2,4	2,33 - 3,43
	Sasaran : meningkatnya pendapatan masyaraat dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pendapatan perkapita	juta Rp	60	75	85	100	120	140,47
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	5,5	5,7	5,9	6	6,25	6,47
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	persen	16	16,5	17	17,5	18	19
		Rasio net eksport terhadap PDRB	persen	15	15,25	15,5	16	16,5	17
	Sasaran : mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	persen	4,6	4,5	4,25	4	3,5	3,18
		Tingkat pengangguran	persen	5,7	5,5	5,3	5,2	5,1	5

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran : Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase nagari mandiri	persen	50	53,85	57,69	61,54	65,38	69,23
Misi 6 : TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA BERBASIS ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH SEBAGAI PONDASI									
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	indeks	57,5	62,5	68,5	75,5	80	84,5
	Sasaran : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan peningkatan kerukunan antar umat beragama	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	indeks	57,5	62,5	68,5	75,5	80	84,5
		Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	indeks	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktorfaktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, strategi dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* menjadi dasar bagi penentuan program prioritas pembangunan. Sedangkan arah kebijakan diformulasikan melalui *intermediate term outcome* sebagai media untuk melihat tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

3.5.1. Pentahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan adalah serangkaian langkah atau fase yang dilakukan dalam suatu proses pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial dalam rangka memantapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dharmasraya periode 2025-2029. Pentahapan dilaksanakan atas pertimbangan waktu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mengakselerasi prioritas pembangunan Dharmasraya serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan tahap pertama RPJPD 2025-2029 adalah Perkuatan Fondasi Transformasi, berupa penyiapan dasar pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan pertahun tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3- 11
Pentahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penyiapan Dasar Pengembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Memperkokoh Integrasi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan dan Percepatan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Pengembangan Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Akselerasi Produktivitas Ekonomi dan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Dharmasraya Sejahtera Merata
PERKUATAN FONTASI TRANSFORMASI → DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA				

Sumber : Hasil Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5.2. Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Arah kebijakan ini disusun secara terintegrasi dengan memperhatikan isu-isu strategis, potensi dan permasalahan daerah, serta sinergi dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan yang bersifat operasional, berorientasi pada hasil, serta mendorong pencapaian target kinerja pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Arah kebijakan juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah.

Tabel 3- 12
Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
Misi 1 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA	-	Peningkatan daya tampung air
	-	Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air) untuk menjaga keberlanjutan pasokan.
	-	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
	-	Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan kabupaten
	-	Pemerataan konektivitas/Pembangunan dan peningkatan jalan disetiap kecamatan
	-	Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
	-	Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan kabupaten
	-	Pendanaan pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)
		Feeder toll Dharmasraya - Rengat
		Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR
	-	Peningkatan jaringan irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan
		Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan
	-	Koordinasi terkait penanganan blank spot area
	-	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik
	-	Peningkatan sanitasi
	-	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)
Misi 2 : PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN	-	Pemantapan *Smart Governance* dan Partisipasi Inklusif
	-	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik
	-	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi DaerahFondasi Keterbukaan dan Digitalisasi
	-	Penguatan transformasi kelembagaan yang berbasis kinerja
	-	Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik
	-	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool
	-	Meningkatkan maturitas SPIP
	-	Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif
	-	Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka
	-	penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
	-	Peningkatan kemandirian dan kapasitas keuangan daerah/fiskal
	-	Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pemerataan layanan serta memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan
	-	Mendorong Pemerataan layanan tranformasi jaringan telekomunikasi 4G ke 5G untuk peningkatan kualitas layanan
	-	Intensifikasi literasi Digital pada berbagai sektor produktif masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menstimulus produktivitas masyarakat
	-	Digitalisasi pelayanan pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi publik

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
		Percepatan pelayanan publik menjadi alat pemicu tumbuhnya sektor produktif dan investasi lokal.
	-	Peningkatan pemerataan pembangunan nagari berdasarkan potensi nagari
	-	Peningkatan dan pengembangan komoditi unggulan di tingkat nagari
Misi 3 : MENGEMBANGKAN SISTEM, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PELESTARIAN LINGKUNGAN	-	Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau
	-	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.
	-	Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas
	-	Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tangggap iklim
	-	Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon
	-	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup
	-	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah
	-	Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
	-	Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir
	-	Pengembangan nagarati tangguh bencana
	-	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
	-	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat,
	-	Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time.
Misi 4 : MEMBANGUN SDM UNTUK MENUNJANG DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA	-	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	-	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat
	-	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	-	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
	-	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;
	-	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;
	-	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;
	-	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.
	-	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	-	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.
	-	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari
	-	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil
	-	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
	-	Penurunan kematian ibu dan anak
	-	Pencegahan dan penurunan stunting
	-	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	-	Penuntasan TBC
	-	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	-	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	-	Eliminasi penyakit kusta dan
		Peningkatan Status dan Kualitas Layanana RSUD
	-	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
	-	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap
	-	Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD
		sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan
		beasiswa afirmatif, dan peningkatan sarana pendidikan menengah dan kejuruan dan vokasi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
	-	informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes
	-	Peningkatan kualitas layanan pendidikan
	-	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
	-	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan
	-	Peningkatan komprensi guru
	-	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau
	-	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu
	-	Fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat
	-	Pengembangan kampung inggris
	-	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
	-	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	-	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.
	-	Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial
	-	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
	-	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.
	-	Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif.
	-	Penguatan koordinasi kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.
	-	Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online
	-	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak
	-	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
	-	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak
	-	Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar
Misi 5 : TRANSFORMASI EKONOMI	-	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.
	-	Pengembangan One Village One Product (OVOP) untuk mendorong ekonomi lokal berbasis nagari

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
		Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)
		Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.
	-	Pengembangan kawasan wisata candi Padang Roco
	-	Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih
	-	Clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.
	-	Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.
	-	Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan.
	-	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	-	Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan.
	-	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi.
	-	Fasilitasi penguatan rantai nilai melalui kemitraan petani dengan pelaku industri.
	-	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
	-	Sertifikasi halal, mutu, dan keamanan pangan
	-	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.
	-	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	-	Penguatan sistem logistik pangan daerah berbasis kawasan.
	-	Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi.
	-	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	-	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
	-	Pemetaan komoditi unggulan daerah
	-	Mendorong transformasi kelembagaan Lembaga Lembaga Keuangan Mikro Imenjadi lembaga berbasis syariah melalui fasilitasi perizinan, pendampingan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas
	-	Menyediakan fasilitas pembiayaan syariah dan program inkubasi bisnis bagi UMKM yang bergerak di sektor halal untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah
	-	Mewujudkan kawasan percontohan ekonomi syariah di lokasi strategis sebagai model pengembangan.
	-	Mengembangkan sistem digital keuangan syariah daerah melalui adopsi teknologi seperti fintech syariah,dan platform pembayaran zakat, infaq, dan wakaf berbasis digital
	-	Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan

VISI : DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA		
Misi	**Arah Kebijakan**	
	-	Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko
	-	Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi
	-	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin
	-	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan
		optimalisasi balai latihan kerja
	-	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan
	-	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting
	-	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.
	-	Revitalisasi BLK dan penguatan sinergi dengan sektor swasta (CSR & kemitraan).
Misi 6 : TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA BERBASIS ABS–SBK	-	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.
	-	Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan
	-	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.
	-	Pembinaan Sejarah Lokal
	-	Memfasilitasi pembinaan mental spiritual
	-	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
	-	pelestarian cagar budaya benda dan tak benda
		Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
		Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama

Sumber : Hasil Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD

Arah kebijakan dan strategi pembangunan merupakan langkahlangkah yang akan diterapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Dharmasraya dan Wakil Bupati Dharmasraya yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yang merupakan metode

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tahapan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi memerlukan perubahan kearah yang lebih baik yang didasarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara menyeluruh. Isu strategis pembangunan daerah menjadi dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang akan disusun untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Kondisi eksternal dan internal yang ada di Kabupaten Dharmasraya juga menjadi pertimbangan dan dasar yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perlu memperhatikan permasalahan, isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Disamping itu juga perlu memperhatikan keselarasan dengan dokumen RPJPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2045. Karena RPJMD saat ini berada dalam tahapan pertama dalam periode RPJPD tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dan juga mengacu kepada kesinambungan dan keberlanjutan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2025-2045 yang merupakan kelanjutan dari tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 13
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Pertahun

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif	- Peningkatan daya tampung air dan peningkatan kualitas kelembagaan	Pembangunan instalasi pengolahan air beserta pembentukan BUMD/BLUD (PDAM)	Pembangunan instalasi pengolahan air beserta pembentukan BUMD/BLUD (PDAM)	Pembangunan instalasi pengolahan air beserta pembentukan BUMD/BLUD (PDAM)	Pembangunan instalasi pengolahan air beserta pembentukan BUMD/BLUD (PDAM)	Pembangunan instalasi pengolahan air beserta pembentukan BUMD/BLUD (PDAM)
	- Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air) untuk menjaga keberlanjutan pasokan.	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air
	- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Rehabilitasi Sumber air untuk menjaga keberlanjutan pasokan (sungai, mata air)	Rehabilitasi Sumber air untuk menjaga keberlanjutan pasokan (sungai, mata air)	Rehabilitasi Sumber air untuk menjaga keberlanjutan pasokan (sungai, mata air)	Rehabilitasi Sumber air untuk menjaga keberlanjutan pasokan (sungai, mata air)	Rehabilitasi Sumber air untuk menjaga keberlanjutan pasokan (sungai, mata air)
	- Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan kabupaten	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman	Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik
		Penguatan kelembagaan air minum secara bertahap (BLUD)	Penguatan kelembagaan air minum secara bertahap (BLUD)	Penguatan kelembagaan air minum secara bertahap (BLUD)	Penguatan kelembagaan air minum secara bertahap (PDAM)	Penguatan kelembagaan air minum secara bertahap (PDAM)
		Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan	Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan	Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan	Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan	Pembangunan dan Rehab Jaringan Irigasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan
		Normalisasi sungai	Normalisasi sungai	Normalisasi sungai	Normalisasi sungai	Normalisasi sungai
Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan serta infrastruktur lainnya	- Pemerataan konektivitas/Pembangunan dan peningkatan jalan disetiap kecamatan	Pembangunan, Rehab, Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan	Pembangunan, Rehab, Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan	Pembangunan, Rehab, Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan	Pembangunan, Rehab, Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan	Pembangunan, Rehab, Pemeliharaan dan Pelebaran Jalan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan, Rehab, dan Pemeliharaan Jembatan
	- Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Produksi (JP) dan jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Produksi (JP) dan jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Produksi (JP) dan jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Produksi (JP) dan jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Produksi (JP) dan jalan Usaha Tani (JUT)
	- Pendanaan pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)	Pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)	Pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)	Pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)	Pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)	Pembangunan infrastruktur melalui KPBU (PJU, Rest Area, Mice dan komplek pergudangan)
	- Feeder toll Dharmasraya - Rengat	Dukungan Pembangunan feeder Tol Dharmasraya Rengat	Dukungan Pembangunan feeder Tol Dharmasraya Rengat	Dukungan Pembangunan feeder Tol Dharmasraya Rengat	Dukungan Pembangunan feeder Tol Dharmasraya Rengat	Dukungan Pembangunan feeder Tol Dharmasraya Rengat
	- Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR	Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR	Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR	Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR	Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR	Pelibatan pihak swasta pembangunan infrastruktur melalui CSR

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan
	- Koordinasi terkait penanganan blank spot area	Penuntasan blank spot area	Penuntasan blank spot area	Menjamin keberlanjutan		
	- Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik	Koordinasi terkait peningkatan jaringan listrik pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik
	- Peningkatan sanitasi	Peningkatan sanitasi perkotaan, perdesaan dan kawasan kumuh	Peningkatan sanitasi perkotaan, perdesaan dan kawasan kumuh	Peningkatan sanitasi perkotaan, perdesaan dan kawasan kumuh	Peningkatan sanitasi perkotaan, perdesaan dan kawasan kumuh	Peningkatan sanitasi perkotaan, perdesaan dan kawasan kumuh

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)	Integrasi dengan proyek-proyek strategis provinsi/nasional (Trans RIMBA, KPBU, Kawasan Strategis Provinsi)
Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	- Pemantapan *Smart Governance* dan Partisipasi Inklusif	Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif	Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif	Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif	Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif	Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif
	- Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik	Meritokrasi dalam peningkatan kompetensi, talenta, dan kemampuan SDM guna peningkatan pelayanan publik

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Fondasi Keterbukaan dan Digitalisasi	Penguatan inovasi daerah untuk percepatan pembangunan	Penguatan inovasi daerah untuk percepatan pembangunan	Penguatan inovasi daerah untuk percepatan pembangunan	Penguatan inovasi daerah untuk percepatan pembangunan	Penguatan inovasi daerah untuk percepatan pembangunan
	- Mengembangkan kompetensi melalui talent pool	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool	Mengembangkan kompetensi melalui talent pool
	- Meningkatkan maturitas SPIP	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	- Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka	Keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Keterbukaan informasi publik pemerintah daerah
	- penyempuraan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum yang dihasilkan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	perundang-undangan yang lebih tinggi					
	- Peningkatan kemandirian dan kapasitas keuangan daerah/fiskal	Peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah
Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pemerataan layanan serta memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan	Kerjasama pemerintah daerah dan pihak lain (swasta dan antar pemerintah daerah)	Kerjasama pemerintah daerah dan pihak lain (swasta dan antar pemerintah daerah)	Kerjasama pemerintah daerah dan pihak lain (swasta dan antar pemerintah daerah)	Kerjasama pemerintah daerah dan pihak lain (swasta dan antar pemerintah daerah)	Kerjasama pemerintah daerah dan pihak lain (swasta dan antar pemerintah daerah)
	- Mendorong Pemerataan layanan tranformasi jaringan telekomunikasi untuk peningkatan kualitas layanan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah daerah hingga level unit layanan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah daerah hingga level unit layanan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah daerah hingga level unit layanan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah daerah hingga level unit layanan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah daerah hingga level unit layanan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Intensifikasi literasi Digital pada berbagai sektor produktif masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menstimulus produktivitas masyarakat	Pemanfaatan media digital dalam mendukung program OVOP dan sektor rill lainnya	Pemanfaatan media digital dalam mendukung program OVOP dan sektor rill lainnya	Pemanfaatan media digital dalam mendukung program OVOP dan sektor rill lainnya	Pemanfaatan media digital dalam mendukung program OVOP dan sektor rill lainnya	Pemanfaatan media digital dalam mendukung program OVOP dan sektor rill lainnya
	Percepatan pelayanan publik menjadi alat pemicu tumbuhnya sektor produktif dan investasi lokal.	Perlibatan ivestor dalam pembangunan proyek strategis daerah	Perlibatan ivestor dalam pembangunan proyek strategis daerah	Perlibatan ivestor dalam pembangunan proyek strategis daerah	Perlibatan ivestor dalam pembangunan proyek strategis daerah	Perlibatan ivestor dalam pembangunan proyek strategis daerah
Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	- Peningkatan pemerataan pembangunan nagari berdasarkan potensi nagari	Pembangunan infrastruktur, ekonomi serta pemberdayaan masyarakat	Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
	- Peningkatan dan pengembangan komoditi unggulan di tingkat nagari	Pengembangan program OVOP berdasarkan potensi nagari beserta pembentukan BLUD sektor pertanian	Pengembangan program OVOP berdasarkan potensi nagari beserta pembentukan BLUD sektor pertanian	Pengembangan program OVOP berdasarkan potensi nagari beserta pembentukan	Pengembangan program OVOP berdasarkan potensi nagari beserta pembentukan	Pemantapan program OVOP berdasarkan potensi nagari beserta pembentukan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
				BLUD sektor pertanian	BLUD sektor pertanian	BLUD sektor pertanian
Meningkatnya kualitas lingkungan	- Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau	Pembangunan daerah secara inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau	Pembangunan daerah secara inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau	Pembangunan daerah secara inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau	Pembangunan daerah secara inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau	Pembangunan daerah secara inklusif dan berbasis komunitas lokal, ekonomi hijau
	- Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.	Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.
	- Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas	Perlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup
	- Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian terkait	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Pengembangan Sekolah Adiwiyata

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon					
	- Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup
	- Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah	Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah
Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	- Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada daerah rawan banjir dan lonsor	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada daerah rawan banjir dan lonsor	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada daerah rawan banjir dan lonsor	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada daerah rawan banjir dan lonsor	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada daerah rawan banjir dan lonsor
	- Pengembangan nagari tangguh bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana
Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata	- Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	- Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat
	- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI
	- Percepatan eliminasi TBC melalui promosi dan pencegahan TBC	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;
	-	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi;

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	-	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;
	-	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	-	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	-	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.
	-	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari	Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	-	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil	memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak dan Balita dan ibu hamil
	-	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
	- Penurunan kematian ibu dan anak	Penurunan kematian ibu dan anak	Penurunan kematian ibu dan anak	Penurunan kematian ibu dan anak	Penurunan kematian ibu dan anak	Penurunan kematian ibu dan anak
	- Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	- Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	- Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	Peningkatan Status dan Kualitas Layanana RSUD	Peningkatan status Rumah Sakit Type D ke Type C RSUD Sungai Rumbai dengan Tematik TBC Paru	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Peningkatan kualitas layanan RSUD

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Peningkatan status Rumah Sakit dari Type C ke Type B dengan Tematik Trauma Centre	Peningkatan Kualitas layanan RSUD Tematik Trauma Centre	Peningkatan Kualitas layanan RSUD Tematik Trauma Centre	Peningkatan Kualitas layanan RSUD Tematik Trauma Centre	Peningkatan Kualitas layanan RSUD Tematik Trauma Centre
		Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD	Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD	Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD	Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD	Pemenuhan Dokter Spesialis melalui kebijakan distribusi penempatan Spesialis di RSUD
	- Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Peningkatan Kompetensi Petugas dengan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap	meningkatkan status puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap
	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.	Penurunan angka stunting dan kematian ibu.
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan
	- Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes	Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes	Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes	Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes	Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes	Informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes
Terwujudnya Pendidikan	- Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Berkualitas yang merata						
	- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
	- Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan	Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan
	- Peningkatan komprensi guru	Peningkatan komprensi guru	Peningkatan komprensi guru	Peningkatan komprensi guru	Peningkatan komprensi guru	Peningkatan komprensi guru
	- Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau	Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang tidak mampu
	- Fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat	Fasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Sekolah Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Sekolah Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Sekolah Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Sekolah Rakyat
	- Pengembangan kampung Inggris	Pengembangan kampung Inggris	Pengembangan kampung Inggris	Pengembangan kampung Inggris	Pengembangan kampung Inggris	Pengembangan kampung Inggris
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	- Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
	- Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.
	- Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
	- Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.
	- Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan	Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
					kekerasan terhadap anak	kekerasan terhadap anak
	- Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.	Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
	- Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak	Mendorong kabupaten menjadi kabupaten layak anak
meningkatnya pendapatan masyaraat dan nilai tambah sektor unggulan daerah	- Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.	Diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, BUMD, Perusda, BLUD, UMKM berbasis nagari, dan digitalisasi ekonomi rakyat.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Pengembangan One Village One Product (OVOP) untuk mendorong ekonomi lokal berbasis nagari	Pengembangan OVOP di Nagari	Pengembangan OVOP di Nagari	Pengembangan OVOP di Nagari	Pengembangan OVOP di Nagari	Pengembangan OVOP di Nagari
	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)	Penguatan BUMNag dan BUMD, koperasi dalam hilirisasi produk unggulan (padi, sawit, karet)
	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.	Program clusterisasi usaha mikro untuk integrasi ke dalam rantai pasok industri lokal dan regional.
	- Pengembangan kawasan wisata,	Pengembangan kawasan wisata Padang Roco Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata, event wisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata, event wisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata, event wisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata, event wisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatan nusantara.	1. Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatan nusantara.	1. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 2. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatan nusantara. 3. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih	Penguatan dan Pengembangan koperasi merah putih	Penguatan dan Pengembangan koperasi merah putih	Penguatan dan Pengembangan koperasi merah putih	Penguatan dan Pengembangan koperasi merah putih	Penguatan dan Pengembangan koperasi merah putih
	- Pemberdayaan kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan petani
	- Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)	Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi (RMU dan alat pengolahan hasil lainnya)
	- Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.	Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran	- Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin	Pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi keluarga miskin
	- Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan	Kemitraan dengan perusahaan lokal untuk perluasan lapangan pekerjaan
	- Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan	Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketanagakerjaan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting	Perluasan program bantuan sosial berbasis data desa (DTSEN), disertai peningkatan efektivitas targeting
	- Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.	Pelatihan vokasional dan life-skill untuk segmen usia produktif, keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga.
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan peningaktan kerukunan antar umat beragama	- Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	- Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda	Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda	Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda	Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda	Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda	Pelestarian dan penetapan cagar budaya benda dan tak benda
	- Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.	Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.

Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi				
			Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
		Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial

Sumber : Hasil Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5.4. Program Prioritas RPJMD

Program prioritas pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta outcome yang dihasilkan serta disesuaikan dengan numenklatur pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana telaah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan menter! Dalam negeri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024. Untuk lebih jeelasnya program prioritas RPJMD Kabuapten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 14
Program Prioritas RPJMD

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Visi : Dharmasraya Sejahtera Merata					
Misi 1 : Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.					
	Tujuan : Pemerataan Akses dan pengembangan Infrastruktur Daerah			Indeks Kinerja Infrastruktur	
		Sasaran : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kapasitas Air Baku	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		1.03.03 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Sasaran : Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan
		Sasaran : Mningkatkan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Rumah tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Akses Rumah tangga terhadap Konsumsi Air Minum	1.03.02 - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
			Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.03.03 - Program Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi Lingkungan
Misi 2 : Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien					
	Tujuan : meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola yang berinteritas dan adaptif			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
				Indeks reformasi birokrasi	
				Indeks Daya Saing Daerah	
		Sasaran : Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	4.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini BPK terhadap laporan keuangan	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	indeks reformasi hukum	4.01.02 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	5.05.03 - Program Riset Dan Inovasi Daerah
		Sasaran : Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital		Indeks Kepuasan Masyarakat	5.02.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Indeks SPBE	2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Indeks masyarakat digital indonesia	2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Indeks Pelayanan Publik	4.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Sasaran : Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase nagari mandiri	2.13.02 - Program Penataan Desa
Misi 3 : Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan					
	Tujuan : Terwujudnya pelestarian lingkungan serta resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Sasaran : meningkatnya kualitas lingkungan	Menurunnya pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas air	2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Tutupan Lahan	2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Sasaran : meningkatnya resiliensi terhadap bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Membangun SDM untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata					
	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	
		Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Usia Harapan Hidup	1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sasaran : Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Harapan lama sekolah	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka rata-rata lama sekolah	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan
		Sasaran : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	2.08.07 - Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	2.08.04 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Misi 5 : TRANSFORMASI EKONOMI					
	Tujuan : Terwujudnya stabiitas ekonomi makro			Pertumbuhan PDRB	
				Gini Rasio	
				tingkat inflasi	
		Sasaran : meningkatnya pendapatan masyaraat dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pendapatan perkapita	3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya produktivitas koperasi		2.17.06 - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		2.17.07 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang eflsien, merata dan terintegrasi	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Rasio net eksport terhadap PDRB	3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor
		Sasaran : mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Tingkat kemiskinan	1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran	2.07.03 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi 6 : TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA BERBASIS ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH SEBAGAI PONDASI					
	Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Sasaran : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dan peningkatan kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	2.22.03 - Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		2.22.05 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	4.01.02 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Sasaran : Penerapan kehidupan berbudaya di masyarakat dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan			

Sumber : Hasil Analisis Tim penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5.5. Program Unggulan

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga dapat menjabarkan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga tercapainya target kinerja RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih terdapat 12 (dua belas) program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3- 15
Program Unggulan Berdasarkan Misi Pembangunan
Kabupaten DharmasrayaTahun 2025-2029

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029		PROGRAM UNGGULAN	
1	Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.	*	Ruang terbuka hijau dan infrastruktur untuk pusat kegiatan industri kreatif, ekonomi digital, olahraga, edukasi dan wisata
2	Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	*	Meningkatkan kesejahteraan guru, kader posyandu dan ASN
3	Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	5	Ruang terbuka hijau dan infrastruktur untuk pusat kegiatan industri kreatif, ekonomi digital, olahraga, edukasi dan wisata
4	Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	8	Pelayanan cek Kesehatan gratis dan rutin untuk lansia langsung ke rumah dan bantuan langsung sesuai kebutuhan
		9	Pendidikan gratis untuk pelajar dan beasiswa untuk hafidz Al-quran, mahasiswa SI, S2, dan S3
		11	Meningkatkan kesejahteraan guru, kader posyandu dan ASN
		7	Bantuan langsung tunai Rp 3 juta setiap ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menghindari stunting
5	Transformasi ekonomi	1	Penyediaan dan pembinaan bibit komoditas unggulan dan bantuan alat produksi

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029		PROGRAM UNGGULAN	
			pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat
		2	Pembangunan pabrik pupuk untuk petani
		3	Membangun infrastruktur pertanian dan perkebunan seperti akses jembatan dan jalan
		4	Bantuan pembinaan, akses pendanaan dan pembangunan infrastruktur produksi dan pemasaran produk UMKM
		6	Mendirikan BUMD pengolahan SDA dan pengolahan hasil perkebunan masyarakat
6	Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi	10	Pembinaan dan membuat event olahraga tahunan antar kampung setiap cabang olahraga
		12	Anggaran khusus program kerja, budaya untuk tokoh adat dan ulama.

3.3.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya diwujudkan melalui sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antara kedua dokumen ini sangat erat, memastikan bahwa setiap langkah strategis dalam jangka menengah mendukung visi pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah untuk periode lima tahunan, sekaligus menjadi instrumen operasional dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2045.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD 2025–2029 harus selaras, menjabarkan, dan memulai pelaksanaan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045. Keterkaitan visi dan misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terarah.

Keterkaitan bersifat hierarkis dan sinkron dimana setiap misi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029 berperan sebagai langkah operasional dan konkrit dari misi-misi strategis dalam RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2045. RPJMD berfungsi sebagai fase awal atau perodesasi/ tahap I (2025–2029) perkuatan fondasi transformasi dalam tahapan menuju capaian visi jangka panjang 2045, yakni *Dharmasraya yang sejahtera, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan*. Selain itu prinsip kesinambungan dan konsistensi perencanaan tercermin dari adanya benang merah yang kuat antara pembangunan SDM, transformasi ekonomi, tata kelola, budaya, hingga lingkungan.

Secara hierarkis, RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun, yang menjadi acuan strategis bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. RPJMD 2025–2029 berperan sebagai tahapan awal dalam siklus perencanaan jangka panjang tersebut, dengan merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur yang diarahkan untuk mencapai visi besar “Dharmasraya Maju Yang Berbudaya Dan Berkelanjutan Tahun 2025”.

Setiap misi dalam RPJMD 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan misi dalam RPJPD 2025–2045. Misalnya, misi RPJMD dalam membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata secara langsung mendukung misi RPJPD dalam memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, serta membangun wilayah secara merata dan berkeadilan. Misi lainnya seperti transformasi ekonomi, pembangunan SDM, pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya lokal, serta reformasi tata kelola pemerintahan, juga menunjukkan hubungan sinergis dengan arah pembangunan jangka panjang yang diamanatkan dalam RPJPD. Dengan demikian, RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjabarkan agenda pembangunan lima tahunan, tetapi juga memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan menuju pencapaian tujuan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2045.

Aspek Infrastruktur dan Wilayah: Misi pertama RPJMD, "Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata," memiliki korelasi langsung dengan RPJPD yang berupaya "Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan di Wilayah Tenggara Sumatera Barat" serta "Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan." Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan fondasi fisik yang kuat dan merata sebagai prasyarat bagi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Dharmasraya.

Tata Kelola Pemerintahan: Selanjutnya, misi RPJMD yang berfokus pada "Transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien" secara eksplisit mendukung misi RPJPD untuk "Mewujudkan transformasi tata kelola pembangunan yang

maju." Hal ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik (good governance) sebagai pendorong utama kemajuan pembangunan daerah.

Pelestarian Lingkungan dan Budaya: Misi ketiga RPJMD, "Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan," sejalan dengan upaya RPJPD dalam "Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK", pelestarian aset budaya dan ekologi." Ini mengindikasikan bahwa pelestarian lingkungan hidup dan kekayaan budaya merupakan elemen integral dari pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas bersama. Misi RPJMD untuk "Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata" selaras dengan misi RPJPD "Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera." Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

Transformasi Ekonomi: Dalam sektor ekonomi, misi RPJMD "Transformasi ekonomi" berpadu dengan misi RPJPD "Mewujudkan transformasi ekonomi daerah bertumpu pada kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi dan ketahanan ekonomi lokal." Fokusnya adalah pada pengembangan sektor ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Transformasi Sosial dan Budaya: Misi RPJMD tentang "Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah sebagai pondasi" mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Dharmasraya. Hal ini diperkuat oleh RPJPD yang juga menekankan "Memantapkan keamanan daerah tangguh melalui penegakan supremasi hukum, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta stabilitas ekonomi makro daerah" dan kembali menegaskan "Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia berkualitas yang terdidik, sehat dan sejahtera" serta "Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penegakan nilai “ABS-SBK", pelestarian aset budaya dan ekologi." Ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial budaya yang berlandaskan adat dan agama adalah pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan beradab.

Tabel 3- 16
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan Misi Kabupaten Dharmasraya RPJPD Tahun 2025-2045

Misi RPJMD 2025–2029	Keterkaitan dengan Misi RPJPD 2025–2045	Penjelasan Keterkaitan
Misi 1 : Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata	• Misi 7: Pembangunan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan • Misi 6: Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Misi ini berperan sebagai langkah awal membangun pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur
Misi 2 : Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	- Misi 3: Transformasi tata kelola pembangunan yang maju - Misi 4: Ketahanan daerah melalui hukum dan stabilitas	Misi RPJMD mendukung reformasi birokrasi, tata kelola digital, dan efisiensi pelayanan publik
Misi 3 : Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	▪ Misi 5: Ketahanan ekologi dan budaya ▪ Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	RPJMD fokus pada ekosistem lestari dan keberlanjutan jangka panjang sejalan dengan misi RPJPD
Misi 4 : Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Misi 1: Transformasi sosial menuju SDM berkualitas	Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mendukung pembangunan manusia unggul 2045
Misi 5 : Transformasi ekonomi	Misi 2: Transformasi ekonomi bernilai tambah dan ketahanan lokal	RPJMD menjadi fondasi pengembangan sektor unggulan dan produktivitas daerah
Misi 6 : Transformasi sosial dan budaya berbasis ABS–SBK	✓ Misi 5: Ketahanan sosial budaya dan pelestarian nilai ABS-SBK ✓ Misi 4: Stabilitas sosial dan kerukunan	Penguatan identitas budaya lokal menjadi basis sosial pembangunan berkelanjutan di RPJPD

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.3.5. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, serta disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2025–2029. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan adanya konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan provinsi.

Secara substantif, visi Kabupaten Dharmasraya selaras dan mendukung pencapaian visi Provinsi Sumatera Barat. Fokus pada *"sejahtera dan merata"* di tingkat kabupaten merupakan bagian integral dari upaya provinsi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai budaya *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* yang menjadi basis ideologis Sumatera Barat, juga menjadi fondasi dalam misi Dharmasraya, khususnya pada transformasi sosial dan budaya.

Visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029 yaitu *"Dharmasraya Sejahtera Merata"* memiliki keselarasan strategis dengan visi Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD 2025–2029, yakni *"Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan"*. Keduanya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, kemajuan ekonomi dan sosial, serta penguatan nilai-nilai lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, misi-misi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya merupakan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Misi pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada konteks lokal, namun juga memperkuat posisi Dharmasraya sebagai bagian dari sistem wilayah dan ekonomi provinsi.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Dharmasraya dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kesinambungan vertikal dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara substansial mendukung arah pembangunan Provinsi, khususnya dalam mendorong pembangunan yang merata, berkeadilan, berbasis potensi lokal, serta berakar pada nilai budaya dan agama.

Pemetaan Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya terhadap Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 3- 17
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dengan Misi Kabupaten Dharmasraya RPJPD Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya	Keterkaitan dengan Misi Provinsi Sumatera Barat	Keterangan
Misi 1: Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata	- Misi 5: Infrastruktur Berkeadilan dan Tanggap Bencana - Misi 3: Nagari sebagai basis kemajuan	Peningkatan infrastruktur mendukung konektivitas wilayah dan kesiapsiagaan bencana
Misi 2: Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	- Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Efektif	Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik sejalan dengan agenda provinsi
Misi 3: Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	- Misi 2: Ekonomi berkelanjutan - Misi 5: Tanggap bencana	Pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi perhatian bersama
Misi 4: Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	- Misi 1: Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas - Misi 6: Kehidupan beradat dan keluarga berkualitas	Investasi di sektor pendidikan dan kesehatan mendukung kesejahteraan masyarakat
Misi 5: Transformasi ekonomi	- Misi 2: Lumbung pangan nasional - Misi 4: Pusat perdagangan dan bisnis- Misi 7: UMKM dan ekonomi kreatif	Arah transformasi ekonomi lokal mendukung struktur ekonomi provinsi berbasis pertanian, perdagangan, dan UMKM
Misi 6: Transformasi sosial dan budaya berbasis ABS-SBK	- Misi 6: Kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan lokalitas	Penguatan nilai ABS-SBK sebagai identitas budaya provinsi dijabarkan secara nyata di kabupaten

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.3.6. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN memiliki fokus pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas., transformasi ekonomi menuju hilirisasi, digitalisasi, dan inovasi, ketahanan sosial-budaya dan

lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan fokus dari visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan antarwilayah dalam kabupaten, penguatan infrastruktur, kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan potensi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya "Sejahtera Merata" sangat selaras dan mendukung visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Keduanya menekankan pentingnya: pembangunan yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, perbaikan tata kelola dan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan keberlanjutan. Artinya Visi "Dharmasraya Sejahtera Merata" secara langsung mendukung pencapaian visi "Bersama Indonesia Maju" melalui pendekatan lokal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata. RPJMD Dharmasraya menjadi bagian integral dari sistem perencanaan nasional yang berjenjang, berfungsi untuk mengakselerasi tujuan nasional dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Arah visi RPJMN Pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan, sejalan dengan semangat “merata” dalam visi Dharmasraya untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan nagari, untuk transformasi ekonomi dan hilirisasi yang didukung oleh visi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan sektor unggulan (pertanian, UMKM).dengan pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Selain itu arah visi RPJMD dalam rangka Peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam prioritas Dharmasraya untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif, Ketahanan sosial dan lingkungan yang selaras dengan fokus daerah pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan berbasis kearifan lokal. Untuk Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diakomodasi oleh komitmen daerah dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Misi RPJMD Dharmasraya 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dan kuat dengan arah dan strategi nasional RPJMN 2025–2029. Setiap misi daerah merupakan *konkretisasi* dari misi nasional dengan mempertimbangkan konteks lokal, seperti budaya ABS-SBK, karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam Dharmasraya. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD Dharmasraya tidak hanya mendukung tetapi juga menyelaraskan diri sebagai bagian integral dari pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peran aktif daerah.

Dari sisi misi pembangunan, keterkaitan antara Kabupaten Dharmasraya dan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
   Misi pertama Dharmasraya untuk membangun infrastruktur sejalan dengan misi nasional dalam mendorong pengembangan infrastruktur berkualitas, kewirausahaan, serta agromaritim. Dharmasraya sebagai daerah strategis di perbatasan provinsi memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai bagian dari strategi pemerataan nasional.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
   Upaya Dharmasraya dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional mendukung agenda reformasi politik, hukum, dan birokrasi pada tingkat nasional. Tata kelola yang baik di tingkat lokal merupakan pondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih, responsif, dan akuntabel secara nasional.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekologis
   Misi pelestarian lingkungan Dharmasraya berkaitan langsung dengan misi nasional dalam menciptakan kehidupan harmonis dengan lingkungan dan budaya, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengingat Dharmasraya memiliki sumber daya alam yang melimpah, pendekatan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan hijau Indonesia.

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Fokus pembangunan SDM di Dharmasraya, dimana melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja dan mendukung penuh agenda nasional dalam menciptakan SDM unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan bonus demografi dan transformasi teknologi global.

5. Transformasi Ekonomi Lokal dan Nasional
   Misi transformasi ekonomi Dharmasraya, melalui hilirisasi pertanian, penguatan UMKM, dan ekonomi kreatif yang beririsan langsung dengan misi nasional dalam hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Kabupaten menjadi basis penting bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kawasan metropolitan.

6. Penguatan Nilai Sosial dan Budaya Lokal
   Komitmen Dharmasraya terhadap nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sangat sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat kehidupan berbudaya, toleran, dan berkarakter. Hal ini memperkaya keragaman budaya bangsa dan memperkuat identitas nasional melalui pendekatan lokal.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Dharmasraya dan RPJMN 2025–2029 menunjukkan bahwa pembangunan daerah bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Dengan menyelaraskan visi dan misi di tingkat lokal dan nasional, Kabupaten Dharmasraya tidak hanya mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga ikut berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045: adil, makmur, berkelanjutan dan berdaya saing global.

Tabel 3- 18
Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Dharmasraya	Keterkaitan dengan Misi RPJMN	Penjelasan Keterkaitan
Misi 1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata	Misi 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Misi 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Sejalan dengan Misi RPJMN tentang pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di Dharmasraya bertujuan membuka konektivitas dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Misi 2. Pemerintahan yang transparan, profesional, efektif dan efisien	Misi 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusi Misi 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mendukung penguatan demokrasi, transparansi, serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Efektivitas pemerintahan daerah memperkuat tata kelola yang sejalan dengan semangat nasional.
Misi 3. Mengembangkan sistem, kebijakan dan implementasi pelestarian lingkungan	Misi 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Misi 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama	Berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pelestarian lingkungan serta harmonisasi antara alam, budaya dan kehidupan sosial.

Misi RPJMD Dharmasraya	Keterkaitan dengan Misi RPJMN	Penjelasan Keterkaitan
	untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
Misi 4. Membangun SDM untuk menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata	Misi 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan	Sangat selaras dengan fokus nasional terhadap peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pembangunan SDM lokal mendukung produktivitas dan daya saing daerah.
Misi 5. Transformasi ekonomi	Misi 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Misi 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Misi 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Misi 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Sejalan dengan transformasi ekonomi nasional melalui pengembangan industri lokal, hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan. Dharmasraya diharapkan mendorong pertumbuhan inklusif dan berbasis potensi daerah.
Misi 6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Misi 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusi Misi 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Kuat relevansinya dengan penguatan ideologi, nilai luhur bangsa, serta harmoni sosial-budaya. Nilai-nilai lokal ini mendukung ketahanan budaya dan sosial masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

3.5.6. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN tahun 2025-2029

A. Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah Untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

Mengacu pada dokumen RPJPD tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dilaksanakan dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :

a. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
c. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
d. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan penguatan dan perluasan perlindungan sosial terpadu melalui penyempurnaan basis data kemiskinan terpadu, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, penyediaan bantuan darurat untuk kelompok paling rentan, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penerapan pendekatan graduasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
2. Penyediaan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan untuk pengentasan kemiskinan dalam upaya penurunan angka putus sekolah dan stunting
3. Penguatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin, revitalisasi kawasan kumuh perkotaan dan dan infrastruktur pendukung lainnya.

4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin terutama perempuan kepala keluarga, penyediaan pelatihan dasar keterampilan dan pelaksanaan program padat karya
5. Pembangunan sentra ekonomi lokal dan desa sebagai sentra produksi pangan berkelanjutan
6. Penguatan Industri Kecil Menengah, Pengembangan UKM dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi ekonomi perdesaan

B. Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup.

1) Pendidikan Berkualitas yang Merata
   a. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
   b. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
   c. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
   d. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
   e. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
2) Kesehatan untuk Semua
   a. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
   b. Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
   c. Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan
   d. Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola
3) Mencapai Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Pemuda, Prestasi Olahraga, dan pemajuan kebudayaan
   - Peningkatan Ketangguhan Keluarga
   - Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak
   - Peningkatan Kualitas Pemuda
   - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan
   - Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
   - Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
   - Pemajuan kebudayaan

C. Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah dengan berbasis pada keunggulan lokal, peningkatan produktivitas, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Arah kebijakan Kabuapten Dharmasraya difokuskan pada:

a. Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis dengan mendorong hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah melalui digitalisasi dan inovasi.
b. Peningkatan produktivitas dan daya saing UKM, termasuk fasilitasi akses terhadap permodalan, pelatihan vokasi, dan integrasi dengan rantai pasok industri.
c. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama akses jalan antar kecamatan
d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa/nagari melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), pertanian berkelanjutan, dan pelestarian kearifan lokal sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan.
e. Penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Program prioritas yang mendukung arah kebijakan tersebut antara lain adalah :

a. Revitalisasi kawasan pertanian produktif dan modernisasi alat pertanian.
b. Peningkatan kapasitas wirausaha muda dan perempuan melalui inkubasi bisnis.
c. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal dan sentra industri kecil.
d. Penguatan daya saing pariwisata berbasis budaya dan alam.
e. Program desa mandiri energi dan pemanfaatan energi bersih.
f. Percepatan konektivitas melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis Kabupaten Dharmasraya.

Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ini, Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional, sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029.

Dalam upaya meningkatkan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan

signifikan dalam penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akses informasi kini dapat diperoleh secara mudah melalui internet tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan mulai kehilangan daya tarik utamanya di mata masyarakat, terutama generasi muda.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program- program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 3- 19
Program Strategis Nasional (ProSN)

NO	ProSN	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*)

NO	ProSN	Proyek/Kegiatan
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran 4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) 2. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Dalam RPJMN Tahun tahun 2025-2029, Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat dalam kebijakan kewiyahan di Provinsi Sumatera Barat. Setelah adanya konsultasi ke Bappenas, maka telah diarahkan fokus pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Swasembada Pangan, Swasembada Air, swasembada Energi, infrastruktur Hilirisasi dan Peningkatan SDM

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada sub bab ini menyajikan tentang rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Kabupaten Dharmasraya periode 2025-2029. Alokasi anggaran pada program Perangkat Daerah juga memperhatikan dinamika pembangunan yang harus ditindaklanjuti salah satunya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dan untuk mewujudkan Dharmasraya Sejahtera Merata.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kabupaten Dharmasraya selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas fiscal. penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu dan dijabarkan dalam Tabel 4.1. Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengambarkan dinamika nomenklatur Program pada setiap Perangkat Daerah. Tabel Program tahun 2026-2029 merupakan Nomenklatur Program yang dilaksanakan pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2025-2029.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					316.552.589.545,000		319.717.165.440,000		322.913.387.095,000		326.141.570.966,000		329.402.036.676,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					280.622.933.145,000		283.429.162.476,000		286.263.454.101,000		289.126.088.642,000		292.017.349.529,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	280.622.933.145,000	82	283.429.162.476,000	83	286.263.454.101,000	84	289.126.088.642,000	85	292.017.349.529,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					35.614.656.400,000		35.970.802.964,000		36.330.510.994,000		36.693.816.104,000		37.060.754.265,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	84,92	85,32	86,72	35.614.656.400,000	87,62	35.970.802.964,000	88,68	36.330.510.994,000	89,03	36.693.816.104,000	91,54	37.060.754.265,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	94,23	94,69	95,32		96,02		97,33		98,34		99,01		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	81,3	82,7	83,95		85,8		87,9		89,96		92		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Persentase)	21,84	25,93	30,03		34,13		38,23		42,33		46,43		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					220.000.000,000		222.200.000,000		224.422.000,000		226.666.220,000		228.932.882,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	28,51	25,25	23,71	220.000.000,000	21,76	222.200.000,000	19,43	224.422.000,000	17,01	226.666.220,000	15,80	228.932.882,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	76,29	78,61	80,01		82,50		84,45		86,90		88,00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	94,08	95,32	96,55	50.000.000,000	97,38	50.000.000,000	98,21	50.000.000,000	99,31	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					266.965.645.991,000		272.678.485.894,000		277.761.813.836,000		282.957.341.266,000		288.275.681.093,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					240.713.932.419,000		246.166.578.079,000		250.986.973.561,000		255.916.800.887,000		260.966.643.215,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	147.684.820.782,000	82	149.900.093.094,000	83	151.399.094.025,000	84	152.913.084.965,000	85	154.442.215.815,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan RSUD					70.000.000.000,000		72.000.000.000,000		74.000.000.000,000		76.000.000.000,000		78.000.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Meningkatnya kinerja pelayanan Puskesmas					1.681.834.568,000		1.732.289.605,000		1.784.258.293,000		1.837.786.042,000		1.892.919.623,000	1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Situng I
Meningkatnya pelayanan RSUD					7.200.000.000,000		7.920.000.000,000		8.710.000.000,000		9.580.000.000,000		10.540.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0020 - Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai
Meningkatkan kinerja pelayanaan Puskesmas					452.979.833,000		466.569.228,000		480.566.305,000		494.983.294,000		509.832.793,000	1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Sungai Limau
Meningkatnya pelayanan Puskesmas					782.851.500,000		806.337.045,000		830.527.156,000		855.442.971,000		881.106.260,000	1.02.0.00.0.00.01.0023 - Puskesmas Tiumang
Meningkatkan pelayanan Puskesmas					936.759.411,000		964.862.193,000		993.808.059,000		1.023.622.301,000		1.054.330.970,000	1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Silago
Meningkatkan pelayanan Puskesmas					936.759.411,000		964.862.193,000		993.808.059,000		1.023.622.301,000		1.054.330.970,000	1.02.0.00.0.00.01.0025 - Puskesmas Sialang
Meningkatkan pelayanan Puskesmas					935.262.890,000		963.320.776,000		992.220.400,000		1.021.987.012,000		1.052.646.622,000	1.02.0.00.0.00.01.0026 - Puskesmas Situng II
Meningkatnya pelayanan Puskesmas					635.339.856,000		654.400.052,000		674.032.054,000		694.253.015,000		715.080.606,000	1.02.0.00.0.00.01.0027 - Puskesmas Padang Laweh
Meningkatkan pelayanan Puskesmas					417.380.000,000		429.901.400,000		442.798.442,000		456.082.395,000		469.764.867,000	1.02.0.00.0.00.01.0028 - Puskesmas Koto Besar
Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas					2.106.584.802,000		2.169.782.346,000		2.234.875.816,000		2.301.922.091,000		2.370.979.754,000	1.02.0.00.0.00.01.0029 - Puskesmas Koto Baru
Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas					1.465.690.000,000		1.509.660.700,000		1.554.950.521,000		1.601.599.037,000		1.649.647.008,000	1.02.0.00.0.00.01.0030 - Puskesmas Sungai Rumbai
Meningkatnya kualitas layanan Puskesmas					824.000.000,000		848.720.000,000		874.181.600,000		900.407.048,000		927.419.259,000	1.02.0.00.0.00.01.0031 - Puskesmas Gunung Medan
Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas					2.092.913.856,000		2.155.701.272,000		2.220.372.310,000		2.286.983.479,000		2.355.592.983,000	1.02.0.00.0.00.01.0032 - Puskesmas Sungai Dareh
Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas					1.023.425.510,000		1.054.128.275,000		1.085.752.124,000		1.118.324.687,000		1.151.874.428,000	1.02.0.00.0.00.01.0033 - Puskesmas Timpeh
Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas					661.260.000,000		681.097.800,000		701.530.734,000		722.576.656,000		744.253.956,000	1.02.0.00.0.00.01.0034 - Puskesmas Beringin Sakti
Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas					626.070.000,000		644.852.100,000		664.197.663,000		684.123.593,000		704.647.301,000	1.02.0.00.0.00.01.0035 - Puskesmas Situng IV
Meningkatkan kualitas layanan Labkesda					250.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000		400.000.000,000		450.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0019 - Laboratorium Kesehatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					23.293.925.155,000		23.526.864.407,000		23.762.133.051,000		23.999.754.381,000		24.239.751.925,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	50,7	51,7	53	23.293.925.155,000	54,8	23.526.864.407,000	56	23.762.133.051,000	57,7	23.999.754.381,000	60	24.239.751.925,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13	15	14		13		12		11		10		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	187	172	160		150		140		130		120		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persentase)	100	85	87		90		94		97		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	49,8	60	65		70		75		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk (per 100.000 penduduk)	510	908	785		681		607		551		508		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	96,33	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	99,06	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	95,62	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (Persentase)	97,37	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	96,71	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Persentase)	91,97	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Persentase)	91,39	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Persentase)	88,04	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	99,32	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	6,5	17,5	16		15		14		13		11,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13	15	14		13		12		11		10		1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					614.589.000,000		614.589.000,000		614.589.000,000		614.589.000,000		614.589.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	614.589.000,000	100	614.589.000,000	100	614.589.000,000	100	614.589.000,000	100	614.589.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					526.200.000,000		526.200.000,000		526.200.000,000		526.200.000,000		526.200.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	526.200.000,000	100	526.200.000,000	100	526.200.000,000	100	526.200.000,000	100	526.200.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.816.999.417,000		1.844.254.408,000		1.871.918.224,000		1.899.996.998,000		1.928.496.953,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	10	20	1.816.999.417,000	30	1.844.254.408,000	40	1.871.918.224,000	50	1.899.996.998,000	60	1.928.496.953,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					85.685.399.220,000		85.874.022.708,000		80.615.475.549,000		80.809.800.183,000		81.007.039.684,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.794.899.220,000		11.971.822.708,000		12.151.400.049,000		12.333.671.050,000		12.518.676.115,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	11.794.899.220,000	82	11.971.822.708,000	83	12.151.400.049,000	84	12.333.671.050,000	85	12.518.676.115,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.000.000.000,000		9.000.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi (Persentase)	72,44	73	73,93	9.000.000.000,000	75,06	9.000.000.000,000	76,76	4.000.000.000,000	77,66	4.000.000.000,000	78,07	4.000.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	40	50	55		60		65		70		80		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.465.000.000,000		3.465.000.000,000		3.465.000.000,000		3.465.000.000,000		3.465.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	30,02	30,88	31,73	3.465.000.000,000	32,58	3.465.000.000,000	33,44	3.465.000.000,000	34,15	3.465.000.000,000	35,15	3.465.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Persentase)	89,64	90,50	91,35		92,21		93,06		93,92		94,77		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (Persentase)	3,27	2,85	2,77		2,69		2,62		2,55		2,49		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					780.000.000,000		791.700.000,000		803.575.500,000		815.629.133,000		827.863.569,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	0,1	0,1	780.000.000,000	0,1	791.700.000,000	0,1	803.575.500,000	0,1	815.629.133,000	0,1	827.863.569,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (Persentase)	92,45	93,31	94,16	550.000.000,000	95,02	550.000.000,000	95,87	550.000.000,000	96,73	550.000.000,000	97,58	550.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	55,08	55,58	400.000.000,000	56,08	400.000.000,000	56,58	400.000.000,000	57,08	400.000.000,000	57,58	400.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000		1.500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	1.500.000.000,000	0	1.500.000.000,000	0	1.500.000.000,000	0	1.500.000.000,000	0	1.500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.560.000.000,000		4.560.000.000,000		4.560.000.000,000		4.560.000.000,000		4.560.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	70,53	70,74	71,28	4.560.000.000,000	72,02	4.560.000.000,000	72,67	4.560.000.000,000	73,53	4.560.000.000,000	74,17	4.560.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1,63	1,73	1,84	200.000.000,000	1,94	200.000.000,000	2,04	200.000.000,000	2,14	200.000.000,000	2,24	200.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					51.500.000.000,000		51.500.000.000,000		51.500.000.000,000		51.500.000.000,000		51.500.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan (Persentase)	54,58	55,08	55,58	51.500.000.000,000	56,08	51.500.000.000,000	56,58	51.500.000.000,000	57,08	51.500.000.000,000	57,58	51.500.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					685.500.000,000		685.500.000,000		685.500.000,000		685.500.000,000		685.500.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	18,27	19,23	20,19	685.500.000,000	21,15	685.500.000,000	22,12	685.500.000,000	23,08	685.500.000,000	24,04	685.500.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR) (Persentase)	10,64	10,72	10,81	1.250.000.000,000	10,90	1.250.000.000,000	10,99	800.000.000,000	11,09	800.000.000,000	11,09	800.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.645.308.178,000		8.024.175.301,000		8.143.600.430,000		8.264.816.937,000		7.465.147.252,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.682.808.178,000		3.738.050.301,000		3.794.121.055,000		3.851.032.871,000		3.908.798.364,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	3.682.808.178,000	82	3.738.050.301,000	83	3.794.121.055,000	84	3.851.032.871,000	85	3.908.798.364,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					52.500.000,000		52.500.000,000		52.500.000,000		52.500.000,000		52.500.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Persentase)	0	0	0	52.500.000,000	0	52.500.000,000	0	52.500.000,000	0	52.500.000,000	0	52.500.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.250.000.000,000		1.268.750.000,000		1.287.781.250,000		1.307.097.969,000		404.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (Persentase)	0	0	0	1.250.000.000,000	0	1.268.750.000,000	0	1.287.781.250,000	0	1.307.097.969,000	0	404.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					325.000.000,000		329.875.000,000		334.823.125,000		339.845.472,000		344.943.154,000	
Berkurangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh					325.000.000,000		329.875.000,000		334.823.125,000		339.845.472,000		344.943.154,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.325.000.000,000		2.625.000.000,000		2.664.375.000,000		2.704.340.625,000		2.744.905.734,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Persentase)	0	0	0	2.325.000.000,000	0	2.625.000.000,000	0	2.664.375.000,000	0	2.704.340.625,000	0	2.744.905.734,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertiflkasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	0	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.693.946.750,000		15.857.713.470,000		16.023.936.691,000		16.192.653.261,000		16.363.900.578,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.917.781.350,000		11.081.548.070,000		11.247.771.291,000		11.416.487.861,000		11.587.735.178,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	8.164.155.350,000	82	8.286.617.680,000	83	8.410.916.945,000	84	8.537.080.700,000	85	8.665.136.910,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.753.626.000,000	82	2.794.930.390,000	83	2.836.854.346,000	84	2.879.407.161,000	85	2.922.598.268,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					518.000.000,000		518.000.000,000		518.000.000,000		518.000.000,000		518.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Persentase)	100	100	100	233.000.000,000	100	233.000.000,000	100	233.000.000,000	100	233.000.000,000	100	233.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Penyelesaian Konfilk Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	100	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	70	0	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					638.165.400,000		638.165.400,000		638.165.400,000		638.165.400,000		638.165.400,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Persentase)	100	100	100	438.165.400,000	100	438.165.400,000	100	438.165.400,000	100	438.165.400,000	100	438.165.400,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	12,7	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.620.000.000,000		3.620.000.000,000		3.620.000.000,000		3.620.000.000,000		3.620.000.000,000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran (Persentase)	100	100	100	3.320.000.000,000	100	3.320.000.000,000	100	3.320.000.000,000	100	3.320.000.000,000	100	3.320.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.396.784.700,000		5.473.440.021,000		5.551.245.171,000		5.630.217.398,000		5.710.374.209,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.485.354.700,000		4.552.635.021,000		4.620.924.546,000		4.690.238.414,000		4.760.591.990,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85,28	85,94	4.485.354.700,000	88,69	4.552.635.021,000	88,75	4.620.924.546,000	89,25	4.690.238.414,000	89,44	4.760.591.990,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	23	23	25	35.000.000,000	30	35.000.000,000	50	35.000.000,000	75	35.000.000,000	90	35.000.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	80	80	80		80		80		80		80		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					625.000.000,000		634.375.000,000		643.890.625,000		653.548.984,000		663.352.219,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	100	100	625.000.000,000	100	634.375.000,000	100	643.890.625,000	100	653.548.984,000	100	663.352.219,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					115.000.000,000		115.000.000,000		115.000.000,000		115.000.000,000		115.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (Indeks)	0	76	77	115.000.000,000	78	115.000.000,000	79	115.000.000,000	80	115.000.000,000	81	115.000.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Indeks)	0	82	83		85		85		90		95		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	2	0	5		5		5		5		5		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	76	77		78		79		80		81		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	99,01	98,91	99,00		99,00		99,00		99,00		99,00		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					136.430.000,000		136.430.000,000		136.430.000,000		136.430.000,000		136.430.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Persentase)	100	100	100	136.430.000,000	100	136.430.000,000	100	136.430.000,000	100	136.430.000,000	100	136.430.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.948.839.360,000		6.024.534.327,000		6.101.364.719,000		6.179.347.567,000		6.258.500.158,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.046.331.160,000		5.122.026.127,000		5.198.856.519,000		5.276.839.367,000		5.355.991.958,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	5.046.331.160,000	82	5.122.026.127,000	83	5.198.856.519,000	84	5.276.839.367,000	85	5.355.991.958,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					51.000.000,000		51.000.000,000		51.000.000,000		51.000.000,000		51.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Persentase)	1	1	1	51.000.000,000	1	51.000.000,000	1	51.000.000,000	1	51.000.000,000	1	51.000.000,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (Persentase)	10	24	30	150.000.000,000	35	150.000.000,000	40	150.000.000,000	45	150.000.000,000	50	150.000.000,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					112.321.350,000		112.321.350,000		112.321.350,000		112.321.350,000		112.321.350,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	21	30	40	112.321.350,000	50	112.321.350,000	60	112.321.350,000	70	112.321.350,000	80	112.321.350,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					589.186.850,000		589.186.850,000		589.186.850,000		589.186.850,000		589.186.850,000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Persentase)	12	12	12	589.186.850,000	12	589.186.850,000	12	589.186.850,000	12	589.186.850,000	12	589.186.850,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.440.611.700,000		1.448.055.600,000		1.455.611.159,000		1.463.280.050,000		1.471.063.976,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					687.021.700,000		687.021.700,000		687.021.700,000		687.021.700,000		687.021.700,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif (Persentase)	4,81	4,85	4,88	687.021.700,000	4,91	687.021.700,000	4,95	687.021.700,000	4,98	687.021.700,000	5,00	687.021.700,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					131.130.000,000		131.130.000,000		131.130.000,000		131.130.000,000		131.130.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	131.130.000,000	100	131.130.000,000	100	131.130.000,000	100	131.130.000,000	100	131.130.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					42.000.000,000		42.000.000,000		42.000.000,000		42.000.000,000		42.000.000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang beperspektif gender dan hak anak sesuai standar (Persentase)	100	100	100	42.000.000,000	100	42.000.000,000	100	42.000.000,000	100	42.000.000,000	100	42.000.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau penyusunan kebijakan (Persentase)	0	50	55	15.000.000,000	60	15.000.000,000	70	15.000.000,000	75	15.000.000,000	85	15.000.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					69.200.000,000		69.200.000,000		69.200.000,000		69.200.000,000		69.200.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	61,57	61,62	69.200.000,000	61,68	69.200.000,000	62,56	69.200.000,000	62,73	69.200.000,000	63,13	69.200.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					496.260.000,000		503.703.900,000		511.259.459,000		518.928.350,000		526.712.276,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	0	66,83	66,95	496.260.000,000	67,20	503.703.900,000	67,55	511.259.459,000	67,75	518.928.350,000	67,90	526.712.276,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	76,54	76,71		76,82		76,91		76,99		82,02		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5.949.700.000,000		6.014.645.500,000		6.080.565.183,000		6.147.473.660,000		6.215.385.765,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.329.700.000,000		4.394.645.500,000		4.460.565.183,000		4.527.473.660,000		4.595.385.765,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	4.329.700.000,000	82	4.394.645.500,000	83	4.460.565.183,000	84	4.527.473.660,000	85	4.595.385.765,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000		1.100.000.000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	88,56	47,53	52,28	1.100.000.000,000	57,5	1.100.000.000,000	63,25	1.100.000.000,000	69,57	1.100.000.000,000	76,52	1.100.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000	
Meningkatnya diversiftkasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Indeks)	91,2	89	89,5	240.000.000,000	90	240.000.000,000	90,5	240.000.000,000	91	240.000.000,000	91,5	240.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persentase)	2	2	2	250.000.000,000	2	250.000.000,000	2	250.000.000,000	2	250.000.000,000	2	250.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Persentase)	71	84	85	30.000.000,000	86	30.000.000,000	87	30.000.000,000	88	30.000.000,000	89	30.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					105.000.000,000		105.000.000,000		105.000.000,000		105.000.000,000		105.000.000,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	0	10.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	0	50.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	5	10.000.000,000	10	10.000.000,000	15	10.000.000,000	20	10.000.000,000	25	10.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat (Persentase)	0	43	48	25.000.000,000	53	25.000.000,000	58	25.000.000,000	65	25.000.000,000	70	25.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.320.821.270,000		6.375.796.270,000		6.431.595.895,000		6.488.232.514,000		6.545.718.683,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.665.000.000,000		3.719.975.000,000		3.775.774.625,000		3.832.411.244,000		3.889.897.413,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	3.665.000.000,000	82	3.719.975.000,000	83	3.775.774.625,000	84	3.832.411.244,000	85	3.889.897.413,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					170.000.000,000		170.000.000,000		170.000.000,000		170.000.000,000		170.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkunganuntuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	0	170.000.000,000	0	170.000.000,000	0	170.000.000,000	100	170.000.000,000	0	170.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					198.000.000,000		198.000.000,000		198.000.000,000		198.000.000,000		198.000.000,000	
Menurunnya pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	51,11	71,24	71,44	198.000.000,000	71,64	198.000.000,000	71,84	198.000.000,000	72,04	198.000.000,000	72,24	198.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	91,97	75,86	76,16		76,46		76,76		77,06		77,36		2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	1,5	1,51	1,52	400.000.000,000	1,53	400.000.000,000	1,54	400.000.000,000	1,55	400.000.000,000	1,56	400.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	39,47	47,37	51,28	40.000.000,000	57,5	40.000.000,000	60,98	40.000.000,000	61,9	40.000.000,000	63,95	40.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					52.000.000,000		52.000.000,000		52.000.000,000		52.000.000,000		52.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (Persentase)	82	85	85	52.000.000,000	86	52.000.000,000	86	52.000.000,000	87	52.000.000,000	87	52.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000		140.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	10	10	140.000.000,000	15	140.000.000,000	15	140.000.000,000	15	140.000.000,000	20	140.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	5,21	5,64	6,07	15.000.000,000	6,51	15.000.000,000	6,94	15.000.000,000	7,38	15.000.000,000	7,81	15.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.620.821.270,000		1.620.821.270,000		1.620.821.270,000		1.620.821.270,000		1.620.821.270,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	0	70	69	1.620.821.270,000	68	1.620.821.270,000	67	1.620.821.270,000	66	1.620.821.270,000	65	1.620.821.270,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.687.541.754,000		4.747.579.880,000		4.808.518.579,000		4.870.371.357,000		4.933.151.928,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.002.541.754,000		4.062.579.880,000		4.123.518.579,000		4.185.371.357,000		4.248.151.928,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,03	86,50	88,50	4.002.541.754,000	89,50	4.062.579.880,000	90,65	4.123.518.579,000	91,25	4.185.371.357,000	92,50	4.248.151.928,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (Persentase)	0	0	0	195.000.000,000	0	195.000.000,000	0	195.000.000,000	0	195.000.000,000	0	195.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase)	94,19	96	97		98		99		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik (Persentase)	38,46	50	60		80		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					315.000.000,000		315.000.000,000		315.000.000,000		315.000.000,000		315.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persentase)	0	0	0	315.000.000,000	0	315.000.000,000	0	315.000.000,000	0	315.000.000,000	0	315.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					160.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	0	160.000.000,000	0	160.000.000,000	0	160.000.000,000	0	160.000.000,000	0	160.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	0	0	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.573.289.565,000		5.629.273.908,000		5.686.098.017,000		5.743.774.487,000		5.802.316.105,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.732.289.565,000		3.788.273.908,000		3.845.098.017,000		3.902.774.487,000		3.961.316.105,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	3.732.289.565,000	82	3.788.273.908,000	83	3.845.098.017,000	84	3.902.774.487,000	85	3.961.316.105,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	-	100	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	100	240.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					43.000.000,000		43.000.000,000		43.000.000,000		43.000.000,000		43.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	-	80,28	81	43.000.000,000	82	43.000.000,000	83	43.000.000,000	84	43.000.000,000	95	43.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					618.000.000,000		618.000.000,000		618.000.000,000		618.000.000,000		618.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	80	81	618.000.000,000	82	618.000.000,000	83	618.000.000,000	84	618.000.000,000	95	618.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					940.000.000,000		940.000.000,000		940.000.000,000		940.000.000,000		940.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	75	80,28	84,61	940.000.000,000	88,94	940.000.000,000	92,78	940.000.000,000	96,15	940.000.000,000	99,03	940.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	40,38	44,23	48,07		51,92		55,76		59,61		63,46		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.161.212.000,000		4.161.212.000,000		4.161.212.000,000		4.161.212.000,000		4.161.212.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					292.000.000,000		292.000.000,000		292.000.000,000		292.000.000,000		292.000.000,000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifzc Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Persentase)	17,2	14,7	12,9	292.000.000,000	11,5	292.000.000,000	10,5	292.000.000,000	9,7	292.000.000,000	9,2	292.000.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Persentase)	2,27	2,26	2,24		2,22		2,21		2,19		2,18		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	63,7	71,6	76,6		79,7		81,7		82,9		83,7		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung KB Mandiri (Persentase)	40,4	45,4	55,8		65,4		75,0		80,8		85,8		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.676.612.000,000		2.676.612.000,000		2.676.612.000,000		2.676.612.000,000		2.676.612.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (mCPR) (Persentase)	72,18	72,18	72,50	2.676.612.000,000	72,80	2.676.612.000,000	73,15	2.676.612.000,000	74,25	2.676.612.000,000	75,15	2.676.612.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Persentase)	9,55	9,55	9,15		8,95		8,40		8,15		7,35		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	14,08	11,02	9,4		84		8,0		7,7		7,6		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.192.600.000,000		1.192.600.000,000		1.192.600.000,000		1.192.600.000,000		1.192.600.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,8	57,8	58,4	1.192.600.000,000	59,2	1.192.600.000,000	60	1.192.600.000,000	60,7	1.192.600.000,000	61,4	1.192.600.000,000	1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	83,5	84,9	86,2		87,4		88,4		89,4		90,3		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	85,37	85,60	86,36		87,8		89,90		91,05		95,00		1.06.2.08.2.14.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					21.704.779.438,000		21.805.856.469,000		21.908.449.656,000		22.012.581.740,000		22.118.275.806,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.738.468.740,000		6.839.545.771,000		6.942.138.958,000		7.046.271.042,000		7.151.965.108,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	6.738.468.740,000	82	6.839.545.771,000	83	6.942.138.958,000	84	7.046.271.042,000	85	7.151.965.108,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.966.310.698,000		14.966.310.698,000		14.966.310.698,000		14.966.310.698,000		14.966.310.698,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100	100	14.966.310.698,000	100	14.966.310.698,000	100	14.966.310.698,000	100	14.966.310.698,000	100	14.966.310.698,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	V/C Rasio (Rasio)	0,4	0,4	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.852.036.800,000		5.922.461.617,000		5.993.942.806,000		6.066.496.213,000		6.140.137.922,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.694.987.800,000		4.765.412.617,000		4.836.893.806,000		4.909.447.213,000		4.983.088.922,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	4.694.987.800,000	82	4.765.412.617,000	83	4.836.893.806,000	84	4.909.447.213,000	85	4.983.088.922,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.082.049.000,000		1.082.049.000,000		1.082.049.000,000		1.082.049.000,000		1.082.049.000,000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Persentase)	0	50	55	1.082.049.000,000	60	1.082.049.000,000	65	1.082.049.000,000	70	1.082.049.000,000	75	1.082.049.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	3,61	3,90	4,21	75.000.000,000	4,72	75.000.000,000	5,12	75.000.000,000	5,27	75.000.000,000	5,70	75.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.905.100.000,000		4.958.501.500,000		5.012.704.023,000		5.067.719.583,000		5.123.560.377,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.560.100.000,000		3.613.501.500,000		3.667.704.023,000		3.722.719.583,000		3.778.560.377,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	80	81	3.560.100.000,000	82	3.613.501.500,000	83	3.667.704.023,000	84	3.722.719.583,000	85	3.778.560.377,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	6	72,18	8	5.000.000,000	8	5.000.000,000	8	5.000.000,000	9	5.000.000,000	9	5.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	20	23	25	40.000.000,000	30	40.000.000,000	33	40.000.000,000	37	40.000.000,000	40	40.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	37	39	40	30.000.000,000	41	30.000.000,000	42	30.000.000,000	44	30.000.000,000	45	30.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	24	27	30	50.000.000,000	33	50.000.000,000	40	50.000.000,000	45	50.000.000,000	50	50.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	5	100	14	35.000.000,000	16	35.000.000,000	18	35.000.000,000	20	35.000.000,000	25	35.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.110.000.000,000		1.110.000.000,000		1.110.000.000,000		1.110.000.000,000		1.110.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	55	60	63	1.110.000.000,000	69	1.110.000.000,000	71	1.110.000.000,000	74	1.110.000.000,000	80	1.110.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	15	16	18		19		21		22		24		2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2	2	2	75.000.000,000	2	75.000.000,000	2	75.000.000,000	2	75.000.000,000	2	75.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.604.544.973,000		4.658.613.148,000		4.713.492.345,000		4.769.194.730,000		4.825.732.651,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.604.544.973,000		3.658.613.148,000		3.713.492.345,000		3.769.194.730,000		3.825.732.651,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,7	89	89,5	3.604.544.973,000	90	3.658.613.148,000	90,5	3.713.492.345,000	91	3.769.194.730,000	91,5	3.825.732.651,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	102	100	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	115	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	12	12	12	50.000.000,000	12	50.000.000,000	12	50.000.000,000	12	50.000.000,000	12	50.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.642.006.350,000		6.702.887.545,000		6.764.681.958,000		6.827.403.288,000		6.891.065.437,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.058.746.350,000		4.119.627.545,000		4.181.421.958,000		4.244.143.288,000		4.307.805.437,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	80	81	4.058.746.350,000	82	4.119.627.545,000	83	4.181.421.958,000	84	4.244.143.288,000	85	4.307.805.437,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	B		BB		BB		BB		BB		2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					463.260.000,000		463.260.000,000		463.260.000,000		463.260.000,000		463.260.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	26,61	26,70	26,88	463.260.000,000	26,97	463.260.000,000	27,06	463.260.000,000	27,15	463.260.000,000	27,24	463.260.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.745.000.000,000		1.745.000.000,000		1.745.000.000,000		1.745.000.000,000		1.745.000.000,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase cabang olah raga yang aktif (Persentase)	37,5	37,5	42,5	1.745.000.000,000	50	1.745.000.000,000	57,5	1.745.000.000,000	60	1.745.000.000,000	67,5	1.745.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	23,08	23,08	23,08	375.000.000,000	23,08	375.000.000,000	23,08	375.000.000,000	23,08	375.000.000,000	23,08	375.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2,24	2,30	2,40	150.000.000,000	2,50	150.000.000,000	2,60	150.000.000,000	2,70	150.000.000,000	2,80	150.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Persentase)	0	0	20,00	75.000.000,000	22,00	75.000.000,000	25,00	75.000.000,000	27,00	75.000.000,000	28,00	75.000.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					5.243.840.576,000		5.243.840.576,000		5.543.840.576,000		5.543.840.576,000		5.543.840.576,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.714.435.026,000		2.714.435.026,000		2.714.435.026,000		2.714.435.026,000		2.714.435.026,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase lembaga adat yang aktif (Persentase)	18	18	18	2.714.435.026,000	38	2.714.435.026,000	58	2.714.435.026,000	78	2.714.435.026,000	100	2.714.435.026,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					2.368.955.850,000		2.368.955.850,000		2.368.955.850,000		2.368.955.850,000		2.368.955.850,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	78,72	82,98	2.368.955.850,000	87,23	2.368.955.850,000	91,49	2.368.955.850,000	95,74	2.368.955.850,000	100	2.368.955.850,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					135.449.700,000		135.449.700,000		135.449.700,000		135.449.700,000		135.449.700,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	60	135.449.700,000	69	135.449.700,000	79	135.449.700,000	89	135.449.700,000	100	135.449.700,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	60		69		79		89		100		2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0,000		0,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	5	300.000.000,000	9	300.000.000,000	17	300.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.437.230.045,000		3.479.113.496,000		3.521.625.198,000		3.564.774.576,000		3.608.571.195,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.792.230.045,000		2.834.113.496,000		2.876.625.198,000		2.919.774.576,000		2.963.571.195,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.792.230.045,000	82	2.834.113.496,000	83	2.876.625.198,000	84	2.919.774.576,000	85	2.963.571.195,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					515.000.000,000		515.000.000,000		515.000.000,000		515.000.000,000		515.000.000,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Indeks)	73,70	73,75	73,79	515.000.000,000	73,83	515.000.000,000	73,87	515.000.000,000	74,02	515.000.000,000	74,18	515.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					130.000.000,000		130.000.000,000		130.000.000,000		130.000.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimilik (Persentase)	0	100	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	100	130.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					280.000.000,000		280.000.000,000		280.000.000,000		280.000.000,000		280.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	96,39	96,45	96,50	250.000.000,000	96,55	250.000.000,000	96,60	250.000.000,000	96,63	250.000.000,000	96,65	250.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	50	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					925.000.000,000		925.000.000,000		925.000.000,000		925.000.000,000		925.000.000,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	350,48	815	1.230	20.000.000,000	1.650	20.000.000,000	2.060	20.000.000,000	2.500	20.000.000,000	2.600	20.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					810.000.000,000		810.000.000,000		810.000.000,000		810.000.000,000		810.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	27.105,49	23.300	24.000	810.000.000,000	24.500	810.000.000,000	25.000	810.000.000,000	25.000	810.000.000,000	26.000	810.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	45	46	47	25.000.000,000	48	25.000.000,000	49	25.000.000,000	50	25.000.000,000	52	25.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Ton/Tahun)	41,11	44,5	46,2	70.000.000,000	48,5	70.000.000,000	50,3	70.000.000,000	52	70.000.000,000	53	70.000.000,000	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					585.000.000,000		585.000.000,000		585.000.000,000		585.000.000,000		630.000.000,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					430.000.000,000		430.000.000,000		430.000.000,000		430.000.000,000		430.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	1,52	1,94	430.000.000,000	2,86	430.000.000,000	3,24	430.000.000,000	3,90	430.000.000,000	4,91	430.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	0	20	30.000.000,000	40	30.000.000,000	60	30.000.000,000	80	30.000.000,000	100	75.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	10	20	25.000.000,000	30	25.000.000,000	40	25.000.000,000	50	25.000.000,000	60	25.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	48,84	55,70	100.000.000,000	64,56	100.000.000,000	73,42	100.000.000,000	82,28	100.000.000,000	91,14	100.000.000,000	2.22.3.26.2.19.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					22.877.891.245,000		23.109.497.114,000		23.344.577.070,000		23.583.183.226,000		23.825.368.475,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.440.391.245,000		15.671.997.114,000		15.907.077.070,000		16.145.683.226,000		16.387.868.475,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,13	85	86	15.440.391.245,000	87	15.671.997.114,000	88	15.907.077.070,000	89	16.145.683.226,000	90	16.387.868.475,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	A	A	A		A		A		A		A		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.163.139.700,000		1.163.139.700,000		1.163.139.700,000		1.163.139.700,000		1.163.139.700,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	304,26	101	101	1.163.139.700,000	101	1.163.139.700,000	101	1.163.139.700,000	101	1.163.139.700,000	101	1.163.139.700,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	111,87	101,23	101,89		102,33		102,85		103,22		103,65		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Persentase)	104,74	100,23	100,39		100,58		100,77		100,94		101,11		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	108,77	104,48	104,50		104,55		104,60		104,77		104,82		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.401.860.300,000		3.401.860.300,000		3.401.860.300,000		3.401.860.300,000		3.401.860.300,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Persentase)	99,45	99,45	99,45	3.401.860.300,000	99,45	3.401.860.300,000	99,45	3.401.860.300,000	99,45	3.401.860.300,000	99,45	3.401.860.300,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	75	75	75	2.500.000.000,000	75	2.500.000.000,000	75	2.500.000.000,000	75	2.500.000.000,000	75	2.500.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	75	75	75	350.000.000,000	75	350.000.000,000	75	350.000.000,000	75	350.000.000,000	75	350.000.000,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.907.500.000,000		2.907.500.000,000		2.907.500.000,000		2.907.500.000,000		2.907.500.000,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000		7.500.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	100	7.500.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang eflsien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	37,83	37,83	40,54	2.500.000.000,000	53,24	2.500.000.000,000	45,94	2.500.000.000,000	48,64	2.500.000.000,000	50	2.500.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	94,19	95	96	300.000.000,000	97	300.000.000,000	98	300.000.000,000	99	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Persentase)	3,86	4	5,95	5.000.000,000	5,96	5.000.000,000	5,96	5.000.000,000	5,96	5.000.000,000	5,96	5.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (Persentase)	100	100	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	70	75	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	90	25.000.000,000	95	25.000.000,000	100	25.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					455.000.000,000		455.000.000,000		455.000.000,000		455.000.000,000		455.000.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					380.000.000,000		380.000.000,000		380.000.000,000		380.000.000,000		380.000.000,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri (Persentase)	6,7	5,1	5,2	380.000.000,000	5,4	380.000.000,000	5,6	380.000.000,000	5,8	380.000.000,000	6,0	380.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	80,3	90	92	50.000.000,000	94	50.000.000,000	96	50.000.000,000	98	50.000.000,000	100	50.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Persentase)	100	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.425.000.000,000		2.925.000.000,000		2.925.000.000,000		2.425.000.000,000		2.425.000.000,000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					500.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	0	100	500.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					775.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000		1.775.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	0	100	775.000.000,000	100	1.775.000.000,000	100	1.775.000.000,000	100	1.775.000.000,000	100	1.775.000.000,000	3.32.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					34.613.570.350,000		35.047.465.428,000		35.487.868.931,000		35.934.878.487,000		36.388.593.187,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.926.338.500,000		29.360.233.578,000		29.800.637.081,000		30.247.646.637,000		30.701.361.337,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	28.926.338.500,000	82	29.360.233.578,000	83	29.800.637.081,000	84	30.247.646.637,000	85	30.701.361.337,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.645.010.150,000		4.645.010.150,000		4.645.010.150,000		4.645.010.150,000		4.645.010.150,000	
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,88	2,9	2,92	4.645.010.150,000	2,94	4.645.010.150,000	2,96	4.645.010.150,000	2,98	4.645.010.150,000	3	4.645.010.150,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.042.221.700,000		1.042.221.700,000		1.042.221.700,000		1.042.221.700,000		1.042.221.700,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.042.221.700,000	100	1.042.221.700,000	100	1.042.221.700,000	100	1.042.221.700,000	100	1.042.221.700,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Luas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan pemerintah daerah (Hektar)	0	3.051,455	3.051,455		0		3		4		5		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Return on Asset (ROA) BUMD (Persentase)	0	0	0		0		3		4		5		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					48.499.992.150,000		48.785.292.150,000		49.074.871.650,000		49.368.794.843,000		49.667.126.883,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.020.000.000,000		19.305.300.000,000		19.594.879.500,000		19.888.802.693,000		20.187.134.733,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	19.020.000.000,000	82	19.305.300.000,000	83	19.594.879.500,000	84	19.888.802.693,000	85	20.187.134.733,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					29.479.992.150,000		29.479.992.150,000		29.479.992.150,000		29.479.992.150,000		29.479.992.150,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	9.000.000.000,000	100	9.000.000.000,000	100	9.000.000.000,000	100	9.000.000.000,000	100	9.000.000.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	80	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	20.479.992.150,000	100	20.479.992.150,000	100	20.479.992.150,000	100	20.479.992.150,000	100	20.479.992.150,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.961.622.350,000		6.038.445.450,000		6.116.420.897,000		6.195.565.975,000		6.275.898.229,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.121.540.000,000		5.198.363.100,000		5.276.338.547,000		5.355.483.625,000		5.435.815.879,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	79	80	81	5.121.540.000,000	82	5.198.363.100,000	83	5.276.338.547,000	84	5.355.483.625,000	85	5.435.815.879,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	A	A	A		A		A		A		A		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					540.082.350,000		540.082.350,000		540.082.350,000		540.082.350,000		540.082.350,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	80	90	95	540.082.350,000	95	540.082.350,000	95	540.082.350,000	95	540.082.350,000	95	540.082.350,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	80	90	95		95		95		95		95		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	80	90	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	80	90	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	95	150.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					138.386.169.182,000		138.571.546.923,000		138.759.705.331,000		138.950.686.114,000		139.144.531.609,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.358.516.082,000		12.543.893.823,000		12.732.052.231,000		12.923.033.014,000		13.116.878.509,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	12.358.516.082,000	82	12.543.893.823,000	83	12.732.052.231,000	84	12.923.033.014,000	85	13.116.878.509,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					121.800.365.406,000		121.800.365.406,000		121.800.365.406,000		121.800.365.406,000		121.800.365.406,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai d Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	37,80	44,53	37	121.325.365.406,000	35	121.325.365.406,000	30	121.325.365.406,000	30	121.325.365.406,000	30	121.325.365.406,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	28,80	30	35		35		40		40		40		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	91	80	70	225.000.000,000	60	225.000.000,000	50	225.000.000,000	40	225.000.000,000	30	225.000.000,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	94,96	95	95		95		95		95		95		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	90	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.508.251.472,000		1.508.251.472,000		1.508.251.472,000		1.508.251.472,000		1.508.251.472,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0	3	3	1.508.251.472,000	3	1.508.251.472,000	3	1.508.251.472,000	3	1.508.251.472,000	4	1.508.251.472,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.719.036.222,000		2.719.036.222,000		2.719.036.222,000		2.719.036.222,000		2.719.036.222,000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	11,16	14,56	14,67	2.594.036.222,000	15,03	2.594.036.222,000	15,40	2.594.036.222,000	15,76	2.594.036.222,000	16,17	2.594.036.222,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	65	70	75.000.000,000	75	75.000.000,000	80	75.000.000,000	85	75.000.000,000	90	75.000.000,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	62	70	50.000.000,000	75	50.000.000,000	85	50.000.000,000	90	50.000.000,000	100	50.000.000,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.235.656.400,000		7.319.876.246,000		7.405.359.390,000		7.492.124.781,000		7.580.191.652,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.614.656.400,000		5.698.876.246,000		5.784.359.390,000		5.871.124.781,000		5.959.191.652,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,02	82,15	82,5	5.614.656.400,000	82,7	5.698.876.246,000	83	5.784.359.390,000	84	5.871.124.781,000	85	5.959.191.652,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.621.000.000,000		1.621.000.000,000		1.621.000.000,000		1.621.000.000,000		1.621.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	971.000.000,000	100	971.000.000,000	100	971.000.000,000	100	971.000.000,000	100	971.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	55,3	55,5	56	300.000.000,000	56,5	300.000.000,000	57	300.000.000,000	57,5	300.000.000,000	58	300.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	55,3	56	57	300.000.000,000	58	300.000.000,000	59	300.000.000,000	60	300.000.000,000	61	300.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96	97	97	50.000.000,000	97	50.000.000,000	98	50.000.000,000	98	50.000.000,000	99	50.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000		1.202.000.000,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (Persentase)	25,5	25,5	26	1.202.000.000,000	26,5	1.202.000.000,000	27	1.202.000.000,000	27,5	1.202.000.000,000	28	1.202.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					180.000.000,000		180.000.000,000		180.000.000,000		180.000.000,000		180.000.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	20	25	25.000.000,000	30	25.000.000,000	35	25.000.000,000	40	25.000.000,000	50	25.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	25	25.000.000,000	30	25.000.000,000	35	25.000.000,000	40	25.000.000,000	50	25.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	25	15.000.000,000	30	15.000.000,000	35	15.000.000,000	40	15.000.000,000	50	15.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan , bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	0	25	15.000.000,000	30	15.000.000,000	35	15.000.000,000	40	15.000.000,000	50	15.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	0	0	0	35.000.000,000	0	35.000.000,000	0	35.000.000,000	0	35.000.000,000	0	35.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	0	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan , bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	0	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	0	15.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.968.679.550,000		11.090.636.846,000		11.214.423.501,000		11.340.066.957,000		11.467.595.064,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.130.486.400,000		8.252.443.696,000		8.376.230.351,000		8.501.873.807,000		8.629.401.914,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	8.130.486.400,000	82	8.252.443.696,000	83	8.376.230.351,000	84	8.501.873.807,000	85	8.629.401.914,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.701.874.080,000		1.701.874.080,000		1.701.874.080,000		1.701.874.080,000		1.701.874.080,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	79,86	80,00	82,05	1.701.874.080,000	83,67	1.701.874.080,000	85,04	1.701.874.080,000	87,00	1.701.874.080,000	89,35	1.701.874.080,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.136.319.070,000		1.136.319.070,000		1.136.319.070,000		1.136.319.070,000		1.136.319.070,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Indeks)	3	3	3	1.136.319.070,000	3	1.136.319.070,000	3	1.136.319.070,000	3	1.136.319.070,000	3	1.136.319.070,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
	Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	2,903	3	3		3		3		3		3		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
7.01 - KECAMATAN					28.053.046.375,000		27.913.896.914,000		28.406.455.414,000		28.951.484.357,000		29.513.147.098,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.073.046.375,000		26.933.896.914,000		27.426.455.414,000		27.971.484.357,000		28.533.147.098,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.503.760.775,000	82	2.541.317.187,000	83	2.579.436.944,000	84	2.618.128.499,000	85	2.657.400.426,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.216.343.800,000	82	1.704.343.800,000	83	1.818.459.000,000	84	1.979.368.000,000	85	2.151.149.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	80	81	2.483.660.200,000	82	2.520.915.103,000	83	2.558.728.830,000	84	2.597.109.762,000	85	2.636.066.408,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB		BB		BB		BB		BB		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000		110.000.000,000	
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	100	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	100	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	85	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	85	10.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	85	85	30.000.000,000	85	30.000.000,000	85	30.000.000,000	85	30.000.000,000	85	30.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	75	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	0	60	65	25.000.000,000	70	25.000.000,000	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	0	60	65	25.000.000,000	70	25.000.000,000	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	25.000.000,000	70	25.000.000,000	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari (Persentase)	-	60	65	20.000.000,000	70	20.000.000,000	75	20.000.000,000	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000		195.000.000,000	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	60	65	25.000.000,000	70	25.000.000,000	75	25.000.000,000	80	25.000.000,000	85	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persentase)	-	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					155.000.000,000		155.000.000,000		155.000.000,000		155.000.000,000		155.000.000,000	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000		15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Pulau Punjung
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sitiung
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Baru
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sungai Rumbai
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sembilan Koto
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Timpeh
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Koto Salak
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	100	25.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Asam Jujuhan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	100	35.000.000,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Koto Besar
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Padang Laweh
Meningkatnya tata kelola pemerintahan nagari	Persentase nagari yang tertib perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban (Persentase)	-	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Tiumang
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.727.989.485,000		4.754.022.008,000		4.780.445.018,000		4.807.264.373,000		4.834.486.019,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.735.501.500,000		1.761.534.023,000		1.787.957.033,000		1.814.776.388,000		1.841.998.034,000	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Indeks)	B	B	BB	1.735.501.500,000	BB	1.761.534.023,000	BB	1.787.957.033,000	BB	1.814.776.388,000	BB	1.841.998.034,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.238.119.350,000		1.238.119.350,000		1.238.119.350,000		1.238.119.350,000		1.238.119.350,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.238.119.350,000	100	1.238.119.350,000	100	1.238.119.350,000	100	1.238.119.350,000	100	1.238.119.350,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.242.334.535,000		1.242.334.535,000		1.242.334.535,000		1.242.334.535,000		1.242.334.535,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	85	100	100	1.242.334.535,000	100	1.242.334.535,000	100	1.242.334.535,000	100	1.242.334.535,000	100	1.242.334.535,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					15.171.000,000		15.171.000,000		15.171.000,000		15.171.000,000		15.171.000,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	50	68	15.171.000,000	72	15.171.000,000	85	15.171.000,000	90	15.171.000,000	100	15.171.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					87.236.200,000		87.236.200,000		87.236.200,000		87.236.200,000		87.236.200,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	95	100	100	87.236.200,000	100	87.236.200,000	100	87.236.200,000	100	87.236.200,000	100	87.236.200,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					409.626.900,000		409.626.900,000		409.626.900,000		409.626.900,000		409.626.900,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	409.626.900,000	100	409.626.900,000	100	409.626.900,000	100	409.626.900,000	100	409.626.900,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.094.025.345.302,000		1.107.217.553.749,000		1.113.572.788.088,000		1.124.815.651.465,000		1.135.894.150.287,000	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan disampaikan penjabaran mengenai tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Daftar indikator yang termuat bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dari akumulasi hasil pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator yang saling berkaitan (kausalitas indikator) dengan tetap mempertimbangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra PD.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026-2029 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1. Target Indikator Makro Pembangunan

Target pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya meliputi target indikator kinerja makro dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 bersifat imperatif dan wajib termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Adapun indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagai imperatif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,54	5,64	6,87	7,02	7,28	5,98
2	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	63,22	69,97	77,53	85,67	94,5	104,36
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. Juta	36,7	38,15	40,14	42,3	44,7	46,68
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,26	75,86	76,42	77,00	77,62	78,22

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74,58	74,88	75,17	75,46	75,75	76,05
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,03	13,21	13,39	13,55	13,73	13,89
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	8,87	9,02	9,12	9,18	9,26	9,36
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Rp. Ribu	12.437	12.626	12.822	13.025	13.235	13.451
9	Tingkat Pengangguran Tebuka (%)	Persentase	5,86	5,57	5,42	5,27	5,18	5,02
10	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	13.426	12.883	12.451	12.036	11.643	11.201
11	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	5,41	5,11	4,86	4,63	4,41	4,18
12	Gini Ratio	Indeks	0,232	0,231	0,230	0,229	0,228	0,227

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

4.2.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja strategis yang relevan dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD serta Visi dan Misi Kepala Daerah. Target yang tercantum berlaku dari tahun 2025-2030; dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah pada periode selanjutnya. IKU dievaluasi setiap tahun untuk menjadi dasar penetapan perjanjian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Target Capaian					
		Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kinerja Infrastruktur	indeks	60	65	70	80	85	90
Persentase pertumbuhan Infrastruktur daerah	persen	3	3,2	3,4	3,55	3,65	3,75
Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	persen	60	65	70	80	85	90

Indikator	Satuan	Target Capaian					
		Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	indeks	4	4,1	4,2	4,35	4,5	4,6
indeks reformasi birokrasi	indeks	78	78	79	79	80	80
Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,5	3,55	3,57	3,6	3,7	4,75
Nilai SAKIP	bobot	B	BB	BB	BB	A	A
Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
indeks reformasi hukum	indeks	70	70,1	70,25	70,35	70,5	70,65
Indeks Inovasi Daerah	indeks	65	67	70	80	85	90
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85	86	86,5	87	87,2	87,5
Indeks SPBE	indeks	3,65	3,7	3,8	3,85	3,9	4
Indeks masyarakat digital indonesia	indeks	53,52	55	56	58	60	60,14
Indeks Pelayanan Publik	indeks	4	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3
Persentase nagari mandiri	persen	50,00	53,85	57,69	61,54	65,38	69,23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	72,82	73,04	73,25	73,46	73,67	73,88
Indeks Kualitas air	indeks	71,24	71,44	71,64	71,84	72,04	72,24
indeks kualitas udara	indeks	75,86	76,16	74,46	76,76	77,06	77,36
indeks tutupan lahan	indeks	69,93	70	70,07	70,14	70,21	70,24
Indeks resiko bencana (IRB)	indeks	129	128	127	126	126,5	126,94
Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,26	75,86	76,42	77,00	77,62	78,22
Usia Harapan Hidup	tahun	74,58	74,88	75,17	75,46	75,75	76,05
Harapan lama sekolah	tahun	13,03	13,21	13,39	13,55	13,73	13,89
Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,1	10,2	10,4	10,55	10,6	10,76
Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	80	80,5	81	81,5	82	82,5
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	65	65,5	66	66,2	66,5	67
Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,52	0,515	0,500	0,550	0,500	0,480
Pertumbuhan PDRB	persen	4,54	5,64	6,87	7,02	7,28	5,98
Gini Rasio	indeks	0,232	0,231	0,230	0,229	0,228	0,227
tingkat inflasi	persen	2,80 - 3,60	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Pendapatan perkapita (ADHB)	juta Rp	63,22	69,97	77,53	85,67	94,50	104,36
Pendapatan perkapita (ADHK)	juta Rp	36,70	38,15	40,14	42,30	44,70	46,68
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	5,5	5,7	5,9	6	6,25	6,47
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	persen	16	16,5	17	17,5	18	19
Rasio net eksport terhadap PDRB	persen	15	15,25	15,5	16	16,5	17
Tingkat kemiskinan	persen	5,21	5,11	4,86	4,63	4,41	4,18
Tingkat pengangguran terbuka	persen	5,86	5,57	5,42	5,27	5,18	5,02
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52	52,5	53	54	55	56
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	52	52,5	53	54	55	56

Indikator	Satuan	Target Capaian					
		Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	75	75,2	75,5	76	76,5	77

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

4.2.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

IKD meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, daftar indikator yang termuat bersumber dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan indikator makro relevan lainnya hasil penyelarasan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pada aspek pelayanan umum, daftar indikator yang termuat merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing urusan Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sama halnya dengan IKU, IKD berlaku dari tahun 2025-2030; dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Lebih lanjut penetapan IKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAR DEMOGRAFI**							
4)	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85	85,1	85,45	85,5	85,63	85,8
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persentase	5,58	5,23	4,88	4,54	3,85	3,51
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	352	357	360	362	365	367
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persentase	72	73	75	80	93	85
5)	Lingkungan Hidup Berkualitas							
5	Indeks Kualltas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,82	73,04	73,25	73,46	73,67	73,88
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase	6,52	7,85	9,23	10,62	12,00	16,51
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	35,16	37,20	39,63	41,74	44,54	42,35
	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase RT	37,88	41,67	45,42	49,13	52,81	48,37
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	2	5	8	12	15	17
6)	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
9	Pengurangan Intensitas Emisi GRK	Persentase	1%	1,50%	2%	3%	4%	5%
10	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	133,53	133,52 - 132,25	132,24 - 130,97	130,96 - 129,69	129,68 - 128,41	128,4 - 127,13

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.51
7)	Demografi							
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	1,75	1,74	1,72	1,7	1,69	1,67
13	Rasio Penduduk	Persentase	102,6	102,5	102,4	102,2	102,1	102
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	83	84	85	86	87	88
15	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Persentase	2,26	2,24	2,22	2,21	2,19	2,18
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1)	Kesejahteraan Ekonomi							
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persentase	5,25	5,50	5,60	5,70	5,80	5,95
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,41	5,11	4,86	4,63	4,41	4,18
23	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase	1,90	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	60,00	75,00	85,00	100,00	120,00	140,47
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	6	5,98	5,96	5,94	5,92	5,9
5	Gini Rasio	Angka	0,168	0,15	0,14	0,12	0,1	0,092
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,03	76,5	77	78	79	79,33
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	3,69	3,72	3,76	3,80	3,84	3,86
2)	Kesehatan untuk Semua							
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,58	74,88	75,17	75,46	75,75	76,05
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.26	0.28	0.30	0.33	0.34	0.35
9	Prevalensi Stunting	Persentase	17,5	16,0	15,0	14,0	13,0	11,5
3)	Pendidikan Berkualitas yang Merata							
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,1	10,2	10,4	10,55	10,6	10,67
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,4	14,5	14,6	14,7	14,79

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rata-Rata Lama Sekolah Tinggi	Tahun	8,87	9,02	9,12	9,18	9,26	9,36
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Persentase	96,69	99,59	102,24	105,09	107,54	110,2
-	Literasi Membaca	Persentase	48,00	52,16	56,32	60,48	64,64	66,76
-	Numerasi	Persentase	13,00	15,10	17,20	19,30	21,40	23,00
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	9,00	9,12	9,24	9,36	9,46	9,56
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	77,64	78,12	78,60	79,07	79,55	80,03
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	63,50	63,70	63,90	64,10	64,30	64,50
4)	Perlindungan Sosial yang Adaptif							
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase	25	19	20	21	22	23
	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	108,00	158,00	211,00	266,00	322,00	383,00

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5)	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	75	75,3	75,7	76	76,5	77
6)	Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	52	52,3	52,6	53	55	56
18	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,83	66,95	67,20	67,55	67,75	67,90
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	62,00	62,47	63,00	63,65	64,35	65,45
20	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,435	0,427	0,411	0,403	0,398	0,397
21	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,17	90,64	91,10	91,56	92,03	92,49
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53	53,5	54	54,5	55	56
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	26,15	28,82	31,48	34,14	36,81	39,47
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persenta se	11,64	13,14	14,64	16,14	17,64	19,14
25	Tingkat produktivitas tenaga kerja	juta rupiah/ orang	106	106,2	106,4	106,6	106,8	107
27	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	48	50	52	54	56	58
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
	1) Daya Saing Sumber Daya Manusia							
1	Angka Ketergantungan	Persentase	45,3	45,2	45,1	45	44,5	44
	2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
2	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase	5,5	5,7	5,9	6	6,25	6,47

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Kontribusi PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,30
4	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	16	16,5	17	17,5	18	19
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	0,94	0,96	0,98	1	1,2	1,22
6	Rasio Kewirausahaan	Persentase	4,99	5,12	5,26	5,39	5,52	6,13
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	74,5	74,7	75	75,2	75,4	75,5
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	59,84-61,22	60,15-61,76	60,45-62,30	60,76-62,84	61,06-63,38	61,37-63,92
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	46,36	47,56	48,76	49,96	51,16	53,09
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,02	67	70	73	85	90
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,90
	5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
11	Rasio net eksport terhadap PDRB	Persentase	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
	6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	65	65,5	66	67	69	70
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	61,67	63,79	65,91	68,03	71,28	72,68
14	Persentase Desa Mandiri	Persentase	59,6200	63,4600	67,3100	71,1500	75,0000	78,8500
	7) Stabilitas Ekonomi Makro							
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	1,00
16	Tingkat Inflasi	Persentase	2.80-3.60	2,45 - 3,55	2,10 - 3,52	1,75 - 3,51	1,40 - 3,5	1,35 -3,45

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	26,82	26,18	25,53	24,89	24,25	23,61
18	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	5,44	5,47	5,48	5,48	5,48	5,47
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah/ orang	73	73,2	73,6	74	74,5	75
20	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persentase	56	60	62	63	64	69
21	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	90	92	94	95	96	97
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	44	46	47	49	50	50
23	Return on Aset (ROA) BUMD	Persentase			0,06	0,06	0,06	0,06
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	59,84-61,22	60,15-61,76	60,45-62,30	60,76-62,84	61,06-63,38	61,37-63,92
25	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase	100	100	100	100	100	100
26	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persentase	5,13	6	9,7	11,6	13	15
27	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	364	400.000	450.000	550.000	625.000	721
28	Total Kredit/PDRB	Persentase	16,74	17	18	19	20	21
29	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persentase	2,25	2,31	2,37	2,44	2,52	2,60
30	Inklusi Keuangan	Persentase	80	81	82	83	84	85

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
	1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang							
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,65	3,72	3,83	3,93	4,04	4,15
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,27	3,28	3,29	3,31	3,40	4,30
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	0,05	0,05	0,05	2,00	0,08
	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
	2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial							
5	Persentase Penegakan Perda	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persentase	80	80	80	85	85	90
	3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
10	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55	3,57	3,6	3,7	4,75
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78	78	79	79	80	80
12	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	45,32	47,37	48,42	49,34	50,46	50,5
13	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	nilai	78,000	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000
15	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100	100	100	100	100
16	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	83,5	84	85	86	87

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	3,55	3,61	3,66	3,71	3,75
	4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah/ Indikator Kinerja Kunci							
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	82,7	83,95	85,8	87,9	89, 96	92
	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	94,69	95,32	96,02	97,33	98,34	99,01
4	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	85,32	86,72	87,62	88,68	89,03	91,54
5	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persentase	25,93	30,03	34,13	38,23	42,33	46,43
6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	indeks Pemerataan Guru	Indeks	25,25	23,71	21,76	19,43	17,01	15,80
8	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	78,61	80.01	82,50	84,45	86,90	88,00

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	95,32	96,55	97,38	98,21	99,31	100
11	APK PAUD sederajat	Persentase	75,09	77,80	80.02	82,08	85,63	88,90
12	APK SD/Mi sederajat	Persentase	92,01	94,05	96,80	98,70	99,01	100,00
13	APK SMP/MTs sederajat	Persentase	88,90	90,03	92,76	94,61	96,78	98,03
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	186	186	155	155	155	100
2	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	15	14	13	12	11	10
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	16,00	14,75	13,50	12,25	11,00	12,00
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	55,00	61,80	68,60	75,40	82,20	89,00
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persentase	93	93	93	94	94	94
6	Insidensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	908	785	681	607	551	508
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persentase	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	75	77	80	85	90	95
11	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
12	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
15	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
21	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0,5	1	3	6	8	10
2	Indeks kinerja sistem irigasi	Indeks	72,80	73,90	75,10	76,80	77,70	78,10
4	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	Persentase	2	3	4	5	7	10
5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persentase	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	80	82	83	85	90	100
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	40	42	45	50	55	60
14	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	55,08	55,58	56,08	56,58	57,08	57,58

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	5	10	15	20	25	30
16	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persentase	50	50	50	50	50	50
17	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)	Persentase	50	60	65	70	85	80
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	Persentase	6,28	7,28	8,28	9,28	10,28	11,28
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum}	Persentase	90,28	90,53	90,78	91,03	91,28	91,53
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	90	95	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	menit	15	15	14	14	10	10
8	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	40	50	55	60	65	70
9	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persentase	50	60	65	70	75	80
14	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100
15	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks						
2	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Karban Bencana Pravinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persentase	80	80	80	80	80	80

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	90	90	90	90	90	90
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	23	25	30	50	75	90
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50	60	70	80	85
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50	60	70	80	85
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50	60	70	80	85
8	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50	60	70	80	85
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	30	50	60	70	80	85
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	98,91	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	-	5	5	5	5	5
15	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase	-	5	5	5	5	5
19	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial danjatau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,60	58,40	59,20	60,00	60,70	61,40
23	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
24	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
25	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
26	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
27	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase	100	100	100	100	100	100
1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persentase	38,2	40,2	42,2	44,2	46,2	48,2
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	94	94,1	94,2	94,3	94,5	95
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5	Persentase Pekerja Informal	Persentase	59	57,8	56,6	55,4	54,2	53
8	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya		22.300	22.500	22.600	22.800	23.000	23.200
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,8	89,85	89,88	90	90,2	90,5
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,44	0,43	0,41	0,40	0,40	0,40
	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	66,83	66,95	67,20	67,55	67,75	67,90
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	65,90	66,09	66,27	66,46	66,64	66,83
2	Persentase Anggaran Responsif gender	Persentase	4,85	4,88	4,91	4,95	4,98	5,00
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang beperspektif gender dan hak anak sesuai standart	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,57	61,62	61,68	62,56	62,73	63,13
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khususyang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	47,53	52,28	57,5	63,25	69,57	76,52
2	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	92	92,2	92,4	92,6	92,8	93
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	2	2	2	2	2	0
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	84	85	86	87	88	89
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks						
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat	Persentase	52,38	60	70	80	90	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	10	15	20	30	40	45
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,24	71,44	71,64	71,84	72,04	72,24
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92	92,2	93	93,5	94	94,5
5	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	46	47	47,5	48	49	50
7	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100
8	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persentase	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0,00	100	100	100	100	100
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	10	12	14	16	18	20
12	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks						
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	4	20	40	60	80	100
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	69	90	95	100	100	100
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	50	60	80	90	100	100
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
2	Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	Persentase	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	82,05	85,50	88,20	90,50	91,50	92,50
4	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Publik	Nilai	86,5	88,5	89,5	90,65	91,25	92,5

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa	Indeks	0,8041	0,8128	0,8171	0,8192	0,8203	0,8209
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	80	81	82	83	84	95
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	80	81	82	83	84	95
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	Persentase	80,28	84,61	88,94	92,78	96,15	99,03
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	44,23	48,07	51,92	55,76	59,61	63,46
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,05	65,29	66,46	67,58	68,60	68,60
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	76,60	79,72	81,68	82,91	83,70	68,60
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase	82,70	83,06	83,42	83,77	84,11	84,40
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	11,20	9,37	8,45	7,98	7,74	7,60

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	84,90	86,20	87,40	88,40	89,40	90,30
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	45,38	55,77	65,38	75,00	80,77	85,77
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Persentase	2,26	2,24	2,22	2,21	2,19	2,18
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifzc Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Persentase	14,7	12,9	11,5	10,5	9,7	9,2
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (mCPR)	Persentase	72,18	72,50	72,80	73,15	74,25	75,15
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	9,55	9,15	8,95	8,40	8,15	7,35
5	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	85,6	86,36	87,8	89,9	91,05	95,00
6	Persentase Kampung KB Mandiri	Persentase	43	48	70	85	90	100
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah {survei)	Persentase	50	55	60	65	70	75

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,90	4,21	4,72	5,12	5,27	5,70
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	7	8	8	8	9	9
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	23	25	30	33	37	40
3	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	39	40	41	42	44	45
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	27	30	33	40	45	50
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	10	14	16	18	20	25
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	60	63	69	71	74	80
7	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	16	18	19	21	22	24
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	2	2	2	2	2	2
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
	Persentase Peningkatan Investasi	Persentase						
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	100	100	100	100	100,00
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100,00

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100,00
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100,00
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	80	83	85	87	90	95
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Jumlah Perolehan Medali Emas pada event nasional dan provinsi	buah	50	50	50	50	60	60
4	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,50	2,70	3,00	3,40	3,75	4,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		0	20,00	22,00	25,00	27,00	28,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	78,72	82,98	87,23	91,49	95,74	100
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	57,5	62,5	68,5	75,5	80	84,5

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	57,5	62,5	68,5	75,5	80	84,5
6	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	1	1,5	1,73	5,18	8,64	17,27
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	indeks	73,75	73,79	73,83	73,87	74,02	74,18
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	96,45	96,50	96,55	96,60	96,63	96,65
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	815	1.230	1.650	2.060	2.500	2.600
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	23.300	24.000	24.500	25.000	26.000	27000
3	Luasan Kawasan Konservasi	ha	46	47	48	49	50	52
4	Angka Konsumsi Ikan	kg/ tahun	44,5	46,2	48,5	50,3	52	53
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-42,94	-42,94	-42,94	-42,94	-42,94	-42,94
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	38,00	46,00	54,00	62,00	70,00	78,00
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	46,84	55,70	64,56	73,42	82,28	91,14
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	104,48	104,50	104,55	104,60	104,77	104,82
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	101	101	101	101	101	101
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	101,2337	101,8914	102,3335	102,8489	103,2181	103,6458262
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45
5	Cakupan Luas Lahan Sawah Dilingdungi (LSD)	Persentase						
6	Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Persentase	59,51	60,23	60,96	61,00	62,40	62,79
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase	100,23	100,39	100,58	100,77	100,94	101,11
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Peresentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner	Persentase	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	37,83	40,54	43,24	45'94	48,64	50
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	95	96	97	98	99	100
4	Nilai Ekspor Barang	Persentase	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	75	80	85	90	95	100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Persentase	5,1	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	90	92	94	96	98	100
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	-	-	-	25	25	25
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	-	-	-	25	25	25
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	-	-	-	25	25	25
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	bobot	3,5	3,52	3,54	3,55	3,56	3,57
2	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti	Persentase	50	55	60	65	70	75
3	Nilai SAKIP	bobot	68	70	72	74	76	77
4.02	SEKRETARIAT DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	80	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks						
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100
5.02	KEUANGAN							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	44,53	37,00	35,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	25,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.03	KEPEGAWAIAN							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,7	81,9	82	82,2	82,4	82,6
2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	83	85	86	86,5	87	90
3	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	30	31,5	32,8	33,1	34	34,7
4	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	56	57	58	59	60	61
5	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	17	17,5	18	18,5	19	20
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	25,5	26	26,5	27	27,5	28
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerahyang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	20	25	30	35	40	50
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	n/a	25	30	35	40	50
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait	Persentase	n/a	25	30	35	40	50

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah							
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	n/a	25	30	35	40	50
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	n/a	25	30	35	40	50
8	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100
9	Pengeluaran Iptek dan Inovasi	Persentase PDRB	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		80	82,05	83,67	85,04	87	89,35
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	3	3	3	3	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	3	3	3	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							
	Nilai Sakip Perangkat Daerah							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kecamatan Asam Jujuhan	Indeks	74,62	75,96	77,31	78,66	79	80
	Kecamatan Koto Baru	Indeks	78,15	78,61	79,08	79,54	79	80
	Kecamatan Koto Besar	Indeks	73,81	75,36	76,9	78,45	79	80
	Kecamatan Koto Salak	Indeks	69,33	72	74,66	77,33	79	80
	Kecamatan Padang Laweh	Indeks	71,94	73,96	75,97	77,98	79	80
	Kecamatan Pulau Punjung	Indeks	72,09	74,07	76,04	78,02	79	80
	Kecamatan Sembilan Koto	Indeks	62,62	66,96	71,31	75,66	79	80
	Kecamatan Sitiung	Indeks	66,08	69,56	73,04	76,52	79	80
	Kecamatan Sungai Rumbai	Indeks	78,12	78,59	79,06	79,53	79	80
	Kecamatan Timpeh	Indeks	69,89	72,42	74,94	77,47	79	80
	Kecamatan Tiumang	Indeks	69,89	72,42	74,94	77,47	79	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat							
	Kecamatan Asam Jujuhan	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Koto Baru	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Koto Besar	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Koto Salak	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Padang Laweh	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Pulau Punjung	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Sembilan Koto	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Sitiung	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Sungai Rumbai	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Timpeh	Indeks	79	82	84	86	87	88
	Kecamatan Tiumang	Indeks	79	82	84	86	87	88
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							

No	Indiokator outcome	Satuan	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	50	68	72	85	90	100
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerahyang Dilaksanakan	Persentase						
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	10	10	10	10	10	10

Sumber : Hasil Analisis Tim Tim Penyusun RPJMD

BAB V
PENUTUP

Pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk "Dharmasraya Sejahtera Merata" perlu dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai ketentuan agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Upaya pencapaian visi dan misi RPJMD juga memerlukan lingkungan pembiayan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

5.1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

5.1.1. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2025 - 2029 berakhir, maka RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034

5.1.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta pedoman bagi masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja. Sehingga terwujudnya visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun 2025-2029 mendatang yaitu; “Dharmasraya Sejahtera Merata”. Visi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan

sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 meliputi;

1) konsistensi perencanaan dan pendanaan,
2) keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan
3) pembangunan nasional dan provinsi,
4) penerapan prinsip kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan,
5) kerangka pengendalian,
6) skema pendanaan dan penganggaran,
7) sistem insentif,
8) komunikasi publik dan
9) mekanisme perubahan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh
10) pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data
11) pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut,
12) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan
13) pelaksanaan RPJMD.

Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.2.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh

pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

5.1.2.2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Jika digambarkan sejak dari atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD).

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi adalah sebagai berikut:

a. Periodisasi RPJMD mengikuti periodesasi RPJMN yaitu, tahun 2025-2029.
b. Substansi visi dan misi serta prioritas pembangunan dalam RPJMN menjadi bagian utama dari muatan dan substansi RPJMD.
c. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.
d. Dokumen RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah
e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
f. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.

Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/*master plan*/grand design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

5.1.2.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) perencanaan pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

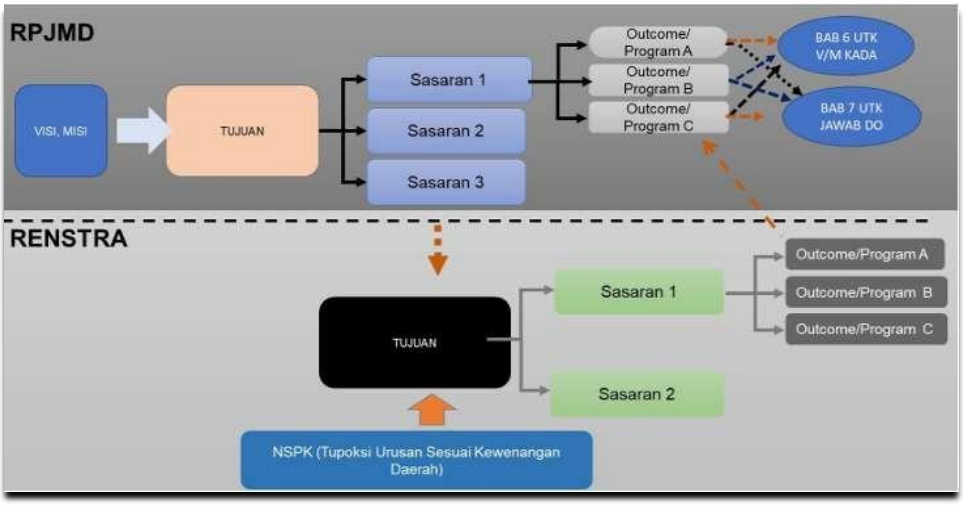
Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif, dijelaskan sebaga berikut :

Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.

1. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
2. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
3. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah Secara terminologi KKL menggambarkan hubungan antara *input-proses-outpu-outcome-impact*.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke *level intermediate-outcame.* Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Hierarki KKL tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1
Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJMD dana Rencana Pembangunan Turunannya



Sumber; Inmendagri No.2./2025 tentang Pedoman Umum Pennyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, 2025

5.1.2.4 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, ResultOriented/Relevant,* dan *Time- Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD karena seluruh indikator RPJMD sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

5.1.2.5 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari

tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

   Pengendalian jangka menengah mencakup hal-hal sebagai berikut:

   a. Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah;
   b. Kesiapan desain prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
   c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
   d. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

   Sedangkan Pengendalian jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut :

   a. penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah;
   b. Kesiapan desain program prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
   c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
   d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Pelaksanaan

   Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

   a. pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan;
   b. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
   c. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan
   d. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

   Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan

regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

1. Sistem Insentif

   Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan.

   Sedangkan untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

2. Komunikasi Publik

   Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Melalui komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: a) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; b) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta b) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

   Komunikasi publik dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu;

a) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.dilakukan melalui musyawarah pembangunan atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan,

b) internal pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang melalui rapat koordinasi Pemerintah Nagari/Desa, kecamatan dan kabupaten dengan efektif untuk membangun pemahaman yang sama dan penguatan partisipasi, dan

c) masyarakat/publik termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti; perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia berpartisipasi dalam pembangunan melalui musyawarah pembangunan secara berjenjang.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.1.2.6 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geo-politik, geo-ekonomi, dan bencana, serta pemekaran wilayah, perubahan kebijakan nasioanl dan penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Namun sebaliknya jika pencapaian target tujuan dan sasaran visi serta Indikator Kinerja Daerah memungkinkan untuk dicapai dapat dimutakhirkan melalui RKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Selain itu, RPJMD dimungkinkan diubah, apabila hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan selama 2 (dua) tahun pelaksanaan karena menunjukkan adanya indikasi capaian indikator tujuan dan sasaran visi serta Indikator Kinerja Daerah tidak terpenuhi pada akhir RPJMD.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 Sehingga perlu meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.2.7 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif

semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Sedangkan untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

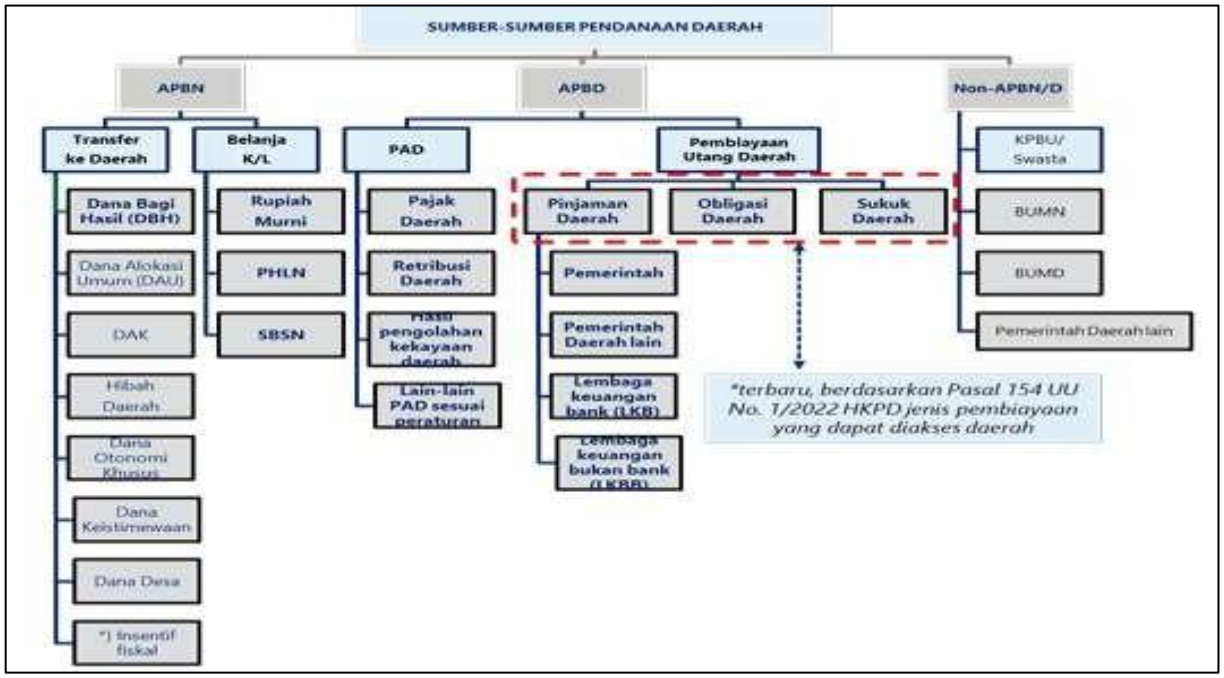
5.1.2.8 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya jangka menengah dibutuhkan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah meliputi;

a. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi; penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
b. Perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
c. Penguatan dan perluasan berbagal instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
d. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*) yang ada dapat digunakan secara optimal.

Disamping itu, terdapat 5 (lima) instrumen pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai maupun mendanai kebutuhan pembangunan daerah seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belanja dari Kementerian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non APBD/APBN. Skema sumber-sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara jangka menengah, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.2
Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029



Selain itu, skema pembiayaan lain yang akan dikembangkan yaitu, skema *blended finance*. Skema ini fokus pada gabungan pendanaan dari pemerintah, pihak swasta untuk mengatasi hambatan investasi swasta dalam proyek infrastruktur

5.1.2.9 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan

pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah;
b. Kesiapan desain prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Sedangkan Pengendalian jangka pendek mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah;
b. Kesiapan desain program prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan;
b. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
c. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan
d. evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Pengendalian pembangunan tersebut, perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

3. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun rencana berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

- Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;
- Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan
- Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya, dalam kerangka RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2045
- Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025–2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya.

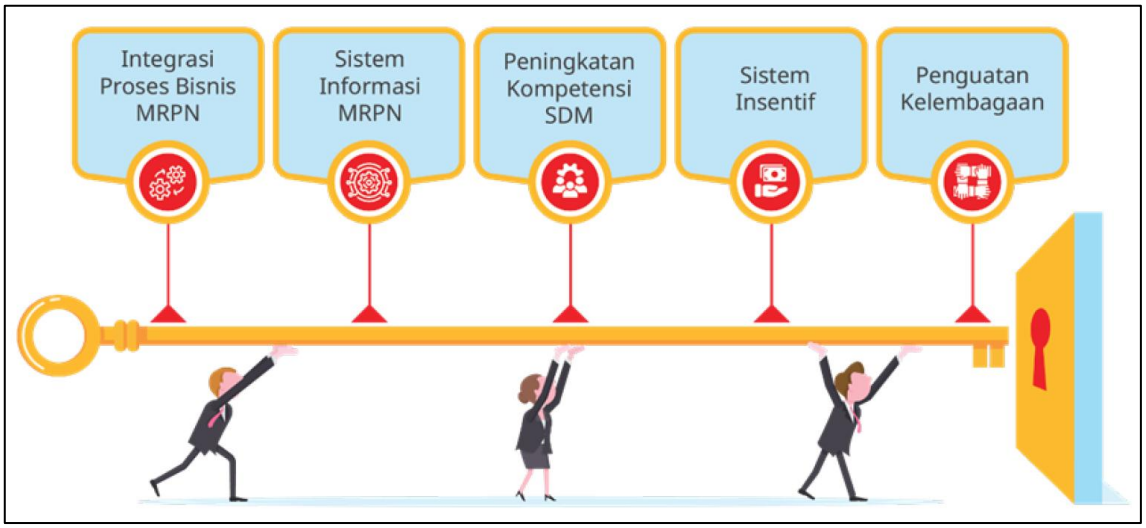
Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2. MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program prioritas pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah memiliki kompleksites pelaksanaan program prioritas diiringi dengan ketidakpastian kerangka perekonomian global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi melalui penerapan manajemen risiko pembangunan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor dengan proses perencanaan perlu dilakukan melalui integrasi pelaksanaan dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor berjalan efektif. Mengakselerasi implementasi

manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor, beberapa kunci penerapan manajemen risiko pembangunan nasional perlu dilakukan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.3
Kunci Impelementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sumber : Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Belandaskan manajemen risiko pembangunan nasional, penerapan manejemen risiko pembangunan di daerah dilaksanakan dalam proses pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 tahun rencana berjalan. Hal ini dalam upaya memperkuat pendekatan problem-oriented yang selama ini dilakukan berdasarkan backward looking melalui antisipasi risiko kedepan (forward looking). Level risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitigasinya perlu terus dipantau agar kebijakan pembangunan beialan dengan baik. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan iimplementasikan secara tepat. Sehingga pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebiiakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sejalan dengan sasaran pembangunan nasional. Indikasi dan mitigasi risiko pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh unit pemilik risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan pcnerapan manajemen risiko pembangunan lintas Perangkat Daerah melalui tahapan antara lain;

a. penetapan objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah dan unit pemilik risiko,
b. penetapan profil risiko objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah oleh unit pemilik risiko sebagai tahap awal implementasi manajemen risiko pembangunan daerah dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah,
c. pemantauan secara berkala dan berkelanjutan dan

d. pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan daerah lintas Perangkat Daerah oleh Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, penerapan manajemen risiko pembangunan daerah juga dapat dilaksanakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya akan berusaha menimalisir risiko terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 berlandaskan 2 (dua) faktor penghambat melalui upaya-upaya yang strategis, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Proses Perencanaan dan Pengendalian Pelaksaanan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029

No	Faktor Penghambat	Upaya Strategis
1	Keterbatasan fiskal pembangunan	Merumuskan perencanaan pembangunan daerah dan sektoral secara terintegratif dan kolaboratif antar Perangkat Daerah, sehingga terciptanya program/kegiatan yang efektif dan efisien berorientasi tujuan/sasaran pembangunan
		Menciptakan tema dan fokus pembangunan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi dan Spasial (THIS) untuk terciptanya keselarasan pembangunan secara teknokratis
		Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis melalui penataan organisasi yang efektif dan efisien berlandaskan agenda dan prioritas pembangunan daerah
		Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan dengan provinsi dan nasional secara efektif, efisien dan kolaboratif berbasis prioritas nasional dan provinsi
		Membangun koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas ruang fiskal pembangunan
2	Keterbatasan sumber daya daerah	Memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif, efisien dan berkelanjutan
		Memperkuat ekosistem inovasi diseluruh sektor pembangunan secara terstruktur, efektif dan berkesinambungan
		Meningkatkan kualitas sinergi pembangunan dengan masyarakat dan dunia usaha serta kerjasama antar daerah secara efektif

No	Faktor Penghambat	Upaya Strategis
		Memperkuat manajemen risiko pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan berkesinambungan

Untuk lebih jelasnya meta data RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **LAMPIRAN I.**

5.3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DHARMASRAYA

Keberadaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memberikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tata kelola data dapat meningkatkan kualitas, integrasi, koordinasi, transparansi, dan interoperabilitas data. Selain itu, dengan tata kelola data yang baik, duplikasi data dan silo antar-instansi juga bcrkurang. Sehingga manfaat Satu Data Indonesia secara langsung dapat mendukung kebijakan pemerintah yang lebih efektif serta menciptakan evaluasi dan pengendalian pembengunan yang lcbih baik, sehingga penggunaan anggaran akan lebih elisien dan hasil pcmbangunan menjadi lebih optimal.

5.3.1. Memperkuat tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi digital, Satu Data Indonesia memiliki peran sangat signifikan dan penting dalam melakukan tata kelola data. Dukungan Satu Data Indonesia akan semakin menguatkan reformasi tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya publik. Sementara itu, tata kelola data yang baik akan mendukung akselerasi transformasi digital nasional dan daerah. Sehingga melalui reformasi tata kelola pemerintahan serta transformasi digital nasional dan daerah, kebijakan pembangunan harus bertransformasi dari government centric menuju citizen centric, Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menjadi pusat koordinasi dan integrasi data dari berbagai Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta kementerian/Lembaga untuk menciptakan ekosistem data yang terstandardisasi, terbuka, dan terhubung.

Penyelenggaraan tata kelola SDI tingkat daerah di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana mandat dari Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ditindaklanjuti melalui penetapan regulasi, antara lain;

1. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya dan

2. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/219/Kpts-Bup/2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Dharmasraya

Implementasi dari kedua regulasi tersebut, menemui beberapa tantangan, diantaranya tumpang tindih data, akurasi data yang rendah, ketidakmutakhiran data, sulitnya akses data lintas instansi, pengelolaan data yang lemah, serta dalam memenuhi prinsip SDI mudah diakses dan dibagipakaikan mengalami kendala belum tersedianya portal Satu Data yang terinterkoneksi dengan Satu Data Pusat, saat ini baru terinterkoneksi dengan satu data Provinsi. Dalam rangka pemenuhan data yang akuntabel, berkualitas dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Sehingga perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung transformasi layanan publik digital pemerintah, khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam menghadapi tantangan global. Implementasi Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

5.3.2. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Dharmasraya medorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah. Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, arah kebijakan pembangunan di Sumatera Barat diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*citizen centric*).

Platform Satu Data Indonesia berpotensi menjadi simpul koordinasi dan integrasi data lintas Perangkat Daerah dan instansi vertilkal, membangun ekosistem data yang konsisten, terbuka, dan interoperabel. Dengan ekosistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan memiliki basis informasi yang andal untuk menyusun kebijakan yang inklusif, dan inovatif sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta potensi khas daerah. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan

publik dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Ranah Cati Nan Tigo.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, kemajuan ekonomi, integritas birokrasinya, layak dan lestari lingkungannya, serta kesempatan untuk terhubung dengan regional dan nasional. Melalui pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Dharmasraya semakin mendekati pencapaian visi 5 (lima) tahun ke depan "DHARMASRAYA SEJAHTERA MERATA' dan visi jangka panjangnya, yaitu "DHARMASRAYA MAJU YANG BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN" dan mampu berperan sebagai pusat ekonomi pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN I
MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. Tujuan : **PEMERATAAN AKSES DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH**
Indikator Kinerja : Indeks Kinerja Infrastruktur

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	PEMERATAAN AKSES DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH								
		Indeks Kinerja Infrastruktur	Keterlambatan pembangunan infrastruktur	Dinas PUPR	Kurangnya koordinasi antar pihak terkait	Internal	C	▪ Terhambatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (transportasi, air bersih, listrik, dll.) ▪ Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ▪ Kinerja daerah dinilai buruk oleh pemerintah	Masyarakat, Dinas Terkait, Pemerintah Daerah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
								pusat atau lembaga evaluasi	
			Kualitas infrastruktur tidak sesuai standar	Dinas PUPR	Pengawasan proyek tidak optimal	Internal	UC	- Infrastruktur cepat rusak atau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal- Biaya pemeliharaan dan perbaikan meningkat - Risiko kecelakaan atau kerugian bagi masyarakat	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Terbatasnya anggaran pembangunan	Bapperida/BKD	Penurunan pendapatan daerah atau alokasi tidak prioritas	Eksternal	UC	- Proyek strategis tidak dapat dilaksanakan atau hanya sebagian selesai- Ketimpangan pembangunan antar wilayah meningkat - Tujuan pemerataan	Masyarakat di wilayah kurang berkembang, Bapperida, Dinas PUPR, Perkimtan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
								akses infrastruktur gagal tercapai	
			Gangguan cuaca ekstrem menghambat pelaksanaan proyek	Dinas PUPR	Kondisi alam yang tidak dapat diprediksi	Eksternal	UC	▪ Jadwal pekerjaan molor, biaya meningkat karena waktu pengerjaan bertambah ▪ Material rusak atau proyek tertunda- Proyek tidak selesai sesuai tahun anggaran	Kontraktor, Dinas PUPR, Perkimtan, Masyarakat pengguna infrastruktur
1	Pemerataan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kecamatan	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	Rendahnya kualitas aksesibilitas wilayah dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi	Bupati	a. Rendahnya kualitas kemantapan jalan	Internal	C	Rendahnya tingkat kemantapan jalan	Bupati/ Masyarakat
					b. Rendahnya sarana prasarana penunjang infrastruktur jalan	Internal	C	Rendahnya tingkat sarana prasarana jalan	Bupati/ Masyarakat
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif	Kapasitas Air Baku	Rendahnya tingkat layanan infrastruktur dasar	Bupati	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan akses sanitasi dan air minum	Internal	C	• Rendahnya akses air minum yang aman serta	Bupati/ Masyarakat

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		Indeks kinerja sistem irigasi			• penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun			sanitasi yang aman dan layak • Rendahnya Indeks Kinerja Sistem Irigasi	

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	PEMERATAAN AKSES DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH								
	Keterlambatan pembangunan infrastruktur	4	4	16	Monitoring rutin pelaksanaan proyek	• Belum optimalnya sistem evaluasi *real time*	Peningkatan sistem pelaporan berbasis digital dan evaluasi mingguan	Bupati	Tahun 2025-2029
	Kualitas infrastruktur tidak sesuai standar	4	3	12	Adanya pengawasan lapangan	• Tidak ada audit teknis berkala	Penambahan audit mutu teknis oleh tim independen	Bupati	Tahun 2025-2029
	Terbatasnya anggaran pembangunan	5	2	10	Musrenbang dan RKPD tahunan	• Ketergantungan pada dana pusat	Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan kerjasama dengan swasta (PPP)	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	Gangguan cuaca ekstrem menghambat proyek	3	3	9	Penjadwalan proyek sesuai musim	• Tidak ada skenario kontinjensi	Penyusunan SOP mitigasi bencana dan buffer time dalam jadwal proyek	Bupati	Tahun 2025-2029
1	Rendahnya kualitas aksesibilitas wilayah dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya tata kelola peyelenggaraan jalan secara terstuktur dan terukur	Penguatan tata kelola peyelenggaraan jalan secara terstuktur dan terukur berbasis RTRW	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung jalan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung jalan berbasis skala prioritas	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya tingkat layanan infrastruktur dasar	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya penyediaan air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak	Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola. penyediaan air minum yang aman serta sanitasi yang aman dan layak	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum optimalnya penyediaan infrastruktur irigasi dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun	Penguatan dan peningkatan penyediaan infrastruktur irigasi dan diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

Rencana Komunikasi RTP dan Rencana Pemantauan RTP untuk Misi 1 dari RPJMD akan mengacu pada tujuan dan sasaran ini untuk memastikan semua proyek dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang efektif, pemantauan, dan pelaporan yang transparan.

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan meliputi Dinas PUPR, Bapperida, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, masyarakat, dan sektor swasta.	Identifikasi pemangku kepentingan dari setiap proyek (misalnya pengelolaan air, infrastruktur irigasi), dan tentukan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap fase proyek.
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi yang akan digunakan: rapat koordinasi, situs web pemerintah daerah, media sosial, buletin, dan email.	Buat platform komunikasi terintegrasi, termasuk portal web resmi, email, dan penggunaan media sosial (Facebook, Instagram) untuk menyampaikan update proyek.
3.	Koordinasi Antar Instansi	Komunikasi antar instansi pemerintah untuk mengelola risiko dan memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.	Rapat koordinasi bulanan antara dinas terkait (PUPR, Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air) untuk membahas status proyek dan pengendalian risiko.
4.	Transparansi dan Laporan Proyek	Penyebaran informasi secara berkala tentang perkembangan proyek infrastruktur, kualitas infrastruktur, pengelolaan air, dan dampak pengelolaan irigasi.	Publikasi laporan triwulanan yang merinci progres proyek, masalah yang dihadapi, dan solusi yang diambil. Informasi dapat dipublikasikan di media sosial dan website.
5.	Penyuluhan kepada Masyarakat	Mengedukasi masyarakat tentang manfaat proyek dan pentingnya pengelolaan risiko untuk mendukung keberhasilan RPJMD.	Menyediakan forum komunitas dan seminar publik untuk mengedukasi masyarakat mengenai proyek-proyek yang sedang berlangsung, serta manfaat bagi mereka.
6.	Umpan Balik dan Partisipasi Publik	Menyediakan saluran umpan balik bagi masyarakat terkait proyek dan pengelolaan risiko.	Menyediakan kotak saran digital di situs web pemerintah dan mengadakan forum publik untuk menerima masukan dari masyarakat terkait kemajuan proyek.

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator yang digunakan untuk memantau proyek, seperti Indeks Kinerja Infrastruktur, Kapasitas Air Baku, dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi.	Pengumpulan data melalui sistem informasi proyek, laporan progres bulanan dari masing-masing dinas terkait, dan survei lapangan.
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan atau sesuai dengan progres proyek yang sedang dilaksanakan.	Pemantauan rutin setiap triwulan dengan evaluasi hasil dan penyusunan laporan kemajuan untuk setiap proyek, seperti pengelolaan air dan perbaikan sistem irigasi.
3.	Tim Pemantauan	Tim yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi proyek terkait dengan pengelolaan air dan infrastruktur lainnya.	Penunjukan tim dari Dinas PUPR, Bapperida, dan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit dan pemantauan langsung di lapangan.
4.	Laporan Kemajuan Proyek	Penyusunan laporan terkait progres proyek dan dampaknya terhadap sasaran yang ada.	Laporan kemajuan setiap triwulan disiapkan oleh tim yang bertanggung jawab, kemudian dipublikasikan untuk pemangku kepentingan dan masyarakat umum.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi hasil pemantauan dan penyesuaian strategi atau pengendalian jika ada perubahan dalam kondisi lapangan.	Mengadakan rapat evaluasi setelah setiap pemantauan untuk mendiskusikan masalah yang ditemukan dan merumuskan solusi atau penyesuaian terhadap rencana yang ada.
6.	Umpan Balik Masyarakat	Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai dampak proyek yang sedang berjalan.	Mengadakan survei dan forum masyarakat untuk mengumpulkan pendapat mengenai dampak proyek dan bagaimana proyek dapat lebih menguntungkan mereka.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi :

1. Penjadwalan Pemantauan dan Komunikasi Rutin
   Mengatur jadwal pemantauan proyek secara rutin dan koordinasi antar instansi. Pemantauan dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Setelah pemantauan, hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat melalui laporan publik dan media sosial.
2. Penyusunan Laporan Progres dan Evaluasi
   Menyusun laporan berkala yang berisi status implementasi kebijakan, pencapaian indikator kinerja, dan evaluasi terhadap program atau proyek yang sedang berjalan. Laporan ini akan dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi.
3. Meningkatkan Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal
   Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang memiliki kapasitas dalam melakukan evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang ada. Lembaga seperti BPK, LSM, dan media massa dapat memberikan evaluasi objektif.

4. Partisipasi Publik dalam Evaluasi
   Membuka saluran umpan balik dari masyarakat untuk memberikan penilaian atau usulan terkait kebijakan atau inisiatif yang telah dilaksanakan. Forum-forum atau survei online dapat digunakan untuk mempercepat pengumpulan umpan balik.
5. Penyesuaian Program Berdasarkan Hasil Pemantauan
   Berdasarkan evaluasi dan pemantauan, kebijakan atau proyek yang tidak berjalan sesuai harapan akan disesuaikan atau diperbaiki. Semua perubahan yang dilakukan akan dikomunikasikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

II. Tujuan : MENINGKATKAN KUALITAS REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

Indikator Kinerja :
1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Indeks reformasi birokrasi
3. Indeks Daya Saing Daerah

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	MENINGKATKAN KUALITAS REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF								
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penurunan nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah	Inspektorat Daerah, Bagian Tapem-Setda	Kurangnya pelaksanaan sistem pengawasan internal	Internal	C	Reputasi dan kepercayaan publik menurun	Pemerintah Daerah, Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		Indeks reformasi birokrasi	Lambatnya proses reformasi birokrasi	BKPSDM, Sekretariat Daerah	Budaya kerja birokrasi belum adaptif terhadap perubahan	Internal	C	Kinerja ASN stagnan, layanan publik tidak optimal	ASN, Masyarakat
		Indeks Daya Saing Daerah	Daya saing daerah tidak meningkat signifikan	Bapperida, Dinas Penanaman Modal	Kolaborasi lintas sektor belum terintegrasi	Internal	C	Ketertinggalan daerah dalam investasi dan inovasi	Dunia usaha, Pemda, Masyarakat
1	Birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis digital	Bupati	a. Rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintahan .	Internal	C	Rendahnya nilai SAKIP	Bupati
		Opini BPK terhadap laporan keuangan		Bupati	b. Untuk pembiayaan pembangunan masih bergantung pada suber pendanaan pembangunan dari dana transfer.	Internal	C	Tidak meratanya pembangunan	Bupati
		indeks reformasi hukum		Bupati	c. Kurangnya partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat	Internal	C	Rendahnya indeks reformasi hukum	Bupati
		Indeks Inovasi Daerah		Bupati	d. Belum adanya kebijakan yang mendorong OPD beserta staff berpartisipasi dalam melahirkan inovasi	Internal	C	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah	Bupati
2	Pelayanan publik yang prima dan pemerintah berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis *Key Success Indicators*	Bupati	Belum optimalnya perbaikan sistem hingga perubahan budaya kerja dan integritas petugas	Internal	C	Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Bupati/ Masyarakat
		Indeks SPBE				Internal	C		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		Indeks masyarakat digital indonesia			Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Internal	C	Rendahnya indeks SPBE dan Indeks masyarakat digital masyarakat	Bupati/ Masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik			Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas	Internal	C	Rendahnya Indeks Pelayanan Publik	Bupati/ Masyarakat
3	Membangun dari nagari sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase nagari mandiri	Rendahnya Persentase nagari mandiri	Bupati	Belum optimalnya peningkatan status Nagari/Desa menjadi Desa Mandiri	Internal	C	Rendahnya tingkat Nagari/Desa status mandiri	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	MENINGKATKAN KUALITAS REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF								
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4	3	12	Pelaporan kinerja tahunan dan evaluasi internal	Tidak semua perangkat daerah menyusun laporan berbasis kinerja	Bimtek penyusunan laporan kinerja dan penguatan sistem monitoring internal	Inspektorat Daerah,	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
								Bagian Ortala	
	Indeks reformasi birokrasi	4	3	12	Penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB)	Kurangnya perubahan budaya kerja dan kepemimpinan adaptif	Peningkatan kapasitas ASN dan internalisasi core values ASN	BKPSDM, Sekretariat Daerah	Tahun 2025-2029
	Indeks Daya Saing Daerah	5	2	10	Perencanaan pembangunan daerah berbasis data	Minimnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal	Pemetaan potensi unggulan daerah dan penguatan sinergi OPD	Bapperida, Dinas Penanaman Modal	Tahun 2025-2029
1	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel berbasis digital	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya *softkiil management* berorientasi hasil dan berdampak secara kolaboratif	• Peningkatan kualitas kelembagaan yang tepat fungsi secara efektif dan efisien • Peningkatan kualitas *softklil management* ASN yang berkinerja tinggi • Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan terintegratif • Peningkatan kualitas kerjasama secara efektif dan efisien	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya kualitas penyelenggaraan	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6	• Belum terintegrasinya sistem pemerintahan	Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	pemerintah berbasis *Key Success Indicators*				Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	berbasis digital secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan	yang terintegrasi dan akuntabel berbasis akuntabilitas kinerja dan keuangan		
						• Belum meratanya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pemerintah dan Ombudsman RI	Percepatan dan peingkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi secara efektif dan responsif berdasarkan kualitas dan mutu pelayanan standar pemerintah dan Ombudsman RI	Bupati	Tahun 2025-2029
3	Rendahnya Persentase nagari mandiri	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya tingkat Nagari/ Desa berstatus Desa Mandiri	Penguatan tata kelola pemberdayaan masyarakat Nagari/ Desa melalui integrasi program pembangunan antar sektor dan *stakeholders*	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pengendalian risiko, seperti Dinas Penyelenggara, Bapperida, serta masyarakat.	Menyusun daftar pemangku kepentingan yang mencakup instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat.

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi yang digunakan seperti rapat koordinasi, situs web pemerintah daerah, media sosial, email.	Menggunakan berbagai saluran komunikasi formal dan informal, baik online maupun offline untuk memberikan informasi dan update terkait proyek.
3.	Koordinasi Antar Instansi	Mengatur koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan risiko yang baik.	Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin (setiap bulan) antara berbagai instansi terkait untuk membahas progres dan risiko yang muncul.
4.	Penyampaian Hasil Evaluasi	Menyampaikan hasil evaluasi yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah terhadap regulasi dan tata kelola.	Membuat laporan triwulanan yang dapat diakses publik mengenai hasil evaluasi pelaksanaan regulasi dan reformasi tata kelola.
5.	Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang efektif.	Mengadakan seminar, pelatihan publik, dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola yang baik.
6.	Umpan Balik dan Partisipasi Publik	Mengumpulkan umpan balik masyarakat terkait hasil kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.	Menyediakan forum dialog interaktif (online/offline), serta survei digital yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terkait kebijakan yang dijalankan.

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator yang digunakan untuk memantau keberhasilan transformasi tata kelola, seperti Indeks Kinerja Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Daya Saing Daerah, dan Opini BPK terhadap laporan keuangan.	Pengumpulan data indikator secara berkala, dilakukan oleh tim pemantau yang terdiri dari perangkat daerah yang relevan dan lembaga audit eksternal.
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan atau sesuai dengan progres proyek dan kebijakan yang sedang berjalan.	Pemantauan triwulanan dilakukan dengan evaluasi hasil dan pengumpulan data terkait dengan kinerja administratif dan operasional.
3.	Tim Pemantauan	Tim yang bertanggung jawab meliputi Bapperida, Dinas Penyelenggara, BPK, dan lembaga independen untuk audit eksternal.	Penunjukan tim pemantau dari berbagai sektor terkait untuk mengawasi implementasi kebijakan dan pengelolaan risiko yang ada.

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
4.	Laporan Kemajuan Proyek	Penyusunan laporan berkala terkait progres yang dicapai dalam implementasi regulasi dan tata kelola pemerintahan.	Laporan bulanan atau triwulanan disusun oleh tim yang bertanggung jawab, termasuk evaluasi terhadap capaian dan hambatan dalam pengelolaan regulasi dan birokrasi.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penyesuaian strategi pengendalian risiko berdasarkan temuan pemantauan.	Mengadakan rapat evaluasi rutin setelah setiap pemantauan untuk merumuskan penyesuaian terhadap rencana atau kebijakan yang diperlukan.
6.	Umpan Balik Masyarakat	Mengumpulkan umpan balik masyarakat mengenai persepsi mereka terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.	Survei masyarakat yang dilakukan secara online atau melalui forum diskusi untuk mendapatkan informasi terkait tingkat kepuasan mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi

1. Penjadwalan Pemantauan dan Komunikasi
   Menetapkan jadwal pemantauan rutin setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk setiap indikator yang relevan, baik dalam pelestarian lingkungan maupun resiliensi terhadap bencana.
2. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi
   Membuat laporan evaluasi yang rinci setiap triwulan yang akan disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan, serta melalui media sosial dan situs web pemerintah daerah.
3. Penyuluhan kepada Masyarakat
   Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan berbasis lingkungan di setiap kecamatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Pemantauan Berbasis Teknologi
   Menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sensor kualitas udara dan air untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up-to-date tentang kondisi lingkungan dan potensi bencana.
5. Meningkatkan Kolaborasi
   Mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat untuk memperkuat program mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

III. Tujuan : TERWUJUDNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN SERTA RESILIENSI DAERAH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	TERWUJUDNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN SERTA RESILIENSI DAERAH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan menurun	Dinas Lingkungan Hidup	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Internal	C	Meningkatnya polusi, pencemaran air dan udara	Masyarakat, DLH
			Tingginya risiko banjir dan longsor	BPBD, Dinas PUPR	Alih fungsi lahan dan minimnya infrastruktur penanggulangan bencana	Internal	C	Kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan kerugian ekonomi	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Ketidaksiapan daerah menghadapi perubahan iklim ekstrem	BPBD, Bapperida	Minimnya integrasi adaptasi iklim dalam perencanaan pembangunan	Internal dan Eksternal	UC	Penurunan produktivitas sektor pertanian, krisis air bersih	Petani, Dinas Pertanian, Masyarakat
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	1) Indeks Kualitas air 2) Indeks Kualitas Udara	Rendahnya kualitas ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan	Bupati	a. Rendahnya kualitas air	Internal	C	Rendahnya indeks kualitas air	Bupati/ Masyarakat
					b. Rendahnya kualitas udara	Internal	C	Rendahnya indeks kualitas Udara	Bupati/ Masyarakat
					c. Rendahnya kualitas tutupan lahan .	Internal	C	Rendahnya Indeks Tutupan Lahan	Bupati/ Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		3) Indeks Tutupan Lahan							
2	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Belum optimalnya ketahanan bencana	Bupati	Belum maksimalnya resilensi bencana dalam menghadapi perubahan iklim	Internal	C	Rendahnya Indeks Resiko Bencana	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	TERWUJUDNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN SERTA RESILIENSI DAERAH TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM								
	Kualitas lingkungan menurun	4	3	12	Sosialisasi pengelolaan sampah, penghijauan	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha	Penguatan regulasi lingkungan, edukasi berkelanjutan, insentif pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	Tingginya risiko banjir dan longsor	5	4	20	Normalisasi sungai, penghijauan lereng	Tidak ada pemetaan rawan bencana berbasis data spasial	Pemetaan wilayah rawan bencana, pembangunan infrastruktur mitigasi (drainase, talud)	BPBD, Dinas PUPR	Tahun 2025-2029
	Ketidaksiapan daerah menghadapi perubahan iklim ekstrem	4	3	12	Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	KLHS belum terintegrasi dalam semua dokumen perencanaan daerah	Integrasi adaptasi perubahan iklim dalam RPJMD dan RKPD	Bapperida, BPBD, DLH	Tahun 2025-2029
1	Rendahnya kualitas ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan secara berkelanjutan	Penguatan tata kelola pelestarian lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum tersedianya sarana dan sarana pegelolaan sampah terpadu	Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah yang terpadu berbasis regional	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Belum optimalnya ketahanan bencana	3	3	9	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Belum optimalnya mitigasi risiko bencana yang tidak relevan dengan perubahan iklim	Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola kebencanaan yang adaptif berbasis pemberdayaan masyarakat.	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan utama: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Bapperida, Dinas PUPR, masyarakat, LSM lingkungan, sektor swasta.	Identifikasi dan libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan risiko dan pemantauan lingkungan.
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi yang digunakan: rapat koordinasi, media sosial, situs web pemerintah, email, buletin, publikasi.	Membuat platform komunikasi terintegrasi melalui media sosial dan website resmi, serta pertemuan publik untuk keterbukaan informasi.
3.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Penyebaran informasi terkait kebijakan pelestarian lingkungan dan resiliensi terhadap bencana.	Melakukan sosialisasi program melalui seminar, forum publik, dan media sosial untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
4.	Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan peran mereka dalam mencegah bencana.	Menyelenggarakan program edukasi seperti workshop, seminar, dan kampanye berbasis lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
5.	Umpan Balik dan Keterlibatan Masyarakat	Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait implementasi kebijakan lingkungan dan penanggulangan bencana.	Mengadakan survei dan forum diskusi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan mereka.
6.	Komunikasi Krisis	Komunikasi yang cepat dan efektif selama situasi bencana alam atau kejadian darurat terkait perubahan iklim.	Membuat sistem pemberitahuan cepat yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kondisi darurat (misalnya, SMS, aplikasi mobile, dll.).

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator kinerja untuk memantau kemajuan proyek terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan resiliensi terhadap bencana. Indikator yang relevan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, dan Indeks Resiko Bencana (IRB).	Pemantauan rutin dilakukan dengan pengumpulan data secara berkala melalui sistem informasi geografis (SIG), laporan instansi terkait, serta pemantauan lapangan.
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap triwulan atau setiap 6 bulan tergantung pada jenis indikator dan perkembangan yang terjadi.	Pemantauan dilakukan melalui evaluasi lapangan dan survei data yang mengukur kualitas udara, air, tutupan lahan, dan resiko bencana secara berkala.

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
3.	Tim Pemantauan	Tim yang bertanggung jawab melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Bapperida, serta lembaga independen untuk audit eksternal.	Tim pemantau terdiri dari perwakilan instansi pemerintah dan lembaga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
4.	Laporan Kemajuan Proyek	Laporan berkala terkait pencapaian dan evaluasi terhadap kebijakan pelestarian lingkungan dan resiliensi bencana.	Laporan disusun setiap triwulan dan mencakup analisis terhadap pencapaian dan hambatan dalam penerapan kebijakan serta pengelolaan risiko lingkungan.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi hasil pemantauan dan penyesuaian langkah-langkah atau strategi berdasarkan hasil yang dicapai.	Mengadakan rapat evaluasi setiap 6 bulan untuk mendiskusikan hasil pemantauan dan merumuskan penyesuaian terhadap kebijakan atau strategi yang diterapkan.
6.	Penyusunan Laporan	Menyusun laporan berkala tentang dampak dari kebijakan lingkungan yang diterapkan.	Laporan kemajuan dan hasil evaluasi disusun oleh tim terkait dan dipublikasikan untuk transparansi kepada publik serta pemangku kepentingan.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi

1. Penjadwalan Pemantauan dan Komunikasi
   Menetapkan jadwal pemantauan rutin setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan untuk setiap indikator yang relevan, baik dalam pelestarian lingkungan maupun resiliensi terhadap bencana.
2. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi
   Membuat laporan evaluasi yang rinci setiap triwulan yang akan disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan, serta melalui media sosial dan situs web pemerintah daerah.
3. Penyuluhan kepada Masyarakat
   Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan berbasis lingkungan di setiap kecamatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat.

4. Pemantauan Berbasis Teknologi
   Menggunakan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sensor kualitas udara dan air untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up-to-date tentang kondisi lingkungan dan potensi bencana.
5. Meningkatkan Kolaborasi
   Mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat untuk memperkuat program mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

IV. Tujuan : **TERWUJUDNYA KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING**

Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	TERWUJUDNYA KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	Indeks Pembangunan Manusia	Rendahnya capaian IPM	Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	Akses pendidikan dan layanan kesehatan belum merata	Internal	C	SDM tidak kompetitif, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Tingginya angka putus sekolah	Dinas Pendidikan	Ketidakmampuan ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan	Internal	C	Menurunnya angka rata-rata lama sekolah	Pelajar, Dunia Pendidikan
			Rendahnya partisipasi pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja	Dinas Tenaga Kerja	Minimnya program pelatihan, sosialisasi belum optimal	Internal	C	Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal	Pencari kerja, Dunia Usaha
1	Terwujudnya Pendidikan	1) Harapan lama sekolah		Bupati	a. tekanan ekonomi yang memaksa anak bekerja,	Internal/Eksternal	C	Rendahnya angka harapan lama	Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	Berkualitas yang merata		Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		norma sosial-budaya yang memprioritaskan peran tradisional daripada pendidikan, dan keterbatasan kualitas serta akses pendidikan			sekolah dan rata-rata lama sekolah	
		2) Angka rata-rata lama sekolah			b. Belum meratanya tingkat pendidikan masyarakat.	Internal/Eksternal	C		Masyarakat
2	Meningkatnya derajat Kesehatan untuk Semua dan merata	Usia Harapan Hidup	Rendahnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	Bupati	Belum optimalnya tingkat derajat kesehatan masyarakat	Internal	C	• Rendahya angka usia harapan hidup • Tingginya angka prevelensi stunting	Bupati/ Masyarakat
3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1) Indeks Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kekerasan terhadap anak	Bupati	Kurangnya Layanan Perlindungan Anak yang Terjangkau dan Terintegrasi	Internal	C	Rendahnya Indeks Perlindungan Khusus Anak	Bupati
		2) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		Bupati	Kurangnya Layanan pola asuh dan pendampingan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga	Internal	C	Rendahnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Bupati

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		3) Indeks Ketimpangan Gender	hambatan ekonomi, sosial, dan politik yang melemahkan fondasi masyarakat	Bupati	keterbatasan akses perempuan pada kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan kesenjangan yang parah di pasar tenaga kerja	Internal	C	Tingginya Indeks Ketimpangan Gender	Bupati

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	TERWUJUDNYA KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING								
	Rendahnya capaian IPM	4	4	16	Program pendidikan, kesehatan, jaminan sosial	• Belum menjangkau seluruh wilayah atau kelompok rentan	Perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan	Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	Tingginya angka putus sekolah	4	3	12	Program BOS, beasiswa siswa miskin	• Belum efektif menurunkan angka putus sekolah di daerah tertentu	Pemetaan daerah rawan putus sekolah dan intervensi berbasis data	Dinas Pendidikan	Tahun 2025-2029
	Rendahnya partisipasi pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja	3	3	9	Program pelatihan BLK dan kerja sama dengan industri	• Kurangnya minat, informasi, dan sarana pelatihan	Penguatan sosialisasi, kemitraan dengan sektor swasta, revitalisasi BLK	Dinas Tenaga Kerja	Tahun 2025-2029
1	Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya aksesibiltas layanan sektor pendidikan dan kesehn secara merata dan inklusi	Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan serta perlindungan sosial secara inklusif	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Cukup rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan.	Peningkatan kualitas program pendidikan melalui pemberian beasiswa dan subsidi yang tepat sasaran	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita	Peningkatan dan pemerataan kualitas pembinaan masyarakat terhadap pola asuh gizi Balita secara terintegrasi.	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Rendahnya prilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Peningkatan kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat berbasis Sanitasi Total	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
							Berbasis Masyarakat secara efektif dan terintegratif		
3	Meningkatnya Kekerasan terhadap anak	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnnya Layanan Perlindungan Anak yang Terjangkau dan Terintegrasi	Peningkatan kualitas Layanan Perlindungan Anak yang Terjangkau dan Terintegrasi	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum Optimalnya pola asuh dan pendampingan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga	Peningkatan kualitas pola asuh dan pendampingan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga	Bupati	Tahun 2025-2029
4	hambatan ekonomi, sosial, dan politik yang melemahkan fondasi masyarakat	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	keterbatasan akses perempuan pada kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan kesenjangan yang parah di pasar tenaga kerja	Peningkatan akses perempuan pada kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan kesenjangan yang parah di pasar tenaga kerja	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapperida, Dinas Sosial, dan masyarakat.	Identifikasi dan koordinasikan peran pemangku kepentingan yang bertanggung jawab pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi yang digunakan adalah rapat koordinasi, website pemerintah, media sosial, email, dan buletin.	Menggunakan saluran komunikasi formal seperti pertemuan, buletin, serta media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
3.	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi antara instansi pemerintah untuk memastikan pengelolaan program pembangunan SDM berjalan efisien.	Rapat koordinasi bulanan antara instansi terkait (Kesehatan, Pendidikan, Bapperida) untuk memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai target.
4.	Transparansi Program	Penyebaran informasi terkait program pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender kepada masyarakat.	Publikasi laporan triwulanan terkait pencapaian indikator-indikator SDM melalui website dan media sosial pemerintah untuk memastikan transparansi.
5.	Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.	Menyelenggarakan seminar, workshop, dan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan gender.
6.	Umpan Balik dan Partisipasi Publik	Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait efektivitas program.	Menyediakan saluran online untuk survei dan forum diskusi guna menerima umpan balik terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator yang digunakan: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Indeks Perlindungan Khusus Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender.	Pemantauan dilakukan setiap triwulan dengan pengumpulan data dari dinas terkait dan lembaga eksternal untuk memantau pencapaian indikator-indikator SDM.
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan secara rutin setiap triwulan atau sesuai dengan perkembangan indikator.	Pemantauan dilakukan dengan pengumpulan data statistik setiap tiga bulan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Bapperida.
3.	Tim Pemantauan	Tim pemantauan yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas SOSP3APPKB, serta lembaga independen.	Penunjukan tim gabungan dari masing-masing dinas terkait untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan, seperti rumah sakit, sekolah, dan instansi sosial.
4.	Laporan Kemajuan Program	Laporan kemajuan yang berisi status pencapaian dari setiap program yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.	Laporan disusun setiap triwulan dan berisi evaluasi serta rekomendasi perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas program.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penyesuaian strategi berdasarkan temuan dan hasil yang dicapai.	Rapat evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk mendiskusikan hasil pemantauan dan merumuskan solusi terhadap hambatan yang dihadapi.
6.	Penyusunan Laporan dan Transparansi	Penyusunan laporan berkala yang akan dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.	Laporan kemajuan dan evaluasi disusun oleh tim pemantau dan dipublikasikan kepada publik melalui website, media sosial, dan media cetak.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi

1. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Pemantauan
   Menetapkan jadwal rapat koordinasi setiap triwulan yang melibatkan semua instansi terkait dalam memantau pelaksanaan program.
2. Penyusunan Laporan Progres dan Evaluasi
   Menyusun laporan triwulanan yang berisi evaluasi pencapaian program dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Laporan ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan
   Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memberi umpan balik tentang kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender melalui survei atau forum diskusi terbuka.
4. Mengoptimalkan Teknologi dalam Pemantauan
   Memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data secara lebih cepat dan akurat, seperti penggunaan aplikasi untuk pelaporan kesehatan dan pendidikan secara digital.
5. Pelatihan kepada Pemangku Kepentingan
   Memberikan pelatihan berkala kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya indikator SDM dan peran mereka dalam pengelolaan dan pemantauan program.

V. Tujuan : TERWUJUDNYA STABIITAS EKONOMI MAKRO

Indikator Kinerja :
1. Pertumbuhan PDRB
2. Gini Rasio
3. tingkat inflasi

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	TERWUJUDNYA STABIITAS EKONOMI MAKRO								
		Pertumbuhan PDRB	Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah	Bapperida	Ketergantungan pada sektor tertentu, minimnya investasi	Eksternal & Internal	UC	Menurunnya pendapatan masyarakat, pengangguran meningkat	Masyarakat, pelaku usaha
		Gini Rasio	Kesenjangan pendapatan yang melebar	Dinas Sosial	Ketimpangan akses pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik	Sosial-ekonomi	C	Ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan publik	Masyarakat bawah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		tingkat inflasi	Laju inflasi tidak terkendali	Dinas Kumperdag	Disrupsi rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, kebijakan fiskal yang tidak adaptif	Eksternal & kebijakan	UC	Daya beli masyarakat menurun, kemiskinan meningkat	Konsumen umum
1	Meningkatnya pendapatan masyaraat dan nilai tambah sektor unggulan daerah	1) Pendapatan perkapita	Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	Bupati	a. Rendahnya penerapan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi terhadap nilai tambah sektor strategis daerah.	Internal/Eksternal	C	Rendahnya laju pertumbuhan usaha pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Masyarakat
					b. Rendahnya realisasi investasi sektor swasta	Eksternal	UC	Rendahya kontribusi sektor investasi terhadap PDRB	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum berkembangnya sektor perdagangan berorientasi global	Internal/Eksternal	C	Rendahnya laju pertumbuhan usaha perdagangan	Masyarakat
					d. Rendahnya konektivitas wilayah	Internal	C	Rendahnya daya saing daerah	Bupati
		2) Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 3) Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Rendahnya pendapatan masyarakat	Bupati	a. Belum berkembangnya kewirausahaan masyarakat.	Internal	C	Rendahnya rasio kewirausahaan masyarakat	Bupati/ Masyarakat
					b. Belum berkembangnya sektor usaha mikro dan industri kecil menengah kerena terbatasnya kemampuan sumber daya	Internal/Eksternal	C	• Rendahnya tingkat usaha mikro non pertanian • Rendahnya tingkat IKM	Bupati/ Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
		4) Rasio net eksport terhadap PDRB			manusia dan akses permodalan				
					c. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi secara efektif	Internal	C	Rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Bupati/ Masyarakat
2	Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran	1) Tingkat kemiskinan	Melambatnya penurunan angka kemiskinan	Bupati	a. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan tepat sasaran	Internal	C	Tinggimya jumlah penduduk miskin absolut	Bupati
		2) Tingkat pengangguran	Cenderung meningkatnya angka pengangguran		b. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja	Internal	C	Rendahnya produktivitas masyarakat	Bupati/ Masyarakat

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	TERWUJUDNYA STABIITAS EKONOMI MAKRO								
	Perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah	4	3	12	Pemantauan indikator ekonomi	Minimnya investasi swasta sektor produktif	Mendorong kemudahan investasi, insentif pajak, promosi sektor unggulan	Bapperida, DPMPTSP	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
					dan program investasi daerah				
	Kesenjangan pendapatan yang melebar	3	4	12	Program bantuan sosial, pelatihan kerja UMKM	Ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi	Peningkatan akses pendidikan vokasi dan program pemberdayaan ekonomi inklusif	Dinas SOSP3APPKB, Dinas Nakertrans, Bapperida	Tahun 2025-2029
	Laju inflasi tidak terkendali	4	4	16	TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), operasi pasar	Ketergantungan pada komoditas tertentu	Diversifikasi produk pangan lokal dan digitalisasi distribusi barang	Dinas Kumperdag,	Tahun 2025-2029
1	Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sektor strategis daerah berbasis teknologi dan inovasi	- Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis kawasan, IPTEK dan inovasi - Pengembangan sektor pariwisata berbasis Nagari/Desa yang berdaya saing berorientasi internasional	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian.	Peningkatan dan pemantapan kualitas hilirisasi pertanian berkelanjutan berbasis inovatif dan ekonomi digital	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						• Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi berbasis ekonomi digital	Pemenuhan kapasitas akses ekonomi digital yang terjangkau oleh masyarakat	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Rendahnya tingkat partumbuhan investasi sektor strategis daerah	Penguatan tata kelola investasi melalui peningkatan kualitas advokasi masyarakat dan promosi investasi.	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Rendahnya kualitas konektivitas wilayah	Peningkatan kualitas dan peme-rataan konektivitas wilayah secara terintegratif antar kawasan pertumbuhan dan kawasan penyangga	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Cenderung meningkatnya angka pengangguran	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya penciptaan lapangan kerja formal	Peningkaan kualitas investasi padat karya	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Rendahnya pemanfaatan lahan produktif	Peningkaan kualitas pemanfaatan lahan produktif secara efektif dan berkelanjutan	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
3	Melambatnya penurunan angka kemiskinan	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum meratanya jangkauan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kaum rentan	Peningkatan kualitas layanan dan jaminan perlindungan sosial masyarakat miskin dan kaum rentan secara merata dan inklusif	Bupati	Tahun 2025-2029
4	Rendahnya pendapatan ma-syarakat	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum berkembangnya sektor koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah kerena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan akses permodalan	Pengembangan koperasi, usaha mikro dan industri kecil melalui program pelatihan keterampilan, bantuan permodalan dan akses pasar berbasis digital	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum berkembangnya kewirausahaan masyarakat sektor ekonomi kreatif	Pengembangan pelaku ekonomi kreatif, terutama generasi muda melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha serta penyediaan *creative hub* dan fasilitasi pemanfaatan *platform online* untuk memperluas akses pasar	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan utama seperti Bapperida, Dinas Perdagangan, Dinas Industri dan Perindustrian, BPS, dan masyarakat.	Identifikasi pemangku kepentingan terkait dalam sektor ekonomi dan pastikan peran serta tanggung jawab masing-masing instansi.
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi meliputi rapat koordinasi, situs web pemerintah daerah, media sosial, email, publikasi buletin.	Gunakan saluran komunikasi formal dan informal (website, media sosial, dan publikasi cetak) untuk menyebarkan informasi terkait pencapaian ekonomi daerah.
3.	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah untuk mengelola pengendalian ekonomi makro dan sektor unggulan.	Menyelenggarakan rapat koordinasi bulanan dengan instansi terkait dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
4.	Transparansi dan Publikasi Program	Penyebaran informasi mengenai program-program ekonomi daerah dan dampaknya terhadap masyarakat secara terbuka.	Membuat laporan triwulanan yang dipublikasikan melalui media sosial, situs web pemerintah, dan media massa lainnya untuk meningkatkan transparansi.
5.	Penyuluhan kepada Masyarakat	Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program peningkatan ekonomi dan pendapatan.	Menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan kampanye berbasis ekonomi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi mereka dalam mendukung transformasi ekonomi.
6.	Umpan Balik dan Partisipasi Publik	Mengumpulkan umpan balik masyarakat terkait implementasi program-program ekonomi yang sedang berjalan.	Menyediakan saluran komunikasi seperti survei online dan forum publik untuk menerima umpan balik terkait ekonomi daerah dan kebijakan yang diterapkan.

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator utama yang digunakan untuk memantau pencapaian stabilitas ekonomi makro seperti PDRB, Gini Rasio, Inflasi, Pendapatan Perkapita, dan lainnya.	Pengumpulan data secara rutin dan terstruktur melalui instansi terkait seperti BPS, Bapperida, dan Dinas Perdagangan.

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan setiap triwulan untuk memastikan perkembangan ekonomi berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.	Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan dengan melibatkan tim terkait dalam analisis data ekonomi.
3.	Tim Pemantauan	Tim pemantauan melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, BPS, Bapperida, dan lembaga audit eksternal untuk mengevaluasi dampak program ekonomi.	Tim pemantau yang terdiri dari instansi terkait serta pihak independen untuk melakukan audit dan pemantauan lapangan.
4.	Laporan Kemajuan Program	Laporan terkait pencapaian indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan kontribusi sektor unggulan.	Laporan yang disusun setiap triwulan oleh tim yang bertanggung jawab, mencakup evaluasi terhadap pencapaian dan hambatan dalam implementasi program.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi terhadap program dan penyesuaian strategi jika diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.	Mengadakan rapat evaluasi setiap triwulan untuk mendiskusikan hasil pemantauan dan merumuskan penyesuaian terhadap kebijakan ekonomi daerah.
6.	Penyusunan Laporan dan Transaparansi	Penyusunan laporan kemajuan dan evaluasi yang akan dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi.	Laporan hasil pemantauan dipublikasikan di situs web pemerintah dan media sosial untuk memastikan keterbukaan kepada publik.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi

1. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Pemantauan
   Menetapkan jadwal rapat koordinasi setiap triwulan yang melibatkan semua instansi terkait untuk membahas hasil pemantauan dan mengevaluasi kebijakan ekonomi.
2. Penyusunan Laporan Progres
   Laporan kemajuan akan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Laporan ini akan mencakup status pencapaian ekonomi, seperti PDRB, tingkat pengangguran, kontribusi sektor industri, dan pengurangan kemiskinan.
3. Menggunakan Teknologi untuk Pemantauan dan Pelaporan
   Memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sektor ekonomi, dan membuat laporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal
   Bekerjasama dengan lembaga independen seperti BPS dan lembaga riset untuk memastikan objektivitas dalam pemantauan dan pelaporan terkait indikator ekonomi makro.

5. Pelatihan kepada Pemangku Kepentingan
   Memberikan pelatihan terkait pentingnya data dan statistik ekonomi kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat berkontribusi aktif dalam pemantauan dan pengumpulan data.

VI. Tujuan : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERADAT DAN BERBUDAYA YANG HARMONIS, RELIGIUS

Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

1. Identifikasi Risiko Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERADAT DAN BERBUDAYA YANG HARMONIS, RELIGIUS	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Menurunnya nilai IPK karena minimnya pelestarian budaya lokal	Dinas Kebudayaan	Kurangnya program penguatan budaya lokal	Internal & Eksternal	C	Hilangnya identitas budaya lokal dan konflik sosial	Masyarakat, Tokoh Adat
			Konflik antar kelompok masyarakat karena perbedaan keyakinan/budaya	Kesbangpol, FKUB	Minimnya ruang dialog lintas budaya & agama	Sosial	UC	Disintegrasi sosial, menurunnya harmoni masyarakat	Lembaga Agama, Ormas
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya dan keagamaan	Dinas Pariwisata/Kebudayaan	Kurang edukasi & fasilitas pendukung	Internal	C	Tradisi dan nilai lokal tidak berkelanjutan	Pemuda, Pelajar, LSM
1	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang	Indeks Kerukunan	Rendahnya ketahanan sosial berbasis keluarga.	Bupati	a. Belum optimalnya program pembangunan	Internal	C	Rendahnya ketahanan keluarga	Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC*)	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Terkena
	Harmonis dan peningaktan kerukunan antar umat beragama	Umat Beragama (IKUB)			keluarga berkualitas secara terintegrasi.				
					b. Belum optimalnya peningkatan kualitas gender secara inklusif	Internal/Eksternal	C	Tingginya ketimpa-ngan gender	Bupati/ Masyarakat
					c. Belum optimalnya penguatan tata kelola perlindungan anak	Internal	C	Rendahnya kualitas perlindungan anak	Masyarakat
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat	Bupati	• Belum maksimal keterlibatan tokoh adat dan peran lembaga keagamaan, serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ABS-SBK	Internal/Eksternal	UC	Rendahnya Indeks ABS-SBK	Bupati/ Masyarakat
					• Belum optimalnya pemanfaatan warisan budaya secara merata ditatanan masyarakat	Internal/Eksternal	C	Rendahnya tingkat pelestarian warisan budaya	Bupati

*) C: Control Internal dan UC : Uncontrolable external

2. Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
	TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERADAT DAN BERBUDAYA YANG HARMONIS, RELIGIUS								
	Menurunnya nilai IPK karena minimnya pelestarian budaya lokal	4	3	12	Program pelestarian adat dan budaya di desa/kecamatan	Belum merata dan kurang dokumentasi digital budaya lokal	Digitalisasi budaya, festival budaya daerah, kerja sama dengan komunitas budaya	Dinas Budparpora	Tahun 2025-2029
	Konflik antar kelompok masyarakat karena perbedaan keyakinan/budaya	5	2	10	Forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	FKUB belum menyentuh semua lapisan masyarakat	Penguatan FKUB di tingkat desa, pelatihan moderasi beragama, dialog budaya	Kesbangpol & Kemenag	Tahun 2025-2029
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya dan keagamaan	3	3	9	Kegiatan seremonial budaya/agama oleh pemerintah daerah	Kurangnya partisipasi usia muda	Sosialisasi dan kolaborasi dengan sekolah/pemuda; lomba budaya dan religi	Dinas Budparpora	Tahun 2025-2029
1	Rendahnya ketahahan sosial berbasis keluarga	4	3	12	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Belum optimalnya peningkatan kualitas pembangunan keluarga secara terintegratif	Penguatan dan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan keluarga secara integrasi program	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Belum optimalnya pelaksanaan pogram pengarustamaan	Peningkatan kualitas program pengarustamaan gender yang terintegrasi	Bupati	Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Analisis Risiko			Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Skala Dampak (a)	Skala Kemungkinan (b)	Skala Risiko (c=axb)					
						gender yang terintegrasi lintas sektor.	lintas sektor secara efektif dan merata		
						• Belum selarasnya program perlindungan anak terintegrasi lintas sektor	Penguatan tata kelola perlindungan anak secara terintegrasi lintas sektor melalui konsinering program.	Bupati	Tahun 2025-2029
2	Rendahnya ketahanan budaya masyarakat	4	2	8	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	• Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ABS-SBK	Penguatan tata kelola kebudayaan berlandaskan ABS-SBK melalui peningkatan kualitas tokoh adat dan peran lembaga keagamaan berbasis kearifan dan budaya lokal	Bupati	Tahun 2025-2029
						• Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam membuat kreativitas tentang pemanfaatan warisan budaya	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendorong pemanfaatan warisan budaya.	Bupati	Tahun 2025-2029

3. Rencana Komunikasi RTP

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
1.	Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan utama meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, MUI, tokoh agama, serta masyarakat.	Identifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam program kerukunan dan pembangunan kebudayaan, serta pastikan koordinasi antar pemangku kepentingan.

No.	Komponen Komunikasi	Deskripsi	Strategi Komunikasi
2.	Saluran Komunikasi	Saluran komunikasi yang digunakan termasuk rapat koordinasi, situs web pemerintah, media sosial, buletin, forum agama.	Menggunakan berbagai saluran komunikasi formal dan informal (media sosial, forum komunitas, dan website) untuk menyebarkan informasi terkait program kerukunan dan kebudayaan.
3.	Koordinasi Antar Instansi	Mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait untuk memperkuat kebijakan keberagaman sosial dan kebudayaan.	Menyelenggarakan rapat koordinasi antar instansi setiap triwulan untuk memastikan keselarasan program dan kebijakan di lapangan.
4.	Penyuluhan kepada Masyarakat	Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kerukunan umat beragama dan pelestarian budaya.	Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan acara sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai kerukunan dan budaya yang berlandaskan agama dan adat.
5.	Umpan Balik dan Partisipasi Masyarakat	Mengumpulkan umpan balik terkait pelaksanaan program kerukunan dan pembangunan kebudayaan dari masyarakat.	Menyediakan platform digital untuk survei atau kotak saran serta forum terbuka untuk mendiskusikan hasil dan kendala program kepada masyarakat.
6.	Komunikasi Krisis dan Resolusi Konflik	Menyusun prosedur komunikasi dalam situasi konflik sosial atau ketegangan antar kelompok.	Membuat sistem komunikasi darurat yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi secara cepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan kerukunan antar umat beragama.

4. Rencana Pemantauan RTP

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
1.	Indikator Kinerja	Indikator yang digunakan untuk memantau keberhasilan transformasi sosial dan kebudayaan seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).	Pemantauan dilakukan melalui survei, laporan triwulanan dari Dinas Kebudayaan, Bappeda, serta pengumpulan data statistik dari masyarakat dan LSM terkait.
2.	Frekuensi Pemantauan	Pemantauan dilakukan secara rutin setiap triwulan untuk memantau pencapaian indikator terkait kerukunan dan kebudayaan.	Pemantauan dilakukan melalui laporan lapangan, hasil survei masyarakat, serta diskusi antar stakeholder terkait dengan perkembangan kerukunan dan kebudayaan.

No.	Komponen Pemantauan	Deskripsi	Metode Pemantauan
3.	Tim Pemantauan	Tim yang bertanggung jawab melibatkan Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, tokoh agama, dan LSM yang berfokus pada kerukunan antar umat beragama.	Tim pemantau terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat yang memiliki pengalaman dalam bidang kerukunan dan kebudayaan.
4.	Laporan Kemajuan Program	Laporan terkait pencapaian indikator seperti IPK dan IKUB, serta evaluasi tentang program kerukunan antar umat beragama dan pelestarian budaya.	Laporan disusun setiap triwulan oleh tim yang bertanggung jawab dan mencakup analisis terkait pencapaian, hambatan, dan solusi yang diambil.
5.	Evaluasi dan Penyesuaian	Evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penyesuaian strategi berdasarkan temuan yang dicapai, jika diperlukan.	Mengadakan rapat evaluasi dan refleksi setelah setiap pemantauan untuk merumuskan penyesuaian terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan.
6.	Penyusunan Laporan dan Transparansi	Menyusun laporan terkait pencapaian program dan hasil pemantauan untuk dipublikasikan kepada masyarakat.	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan melalui website pemerintah dan media sosial untuk memastikan transparansi kepada publik.

Langkah Implementasi Rencana Pemantauan dan Komunikasi

1. Penjadwalan Rapat Koordinasi dan Pemantauan
   Menetapkan jadwal rapat koordinasi setiap triwulan yang melibatkan instansi terkait untuk membahas hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan kerukunan dan kebudayaan.
2. Penyusunan Laporan Progres dan Evaluasi
   Laporan progres akan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, dan disebarluaskan melalui media sosial dan situs web pemerintah.
3. Mengoptimalkan Teknologi dalam Pemantauan
   Menggunakan teknologi seperti aplikasi dan sistem informasi untuk memantau kemajuan dan pelaksanaan program secara lebih efisien dan akurat.
4. Pelatihan kepada Pemangku Kepentingan
   Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pemangku kepentingan untuk memahami indikator-indikator kinerja dalam kerukunan umat beragama dan kebudayaan serta meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan program.
5. Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Sosial
   Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan agama dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama.

LAMPIRAN II
METADATA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025-2029

I. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah dalam periode tertentu.	((PDRB_t - PDRB_0) / PDRB_0) × 100% / t	BPS	Tahunan
2.	PDRB Per Kapita ADHB	Menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah tanpa memperhitungkan distribusi pendapatan.	PDRB ADHB / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan
3.	PDRB Per Kapita ADHK	Menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk dalam nilai riil (menghilangkan pengaruh inflasi).	PDRB ADHK / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.	IPM = (Indeks Kesehatan + Pendidikan + Pengeluaran) / 3	BPS	Tahunan
5.	Angka Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata umur hidup penduduk saat lahir.	Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan data mortalitas dan kelahiran	BPS	Tahunan
6.	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia sekolah.	Total tahun yang diharapkan / Anak usia sekolah	BPS	Tahunan
7.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas.	Jumlah total tahun sekolah / Jumlah penduduk usia ≥25 tahun	BPS	Tahunan
8.	Pengeluaran Per Kapita	Rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dihitung dari total pengeluaran rumah tangga dibagi dengan	Pengeluaran Rumah Tangga / Jumlah Penduduk Total	BPS (Susenas)	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
		jumlah anggota rumah tangga.			
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase angkatan kerja yang belum bekerja.	(Jumlah penganggur / Angkatan kerja) × 100%	BPS (Sakernas)	Semesteran
10.	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.	$\Sigma_{i=1}^{N}$ Penduduk (Pengeluaran Per Kapita < Garis Kemiskinan)	BPS	Semesteran
11.	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.	(Jumlah penduduk miskin / Total penduduk) × 100%	BPS	Tahunan
12.	Rasio Gini	Mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk.	Koefisien Gini (0–1)	BPS	Tahunan

II. METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

No.	Sasaran Visi	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1.	Peningkatan pendapatan Per Kapita	a. PDRB Per Kapita	Pendapatan rata-rata per penduduk.	PDRB / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan
		b. Kontribusi Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB.	(PDRB Industri Pengolahan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
2.	Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.	(Jumlah penduduk miskin / Total penduduk) × 100%	BPS	Tahunan
		b. Rasio Gini	Mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk.	Koefisien Gini (0–1)	BPS	Tahunan
		c. Pertumbuhan Ekonomi	Mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah dalam periode tertentu.	((PDRB_t - PDRB_0) / PDRB_0) × 100% / t	BPS	Tahunan
3.	Peningkatan Daya Saing Daerah	a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi	Penilaian dilakukan dengan metode evaluasi berbasis indikator dan sub-indikator yang ditentukan dalam pedoman EKPPD. Skor	BPS, Survei IDSD	Tahunan

No.	Sasaran Visi	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
			pemerintahan umum, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.	dihitung dari hasil verifikasi dokumen LPPD, analisis capaian kinerja, serta klarifikasi lapangan (jika diperlukan). Skala nilai umumnya 0 – 100.		
		b. Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan menarik investasi.	Rata-rata skor ekonomi, SDM, infrastruktur × 100	Kementerian Dalam Negeri – Litbang	Tahunan
4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	a. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.	IPM = (Indeks Kesehatan + Pendidikan + Pengeluaran) / 3	BPS	Tahunan
		b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Mengukur output ekonomi per pekerja dalam periode tertentu.	PDRB / Jumlah tenaga kerja	BPS	Tahunan
5.	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emision	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas udara, air, dan tutupan lahan wilayah.	IKLH = (Skor Udara + Skor Air + Skor Lahan) / 3	KLHK, DLH	Tahunan

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1.	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, energi, dan telekomunikasi.	Indeks komposit dari sub-sektor infrastruktur	- Bappenas - PU - Kominfo	Tahunan
2.	Persentase pertumbuhan Infrastruktur daerah	Tingkat peningkatan jumlah, kualitas, dan cakupan sarana dan prasarana dasar (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan sarana publik lainnya) pada periode tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	[(indikator Infrastruktur $_{t}$ – indikator infrastruktur $_{t-1}$) / indikator infrastruktur $_{t-1}$] x 100%	- BPS - Dinas PUPR - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo - Perumda Air Minum - PLN - Telkom	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
3.	Kapasitas Air Baku	Volume air mentah yang tersedia untuk masyarakat.	Total volume air baku / Jumlah Penduduk	- Dinas PU - PDAM - BWWS	Tahunan
4.	Indeks kinerja sistem irigasi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kinerja jaringan irigasi berdasarkan kondisi fisik, kelembagaan, produktivitas, sarana prasarana, serta dokumentasi dan kelembagaan pengelolaan irigasi.	$\frac{Nilai\ Total\ Penilaian\ Aspek\ Kinerja}{Nilai\ Maksimal\ Penila}$	- Kementerian PUPR - Dinas PUPR/PSDA Provinsi dan Kabupaten/Kota - Balai Wilayah Sungai (BWS) / Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	Tahunan
5.	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	Perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan kabupaten yang ada, dinyatakan dalam persen (%)	$\frac{Panjang\ Jalan\ Mantap}{Total\ Panjang\ Jalan\ Kabupaten}$	- Dinas PUPR Kabupaten - Bina Marga Provinsi - Kementerian PUPR - BPS	Tahunan
6.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	proses pengukuran dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, berdasarkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh kepala daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat	$\frac{\sum(Bobot\ indikator\ \times\ s}{\sum Total\ bob}$	- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Kementerian Dalam Negeri (Ditjen OTDA)	Tahunan
7.	Indeks reformasi birokrasi	Ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah daerah.	Rata-rata nilai komponen RB × 100	- KemenPAN-RB	Tahunan
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan menarik investasi.	$\frac{\sum(skor\ indikator\ \times\ bo}{\sum\ bobot}$	- Badan Pusat Statistik (BPS) - Kementerian / Lembaga Teknis - Survei IDSD (Kemenko Perekonomian/Bappenas atau Pemerintah Daerah)	Tahunan
10.	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu merencanakan,	Nilai SAKIP ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB dengan bobot penilaian per dimensi. Skor kemudian dikonversi menjadi kategori:	- Kementerian PANRB	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
		melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.	- AA (sangat memuaskan) = ≥ 90 - A (memuaskan) = 80 – < 90 - BB (sangat baik) = 70 – < 80 - B (baik) = 60 – < 70 - CC (cukup) = 50 – < 60 - C (kurang) = 30 – < 50 - D (sangat kurang) = < 30		
11.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.	Nilai berdasarkan jenis opini (WTP = 100, WDP = 75, dst.)	- BPK RI	Tahunan
12.	Indeks reformasi hukum	Ukuran komposit atas pelaksanaan reformasi hukum di daerah, termasuk regulasi, akses keadilan, dan kelembagaan hukum.	Skor rata-rata dari indikator penyusun reformasi hukum (skor 0–100).	Kementerian Hukum dan HAM	Tahunan
13.	Indeks Inovasi Daerah	Ukuran tingkat inovasi daerah dalam berbagai aspek pembangunan.	Indeks komposit dari variabel inovasi	Kemendagri / BRIN	Tahunan
14.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Rata-rata skor unsur pelayanan × konversi skala 100	Unit Pelayanan Publik/Pemerintah Daerah	Tahunan
15.	Indeks SPBE	Ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah, yang mencakup aspek kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.	$\frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$	- Kementerian PAN-RB -- Hasil evaluasi mandiri SPBE oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi - Penilaian eksternal melalui Tim Evaluator SPBE Nasional (terdiri dari BSSN, BPKP, Kemenkominfo, BRIN, dan KemenPAN-RB).	Tahunan
16.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Menggambarkan tingkat keterlibatan dan literasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital.	Rata-rata skor akses, literasi, partisipasi digital × 100	Kemenkominfo	Tahunan
17.	Indeks Pelayanan Publik	Ukuran kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang dinilai dari kualitas pelayanan.	$\frac{\sum(skor\ indikator \times bo}{\sum bobot}$	- Kementerian PANRB - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
				- Evaluasi kinerja pelayanan publik oleh instansi terkait	
18.	Persentase nagari mandiri	Persentase nagari (desa) dengan status mandiri dalam klasifikasi IDM.	(Jumlah desa mandiri / Total desa) × 100%	Kemendesa / BPS	Tahunan
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas udara, air, dan tutupan lahan wilayah.	IKLH = (Skor Udara + Skor Air + Skor Lahan) / 3	KLHK, DLH	Tahunan
20.	Indeks Kualitas air	Menilai kualitas air berdasarkan pengukuran beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kelayakan air untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, irigasi, dan pemeliharaan ekosistem	$\sum(P_i \times W_i)$	-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup - Badan Lingkungan Hidup Daerah - Lembaga pengelola air	Tahunan
21.	Indeks kualitas udara	Mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi berbagai jenis polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), ozon (O_3), dan karbon dioksida (CO_2).	$\frac{C_1}{S_1}, \frac{C_2}{S_2}, \ldots \frac{C_n}{S_n}$	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Badan Lingkungan Hidup Daerah - Pemantauan Kualitas Udara Nasional dan Regional	Harian atau lebih sering tergantung pada kebijakan dan kebutuhan monitoring kualitas udara
22.	Indeks tutupan lahan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar persentase wilayah yang masih tertutup oleh vegetasi alami atau penutup lahan tertentu (hutan, semak, sawah, perkebunan, badan air, dll) dibandingkan dengan luas total wilayah administratif tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi ekologis dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah.	$\frac{Luas\ wilayah\ dengan\ tuutpan\ lahan\ alami}{Total\ luas\ wilayah} x$	- Citra Satelit (Landsat, Sentinel, Google Earth Engine) - KLHK (Peta Tutupan Lahan Indonesia) - BIG (Badan Informasi Geospasial) - Bappeda/DLH yang memiliki sistem informasi geospasial daerah - Laporan Inventarisasi Hutan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tahunan, Triwulan
23.	Indeks risiko bencana (IRB)	Tingkat risiko bencana berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas.	IRBI = Bahaya × Kerentanan / Kapasitas	- BNPB - InaRisk	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
24.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.	IPM = (Indeks Kesehatan + Pendidikan + Pengeluaran) / 3	BPS	Tahunan
25.	Usia Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata umur hidup penduduk saat lahir.	UHH dihitung berdasarkan data mortalitas dan kelahiran	BPS	Tahunan
26.	Harapan lama sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia sekolah.	Total tahun yang diharapkan / Anak usia sekolah	BPS	Tahunan
27.	Angka rata-rata lama sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas.	Jumlah total tahun sekolah / Jumlah penduduk usia ≥25 tahun	BPS	Tahunan
28.	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.	$\frac{\sum(skor\ dimensi\ \times\ bob}{\sum\ bobot}$	- Kementerian PPPA - Dinas PPPA - UPTD PPA - Satgas PPA - SIMFONI PPA - BPS - OPD teknis	Tahunan
29.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Ukuran komposit yang menggambarkan kondisi kualitas keluarga di Indonesia, dilihat dari aspek ketentraman, kemandirian, kebahagiaan, dan kesehatan keluarga sesuai dengan arah pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh BKKBN.	$\frac{\sum(skor\ indikator\ \times\ bo}{\sum\ bobot}$	- BKKBN (Survei Pembangunan Keluarga/SDKI, Pendataan Keluarga). - Badan Pusat Statistik (BPS). - Survei tematik lainnya.	Tahunan
30.	Indeks Ketimpangan Gender	Mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.	Indeks komposit dari indikator ketimpangan gender	BPS / Bappenas	Tahunan
31.	Pertumbuhan PDRB	Mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah dalam periode tertentu.	((PDRB_t - PDRB_0) / PDRB_0) × 100% / t	BPS	Tahunan
32.	Gini Rasio	Mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk.	Koefisien Gini (0–1)	BPS	Tahunan
33.	Tingkat inflasi	Persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode.	((IHKt - IHKt-1) / IHKt-1) × 100%	BPS	Bulanan / Tahunan
34.	Pendapatan perkapita (ADHB)	Menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah tanpa	PDRB ADHB / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
		memperhitungkan distribusi pendapatan.			
35.	Pendapatan perkapita (ADHK)	Menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk dalam nilai riil (menghilangkan pengaruh inflasi).	PDRB ADHK / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan
36.	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB.	(PDRB Industri Pengolahan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
37.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	(PDRB Perdagangan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
38.	Rasio net eksport terhadap PDRB	Perbandingan antara net ekspor (ekspor - impor) terhadap total PDRB.	(Ekspor - Impor) / Total PDRB × 100%	BPS	Tahunan
39.	Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.	(Jumlah penduduk miskin / Total penduduk) × 100%	BPS	Tahunan
40.	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase angkatan kerja yang belum bekerja.	(Jumlah penganggur / Angkatan kerja) × 100%	BPS (Sakernas)	Semesteran
41.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Mengukur capaian pembangunan kebudayaan di Indonesia, mencakup berbagai dimensi yang terkait dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan	$\frac{\sum(skor\ indikator\ \times\ bo}{\sum\ bobot}$	- BPS (Indeks Pembangunan Kebudayaan). - Kemendikbudristek. - Survei dan data administratif terkait kebudayaan.	Tahunan
42.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati.	$\frac{(Skor\ Toleransi + Skor\ Kesetaraan + Skor\ Kerja\ Sama)}{3}$	- Kementerian Agama RI - FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) - Laporan kejadian konflik sosial berbasis agama - Evaluasi kegiatan lintas agama di daerah	Tahunan

IV. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

IVA. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1	Indeks Ketahanan Pangan	Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan.	IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3	BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional	Tahunan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persentase penduduk dengan konsumsi energi < kebutuhan minimum harian.	(Penduduk tidak cukup energi / Total penduduk) × 100%	BPS (Susenas)	Tahunan
3	Konsumsi Listrik per Kapita	Rata-rata penggunaan listrik oleh setiap penduduk.	Konsumsi Listrik (kWh) / Jumlah Penduduk	PLN, Dinas ESDM, BPS	Tahunan
4	Akses Sumber Air Minum Layak	Persentase rumah tangga dengan akses ke sumber air layak.	(RT dengan akses air layak / Total RT) × 100%	BPS (Susenas)	Tahunan
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Mengukur kualitas udara, air, dan tutupan lahan wilayah.	IKLH = (Skor Udara + Skor Air + Skor Lahan) / 3	KLHK, DLH	Tahunan
6	Akses Sanitasi Aman	Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.	(RT dengan sanitasi aman / Total RT) × 100%	BPS (Susenas)	Tahunan
7	Timbulan Sampah Terolah	Persentase sampah yang dikelola di fasilitas pengolahan.	(Volume sampah terolah / Total timbulan sampah) × 100%	DLH, SIPSN	Tahunan
8	Layanan Pengumpulan Sampah Penuh	Proporsi RT yang mendapat layanan penuh pengumpulan sampah.	(RT dilayani / Total RT) × 100%	DLH, BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Efisiensi pengurangan emisi GRK per unit PDRB.	(Intensitas Awal - Intensitas Akhir) / Intensitas Awal × 100%	KLHK, DLH, Bappenas	Tahunan
10	Indeks Risiko Bencana	Tingkat risiko bencana berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas.	IRBI = Bahaya × Kerentanan / Kapasitas	BNPB, InaRisk	Tahunan
11	Indeks Ketahanan Daerah	Kemampuan daerah menghadapi dan pulih dari tekanan dan bencana.	Rata-rata skor dimensi Sosial, Ekonomi, Lingkungan	Bappenas, BNPB	Tahunan
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk dalam satu periode.	((P_t - P_0)/P_0) × 100% / t	BPS	Tahunan
13	Rasio Penduduk	Perbandingan penduduk usia non-produktif terhadap produktif.	((Penduduk <15 + >64) / Penduduk 15–64) × 100%	BPS	Tahunan
14	Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk per satuan luas wilayah.	Jumlah Penduduk / Luas Wilayah	BPS	Tahunan
15	Kapasitas Air Baku	Volume air mentah yang tersedia untuk masyarakat.	Total volume air baku / Jumlah Penduduk	Dinas PU, PDAM, BWWS	Tahunan
16	Kapasitas Tampungan Air	Kemampuan wilayah menampung air.	Total volume tampungan / Luas wilayah atau per kapita	Dinas PU, BWWS	Tahunan
17	Kerugian Ekonomi Akibat Bencana	Persentase kerugian ekonomi akibat bencana terhadap PDRB.	(Total Kerugian / PDRB) × 100%	BNPB, Bappeda	Tahunan / Pasca bencana
8	Rasio Migrasi Netto	Selisih migrasi masuk dan keluar dibanding jumlah penduduk.	((Migrasi Masuk - Migrasi Keluar) / Jumlah Penduduk) × 100%	BPS, Dukcapil	Tahunan

IVB. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah dalam periode tertentu.	((PDRB_t - PDRB_0) / PDRB_0) × 100% / t	BPS	Tahunan
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.	(Jumlah penduduk miskin / Total penduduk) × 100%	BPS	Tahunan
3	PDRB per Kapita	Pendapatan rata- rata per penduduk.	PDRB / Jumlah Penduduk	BPS	Tahunan
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase angkatan kerja yang belum bekerja.	(Jumlah penganggur / Angkatan kerja) × 100%	BPS (Sakernas)	Semesteran
5	Rasio Gini	Mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk.	Koefisien Gini (0–1)	BPS	Tahunan
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.	IPM = (Indeks Kesehatan + Pendidikan + Pengeluaran) / 3	BPS	Tahunan
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Perkiraan rata-rata umur hidup penduduk saat lahir.	UHH dihitung berdasarkan data mortalitas dan kelahiran	BPS	Tahunan
8	Indeks Keluarga Sehat	Mengukur status kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator pilar.	Skor berdasarkan pencapaian indikator keluarga sehat	Kemenkes	Tahunan
9	Prevalensi Stunting	Persentase balita yang mengalami stunting (pendek dan sangat pendek).	(Jumlah balita stunting / Total balita) × 100%	SSGI (Kemenkes), BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
10	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang telah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas.	Jumlah total tahun sekolah / Jumlah penduduk usia ≥25 tahun	BPS	Tahunan
11	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia sekolah.	Total tahun yang diharapkan / Anak usia sekolah	BPS	Tahunan
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca	Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca.	(Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100%	Kemendikbudri stek (AN)	Tahunan
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Numerasi	Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum numerasi.	(Jumlah sekolah capai SKM numerasi / Total sekolah) × 100%	Kemendikbudri stek (AN)	Tahunan
14	Rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) - Membaca	Rerata skor kemampuan membaca siswa usia 15 tahun berdasarkan studi PISA.	Skor rerata membaca (skala 0–1000)	OECD/PISA	3 Tahunan
15	Rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) - Matematika	Rerata skor kemampuan matematika siswa usia 15 tahun.	Skor rerata matematika (skala 0–1000)	OECD/PISA	3 Tahunan
16	Rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) - Sains	Rerata skor kemampuan sains siswa usia 15 tahun.	Skor rerata sains (skala 0–1000)	OECD/PISA	3 Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang mengukur keberdayaan literasi masyarakat berdasarkan perpustakaan, bahan bacaan, dan partisipasi.	Indeks komposit berbagai dimensi literasi	Perpusnas	Tahunan
18	Indeks Literasi Digital	Mengukur kemampuan dan pemanfaatan teknologi digital di masyarakat.	Skor rata-rata dari aspek keamanan, etika, budaya, dan kecakapan digital	Kemenkominfo	Tahunan
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Proporsi penduduk usia kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja.	(Jumlah peserta aktif / Penduduk usia kerja) × 100%	BPJS Ketenagakerja an	Tahunan
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama.	Indeks berdasarkan persepsi sosial, hubungan antarumat, dan toleransi	Kemenag	Tahunan
21	Indeks Ketimpangan Gender	Mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.	Indeks komposit dari indikator ketimpangan gender	BPS / Bappenas	Tahunan
22	Indeks Pembangunan Gender	Menunjukkan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan gender.	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × IPM Total	BPS	Tahunan
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Mengukur pencapaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.	Indeks komposit berbagai dimensi kepemudaan	Kemenpora	Tahunan
24	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem (PPP USD 1,9 per hari).	(Penduduk miskin ekstrem / Total penduduk) × 100%	BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
25	Angka Kelahiran Total (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduktifnya.	Jumlah kelahiran / Wanita usia subur (ASFR)	BKKBN / BPS	Tahunan
26	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Mengukur output ekonomi per pekerja dalam periode tertentu.	PDRB / Jumlah tenaga kerja	BPS	Tahunan
27	Proporsi Penduduk ≥15 Tahun yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase penduduk usia kerja dengan ijazah pendidikan tinggi.	(Penduduk pendidikan tinggi / Total penduduk ≥15 tahun) × 100%	BPS	Tahunan
28	Persentase Pekerja Lulusan Menengah-Tinggi di Bidang Keahlian	Mengukur relevansi pendidikan dengan jenis pekerjaan.	(Pekerja di bidang sesuai / Total pekerja lulusan menengah-tinggi) × 100%	BPS / Kemnaker	Tahunan
29	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase penciptaan lapangan kerja di sektor formal dari total lapangan kerja baru.	(Lapangan kerja formal / Total lapangan kerja baru) × 100%	BPS	Tahunan
30	APK Perguruan Tinggi	Persentase penduduk usia 19–23 tahun yang mengikuti pendidikan tinggi.	(Jumlah mahasiswa / Penduduk usia 19–23 tahun) × 100%	BPS / Kemendikbudri stek	Tahunan
31	Penduduk Bersertifikat Keahlian	Proporsi penduduk yang memiliki sertifikasi keahlian dari lembaga resmi.	(Penduduk bersertifikat / Total penduduk) × 100%	BNSP / Kemnaker	Tahunan
32	Persen Kepemilikan NPWP	Persentase penduduk wajib pajak yang memiliki NPWP.	(Pemilik NPWP / Penduduk wajib pajak) × 100%	DJP / Kemenkeu	Tahunan
33	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, energi, dan telekomunikasi.	Indeks komposit dari sub- sektor infrastruktur	Bappenas / PU / Kominfo	Tahunan
34	Stok Infrastruktur terhadap PDRB	Proporsi nilai infrastruktur tetap terhadap total PDRB wilayah.	(Nilai infrastruktur / PDRB) × 100%	Bappenas / BPS	Tahunan

IVC. ASPEK DAYA SAING DAERAH

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1	Angka Ketergantungan	Rasio jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif.	(Penduduk usia 0–14 dan 65+ / Penduduk usia 15–64) × 100%	BPS	Tahunan
2	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB.	(PDRB Industri Pengolahan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
3	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Persentase PDRB sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB.	(PDRB Akomodasi Mamin / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
4	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.	(PDRB Perdagangan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap total PDRB.	(PDRB Ekraf / Total PDRB) × 100%	BPS / Bekraf	Tahunan
6	Rasio Kewirausahaan	Jumlah wirausaha terhadap jumlah penduduk usia kerja.	(Jumlah wirausaha / Penduduk usia kerja) × 100%	Kemenkop UKM / BPS	Tahunan
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase angkatan kerja terhadap Penduduk usia kerja.	(Angkatan kerja / Penduduk usia kerja) × 100%	BPS	Tahunan
8	Indeks Inovasi Daerah	Ukuran tingkat inovasi daerah dalam berbagai aspek pembangunan.	Indeks komposit dari variabel inovasi	Kemendagri / BRIN	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
9	Indeks Pembangunan TIK	Mengukur ketersediaan, akses, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	Indeks komposit dari dimensi akses, penggunaan, dan keterampilan	Kominfo / BPS	Tahunan
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Investasi bruto pada barang modal tetap dalam periode tertentu.	Nilai PMTB / Total PDRB × 100%	BPS	Tahunan
11	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Perbandingan antara net ekspor (ekspor - impor) terhadap total PDRB.	(Ekspor - Impor) / Total PDRB × 100%	BPS	Tahunan
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks komposit ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.	Indeks komposit berdasarkan jalan, listrik, air, internet, dan lainnya	Bappenas / PU	Tahunan
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Proporsi rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni.	(RT dengan rumah layak / Total RT) × 100%	BPS	Tahunan
14	Persentase Desa Mandiri	Persentase desa dengan status mandiri dalam klasifikasi IDM.	(Jumlah desa mandiri / Total desa) × 100%	Kemendesa / BPS	Tahunan
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio pendapatan pajak daerah terhadap total PDRB.	(Pendapatan pajak daerah / PDRB) × 100%	Pemda / DJPK	Tahunan
16	Tingkat Inflasi	Persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode.	((IHKt - IHKt-1) / IHKt-1) × 100%	BPS	Bulanan / Tahunan
17	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB.	(PDRB sektor pertanian / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
18	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap tahun sebelumnya.	((PDRB tahun t - tahun t-1) / tahun t-1) × 100%	BPS	Tahunan
19	Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian	Nilai output sektor pertanian dibagi dengan jumlah pekerja sektor pertanian.	PDRB Pertanian / Tenaga kerja sektor pertanian	BPS	Tahunan
20	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	Proporsi UKM di luar sektor pertanian terhadap total UKM.	(UKM non-pertanian / Total UKM) × 100%	Kemenkop UKM / BPS	Tahunan
21	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM terhadap total unit usaha industri.	(Jumlah IKM / Total industri) × 100%	Kemenperin / BPS	Tahunan
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi dibandingkan dengan PDRB daerah.	(Volume usaha koperasi / PDRB) × 100%	Kemenkop UKM	Tahunan
23	Return on Asset (ROA) BUMD	Tingkat keuntungan BUMD terhadap total aset yang dimiliki.	(Laba bersih / Total aset) × 100%	Pemda / BUMD	Tahunan
24	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase perempuan dalam angkatan kerja.	(Perempuan angkatan kerja / Total perempuan usia kerja) × 100%	BPS	Tahunan
25	Stabilitas dan Ketersediaan Bapokting	Indikator persentase stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting.	Persentase kecukupan dan keterjangkauan barang pokok	Kemendag / TPID	Bulanan / Tahunan
26	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB	Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank dibagi PDRB.	(Total DPK / PDRB) × 100%	OJK / BI	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi / Narasi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
27	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Total transaksi saham dibagi dengan jumlah penduduk.	Total nilai transaksi saham / Jumlah penduduk	BEI / OJK	Tahunan
28	Total Kredit terhadap PDRB	Perbandingan jumlah kredit perbankan terhadap PDRB.	(Total kredit / PDRB) × 100%	OJK / BI	Tahunan
29	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Kontribusi sektor jasa keuangan terhadap total PDRB.	(PDRB sektor jasa keuangan / Total PDRB) × 100%	BPS	Tahunan
30	Inklusi Keuangan	Persentase penduduk dewasa yang memiliki akses ke layanan keuangan formal.	(Jumlah penduduk yang punya rekening / Penduduk dewasa) × 100%	OJK / BI	Tahunan

IVD. ASPEK PELAYANAN UMUM

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
1	Indeks Reformasi Hukum	Ukuran komposit atas pelaksanaan reformasi hukum di daerah, termasuk regulasi, akses keadilan, dan kelembagaan hukum.	Skor rata-rata dari indikator penyusun reformasi hukum (skor 0–100).	Kementerian Hukum dan HAM	Tahunan
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks yang menggambarkan kematangan dan kapabilitas penerapan SPBE di instansi pemerintah.	Rata-rata skor penilaian domain SPBE berdasarkan Permen PANRB.	Kementerian PANRB	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
3	Indeks Pelayanan Publik	Ukuran kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang dinilai dari kualitas pelayanan.	Nilai rata-rata dari survei kepuasan masyarakat pada layanan-layanan utama.	Kementerian PANRB	Tahunan
4	Indeks Integritas Angka	ndeks yang mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap integritas lembaga publik.	Gabungan skor persepsi pengguna layanan, pegawai, dan pakar (oleh KPK).	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Tahunan
5	Persentase Penegakan Perda	Persentase Peraturan Daerah yang telah ditegakkan melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi.	(Jumlah Perda yang ditegakkan / Jumlah Perda berlaku) × 100%	Pemerintah Daerah / Satpol PP	Tahunan
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persentase pelaksanaan rencana aksi HAM oleh pemerintah daerah.	(Jumlah aksi HAM yang tercapai / Total aksi yang direncanakan) × 100%	Kementerian Hukum dan HAM	Tahunan
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks yang mencerminkan kondisi demokrasi di suatu wilayah berdasarkan aspek kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik.	Nilai komposit dari 3 aspek dan 11 variabel demokrasi.	BPS	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
8	Indeks Rasa Aman	Menggambarkan rasa aman masyarakat terhadap tindak kriminal, bencana, dan gangguan sosial lainnya.	Rata-rata skor indikator rasa aman × 100	BPS – Indeks Rasa Aman	Tahunan
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks yang menggambarkan kondisi sosial yang aman, tertib, dan terkendali di wilayah.	Rata-rata skor ketenteraman dan ketertiban × 100	Kemendagri/Satpol PP	Tahunan
10	Indeks Daya Saing Daerah	Ukuran kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan menarik investasi.	Rata-rata skor ekonomi, SDM, infrastruktur × 100	Kementerian Dalam Negeri – Litbang	Tahunan
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Ukuran keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah daerah.	Rata-rata nilai komponen RB × 100	KemenPAN-RB	Tahunan
12	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Menggambarkan tingkat keterlibatan dan literasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital.	Rata-rata skor akses, literasi, partisipasi digital × 100	Kemenkominfo	Tahunan

No	Nama Indikator	Definisi	Rumus perhitungan	Sumber Data	Frekuensi
3	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)	Nilai integritas instansi yang diperoleh melalui survei terhadap pegawai, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.	Skor rata-rata persepsi + pengalaman + sistem (skala 0–100)	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Tahunan
14	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Menggambarkan tingkat persepsi publik terhadap praktik korupsi di sektor publik di daerah.	Rata-rata skor persepsi antikorupsi × 100	BPS/KPK	Tahunan
15	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah.	(Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100%	Satpol PP/Kemendagri	Tahunan
16	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.	Nilai berdasarkan jenis opini (WTP = 100, WDP = 75, dst.)	BPK RI	Tahunan
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.	Rata-rata skor unsur pelayanan × konversi skala 100	Unit Pelayanan Publik/Pemerintah Daerah	Tahunan

V. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Nama Indikator	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD**
Defenisi	Jumlah anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal (TK/RA) maupun non-formal (KB, TPA, SPS), dalam suatu wilayah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	**Keterangan:** Partisipasi anak PAUD = (Jumlah Anak Usia 5–6 Tahun yang Mengikuti PAUD) / Total anak usia 5-6 Tahun x100 % • **Jumlah Anak Usia 5–6 Tahun yang Mengikuti PAUD:** Anak yang secara resmi tercatat mengikuti pendidikan PAUD (formal maupun non- formal) di wilayah tertentu. • **Total Anak Usia 5–6 Tahun:** Jumlah keseluruhan anak usia 5–6 tahun di wilayah tersebut, berdasarkan data kependudukan (Dukcapil atau BPS). • Hasil dikali 100% untuk memperoleh nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah atau persentase anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini merupakan indikator penting dalam pengembangan SDM sejak dini.
Sumber Data	Dapodik PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten, Data kependudukan (Dukcapil/BPS)
Frekuensi	Tahunan, sesuai pemutakhiran data

2. Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	**Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)**
Defenisi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun adalah persentase anak usia 7– 12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD/MI/sederajat), baik negeri maupun swasta, dibandingkan dengan total anak usia 7–12 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	APS 7-12 Tahun = (Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang bersekolah) / Total anak usia 7-12 Tahun x100 % **Keterangan:** • **Jumlah Anak Usia 7–12 Tahun yang Bersekolah:** Anak usia 7–12 tahun yang sedang aktif bersekolah di pendidikan dasar (SD/MI dan sederajat). • **Total Anak Usia 7–12 Tahun:** Semua anak usia 7–12 tahun yang berdomisili di wilayah tersebut (berdasarkan data kependudukan). • Dikalikan 100% untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin besar proporsi anak usia sekolah dasar yang mengakses pendidikan. Nilai mendekati 100% menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah dasar untuk bersekolah.
Sumber Data	Dapodik, EMIS (untuk madrasah), Dukcapil
Frekuensi	Tahunan, atau sesuai periode pelaporan

3. Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
Defenisi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun adalah persentase anak usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar tingkat lanjutan (SMP/MTs atau sederajat), baik negeri maupun swasta, terhadap total jumlah anak usia 13–15 tahun pada suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	APS 13-15 Tahun = $\frac{\text{(Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun yang bersekolah)}}{\text{Total anak usia 13-15 Tahun}}$ x100 % **Keterangan:** • **Jumlah Anak Usia 13–15 Tahun yang Bersekolah:** Anak usia 13–15 tahun yang tercatat sedang aktif bersekolah di jenjang SMP/MTs atau sederajat. • **Total Anak Usia 13–15 Tahun:** Jumlah seluruh anak usia 13–15 tahun berdasarkan data kependudukan. • Dikalikan 100% untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai APS yang tinggi menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar lanjutan. APS mendekati 100% mengindikasikan hampir seluruh anak usia 13–15 tahun telah mengakses pendidikan dasar sesuai usia wajib belajar 9 tahun.
Sumber Data	Dapodik, EMIS (untuk madrasah), Dukcapil
Frekuensi	Tahunan, atau sesuai periode pelaporan

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Defenisi	Persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah namun sedang mengikuti program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), atau Paket C (setara SMA), dalam suatu wilayah dan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi % Kesetaraan. = $\frac{\text{(Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang Belum tamat sekolah yang mengikuti Pendidikan kesetaraan)}}{\text{(Total anak usia 7-18 Tahun yang belum tamat Pendidikan Dasar/ Menengah)}}$ x100

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	Keterangan: • **Pembilang:** Jumlah anak usia 7–18 tahun yang tidak sedang sekolah formal dan tercatat mengikuti program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, atau C). • **Penyebut:** Jumlah total anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah. • Dikalikan 100% untuk memperoleh persentase partisipasi.
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang sebelumnya putus sekolah atau tidak mengakses pendidikan formal kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur non-formal. Ini mencerminkan efektivitas program pendidikan kesetaraan dalam memperluas akses pendidikan.
Sumber Data	Dapodik Pendidikan Non-Formal, Dinas Pendidkan Dukcapil
Frekuensi	Tahunan, atau sesuai periode pelaporan

5. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal
Defenisi	Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan yang ada pada wilayah atau jenjang tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase KML} = \left(\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah total satuan pendidikan}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Persentase KML**: Persentase sekolah yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal • **Pembilang**: Jumlah satuan pendidikan yang secara resmi mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal • **Penyebut**: Jumlah seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di wilayah analisis • **Dikalikan 100%** agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum
Sumber Data	Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, sekolah, sistem EMIS/Dapodik
Frekuensi	Tahunan

6. Indeks Pemerataan Guru

Nama Indikator	Indeks Pemerataan Guru
Defenisi	Indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat sebaran atau distribusi guru secara adil dan proporsional di satuan pendidikan, baik berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, maupun mata pelajaran.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPG} = 1 - \frac{\text{Standar Deviasi Rasio Guru-Murid per Sekolah}}{\text{Rata-rata Rasio Guru-Murid per Sekolah}}$$ **Keterangan:** • **IPG**: Indeks Pemerataan Guru

Nama Indikator	Indeks Pemerataan Guru

	• **Standar Deviasi Rasio Guru-Murid per Sekolah**: Menunjukkan tingkat penyimpangan rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di antara sekolah- sekolah
	• **Rata-rata Rasio Guru-Murid per Sekolah**: Rata-rata dari seluruh rasio guru per murid di wilayah tertentu
	• Nilai **IPG** akan berada di antara 0 dan 1, dengan:
	  ○ **0**: distribusi guru sangat tidak merata
	  ○ **1**: distribusi guru sangat merata

Interpretasi	Semakin mendekati 1, distribusi guru semakin merata sesuai kebutuhan sekolah
Sumber Data	Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Nama Indikator	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Defenisi	Proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas keprofesiannya, terhadap seluruh jumlah guru yang aktif mengajar di satuan pendidikan tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Guru Bersertifikat} = \left(\frac{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total Guru}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Pembilang**: Jumlah guru yang telah memiliki **sertifikat pendidik** resmi (PPG/sertifikasi sebelumnya) • **Penyebut**: Jumlah **seluruh guru aktif** yang terdaftar di satuan pendidikan • **Dikalikan 100%**: Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak guru yang memenuhi standar profesional dalam mengajar
Sumber Data	Dapodik, SIM PKB, Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pemutakhiran data

8. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui

Nama Indikator	Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui
Defenisi	Proporsi dari jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan (baik baru maupun pembaruan) yang telah **diterbitkan atau diperbarui secara resmi oleh instansi berwenang**, terhadap total jumlah usulan izin yang diajukan dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Izin Terbit} = \left(\frac{\text{Jumlah usulan izin yang telah diterbitkan atau diperbarui}}{\text{Jumlah total usulan izin}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:**

Nama Indikator	Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui
	• **Pembilang**: Jumlah izin satuan pendidikan (baru atau perpanjangan) yang **telah selesai diproses dan diterbitkan** dalam periode waktu tertentu. • **Penyebut**: Total **usulan izin** yang masuk ke sistem/perizinan dalam periode waktu yang sama. • **Dikalikan 100%** agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi penyelesaian dan legalisasi izin satuan pendidikan
Sumber Data	Dinas Pendidikan, Sistem Perizinan Pendidikan (Online atau manual)
Frekuensi	Triwulan / Semester / Tahunan

9. Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra

Nama Indikator	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra
Defenisi	Proporsi satuan pendidikan, lembaga, atau komunitas yang secara aktif melakukan kegiatan pelestarian, pembinaan, atau pengembangan bahasa dan sastra (terutama bahasa daerah atau bahasa Indonesia) terhadap total jumlah satuan yang menjadi target dalam wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra} = \left(\frac{\text{Jumlah satuan/lembaga yang melaksanakan kegiatan bahasa dan sastra}}{\text{Jumlah total satuan/lembaga sasaran}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Pembilang**: Jumlah satuan pendidikan/lembaga/komunitas yang menyelenggarakan **minimal 1 kegiatan** pengembangan bahasa dan/atau sastra dalam periode tertentu. • **Penyebut**: Jumlah total satuan pendidikan/lembaga yang menjadi sasaran atau populasi dalam wilayah. • **Dikalikan 100%**: Untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin aktif pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa dan sastra di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Pendidikan, Balai Bahasa, Dinas Kebudayaan, komunitas literasi
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Angka Kematian Ibu

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu
Defenisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan akibat kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari setelah berakhirnya kehamilan), per 100.000 kelahiran hidup pada periode tertentu, di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$AKI = \frac{\text{(Jumlah kematian ibu karena kelahiran, persalinan, masa nifas)}}{\text{(Jumlah kelahiran hidup)}} \times 100.000$ **Keterangan:** • **Jumlah kematian ibu**: Total perempuan yang meninggal dunia akibat komplikasi selama kehamilan, proses persalinan, dan dalam masa 42 hari setelah persalinan (masa nifas), tanpa memperhitungkan penyebab eksternal (seperti kecelakaan). • **Jumlah kelahiran hidup**: Total bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan (bernapas, menangis, atau detak jantung) di wilayah dan periode yang sama. • **100.000**: Faktor pengali untuk menyatakan angka kematian per 100.000 kelahiran hidup, sesuai standar internasional agar dapat diperbandingkan antar wilayah atau waktu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai AKI, semakin buruk kondisi kesehatan ibu di suatu wilayah. AKI yang tinggi mengindikasikan adanya permasalahan dalam akses atau kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Target global (SDGs) adalah menurunkan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, Sistem informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIPIA), Survei Penduduk Antar Sensus
Frekuensi	Tahunan, Lima Tahunan (melalui SDKI/ SUPAS)

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Nama Indikator	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
Defenisi	Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang terjadi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$AKB = \frac{\text{(Jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan)}}{\text{(Jumlah kelahiran hidup)}} \times 1000$ **Keterangan:** • **Jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan**: Total bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun (0 sampai dengan 11 bulan). • **Jumlah kelahiran hidup**: Total bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan (bernapas, menangis, atau detak jantung). • **1.000**: Faktor pengali untuk menyatakan angka kematian per 1.000 kelahiran hidup agar dapat dibandingkan antar waktu atau wilayah.

Interpretasi	Semakin rendah angka AKB, semakin baik kondisi kesehatan bayi dan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut. AKB yang tinggi menunjukkan adanya risiko kesehatan yang tinggi pada bayi, termasuk sanitasi buruk, gizi kurang, atau akses layanan kesehatan yang terbatas.
Sumber Data	Dinas Kesehata, Rumah Sakit dan Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan (SIK), BPS, Survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Tahunan , Lima Tahunan

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	**Prevealensi Stunting**
Defenisi	revalensi stunting pada balita adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) yang memiliki tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah minus dua standar deviasi (< -2 SD) dari median standar pertumbuhan anak WHO. Anak dengan status **pendek** berada antara -2 SD hingga -3 SD, sedangkan **sangat** **pendek** di bawah -3 SD.
Rumus Perhitungan	Prevealensi Stuntuing = $\frac{\text{(Jumlah balita stunting)}}{\text{(Jumlah total balita yang diukur)}}$ x100% **Keterangan:** • **Balita dengan status stunting**: Anak usia 0–59 bulan dengan hasil pengukuran tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 SD menurut standar WHO. • **Seluruh balita yang diukur**: Semua anak balita (0–59 bulan) yang diukur tinggi badannya dalam suatu survei atau kegiatan pemantauan. • **100%**: Digunakan untuk menyatakan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Prevalensi stunting menunjukkan tingkat masalah gizi kronis pada balita. • Semakin tinggi persentase, semakin besar masalah kekurangan gizi kronis di wilayah tersebut. • Target nasional (RPJMN 2020–2024): penurunan prevalensi stunting menjadi **14% pada tahun 2024**.
Sumber Data	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Dinas Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit.
Frekuensi	Tahunan, Lima Tahunan

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Nama Indikator	**Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis**
Defenisi	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati (dilaporkan ke sistem nasional) dibandingkan dengan estimasi total kasus TB di masyarakat dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Cakupan = $\frac{\text{(Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati)}}{\text{(Estimasi total kasus TB)}}$ x100% **Keterangan:**

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
	• **Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati**: Total pasien TB yang didiagnosis dan memulai pengobatan, serta tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis Nasional (SITB). • **Estimasi total kasus TB**: Perkiraan jumlah seluruh kasus TB aktif di masyarakat berdasarkan model epidemiologi WHO atau estimasi nasional. • **100%**: Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan (mendekati 100%), semakin baik kinerja sistem layanan kesehatan dalam menemukan dan mengobati kasus TB.
Sumber Data	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas dan rumah sakit rujukan TB
Frekuensi	Tahunan, Triwulan, disesuaikan skala peiode tertentu

5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
Defenisi	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis adalah persentase pasien tuberkulosis yang berhasil menyelesaikan seluruh regimen pengobatan dengan hasil akhir "sembuh" atau "pengobatan lengkap" dari seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$TSR = \frac{\text{(Jumlah pasien TB yang sembuh + yang menyelesaikan pengobatan)}}{\text{(Jumlah total pasien TB yang memulai pengobatan)}} x100\%$ **Keterangan:** • **Pasien TB yang sembuh**: Pasien TB yang hasil pemeriksaan dahaknya negatif pada akhir pengobatan dan minimal satu kali sebelumnya. • **Pasien yang menyelesaikan pengobatan**: Pasien yang menyelesaikan pengobatan lengkap, namun tidak memiliki hasil pemeriksaan laboratorium pada akhir pengobatan. • **Seluruh pasien TB**: Semua pasien yang terdiagnosis TB dan telah memulai pengobatan dalam satu periode pengukuran. • **100%**: Menyatakan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	TSR yang tinggi menunjukkan keberhasilan program pengobatan TB dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.
Sumber Data	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas dan rumah sakit rujukan TB
Frekuensi	Triwulan, Tahunan

6. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Nama Indikator	Insiden Tuberjulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Defenisi	Insiden Tuberkulosis (ITB) adalah jumlah kasus baru tuberkulosis yang muncul dalam satu tahun pada setiap 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Indikator ini mencerminkan beban penyakit TB yang masih aktif di masyarakat.
Rumus Perhitungan	$ITB = \frac{\text{(Jumlah kasus TB baru dalam 1 tahun)}}{\text{(Jumlah penduduk)}} x100.000$

Nama Indikator	Insiden Tuberjulosis (ITB) per 100.000 penduduk
	Keterangan: • **Jumlah kasus baru TB**: Kasus baru TB aktif yang dilaporkan dalam satu tahun, baik TB paru maupun TB ekstra paru. • **Jumlah penduduk**: Total penduduk yang tinggal di wilayah tersebut pada tahun pengukuran (biasanya berdasarkan data proyeksi BPS). • **100.000**: Digunakan untuk menyatakan jumlah kasus per 100.000 penduduk agar memudahkan perbandingan antar daerah atau waktu.
Interpretasi	Semakin tinggi angka insiden, semakin besar penyebaran dan penularan penyakit TB di suatu wilayah.
Sumber Data	Estimasi WHO Global TB Report, Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Dinas Kesehatan, BPS
Frekuensi	Tahunan

7. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nama Indikator	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Defenisi	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional adalah persentase jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN, baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI, terhadap total jumlah penduduk di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan JKN} = \frac{\text{(Jumlah penduduk yang menjadi peserta aktif JKN)}}{\text{(Jumlah total penduduk)}} \times 100\%$ **Keterangan:** • **Jumlah peserta aktif JKN**: Penduduk yang telah terdaftar dan memiliki status aktif dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Termasuk: o Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) – dibiayai oleh pemerintah pusat/daerah o Peserta Non-PBI – pekerja penerima upah, mandiri, dan lainnya • **Jumlah total penduduk**: Seluruh penduduk di wilayah administratif berdasarkan data DUKCAPIL atau proyeksi BPS. • **100%**: Menyatakan cakupan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan JKN, semakin besar penduduk yang terlindungi secara finansial terhadap risiko biaya pelayanan kesehatan.
Sumber Data	BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, DUKCAPIL, BPS
Frekuensi	Bulanan, Tahunan, Berkala sesuai evaluasi nasional dan daerah

8. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Nama Indikator	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Defenisi	Proporsi tenaga kesehatan (SDM Kesehatan) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, workshop, seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan yang relevan dengan profesinya dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total SDM Kesehatan yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensi}}{\text{Jumlah Total SDM Kesehatan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:**

Nama Indikator	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan
	• **Pembilang**: Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam periode tertentu (misalnya setahun). • **Penyebut**: Jumlah total SDM Kesehatan di wilayah atau instansi terkait. • **Dikalikan 100%** agar hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin banyak SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Laporan SDM Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Nama Indikator	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman
Defenisi	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), serta makanan dan minuman yang aman dan layak konsumsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau regulasi yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Cakupan} = \left(\frac{\text{Jumlah Fasilitas/Unit yang Memenuhi Ketersediaan dan Standar}}{\text{Jumlah Total Fasilitas/Unit}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Pembilang**: Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam periode tertentu (misalnya setahun). • **Penyebut**: Jumlah total SDM Kesehatan di wilayah atau instansi terkait. • **Dikalikan 100%** agar hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin banyak SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Laporan SDM Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

Nama Indikator	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan
Defenisi	Proporsi anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui program pemberdayaan, seperti kader kesehatan, posyandu, kelompok sadar gizi, dan komunitas sehat, dibandingkan dengan jumlah total masyarakat sasaran dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Masyarakat yang Diberdayakan} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Aktif dalam Pemberdayaan Kesehatan}}{\text{Jumlah Total Masyarakat Sasaran}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Pembilang**: Jumlah individu yang aktif menjadi kader kesehatan atau tergabung dalam kegiatan/program kesehatan berbasis masyarakat. • **Penyebut**: Total penduduk sasaran di wilayah tersebut (misal: jumlah penduduk usia dewasa, atau seluruh penduduk desa/kelurahan). • **Dikalikan 100%** agar hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan kesehatan

Nama Indikator	Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan
Sumber Data	Puskesmas, Dinas Kesehatan, Laporan Kegiatan Kesehatan Masyarakat, RT/RW, Kelurahan/Desa
Frekuensi	Tahunan / Semester

11. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Nama Indikator	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa kehamilannya, sesuai dengan standar pelayanan minimal (termasuk kunjungan antenatal care/ANC). Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, deteksi dini komplikasi, pemberian suplemen, imunisasi TT, dan konseling.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan)}}{\text{(Jumlah total ibu hamil yang tercatat)}} \times 100\%$ **Keterangan:** ● **Pembilang** : Jumlah ibu hamil yang telah menerima pelayanan kesehatan sesuai standar (minimal 1 kali kunjungan ANC atau sesuai kriteria lokal/standar nasional). ● **Penyebut** : Jumlah total ibu hamil yang tercatat pada periode tertentu (misalnya dalam 1 tahun atau 1 triwulan).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Register KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA)
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

12. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Nama Indikator	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi ibu yang melahirkan dan mendapatkan pelayanan persalinan yang aman dan sesuai standar, baik di fasilitas kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, atau perawat). Pelayanan persalinan yang dimaksud mencakup asistensi saat melahirkan, pemeriksaan pascapersalinan, tindakan pencegahan komplikasi, serta pencatatan dan pelaporan kelahiran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan)}}{\text{(Jumlah total ibu hamil yang tercatat)}} \times 100\%$ **Keterangan:** ● **Pembilang (Numerator):** Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan atau tempat lain (termasuk persalinan di rumah yang dibantu nakes). ● **Penyebut (Denominator):** Jumlah total ibu yang bersalin dalam periode tertentu, baik yang dilayani maupun tidak.

Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin baik cakupan pelayanan persalinan yang aman.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Register KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA), Aplikasi P-Care BPJS atau SatuSehat.
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

13. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Nama Indikator	**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi bayi baru lahir (usia 0–28 hari) yang mendapatkan setidaknya satu kali pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam periode neonatal. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kondisi umum bayi, pemantauan tanda bahaya, imunisasi dasar (HB0), penimbangan, pemantauan inisiasi menyusu dini (IMD), dan edukasi orang tua.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan)}}{\text{(Jumlah total bayi yang lahir hidup)}} \times 100\%$ **Keterangan:** ● **Pembilang** : Jumlah bayi lahir hidup yang mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (minimal satu kali dalam 28 hari pertama). ● **Penyebut**: Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada periode yang sama.
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, semakin baik cakupan pelayanan neonatal dasar dan deteksi dini gangguan kesehatan bayi.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Register KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Laporan kunjungan neonatal Puskesmas, bidan, dan RS, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA), Aplikasi SatuSehat, e-Kohort Bayi
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

14. Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	**Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan**
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah balita (anak usia 0–59 bulan) yang menerima layanan kesehatan selama periode tertentu. Layanan kesehatan ini dapat berupa imunisasi, pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan, pengobatan penyakit umum, serta pemberian suplementasi gizi.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan = Total balita yang menerima minimal satu jenis layanan kesehatan dalam periode tertentu* **Keterangan:** ● Data berupa jumlah absolut balita yang tercatat mendapatkan layanan. ● Tidak selalu dihitung dalam persentase, namun bisa dibandingkan dengan total balita untuk mendapatkan cakupan layanan.
Interpretasi	Angka yang tinggi menunjukkan cakupan layanan kesehatan balita yang baik.

Sumber Data	Register KIA di Puskesmas dan Posyandu, Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIKIA), Laporan bulanan puskesmas dan dinas kesehatan, Aplikasi e- PPGBM (Program Percepatan Penurunan Stunting), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

15. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak usia sekolah dasar (kelas 1–6 atau usia 7–12 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam periode tertentu. Pelayanan kesehatan ini mencakup pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, skrining tumbuh kembang, kesehatan penglihatan dan pendengaran, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sesuai dengan standar UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) atau program kesehatan anak usia sekolah dari Kementerian Kesehatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar)}}{\text{(Jumlah total anak usia pendidikan dasar)}} \times 100\%$ Keterangan : ● **Pembilang** (Numerator): Jumlah anak usia sekolah dasar yang tercatat telah menerima minimal satu kali pelayanan kesehatan sesuai standar dalam periode tertentu. ● **Penyebut** (Denominator): Jumlah seluruh anak usia pendidikan dasar (kelas 1–6 SD/sederajat) di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak anak sekolah yang terpantau status kesehatannya secara dini dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dapodik, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).
Frekuensi	Tahunan, Triwulan atau Semesteran, Evaluasi rutin

16. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	**Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu berusia 15–59 tahun (usia produktif menurut definisi umum di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan) yang mendapatkan minimal satu kali layanan kesehatan dalam periode tertentu. Layanan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM), imunisasi dewasa, skrining kesehatan jiwa, konseling gizi, pelayanan KIA untuk usia subur, dan pengobatan penyakit umum
Rumus Perhitungan	*Jumlah* = ∑ *individu usia 15–59 tahun yang tercatat mendapatkan layanan kesehatan dalam periode tertentu*

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Interpretasi	Meningkatnya jumlah warga usia produktif yang mengakses layanan menunjukkan kesadaran kesehatan yang tinggi, serta akses layanan yang baik.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Sistem Informasi Kesehatan
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

17. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah warga negara usia lanjut (≥60 tahun) yang memperoleh layanan kesehatan dalam periode tertentu. Layanan kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pengelolaan penyakit kronis (hipertensi, diabetes, dll), imunisasi lansia, pelayanan kesehatan gigi, kesehatan jiwa, konseling gizi, dan pelayanan home care atau kunjungan rumah.
Rumus Perhitungan	Indikator ini bersifat **jumlah absolut**, maka cukup dilaporkan sebagai: *Jumlah = ∑ warga usia ≥60 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan dalam periode tertentu*
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah lansia yang dilayani, semakin baik akses dan keberfungsian layanan kesehatan lansia.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Kegiatan Posyandu Lansia, Register Lansia di Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan, Puskesmas
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

18. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penderita hipertensi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standarr)}}{\text{(Total penderita hipertensi yang tercatat)}} \times 100\%$ **Keterangan:** ● **Pembilang (Numerator):** Penderita hipertensi yang menerima pelayanan sesuai standar minimal 1 kali dalam periode pelaporan (misalnya pengobatan teratur, kontrol tekanan darah, dan edukasi). ● **Penyebut (Denominator):** Total penderita hipertensi yang tercatat di wilayah tersebut, baik melalui skrining PTM, Prolanis, atau laporan fasilitas kesehatan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas manajemen penyakit tidak menular di tingkat primer.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Posyandu Lansia, Program Prolanis (BPJS Kesehatan)
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

19. Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	**Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan**
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah penderita diabetes mellitus (DM) yang menerima layanan kesehatan dalam periode tertentu. Layanan kesehatan mencakup: ● Deteksi kadar gula darah (skrining dan monitoring rutin) ● Edukasi pengelolaan DM (gizi, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat) ● Pengobatan sesuai standar (oral atau insulin) ● Rujukan bila terdapat komplikasi ● Pemantauan berkelanjutan (Prolanis DM, kunjungan rutin, Posbindu)
Rumus Perhitungan	Namun karena ini adalah **indikator jumlah absolut**, cukup dicatat: *Jumlah = ∑ penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan dalam periode tertentu*
Interpretasi	Jumlah tinggi mencerminkan kinerja baik fasilitas kesehatan dalam pengelolaan penyakit kronis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Posyandu Lansia, Program Prolanis (BPJS Kesehatan).
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

20. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Nama Indikator	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi ODGJ berat (misalnya skizofrenia, bipolar berat, psikosis, dan gangguan mental berat lainnya) yang menerima pelayanan kesehatan jiwa minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{(Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar)}}{\text{(Jumlah ODGJ berat yang tercatat)}} \times 100\%$ **Keterangan:** ● **ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar**: Minimal pernah dilayani oleh fasilitas kesehatan dalam setahun (kunjungan, pengobatan, pemantauan). ● **ODGJ berat yang tercatat**: ODGJ berat yang terdata dalam register Puskesmas, dinas kesehatan, atau hasil pendataan lapangan (misalnya dari program Keluarga Sehat).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik jangkauan dan kontinuitas layanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ berat.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Kemenkes/BKKBN, Program Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswa), Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIKJ), Register ODGJ di Puskesmas (Formulir Jiwa).
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

7. Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	**Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan**
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu yang dicurigai menderita TBC (suspek TBC) dan telah mendapatkan layanan kesehatan untuk penapisan, pemeriksaan, atau tindak lanjut diagnosis TBC, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Namun indikator ini biasanya **dilaporkan sebagai jumlah absolut**, yaitu: *Jumlah = ∑ warga negara yang teridentifikasi sebagai terduga TBC dan telah mendapatkan layanan kesehatan*
Interpretasi	Jumlah tinggi menunjukkan cakupan penapisan dan respons sistem kesehatan terhadap gejala TBC di masyarakat berjalan baik.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit, SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis), Formulir register TBC dan laporan kunjungan suspek TBC.
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

8. Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Nama Indikator	**Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan**
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi tertular HIV dan telah mendapatkan layanan kesehatan terkait pencegahan, deteksi, atau pengobatan HIV/AIDS dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Indikator ini umumnya **dilaporkan sebagai jumlah absolut**, yaitu: *Jumlah = ∑ individu berisiko tinggi HIV yang mendapatkan minimal satu layanan kesehatan terkait HIV dalam periode tertentu*
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah ini, semakin baik jangkauan layanan pencegahan dan penanganan HIV pada kelompok risiko.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Laporan layanan HIV di Puskesmas, RS, Klinik VCT, LSM mitra
Frekuensi	Bulanan, Triwulan, Tahunan

9. Indeks Pengasuhan Remaja

Nama Indikator	**Indeks Pengasuhan Remaja**
Defenisi	Indeks Pengasuhan Remaja adalah ukuran komposit (gabungan) yang menggambarkan tingkat keterlibatan keluarga/orang tua dalam pengasuhan positif terhadap remaja usia 10–18 tahun. Indeks ini mencerminkan sejauh mana remaja mendapatkan perhatian, pendampingan, perlindungan, serta dukungan emosional dan sosial dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga.

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Remaja
Rumus Perhitungan	Indeks ini biasanya dihitung melalui skor rata-rata dari sejumlah pertanyaan atau indikator kuantitatif, misalnya: *Indeks = (Skor total pengasuhan remaja dari responden / Skor maksimum yang mungkin) × 100* **Contoh:** Jika digunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan skala Likert (skor maksimal = 50) dan responden rata-rata mendapatkan skor 35, maka: Indeks = (35 / 50) × 100 = 70
Interpretasi	● Indeks ≥ 80 → Tingkat pengasuhan sangat baik ● 60–79 → Cukup baik, namun masih perlu peningkatan ● < 60 → Rendah, artinya banyak remaja tidak mendapatkan pengasuhan optimal
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), BKKBN, Kemensos, Program PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja),PKK
Frekuensi	Tahunan, disesuaikan dengan periode laporan

1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Nama Indikator	Persentase peningkatan perlindunga Kawasan permukiman rawan banjir
Defenisi	Proporsi peningkatan jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang telah mendapatkan intervensi perlindungan (baik struktural maupun non-struktural), dibandingkan dengan total kawasan rawan banjir yang ada dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Perlindungan} = \left(\frac{\text{Jumlah Kawasan Rawan Banjir yang Mendapat Perlindungan Tambahan (Tahun Ini - Tahun Sebelumnya)}}{\text{Total Kawasan Permukiman Rawan Banjir}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Pembilang: Jumlah kawasan rawan banjir yang mendapatkan perlindungan tambahan atau intervensi baru pada periode berjalan. ● Penyebut: Total kawasan permukiman rawan banjir berdasarkan data pemetaan atau dokumen resmi pemerintah. ● Hasil dikalikan 100% untuk mendapatkan nilai persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan baik
Sumber Data	Dinas PUPR, BPBD, Dinas Permukiman, RTRW Daerah, Peta Rawan Banjir, laporan proyek infrastruktur
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks kinerja sistem irigasi

Nama Indikator	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
Defenisi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja teknis, operasional, kelembagaan, dan partisipasi petani dalam pengelolaan dan pelayanan sistem irigasi. IKSI membantu mengevaluasi fungsi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan irigasi, baik pada jaringan irigasi primer, sekunder, maupun tersier.
Rumus Perhitungan	*IKSI = (Skor total dari komponen penilaian / Skor maksimum) × 100* Komponen IKSI mengacu pada 6 aspek utama (berdasarkan Permen PUPR No. 12/2015), yaitu: 1. Kondisi fisik jaringan irigasi 2. Ketersediaan air dan distribusinya 3. Kegiatan operasi dan pemeliharaan 4. Kelembagaan pengelola (misalnya P3A/GP3A) 5. Partisipasi petani/pengguna air 6. Produktivitas lahan (indikator pertanian) Masing-masing komponen dinilai dalam skala tertentu (misalnya 0–5), lalu dijumlahkan.
Interpretasi	Nilai tinggi menandakan sistem irigasi berfungsi baik dan dikelola secara berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) / Dinas PU, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS), Tim Penilai IKSI Provinsi atau Kabupaten,
Frekuensi	Tahunan, per musim tanam

3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas

Nama Indikator	Persentase luas layanan irigasi mutikomoditas
Defenisi	Proporsi luas wilayah pertanian yang memperoleh layanan irigasi dan dapat digunakan untuk menanam lebih dari satu jenis komoditas pertanian (multikomoditas), dibandingkan dengan total luas lahan irigasi yang tersedia.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Irigasi Multikomoditas} = \left(\frac{\text{Luas Layanan Irigasi yang Melayani Multikomoditas}}{\text{Total Luas Layanan Irigasi}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Pembilang: Total luas lahan pertanian yang mendapatkan layanan irigasi dan digunakan untuk menanam lebih dari satu jenis komoditas. • Penyebut: Total luas lahan yang terlayani sistem irigasi (baik teknis maupun non-teknis) dalam wilayah tersebut. • Nilai dikali 100% untuk mendapatkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar cakupan layanan irigasi yang mendukung diversifikasi komoditas

Nama Indikator	Persentase luas layanan irigasi mutikomoditas
Sumber Data	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS), Sistem Informasi Irigasi Nasional (SIIN)
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah

Nama Indikator	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota
Defenisi	Proporsi peningkatan volume atau cakupan layanan air minum curah (bulk water) yang berhasil disalurkan dari sistem regional atau antarwilayah kepada masyarakat atau fasilitas pengguna, dibandingkan dengan kapasitas layanan pada periode sebelumnya.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas Terlayani} = \left(\frac{\text{Kapasitas Layanan Tahun Ini} - \text{Kapasitas Tahun Sebelumnya}}{\text{Kapasitas Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100\%$
	Keterangan:
	• Kapasitas dapat diukur dalam satuan:
	  ○ Debit air (liter/detik), atau
	  ○ Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani
	• Tahun Sebelumnya adalah baseline kapasitas air minum curah lintas wilayah
	• Tahun Ini adalah kapasitas setelah ada peningkatan jaringan, SPAM regional, atau kerja sama antardaerah

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar kapasitas layanan air minum curah yang berhasil dijangkau secara lintas daerah
Sumber Data	PDAM, BUMD Air Minum, Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, Sistem Informasi Air Minum (SIM-SPAM), Bappenas
Frekuensi	Tahunan

5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses langsung ke air siap minum melalui jaringan perpipaan (misalnya PDAM atau instalasi perpipaan lainnya) di tempat tinggal mereka. Air siap minum adalah air yang memenuhi standar kualitas aman untuk dikonsumsi tanpa risiko kesehatan.
Rumus Perhitungan	*Persentase = (Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses air siap minum perpipaan / Total rumah tangga di wilayah perkotaan) × 100%* **Keterangan:** ● Akses: Rumah tangga yang terhubung langsung dengan jaringan perpipaan air minum dan menerima air yang memenuhi standar kualitas.

Nama Indikator	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
	● Wilayah perkotaan: Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS) atau pemerintah daerah.
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan ketersediaan layanan air minum perpipaan yang baik dan distribusi merata di perkotaan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS, PDAM
Frekuensi	Tahunan atau dua tahunan

6. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu yang dapat mengakses air minum dalam jumlah cukup dan kualitas aman untuk dikonsumsi setiap hari, sesuai dengan standar kebutuhan minimum air untuk keperluan hidup sehat.
Rumus Perhitungan	Indikator ini umumnya dilaporkan sebagai jumlah absolut, namun dapat disajikan juga dalam bentuk persentase: *Jumlah* = ∑ *warga yang memperoleh air minum dalam jumlah dan kualitas sesuai standar setiap hari*
Interpretasi	Jumlah tinggi atau cakupan ≥90% menunjukkan pemenuhan hak dasar atas air minum dan mendukung upaya kesehatan masyarakat.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Cipta Karya / Dinas PU SDA, PDAM atau penyedia air minum lokal, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) – BPS
Frekuensi	Tahunan atau dua tahunan, Bulanan atau triwulanan

7. Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional

Nama Indikator	Persentase penigkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional
Defenisi	Ukuran proporsional yang menunjukkan peningkatan volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang berhasil dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berskala regional (lintas kabupaten/kota) dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Sampah Terkelola} = \left(\frac{\text{Volume Sampah Terkelola di TPA/TPST Tahun Ini} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Volume Tahun Sebelumnya}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Volume Sampah Terkelola = Total tonase sampah yang masuk dan diproses di TPA/TPST regional ● Bisa diukur harian, kemudian dikonversi menjadi tahunan ● Perbandingan dilakukan antar periode (tahun)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peningkatan pengelolaan sampah secara terpusat dan lintas wilayah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola TPA/TPST Regional, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Nama Indikator	**Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman)**
Defenisi	Indikator yang menunjukkan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman, seperti memiliki jamban sehat dan sistem pengelolaan air limbah domestik (seperti tangki septik kedap, IPAL domestik, atau sistem perpipaan) yang tidak mencemari lingkungan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman} = \left(\frac{\text{RT dengan Akses Tahun Ini} - \text{RT dengan Akses Tahun Lalu}}{\text{RT dengan Akses Tahun Lalu}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **RT dengan Akses Tahun Ini** = Jumlah rumah tangga yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah yang layak dan aman pada tahun berjalan • **RT dengan Akses Tahun Lalu** = Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi yang sama pada tahun sebelumnya • Sistem layak & aman meliputi: o Jamban sehat o Tangki septik kedap + disedot rutin o Terhubung ke sistem IPAL domestik/komunal o Air limbah tidak mencemari tanah atau air permukaan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat dan tidak mencemari lingkungan
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, BPS (Susenas), STBM, Data IPAL/Septik Komunal
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Nama Indikator	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik, baik secara individu maupun melalui sistem terpusat.
Rumus Perhitungan	*Persentase = (Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik / Total rumah tangga) × 100%*

Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Keterangan: ● Layanan dianggap ada jika rumah tangga terhubung ke sistem pengolahan atau memiliki septic tank sesuai standar teknis dan telah disedot/diolah secara aman. ● Tidak termasuk septic tank bocor, empang tanah, atau pembuangan langsung ke lingkungan.
Interpretasi	Persentase tinggi (≥80%) menunjukkan sanitasi layak dan pengelolaan limbah yang baik.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum (PU), BPS, Sistem Informasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (SIPALD)
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi panjang jaringan drainase (saluran air hujan dan air limbah non-fecal) yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi normal terhadap total panjang drainase yang ada di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	*Persentase = (Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase yang ada) × 100%* Keterangan: ● Pengukuran bisa berdasarkan satuan panjang (meter/kilometer) ● Kondisi baik biasanya dinilai melalui survei lapangan oleh dinas teknis atau mitra konsultan teknis
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan pemeliharaan rutin dan pembangunan drainase berjalan efektif.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum / Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Laporan survey kondisi infrastruktur (audit drainase), Peta drainase dan master plan infrastruktur daerah.
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik
Defenisi	Ukuran proporsi infrastruktur dasar di kawasan permukiman (seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau) yang berfungsi dengan baik, layak pakai, dan memenuhi standar teknis, dibandingkan dengan total infrastruktur yang tersedia di wilayah permukiman.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\text{Panjang/Luas/Jumlah Infrastruktur dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Infrastruktur Permukiman yang Ada}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Infrastruktur Permukiman mencakup:** ○ Jalan lingkungan

Nama Indikator	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik
	○ Drainase lingkungan ○ Jaringan air bersih ○ Jaringan sanitasi ○ Tempat pengelolaan sampah ○ Ruang terbuka hijau (RTH) • **Kondisi Baik** artinya berfungsi optimal, memenuhi standar teknis, tidak rusak sedang/berat • Dapat dinilai per komponen atau total secara agregat
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi infrastruktur permukiman yang layak dan berfungsi
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappeda, Survey Lapangan, RT/RW Planning, SIMPKP
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik
Defenisi	Ukuran proporsi jumlah bangunan gedung milik pemerintah atau publik (seperti sekolah, kantor, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya) yang secara struktural dan fungsional berada dalam kondisi layak, aman, dan berfungsi optimal, dibandingkan dengan total bangunan yang ada.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Gedung dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Bangunan Gedung}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Kondisi Baik meliputi: ○ Struktur bangunan utuh (tidak retak, roboh, atau rusak berat) ○ Atap, lantai, dinding, dan pondasi berfungsi baik ○ Terpenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan • Data dapat dibagi per jenis gedung: sekolah, puskesmas, kantor, balai desa, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak bangunan 36sset36 yang masih dalam kondisi fisik yang baik
Sumber Data	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPKAD (untuk 36sset bangunan), SIMBG
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nama Indikator	Persentase penataan bangunan dan lingkungan
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi kawasan atau unit bangunan yang telah mengalami penataan fisik dan fungsional, termasuk peningkatan kualitas bangunan gedung serta penataan elemen lingkungan sekitarnya, seperti aksesibilitas, penghijauan, drainase, pencahayaan, dan sirkulasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan} = \left(\frac{\text{Jumlah Unit/Luas Kawasan yang Telah Ditata}}{\text{Jumlah Unit/Luas Kawasan yang Direncanakan untuk Ditata}}\right) \times 100\%$$

Nama Indikator	Persentase penataan bangunan dan lingkungan

	Keterangan:
	• Penataan Bangunan: mencakup perbaikan fasad, struktur, utilitas bangunan, dan fungsi bangunan.
	• Penataan Lingkungan: mencakup pedestrian, drainase, RTH, pencahayaan, akses jalan, tata ruang, penghijauan.
	• Satuan dapat berupa:
	  ○ Jumlah unit bangunan (jika penataan bersifat individual)
	  ○ Luas kawasan (jika penataan bersifat kawasan/lingkungan)

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas atau banyak bangunan dan lingkungan yang tertata dan berkualitas baik
Sumber Data	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bappeda, UPT Penataan Bangunan, Laporan Proyek Pembangunan atau Rehabilitasi
Frekuensi	Tahunan

14. Tingkat kemantapan jalan

Nama Indikator	Tingkat kemantapan jalan
Defenisi	Indikator yang menunjukkan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota). Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memenuhi kriteria layak fungsi pelayanan, dari segi struktur, permukaan, dan keselamatan lalu lintas.
Rumus Perhitungan	$$\text{Tingkat Kemantapan Jalan}\ (\%) = \left(\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik + Sedang)}}{\text{Total Panjang Jalan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Kondisi Jalan Mantap: jalan dengan kondisi baik atau sedang, sesuai standar teknis Direktorat Jenderal Bina Marga. • Kondisi Tidak Mantap: jalan dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat. • Data kondisi jalan diperoleh dari survei visual jalan (SVJ) atau sistem pemantauan jalan elektronik (e-monitoring).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak jalan yang dalam kondisi baik dan siap mendukung mobilitas
Sumber Data	Dinas PUPR, Bina Marga, Bappeda, SIMJ (Sistem Informasi Jalan), Bina Marga Pusat/Daerah
Frekuensi	Tahunan

15. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli
Defenisi	**Indikator yang mengukur proporsi tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikasi kualifikasi sebagai tenaga ahli (minimal setara SKA – Sertifikat Keahlian) dari total tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.**

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tenaga Ahli Konstruksi} = \left(\frac{\text{Jumlah Tenaga Konstruksi Berkualifikasi Ahli}}{\text{Total Tenaga Kerja Konstruksi}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Tenaga Ahli Konstruksi: mereka yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai klasifikasi LPJK (misalnya ahli madya, ahli muda, ahli utama). • Tenaga Kerja Konstruksi: semua pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi (baik ahli maupun terampil). • Dapat dikelompokkan berdasarkan bidang (sipil, arsitektur, ME, dsb).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi
Sumber Data	LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), Dinas PUPR, SIMK (Sistem Informasi Manajemen Konstruksi)
Frekuensi	Tahunan

16. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten

Nama Indikator	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang d daerah kabupaten
Defenisi	Indikator yang mengukur **proses penegakan hukum atau penyelesaian administratif** terhadap kasus-kasus pelanggaran dalam pemanfaatan ruang (seperti pembangunan tanpa izin, penggunaan ruang tidak sesuai RTRW/RDTR, alih fungsi lahan ilegal, dan lainnya) yang terjadi di wilayah provinsi, dibandingkan dengan total jumlah kasus yang terdata dalam periode tertentu.

Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penyelesaian Kasus} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pelanggaran yang Terdata}}\right) \times 100\%$$
	Keterangan:
	• **Penyelesaian Kasus** dapat berupa:
	  ○ Penertiban bangunan/tindakan pembongkaran
	  ○ Penerbitan sanksi administratif
	  ○ Penghentian sementara kegiatan
	  ○ Mediasi hingga pemberian izin baru (rekonsiliasi pemanfaatan ruang)
	• Pelanggaran ruang termasuk pelanggaran terhadap: RTRW, RDTR, KDB, GSB, sempadan, zona konservasi, dsb.
	• Dapat dibedakan antara **sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata**.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah
Sumber Data	Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, SIMTARU, GTRA
Frekuensi	Tahunan

17. Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)

Nama Indikator	Jumlah rekomendasi terhadap usulan izin pemanfaatan ruang (IPR)
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah rekomendasi teknis atau administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Ruang) terhadap
	permohonan izin pemanfaatan ruang dari masyarakat, pelaku usaha, atau lembaga dalam periode tertentu. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) adalah persetujuan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lahan.
Rumus Perhitungan	Indikator ini dilaporkan sebagai jumlah absolut: *Jumlah* = ∑ *rekomendasi terhadap usulan IPR yang diterbitkan dalam periode tertentu* Bisa dirinci menjadi: ● Rekomendasi sesuai RTRW/RDTR (disetujui) ● Rekomendasi ditolak atau direvisi ● Rekomendasi dalam proses
Interpretasi	Jumlah tinggi menunjukkan aktivitas pembangunan dan permohonan pemanfaatan ruang yang aktif.
Sumber Data	Dinas Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum, Sistem Informasi Perizinan Terpadu
Frekuensi	Tahunan, Bulanan atau triwulanan

1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Nama Indikator	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Defenisi	Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Korban Mendapat Rumah Layak Huni} = \left(\frac{\text{Jumlah KK Korban Bencana yang Mendapat Hunian Layak}}{\text{Total KK Korban Bencana yang Kehilangan Rumah}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Rumah Layak Huni** adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan). • Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan. • Termasuk rumah tetap (huntap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya
Sumber Data	BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

2. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Nama Indikator	**Persentase warga negara yag terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah layak huni**
Defenisi	Indikator yang menggambarkan **proporsi korban bencana** (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan **fasilitas hunian layak huni** melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Korban Mendapat Rumah Layak Huni} = \left(\frac{\text{Jumlah KK Korban Bencana yang Mendapat Hunian Layak}}{\text{Total KK Korban Bencana yang Kehilangan Rumah}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • **Rumah Layak Huni** adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan). • Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan. • Termasuk rumah tetap (huntap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya
Sumber Data	BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

3. Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani

Nama Indikator	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang ditangani**
Defenisi	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dengan luasan antara 0–10 hektare yang telah ditangani oleh pemerintah daerah melalui program penanganan kumuh, baik secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, atau masyarakat. Penanganan meliputi perbaikan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, dan pengelolaan persampahan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan} = \frac{\text{(Luas Kawasan Kumuh 0–10 Ha yang Ditangani)}}{\text{(Total Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha))}} \times 100\ \%$ **Keterangan:** ● Luas Kawasan Kumuh 0–10 Ha yang Ditangani: Total luas dari kawasan kumuh skala 0–10 hektare yang telah dilakukan penanganan sesuai standar teknis ● Total Luas Kawasan Kumuh 0–10 Ha: Luas keseluruhan kawasan kumuh berukuran 0–10 hektare yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemetaan atau verifikasi resmi ● Satuan luas: hektare (Ha)
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja penanganan kawasan kumuh pada segmen wilayah berukuran kecil.
Sumber Data	Dinas Perkim, Dokumen SK Penetapan Kawasan Kumuh (SK Kumuh), Program Kotaku, BSPS, DAK Tematik, APBD, dll.
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Nama Indikator	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (baik formal maupun non- formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis, dibandingkan dengan total kawasan permukiman yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU} = \left(\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman yang Memiliki PSU Lengkap}}{\text{Total Kawasan Permukiman}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • PSU dikatakan lengkap jika minimal 80% komponen utama PSU tersedia dan berfungsi. • Data kawasan permukiman bisa merujuk pada wilayah hasil pendataan RTRW/RDTR atau SK pengembangan kawasan permukiman. • Indikator dapat digunakan untuk evaluasi permukiman formal (perumahan developer) dan informal (swadaya).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai
Sumber Data	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan

Nama Indikator	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat kepatuhan profesional dan lembaga (arsitek, perencana tata ruang, konsultan teknik, perusahaan jasa konstruksi, dll) dalam memperoleh sertifikat keahlian dan registrasi resmi untuk melaksanakan kegiatan perancangan dan perencanaan teknis pembangunan rumah dan PSU.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Sertifikasi dan Registrasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Orang/Badan Hukum Bersertifikat dan Teregistrasi}}{\text{Total Orang/Badan Hukum yang Melakukan Perancangan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** • Sertifikasi dapat berupa: SKA (Sertifikat Keahlian), SKT (Sertifikat Keterampilan), SBU (Sertifikat Badan Usaha). • Registrasi dapat melalui LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) atau sistem OSS (Online Single Submission). • Perancangan mencakup desain arsitektural rumah, sistem drainase, jalan lingkungan, jaringan air bersih, sanitasi, dan elemen PSU lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak pelaku yang kompeten dan legal secara hukum
Sumber Data	LPJK, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PU, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, OSS
Frekuensi	Tahunan

1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Persentase Penyelesaian Konfilk Sosial

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial
Defenisi	Persentase kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah daerah, baik melalui mediasi, fasilitasi, maupun intervensi langsung. Konflik sosial dapat berupa pertentangan antar kelompok masyarakat, antar warga dan instansi, atau konflik lainnya yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelesaian Konflik = $\frac{\text{(Jumlah konflik sosial yang diselesaikan)}}{\text{(Jumalah total konflik sosial yang terjadi)}}$ x100 % Keterangan Rumus: ● Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan: Kasus konflik yang telah ditangani dan diselesaikan melalui pendekatan yang diakui (mediasi, negosiasi, keputusan hukum, atau kesepakatan damai) ● Jumlah Total Konflik Sosial yang Terjadi: Total kasus konflik sosial yang teridentifikasi dan dilaporkan dalam periode tertentu ● Satuan: Persen (%)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis.
Sumber Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satpol PP, Kepolisian, dan Kecamatan / Desa
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Total Perda dan Perkada yang Ada}}\right) \times 100$ **Keterangan:** • **Perda:** Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut.
Nama Indikator	**Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**
	• **Perkada:** Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci. • **Penegakan:** Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Sumber Data	Dinas Hukum dan HAM, Satpol PP, Bappeda, Kejaksaan Negeri, Polres, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Defenisi	Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelenggaraan = $\frac{\text{(Jumlah Kegiatan Tibumtranmas yang Dilaksanakan)}}{\text{(Jumalah Kegiatan Tibumtranmas yang Direncanakan)}}$ x100 % **Keterangan Rumus:** ● Jumlah Kegiatan Tibumtranmas yang Dilaksanakan: Seluruh kegiatan yang telah direalisasikan sesuai rencana kerja ● Jumlah Kegiatan Tibumtranmas yang Direncanakan: Total kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan ● Satuan: Persen (%)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas
Sumber Data	Dinas Satpol PP, Kepolisian, Bappeda, Dinas Sosial, Polda, Instansi Pemerintah Daerah terkait
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat

Nama Indikator	Persentase cakupan perlindungan Masyarakat
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlindungi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan}}\right) \times 100$ **Keterangan:** • **Jumlah Masyarakat yang Terlindungi:** Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan).
	• **Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan:** Adalah estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Masyarakat, Bappeda
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \left(\frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan:** Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka. • **Jumlah Total PPNS yang Ada:** Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik program peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PPNS, Kepolisian, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Nama Indikator	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Defenisi	Tingkat waktu tanggap atau Response Time Rate adalah indikator yang mengukur kecepatan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam merespons laporan kejadian darurat, seperti kebakaran atau penyelamatan, dihitung sejak laporan diterima hingga tim tiba di lokasi kejadian.
Rumus Perhitungan	$$\text{Response Time Rate} = \left(\frac{\text{Jumlah Respons dengan Waktu} \leq \text{Standar}}{\text{Jumlah Total Respons}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** ● Jumlah Respons dengan Waktu ≤ Standar: Jumlah kejadian darurat yang ditangani dengan waktu tanggap sesuai standar (biasanya ≤ 15 menit di wilayah perkotaan) ● Jumlah Total Respons: Total seluruh kejadian yang direspons oleh tim damkar ● Satuan: Persen (%)
	● Standar waktu tanggap dapat mengacu pada ketentuan Permendagri No. 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran
Interpretasi	Persentase tinggi mencerminkan sistem respons yang cepat dan efektif, sangat krusial untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda.
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar)
Frekuensi	Tahunan

7. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran

Nama Indikator	Persentase penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah tersebar di masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana}}\right) \times 100$ **Keterangan:** • **Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi:** Merupakan jumlah masyarakat yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko bencana. • **Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana:** Merupakan jumlah seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan bencana (misalnya, kawasan rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau tsunami).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana di Masyarakat.
Sumber Data	BPBD, Dinas Sosial, Lembaga Mitigasi Bencana, Pemerintah Daerah, LSM terkait Penanggulangan Bencana.
Frekuensi	Tahunan

8. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Nama Indikator	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Defenisi	Persentase kejadian kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah kabupaten/kota. Layanan ini meliputi upaya penyelamatan jiwa, evakuasi korban, dan pengamanan lokasi kejadian untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Layanan Penyelamatan Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang Dilayani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Kebakaran}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: ● Jumlah Kejadian Kebakaran yang Dilayani: Jumlah kejadian kebakaran di mana tim damkar memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban ● Jumlah Total Kejadian Kebakaran: Seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan di wilayah kabupaten/kota dalam periode tertentu ● Satuan: Persen (%)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan dan efektivitas sistem layanan darurat kebakaran daerah.
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), BPBD,
Frekuensi	Tahunan

9. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase penduduk yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada malam hari. Perasaan aman ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di sekitarnya, dan merupakan salah satu indikator kesejahteraan non-material dan kualitas hidup warga.
Rumus Perhitungan	$$\text{Proporsi Merasa Aman} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menyatakan Merasa Aman}}{\text{Jumlah Total Penduduk yang Disurvei}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** ● **Jumlah Penduduk yang Menyatakan Merasa Aman**: Hasil survei masyarakat yang menyatakan merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal ● **Jumlah Total Penduduk yang Disurvei**: Total responden survei dalam wilayah administrasi tertentu ● Satuan: Persen (%) ● Data biasanya diperoleh melalui survei persepsi warga (kuantitatif), baik oleh instansi daerah maupun kerja sama dengan lembaga statistik
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan tingkat keamanan subjektif masyarakat yang baik, menandakan lingkungan sosial yang kondusif.
Sumber Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan/ Desa
Frekuensi	Tahunan

10. Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran

Nama Indikator	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.
Rumus Perhitungan	$$\text{Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Korban Kebakaran}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi:** Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran. • **Jumlah Total Korban Kebakaran:** Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran.
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, RSUD, Puskesmas, LSM kebencanaan.
Frekuensi	Tahunan atau per kejadian kebakaran.

11. Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran

Nama Indikator	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi}}{\text{Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran}}\right) \times 100$ **Keterangan:** • **Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi:** Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran. • **Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran:** Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas wilayah yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Kominfo, Lurah/Kepala Desa, Camat
Frekuensi	Tahunan atau sesuai program edukasi

12. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada
Defenisi	mengukur jumlah individu (warga negara) yang mendapatkan layanan sebagai dampak langsung dari kegiatan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Rumus Perhitungan	*Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan*=∑*Warga yang Tercatat Menerima Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda/Perkada* **Keterangan Rumus:** ● Layanan dapat bersifat langsung (pengamanan, evakuasi, bantuan sosial) atau tidak langsung (edukasi saat penertiban) ● Data dihimpun dari laporan kegiatan penegakan Perda/Perkada ● Satuan: **Orang**
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, menunjukkan bahwa penegakan hukum Perda dan Perkada tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan pelayanan kemanusiaan dan perlindungan warga.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

13. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu (warga negara) yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi dari petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan pada saat terjadi kebakaran. Layanan ini bertujuan menyelamatkan jiwa, mengurangi risiko luka atau kematian, dan mengevakuasi warga dari lokasi kejadian secara aman dan cepat.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Warga yang Dilayani=∑Orang yang Diselamatkan dan Dievakuasi pada Kejadian Kebakaran* **Keterangan Rumus:** ● Data dikumpulkan berdasarkan laporan operasi harian/reguler dari tim pemadam kebakaran ● Jumlah dapat mencakup: korban langsung, warga sekitar, dan petugas yang turut dievakuasi ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah warga yang memperoleh layanan, menunjukkan respons cepat dan kapasitas operasional unit damkar yang baik.
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), BPBD
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah warga negara yang mendapatkan akses atau menerima layanan informasi terkait potensi dan risiko bencana di wilayah tempat tinggalnya. Informasi rawan bencana dapat disampaikan melalui berbagai metode seperti sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, sistem peringatan dini (early warning system), media cetak/digital, atau aplikasi layanan kebencanaan.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Warga yang Mendapat Layanan Informasi=∑Individu yang Terdata Menerima I nformasi Rawan Bencana* **Keterangan Rumus:** ● Meliputi warga yang terdata dalam kegiatan edukasi atau penerima informasi berbasis sistem peringatan dini ● Bisa mencakup peserta pelatihan, masyarakat penerima brosur, SMS blast, atau peserta simulasi bencana ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah warga yang mendapat informasi, semakin baik kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan/Kelurahan
Frekuensi	Tahunan

15. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah warga negara yang mendapatkan layanan berupa edukasi, pelatihan, sosialisasi, pendampingan, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana. Layanan ini merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana dan pembangunan budaya sadar bencana.

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Rumus Perhitungan	*Jumlah Warga yang Mendapat Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan=∑Individu yan g Terlibat atau Terdata dalam Kegiatan Pencegahan/Kesiapsiagaan* **Keterangan Rumus:** ● Termasuk warga yang mengikuti simulasi, pelatihan, forum kesiapsiagaan, penyuluhan kebencanaan, dll. ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin banyak warga yang mendapat layanan ini, semakin tinggi tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Kecamatan/ Desa
Frekuensi	Tahunan

16. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah individu (warga negara) yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, atau bencana sosial. Layanan tersebut mencakup evakuasi dari lokasi berbahaya, pertolongan pertama, dan pengungsian ke lokasi aman oleh petugas pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Warga yang Dilayani=∑Korban Bencana yang Dievakuasi dan Diselamatkan oleh Petugas* Keterangan Rumus: ● Mencakup warga yang dievakuasi dari lokasi bencana dan/atau diselamatkan dalam situasi darurat bencana ● Data dihimpun dari laporan kegiatan operasional saat tanggap darurat ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini (dengan konteks respons tepat dan cepat), menunjukkan kesiapsiagaan dan efektivitas sistem penanggulangan bencana daerah.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Frekuensi	Tahunan

1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Indeks kesejahteraan sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah ukuran komposit yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan sejumlah dimensi sosial yang mencakup: ● Ketahanan keluarga ● Akses dan mutu pelayanan sosial dasar ● Partisipasi sosial ● Kondisi lingkungan sosial ● Perlindungan dan jaminan sosial IKS memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial non-ekonomi.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKS} = \frac{\sum(\text{Nilai Tiap Indikator Dimensi})}{\text{Jumlah Indikator}}$$ Keterangan Rumus: ● IKS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari skor dimensi atau sub-indikator yang mencerminkan aspek kesejahteraan sosial ● Nilai IKS berkisar dari 0 hingga 100, dengan interpretasi sebagai berikut: ➢ < 60 = Rendah ➢ 60–80 = Sedang ➢ > 80 = Tinggi ● Penghitungan biasanya dilakukan menggunakan metodologi BKKBN atau Kementerian Sosial yang dapat disesuaikan secara lokal oleh pemerintah daerah
Interpretasi	Semakin tinggi IKS, semakin baik kondisi sosial masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial di daerah.
Sumber Data	Dinas Sosial, Bappeda
Frekuensi	Tahunan atau Dua Tahunan

2. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar

Nama Indikator	**Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial** yang **melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)** dan ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Menangani Sesuai Standar:** Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor.

Nama Indikator	**Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**
	• **Relawan Sosial:** Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kemensos, Lembaga Sosial Masyarakat
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

3. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

Nama Indikator	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial**—termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang **mengalami peningkatan kompetensi** melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkat Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • **SDM Sosial:** Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll. • **Meningkat Kompetensinya:** Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial

Nama Indikator	**Persentase Lembaga di Bi dang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi lembaga kesejahteraan sosial** (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami **peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial** sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkat Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Meningkat Kualitasnya:** Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga. • **Lembaga Sosial:** Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll.

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bi dang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Forum LKS, Lembaga Akreditasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Nama Indikator	Persentase peyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi penyandang disabilitas terlantar** yang **telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar** melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • **Terlantar:** Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi anak terlantar** yang telah mendapatkan **pemenuhan kebutuhan dasar** melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • **Total anak terlantar:** Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan.
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur **persentase lanjut usia (lansia) terlantar** yang telah menerima **pemenuhan kebutuhan dasar** melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial. • **Data lansia terlantar:** Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Panti Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKS-LU)
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Nama Indikator	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi -60- Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng)** yang telah menerima **pelayanan sosial** berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Gepeng Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll). • **Data gepeng:** Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, LKS, Tim Rehabilitasi Sosial Daerah
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur **persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** lainnya—selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA—yang telah memperoleh **pemenuhan kebutuhan dasar** melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PPKS Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-HIV/AIDS dan NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata}} \right) \times 100$ **Keterangan:** • **PPKS lainnya** mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA. • **Terpenuhi kebutuhan dasar** jika mendapat minimal 3 layanan pokok. • **Data terverifikasi** diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Balai/Loka Rehabilitasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

10. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berdasarkan aspek aksesibilitas, perlindungan sosial, partisipasi, dan kemandirian hidup. IKSPD digunakan untuk menilai sejauh mana penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak sosial secara setara, serta keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan layanan publik di daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{IKSPD} = \frac{\sum(\text{Skor Dimensi Kesejahteraan Disabilitas})}{\text{Jumlah Dimensi}}$ **Keterangan Rumus:** • Dimensi dapat meliputi: ➢ Akses layanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) ➢ Aksesibilitas fisik dan informasi ➢ Perlindungan hukum dan sosial ➢ Partisipasi dan kemandirian • Skor biasanya diukur melalui survei, penilaian indeks lokal, atau metode penilaian partisipatif • Rentang nilai: 0–100, dengan kategori: ➢ < 60: Rendah ➢ 60–80: Sedang ➢ > 80: Tinggi • Satuan: Skala (0–100)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKSPD, semakin baik tingkat kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di daerah.
Sumber Data	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda
Frekuensi	Tahunan

11. indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah **indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial** yang diperoleh oleh **lansia (lanjut usia)**, berdasarkan **akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial** yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKSLU} = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5}\right)$$ **Dimana:** • A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100) • B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100) • C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100) • D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • E= Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0-100) **Keterangan:** • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

12. Indeks Peranan Sosial

Nama Indikator	Indeks Peranan Sosial
Defenisi	**Indeks Peranan Sosial (IPS)** adalah **indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat**. Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPS} = \left(\frac{A + B + C + D}{4}\right)$$ **Dimana:** • A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100) • B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100) • C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100) • D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100) **Keterangan:** • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat.

	• Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal. • IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat
Sumber Data	Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan
Frekuensi	Tahunan

13. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Nama Indikator	**Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penerima Manfaat Total}}\right) \times 100$$ **Dimana:** • Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. • Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. **Keterangan:** • **Kebutuhan dasar** dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. • Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Data	Data dari program bantuan sosial, survei kesejahteraan sosial, laporan pemerintah dan lembaga sosial
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi

Nama Indikator	**Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi**
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri secara ekonomi, tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kemandirian Ekonomi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi}}{\text{Jumlah Total Penerima Manfaat}}\right) \times 100$$ **Keterangan:**

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
	• Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi: Penerima manfaat yang secara objektif menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekonomi mandiri. • Jumlah Total Penerima Manfaat: Total penerima manfaat yang menjadi sasaran program pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak penerima manfaat yang berhasil mandiri secara ekonomi
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan, data dinas sosial, survei kesejahteraan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai siklus program

15. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Defenisi	Persentase wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	**Keterangan:** • Jumlah Daerah yang Melaksanakan: Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. • Jumlah Total Daerah: Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir miskin
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)
Frekuensi	Tahunan

16. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar

$$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}} \right) \times 100$$

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
Defenisi	Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi
Rumus Perhitungan	$$\text{IKD} = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i}{n}$$ **Keterangan:** • IKD = Indeks Kebutuhan Dasar • Ki = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100) • n = Jumlah komponen kebutuhan dasar

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
nterpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS
Frekuensi	Tahunan

17. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi

Nama Indikator	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i}{n}$$ **Keterangan:** • IKE = Indeks Keberdayaan Ekonomi • K_i = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skala 0–1 atau 0–100) • n = Jumlah komponen
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial
Frekuensi	Tahunan

18. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Defenisi	Indikator ini mengukur **persentase keluarga miskin dan rentan** yang sebelumnya **menerima bantuan perlindungan sosial**, namun kemudian **berhasil keluar dari status kemiskinan** (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tergraduasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah. • Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau verifikasi by name by address.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.

Nama Indikator	**Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan**
Sumber Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial, BPS, hasil verifikasi lapangan
Frekuensi	Tahunan

19. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Nama Indikator	**Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**
Defenisi	Indikator ini mengukur **proporsi korban bencana** (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang **telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar** selama fase **tanggap darurat** dan **setelahnya (pemulihan awal)**.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • Korban bencana meliputi korban bencana: ○ Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll) ○ Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar) ○ Sosial (konflik sosial, kerusuhan) • Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya. • Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban.
Sumber Data	BNPB, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Dinas Perlindungan Sosial
Frekuensi	Setiap kejadian bencana / Tahunan (rekapitulasi)

20. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya

Nama Indikator	**Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya**
Defenisi	Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu.

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
umus Perhitungan	$\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** • Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti: ○ Pelatihan atau edukasi kebencanaan ○ Simulasi evakuasi bencana ○ Penyuluhan mitigasi bencana ○ Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana • Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum. • × 100% Digunakan untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana
Sumber Data	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPS, Desa/Kelurahan, LSM, dll.
Frekuensi	Tahunan atau sesuai periode program

21. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Defenisi	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}} \right) \times 100\%$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti: ○ Dukungan psikososial atau konseling trauma ○ Tempat tinggal sementara atau relokasi ○ Bantuan sosial ekonomi pascabencana ○ Reintegrasi sosial dan pemberdayaan ○ Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana • Total korban bencana Merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial. • × 100% Untuk mengubah nilai rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tagana, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung

22. Indeks Lansia Berdaya

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Defenisi	Indeks Lansia Berdaya adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan sosial penduduk lanjut usia (lansia). Indeks ini mencerminkan sejauh mana lansia di daerah dapat hidup mandiri, berkontribusi dalam kehidupan sosial, serta mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial secara layak.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Lansia Berdaya} = \frac{\sum(\text{Nilai Tiap Dimensi Lansia})}{\text{Jumlah Dimensi}}$$ ● **Keterangan Rumus:** Dimensi yang umum digunakan meliputi: 1) Kemandirian (kemampuan lansia mengurus diri sendiri dan aktivitas sehari-hari) 2) Partisipasi Sosial (keterlibatan lansia dalam kegiatan masyarakat) 3) Akses Pelayanan Sosial dan Kesehatan 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial ● Skor tiap dimensi biasanya diperoleh melalui survei atau penilaian instansi daerah ● Satuan: Skala indeks 0–100 ● Kategori: ➢ < 60 = Rendah ➢ 60–80 = Sedang ➢ > 80 = Tinggi
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Lansia Berdaya, semakin menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia memiliki taraf hidup yang lebih layak, mampu menjalani kehidupan secara mandiri, dan diikutsertakan dalam pembangunan sosial oleh pemerintah daerah.
Sumber Data	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kecamatan/ Desa
Frekuensi	Tahunan

23. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, atau masyarakat (non-panti). Rehabilitasi sosial luar panti mencakup layanan seperti: ● Home visit oleh pekerja sosial ● Pelatihan keterampilan dan kemandirian ● Terapi fisik/psikososial ● Pemberian alat bantu ● Layanan berbasis komunitas atau LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Rumus Perhitungan	*Jumlah Penyandang Disabilitas yang Dilayani* = ∑ *Individu Penyandang Disabilitas yang Terdata Menerima Layanan Rehabilitasi di Luar Panti* **Keterangan Rumus:** ● Layanan harus dilakukan oleh atau atas fasilitasi pemerintah daerah ● Tidak termasuk layanan yang diberikan dalam UPT atau panti sosial ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi angkanya, semakin luas jangkauan pelayanan sosial yang dilakukan tanpa harus menginstitusionalisasikan penerima manfaat.
Sumber Data	Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial mitra Pemda
Frekuensi	Tahunan

24. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Nama Indikator	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, atau masyarakat (di luar panti sosial). Layanan ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial anak terlantar, agar dapat berfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Anak Terlantar yang Dilayani*=∑ *Individu Anak Terlantar yang Terdata Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti* **Keterangan Rumus:** ● Anak terlantar yang dimaksud adalah anak dalam situasi kehilangan pengasuhan atau berisiko kehilangan pengasuhan ● Data mencakup layanan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang difasilitasi melalui mitra LKS ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keluarga dan komunitas dalam penanganan anak terlantar semakin kuat, mengurangi ketergantungan pada layanan panti.
Sumber Data	Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Frekuensi	Tahunan

25. Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah lanjut usia (lansia) yang tergolong terlantar atau berisiko terlantar, dan menerima layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, atau layanan luar panti sosial. Tujuan layanan ini adalah untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan lansia agar tetap mandiri, dihormati, dan mendapat perlindungan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Rumus Perhitungan	*Jumlah Lansia Terlantar yang Dilayani* = ∑ *Individu Lansia Terdata Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti* **Keterangan Rumus:** ● Lansia terlantar adalah lansia yang tidak memiliki keluarga/pengasuhan memadai dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ● Layanan dihitung jika dilakukan oleh atau difasilitasi oleh pemerintah daerah (langsung atau melalui mitra seperti LKS) ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah penerima layanan, menunjukkan semakin efektif pendekatan perlindungan sosial non-institusional dan penguatan peran keluarga/masyarakat dalam mendukung lansia.
Sumber Data	Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Frekuensi	Tahunan

26. Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah warga negara yang tergolong sebagai tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis (gepeng), yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Layanan ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dasar mereka dan mendorong reintegrasi sosial melalui pendekatan berbasis masyarakat, bukan institusi.
Rumus Perhitungan	*Jumlah Tuna Sosial yang Dilayani*=∑ *Individu Gepeng yang Menerima Layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti* **Keterangan Rumus:** ● Tuna sosial dihitung jika telah mendapatkan minimal satu jenis layanan intervensi non-panti dari instansi daerah ● Tidak termasuk yang hanya tertangkap dan dipulangkan tanpa proses rehabilitasi ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah warga yang memperoleh layanan, semakin baik respons dan efektivitas daerah dalam menangani persoalan gepeng secara manusiawi, non-represif, dan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra. Unit Rehabilitasi Sosial Lapangan
Frekuensi	Tahunan

27. Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Korban Bencana di Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dan menerima bantuan sosial, perlindungan darurat, atau jaminan sosial lainnya dari pemerintah daerah. Layanan ini mencakup bantuan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup korban bencana, baik di tahap tanggap darurat maupun pascabencana.

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara Korban Bencana di Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
Rumus Perhitungan	*Jumlah Korban Bencana yang Dilayani=∑Individu Korban Bencana yang Terdata Menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial* **Keterangan Rumus:** ● Korban bencana adalah warga terdampak bencana alam maupun sosial yang ditetapkan melalui SK atau laporan resmi ● Termasuk korban yang tinggal sementara di pengungsian, mendapatkan bantuan, atau menerima layanan sosial lainnya ● Satuan: Orang
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, semakin besar cakupan intervensi perlindungan sosial yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat terdampak bencana.
Sumber Data	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kecamatan/ Desa
Frekuensi	Tahunan

28. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas

Nama Indikator	Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah **indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial** yang diperoleh oleh penyandang disabilitas melalui **akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan**, dan **rehabilitasi sosial** yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKSPD} = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$$ **Dimana:** • A = Akses terhadap pendidikan inklusif (skor 0-100) • B = Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi (skor 0-100) • C = Akses terhadap pekerjaan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • D = Akses terhadap layanan sosial (skor 0-100) • E = Akses terhadap tempat tinggal layak sesuai kebutuhan disabilitas (skor 0-100) **Keterangan:** • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSPD dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Rumah Sakit Penyandang Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

29. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah **indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial** yang diperoleh oleh **lansia (lanjut usia)**, berdasarkan **akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial** yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKSLU} = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5}\right)$$ **Dimana:** • A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100) • B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100) • C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100) • D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • E= Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0- 100)
	Keterangan: • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

29.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Tenaga Kerja
Defenisi	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja adalah ukuran proporsi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah menyusun dan memiliki dokumen perencanaan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Ketersediaan Dokumen} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Memiliki Dokumen Rencana Tenaga Kerja}}{\text{Total Jumlah Daerah yang Menjadi Target}}\right) \times 100\%$ **Keterangan:** ● Jumlah Daerah yang Memiliki Dokumen Rencana Tenaga Kerja adalah jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang memiliki minimal satu dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang valid dan sesuai standar. ● Total Jumlah Daerah yang Menjadi Target adalah jumlah total daerah yang seharusnya menyusun dokumen tersebut (biasanya seluruh kabupaten/kota atau provinsi di suatu wilayah atau nasional).
Interpretasi	Nilai yang lebih rendah mengindikasikan masih adanya daerah yang belum menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja secara memadai.
Sumber Data	Kementerian Ketenagakerjaan RI (Ditjen Binapenta & PKK), Dinas Tenaga Kerja,
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Defenisi	Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor prioritas pembangunan ekonomi (misalnya: pertanian, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lainnya) yang mengalami peningkatan produktivitas dalam suatu periode waktu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Produktivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas}}{\text{Total tenaga kerja di sektor prioritas}}\right) \times 100\%$ **Keterangan Rumus:** ● Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas Merupakan jumlah individu yang bekerja di sektor prioritas dan menunjukkan kenaikan produktivitas berdasarkan indikator seperti: ○ Peningkatan output kerja per individu ○ Kenaikan pendapatan atau upah riil ○ Peningkatan hasil produksi/usaha ○ Efisiensi kerja meningkat (lebih sedikit jam kerja untuk hasil lebih tinggi) ○ Adanya sertifikasi keterampilan atau pelatihan yang berdampak signifikan ● Total tenaga kerja di sektor prioritas Merupakan seluruh tenaga kerja aktif yang bekerja di sektor-sektor yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah atau nasional. ● × 100% Digunakan untuk menyajikan dalam bentuk persentase.

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi tenaga kerja yang produktivitasnya meningkat di sektor prioritas
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja, BPS, Kementerian Teknis (sektor terkait), Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan atau berkala sesuai siklus pembangunan

3. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri

Nama Indikator	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Defenisi	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja di dalam negeri oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga penempatan tenaga kerja (publik maupun swasta), dibandingkan dengan total pencari kerja yang terdaftar.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penempatan Dalam Negeri} = \left(\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Adalah total pencari kerja yang berhasil mendapat pekerjaan di wilayah Indonesia melalui mekanisme resmi seperti: ○ Penempatan oleh Disnaker, LPK, atau sistem digital pemerintah ○ Penyaluran dari hasil pelatihan kerja (BLK/LPK) ○ Penempatan langsung melalui bursa kerja atau job fair • Jumlah pencari kerja terdaftar Adalah jumlah individu yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada
	sistem ketenagakerjaan, seperti AK1 (kartu kuning) atau platform penempatan kerja digital pemerintah/swasta. • × 100% Digunakan untuk menyatakan hasil perbandingan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif sistem penempatan kerja domestik
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja, Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), LPK, BLK, Bursa Kerja
Frekuensi	Bulanan / Tahunan

4. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial

Nama Indikator	Jumlah pekerja pada Perusahaan yang meneraptakn perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
Defenisi	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak dasar pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan internasional, serta menjamin adanya ruang **dialog sosial** yang sehat dan terbuka antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak dan Dialog Sosial} = \sum \text{Jumlah pekerja di perusahaan yang memenuhi kriteria}$ **Kriteria Perusahaan yang Memenuhi:** Perusahaan dikatakan memenuhi apabila telah: • Menyediakan upah layak dan sesuai UMP/UMK • Memberikan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) • Menerapkan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) • Memfasilitasi atau tidak menghalangi kebebasan berserikat • Memiliki atau memfasilitasi lembaga kerja sama bipartit atau forum dialog sosial • Tidak memiliki pelanggaran ketenagakerjaan yang signifikan selama satu tahun terakhir
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah pekerja pada perusahaan yang patuh, semakin baik kualitas hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan di wilayah tersebut
Sumber Data	Dinas Ketenagakerjaan, Laporan Perusahaan, Serikat Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal**
Defenisi	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan di sektor formal terhadap total penyandang disabilitas yang masuk usia kerja (15 tahun ke atas), baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Sektor formal meliputi pekerjaan yang berada dalam lembaga/organisasi resmi dan tercatat, seperti: ● ASN ● Pegawai BUMN/BUMD ● Pekerja perusahaan swasta yang terdaftar

	● Pekerja dengan kontrak kerja tertulis dan perlindungan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek, dsb.)
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Disabilitas di Sektor Formal} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal}}{\text{Total Penyandang Disabilitas Usia Kerja}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal adalah jumlah individu penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal sebagaimana didefinisikan. ● Total Penyandang Disabilitas Usia Kerja adalah total penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas, baik bekerja maupun tidak.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat penerimaan dan integrasi penyandang disabilitas di dunia kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Sosial, Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Pekerja Informal

Nama Indikator	**Persentase Pekerja Informal**
Defenisi	Persentase Pekerja Informal adalah proporsi penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor informal terhadap total penduduk yang bekerja. Sektor informal mencakup pekerjaan yang tidak memiliki hubungan kerja formal, tidak tercatat secara resmi, dan umumnya tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti jaminan sosial atau kontrak kerja tertulis.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pekerja Informal} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja di Sektor Informal}}{\text{Jumlah Total Penduduk Bekerja}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Jumlah Pekerja di Sektor Informal adalah penduduk bekerja yang tidak memiliki status pekerjaan formal dan tidak terdaftar pada sistem ketenagakerjaan nasional. ● Jumlah Total Penduduk Bekerja adalah seluruh penduduk usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja selama seminggu sebelum survei (termasuk formal dan informal).
Interpretasi	Semakin rendah Persentase menandakan struktur ketenagakerjaan yang lebih mapan dan terlindungi secara hukum.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Data Administratif BPJS Ketenagakerjaan (sebagai pembanding pekerja formal),
Frekuensi	Tahunan

7. Dissabilitas di Sektor Informal

Nama Indikator	**Dissabilitas di Sektor Informal**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas usia kerja (15–64 tahun) yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan total penyandang disabilitas usia kerja yang bekerja (baik di sektor formal maupun informal).
Rumus Perhitungan	

Nama Indikator	Dissabilitas di Sektor Informal
	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● **Pembilang**: Jumlah penyandang disabilitas usia kerja yang bekerja di sektor informal (misalnya: wiraswasta, buruh tidak tetap, pekerja keluarga tanpa upah, petani, nelayan tradisional). ● **Penyebut**: Jumlah seluruh penyandang disabilitas usia kerja yang bekerja (di sektor formal dan informal).
Interpretasi	Nilai yang tinggi dapat mengindikasikan kurangnya akses atau hambatan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke sektor formal, serta menunjukkan perlunya program pelindung sosial dan penguatan kapasitas wirausaha inklusif.
Sumber Data	BPS, Dinas Sosial/Kemensos, Disnakertrans,
Frekuensi	Tahunan, Semesteran

8. Dukungan Fasilitasi Pelatihan

Nama Indikator	Dukungan Fasilitasi Pelatihan
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi kegiatan pelatihan ketenagakerjaan yang didukung fasilitasi oleh pemerintah atau pihak lain (swasta/CSR/lembaga donor) terhadap total pelatihan ketenagakerjaan yang diselenggarakan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah pelatihan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total pelatihan yang dilaksanakan}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Pelatihan yang difasilitasi mencakup pelatihan kerja yang didukung oleh dana APBD, APBN, CSR, atau kerja sama dengan lembaga non-pemerintah (misal: BLK, LPK, NGO). ● Pelatihan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pelatihan keterampilan kerja formal maupun non-formal di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar dukungan fasilitasi yang diberikan untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BLK (Balai Latihan Kerja), Dinas Sosial, Bappeda, Lembaga Pelatihan Kerja
Frekuensi	Tahunan, Semesteran

9. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya

Nama Indikator	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
Defenisi	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya di tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan internasional.

Nama Indikator	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
Rumus Perhitungan	$\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi} = \sum \text{Tenaga kerja pada perusahaan atau lembaga yang memenuhi standar perlindungan hak dasar}$ **Kriteria Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja:** Seorang pekerja dianggap terlindungi hak-haknya apabila ia bekerja di tempat kerja yang memenuhi kriteria berikut: 1. Menerima upah sesuai ketentuan (UMP/UMK atau perjanjian kerja bersama) 2. Terdaftar pada jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) 3. Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 4. Bekerja dalam jam kerja sesuai UU Ketenagakerjaan 5. Memiliki akses terhadap pengaduan/penyelesaian perselisihan 6. Tidak mengalami diskriminasi atau kekerasan di tempat kerja 7. Bebas berserikat dan memiliki akses pada dialog sosial (jika diperlukan)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terlindungi, semakin baik kualitas perlindungan ketenagakerjaan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan, BPJS, Serikat Pekerja, Laporan Pengawas Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

29.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Defenisi	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** adalah ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana **pemerintah daerah telah melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)** secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPKA} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$$ **Keterangan Rumus:** • IPKA dihitung berdasarkan dimensi-dimensi utama perlindungan khusus anak. Umumnya mencakup: 1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan AMPK (misalnya perda, SOP, mekanisme pengaduan) 2. Kelembagaan dan Sumber Daya (misalnya keberadaan UPTD PPA, SDM terlatih, Satgas PPA) 3. Data dan Informasi AMPK (ketersediaan dan pemanfaatan data AMPK, SIMFONI PPA aktif) 4. Layanan Komprehensif untuk AMPK (layanan hukum, psikososial, rehabilitasi, pemulihan) 5. Partisipasi Anak dan Masyarakat dalam upaya perlindungan • Bobot ditentukan berdasarkan kebijakan nasional atau pedoman dari Kementerian PPPA (bisa sama rata atau berdasarkan skala prioritas).

	• Setiap dimensi diberi skor 0–100, kemudian dikalikan dengan bobotnya.
Interpretasi	Semakin tinggi IPKA, semakin baik pelaksanaan perlindungan khusus anak di suatu wilayah
Sumber Data	Kementerian PPPA, Dinas PPPA, UPTD PPA, Satgas PPA, SIMFONI PPA, BPS, OPD teknis
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Anggaran Responsif

Nama Indikator	**Persentase Anggaran Rsponsif**
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anggaran belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk program, kegiatan, atau subkegiatan yang responsif terhadap kelompok rentan (misalnya: perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, masyarakat miskin) dibandingkan dengan total anggaran belanja.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Total anggaran responsif terhadap isu inklusif}}{\text{Total anggaran belanja daerah}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Anggaran responsif adalah alokasi belanja yang secara eksplisit mencantumkan tujuan, output, atau sasaran yang menjawab kebutuhan kelompok rentan (gender, disabilitas, dll.), termasuk kegiatan afirmatif, pengarusutamaan, atau perlindungan sosial. ● Total anggaran belanja daerah mencakup belanja langsung dan tidak langsung dari APBD.
Interpretasi	Nilai yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Nilai rendah menandakan perlunya peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis inklusi sosial.
Sumber Data	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD, Bappeda, Dinas PPPA, Laporan Gender Budget Statement (GBS), Analisis Gender dan Inklusi Sosial (AGIS), APBD
Frekuensi	Tahunan, Triwulan/ Semesteran

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**
Defenisi	Persentase jumlah perempuan yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dalam angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) terhadap jumlah total perempuan dalam usia kerja (jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas).
Rumus Perhitungan	$$\text{TPAK Perempuan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Kerja}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja Adalah jumlah perempuan yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yang terdiri dari dua kelompok: ○ Bekerja: Perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. ○ Mencari pekerjaan: Perempuan yang sedang aktif mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. • Jumlah Perempuan Usia Kerja Adalah jumlah total perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang berada dalam

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
	kelompok usia produktif, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, atau yang tidak aktif dalam angkatan kerja (misalnya, ibu rumah tangga). • × 100% Digunakan untuk mengubah hasil menjadi persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi TPAK Perempuan, semakin besar peran perempuan dalam perekonomian
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja, Laporan Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Nama Indikator	Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Persentase Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah **persentase korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO** yang memperoleh **akses penuh terhadap layanan yang komprehensif** dari lembaga pemerintah dan mitra terkait.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan lengkap yang mencakup: 1. Layanan hukum: Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum. 2. Layanan kesehatan: Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan kesehatan pasca kekerasan. 3. Rehabilitasi sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulihkan kondisi korban. 4. Konseling psikologis: Dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. 5. Pemulihan ekonomi: Bantuan untuk kemandirian ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. • Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO Adalah jumlah total korban kekerasan (baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll) dan korban TPPO yang tercatat oleh lembaga penanganan kasus kekerasan dan TPPO, seperti polisi, rumah sakit, LSM, dan dinas sosial. • × 100% Untuk mengonversi hasil ke dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), LSM, Rumah Sakit, Polri, Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

5. Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang beperspektif gender dan hak anak sesuai standar

Nama Indikator	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur **jumlah atau persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)** yang telah menerapkan pendekatan **berbasis gender dan hak anak** sesuai dengan **standar nasional**.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Puspaga Sesuai Standar} = \left(\frac{\text{Jumlah Puspaga yang memenuhi standar perspektif gender dan hak anak}}{\text{Total Puspaga}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Puspaga yang memenuhi standar Adalah jumlah unit Puspaga yang telah diverifikasi memiliki: ○ Fasilitator/konselor terlatih perspektif gender dan anak ○ Modul edukasi yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak ○ Sarana layanan ramah keluarga dan inklusif ○ Kegiatan rutin pembelajaran dan konseling keluarga ○ Pelaporan dan monitoring berbasis hak anak dan gender • Total Puspaga Adalah jumlah seluruh unit Puspaga yang terdaftar dan aktif di wilayah yang menjadi cakupan evaluasi. • × 100% Untuk mengubah hasil menjadi persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas layanan Puspaga dalam mendukung keluarga adil gender dan ramah anak
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puspaga Daerah, Kemen PPPA
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau penyusunan kebijakan

Nama Indikator	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusuna kebijakan
Defenisi	Indikator ini mengukur sejauh mana **data terpilah menurut jenis kelamin dan usia (data gender dan anak)** digunakan oleh instansi pemerintah daerah atau lembaga dalam **proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan**.
Rumus Perhitungan	$$\text{Tingkat Pemanfaatan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak Adalah jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi yang secara nyata dan terdokumentasi menggunakan data terpilah gender dan anak dalam: ○ Penyusunan rencana pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dll) ○ Implementasi kegiatan/program (misalnya menyasar kelompok perempuan atau anak secara spesifik berdasarkan data) ○ Evaluasi capaian pembangunan berdasarkan data terpilah • Jumlah Total Perangkat Daerah Adalah jumlah seluruh OPD atau lembaga yang menjadi subjek evaluasi di daerah tersebut.

Nama Indikator	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusuna kebijakan
	• × 100% Untuk mengubah hasil ke bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam proses pembangunan
Sumber Data	Dinas PPPA, Bappeda, Perangkat Daerah, Laporan Dokumen Perencanaan (RKPD, Renstra, Renja, dll.)
Frekuensi	Tahunan

7. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Nama Indikator	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Defenisi	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)** adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai **tingkat pemenuhan hak-hak anak** oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak dan kerangka **Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)**.

Rumus Perhitungan	$$\text{IPHA} = \frac{\text{Skor Klaster 1} + \text{Skor Klaster 2} + \text{Skor Klaster 3} + \text{Skor Klaster 4} + \text{Skor Klaster 5}}{5}$$
	Keterangan Rumus:
	• Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
	  ○ Contoh indikator: Akta kelahiran, partisipasi anak dalam pembangunan, akses informasi
	• Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	  ○ Contoh indikator: Akses layanan konseling keluarga, PUSPAGA aktif, pengasuhan non-diskriminatif
	• Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
	  ○ Contoh indikator: Imunisasi, angka kematian bayi, akses sanitasi, gizi balita
	• Klaster 4: Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
	  ○ Contoh indikator: Akses PAUD, partisipasi sekolah, kegiatan seni dan olahraga anak
	• Klaster 5: Perlindungan Khusus
	  ○ Contoh indikator: Penanganan anak korban kekerasan, perlindungan anak disabilitas, anak di LPKA
	Setiap klaster diberikan skor antara 0 – 100, tergantung pada pemenuhan indikator turunan di dalamnya.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPHA, semakin tinggi tingkat pemenuhan hak anak di suatu wilayah
Sumber Data	Kementerian PPPA, Dinas PPPA, BPS, OPD teknis (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll.)
Frekuensi	Tahunan

8. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang termasuk dalam kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah mendapatkan layanan secara komprehensif, baik berupa perlindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi sosial.

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase AMPK dengan Layanan Komprehensif} = \left(\frac{\text{Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total AMPK}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah anak yang masuk dalam kategori AMPK yang menerima layanan perlindungan anak secara terintegrasi dan menyeluruh, misalnya: ○ Penanganan kasus oleh UPTD PPA ○ Layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial ○ Pendampingan hingga pemulihan atau reintegrasi • Jumlah Total AMPK Adalah seluruh anak dalam wilayah yang teridentifikasi masuk kategori AMPK, baik dari laporan masyarakat, UPTD, data SIMFONI PPA, atau pendataan sektor lain. • × 100% Untuk menyatakan hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak AMPK yang terpenuhi hak-haknya melalui layanan lintas sektor
Sumber Data	Dinas PPPA, UPTD PPA, Lembaga Layanan Anak, Satgas PPA, Kementerian PPPA, SIMFONI PPA
Frekuensi	Tahunan / Triwulanan

29.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Defenisi	Persentase jumlah cadangan pangan adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi krisis atau masa paceklik.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Cadangan Pangan} = \left(\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia}}{\text{Kebutuhan Konsumsi Pangan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia** = total stok pangan yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, atau lembaga lainnya dalam satuan ton atau kg • **Kebutuhan Konsumsi Pangan** = estimasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat selama periode tertentu dalam satuan yang sama • Hasil dinyatakan dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin kuat ketahanan pangan suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan

2. Skor Pola Pangan Harapan

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk menilai mutu konsumsi pangan penduduk berdasarkan keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan.
Rumus Perhitungan	$$\text{PPH} = 100 - \sum_{i=1}^{n} \lvert R_i - D_i \rvert$$ **Keterangan:** • Ri= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi konsumsi aktual • Di= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i dalam Pola Pangan Harapan • n = Jumlah kelompok pangan yang dianalisis (umumnya 9-12 kelompok) • |Ri−Di|= Deviasi dari pola pangan harapan .
Interpretasi	Nilai PPH menunjukkan **seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola pangan yang dianjurkan (ideal)**.
Sumber Data	Data Konsumsi Pangan (contoh: Susenas, Food Balance Sheet, atau Survei Konsumsi Rumah Tangga)
Frekuensi	Tahunan atau sesuai kebutuhan analisis

3. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Nama Indikator	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi wilayah (misalnya kabupaten/kota atau kecamatan) dalam suatu daerah yang dikategorikan sebagai rentan terhadap kerawanan pangan dibandingkan dengan total wilayah yang dianalisis.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan} = \left(\frac{W_{rrp}}{W_t}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • Wrrp= Jumlah wilayah yang tergolong Rentan Rawan Pangan, berdasarkan kriteria atau klasifikasi tertentu (misalnya dari FSVA atau indikator lokal). • Wt = Jumlah Total wilayah yang dianalisis (misalnya seluruh kecamatan/kabupaten di suatu provinsi atau kabupaten). • Hasil akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persen (%). .
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak wilayah yang tergolong rentan terhadap kerawanan pangan, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Sumber Data	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA), BPS, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

Nama Indikator	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi sampel pangan segar (produk hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan) yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (misalnya tidak melebihi ambang batas residu pestisida, logam berat, formalin, dan kontaminan lain) terhadap seluruh sampel pangan segar yang diuji.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat} = \left(\frac{P_{ms}}{P_t}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • P_{ms} = Jumlah **pangan segar yang memenuhi syarat** mutu dan keamanan (berdasarkan uji laboratorium atau standar tertentu, seperti tidak mengandung pestisida berlebih, formalin, boraks, dsb). • P_t = Jumlah **total sampel pangan segar** yang diuji selama periode waktu tertentu. • Nilai akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Laboratorium Pengujian Pangan, BPOM, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pelaksanaan uji sampling di lapangan

29.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kasus atau sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi dibandingkan dengan total kasus yang ditangani.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penyelesaian Melalui Mediasi} = \left(\frac{K_m}{K_t}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • K_m = Jumlah **kasus tanah garapan belum bersertifikat** yang **berhasil diselesaikan melalui mediasi** • K_t = Jumlah **total kasus tanah garapan belum bersertifikat** yang ditangani dalam periode tertentu • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin berhasil pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah garapan belum bersertifikat.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Frekuensi	Tahunan / Per semester

2. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi jumlah tanah yang terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan kepada pemiliknya dibandingkan dengan total tanah yang terkena pengadaan untuk pembangunan tersebut.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian} = \left(\frac{G_{tg}}{T_{tg}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • G_{tg} = Jumlah **tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan** sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk tanah yang telah diselesaikan pembayaran ganti kerugian atau santunan). • T_{tg} = Jumlah **total tanah yang terdampak proyek pembangunan** (tanah yang termasuk dalam kawasan pengadaan untuk pembangunan). • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dan santunan dalam proyek pembangunan.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Pengadaan Tanah
Frekuensi	Triwulan / Semester / Tahunan

3. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Defenisi	Indikator yang mengukur jumlah tanah yang dapat didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang berhak sebagai bagian dari program landreform.

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Rumus Perhitungan	$$\text{Tersedia Tanah TOL untuk Didistribusikan} = T_{km} + T_a$$ **Keterangan Rumus:** • T_{km} = Luas **tanah kelebihan maksimum** yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). • T_a = Luas **tanah absentee** yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). • Rumus ini menyatakan total luas tanah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, yang berasal dari dua kategori tanah tersebut.
Interpretasi	Semakin banyak tanah yang tersedia untuk didistribusikan, semakin besar keberhasilan program landreform dalam menyediakan akses tanah bagi masyarakat.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Tim Landreform, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan

Nama Indikator	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum dari pihak yang berwenang (seperti pemerintah atau lembaga adat) sebagai tanah ulayat yang sah dan terdaftar.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan} = \left(\frac{T_{du}}{T_{tu}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • T_{du} = Luas **tanah ulayat yang telah ditetapkan** dan diakui oleh pihak yang berwenang sebagai tanah ulayat yang sah (dalam hektare). • T_{tu} = Luas **total tanah ulayat** yang ada di wilayah tersebut, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum (dalam hektare). • Hasil dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat di wilayah tersebut.

Nama Indikator	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, Kantor Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Tanah Kosong yang Dikelola

Nama Indikator	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi tanah kosong yang telah diambil alih, dimanfaatkan, atau dikelola dengan tujuan produktif dibandingkan dengan total tanah kosong yang ada di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tanah Kosong yang Dikelola} = \left(\frac{T_{dk}}{T_{tk}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • T_{dk} = Luas **tanah kosong yang telah dikelola** (dalam hektare), baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. • T_{tk} = Luas **total tanah kosong** yang ada di wilayah tersebut (dalam hektare). • Hasil dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pengelolaan tanah kosong yang ada di wilayah tersebut.
Sumber Data	Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan, dan Lembaga Pengelola Tanah
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah

Nama Indikator	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi luas tanah yang telah melalui proses konsolidasi, yaitu penggabungan atau penyusunan ulang tanah-tanah kecil atau terpecah menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan teratur, dibandingkan dengan total luas yang direncanakan atau tersedia untuk konsolidasi tanah.

Nama Indikator	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah} = \left(\frac{L_{tk}}{L_{tt}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • L_{tk} = **Luas tanah yang telah dikonsolidasikan** dan berhasil disatukan atau dikelola kembali (dalam hektare). • L_{tt} = **Luas total tanah yang direncanakan untuk konsolidasi** (dalam hektare). • Hasil dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan program konsolidasi tanah yang ada di wilayah tersebut.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat

Nama Indikator	Persentase tanah pemerintah daerah yang memiliki sertifikat
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi bidang tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibandingkan dengan total bidang tanah milik pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah total bidang tanah milik pemerintah daerah}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● **Tanah bersertifikat**: bidang tanah yang telah memiliki dokumen resmi berupa sertifikat hak milik atau hak pakai atas nama pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPN. ● **Total tanah pemerintah daerah**: seluruh aset tanah milik pemda (baik bersertifikat maupun belum), tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan kepastian hukum atas aset tanah pemda, serta meningkatkan perlindungan dan optimalisasi pemanfaatan aset.
Sumber Data	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD/SIPD), Inspektorat.
Frekuensi	Tahunan, Dapat diperbarui semesteran jika ada program sertifikasi tanah massal (PTSL/redistribusi aset).

29.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase rumah tangga yang secara rutin dan menyeluruh mendapatkan layanan pengumpulan sampah oleh pihak resmi (pemerintah, swasta, atau komunitas) dari tempat tinggal hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = \left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \right) \times 100\%$ **Keterangan**: ● **Layanan penuh** mencakup pengambilan sampah secara rutin di lokasi rumah tangga dan pengangkutan ke TPS/TPA atau fasilitas pengelolaan sampah akhir. ● **Rumah tangga** mencakup seluruh rumah tangga dalam satu wilayah administrasi (desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten).
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan cakupan layanan persampahan yang baik dan mendukung kebersihan lingkungan serta pengurangan pencemaran.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN – KLHK), Data Profil Desa/Kelurahan, Survei Rumah Tangga (Susenas – BPS)
Frekuensi	Tahunan, Semseteran/ Triwulan

2. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi rekomendasi yang dihasilkan dari dokumen kajian lingkungan hidup (seperti KLHS, AMDAL, DELH, DPLH) yang telah ditindaklanjuti oleh instansi atau pihak terkait dalam bentuk kebijakan, rencana, atau tindakan nyata.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi dalam kajian lingkungan hidup}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** ● **Rekomendasi yang ditindaklanjuti** adalah butir rekomendasi yang telah: ➢ Diakomodasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, RTRW, RENSTRA OPD. ➢ Diterjemahkan ke dalam program/kegiatan nyata (misalnya rehabilitasi lingkungan, pengendalian pencemaran, pelestarian kawasan lindung, dsb). ● **Rekomendasi total** adalah seluruh butir rekomendasi yang tercantum dalam dokumen kajian lingkungan hidup.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah atau pemrakarsa dalam memperhatikan hasil kajian lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Tim Kajian KLHS/AMDAL, Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut KLHS (oleh Bappeda/DLH)

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Frekuensi	Tahunan, Setiap dokumen kajian selesai (semesteran)

3. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan pengukuran beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kelayakan air untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, irigasi, dan pemeliharaan ekosistem.
Rumus Perhitungan	$$IKA = \sum (P_i \times W_i)$$ Dimana: • P_i = Nilai normalisasi untuk parameter ke-i (misalnya pH, DO, BOD, dll.), yang dihitung dengan membandingkan nilai parameter dengan rentang yang telah ditetapkan untuk parameter tersebut. • W_i = Bobot atau pentingnya parameter ke-i dalam menentukan kualitas air (misalnya, bobot untuk BOD mungkin lebih tinggi dibandingkan pH, tergantung pada tujuan evaluasi kualitas air).
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas air yang buruk.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah, serta lembaga pengelola air
Frekuensi	Tahunan atau lebih sering, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan monitoring kualitas air.

4. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi berbagai jenis polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), ozon (O_3), dan karbon dioksida (CO_2). Indeks ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu wilayah, yang penting untuk kesehatan manusia dan ekosistem.

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Rumus Perhitungan	$$IKU = \max\left(\frac{C_1}{S_1}, \frac{C_2}{S_2}, \ldots, \frac{C_n}{S_n}\right)$$ Dimana: • C_i = Konsentrasi polutan ke-i (misalnya, PM10, PM2.5, CO, NO_2, SO_2, O_3) dalam satuan yang sesuai (misalnya µg/m³ atau ppm). • S_i = Ambang batas standar kualitas udara untuk polutan ke-i, sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. • Hasil $\frac{C_i}{S_i}$ menunjukkan rasio antara konsentrasi polutan dengan standar yang telah ditetapkan.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk dan berpotensi lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemantauan Kualitas Udara Nasional dan Regional
Frekuensi	Harian atau lebih sering tergantung pada kebijakan dan kebutuhan monitoring kualitas udara.

5. Indeks Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Ttutupan Lahan
Defenisi	Indeks Tutupan Lahan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar persentase wilayah yang masih tertutup oleh vegetasi alami atau penutup lahan tertentu (hutan, semak, sawah, perkebunan, badan air, dll) dibandingkan dengan luas total wilayah administratif tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi ekologis dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Tutupan Lahan (ITL)} = \left(\frac{\text{Luas wilayah dengan tutupan lahan alami/vegetatif}}{\text{Total luas wilayah}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● **Tutupan lahan alami/vegetatif** mencakup: hutan, lahan pertanian, kebun, padang rumput, rawa, dan lainnya yang masih menyimpan fungsi ekologis. ● **Total luas wilayah** adalah luas keseluruhan area yang dianalisis, biasanya per kabupaten/kecamatan/desa. **Catatan:** Dalam beberapa pendekatan, nilai ITL juga dapat dibobot berdasarkan jenis tutupan lahan, misalnya hutan primer mendapat bobot lebih besar daripada kebun sawit atau sawah.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan masih luasnya area tutupan lahan vegetatif yang bermanfaat untuk konservasi air, perlindungan tanah, keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon.
Sumber Data	● Citra Satelit (Landsat, Sentinel, Google Earth Engine) ● KLHK (Peta Tutupan Lahan Indonesia) ● BIG (Badan Informasi Geospasial)

Nama Indikator	Indeks Ttutupan Lahan
	● Bappeda/DLH yang memiliki sistem informasi geospasial daerah ● Laporan Inventarisasi Hutan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Frekuensi	Tahunan, Triwulanan

6. Persentase RTH

Nama Indikator	Persentase RTH
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi luas ruang terbuka hijau (seperti taman, hutan kota, kebun, dan area vegetasi lainnya) terhadap total luas area yang tersedia dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase RTH} = \left(\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • **Luas RTH**: Merupakan luas total ruang terbuka hijau yang ada dalam wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar). • **Luas Wilayah**: Merupakan luas total area atau wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar). • Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase RTH, semakin baik kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang untuk aktivitas rekreasi serta fungsi ekologis lainnya.
Sumber Data	Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Limbah B3 yang Terkelola

Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dikelola dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau kegiatan industri.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Limbah B3 yang Terkelola} = \left(\frac{\text{Limbah B3 yang Terkelola}}{\text{Total Limbah B3 yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Limbah B3 yang Terkelola: Merupakan jumlah limbah B3 yang telah dikelola sesuai dengan prosedur yang benar dan aman, misalnya dengan cara didaur ulang, diolah, atau dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku. • Total Limbah B3 yang Dihasilkan: Merupakan jumlah total limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sektor, atau kegiatan industri dalam periode tertentu.

Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
	• Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase limbah B3 yang terkelola, semakin baik pengelolaannya dan semakin kecil risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Limbah B3 Daerah
Frekuensi	Tahunan

8. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota

Nama Indikator	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Defenisi	Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Ketaatan} = \left(\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat: Jumlah entitas usaha atau kegiatan yang memenuhi seluruh persyaratan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH, baik administratif maupun teknis. • Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: Total usaha/kegiatan yang dilakukan pemantauan atau evaluasi kepatuhan oleh instansi terkait selama periode tertentu. • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan sesuai peraturan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Sistem Informasi Perizinan Lingkungan.
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi komunitas MHA yang telah menerima peningkatan kapasitas melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, atau fasilitasi dari pemerintah atau lembaga terkait, terhadap total komunitas MHA yang telah teridentifikasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya} = \left(\frac{\text{Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total MHA yang Teridentifikasi}} \right) \times 100\%$$

Nama Indikator	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	Keterangan Rumus: • Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh pelatihan, pendampingan, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya pada periode waktu tertentu. • Total MHA yang Teridentifikasi: Total jumlah komunitas MHA yang secara resmi telah diakui atau didata oleh instansi terkait dalam wilayah administratif tertentu. • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase ini mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir dalam upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pelaksanaan program peningkatan kapasitas.
Sumber Data	Direktorat Jenderal PKTHA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya

Nama Indikator	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau kompetensi (seperti pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, workshop) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total penyuluh lingkungan hidup yang terdata.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Kompetensi Penyuluh LH} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Total Penyuluh LH}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya: Jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam satu tahun. • Total Penyuluh LH: Jumlah keseluruhan penyuluh lingkungan hidup yang terdata aktif dalam wilayah atau lembaga tertentu. • Dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pengembangan kapasitas penyuluh lingkungan hidup untuk mendukung keberhasilan program lingkungan.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Prov/Kab
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara individu maupun berkelompok.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Partisipasi Masyarakat} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Total Penduduk}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi: Jumlah individu yang ikut serta dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti kegiatan gotong royong kebersihan, konservasi, pelatihan lingkungan, dan sejenisnya dalam periode tertentu. • Total Penduduk: Jumlah total penduduk pada wilayah administratif yang menjadi cakupan pengukuran. • Hasil dikalikan 100 untuk menyatakan dalam satuan persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar keterlibatan publik dalam upaya pelestarian lingkungan.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, BPS, Laporan Kegiatan Lingkungan, LSM Lingkungan
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi jumlah sengketa atau kasus pidana lingkungan yang telah diselesaikan (baik melalui jalur hukum, mediasi, atau administrasi) terhadap total kasus yang ditangani dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penyelesaian Kasus} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus yang Ditangani}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Kasus yang Diselesaikan: Jumlah kasus atau sengketa lingkungan hidup yang telah mendapatkan keputusan tetap, penyelesaian damai, atau bentuk penyelesaian resmi lainnya. • Total Kasus yang Ditangani: Jumlah keseluruhan kasus atau sengketa yang tercatat dan sedang dalam penanganan pada periode pelaporan. • Perhitungan dikalikan 100 untuk menyatakan dalam satuan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik kinerja penyelesaian kasus lingkungan hidup, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakkum LH, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan
Frekuensi	Tahunan

13. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Rumus Perhitungan	$$\text{IKPS} = \sum_{i=1}^{n} (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)$$
	Keterangan Rumus:
	• **Nilai Indikator:** Skor capaian dari masing-masing komponen pengelolaan sampah, seperti:
	  ○ Pengurangan sampah
	  ○ Penanganan sampah
	  ○ Regulasi dan kebijakan
	  ○ Kelembagaan dan SDM
	  ○ Pendanaan
	  ○ Partisipasi masyarakat
	  ○ Infrastruktur dan teknologi
	• **Bobot:** Nilai bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan prioritas atau kebijakan nasional (misalnya, pengurangan sampah diberi bobot lebih besar daripada dokumentasi).
	• **n:** Jumlah total indikator yang diukur.
	• Nilai akhir dinyatakan dalam skala 0 – 100, dengan skala penilaian tertentu.

Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh daerah tersebut.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Frekuensi	Tahunan

29.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** terhadap total jumlah penduduk wajib KTP.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase IKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki IKD}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Penduduk yang Memiliki IKD: Penduduk yang telah berhasil mengaktifkan identitas kependudukan digital melalui aplikasi resmi Dukcapil (misalnya, aplikasi IKD).

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
	• Jumlah Penduduk Wajib KTP: Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan wajib memiliki KTP. • Hasil perhitungan dikalikan 100 untuk dinyatakan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan adminduk.
Sumber Data	Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki **Kartu Identitas Anak** terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase KIA} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Total Anak Usia 0–17 Tahun} < \text{1 Hari}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Anak yang Memiliki KIA: Anak-anak yang telah tercatat dan memiliki Kartu Identitas Anak aktif. • Jumlah Total Anak Usia 0–17 Tahun < 1 Hari: Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia tersebut, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan. • Hasil dikalikan 100 agar dinyatakan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk untuk anak.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri
Frekuensi	Bulanan / Tahunan

3. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan

Nama Indikator	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Defenisi	indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi pelaporan kematian yang berhasil ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian oleh instansi yang berwenang (Dinas Dukcapil).
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Akta Kematian} = \left(\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Pelaporan Kematian}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan: Total akta resmi yang telah dicetak dan diserahkan oleh Dukcapil sebagai tindak lanjut dari pelaporan kematian. • Jumlah Pelaporan Kematian: Jumlah laporan kematian yang masuk ke Dukcapil melalui berbagai kanal (manual, daring, atau aplikasi) selama periode waktu tertentu. • Hasil dikalikan 100 agar dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin responsif dan tertib layanan pencatatan kematian.

Nama Indikator	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

4. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan

Nama Indikator	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah anak usia 0–18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dibandingkan dengan jumlah total anak usia 0–18 tahun di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah total anak usia 0–18 tahun}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Akta kelahiran yang diterbitkan adalah dokumen resmi dari Dukcapil yang memuat identitas anak dan diakui secara hukum. ● Total anak usia 0–18 tahun berdasarkan data administrasi kependudukan (Dukcapil/BPS).
Interpretasi	Angka tinggi menunjukkan pencapaian pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen hukum identitas anak.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, BPS (untuk data anak usia 0–18 tahun)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan, Dapat dimonitor real-time jika sistem administrasi kependudukan terhubung dengan data nasional (SIK-NG atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

5. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan

Nama Indikator	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pelaporan perkawinan yang berhasil ditindaklanjuti dengan penerbitan akta perkawinan oleh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Akta Perkawinan} = \left(\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Laporan Perkawinan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan: Total akta perkawinan yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh instansi yang berwenang (misalnya Dukcapil) sebagai hasil dari pelaporan perkawinan yang masuk. • Jumlah Laporan Perkawinan: Total laporan perkawinan yang diterima oleh instansi terkait (Dukcapil) dalam periode waktu tertentu. • Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan Dukcapil yang efisien dalam menerbitkan akta perkawinan.

Nama Indikator	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

6. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan

Nama Indikator	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi dari pelaporan perceraian yang diterima oleh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang kemudian diterbitkan akta perceraian.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Akta Perceraian} = \left(\frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Laporan Perceraian}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan: Total jumlah akta perceraian yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh instansi yang berwenang (Dukcapil) sebagai tindak lanjut dari pelaporan perceraian yang diterima. • Jumlah Laporan Perceraian: Total jumlah laporan perceraian yang diterima oleh Dukcapil atau instansi terkait dalam periode tertentu. • Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan layanan Dukcapil yang efisien dan responsif dalam menerbitkan akta perceraian.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

7. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki oleh instansi kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penggunaan Informasi Kependudukan}}{\text{Jumlah Total Data Kependudukan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Penggunaan Informasi Kependudukan: Total jumlah kasus atau instansi yang memanfaatkan data kependudukan yang telah disediakan oleh Dukcapil untuk berbagai kepentingan administrasi dan kebijakan. • Jumlah Total Data Kependudukan: Total jumlah data kependudukan yang tersedia atau tercatat pada instansi yang berwenang, termasuk data penduduk, keluarga, dan informasi terkait lainnya. • Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.

Nama Indikator	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Laporan Penggunaan Data oleh Instansi/Pihak Terkait
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

8. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan

Nama Indikator	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berhasil mengelola dan memperbarui data profil kependudukan untuk mencakup seluruh penduduk yang terdaftar, termasuk memastikan bahwa data tersebut tersedia, valid, dan digunakan untuk kepentingan administrasi dan perencanaan kebijakan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Terkelola}}{\text{Jumlah Total Penduduk}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Terkelola: Total jumlah penduduk yang tercatat dan datanya dikelola dengan baik dalam sistem pengelolaan profil kependudukan oleh instansi terkait (Dukcapil). • Jumlah Total Penduduk: Total jumlah penduduk yang ada di wilayah yang tercatat oleh instansi terkait, yang menjadi sasaran pengelolaan profil kependudukan. • Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan data kependudukan yang tinggi dan keberhasilan dalam menyediakan informasi yang akurat dan lengkap untuk administrasi publik.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Kependudukan, Laporan Pengelolaan Profil
Frekuensi	Bulanan / Triwulanan / Tahunan

9. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Nama Indikator	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah anak usia 0–18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dibandingkan dengan jumlah total anak usia 0–18 tahun di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah total anak usia 0–18 tahun}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Akta kelahiran yang diterbitkan** adalah dokumen resmi dari Dukcapil yang memuat identitas anak dan diakui secara hukum. • **Total anak usia 0–18 tahun** berdasarkan data administrasi kependudukan (Dukcapil/BPS).

Nama Indikator	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Interpretasi	Angka tinggi menunjukkan pencapaian pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen hukum identitas anak.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, BPS (untuk data anak usia 0–18 tahun),
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

10. Persentase pengguna yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik

Nama Indikator	Persentase Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi instansi atau lembaga pengguna (user) yang telah memanfaatkan akses data kependudukan dari **Database Kependudukan Nasional (DKN)** atau **Dinas Dukcapil**, untuk kepentingan **pelayanan publik** seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perizinan, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah instansi pengguna yang aktif menggunakan data kependudukan}}{\text{Jumlah total instansi pengguna yang memiliki hak akses}} \right) \times 100\%$ **Keterangan:** ● Instansi pengguna aktif adalah instansi yang telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dan mengakses data kependudukan (melalui web service Dukcapil atau konsolidasi data NIK) untuk pelayanan publik minimal satu kali dalam periode evaluasi. ● Total instansi pengguna adalah semua lembaga yang telah menandatangani PKS dan diberikan hak akses oleh Kemendagri/Dukcapil.
Interpretasi	Nilai tinggi mencerminkan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan publik berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Sumber Data	Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil, Dashboard Pemanfaatan Data NIK Terpusat (Kemendagri)
Frekuensi	Semesteran, Tahunan, Monitoring real-time dapat dilakukan jika menggunakan dashboard akses web service Dukcapil

11. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Defenisi	Indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah (OPD) mampu mempertanggungjawabkan kinerja instansinya melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan program yang efektif, serta pelaporan dan evaluasi yang transparan, sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	Terdapat dua pendekatan umum : **a) Berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP (Kualitatif)** *Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD = Skor evaluasi SAKIP oleh Inspektorat atau Kemen PAN - RB* Dengan klasifikasi nilai : ● AA = Sangat Memuaskan (≥90) ● A = Memuaskan (80–89)

Nama Indikator	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	● BB = Baik (70–79) ● B = Cukup Baik (60–69) ● CC = Kurang (50–59) ● D = Sangat Kurang (<50) **b) Berdasarkan Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Baik atau Lebih :** $$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD dengan nilai akuntabilitas} \geq \text{B}}{\text{Jumlah total OPD}} \right) \times 100\%$$
Interpretasi	Nilai tinggi atau proporsi besar menunjukkan OPD mampu menyusun perencanaan berbasis kinerja, melaksanakan secara efektif, dan mempertanggungjawabkan hasilnya dengan transparan.
Sumber Data	Hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Inspektorat, Bappeda, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perencanaan dan realisasi dalam dokumen RKPD, Renstra, Renja.
Frekuensi	Tahunan, Semesteran/ Triwulanan

12. Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Publik

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Defenisi	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, keramahan, biaya, dan sarana prasarana pelayanan.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKM} = \left(\frac{\sum(n_i \times w_i)}{N} \right) \times \frac{25}{k}$$ Keterangan: ● n_i = Nilai persepsi responden terhadap unsur pelayanan ke-i ● w_i = Bobot dari masing-masing unsur pelayanan ● N = Jumlah responden ● k = Skor maksimum (biasanya 4 atau 5, tergantung skala penilaian) ● Hasil akhir IKM berada dalam rentang 25–100 (atau 0–100 jika dinormalisasi)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sumber Data	● Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ● Kuesioner langsung atau online dari pengguna layanan ● Aplikasi pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, Qlue, SIPPD, dll)

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	● Survei internal oleh masing-masing OPD atau melalui pihak ketiga
Frekuensi	Tahunan, Semesteran/ Triwulanan

29.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Indeks Desa Membangun/ Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa Membangun (IDM)
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di tingkat desa. I
Rumus Perhitungan	$$IDM = \frac{\sum \text{Indikator Pembangunan Desa}}{\text{Jumlah Indikator}}$$ **Keterangan Rumus:** ● Indikator Pembangunan Desa: Merupakan ukuran atau variabel yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan pentingnya dalam pembangunan desa. ● Jumlah Indikator: Jumlah total indikator atau variabel yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Setiap indikator memiliki skor atau nilai tertentu berdasarkan data yang dihimpun. ● Hasil dihitung dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai 100 menunjukkan desa yang sepenuhnya maju dalam semua aspek pembangunan yang diukur.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa desa tersebut semakin maju dalam hal pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
Sumber Data	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan data terkait lainnya
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan fasilitasi dalam penataan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan, dan penguatan tata kelola desa, telah dilakukan secara efektif.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Fasilitasi Penataan Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** ● Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan: Total jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka penataan desa. Ini bisa mencakup perencanaan kawasan, penyusunan dokumen tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain.

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
	• Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan atau program penataan desa yang sudah direncanakan dalam suatu periode, misalnya tahunan atau perencanaan lima tahunan. • Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi penataan desa telah dilaksanakan dengan baik, meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan desa.
Sumber Data	Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, serta lembaga lain yang terlibat dalam penataan desa.
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Defenisi	Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah atau pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga (swasta, LSM), maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan nyata yang sudah difasilitasi, seperti pembentukan BUMDes Bersama, kerja sama antar desa dalam pengelolaan sampah, pertanian, pendidikan, atau layanan dasar. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan fasilitasi kerja sama desa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan atau RPJMDes. • 100%: Dikalikan untuk mengubah hasil menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Makin tinggi persentasenya, makin baik fasilitasi kerja sama yang dilakukan, menandakan kolaborasi desa berjalan optimal.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi kerja sama antar desa
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total Aparatur Desa dan Anggota BPD}} \right) \times 100\%$ **Keterangan Rumus:**

Nama Indikator	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	• Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Total individu yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu. • Total Aparatur Desa dan Anggota BPD: Jumlah keseluruhan aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya) serta anggota BPD yang aktif. • Dikalikan 100% untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase tinggi menandakan peningkatan kapasitas SDM desa berjalan baik dan merata.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan kegiatan pelatihan/pembinaan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendukung untuk membantu desa dalam memperbaiki atau memperkuat tata kelola pemerintahan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, pelayanan publik, serta akuntabilitas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ **Keterangan Rumus:** • **Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan**: Merupakan jumlah kegiatan nyata yang telah dilaksanakan seperti pelatihan SID, pendampingan penyusunan APBDes, fasilitasi musyawarah desa, sistem pelaporan keuangan, dan sebagainya. • **Jumlah Kegiatan yang Direncanakan**: Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi tata kelola desa yang tertuang dalam perencanaan tahunan atau dokumen kerja perangkat daerah. • **100%**: Untuk mengubah nilai menjadi persentase. • ntase.
Interpretasi	Makin tinggi nilainya, makin optimal fasilitasi yang dilakukan dalam mendukung tata kelola desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan kegiatan fasilitasi desa
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
	Keterangan Rumus: • Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD. • 100%: Untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi atau pembinaan LKD
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Fasilitasi Pemberdayaa/ Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mendukung penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) dalam menjaga nilai-nilai budaya, hukum adat, serta peran sosialnya di tengah masyarakat desa.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LAD dan LMHA} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan: Total kegiatan aktual yang dilakukan seperti pelatihan kelembagaan adat, pengakuan/pengesahan LMHA, pendampingan pengelolaan wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan lain-lain. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan fasilitasi terhadap LAD dan LMHA yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan tahunan pemerintah. • 100%: Untuk mengubah hasil perbandingan menjadi nilai persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan Fasilitasi LAD/LMHA
Frekuensi	Tahunan

29.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/ TFR)*
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	$$TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{49} ASFR_i$$ Keterangan : Di mana: ASFRi = Angka Kelahiran Spesifik Menurut Usia untuk kelompok usia i (jumlah kelahiran bayi oleh wanita pada kelompok usia i dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia i pada pertengahan tahun). Perhitungan seringkali menggunakan interval usia 5 tahun (15-19, 20-24, ..., 45-49), sehingga rumusnya menjadi:
Interpretasi	TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi).
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Ferility Rate ? ASFR 15-19)*
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir.
Rumus Perhitungan	$$ASFR_{15-19} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia 15 - 19 Tahun}}{\text{Jumlah Rata - rata Wanita Berusia 15 - 19 Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$$ Keterangan : [ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir. [Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut.

Nama Indikator	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Ferility Rate ? ASFR 15-19)*
Interpretasi	Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Setiap 10 tahun

3. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (Mcpr)

Nama Indikator	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive* (Mcpr)
Definisi	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah persentase wanita usia reproduksi (biasanya 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern dari total wanita usia reproduksi (termasuk yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern).
Rumus Perhitungan	$mCPR$ = $\frac{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 - 49 Tahun) yang Saat Ini Menggunakan Metode Kontrasepsi - 49 Tahun)}}$ × 100 Keterangan : Persentase wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern. Ini juga mencakup wanita yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern (misalnya vasektomi).
Interpretasi	mCPR menunjukkan proporsi wanita usia reproduksi yang menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Peningkatan mCPR sering dikaitkan dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. mCPR merupakan indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB).
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan dengan cakupan yang lebih detail pada tahun-tahun tertentu.

4. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Nama Indikator	Persentase Kebutuhan Ber-KB ang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*
Definisi	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) adalah proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang: 1. Ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak ingin memiliki anak sama sekali (mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB), tetapi 2. Tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

Rumus Perhitungan	$\text{Unmet Need (\%)}$ = $\frac{\text{Jumlah Wanita Usia Subur dengan Unmet Need}}{\text{Jumlah Wanita Usia Subur}}$ × 100\% Keterangan : Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) Definisi: Proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.
Interpretasi	Unmet Need merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi kelompok wanita yang rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan wanita untuk mengatur kesuburan dan akses atau penggunaan layanan KB. Penurunan Unmet Need merupakan salah satu tujuan utama program Keluarga Berencana.
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

5. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga

Nama Indikator	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**
Definisi	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga adalah proporsi keluarga di suatu wilayah tertentu yang aktif berpartisipasi dalam minimal satu kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga}}{\text{Jumlah total keluarga di wilayah tersebut}}\right) \times 100\%$ Keterangan : ▯ **Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan** = jumlah keluarga yang terlibat dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga (misalnya: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, dsb). ▯ **Jumlah Seluruh Keluarga** = total keluarga yang ada di wilayah yang sedang dihitung (desa, kecamatan, kabupaten, dll).
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi keluarga dalam program-program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cakupan program yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan keluarga.
Sumber Data	Data Registrasi/Pendataan Program Ketahanan Keluarga
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

6. Persentase Kampung KB Mandiri

Nama Indikator	Presentase Kampung KB Mandiri
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mencapai status mandiri, yaitu kampung yang mampu menjalankan program pembangunan keluarga secara berkelanjutan dengan dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pendanaan lokal tanpa bergantung penuh pada bantuan pemerintah pusat/daerah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kampung KB Mandiri} = \left(\frac{\text{Jumlah Kampung KB yang Mandiri}}{\text{Jumlah Total Kampung KB}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Jumlah Kampung KB Mandiri: Kampung KB yang telah memenuhi indikator kemandirian, seperti kelembagaan aktif (pokja), pendanaan non-BKKBN, inovasi lokal, dan capaian pembangunan keluarga. ● Jumlah Total Kampung KB: Seluruh Kampung KB yang telah ditetapkan di wilayah (kabupaten/kota). ● × 100%: Untuk mengubah proporsi menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan Kampung KB yang berkelanjutan dan partisipatif.
Sumber Data	BKKBN, DPMD, DPPKB, Hasil verifikasi dan validasi lapangan terhadap status Kampung KB.
Frekuensi	Tahunan

29.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Konektivitas Darat

Nama Indikator	Konektivitas Darat
Definisi	Indeks Konektivitas Darat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan antar wilayah melalui infrastruktur transportasi darat. Indeks ini mencerminkan kemudahan dan efisiensi pergerakan orang dan barang antar pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, pusat administrasi, dan wilayah geografis lainnya dalam suatu area (misalnya, provinsi, negara, atau kawasan). Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas darat yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$$\textbf{Indeks Konektivitas Darat} = \left(\frac{\text{Panjang Jalan Layak Fungsi}}{\text{Total Panjang Jalan}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Wilayah yang Dapat Diakses Jalur Darat = jumlah desa/kecamatan/daerah yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat. [Jumlah Total Wilayah = jumlah seluruh wilayah yang menjadi cakupan perhitungan.

Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas darat yang lebih baik. Perbandingan nilai indeks antar waktu atau antar wilayah dapat memberikan informasi tentang perubahan atau disparitas dalam konektivitas.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

Nama Indikator	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**
Definisi	**Indeks Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal** adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpasang saat ini memenuhi standar atau kondisi ideal yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan jalan. Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah atau tingkat kelengkapan fasilitas jalan yang ada dengan jumlah atau tingkat kelengkapan ideal yang seharusnya tersedia,
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kelengkapan Jalan} = \left(\frac{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang}}{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan Ideal}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Panjang Jalan yang Terpasang = total panjang jalan yang sudah ada dan terbangun di wilayah tersebut. [Panjang Jalan Ideal (Kebutuhan) = total panjang jalan yang seharusnya dibutuhkan untuk melayani seluruh wilayah dengan optimal (misalnya berdasarkan tata ruang atau perencanaan teknis).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin lengkap fasilitas jalan yang terpasang sesuai dengan kondisi ideal. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh fasilitas jalan yang dibutuhkan telah terpasang sesuai standar.
Sumber Data	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah

Nama Indikator	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survey)**
Definisi	**Indeks Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik.

Nama Indikator	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survey)
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kepuasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden yang memberikan jawaban dengan kategori *"Puas"* atau *"Sangat Puas"* (tergantung skala yang digunakan). Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden.
Sumber Data	Data Primer dari Survei
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	Indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah, yang mencakup aspek kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Indeks ini menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi digital birokrasi pemerintah menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	Indeks SPBE dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari 47 indikator penilaian yang terbagi ke dalam 4 domain dan 11 aspek, dengan bobot yang ditentukan oleh Kementerian PAN-RB: $$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$ **Keterangan:** • N_i = Nilai masing-masing indikator aspek SPBE (skala 0–5) • B_i = Bobot masing-masing indikator sesuai pedoman • Nilai akhir berada dalam skala **0,00 – 5,00**, yang kemudian dikonversi menjadi klasifikasi mutu.
Interpretasi	Nilai indeks tinggi menunjukkan bahwa instansi telah melaksanakan prinsip SPBE dengan tata kelola dan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Sumber Data	Kementerian PAN-RB, Hasil evaluasi mandiri SPBE oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi, Penilaian eksternal melalui Tim Evaluator SPBE Nasional (terdiri dari BSSN, BPKP, Kemenkominfo, BRIN, dan KemenPAN-RB).
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi, dan Komunikasi

Nama Indikator	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survey)**
Definisi	IP-TIK adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan TIK di suatu wilayah, mencakup **akses dan infrastruktur**, **penggunaan TIK**, dan **keterampilan TIK**. Indeks ini mengukur kesiapan dan kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan.
Rumus Perhitungan	$$\text{IP-TIK} = \frac{1}{3}(I_{\text{akses}} + I_{\text{penggunaan}} + I_{\text{keterampilan}})$$ **Keterangan:** • I_{akses} = Indeks akses dan infrastruktur TIK (contoh: kepemilikan komputer, langganan telepon seluler, akses internet) • $I_{\text{penggunaan}}$ = Indeks penggunaan TIK (contoh: persentase pengguna internet, tingkat penggunaan komputer di rumah) • $I_{\text{keterampilan}}$ = Indeks keterampilan TIK (diukur dari indikator pendidikan, seperti angka partisipasi jenjang SMP dan SMA) Masing-masing sub-indeks dihitung dari indikator-indikator spesifik, kemudian dinormalisasi dan diberi bobot sesuai pedoman dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan International Telecommunication Union (ITU).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IP-TIK, semakin baik kesiapan infrastruktur, akses masyarakat, dan kapasitas SDM dalam memanfaatkan TIK untuk produktivitas dan layanan publik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Data Dinas Pendidikan dan operator telekomunikasi.
Frekuensi	Tahunan

2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**
Definisi	**Indeks Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi** adalah ukuran persentase perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi usaha lainnya. Indeks ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat.
Rumus Perhitungan	

	$\text{Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi} = \left(\frac{\text{Volume Usaha Tahun Ini} - \text{Volume Usaha Tahun Lalu}}{\text{Volume Usaha Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun yang sedang dihitung. [Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar)
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi (kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat penurunannya. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan volume usaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Nama Indikator	**Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi**
Definisi	**Indeks Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi koperasi aktif yang telah menjalani kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang (Dinas Koperasi dan UKM atau lembaga yang ditunjuk) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi}}{\text{Jumlah Total Koperasi}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi = jumlah koperasi yang sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan selama periode tertentu. [Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi koperasi aktif yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan organisasi koperasi yang lebih baik secara keseluruhan.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Koperasi Aktif

Nama Indikator	**Persentase Koperasi Aktif**
Definisi	**Indeks Persentase Koperasi Aktif** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat vitalitas dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di suatu wilayah.

Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku [Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan

Nama Indikator	**Persentase Koperasi yang Diberikan**
Definisi	**Indeks Persentase Koperasi yang Diberikan [Jenis Bantuan/Fasilitasi/Pelayanan]** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi aktif yang menerima suatu jenis bantuan, fasilitasi, atau pelayanan tertentu dari pihak berwenang (pemerintah, lembaga terkait, atau pihak lain) dibandingkan dengan jumlah total koperasi aktif pada periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat jangkauan atau distribusi program bantuan/fasilitasi/pelayanan kepada sektor koperasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Koperasi yang Diberikan Bantuan} = \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diberikan Bantuan}}{\text{Jumlah Total Koperasi}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Koperasi yang Diberikan Bantuan = koperasi yang menerima bantuan atau pendampingan, baik berupa pelatihan, pembiayaan, fasilitas, atau program lainnya. [Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar di wilayah yang dihitung.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi koperasi aktif yang telah menerima [jenis bantuan/fasilitasi/pelayanan] tersebut. Indeks ini menunjukkan tingkat keberhasilan program dalam menjangkau target sasaran.
Sumber Data	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM)
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Nama Indikator	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**
Definisi	**Indeks Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). Indeks ini

Nama Indikator	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
	mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.
Rumus Perhitungan	tnya Koperasi yang Berkualitas $= \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini} - \text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan. [Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.
Sumber Data	Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

Nama Indikator	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informasi ke Formal
Definisi	**Indeks Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi Usaha Kecil (UK) yang sebelumnya beroperasi secara informal (tidak memiliki izin usaha yang sah dan/atau tidak terdaftar secara resmi) dan kemudian berhasil bertransformasi menjadi formal (memiliki izin usaha yang sah dan terdaftar secara resmi) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam memformalkan sektor UK, yang diharapkan dapat meningkatkan akses mereka terhadap berbagai layanan dan peluang pengembangan.
Rumus Perhitungan	:il yang Bertransformasi $= \left(\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil Formal Tahun Ini} - \text{Jumlah Usaha Kecil Formal Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Informal Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Jumlah Usaha Kecil Formal Tahun Ini = jumlah usaha kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, dsb.) pada tahun ini. [Jumlah Usaha Kecil Formal Tahun Lalu = jumlah usaha kecil yang sudah terdaftar secara resmi pada tahun sebelumnya. [Jumlah Usaha Kecil Informal Tahun Lalu = jumlah usaha kecil yang beroperasi secara informal pada tahun lalu (belum terdaftar atau belum memenuhi persyaratan formal).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi UK informal yang berhasil bertransformasi menjadi formal, yang menunjukkan keberhasilan upaya formalisasi.
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

7. Pertumbuhan Wirausaha

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	**Indeks Pertumbuhan Wirausaha** adalah ukuran persentase perubahan jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat perkembangan dan dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas masyarakat dalam memulai usaha baru.
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Wirausaha} = \left(\frac{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Ini} - \text{Jumlah Wirausaha Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun ini. [Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Frekuensi	Tahunan

8. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor

Nama Indikator	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi	**Indeks Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor** adalah ukuran yang menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya) dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor} = \left(\frac{\text{Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor}}{\text{Jumlah Total UKM}}\right) \times 100\%$ Keterangan : [Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor = jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan kegiatan ekspor. [Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau ekspor maupun yang tidak).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih tinggi.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Realisasi Total terhadap Target Investasi

Nama Indikator	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**
Definisi	**Indeks Persentase Peningkatan Investasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{Total Realisasi Investasi}}{\text{Total Target Investasi}} \times 100\%$ Keterangan : [Total Realisasi Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang berhasil direalisasikan dalam suatu periode waktu tertentu. [Total Target Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang ditargetkan untuk dicapai dalam periode waktu yang sama. [100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

Nama Indikator	**Persentase Peningkatan Investasi**
Definisi	**Indeks Persentase Peningkatan Investasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	

	$$\text{Persentase Peningkatan Investasi} = \frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$$ Keterangan : [Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. [Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. [(Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. [Nilai Investasi Awal(Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal): Hasil pembagian ini memberikan rasio peningkatan investasi terhadap nilai investasi awal. [100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**
Definisi	**Indeks Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku usaha (mencakup berbagai skala usaha, dari mikro hingga besar) yang telah memiliki izin usaha yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha yang terdata atau teridentifikasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan dan efektivitas upaya pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pelaku Usaha Berizin} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha dengan Izin Sesuai Ketentuan}}{\text{Total Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Pelaku Usaha dengan Izin Sesuai Ketentuan: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan izin operasional atau izin lain yang relevan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. [Total Jumlah Pelaku Usaha: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah pelaku usaha dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu sektor industri, wilayah, atau negara). [100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan perizinan..
Sumber Data	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nama Indikator	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
Definisi	**Indeks Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah permasalahan dan hambatan yang dilaporkan oleh calon pelaku usaha atau pelaku usaha baru terkait proses pembukaan usaha yang berhasil diselesaikan oleh pihak berwenang (pemerintah daerah, instansi terkait, atau tim fasilitasi) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian masalah dan dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Terselesaikan}}{\text{Total Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi}} \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Terselesaikan: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak permasalahan atau hambatan yang berhasil diatasi atau diselesaikan oleh pelaku usaha dalam proses membuka usaha. [Total Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah permasalahan atau hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam proses membuka usaha. [100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin efektif mekanisme penyelesaian masalah dan semakin baik dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha.
Sumber Data	Unit Layanan Terpadu/Helpdesk Kemudahan Berusaha
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Definisi	**Indeks Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku kepentingan (investor, calon investor, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat umum) yang mengakses dan menggunakan data serta informasi terkait penanaman modal (PMDN dan PMA) yang disediakan oleh pihak berwenang (Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, atau lembaga terkait lainnya) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat efektivitas penyebaran dan relevansi data serta informasi penanaman modal dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan pemahaman perkembangan investasi.

Nama Indikator	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pemanfaatan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna yang Memanfaatkan Data/Informasi}}{\text{Total Jumlah Target Pengguna Data/Informasi}} \times 100\%$$ Keterangan : [Jumlah Pengguna yang Memanfaatkan Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pihak (misalnya, investor, pemerintah daerah, analis, pelaku usaha) yang secara aktif menggunakan data dan informasi penanaman modal yang tersedia. [Total Jumlah Target Pengguna Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan potensi pengguna data dan informasi penanaman modal yang diharapkan (misalnya, seluruh investor terdaftar, seluruh dinas terkait, dll.). [100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi pelaku kepentingan yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal yang disediakan.
Sumber Data	Kementerian Investasi/BKPM
Frekuensi	Tahunan

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada event nasional dan provinsi

Nama Indikator	Jumlah Perolehan Medali Emas pada event nasional dan provinsi
Definisi	Indikator ini mengukur capaian prestasi atlet daerah (kabupaten/kota) dalam bentuk jumlah medali emas yang diperoleh pada kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional, baik melalui Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Nasional (PON), maupun kejuaraan resmi lainnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Jumlah Medali Emas} = \sum \text{Medali Emas yang diraih pada seluruh cabang olahraga}$$ **Keterangan:** ● Tidak berbentuk persentase, tetapi **jumlah absolut** (angka bulat). ● Jika dibedakan: ■ **Medali Emas Provinsi**: Hasil dari keikutsertaan di Porprov atau kejuaraan tingkat Sumatera Barat. ■ **Medali Emas Nasional**: Hasil dari keikutsertaan di PON, Kejurnas, Popnas, atau event nasional resmi.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah medali emas, semakin baik capaian prestasi dan pembinaan atlet daerah.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten/Kota, KONI Kabupaten/Kota dan Provinsi, vPanitia Pelaksana Event (Porprov, PON, Kejurnas, dll), Database atlet dan cabang olahraga

Frekuensi	Tahunan, dua atau empat tahun mengikuti siklus event seperti PON (4 tahun), Porprov (2 tahun).

2. Peringkat event provinsi

Nama Indikator	**Peringkat event provinsi**
Definisi	Peringkat Event Provinsi adalah urutan provinsi berdasarkan jumlah, kualitas, dan/atau dampak event (acara) yang diselenggarakan dalam satu periode tertentu, baik skala lokal, nasional, maupun internasional.
Rumus Perhitungan	*Skor Total Event=(W1×J)+(W2×K)+(W3×D)* **Keterangan:** ● J = Jumlah event yang diselenggarakan ● K = Kualitas event (misalnya dilihat dari skala: lokal, nasional, internasional) ● D = Dampak event (ekonomi, sosial, partisipasi wisatawan) ● W1, W2, W3 = Bobot masing-masing komponen (misalnya: 30%, 40%, 30%) Peringkat ditentukan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah dari skor total setiap provinsi.
Interpretasi	Provinsi dengan peringkat lebih tinggi dianggap lebih aktif dan berdampak dalam menyelenggarakan event yang mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, dan daya tarik wilayahnya.
Sumber Data	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dinas Pariwisata Provinsi
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga

Nama Indikator	**Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga**
Definisi	Persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam kurun waktu tertentu. Olahraga yang dimaksud dapat berupa aktivitas fisik yang dilakukan dengan tujuan kebugaran jasmani, kesehatan, atau rekreasi, minimal 1–2 kali seminggu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Aktif Berolahraga} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk usia} \geq 10 \text{ tahun yang aktif berolahraga}}{\text{Jumlah total penduduk usia} \geq 10 \text{ tahun}} \right) \times 100$ **Keterangan:** ● Penduduk aktif berolahraga adalah individu berusia 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin dalam periode referensi (misalnya seminggu terakhir). ● Total penduduk usia ≥10 tahun mencakup seluruh penduduk dalam kelompok umur tersebut, baik yang berolahraga maupun tidak.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kondisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan.

Nama Indikator	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), · Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Frekuensi	Tahunan

4. Rasio Wirausaha Pemuda

Nama Indikator	Rasio Wirausaha Pemuda
Definisi	**Rasio Wirausaha Pemuda** adalah indikator yang mengukur proporsi pemuda yang berwirausaha dibandingkan dengan total populasi pemuda pada kelompok usia tertentu (biasanya usia 16–30 tahun). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas kewirausahaan baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun rintisan (startup), sebagai ukuran dinamika ekonomi kreatif dan inovasi di kalangan pemuda.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Wirausaha Pemuda} = \frac{\text{Jumlah Pemuda Usia Produktif yang Berwirausaha}}{\text{Total Jumlah Pemuda Usia Produktif}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah Pemuda Usia Produktif yang Berwirausaha: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pemuda dalam rentang usia produktif (biasanya 16- 30 atau 16-40 tahun, tergantung definisi yang digunakan) yang saat ini menjalankan usaha sendiri atau memiliki bisnis. Total Jumlah Pemuda Usia Produktif: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah pemuda dalam rentang usia produktif yang sama dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu wilayah, provinsi, atau negara). 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Rasio menunjukkan **tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda,** semakin tinggi persentasenya berarti semakin tinggi partisipasi pemuda dalam dunia usaha.
Sumber Data	BPS (Sakernas – Survei Angkatan Kerja Nasional), Survei Khusus Kewirausahaan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas

Nama Indikator	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Definisi	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang mengukur proporsi atlet daerah atau nasional yang terpilih dan mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Indeks ini mencerminkan kapasitas pembinaan prestasi olahraga di daerah maupun nasional serta efektivitas sistem talent scouting dan pembinaan atlet.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Atlet Pelatnas} = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas}}{\text{Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar}} \times 100\%$

	Keterangan : - Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak atlet yang terpilih dan mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional untuk cabang olahraga tertentu atau untuk persiapan event olahraga tertentu (misalnya, SEA Games, Asian Games, Olimpiade). - Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah atlet yang dianggap memiliki potensi untuk masuk Pelatnas atau jumlah total atlet yang terdaftar dalam suatu organisasi atau federasi olahraga pada tingkat tertentu (misalnya, tingkat provinsi atau nasional). Pemilihan basis total atlet ini akan memengaruhi interpretasi persentase. - 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa banyak atlet dari suatu wilayah atau cabang olahraga yang lolos ke jenjang pelatnas. Indikator ini dapat digunakan untuk Mengukur efektivitas pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah.Mengevaluasi distribusi talenta dari daerah ke tingkat nasional. Menyusun strategi peningkatan kualitas pelatih, fasilitas, dan scouting
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB/PP Cabang Olahraga
Frekuensi	Tahunan

6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**
Definisi	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan** adalah indikator yang mengukur persentase penduduk (khususnya anak-anak, remaja, dan pemuda) yang terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Pramuka, baik sebagai peserta didik (anggota muda) maupun sebagai pembina, pelatih, dan anggota dewasa. Indeks ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan nonformal yang berbasis karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui aktivitas kepramukaan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Anggota Pramuka}}{\text{Total Jumlah Penduduk Usia Potensial}} \times 100\%$$ Keterangan : - Jumlah Anggota Pramuka: Ini adalah angka yang menunjukkan total jumlah individu yang terdaftar secara resmi sebagai anggota gerakan Pramuka dalam wilayah atau kelompok masyarakat yang Anda teliti. Ini mencakup berbagai tingkatan usia dalam Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pembina). - Total Jumlah Penduduk Usia Potensial: Ini adalah angka yang menunjukkan perkiraan total jumlah penduduk dalam rentang usia yang relevan dengan keanggotaan Pramuka di wilayah atau kelompok masyarakat yang sama. Rentang usia ini biasanya disesuaikan dengan tingkatan dalam Pramuka (misalnya, usia 7- 25 tahun untuk anggota muda). - 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Indeks ini menunjukkan seberapa besar keterlibatan generasi muda dan masyarakat umum dalam kegiatan kepramukaan. Indikator ini berguna untuk

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
	Mengukur efektivitas program kepramukaan nasional & daerah. Menjadi dasar perencanaan kebijakan pendidikan karakter nonformal. Menilai keberhasilan kolaborasi sekolah, kwartir, dan masyarakat
Sumber Data	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas), Kwartir Daerah (Kwarda)
Frekuensi	Tahunan

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik UPS)
Definisi	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan statistik pada **Unit Pengelola Statistik (UPS)** di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis statistik, serta ketersediaan dan kualitas data statistik yang dikelola oleh UPS.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPS UPS} = \frac{\sum(SkorKomponen \times BobotKomponen)}{\sum Bobot}$$ Keterangan : **Kelembagaan Statistik (Bobot 25%)** • Ketersediaan Unit Pengelola Data • Penetapan SDM statistik • SOP Pengelolaan Data **Proses Bisnis Statistik (Bobot 25%)** • Perencanaan dan Pengumpulan Data • Pengolahan dan Penyajian • Diseminasi dan Pemanfaatan Data
Interpretasi	IPS dapat digunakan untuk Mengidentifikasi kelemahan atau gap statistik dalam organisasi. Menyusun roadmap pembangunan statistik sektoral. Meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem statistik nasional
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK penunjukan UPS
Frekuensi	Tahunan

2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1. Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Definisi	**Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah** adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi} = \frac{\sum(S_i \times B_i)}{\sum B_i}$$ Keterangan : - S_i = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0–5) - B_i = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator) - $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot - $\sum B_i$ = Total bobot seluruh indikator (biasanya 100)
Interpretasi	Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)
Sumber Data	Dokumen kebijakan TIK/SPBE daerah, Perkada, SK penanggung jawab keamanan
Frekuensi	Setap tahun (Tahunan)

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Definisi	**Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan** adalah indikator yang mengukur seberapa besar keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Partisipasi ini mencakup kegiatan seni, tradisi lokal, pelestarian warisan budaya, keterlibatan dalam komunitas budaya, serta kontribusi terhadap kebijakan atau program kebudayaan di tingkat lokal dan nasional
Rumus Perhitungan	$$\text{Tingkat Partisipasi Masyarakat (\%)} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi}} \times 100$$ Keterangan : - Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi = jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan (misalnya forum musrenbang, pelatihan, konsultasi publik, gotong royong, dll)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
	Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi = populasi sasaran yang diundang atau berpeluang ikut berpartisipasi Hasil dalam persentase (%).
Interpretasi	Indeks ini berguna untuk Menilai efektivitas program pelestarian budaya. Meningkatkan pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Merancang kebijakan berbasis masyarakat untuk revitalisasi budaya lokal
Sumber Data	Survei Partisipasi Budaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Frekuensi	Setiap Tahun / Dua Tahunan

2. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan

Nama Indikator	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Definisi	**Indeks Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan** adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jenis kesenian tradisional daerah yang masih aktif dilestarikan dan/atau dikembangkan oleh masyarakat, institusi budaya, dan pemerintah daerah dibandingkan dengan total jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata}} \times 100\%$$ Keterangan : a. **Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan** = Kesenian yang masih aktif ditampilkan, diajarkan, atau difasilitasi oleh pemerintah/masyarakat. b. **Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata** = Keseluruhan jenis kesenian tradisional yang tercatat di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). c. **Hasil** dalam bentuk **persentase (%)** menggambarkan tingkat pelestarian terhadap keseluruhan kesenian yang ada.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak jenis kesenian tradisional yang masih lestari dan berkembang. Nilai 100% berarti seluruh jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi telah dilestarikan dan dikembangkan.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Balai Pelestarian Nilai Budaya, komunitas seni lokal, serta observasi lapangan.
Frekuensi	Tahunan (1 kali setiap tahun)

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
Definisi	**Indeks Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal** adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, pelestarian, dan penyebaran informasi sejarah lokal, baik melalui kegiatan formal maupun non-formal.
Rumus Perhitungan	$\text{at terhadap Tinjauan Sejarah Lokal}\ (\%) = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat}} \times 100$ Keterangan : [Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal = Jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal (misalnya: seminar, diskusi sejarah, pelatihan, penggalian cerita lokal, lomba penulisan sejarah lokal, dll). [Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat = Jumlah masyarakat yang diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya berdasarkan undangan, sasaran kegiatan, atau populasi yang relevan. [Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%), yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin aktif masyarakat terlibat dalam memahami dan mengapresiasi sejarah lokal.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, lembaga sejarah lokal, komunitas sejarah, arsip dokumentasi kegiatan, dan survei masyarakat.
Frekuensi	Tahunan (1 kali setiap tahun)

4. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
Definisi	**Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan** adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan}\ (\%) = \frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : [Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah).

	[Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya. [Hasil dihitung dalam persentase (%), yang menunjukkan seberapa banyak warisan budaya yang terjaga dan dilestarikan dari keseluruhan warisan yang ada.
Interpretasi	Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Kemendikbudristek, komunitas budaya, registrasi nasional warisan budaya, hasil inventarisasi daerah.masyarakat.
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun), atau per dua tahun jika inventarisasi memerlukan waktu lebih panjang

5. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan

Nama Indikator	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan**
Definisi	Indeks Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan adalah indikator yang mengukur proporsi unsur budaya yang telah melalui proses penetapan resmi sebagai Cagar Budaya atau Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh lembaga berwenang, dibandingkan dengan total unsur budaya yang teridentifikasi di suatu wilayah pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Budaya Tak Benda yang Ditetapkan } (\%) = \frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : [Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan = Jumlah objek atau elemen cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai warisan budaya yang dilindungi (misalnya, yang terdaftar di UNESCO, terdaftar dalam daftar nasional, atau melalui penetapan oleh pemerintah daerah). [Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Terdaftar = Jumlah keseluruhan cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah tercatat dalam database resmi pemerintah atau lembaga yang berwenang (sebelum penetapan).
Interpretasi	Menunjukkan tingkat legalitas, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya daerah. Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak unsur budaya yang telah mendapatkan status hukum yang sah.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), Kemendikbudristek, basis data nasional Cagar Budaya dan WBTb (https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/ dan https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/), hasil inventarisasi pemerintah daerah.
Frekuensi	Tahunan (1 kali setiap tahun) atau sesuai pembaruan data dari instansi pusat/daerah

6. Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum

Nama Indikator	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum
Definisi	Indeks Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kunjungan wisatawan ke museum dibandingkan dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.Indeks ini mencerminkan tingkat minat dan partisipasi wisatawan terhadap destinasi wisata edukatif dan budaya seperti museum.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kunjungan} = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum}}{\text{Total Potensi Wisatawan atau Target Kunjungan}} \times 100\%$$ Keterangan : [Total Potensi Wisatawan: Ini adalah perkiraan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di mana museum tersebut berada dalam periode waktu yang sama. Ini memberikan gambaran pangsa pasar museum dalam industri pariwisata lokal. [Target Kunjungan: Ini adalah target jumlah kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh pihak museum atau pemerintah daerah untuk periode waktu tersebut. Ini mengukur tingkat pencapaian target kunjungan museum.
Interpretasi	Menunjukkan daya tarik dan kontribusi museum sebagai tujuan wisata. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketertarikan wisatawan terhadap nilai sejarah dan budaya melalui kunjungan ke museum.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, pengelola museum, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kunjungan museum, laporan kunjungan wisatawan daerah
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan (disesuaikan dengan pelaporan daerah)

2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Definisi	**Indeks Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat** adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan minat masyarakat dalam melakukan aktivitas membaca, baik dalam bentuk buku fisik, digital, maupun sumber bacaan lainnya. Indeks ini mencerminkan budaya literasi baca di tengah masyarakat serta efektivitas upaya pembudayaan gemar membaca oleh pemerintah dan lembaga terkait.
Rumus Perhitungan	$$\text{TKMM} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} S_i$$ Keterangan : [Si= Skor pada indikator ke-i (misalnya frekuensi membaca, durasi membaca, jenis bahan bacaan, akses terhadap bahan bacaan, dll.) [nnn = Jumlah indikator yang digunakan

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
	Skor biasanya dinilai dalam rentang 0–100, kemudian dirata-rata untuk mendapatkan nilai TKMM Nilai akhir TKMM juga berada dalam rentang 0–100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan Daerah, survei masyarakat literasi, BPS (jika terintegrasi)
Frekuensi	Setiap 2 tahun (biennial), mengikuti standar nasional survei gemar membaca dari Perpusnas

2. Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki

Nama Indikator	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Definisi	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang berhasil dihimpun, didaftarkan, dan dimiliki oleh pemerintah daerah (melalui museum, perpustakaan, lembaga adat, dll.), dibandingkan dengan total koleksi dan naskah kuno yang teridentifikasi atau diperkirakan ada di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki}}{\text{Jumlah Total Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Teridentifikasi}} \times 100\%$ Keterangan : • Koleksi/Naskah yang Dimiliki: Koleksi/naskah kuno yang telah didata, diamankan, dikelola, dan tercatat resmi oleh instansi pemerintah daerah. • Koleksi/Naskah Teridentifikasi: Semua koleksi/naskah kuno yang terdeteksi ada di wilayah, baik sudah dimiliki maupun belum (masih di masyarakat/lembaga adat/pribadi). • Output: Persentase kepemilikan formal terhadap potensi koleksi nasional di daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pelestarian koleksi budaya daerah
Sumber Data	• Museum Daerah / Dinas Kebudayaan • Perpustakaan Daerah • Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) • Inventarisasi oleh Lembaga Adat / Komunitas Budaya • Database Digital Koleksi Budaya (mis. e-Katalog, e-Pusaka, SIPK)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dikumpulkan melalui laporan kegiatan bidang kebudayaan atau kearsipan)

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Tingkat Ketersediaan Arsip

Nama Indikator	Tingkat Ketersediaan Arsip
Definisi	Tingkat Ketersediaan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase arsip yang tersedia, teridentifikasi, dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan dari keseluruhan arsip yang seharusnya tersedia di suatu unit kerja atau instansi pemerintahan.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Ketersediaan Arsip} = \left(\frac{\text{Jumlah arsip yang tersedia}}{\text{Jumlah arsip yang seharusnya tersedia}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Arsip yang Tersedia dan Siap Diakses = Arsip yang tersimpan secara baik, teridentifikasi, dan dapat ditemukan kembali dalam waktu cepat saat dibutuhkan, baik fisik maupun digital. • Total Arsip yang Seharusnya Tersedia = Seluruh arsip yang seharusnya diciptakan dan disimpan oleh unit kerja sesuai ketentuan retensi dan kewajiban fungsional.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin siap dan tertib pengelolaan arsip instansi tersebut
Sumber Data	• Daftar Arsip Aktif dan Inaktif Unit Pengolah • Daftar Arsip yang Dibutuhkan (berdasarkan permintaan/penggunaan) • Laporan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan • Sistem Informasi Kearsipan (misalnya: SIKD, SIMPAN, JIKN/SIKN)
Frekuensi	Tahunan (Dikumpulkan dan dianalisis dalam laporan pengelolaan arsip tahunan oleh LKD atau unit arsip internal)

2. Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Nama Indikator	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Definisi	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah arsip vital, arsip statis, dan arsip bernilai guna tinggi yang telah mendapat perlindungan dan penyelamatan secara fisik maupun digital oleh instansi pemerintah daerah terhadap total arsip yang seharusnya dilindungi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dilindungi/diselamatkan}}{\text{Jumlah arsip yang wajib dilindungi}}\right) \times 100$ Keterangan : • Arsip yang Telah Dilindungi dan Diselamatkan = Arsip yang telah: ➢ Disimpan di ruang arsip sesuai standar keamanan (suhu, kelembaban, keamanan fisik) ➢ Diduplikasi atau didigitalisasi ➢ Dilengkapi backup

	➢ Termasuk dalam sistem mitigasi risiko (bencana, kebakaran, banjir, dll.) • Total Arsip yang Wajib Dilindungi = Arsip vital, arsip statis, atau arsip bernilai sejarah tinggi yang sudah teridentifikasi sebagai arsip penting
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pelestarian dan penyelamatan arsip strategis pemerintah daerah
Sumber Data	• Laporan Kegiatan Perlindungan Arsip oleh LKD/Perangkat Daerah • Daftar Arsip Vital dan Statis • Dokumen Digitalisasi Arsip • Dokumen Backup Arsip (fisik maupun elektronik) • Audit atau Monitoring Pengelolaan Arsip dari ANRI atau LKD • Sistem Informasi Kearsipan (SIKD, SIKN, JIKN)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilaporkan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam laporan akhir tahun atau evaluasi kearsipan)

3. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Nama Indikator	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**
Definisi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup adalah ukuran persentase masyarakat atau pemohon yang diberi akses secara resmi terhadap arsip yang dikategorikan tertutup setelah melalui proses permohonan, penilaian, dan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Akses Arsip Tertutup yang Dikabulkan}}{\text{Jumlah Total Permohonan Akses Arsip Tertutup}} \times 100\%$ Keterangan : • Permohonan yang Dikabulkan = Permintaan akses terhadap arsip tertutup yang telah lolos proses uji konsekuensi, memenuhi syarat administratif dan hukum, dan disetujui oleh pejabat berwenang. • Total Permohonan Akses = Jumlah seluruh permintaan masyarakat atas arsip tertutup dalam tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan keterbukaan informasi berjalan baik tanpa melanggar aturan kerahasiaan
Sumber Data	• **Daftar Permohonan Akses Arsip Tertutup** • **Dokumen Hasil Uji Konsekuensi** • **Surat Persetujuan Akses Arsip dari Instansi Berwenang** • **Sistem Informasi Pelayanan Arsip (SIKD, JIKN, atau aplikasi internal LKD)** • **Laporan Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah**
Frekuensi	Tahunan (Data dikumpulkan berdasarkan laporan tahunan layanan kearsipan atau permohonan informasi publik)

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Definisi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah total volume hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya yang ditangkap oleh nelayan dari perairan laut dan perairan umum daratan (PUD) dalam satu periode waktu tertentu, baik oleh nelayan kecil, nelayan kapal besar, atau unit penangkapan lainnya, yang dinyatakan dalam satuan ton.

Rumus Perhitungan	`Jumlah Produksi Perikanan Tangkap`
	`= ∑ (Volume Hasil Tangkapan per Jenis Ikan)`
	Keterangan :
	• Volume hasil tangkapan dapat diambil dari data rekapitulasi:
	➢ Laporan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
	➢ Pencatatan nelayan per alat tangkap
	➢ Laporan harian/monitoring petugas pelabuhan perikanan
	• Biasanya dibagi menurut:
	➢ Lokasi tangkap (laut/pud)
	➢ Jenis kapal dan alat tangkap
	➢ Jenis komoditas (ikan pelagis, demersal, udang, cumi, dll.)

Interpretasi	Semakin besar angka, menunjukkan aktivitas dan hasil tangkap perikanan meningkat
Sumber Data	• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten • Sistem Informasi Statistik Perikanan Tangkap (SISDATIK), KKP • Data Produksi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Perikanan Tangkap
Frekuensi	Bulanan dan Tahunan (Biasanya direkap tahunan dalam publikasi BPS atau laporan SKPD)

2. Produksi Perikanan Budidaya

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Definisi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut).

Rumus Perhitungan	`Jumlah Produksi Perikanan Budidaya`
	`= ∑ (Volume Panen Komoditas Budidaya per Jenis dan Lokasi)`
	Keterangan :

	• Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok.
	• Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan:
	  ○ Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut
	  ○ Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll.
	  ○ Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll.

Interpretasi	Semakin tinggi produksi, menunjukkan pertumbuhan sektor budidaya dan ketahanan pangan daerah meningkat
Sumber Data	• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota • Data Laporan Produksi Pembudidaya Ikan • Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya (SISDATIK), KKP • BPS – Statistik Perikanan Budidaya • Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan UPTD Perikanan
Frekuensi	Bulanan dan Tahunan (Biasanya dikompilasi secara tahunan dalam laporan kinerja atau publikasi statistik perikanan)

3. Luasan Kawasan Konservasi

Nama Indikator	**Luasan Kawasan Konservasi**
Definisi	Luasan Kawasan Konservasi adalah total luas wilayah perairan atau daratan yang ditetapkan secara hukum sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tujuan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara lestari, baik secara nasional maupun daerah.

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah SDM Kearsipan yang Telah Mengikuti Peningkatan Kompetensi}}{\text{Jumlah Total SDM Kearsipan yang Ada}} \times 100\%$
	Keterangan :
	• SDM yang Telah Mengikuti Peningkatan Kompetensi = Aparatur atau pegawai bidang kearsipan yang mengikuti kegiatan resmi seperti:
	  ➢ Pelatihan/Diklat
	  ➢ Sertifikasi kompetensi arsiparis
	  ➢ Workshop/Bimtek oleh ANRI, LKD, atau instansi lainnya
	• Jumlah Total SDM Kearsipan = Semua pegawai yang menjalankan fungsi kearsipan (baik arsiparis fungsional maupun pelaksana bidang kearsipan)

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan komitmen dan pencapaian pelestarian sumber d
Sumber Data	Bappeda/OPD Lingkungan Hidup Daerah
Frekuensi	Tahunan (Bisa diperbarui saat ada penetapan kawasan baru atau perluasan kawasan)

aya alam yang se

4. Angka Konsumsi Ikan

Nama Indikator	Angka Komsumsi Ikan
Definisi	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran persentase sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang kearsipan (baik fungsional arsiparis maupun pelaksana teknis arsip) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau pendidikan formal/non-formal, dibandingkan dengan jumlah total SDM kearsipan yang ada.

Rumus Perhitungan	`Luasan Kawasan Konservasi`
	`= ∑ (Luas per Kawasan Konservasi yang Telah Ditetapkan secara Legal)`
	Keterangan :
	Luas dihitung hanya dari kawasan konservasi yang:
	• Sudah ditetapkan dengan SK resmi (Pusat/Daerah)
	• Telah memiliki koordinat, peta, dan nama kawasan
	• Masuk dalam sistem nasional atau daerah Luas
	kawasan dapat berasal dari:
	• Pengukuran GPS/Geospasial
	• Peta RTRW, RZWP3K
	• Dokumen legal (SK Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota)

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas SDM dalam pengelolaan arsip daerah
Sumber Data	• Daftar Nama SDM Kearsipan di OPD/LKD • Laporan Pelatihan/Bimtek/Workshop/Sertifikasi Arsiparis • SK Penugasan atau Sertifikat Peserta • Data dari BKPSDM dan Lembaga Arsip Nasional/Daerah • Sistem Informasi Kepegawaian dan Kearsipan (SIASN, SIMKA, dll.)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dicatat dalam laporan tahunan kepegawaian atau evaluasi kearsipan tahunan oleh LKD)

3.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Definisi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang dinyatakan dalam persentase (%).
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pertumbuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah kunjungan tahun ini} - \text{Jumlah kunjungan tahun lalu}}{\text{Jumlah kunjungan tahun lalu}}\right) \times 100\%$$ Keterangan :

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
	➢ Jumlah Wisatawan Tahun N: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2024) ➢ Jumlah Wisatawan Tahun N-1: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2023) ➢ Data bisa dihitung untuk: • Total keseluruhan wisatawan • Wisatawan nusantara (domestik) • Wisatawan mancanegara (internasional)
Interpretasi	Nilai positif menandakan pertumbuhan, negatif menandakan penurunan
Sumber Data	• Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota • Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Pariwisata • Data pintu masuk destinasi (bandara, pelabuhan, terminal, gerbang kawasan wisata) • Laporan pengelola destinasi wisata, hotel, event pariwisata
Frekuensi	Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan)

2. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Definisi	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata adalah tingkat pertumbuhan jumlah media promosi dan pemasaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dan/atau pelaku pariwisata untuk mempromosikan destinasi, event, dan potensi pariwisata daerah dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhit1ungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah media pemasaran tahun ini} - \text{Jumlah media pemasaran tahun lalu}}{\text{Jumlah media pemasaran tahun lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Media Tahun ini: Total media pemasaran pariwisata yang digunakan pada tahun berjalan • Jumlah Media Tahun Lalu: Total media pada tahun sebelumnya • Media yang dihitung termasuk unik, bukan duplikasi • Sumber harus terdokumentasi (misalnya: 1 akun IG aktif, 1 channel YouTube aktif = 2 media)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan upaya promosi pariwisata yang semakin masif dan modern
Sumber Data	Rekapitulasi anggaran dan output promosi
Frekuensi	Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal)

3. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Nama Indikator	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase KI} = \left(\frac{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki KI}}{\text{Jumlah total pelaku ekonomi kreatif}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki KI: Individu/badan usaha ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat KI aktif • Total Pelaku Ekraf: Seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif yang tercatat aktif di daerah • Jenis KI dapat berupa: hak cipta, merek, paten, desain industri, dll
Interpretasi	Nilai tinggi berarti tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf meningkat
Sumber Data	• Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kekayaan Intelektual) • Laporan komunitas ekonomi kreatif / UMKM
Frekuensi	Tahunan (bisa juga semesteran jika data tersedia dari sistem pendaftaran KI online)

4. Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Definisi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah proporsi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih menjalankan aktivitas usaha dan telah terverifikasi atau tervalidasi melalui proses identifikasi oleh pemerintah daerah, asosiasi resmi, atau lembaga terkait, dibandingkan dengan total pelaku yang terdata.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Aktif dan Tervalidasi} = \left(\frac{\text{Jumlah pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi}}{\text{Jumlah total pelaku yang terdata}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Pelaku Aktif dan Tervalidasi: Pelaku usaha yang masih menjalankan kegiatan usaha, memiliki identitas yang sah/diverifikasi (NPWP, NIB, izin usaha, atau diverifikasi oleh dinas/komunitas) • Total Pelaku Terdata: Semua pelaku parekraf yang tercatat dalam database daerah/nasional (baik yang aktif maupun tidak aktif)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, berarti data semakin akurat dan usaha parekraf aktif lebih banyak

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Sumber Data	• Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi/Kabupaten/Kota • Database Sistem Informasi Industri Kreatif (SIKRIK), Sistem Informasi Kepariwisataan • Asosiasi Pariwisata dan Ekraf (ASITA, PHRI, Bekraf, dll) • Pendataan lapangan, hasil survei atau registrasi ulang pelaku parekraf
Frekuensi	**Tahunan** (bisa triwulanan untuk keperluan monitoring dinamis jika berbasis digital)

3.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Definisi	Indeks Peningkatan Produksi Tanaman Pangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau perubahan volume produksi tanaman pangan dari waktu ke waktu dalam satu wilayah tertentu. Indeks ini memberikan gambaran tentang efektivitas program peningkatan produksi, keberhasilan teknologi pertanian, ketersediaan sarana produksi, serta kondisi iklim dan lingkungan yang mempengaruhi produksi tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun Berjalan}}{\text{Produksi Tahun Dasar}}\right) \times 100$ Keterangan : • Produksi Tahun Berjalan: Total produksi tanaman pangan (dalam ton atau satuan relevan) pada tahun berjalan. • Produksi Tahun Dasar: Total produksi pada tahun acuan yang dijadikan pembanding. • Nilai indeks 100 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun dasar. • Nilai indeks > 100 berarti terjadi peningkatan produksi, dan < 100 berarti terjadi penurunan.
Interpretasi	Nilai > 100 menunjukkan peningkatan produksi; nilai < 100 menunjukkan penurunan dibanding tahun dasar
Sumber Data	Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Survei Pertanian (SPP), SIMLUHTAN
Frekuensi	Tahunan

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Holtikultura
Definisi	**Indeks Peningkatan Produksi Hortikultura** adalah indikator yang mengukur **tingkat perubahan atau pertumbuhan produksi** komoditas hortikultura dari waktu

	ke waktu di suatu wilayah. Komoditas hortikultura mencakup buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan tanaman hias. Indeks ini mencerminkan keberhasilan pengembangan sektor hortikultura, termasuk produktivitas lahan, intensifikasi budidaya, adopsi teknologi, dan dukungan kebijakan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Peningkatan Produksi Hortikultura} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun Berjalan}}{\text{Produksi Tahun Dasar}}\right) \times 100$$ Keterangan : [Produksi Tahun Berjalan: Total produksi hortikultura (dalam ton) pada tahun pengamatan. [Produksi Tahun Dasar: Produksi hortikultura pada tahun acuan (misalnya tahun 2020). ▯ Nilai indeks 100 berarti tidak ada perubahan dari tahun dasar. Nilai indeks > 100 ▯ menunjukkan peningkatan produksi. ▯ Nilai indeks < 100 menunjukkan penurunan produksi.
Interpretasi	Nilai >100 = peningkatan produksi; Nilai <100 = penurunan produksi
Sumber Data	Dinas Pertanian (Bidang Hortikultura), BPS (Survei Hortikultura), SIMLUHTAN, SIHORTI
Frekuensi	Tahunan, atau per musim tanam jika tersedia

3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Nama Indikator	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**
Definisi	**Indeks Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur **tingkat perubahan volume produksi** komoditas peternakan dari waktu ke waktu. Komoditas peternakan meliputi daging, susu, telur, dan hasil ternak lainnya. Indeks ini menunjukkan performa subsektor peternakan dalam meningkatkan output produksinya dan menjadi dasar evaluasi kebijakan atau program pembangunan peternakan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Peningkatan Produksi Peternakan} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun Berjalan}}{\text{Produksi Tahun Dasar}}\right) \times 100$$ Keterangan : [Produksi Tahun Berjalan: Total produksi komoditas peternakan (dalam ton, liter, atau butir) pada tahun pengamatan. [Produksi Tahun Dasar: Produksi komoditas peternakan pada tahun acuan (misalnya tahun 2020). ▯ Nilai indeks 100 menunjukkan tidak ada perubahan. Nilai indeks > 100 ▯ berarti produksi meningkat. ▯ Nilai indeks < 100 berarti produksi menurun.
Interpretasi	Nilai >100 = peningkatan; <100 = penurunan produksi dibandingkan tahun dasar
Sumber Data	Dinas Peternakan, Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Produksi Peternakan, Ditjen PKH Kementan
Frekuensi	Tahunan (dapat dilengkapi semesteran/kuartalan jika tersedia)

4. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B

Nama Indikator	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
Definisi	Indeks Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi lahan pertanian yang secara resmi telah ditetapkan sebagai LP2B terhadap total lahan yang direncanakan atau diusulkan sebagai LP2B di dalam dokumen tata ruang daerah. Indeks ini mencerminkan komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks LP2B} = \left(\frac{\text{Luas Lahan yang Telah Ditetapkan sebagai LP2B}}{\text{Total Lahan yang Direncanakan untuk LP2B}}\right) \times 100$$ Keterangan : • Luas Lahan yang Telah Ditetapkan sebagai LP2B: Luas lahan pertanian yang telah memiliki dasar hukum (misalnya Perda atau SK Kepala Daerah) sebagai LP2B. • Total Lahan yang Direncanakan untuk LP2B: Luas lahan yang tercantum dalam dokumen RTRW atau dokumen rencana lainnya sebagai target LP2B.
Interpretasi	Nilai mendekati 100% menunjukkan keberhasilan dalam perlindungan lahan pertanian
Sumber Data	Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Tata Ruang, ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, dokumen RTRW, dokumen Perda LP2B
Frekuensi	Tahunan

5. Cakupan Luas Lahan Sawah Dilingdungi (LSD)

Nama Indikator	Cakupan Luas Lahan Sawah Dilingdungi (LSD)
Definisi	Cakupan Luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) adalah persentase luas lahan sawah yang telah ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang Dilindungi berdasarkan kebijakan nasional, dibandingkan dengan total luas lahan sawah eksisting dalam wilayah administrasi tertentu. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar perlindungan terhadap lahan sawah produktif agar tidak dialihfungsikan demi ketahanan pangan nasional.
Rumus Perhitungan	*LSD (%) = (Luas lahan sawah yang dilindungi / Total luas lahan sawah eksisting) x 100%* **Keterangan:** • **Luas lahan sawah yang dilindungi**: Luas lahan sawah yang telah masuk dalam peta LSD yang ditetapkan oleh pemerintah. • **Total luas lahan sawah eksisting**: Luas seluruh sawah aktif yang terdata melalui citra satelit atau verifikasi lapangan. • Hasil dikalikan 100 untuk memperoleh nilai dalam persen (%).

Nama Indikator	Cakupan Luas Lahan Sawah Dilingdungi (LSD)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase LSD, maka semakin besar komitmen dan keberhasilan suatu wilayah dalam melindungi lahan sawah dari alih fungsi. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh lahan sawah eksisting telah memiliki status perlindungan hukum dan tata ruang.
Sumber Data	• Kementerian ATR/BPN (Peta Lahan Sawah yang Dilindungi) • Kementerian Pertanian (peta lahan sawah eksisting dari citra satelit) • Badan Pusat Statistik (verifikasi data lahan) • Pemerintah Daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW)
Frekuensi	Tahunan

7. Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Nama Indikator	Peningkatan produksi Perkebunan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Definisi	Peningkatan produksi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan adalah perubahan (kenaikan) jumlah hasil produksi dari subsektor-sektor pertanian tersebut dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan produksi, efektivitas sarana produksi, serta dukungan kebijakan sektor pertanian.
Rumus Perhitungan	*Persentase Peningkatan Produksi = [(Produksi Tahun Berjalan - Produksi Tahun Sebelumnya) / Produksi Tahun Sebelumnya] × 100%* **Keterangan:** • **Produksi Tahun Berjalan**: Jumlah total hasil produksi (dalam ton/ekor/liter, tergantung jenis komoditas) pada tahun yang sedang dianalisis. • **Produksi Tahun Sebelumnya**: Jumlah total hasil produksi pada tahun sebelumnya sebagai pembanding. • Rumus ini dapat diterapkan secara agregat maupun per komoditas.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin menunjukkan peningkatan produktivitas dan keberhasilan intervensi kebijakan/program pertanian. Namun, interpretasi juga perlu memperhatikan faktor iklim, ketersediaan sarana produksi, hama/penyakit, dan fluktuasi pasar.
Sumber Data	• Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota • Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan • Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan)
Frekuensi	Tahunan, triwulanan/ Semesteran

8. Peningkatan Produksi Perkebunan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Perkebunan
Definisi	Peningkatan produksi perkebunan adalah perubahan jumlah hasil produksi komoditas perkebunan utama (dalam satuan ton atau kilogram) dari satu periode ke periode lainnya, yang mencerminkan pertumbuhan sektor perkebunan dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Peningkatan Produksi} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun Ini} - \text{Produksi Tahun Lalu}}{\text{Produksi Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** • **Produksi Tahun Ini** = total produksi perkebunan pada tahun berjalan (dalam ton atau kg) • **Produksi Tahun Lalu** = total produksi perkebunan pada tahun sebelumnya (dalam ton atau kg) • Hasil perhitungan dinyatakan dalam persentase (%) sebagai indikator pertumbuhan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai positif, semakin baik kinerja produksi subsektor perkebunan
Sumber Data	Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Data Statistik Perkebunan Tahunan
Frekuensi	Tahunan

10. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Nama Indikator	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Definisi	Indeks Tingkat Pengendalian PHMS adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis oleh pemerintah daerah. Pengendalian ini mencakup aktivitas pencegahan, surveilans, deteksi dini, penanganan kasus, dan eliminasi penyakit pada hewan ternak yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. PHMS adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar, menghambat perdagangan hewan/produk hewan, dan/atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza, Rabies, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD, dll.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks PHMS} = \left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Bebas PHMS}}{\text{Jumlah Wilayah yang Terjangkit atau Berisiko PHMS}}\right) \times 100$$ **Alternatif lain (jika berbasis kegiatan):** $$\text{Indeks PHMS} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengendalian yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Pengendalian}}\right) \times 100$$ Keterangan : • **Jumlah Wilayah Bebas PHMS:** Kecamatan/desa/kabupaten yang dinyatakan bebas atau nihil kasus PHMS berdasarkan hasil surveilans.

Nama Indikator	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**
	• **Wilayah Terjangkit/Berpotensi Terjangkit:** Wilayah dengan riwayat atau potensi penyebaran PHMS menurut hasil pemetaan risiko.
Interpretasi	Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh wilayah telah dikendalikan atau seluruh rencana kegiatan pengendalian telah dilaksanakan.
Sumber Data	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten, Pusat Data Peternakan (SIMPONI), Laporan Surveilans, Posko PHMS
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan, tergantung jenis penyakit dan siklus pemantauan

11. Persentase Unit Usaba Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Nama Indikator	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**
Definisi	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan jaminan kelayakan higienis sanitasi dari unit usaha yang menangani pangan asal hewan (seperti daging, telur, susu, dll.) terhadap ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat resmi yang diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi berdasarkan hasil audit oleh otoritas veteriner. Sertifikat ini menjamin bahwa produk pangan asal hewan ditangani secara aman dan layak dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	$\text{ersentase Usaha Bersertifikat NKV} = \left(\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan Bersertifikat Pra-NKV atau NKV}}{\text{Jumlah Total Unit Usaha Pangan Asal Hewan}}\right) \times 100$ Keterangan : Data administratif penerbitan sertifikat oleh otoritas veteriner, hasil audit dan inspeksi unit usaharisiko.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak unit usaha yang telah memenuhi standar higienis sanitasi dan keamanan pangan.
Sumber Data	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten, Otoritas Veteriner, Sistem Informasi Kesmavet (SIKESWAN)
Frekuensi	Tahunan (minimal), atau per triwulan jika tersedia pembaruan data keg verifikasi/penerbitan sertifikat

iatan

12. Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Nama Indikator	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**
Definisi	Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah indikator yang menggambarkan proporsi kejadian bencana di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang telah mendapatkan tindakan penanganan atau

	intervensi, baik berupa bantuan benih, pakan, vaksin, relokasi, rehabilitasi, maupun pemulihan lahan dan produksi. Bencana pertanian dapat meliputi bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa), bencana non-alam (serangan hama penyakit tanaman/hewan), serta bencana sosial yang berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penanganan Bencana Pertanian} = \left(\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Bencana Pertanian}}\right) \times 100$$ Keterangan : ≥ 90% Hampir seluruh kejadian bencana ditangani, sangat responsif
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin responsif dan efektif pemerintah dalam menangani bencana pertanian.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten
Frekuensi	Triwulanan / Tahunan

13. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan

Nama Indikator	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**
Definisi	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan** adalah indikator yang menggambarkan proporsi tenaga penyuluh pertanian (PNS, THL-TBPP, swadaya, maupun swasta) yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, studi lanjut, atau program penguatan kompetensi lainnya dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah total penyuluh yang terdata aktif.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase SDM Penyuluh yang Ditingkatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas}}{\text{Jumlah Total Penyuluh Pertanian Aktif}}\right) \times 100$$ Keterangan : Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak SDM penyuluh pertanian di Kota Padang (atau wilayah Sumatera Barat yang Anda fokuskan) yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan). Program peningkatan kompetensi ini bisa berupa pelatihan teknis pertanian, pelatihan metodologi penyuluhan, studi banding, sertifikasi, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya yang relevan dengan tugas mereka.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, maka semakin baik kompetensi SDM penyuluh dalam mendampingi petani dan mengimplementasikan inovasi
Sumber Data	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten
Frekuensi	Tahunan (atau per semester, jika dimungkinkan)

3.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

Nama Indikator	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi
Definisi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi adalah proporsi jumlah pelaku usaha di bidang perdagangan yang telah dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah daerah (melalui dinas terkait) dalam proses penerbitan Izin Usaha Perdagangan (IUP), baik secara langsung maupun melalui sistem Online Single Submission (OSS), dibandingkan dengan total jumlah permohonan atau kebutuhan perizinan usaha perdagangan pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah IUP yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan atau Permohonan IUP}} \right) \times 100$ Keterangan : • **Jumlah IUP yang Difasilitasi**: Jumlah izin usaha perdagangan yang prosesnya dibantu oleh pemda (baik diterbitkan atau dalam proses). • **Jumlah Total Kebutuhan atau Permohonan IUP**: Total pengajuan izin atau estimasi pelaku usaha yang seharusnya memiliki IUP dalam periode tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan peran aktif pemda dalam mendorong legalitas dan kemudahan usaha sektor perdagangan
Sumber Data	Dinas Perdagangan/Koperasi dan UKM
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan

2. Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya

Nama Indikator	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
Definisi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya adalah proporsi sarana atau infrastruktur perdagangan (seperti pasar rakyat, toko kelontong, kios, los, atau fasilitas distribusi perdagangan lainnya) yang telah dilakukan peningkatan kualitas fisik dan/atau manajemen oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan total jumlah sarana perdagangan yang ada dan membutuhkan peningkatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang Ditingkatkan}}{\text{Total Sarana yang Direncanakan untuk Ditingkatkan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Sarana yang Ditingkatkan: Jumlah unit sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya (secara fisik, fungsional, atau manajerial) dalam periode tertentu. • Total Sarana yang Direncanakan: Jumlah total sarana perdagangan yang telah diidentifikasi membutuhkan peningkatan kualitas berdasarkan hasil pendataan atau rencana kerja.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan upaya nyata peningkatan kualitas sarana perdagangan oleh pemerintah daerah

Sumber Data	Dinas Perdagangan atau Disperindag
Frekuensi	Tahunan (biasanya akhir tahun anggaran)

3. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Nama Indikator	**Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**
Definisi	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) adalah persentase jumlah komoditas kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya tetap stabil atau terkendali sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP), dibandingkan dengan total seluruh komoditas Bapokting yang dipantau dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Stabilisasi Harga } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Komoditas yang Harganya Stabil}}{\text{Total Komoditas yang Dipantau}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah Komoditas yang Harganya Stabil: Komoditas Bapokting yang tidak mengalami kenaikan/penurunan harga di luar batas wajar selama periode tertentu. • Total Komoditas yang Dipantau: Jumlah total komoditas Bapokting yang menjadi objek pemantauan harga.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
Sumber Data	Dinas Perdagangan (Disperindag)
Frekuensi	Mingguan, Bulanan, atau Tahunan

4. Nilai Ekspor Barang

Nama Indikator	**Nilai ekspor barang**
Definisi	Nilai Ekspor Barang adalah total nilai ekonomi dari seluruh barang yang dikirim dari suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota/negara) ke luar negeri dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang (biasanya USD atau Rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan Free on Board (FOB), yaitu nilai barang sampai di pelabuhan muat, tidak termasuk biaya pengiriman dan asuransi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Nilai Ekspor Barang (FOB)} = \sum (\text{Volume Ekspor} \times \text{Harga per Unit})$$ Keterangan : • **Volume Ekspor**: Jumlah barang yang diekspor (dalam satuan kg, ton, liter, dsb.). • **Harga per Unit**: Nilai per satuan barang pada saat transaksi ekspor. • **FOB (Free on Board)**: Nilai barang saat berada di pelabuhan ekspor tanpa ongkos kirim dan asuransi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar kontribusi daerah terhadap ekspor nasional dan pertumbuhan ekonomi

Nama Indikator	Nilai ekspor barang
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

5. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Nama Indikator	Persentase penanganan pengaduan konsumen
Definisi	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen adalah persentase jumlah pengaduan dari konsumen yang berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh instansi berwenang (misalnya Dinas Perdagangan atau Badan Perlindungan Konsumen) terhadap total pengaduan yang masuk dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Pengaduan yang Ditangani: Pengaduan yang telah mendapatkan tindak lanjut atau penyelesaian. • Jumlah Pengaduan yang Masuk: Seluruh pengaduan konsumen yang diterima secara formal, baik melalui offline maupun online.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan kinerja pelayanan pengaduan yang baik dan perlindungan konsumen yang efektif
Sumber Data	Dinas Perdagangan (Bidang Perlindungan Konsumen)
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

6. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan
Definisi	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah (secara langsung atau tidak langsung), terhadap jumlah total kegiatan promosi yang direncanakan atau diajukan dalam satu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Promosi yang Difasilitasi } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan Promosi yang Direncanakan/Diajukan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi: Kegiatan promosi produk lokal yang benar-benar dilaksanakan dengan dukungan pemerintah daerah. • Jumlah Total Kegiatan yang Direncanakan: Termasuk usulan promosi dari pelaku usaha, program kerja dinas, atau rencana tahunan promosi daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan dukungan aktif pemerintah terhadap pengembangan produk lokal

Sumber Data	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri

Nama Indikator	Persentase realisasi investasi sektor industri
Definisi	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri adalah persentase dari jumlah realisasi investasi yang telah direalisasikan oleh pelaku usaha (dalam negeri maupun asing) di sektor industri dan kawasan industri terhadap total nilai target investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Realisasi Investasi } (\%) = \left(\frac{\text{Nilai Realisasi Investasi}}{\text{Target Nilai Investasi}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Nilai Realisasi Investasi: Nilai aktual investasi yang telah masuk dan dilaporkan secara resmi. • Target Nilai Investasi: Nilai investasi yang ditetapkan sebagai target oleh pemerintah dalam satu tahun atau periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan program promosi investasi dan minat investor terhadap sektor industri daerah
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan

Nama Indikator	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan
Definisi	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang Diterbitkan adalah persentase jumlah Izin Usaha Industri yang berhasil diterbitkan oleh pemerintah daerah (melalui sistem OSS atau secara langsung) terhadap total jumlah permohonan izin usaha industri yang diterima dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase IUI yang Diterbitkan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah IUI yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan IUI}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah IUI yang Diterbitkan: Izin Usaha Industri yang telah melalui proses verifikasi dan resmi dikeluarkan.

	• Jumlah Permohonan IUI: Semua permohonan IUI yang masuk, baik yang diterima, ditolak, maupun sedang diproses.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efisiensi dan responsivitas pelayanan perizinan industri
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

3. Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini

Nama Indikator	Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini
Definisi	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini adalah kondisi di mana data dan informasi terkait sektor industri yang tersedia mencakup semua elemen penting (lengkap), sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (akurat), dan diperbarui secara berkala (terkini).
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Ketersediaan Informasi Industri } (\%) = \left(\frac{\text{Nilai Lengkap} + \text{Nilai Akurat} + \text{Nilai Terkini}}{3} \right)$ Keterangan : • Nilai Lengkap = (Jumlah elemen data industri yang tersedia / jumlah total elemen yang wajib tersedia) × 100 • Nilai Akurat = (Jumlah data industri yang valid / jumlah total data) × 100 • Nilai Terkini = (Jumlah data industri yang diperbarui dalam periode berjalan / jumlah total data) × 100
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin berkualitas informasi industri yang dapat diakses dan digunakan
Sumber Data	Dinas Perindustrian
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

3.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan
Definisi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan adalah persentase dari jumlah program/kegiatan yang telah direalisasikan (secara fisik maupun administratif) dibandingkan dengan total program transmigrasi yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Program yang Direncanakan}} \right) \times 100$ Keterangan :

Nama Indikator	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan
	• Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan: Program/kegiatan transmigrasi yang sudah terealisasi (fisik dan/atau administratif) hingga periode pelaporan. • Jumlah Program yang Direncanakan: Keseluruhan program/kegiatan transmigrasi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi efektivitas dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi sesuai rencana
Sumber Data	Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2. Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang

Nama Indikator	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang
Definisi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang adalah perbandingan antara luas kawasan transmigrasi yang telah menunjukkan perkembangan secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap total luas kawasan transmigrasi yang ada dalam suatu wilayah administrasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kawasan Transmigrasi yang Berkembang } (\%) = \left(\frac{\text{Luas Kawasan Berkembang}}{\text{Total Luas Kawasan Transmigrasi}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Luas Kawasan Berkembang: Luas wilayah transmigrasi yang telah berkembang secara fisik, ekonomi, dan sosial berdasarkan hasil evaluasi atau verifikasi. • Total Luas Kawasan Transmigrasi: Seluruh kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan bahwa semakin banyak kawasan transmigrasi yang berhasil berkembang
Sumber Data	Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan

Nama Indikator	Persentase transmigrant yang dibina dan diberdayakan
Definisi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan adalah persentase jumlah individu atau kepala keluarga transmigran yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah atau instansi terkait terhadap total jumlah transmigran yang tercatat dalam suatu wilayah transmigrasi.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Transmigran Dibina dan Diberdayakan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan}}{\text{Total Jumlah Transmigran}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan: Transmigran yang telah mengikuti minimal satu program pembinaan atau pemberdayaan dalam periode pelaporan.

Nama Indikator	Persentase transmigrant yang dibina dan diberdayakan
	• Total Jumlah Transmigran: Seluruh transmigran yang terdata aktif dalam wilayah transmigrasi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan bahwa semakin banyak kawasan transmigrasi yang berhasil berkembang
Sumber Data	Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten
Frekuensi	Tahun (dapat di-breakdown per semester)

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01. SEKRETARIAT DAERAH

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Definisi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, berdasarkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh kepala daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rumus Perhitungan	$$\textbf{Nilai EKPPD} = \frac{\sum(\text{Bobot Indikator} \times \text{Skor Capaian})}{\sum \text{Total Bobot}}$$ **Keterangan:** • **Bobot Indikator**: Proporsi kepentingan dari masing-masing indikator (misalnya, tata kelola pemerintahan bisa bernilai 25%, pelayanan publik 30%, dll.). • **Skor Capaian**: Nilai kuantitatif dari masing-masing indikator berdasarkan hasil evaluasi. • **Total Bobot**: Jumlah seluruh bobot indikator yang menjadi dasar penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif dan efisien pemerintah dalam menjalankan tugas.
Sumber Data	• Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) – disusun oleh Pemda. • Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim Nasional (Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dll.). • Data Pendukung dari: ➢ BPS (Badan Pusat Statistik) ➢ BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ➢ KemenPAN-RB, dan lembaga terkait lainnya ➢ Sistem informasi pemerintah daerah (e.g., SIPD)
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti
Definisi	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang Ditindaklanjuti adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) kerja sama antar daerah ke dalam bentuk implementasi nyata, seperti perjanjian kerja sama operasional (PKS) atau kegiatan bersama. Indikator ini mencerminkan komitmen dan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi bersama melalui kolaborasi lintas wilayah untuk pelayanan publik, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kerjasama Ditindaklanjuti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kesepakatan/MoU Kerjasama}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** ● **Kerjasama yang Ditindaklanjuti** = MoU yang telah menghasilkan PKS atau telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan konkret. ● **Jumlah Kesepakatan/MoU Kerjasama** = seluruh nota kesepahaman kerja sama antar daerah yang telah ditandatangani selama periode evaluasi (biasanya 1 tahun).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak kerjasama antar daerah yang telah ditindaklanjuti dengan baik
Sumber Data	● Dokumen kerja sama daerah (MoU dan PKS) ● Laporan Bagian Kerjasama atau Biro Pemerintahan Setda ● LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) ● Sistem informasi kerja sama daerah (e.g., SIMKERDA – Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Daerah)
Frekuensi	Tahunan

3. Nilai SAKIP

Nama Indikator	Nilai SAKIP
Definisi	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur dan melaporkan kinerja secara akuntabel sesuai dengan perencanaan strategis dan anggaran yang digunakan. Nilai SAKIP adalah skor hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja, serta pencapaian tujuan organisasi di pemerintah daerah atau instansi.
Rumus Perhitungan	Tidak ada satu rumus matematis tunggal untuk Nilai SAKIP karena penilaiannya bersifat **komprehensif dan kualitatif-kuantitatif**, namun mencakup lima komponen utama berikut:

Nama Indikator	Nilai SAKIP
	Komponen Penilaian SAKIP **Bobot (%)** 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 10% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 35% Nilai akhir diberikan dalam skal huruf mutu. a **0,00 – 100,00** dan dikategorikan berdasarkan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai sakip menunjukan kinerja instansi semakin akuntabel dan efisien, dan penggunaan anggaran semakin tepat.
Sumber Data	● Evaluasi Kementerian PAN-RB (dengan Surat Hasil Evaluasi SAKIP) ● Dokumen pendukung: ■ Rencana Strategis (Renstra) ■ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ■ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ■ Perjanjian Kinerja (PK) ■ Hasil evaluasi internal oleh Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

4. Indeks Kematangan Organisasi

Nama Indikator	Indeks kematangan organisasi
Definisi	Indeks Kematangan Organisasi (IKO) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan suatu organisasi pemerintah dalam hal penerapan sistem, tata kelola, proses, sumber daya manusia, budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Rumus Perhitungan	$$\textbf{Indeks Kematangan Organisasi} = \frac{\sum(\text{Skor Tiap Dimensi})}{\text{Jumlah Dimensi}}$$ **Keterangan :** ● Setiap dimensi diberi skor berdasarkan tingkat kematangan (biasanya 1–5). ● Dimensi umum meliputi: ■ Kepemimpinan ■ Manajemen SDM ■ Manajemen kinerja ■ Tata kelola dan pengambilan keputusan ■ Inovasi dan budaya kerja ■ Pengelolaan risiko dan pengendalian internal

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin matang dan efektif organisasi menjalankan fungsinya
Sumber Data	Laporan Evaluasi Kelembagaan
Frekuensi	Tahunan

5. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Nama Indikator	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**
Definisi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati.
Rumus Perhitungan	$$\mathbf{IKUB} = \frac{(\text{Skor Toleransi} + \text{Skor Kesetaraan} + \text{Skor Kerja Sama})}{3}$$ **Keterangan:** ● **Toleransi**: Sikap saling menghargai antarumat beragama. ● **Kesetaraan**: Perlakuan setara tanpa diskriminasi berdasarkan agama. ● **Kerja Sama**: Tingkat interaksi dan kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, budaya, atau kemasyarakatan. Skor setiap dimensi diperoleh melalui survei terhadap masyarakat, biasanya menggunakan skala Likert 1–7.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin harmonis dan rukun masyarakat hidup berdampingan
Sumber Data	Kementerian Agama RI, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Laporan kejadian konflik sosial berbasis agama, Evaluasi kegiatan lintas agama di daerah
Frekuensi	Tahunan

6. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan

Nama Indikator	**Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan**
Definisi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan adalah ukuran sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan dijalankan sesuai rencana, tepat sasaran, menghasilkan output dan outcome yang relevan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta layanan publik.
Rumus Perhitungan	$$\text{Efektivitas}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Ekonomi-Pembangunan yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100$$ **Keterangan :**

	• Program/Kegiatan yang Efektif = Program/kegiatan yang mencapai target output & outcome, tepat waktu, tepat anggaran, dan berdampak positif pada sektor ekonomi/pembangunan. • Program/Kegiatan yang Direncanakan = Total program/kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan dalam RKPD atau Renstra OPD.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai efektivitas, menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah dalam pengelolaan sektor ekonomi dan pembangunan
Sumber Data	RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
Frekuensi	Tahunan

7. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan pemerintah daerah

Nama Indikator	Luas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan Pemerintah Daerah
Definisi	Luas wilayah yang secara resmi diusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan skala kecil dengan peralatan sederhana.
Rumus Perhitungan	*Luas WPR yang Diusulkan* = ∑ *Luas masing-masing lokasi WPR yang diajukan* **Keterangan:** • Satuan luas dinyatakan dalam hektare (Ha). • Hanya mencakup wilayah yang telah diusulkan secara resmi melalui dokumen pengusulan ke Kementerian ESDM. • Tidak termasuk WPR yang sudah ditetapkan.
Interpretasi	Semakin besar luas WPR yang diusulkan menunjukkan inisiatif daerah dalam mengakomodasi aktivitas pertambangan rakyat secara legal, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.
Sumber Data	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dokumen Usulan WPR ke Kementerian ESDM, Peta dan data spasial RTRW atau RPED (Rencana Pengelolaan Energi Daerah)
Frekuensi	Tahunan/ Tidak tetap (ad hoc), tergantung pada kebijakan dan kesiapan pengusulan dari daerah

8. Return on Asset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD
Definisi	Return on Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan laba (keuntungan) dari total aset

	yang dimilikinya. ROA menunjukkan seberapa efisien manajemen BUMD dalam menggunakan seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.
Rumus Perhitungan	$$\text{ROA} = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Laba Bersih: Keuntungan bersih setelah pajak, diperoleh dari laporan laba rugi. ● Total Aset: Jumlah seluruh aset yang dimiliki BUMD, diperoleh dari neraca keuangan. ● Hasil dalam bentuk persen (%).
Interpretasi	ROA tinggi menunjukkan BUMD efisien dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.
Sumber Data	Laporan Keuangan dan Tahunan BUMD, Dinas yang membina BUMD
Frekuensi	Tahunan

4.02. SEKRETARIAT DPRD

1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Nama Indikator	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N
Definisi	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran N adalah ukuran ketepatan waktu pemerintah daerah dalam menetapkan APBD melalui persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Ketepatan Penetapan} = \begin{cases} 1 & \text{jika Perda APBD ditetapkan paling lambat 30 November Tahun N-1} \\ 0 & \text{jika Perda APBD ditetapkan setelah 30 November Tahun N-1} \end{cases}$$ **Keterangan:** ● Nilai 1: Tepat waktu ● Nilai 0: Tidak tepat waktu ● Mengacu pada ketentuan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Interpretasi	Ketepatan waktu penetapan APBD menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan perencanaan dan penganggaran, serta efisiensi koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Sumber Data	Dokumen Perda APBD, · Sekretariat Daerah / BPKAD, Laporan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Inspektorat atau BPKP.
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Nama Indikator	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N
Definisi	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N adalah perbandingan antara jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan jumlah keseluruhan Ranperda yang direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun N.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penetapan Ranperda} = \left(\frac{\text{Jumlah Ranperda yang Ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah Ranperda dalam Propemperda}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Ranperda yang ditetapkan adalah Ranperda yang telah disahkan DPRD dan diundangkan menjadi Perda. ● Propemperda adalah daftar prioritas Ranperda yang direncanakan untuk dibahas dan ditetapkan dalam satu tahun anggaran. ● Satuan hasil: persen (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan efektivitas dan efisiensi legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan agenda legislasi daerah.
Sumber Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dokumen Propemperda (DPRD), Berita Acara Rapat Paripurna Penetapan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Indikator	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui pengawasan internal (oleh Inspektorat Daerah) maupun eksternal, yang dilakukan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Pengawasan} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan:** ● Kegiatan pengawasan mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan lain terhadap perangkat daerah, desa, atau program tertentu.

	● Direncanakan berdasarkan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atau sejenis. ● Satuan hasil: persen (%)
Interpretasi	Nilai mendekati 100% menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara efektif sesuai rencana.
Sumber Data	Inspektorat Daerah, Laporan Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), Aplikasi SPIP, APIP Dashboard, atau aplikasi pengawasan lainnya, Laporan evaluasi dari BPKP atau Kemendagri.
Frekuensi	Tahunan

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01. PERENCANAAN

1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}} \right) \times 100$$ Keterangan : ● Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD. ● Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD)
Frekuensi	Tahunan (saat penyusunan dan penetapan RKPD)

2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

Nama Indikator	Persentase keselarasan RPJMD dengan renstra PD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Komponen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Komponen yang Dinilai}}\right) \times 100$ Keterangan : • Komponen Renstra PD yang Selaras: Komponen dalam dokumen Renstra PD (tujuan, sasaran, indikator, dan program) yang sesuai atau mendukung RPJMD. • Total Komponen yang Dinilai: Total keseluruhan komponen strategis dalam seluruh Renstra PD yang relevan untuk dievaluasi keselarasan terhadap RPJMD.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keselarasan perencanaan strategis perangkat daerah terhadap RPJMD
Sumber Data	Dokumen RPJMD
Frekuensi	Setiap awal periode RPJMD dan saat revisi Renstra PD

3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dan pembangunan manusia (seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang tersebut.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah
Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	Tahunan (pada masa penyusunan dan finalisasi RKPD)

4. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Nama Indikator	**Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras atau konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD) yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan, seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan penataan ruang.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Keselarasan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Program/Kegiatan Selaras: Kegiatan/program di RKPD yang sejalan atau sama dengan kegiatan/program di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan. • Total Program/Kegiatan Renja PD: Jumlah seluruh kegiatan atau program yang diusulkan oleh perangkat daerah teknis dalam Renja.
Interpretasi	Nilai lebih tinggi menandakan keselarasan dan konsistensi perencanaan yang baik
Sumber Data	Dokumen RKPD
Frekuensi	Tahunan

5.02. KEUANGAN

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

Nama Indikator	**Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD**
Definisi	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja pegawai (tidak termasuk tunjangan guru) yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total belanja pegawai secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai}} \right) \times 100$$ Keterangan :

	• Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD: Total belanja pegawai yang tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari sumber pendanaan TKD (misalnya DAU, DAK non-fisik. • Total Belanja Pegawai: Seluruh belanja pegawai daerah, termasuk yang berasal dari PAD, DBH, maupun TKD.
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk belanja pegawai non-guru
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan (setiap akhir tahun anggaran)

2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Nama Indikator	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik
Definisi	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan publik, dibandingkan dengan total belanja daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Alokasi Infrastruktur} = \left(\frac{\text{Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik. • Total Belanja Daerah: Seluruh belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan publik
Sumber Data	APBD (Murni dan Perubahan)
Frekuensi	Tahunan (akhir tahun anggaran)

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Nama Indikator	Persentase realisasi anggaran belaja urusan wajib pelayanan dasar
Definisi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah indikator yang menunjukkan tingkat serapan (realisasi) anggaran untuk program/kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, dibandingkan

	dengan total anggaran yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam satu tahun anggaran.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Realisasi } (\%) = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}{\text{Total Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Realisasi Anggaran: Jumlah anggaran yang benar-benar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar sampai periode pelaporan (biasanya akhir tahun anggaran). • Total Anggaran: Total alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBD untuk urusan wajib pelayanan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran pada layanan dasar masyarakat
Sumber Data	APBD dan RKA SKPD
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

4. Persentase Penurunan SILPA

Nama Indikator	Persentase penurunan SILPA
Definisi	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah indikator yang menggambarkan penurunan sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran, dibandingkan dengan SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA yang semakin kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penurunan SILPA} = \left(\frac{\text{SILPA Tahun Sebelumnya} - \text{SILPA Tahun Berjalan}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100$$ Keterangan : • SILPA Tahun Sebelumnya: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya. • SILPA Tahun Berjalan: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran berjalan. • Jika hasil negatif, berarti terjadi peningkatan SILPA.
Interpretasi	Nilai positif: SILPA menurun (positif); Nilai negatif: SILPA meningkat
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Frekuensi	Tahunan (setelah audit BPK atau realisasi APBD akhir tahun)

5. Persentase laporan keuangan tepat waktu

Nama Indikator	Persentase laporan keuangan tepat waktu
Definisi	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Tepat Waktu} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Perangkat Daerah}}\right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu: OPD yang mengirim laporan sebelum atau pada batas waktu. • Total Perangkat Daerah: Seluruh OPD yang wajib menyampaikan laporan keuangan.
Interpretasi	Semakin tinggi, semakin baik tata kelola pelaporan keuangan
Sumber Data	Laporan Pengumpulan Data Laporan Keuangan
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan (paling utama: tahunan)

6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	Persentase penambahan nilai asset tetap
Definisi	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai aset tetap (seperti tanah, bangunan, jalan, kendaraan, peralatan, dan mesin) milik pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai aset tetap pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pengadaan, pembangunan, dan peningkatan sarana-prasarana publik.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap} = \left(\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}\right) \times 100$$ Keterangan : • Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya: Total nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca akhir tahun lalu. • Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan: Total nilai aset tetap pada akhir tahun anggaran berjalan, setelah proses penambahan, penghapusan, dan revaluasi jika ada.
Interpretasi	Nilai positif: terjadi penambahan aset; Nilai negatif: terjadi penurunan aset
Sumber Data	Neraca Pemerintah Daerah (LKPD)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan laporan keuangan audited atau unaudited)

7. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
	dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}\right) \times 100$$ Keterangan : • PAD: Total Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran. • Total Pendapatan Daerah: Jumlah keseluruhan penerimaan daerah, termasuk PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin mandiri keuangan daerah tersebut
Sumber Data	Laporan Realisasi APBD
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

8. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan

Nama Indikator	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
Definisi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi}}{\text{Jumlah OPD Pengelola Pendapatan}}\right) \times 100$$ Keterangan : • **Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi**: OPD yang telah menerima kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan, baik melalui sosialisasi, asistensi teknis, audit internal, monitoring atau evaluasi. • **Jumlah OPD Pengelola Pendapatan**: OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain PAD.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, menunjukkan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal
Sumber Data	Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

9. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

Nama Indikator	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
Definisi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan,

Nama Indikator	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
	penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penerapan SI Keuangan Digital (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Menerapkan: Unit kerja/OPD yang telah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam seluruh atau sebagian besar proses pengelolaan keuangan. • Jumlah Seluruh OPD: Total seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengadopsi sistem tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	BPKAD / Bapenda
Frekuensi	Tahunan

5.03. KEPEGAWAIAN

1. Indeks Profesionalitas ASN

Nama Indikator	Indeks profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum(\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi

Nama Indikator	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi
Definisi	Persentase Perencanaan Kebutuhan ASN yang Sesuai dengan Formasi adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana rencana kebutuhan ASN (baik CPNS maupun PPPK) yang diajukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dari segi jumlah, jabatan, maupun kualifikasi.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kesesuaian Perencanaan ASN } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Rencana Kebutuhan yang Disetujui Sesuai Formasi}}{\text{Jumlah Total Rencana Kebutuhan yang Diajukan}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Rencana Kebutuhan yang Disetujui Sesuai Formasi: Rencana kebutuhan ASN yang sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi, serta jumlah yang disetujui oleh Kementerian PANRB dan BKN. • Jumlah Total Rencana Kebutuhan yang Diajukan: Semua usulan kebutuhan ASN dari pemerintah daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tepat perencanaan ASN oleh instansi
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/BKPSDM
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan

Nama Indikator	**Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**
Definisi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adalah ukuran perbandingan antara jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan dalam satu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi Diklat } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Diklat yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Diklat yang Direncanakan}} \right) \times 100$ **Keterangan:** • Jumlah Diklat yang Dilaksanakan adalah total kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. • Jumlah Diklat yang Direncanakan adalah total kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan (misalnya RKPD, Renja, DPA).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase semakin tinggi tingkat capaian pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan
Sumber Data	Dokumen perencanaan kegiatan (Renja, DPA, RKPD), BKPSDM
Frekuensi	Triwulanan / Semesteran / Tahunan (disesuaikan dengan siklus pelaporan dan monitoring evaluasi)

4. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi

Nama Indikator	**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**
Definisi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (seperti diklat, bimtek, workshop, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan fungsional) dalam periode tertentu dibandingkan dengan total ASN yang ada.

Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Total Jumlah ASN}}\right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan: ASN yang terdaftar dan telah mengikuti pengembangan kompetensi selama periode tertentu, baik secara daring maupun luring. • Total Jumlah ASN: Seluruh ASN aktif dalam lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik pengelolaan pengembangan kompetensi ASN
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis

Nama Indikator	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
Definisi	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis adalah ukuran proporsi ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas teknis, seperti pelatihan, workshop, seminar, atau bimbingan teknis, dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan total jumlah ASN.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase ASN Pengembangan Kompetensi Teknis}\,(\%) = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis}}{\text{Total Jumlah ASN}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis** adalah ASN yang telah mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis sesuai tugas jabatannya. • **Total Jumlah ASN** adalah seluruh ASN aktif dalam instansi atau wilayah tertentu pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik upaya peningkatan kompetensi ASN.
Sumber Data	BKPSDMD, Laporan kegiatan pengembangan kompetensi (e-learning, pelatihan teknis, dsb.)
Frekuensi	Tahunan

5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional

Nama Indikator	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerail, dam fungsional
Definisi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (diklat, bimbingan teknis, seminar, workshop, pelatihan formal/informal, dan uji kompetensi) dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total jumlah ASN.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \right) \times 100$ **Keterangan** : • Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi: ASN yang mengikuti pelatihan, diklat, workshop, sertifikasi, coaching/mentoring formal dalam periode tertentu. • Jumlah Seluruh ASN: Total ASN yang aktif bekerja pada instansi dalam periode yang sama.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan komitmen pengembangan kompetensi ASN
Sumber Data	(BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan (sesuai dengan laporan pelatihan tahun berjalan)

5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerahyang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

Nama Indikator	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan
Definisi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah indikator yang mengukur sejauh mana rekomendasi hasil kajian, analisis kebijakan, dan evaluasi pembangunan digunakan secara nyata sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan: Rekomendasi yang dibuktikan telah menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan.

	• Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan: Seluruh rekomendasi kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh unit perencana atau litbang daerah (misalnya Bappeda, Balitbangda). •
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan pemanfaatan hasil kajian dalam pembangunan semakin optimal
Sumber Data	Dokumen kajian atau analisis kebijakan pembangunan (Bappeda, Balitbangda)
Frekuensi	Tahunan (mengikuti siklus perencanaan dan evaluasi)

2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan-Daerah**
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana hasil kajian ilmiah atau analisis berbasis data yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memetakan potensi unggulan daerah digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Potensi Unggulan yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan}}{\text{Jumlah Total Kajian Potensi Unggulan}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah Kajian Potensi Unggulan yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan: Kajian yang dijadikan dasar atau referensi eksplisit dalam dokumen perencanaan, peraturan, atau pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. • Jumlah Total Kajian Potensi Unggulan: Seluruh kajian atau analisis berbasis bukti yang dilakukan oleh perangkat daerah, perguruan tinggi, atau lembaga riset yang berkaitan dengan potensi unggulan daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menandakan tingginya efektivitas pemanfaatan kajian dalam kebijakan
Sumber Data	Dokumen kajian potensi unggulan (Balitbangda, Bappeda)
Frekuensi	Tahunan (mengikuti siklus perencanaan dan evaluasi kebijakan)

3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kajian atau penelitian berbasis data dan bukti ilmiah yang telah digunakan (dimanfaatkan) dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah.

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kajian yang Termanfaatkan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan dalam Kebijakan}}{\text{Jumlah Total Kajian Potensi Unggulan}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** ● **Kajian yang Dimanfaatkan**: Kajian yang telah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan daerah (misalnya tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, atau Perda). ● **Total Kajian Potensi Unggulan**: Semua dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, maupun lembaga riset.
Interpretasi	Persentase tinggi menunjukkan tingginya integrasi evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) dalam perencanaan.
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah
Definisi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) di Daerah adalah indikator yang menggambarkan proporsi kegiatan pembinaan dan dukungan teknis yang diberikan kepada perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, ataupun komunitas inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas litbangjirap di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi Litbangjirap yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi}} \right) \times 100$$ Keterangan : ● Pembilang: Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi Litbangjirap yang benar-benar dilaksanakan dalam periode pelaporan. ● Penyebut: Total kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan dalam dokumen perencanaan tahunan atau roadmap pembinaan litbangjirap
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan makin aktifnya fasilitasi kegiatan Litbangjirap
Sumber Data	Laporan kinerja OPD (Bappeda/Balitbangda)
Frekuensi	Tahunan (sesuai laporan tahunan OPD dan hasil evaluasi kegiatan)

5. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

Nama Indikator	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Definisi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah indikator yang mengukur sejauh mana hasil inovasi daerah—baik berupa produk, model, metode, atau sistem— yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), digunakan atau diterapkan oleh pihak terkait seperti OPD, masyarakat, pelaku usaha, atau instansi lain.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Total Produk Inovasi yang Dihasilkan}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Pembilang: Produk inovasi daerah yang telah diterapkan secara nyata oleh pengguna (misalnya: OPD, masyarakat, dunia usaha, akademisi). • Penyebut: Seluruh produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, lembaga litbang, atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam periode waktu tertentu. • Dimanfaatkan dapat berupa penggunaan dalam pelayanan publik, adopsi kebijakan, pemanfaatan komersial, maupun penerapan oleh Masyarakat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menandakan keberhasilan inovasi menjawab kebutuhan pengguna
Sumber Data	Laporan litbangda/Bappeda
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan laporan tahunan inovasi/litbang daerah)

6. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah adalah ukuran proporsional yang menggambarkan jumlah kajian atau studi yang disusun berdasarkan data, analisis ilmiah, dan evidensi empiris untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah dibandingkan dengan total kajian yang disusun dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kajian Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti}}{\text{Jumlah Total Kajian Pengembangan Potensi Unggulan}} \right) \times 100$$ Keterangan : • Jumlah Kajian Berbasis Bukti: Kajian yang disusun dengan pendekatan ilmiah, menggunakan data primer atau sekunder yang terverifikasi, dan menghasilkan rekomendasi berbasis analisis logis, statistik, atau ilmiah. • Jumlah Total Kajian Pengembangan Potensi Unggulan: Seluruh dokumen kajian yang disusun oleh perangkat daerah dalam rangka menggali, menganalisis, atau mengembangkan potensi unggulan daerah dalam periode pelaporan. • Berbasis Bukti dapat mencakup data survei, data spasial, data sektoral, atau hasil riset kolaboratif.

Nama Indikator	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin kuat dasar pengambilan keputusan pembangunan berbasis evidensi
Sumber Data	Laporan tahunan Bappeda atau Litbangda
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan siklus perencanaan pembangunan dan pelaporan kajian)

7. Persentase kajian berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah

Nama Indikator	Persentase kajian berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah
Definisi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah adalah ukuran proporsional yang menunjukkan seberapa besar jumlah kajian yang disusun dengan pendekatan ilmiah, analitis, dan berbasis data dalam rangka merumuskan solusi terhadap permasalahan daerah, dibandingkan dengan total kajian yang dilakukan untuk tujuan tersebut pada periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kajian Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kajian Berbasis Bukti untuk Permasalahan Daerah}}{\text{Jumlah Total Kajian Permasalahan Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Kajian Berbasis Bukti untuk Permasalahan Daerah Kajian yang menggunakan pendekatan ilmiah, metodologi yang sistematis, dan berbasis data (primer/sekunder), yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan konkret di daerah (misalnya stunting, kemiskinan, infrastruktur, ketimpangan wilayah, dll). • Jumlah Total Kajian Permasalahan Daerah Seluruh kajian yang disusun oleh instansi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah pembangunan daerah, baik berbasis data maupun tidak.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif proses pengambilan keputusan berbasis evidensi
Sumber Data	Laporan kegiatan penelitian/pengkajian
Frekuensi	Tahunan (disesuaikan dengan siklus perencanaan dan pelaporan daerah)

8. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah
Definisi	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah adalah ukuran persentase dari kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis (bimtek), dan supervisi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam rangka penguatan kapasitas riset dan inovasi, terhadap jumlah rencana kegiatan serupa dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Riset dan Inovasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100$

	Keterangan : • Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan/Bimtek/Supervisi yang Dilaksanakan Merupakan total kegiatan nyata yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait riset dan inovasi, termasuk dukungan teknis, pelatihan, pembinaan kapasitas SDM riset, dan monitoring kegiatan inovasi di daerah. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja OPD, RKPD, atau dokumen program Litbang/Inovasi Daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin optimal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi
Sumber Data	Laporan pelaksanaan kegiatan (SKPD terkait)
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan siklus anggaran dan perencanaan)

9. Pengeluaran Iptek dan Inovasi

Nama Indikator	Pengeluaran Iptek dan Inovasi
Definisi	Pengeluaran Iptek dan Inovasi adalah total belanja atau investasi yang dialokasikan untuk kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), termasuk penelitian, pengembangan, penerapan teknologi, dan inovasi di berbagai sektor, baik oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan/penelitian, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	*Pengeluaran Iptek dan Inovasi = Total Belanja Kegiatan Iptek dan Inovasi dalam Satu Tahun* **Opsional – Jika dinyatakan dalam persentase terhadap PDRB:** $$\text{Persentase Pengeluaran Iptek dan Inovasi} = \left(\frac{\text{Total Pengeluaran Iptek dan Inovasi}}{\text{PDRB}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • **Pengeluaran Iptek dan Inovasi** meliputi: belanja riset, pengembangan produk, pelatihan inovasi, penyediaan alat teknologi, program inkubasi, dll. • **PDRB** adalah Produk Domestik Regional Bruto sebagai acuan total ekonomi daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai pengeluaran Iptek dan inovasi, menunjukkan semakin besar perhatian dan investasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, daya saing teknologi, dan penciptaan nilai tambah ekonomi berbasis pengetahuan.
Sumber Data	Dokumen APBD/APBN (DPA SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas Litbang, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dll), Data PDRB (jika menggunakan persentase), Laporan kinerja atau keuangan lembaga riset/perguruan tinggi
Frekuensi	Tahunan

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01. INSPEKTORAT DAERAH

1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Nama Indikator	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Definisi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah upaya yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan (misalnya, pemerintah daerah) dalam menanggapi dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya (N-1). Indikator ini mengukur persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan untuk tahun tersebut.
Rumus Perhitungan	$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Sudah Ditindaklanjuti Sesuai}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Tahun N-1}} \times 100\%$$ Keterangan : • Pembilang (atas): Jumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti dengan status "Sesuai". • Penyebut (bawah): Seluruh jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1. • Hasil akhir dinyatakan dalam persentase (%) dan digunakan untuk menilai tingkat penyelesaian.
Interpretasi	Makin tinggi persentase, makin tinggi akuntabilitas dan penyelesaian temuan BPK.
Sumber Data	• Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK • Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL BPK) • Laporan Inspektorat Daerah • Bukti tindak lanjut dari masing-masing OPD
Frekuensi	Tahunan (Idealnya setiap Triwulan II atau III untuk laporan tahun sebelumnya)

2. Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistes Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah, yang mencerminkan kemampuan entitas dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Rumus Perhitungan	$\frac{\sum \text{Skor Komponen SPIP}}{\text{5 Komponen}} = \text{Nilai Rata-Rata Maturitas SPIP}$ Keterangan : • Terdapat 5 Komponen SPIP: ➢ Lingkungan Pengendalian ➢ Penilaian Risiko ➢ Kegiatan Pengendalian ➢ Informasi dan Komunikasi ➢ Pemantauan • Setiap komponen dinilai dalam skala 1 sampai 5. • Hasil akhir adalah rata-rata dari skor kelima komponen. • Level akhir SPIP ditentukan dari rata-rata nilai kelima komponen tersebut.
Interpretasi	Makin tinggi level, makin matang dan terintegrasi penerapan pengendalian intern.
Sumber Data	• Laporan Penilaian Maturitas SPIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat • Hasil Evaluasi BPKP (melalui Sistem Aplikasi Penilaian Mandiri SPIP / PM SPIP) • Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP dari OPD
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan pada triwulan III atau IV oleh APIP atau dengan asistensi BPKP)

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah tingkat kemampuan APIP (seperti Inspektorat Daerah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah secara efektif dan profesional. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Kerangka Kerja Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (IA-CM) yang dikembangkan oleh BPKP dan ditetapkan dalam 6 level kapabilitas.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Domain yang Terpenuhi di Suatu Level}}{\text{Total Domain Wajib di Level Tersebut}} = \textit{Level Kapabilitas APIP}$ Keterangan : • Penilaian menggunakan pendekatan domain dan atribut kapabilitas. • Setiap level memiliki sejumlah domain dan indikator yang wajib dipenuhi. • Level Kapabilitas ditentukan dari level tertinggi di mana semua domain wajib terpenuhi.
Interpretasi	Semakin tinggi level kapabilitas, semakin baik fungsi pengawasan intern.
Sumber Data	• Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP

	• Laporan Evaluasi Mandiri APIP (Self-Assessment) • Dokumen pendukung dari Inspektorat Daerah • Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP (APKA) oleh BPKP
Frekuensi	Tahunan (Dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan validasi oleh BPKP)

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

7.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan}}{\text{Total Target Peserta}} \times 100\%$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan. • Penyebut: Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal: seluruh siswa SMA di kabupaten, seluruh ASN, atau kelompok masyarakat tertentu). • Hasil akhir: Persentase cakupan terhadap target.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat.
Sumber Data	• Laporan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila (Badan Kesbangpol, BPIP, Dinas Pendidikan, dll.) • Laporan Kehadiran atau Absensi Peserta • Dokumentasi Kegiatan (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan) • Sistem Informasi Monitoring Ideologi Pancasila (SIM-IP)
Frekuensi	• Tahunan (umumnya disusun per kegiatan/tahun anggaran) • Bisa juga per semester atau per kegiatan besar

2. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Definisi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kader yang Mengikuti Pendidikan Politik}}{\text{Jumlah Target Kader Partai Politik}} \times 100\%$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran. • Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut. • Hasil Akhir: Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader
Sumber Data	• Laporan Kegiatan Pendidikan Politik dari: ➢ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ➢ Partai Politik (DPC/DPD/DPP) ➢ Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri • Daftar Hadir Peserta • Dokumentasi Kegiatan • Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Parpol (jika bersumber dari bantuan APBD/APBN)
Frekuensi	Tahunan (biasanya per tahun anggaran atau per program kerja tahunan partai politik dan Kesbangpol)

3. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Definisi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Ormas Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Ormas Terdaftar}} \times 100\%$ Keterangan :

Nama Indikator	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
	• Ormas Aktif adalah organisasi yang: ➢ Memiliki kepengurusan yang masih berjalan ➢ Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun ➢ Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). • Hasil dalam bentuk persentase (%)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Sumber Data	• Database Ormas dari Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota • Laporan Tahunan Ormas • Hasil Monitoring & Evaluasi Kesbangpol • Dokumentasi Kegiatan Ormas (laporan kegiatan, undangan, berita acara, dll.)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan oleh Kesbangpol setiap akhir tahun anggaran)

4. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerahyang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Definisi	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan.
Rumus Perhitungan	$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan/Program yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan/Program yang Direncanakan}} \times 100\%$$ Keterangan : • Kebijakan/Program yang Dilaksanakan: program/kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara). • Kebijakan/Program yang Direncanakan: seluruh program/kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan (RKPD). • Output: persentase keterlaksanaan kebijakan terhadap rencana.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat
Sumber Data	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Nama Indikator	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Frekuensi	Tahunan (Biasanya diukur saat laporan kinerja akhir tahun)

5. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan

Nama Indikator	Persentase konflik sosial yang diselesaikan
Definisi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\%$$ Keterangan : • Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. • Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut. • Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	Laporan Kepolisian atau Forkopimda
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun bidang kewaspadaan dini atau ketahanan sosial)